Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa
1
Revolusi Mental:
Makna dan Realisasi
HIMPSI
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

Revolusi Mental:
Makna & Realisasi

Revolusi Mental:
Makna dan Realisasi

Tim Editor:
Hana Panggabean
A. Supratiknya
J. Seno Aditya Utama

PENGANTAR TIM EDITOR

Jargon "revolusi mental" yang dilontarkan Joko Widodo pada masa kampanye Pilpres 2014 telah menimbulkan berbagai respons di kalangan masyarakat kita. Bagi yang bersimpati dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik dari calon Presiden baru, jargon itu ibarat mantra yang menumbuhkan harapan. Bagi yang antipati karena berbagai alasan dan khususnya karena tidak ingin kehilangan zona nyaman yang selama ini dinikmati, jargon itu bisa dikonstruksikan menimbulkan gambaran menakutkan tentang sebuah revolusi sosial yang lazim disertai pertumpahan darah. Sebagai warga negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perbaikan kehidupan bersama kita sebagai bangsa, sepantasnyalah kita komunitas Psikologi di Indonesia mencoba memahami makna dan peran dari jargon yang kita harapkan menjadi semacam agenda kerja dari Pemerintahan baru yang dinakhodai oleh Joko Widodo sesudah akhirnya terpilih sebagai Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Dengan begitu kita berharap bahwa komunitas Psikologi di Tanah Air akan mampu berperan serta dan memberikan kontribusi yang efektif dan nyata dalam kerja bersama yang mulia itu.

Revolusi Mental ala Joko Widodo (& Jusuf Kalla)

Dalam teks resmi berisi pemaparan visi-misi dan program kerja kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2014 yang diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian" (Mei, 2014), sebenarnya tidak sekalipun muncul istilah "revolusi mental" (Joko Widodo & Jusuf Kalla, 2014). Namun gagasan ini secara tersirat kiranya memang menjadi semangat dasar yang meresapi seluruh teks, yaitu perlunya melakukan perubahan demi mewujudkan apa yang oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla disebut "kelahiran Indonesia Hebat". Jargon ini baru benar-benar muncul saat dipakai sebagai judul artikel tulisan Joko Widodo yang dimuat di halaman opini sebuah harian nasional pada Sabtu, 10 Mei 2014 (Joko Widodo, 2014). Tulisan ini kiranya dimaksudkan sebagai kampanye dalam kedudukan si penulis sebagai salah satu kontestan calon Presiden dalam Pilpres 2014.

Sebuah gagasan tentang pembaharuan atau perubahan sosial yang dilontarkan oleh seseorang pasti dilandasi oleh persepsi yang bersangkutan tentang adanya sesuatu yang kurang pada situasi yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Kendati dalam rumusan yang sedikit berbeda, namun substansi yang dikemukakan oleh Joko Widodo (dan Jusuf Kalla) tentang situasi masyarakat Indonesia pasca Reformasi 1998 dalam kedua teks tersebut pada dasarnya sama. Menurut mereka, selama 16 tahun pasca Reformasi 1998 bangsa Indonesia terbelenggu oleh "transisi berkepanjangan" sebab kelahiran Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat yang dijanjikan oleh Reformasi 1998 tidak kunjung terwujud (Joko Widodo & Jusuf Kalla, 2014). Lebih tajam lagi, menurut Joko Widodo, pasca Reformasi 1998 bangsa Indonesia menghadapi suatu paradoks pelik: setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, bukannya bertambah bahagia masyarakat Indonesia justru bertambah resah. Kendati ekonomi semakin berkembang dan secara politis masyarakat banyak menikmati kebebasan dan hak-haknya, namun keresahan dan kemarahan justru merebak (Joko Widodo, 2014). Mengapa hal itu terjadi?

Menurut analisis Joko Widodo akar masalahnya adalah karena Reformasi 1998 baru menghasilkan perombakan institusional atau kelembagaan dan belum menghasilkan perubahan paradigma, *mindset*, atau budaya politik. Reformasi 1998 memang menghasilkan amandemen atas UUD 1945, pembentukan sejumlah komisi independen, penyempurnaan sejumlah undang-undang nasional dan daerah, serta pelaksanaan pemilu. Namun Reformasi 1998 belum menghasilkan perubahan pada manusianya. Korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, kerakusan, sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis masih subur dan berkembang pasca Reformasi 1998 (Joko Widodo, 2014).

Untuk mengatasinya, Joko Widodo menawarkan sebuah paradigma baru yang dia sebut *revolusi mental.* Menurutnya, revolusi mental adalah "tindakan korektif" bukan dengan menghentikan proses reformasi melainkan dengan menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan (Joko Widodo, 2014). Dalam sebuah kesempatan diskusi di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 lebih lanjut Joko Widodo menjelaskan bahwa Revolusi mental mengandung arti bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. Menurutnya, karakter asli, orisinal, dan yang menjadi identitas bangsa Indonesia adalah santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Karakter asli tersebut semestinya bisa menjadi modal yang dapat membuat rakyat Indonesia sejahtera. Kenyataannya semua itu sudah berubah dan hasil perubahannya justru menjadi akar bagi munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, dan ketidakdisiplinan ("Jokowi

dan arti revolusi mental", 2014). Lantas, bagaimana cara mengembalikan karakter asli dan dengan begitu sekaligus mengatasi aneka masalah sosial yang timbul akibat ditinggalkannya karakter asli tersebut?

Menurut Joko Widodo, satu-satunya jalan untuk revolusi sebagaimana yang dia maksudkan adalah lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu ("Jokowi dan arti revolusi mental", 2014). Dalam teks resmi kampanye berisi paparan visi-misi capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, jalan untuk revolusi itu diuraikan secara lebih rinci. Jalan atau instrumen untuk melaksanakan revolusi mental yang dimaksud adalah konsep Trisakti yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan tahun 1963, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sehubungan dengan itu, dirumuskan 12 agenda strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, 16 agenda strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dan berkebudayaan. Tiga puluh satu agenda strategis tersebut diperas ke dalam NAWA CITA atau sembilan agenda prioritas pemerintahan.

Rumusan yang mendekati ide revolusi mental terdapat dalam agenda prioritas kedelapan dalam NAWA CITA yang berbunyi "Kami akan melakukan *revolusi karakter bangsa*" antara lain melalui "kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia…mengevaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional…dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhinekaa-an Tunggal Ika."

Rumusan yang mendekati ide revolusi mental tentu saja juga terdapat dalam tiga agenda strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dan berkebudayaan. Agenda strategis kesatu berbunyi "Kami berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa". Kebijakan pendidikan berkarakter ini akan memberikan penekanan pada 10 prioritas utama, antara lain "menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*)" dan "tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional". Agenda strategis kedua berbunyi "Kami akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial". Kebijakan memperteguh kebhinekaan ini akan memberikan

penekanan pada 5 prioritas utama, antara lain "membangun kembali modal sosial bisa dengan metode rekonstruksi sosial, yakni: membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotong-royong…membangun kembali karakter bangsa, membersihkan diri sendiri dari berbagai prasangka sosial-kultural-politik, membangun kepercayaan di antara anak bangsa…" Agenda strategis ketiga berbunyi "Kami akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga". Kebijakan ini akan memberikan penekanan pada 10 prioritas utama, namun tidak satu pun mengacu pada ide revolusi mental.

Dalam pelaksanaannya, dari mana revolusi mental itu harus dimulai? Menurut Joko Widodo, revolusi mental itu harus dimulai "dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara…Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional" (Joko Widodo, 2014). Intinya, selain menjadi agenda kerja pemerintahan mereka, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengharapkan agar revolusi mental itu juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan segenap warga masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah agenda kerja dan sarana mobilisasi sosial oleh sebuah rezim pemerintahan, seperti apakah revolusi mental ala Joko Widodo dan Jusuf Kalla jika dibandingkan dengan strategi sejenis yang dilaksanakan oleh tokoh maupun rezim pemerintahan yang pernah tercatat dalam sejarah?

Revolusi Mental ala Presiden Soekarno

Gagasan tentang Revolusi Mental pernah dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Cuplikan pidato itu dimuat dalam majalah Taman Siswa "Pusara" yang terbit pada tahun 1957 itu juga.

Presiden Soekarno melihat bahwa pada era 1950-an itu bangsa Indonesia masih bergulat menjalani transisi dari *masa liberation*, yaitu masa perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah yang mencapai kulminasinya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ke *masa nation building,* yaitu masa perjuangan mewujudkan cita-cita politik NKRI dan cita-cita sosial "masyarakat yang adil dan makmur". Lebih lanjut Presiden Soekarno melihat bahwa di masa *liberation* idealisme, keikhlasan, dan kesadaran bersama akan *mission sacré* atau misi suci berbangsa-bernegara masih menyala-nyala. "Dalam masa *liberation*, semua orang adalah pedjoang, semua orang adalah pekorban, semua orang adalah baik". Sebaliknya di masa *nation building*, Presiden Soekarno melihat "timbulnya bermacam-macam kesentrisan", munculnya "watek-watek dari kebiasaan-kebiasaan jang tidak baik",

munculnya "godaan-godaan", "aberrasi-aberrasi" dan "kenjelewengan" yang menghambat pencapaian cita-cita politis dan cita-cita sosial proklamasi kemerdekaan. Untuk mengatasi berbagai bahaya dan godaan yang mengancam keselamatan Bangsa dan Negara, Presiden Soekarno melontarkan gagasan tentang pentingnya *Revolusi Mental.* Apa itu revolusi mental menurut Presiden Soekarno?

Menurut Presiden Soekarno, revolusi mental yang dimaksudkannya adalah "kebangkitan", yaitu "kebangkitan dan gerakan ke arah pemulihan djiwa…untuk menjadari kembali tjita-tjita nasional…untuk menjadari kembali tjita-tjita sosial…untuk mendjadi manusia baru", yaitu "manusia Pembina, manusia jang benar-benar sampai kepada tulang sungsumnja bersembojan 'satu buat semua, semua buat pelaksanaan satu tjita-tjita'" (h. 33). Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa revolusi mental adalah "Gerakan Hidup Baru", "Pembaharuan Djiwa", "membaharui mentalitet bangsa", "terutama pimpinannja dan terutama golongan atasnja", dan merupakan "satu usaha 'tous les jours'" yaitu usaha yang harus dilakukan tiap hari (h. 34). Gerakan Hidup Baru adalah gerakan "hidup sederhana" dalam arti "menjederhanakan penghidupan kita dengan penjederhanaan untuk produksi", "untuk meninggikan tingkat hidup kita di kemudian hari", dan berarti "perhatian harus lebih ditudjukan kepada produksi ekspor dan pemakaian barang bikinan Indonesia sendiri". "Kesederhanaan jang kita kehendaki ialah kesederhanaannja pradjurit perdjoangan jang djiwanja berkobar menjala-njala…djiwa idealis Indonesia…" (h. 35). Akhirnya, revolusi mental adalah ajakan untuk "mengadakan self-koreksi, menudju kepada Manusia Indonesia Baru, jang sanggup melandjutkan…perdjoangan untuk mentjapai tudjuan Proklamasi itu". "Maka hajo kita madju, hajo kita tinggalkan apa jang lama, memasuki apa jang baru"…"Hajo, mari melangkah, tinggalkanlah apa jang lama, masukilah apa jang baru! …lantjarkanlah Gerakan Hidup Baru!" (h. 36). Secara lebih spesifik dan sebagaimana dirumuskan oleh Dewan Nasional yang dibentuk oleh Presiden Soekarno, Gerakan hidup baru adalah "Perobahan tjara berfikir, tjara kerdja, tjara hidup, jang merintangi kemadjuan" serta "Peningkatan dan pembangunan tjara berfikir, tjara kerdja, dan tjara hidup jang baik", yang dilaksanakan melalui usaha nyata berupa: (1) hidup sederhana; (2) gerakan kebersihan/kesehatan; (3) gerakan pemberantasan buta huruf; (4) membangkitkan dan mengembangkan gotong-rojong; (5) melantjarkan Djawatan dan Perusahaan Negara; (6) gerakan pembangunan rochani; serta (7) membangkitkan kewaspadaan Nasional. Ringkas kata, Gerakan Hidup Baru ala Presiden Soekarno adalah ajakan kepada "segenap Rakjat untuk mentjoba mengadakan satu Revolusi mental pada diri sendiri, dengan mendjalankan Gerakan Hidup Baru". "Gerakan Hidup Baru adalah Gerakan Revolusi Mental…Gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia mendjadi manusia Baru, jang berhati putih, berkemauan badja, bersemangat Elang Radjawali, berdjiwa Api" (h. 41).

Sebagaimana tampak, ada paralelisme yang cukup signifikan antara gagasan revolusi mental ala Joko Widodo (& Jusuf Kalla) dan revolusi mental ala Presiden Soekarno. Sementara, gagasan tentang revolusi mental sebagai Gerakan Hidup Baru yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno sendiri sempat dituding sebagai jiplakan dari *New Life Movement* yang dilancarkan oleh rezim pemerintahan Tiongkok nasionalis di bawah Presiden Chang Kai-shek di era 1930-an. Seperti apakah *New Life Movement* di Tiongkok di bawah Chiang Kai-shek?

New Life Movement ala Chiang Kai-shek

Chiang Kai-shek atau Jiang Jieshi (1887-1975) sebagai pemimpin Partai Nasionalis (*Guomindang*) Tiongkok sekaligus pemimpin Republik Tiongkok di era 1930-an, dengan dukungan dan bantuan istrinya meluncurkan sebuah program mobilisasi massa yang diberi nama *New Life Movement* pada tanggal 19 Februari 1934 di markas besar militer yang terletak di ibukota salah satu provinsi di Tiongkok, Jiangxi. Pada masa itu pemerintahan Chiang Kai-shek benar-benar tengah terpuruk secara politis maupun ekonomis. Secara politis kekuasaannya atas sebagian besar wilayah Tiongkok hanyalah bersifat nominal, sebab secara *de facto* wilayah yang sangat luas itu dikuasai oleh para *warlords* lokal yang kendati secara teoretis mengaku bekerja sama dengan pemerintahan pusat di *Nanjing* namun dalam kenyataan mereka ini memegang kekuasaan secara absolut di daerah masing-masing dengan didukung oleh pasukan bersenjata yang setia. Secara politis-ekonomis pemerintahannya sendiri juga tersandera oleh pejabat-pejabat korup yang secara diam-diam bersekongkol dengan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi yang menjalankan bisnis gelap seperti perdagangan candu bahkan kegiatan penculikan dan pembunuhan lawan-lawan politik. Situasi itu masih diperumit oleh penolakan kaum terpelajar Tiongkok di kota-kota terhadap nilai-nilai tradisional bangsa Tiongkok serta ancaman serbuan militerisme Jepang di Manchuria dan rongrongan kaum Komunis di daerah-daerah pedesaan di Tiongkok. Di tengah karut-marut akut itulah Chiang Kai-shek meluncurkan program "revolusi mental" dengan "kembali pada nilai-nilai asli" Tiongkok yang secara ironis disebut *New Life Movement* atau Gerakan Hidup Baru (Kai-shek, 2000).

Program Gerakan Hidup Baru Chiang Kai-shek bertujuan meregenerasi (*fuxing*) rakyat Tiongkok dengan cara mempromosikan kembali pedoman hidup yang didasarkan pada nilai-nilai keutamaan lokal atau asli yang diajarkan oleh Konfusius, yaitu "*Li*" atau menjalankan tugas-kewajiban secara semestinya, "*Yi*" atau bertingkah laku jujur, "*Lian*" atau bersikap rendah hati serta mampu membedakan yang baik dari yang buruk, dan "*Chi*" atau memiliki rasa malu (Kai-shek, 1934; 2000; Ferlanti, 2010).

Keutamaan-keutamaan tersebut harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam "*shi*" atau cara mengonsumsi makanan, "*yi*" atau cara berpakaian, "*zhu*" atau cara mengatur rumah tinggal, dan "*xing*" atau cara bertingkah laku pada umumnya (Kai-shek, 1934). Terkait makanan, Chiang Kai-shek mengajak rakyat Tiongkok makan secara teratur pada jam-jam tertentu bukan sekadar mengikuti selera. Peralatan makan haruslah bersih dan makanan harus dicuci. Makanlah produk lokal dan manfaatkanlah keuntungan yang diperoleh bagi kesejahteraan komunitas. Janganlah mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan makanlah secukupnya. Jangan sampai menimbulkan suara berisik saat meneguk minuman atau mengunyah makanan, dan duduklah secara sopan saat makan. Jika menemukan tulang atau duri dalam makanan janganlah dibuang sembarangan. Saat makan bersama, janganlah menebarkan kuman dengan menggunakan alat makan secara tidak semestinya. Hindarilah makanan yang tidak dimasak atau dingin, dan hindari mengonsumsi candu maupun rokok. Carilah nafkah, dan jadikanlah sikap menggantungkan sedekah makan dari orang lain sebagai kebiasaan yang memalukan.

Terkait cara berpakaian, Chiang Kai-shek mengingatkan rakyat Tiongkok agar tidak perlu selalu mengikuti mode berpakaian terbaru dan tidak perlu malu mengenakan pakaian sederhana. Pilihlah gaya berpakaian yang sederhana, dan gunakan kain yang diproduksi di dalam negeri sendiri. Para ibu rumah tangga harus bisa menjahitkan sendiri pakaian untuk anggota keluarganya. Seringlah mencuci pakaian dan tambal atau perbaikilah jika sobek. Berpakaianlah secara pantas dan jangan membiarkan terlalu banyak bagian tubuh terbuka. Bukalah topi saat berada di dalam ruangan. Sering-seringlah menjemur bantal dan sprai di panas matahari, dan jangan membawa pakaian dalam jumlah berlebihan saat melakukan perjalanan. Dermakanlah pakaian yang sudah tidak terpakai kepada kaum miskin.

Terkait cara mengatur rumah, Chinag Kai-shek menekankan kepada rakyat Tiongkok bahwa rumah adalah tempat membangun keluarga dan mengembangkan karir. Saat pertemuan keluarga, jagalah kerukunan dan janganlah bicara dengan berteriak. Bangunlah pagi-pagi, lalu mencuci dan menyapu lantai setiap hari. Gunakanlah bahan-bahan yang bisa dibuat sendiri dalam membangun rumah. Jagalah agar dinding-dinding selalu bersih dan gunakanlah perabotan sederhana. Nikmatilah waktu bersama keluarga dan bekerja keraslah. Waspadalah terhadap bahaya kebakaran dan jagalah pintu rumah. Buanglah sampah dengan segera dan buatlah rumah bebas dari debu. Dapur dan kamar mandi harus dijaga kebersihannya secara ekstra. Tangkaplah tikus dengan perangkap dan basmilah lalat. Pipa-pipa dan saluran-saluran pembuangan tidak boleh tersumbat. Jagalah kerukunan dengan tetangga dan utamakan kepentingan bersama. Hendaknya saling membantu di masa-masa yang sulit. Lakukanlah vaksinasi untuk mencegah aneka penyakit. Naikkanlah bendera sebagai penghormatan pada hari-hari libur nasional.

Terkait cara bertingkah laku pada umumnya, Chiang Kai-shek mengimbau kepada seluruh rakyat Tiongkok agar bertingkah laku secara sopan dan masak. Jangan tergesa-gesa dan memaksakan diri saat naik dan turun dari bus atau perahu. Berikanlah tempat duduk kepada orang yang lebih tua atau wanita dan bantulah orang yang lemah atau sakit. Janganlah berjalan di jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas dan berjalanlah dengan sikap tubuh tegak. Pasanglah mata dan telinga. Kembalikanlah barang-barang yang ditemukan kepada pemiliknya dan berilah salam kepada setiap orang yang ditemui. Tunjukkanlah perasaan sedih saat pergi melayat dan janganlah bersuka cita atas penderitaan orang lain. Jauhkanlah muka kita dari orang lain saat bersin dan arahkanlah ke tanah saat meludah. Janganlah sekali-kali buang air kecil di muka umum dan selalu patuhilah aturan umum. Masuk dan keluarlah dari ruangan dengan perlahan dan tidak berisik. Janganlah memotong pembicaraan orang lain. Berdirilah saat menyanyikan lagu kebangsaan. Berlakulah jujur dan tepatilah janji. Bergaullah secara wajar serta jauhkanlah diri kita dari perjudian dan pelacuran.

Ada yang menyatakan bahwa *New Life Movement* ini pada mulanya pertama-tama adalah sebuah gerakan religius atau keagamaan dalam arti bahwa gerakan itu bertujuan memberikan sebuah sistem nilai dan etika komprehensif yang pada akhirnya diharapkan akan memiliki kekuatan mengubah dan menyelamatkan masyarakat. Namun dari tujuan awal penanaman moralitas individual dan perbaikan kondisi kehidupan warga, pelan-pelan gerakan itu menjelma menjadi gerakan perubahan sosial yang lebih luas. Pendidikan sekolah dimanfaatkan sebagai sarana dan jalan utama untuk melakukan transformasi sosial melalui *New Life Movement* antara lain dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip Gerakan Hidup Baru ke dalam kurikulum baku di sekolah-sekolah. Namun kita tahu, sebelum seluruh cita-cita itu tercapai Chiang Kai-shek dan semua pemimpin Partai Nasional Tiongkok dipaksa menyelamatkan diri meninggalkan Tiongkok daratan dan menyeberang ke Taiwan pada tahun 1949 oleh kaum Komunis di bawah kepemimpinan Mao Tse-tung yang kemudian mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (Ferlanti, 2010; Jabbusch, 2007).

Glasnost & Perestroika ala Mikhail Gorbachev (& Aleksander Yakovlev)

Langkah perubahan dan pembaharuan dalam rangka memperbaiki kondisi bangsa juga dilakukan oleh Mikhail Sergeyevich Gorbachev sebagai sekretaris jenderal *Partai Komunis Soviet* sekaligus kepala pemerintahan Uni Soviet di era 1980-an. Saat diangkat sebagai orang nomor satu di Uni Soviet, situasi negara itu sedang karut-marut. Ekonomi nasional sedang terpuruk, permintaan dan harga bahan bakar minyak yang menjadi

salah satu sumber penghasilan utama negara selama beberapa dasa warsa sedang jatuh, pertanian dan industri sedang stagnan, kelangkaan serius bahan kebutuhan pokok bahkan kelaparan sedang mengancam. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gorbachev meluncurkan sebuah rencana untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet yang diberi nama *Perestroika* (Powell, 2012).

Perestroika adalah program restrukturisasi ekonomi yang ditujukan untuk meluruskan kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh generasi-generasi pemimpin partai dan pemerintahan sebelumnya. Istilah itu sendiri sudah lama dikenal oleh masyarakat Rusia sejak pertama kali diperkenalkan oleh Kaisar Petrus Agung dan berkonotasi kemajuan dan perbaikan. Implementasi program *Perestroika* meliputi yang utama privatisasi tanah-tanah pertanian, efisiensi industri-industri, dan pengurangan impor. Usaha tersebut diawali dengan peningkatan kontrol terhadap kualitas produk pabrik-pabrik di seantero negeri, namun sayang tidak dibarengi dengan peningkatan upah secara sepadan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan buruh. Atas usul Aleksander Yakolev, orang kepercayaan Gorbachev di Sekretariat Partai Komunis Soviet, untuk mengatasi resistensi dari kalangan buruh maupun masyarakat luas Gorbachev sepakat untuk memberikan hak dan kebebasan perorangan secara terbatas berupa antara lain pemberian keleluasaan yang lebih besar kepada media massa untuk mengungkap borok pemerintahan di masa lalu khususnya di era Stalin, membuka kembali ruang kebebasan untuk berkreasi khususnya bagi para penulis buku dan sineas, membuka kembali bangunan-bangunan keagamaan dan tempat-tempat ibadah, serta pemberian keleluasaan bagi sekolah-sekolah untuk mengajarkan pengetahuan tentang sejarah bangsa Soviet termasuk kekejaman-kekejaman yang pernah dilakukan oleh rezim-rezim pemerintahan di masa lalu. Program pelengkap ini disebut *glasnost* yang secara harfiah berarti “hak bersuara” yang diwujudkan dalam bentuk keterbukaan di bidang perkara-perkara publik, pers, politik, pendidikan, bahkan kebebasan mengemukakan pendapat (Powell, 2012).

Menurut sejumlah analis, seperti istilah *perestroika* istilah *glasnost* sesungguhnya juga sudah dikenal lama oleh masyarakat Soviet khususnya melalui langkah liberalisasi yang dilakukan oleh monarki di Soviet sekitar pertengahan abad ke-19. Kebijakan itu dimaksudkan untuk memberikan transparansi politik yang lebih besar kepada rakyat di satu sisi namun pada saat yang bersamaan juga ditujukan untuk memperkuat absolutisme monarki di sisi lain, persis seperti yang sesungguhnya juga dimaksudkan oleh Gorbachev dan Yakolev. Intinya, melalui *glasnost* atau keterbukaan Gorbachev bermaksud membeli kepercayaan rakyat agar selanjutnya dia mampu mengimplementasikan program restrukturisasi ekonomi *perestroika*-nya secara mulus. Sebagai tokoh-tokoh Komunis

konservatif, Gorbachev dan Yakolev memutuskan melaksanakan *perestroika* melalui *glasnost*, dengan harapan memperkuat dan bukan sebaliknya melemahkan bahkan menghapuskan sosialisme (Powell, 2012). Ternyata, hasilnya jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Mendapatkan kesempatan menghirup kebebasan secara tiba-tiba membuat kelompok-kelompok minoritas di wilayah-wilayah pinggiran di bawah pengaruh Uni Soviet yang mengalami perlakuan sewenang-wenang oleh pemerintah pusat di Moskwa selama berabad-abad tergerak untuk menuntut kebebasan yang lebih besar, yaitu penentuan nasib sendiri. Ternyata, *glasnost* dan *perestroika* yang awalnya dimaksudkan sebagai restrukturasi ekonomi demi memperkuat sistem sosialisme terbukti telah menghasilkan "revolusi mental" secara mendasar dan meluas khususnya di kalangan rakyat di wilayah-wilayah periferi di bawah pengaruh Uni Soviet seperti Krimea, Kaukasus, dan negara-negara Baltik. Bagi rakyat di wilayah-wilayah itu, *glasnost* identik dengan kebebasan untuk menuntut hak dari pusat. Di luar dugaan, *glasnost* telah menggoyahkan hubungan ikatan yang hingga saat itu stabil antara Kremlin di pusat dan negara-negara di bawah pengaruh Uni Soviet di periferi. Hingga tahun 1990 saat kekuasaan Partai Komunis atas pemerintahan Soviet dilucuti dan sebagai gantinya Gorbachev diangkat sebagai presiden pertama Uni Soviet, perbaikan kondisi ekonomi sebagaimana diagendakan oleh Gorbachev tidak pernah terwujud. Di tengah suasana yang makin memburuk, akhirnya Gorbachev membubarkan Partai Komunis Uni Soviet pada 1991, memberikan kemerdekaan kepada negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, dan Lithuania), memberikan ikatan yang lebih longgar berupa konfederasi kepada 12 republik sisanya, dan akhirnya bahkan secara pribadi memutuskan mundur dari tampuk pemerintahan Uni Soviet tepat pada tanggal 25 Desember 1991. Sebagaimana kita tahu, sesudah Gorbachev lengser imperium Uni Soviet bubar dengan hanya menyisakan Republik Rusia yang dipimpin oleh Presiden Boris Yeltsin dan melahirkan 12 negara merdeka baru menyusul 3 negara yang sudah lebih dulu memperoleh kemerdekaan, yang semuanya sebelumnya berada di bawah pengaruh langsung Uni Soviet. Alhasil, Uni Soviet di bawah Gorbachev dengan *perestroika* dan *glasnost*-nya dipandang sebagai salah satu paradoks besar sejarah: agar bertahan hidup, sebuah institusi seperti Komunisme Soviet di bawah Gorbachev harus melakukan kompromi, namun ketika benar-benar menempuh kompromi, institusi itu menjadi kehilangan kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya (Powell, 2012). Itulah paradoks. Mikhail Gorbachev memang dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian 1990 atas sejumlah perbuatan besarnya khususnya atas jasanya mencairkan ketegangan hubungan antara Timur dan Barat, namun kehilangan kursi kepresidenan dan bubarnya Uni Soviet adalah harga yang harus dibayarnya ("Mikhail Sergeyevich Gorbachev", tanpa tahun). Itu pun juga paradoks.

Kembali pada "revolusi mental" Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta berkaca dari pengalaman sejumlah pemimpin besar sejumlah negara dalam melakukan perubahan dan perbaikan sosial di masyarakatnya, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. *Pertama,* ada benang merah persamaan antara gagasan revolusi mental ala Joko Widodo (dan Jusuf Kalla) yang kini menjabat sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia dan Presiden Soekarno serta *New Life Movement* Presiden Chiang Kai-shek. Sebagai tokoh-tokoh yang sangat mencintai bangsa dan negara masing-masing ketiganya mengajak rakyat yang dipimpinnya untuk melakukan koreksi dan perubahan sosial ke arah yang lebih baik antara lain dengan kembali kepada nilai-nilai dan berbagai hal bersifat lokal yang menjadi identitas masing-masing bangsa, khususnya kesederhanaan dan kegotong-royongan. Ketiganya juga menekankan pendidikan sebagai instrumen ampuh untuk menghasilkan perubahan dan perbaikan. *Kedua,* mengingat kemiripan struktur sosial-politis-geografis antara Uni Soviet di bawah Presiden Gorbachev yang terdiri dari lima belas negara yang secara kultural beragam dan negara kita yang terdiri dari puluhan kelompok etnik-religius yang sekaligus memiliki ikatan tempat geografis di berbagai wilayah di Tanah Air, kiranya ada hikmah penting yang pantas disimak oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari pemerintahan Presiden Gorbachev terkait pengelolaan tegangan antara pemberian kebebasan di satu sisi dan kontrol di sisi lain dalam rangka mengimplementasikan gagasan revolusi mental. *Ketiga* dan kembali pada perbandingan gagasan revolusi mental yang diusung oleh Presiden Chiang Kai-shek, Presiden Soekarno, dan Presiden Joko Widodo, bisa dikatakan bahwa di luar visi, misi dan program kerja yang dituangkan dalam teks kampanye resmigagasan revolusi mental Presiden Joko Widodo merupakan yang paling terbuka dari sisi penjabaran ke dalam program-program tindakan yang konkret. Maka, sumbangan gagasan yang dipersembahkan oleh warga komunitas Psikologi di Tanah Air yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan yang dituangkan dalam kumpulan tulisan di buku ini (*Revolusi Mental: Makna & Realisasi*)kiranya bisa dipandang sebagai bentuk peran serta menjabarkan gagasan revolusi mental Presiden Joko Widodo ke dalam isu-isu konkret pada berbagai segmen kehidupan bangsa kita yang memiliki persinggungan dengan Psikologi.

Kontribusi gagasan warga komunitas Psikologi dalam buku ini secara umum diharapkan dapat memperkaya konsep Revolusi Mental dalam dua hal utama. **Pertama,** gagasan untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai konsep Revolusi Mental dari kaca mata Psikologi serta memberikan pandangan kritis dari perspektif Psikologi. Dalam hal ini, sejumlah akademisi dan/atau praktisi Psikologi mencoba membangun pemaknaan konsep Revolusi Mental ke dalam konteks berbagai bidang penerapan Psikologi di masyarakat. Misalnya bidang kesehatan mental, abnormalitas perilaku, perilaku sosial

individu dan kelompok, pendidikan karakter, perilaku dalam dunia kerja, perilaku organisasi, pengembangan pengukuran perilaku dan sebagainya, bertolak dari realitas dan pengalaman khas Indonesia.

Kedua, sejumlah akademisi dan praktisi Psikologi membagikan *insight* yang mereka dapatkan berdasarkan pengalaman praktik memberikan layanan psikologis di bidang masing-masing. *Insight* dan *lesson learned* dari karya-karya ini kiranya dapat menjadi kontribusi yang berharga untuk implementasi Revolusi Mental bagi usaha-usaha pengembangan kualitas manusia.

Sisi atau aspek yang cukup penting dari buku ini adalah bahwa hampir semua artikel berisi ide konkret para penulisnya untuk menerapkan konsep Revolusi Mental sesuai pokok pikiran yang diajukan. Ide konkret tentang implementasi ini sangat diharapkan dapat dikembangkan menjadi guliran perubahan di berbagai bidang penerapan Psikologi.

Secara lebih spesifik, buku ini memuat 33 artikel dari 44 penulis yang dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama, *"Membaca" Revolusi Mental,* terdiri dari empat artikel yang mengupas dan mengkritisi makna konsep Revolusi Mental itu sendiri. *Bagus Takwin* mengajukan pemaknaan konsep Revolusi Mental dalam konteks pembangunan sosial dan penanaman nilai. *Hamdi Muluk* mencoba memberikan interpretasi tentang Revolusi Mental Jokowi dari perspsektif Psikologi. *Ngurah Sumitra* dan *Ifa Hanifah Misbach* masing-masing mengaitkan pemaknaan Revolusi Mental untuk membangun nasionalisme dan karakter bangsa.

Bagian kedua, *Revolusi Mental dalam Dunia Pendidikan dan Keluarga,* memuat lima belas artikel yang menggagas implementasi konsep Revolusi Mental dalam konteks pendidikan dan keluarga. *Nani Nurrachman* membuka wawasan mengenai peran pendidikan di masyarakat dalam membentuk karakter personal dan sosial individu. *Irwanto* menyoroti pentingnya peran pendidikan dan keluarga dalam membangun integritas moral. *Solita Sarwono; Tiwin Herman; Sukma Rahastri Kanti & Ike Herdiana*, masing-masing berfokus pada pendidikan karakter bangsa. *Juneman* membahas tentang tantangan pendidikan di perguruan tinggi. Beranjak dari keprihatinan terhadap situasi kaum muda dan kekerasan antar remaja yang semakin marak, *Danny Yatim; Helmi Firmansyah; Tri Dayakisni & Zakarija Ahmad,* serta *Friandry Windisany Thoomaszen*, masing-masing mengemukakan gagasan tentang pentingnya membangun kesediaan berdialog, kreativitas dan kebiasaan berpikir positif, sikap berintegritas, serta budaya anti kekerasan khususnya di sekolah. Selanjutnya *Neivy Dewi Diniyar; Regisda Machdy Fuadhy; Anastasia Satriyo; Listyo Yuwanto* dan *Kamsih Astuti,* masing-masing menyoroti pembangunan karakter dan kesehatan mental anak melalui peran sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Bagian ketiga *Revolusi Mental dalam Dunia Sosial-Kemasyarakatan* berisi sepuluh artikel yang menyoroti penerapan Revolusi Mental dalam konteks sosial kemasyarakatan. *Ichsan Malik*; *Ichlas Nanang Afandi; Clara Moningka & Steven Wijaya; Subhan El Hafiz, Yulmaida Amir & Anisia Kumala; Rayini Dahesihsari, Clara R.P Ajisuksmo, Juliana Murniati, & Hoshael W Erlan;* serta *Pieter Manoppo* masing-masing membahas persoalan di seputar relasi antar kelompok dalam keberagaman masyarakat di Tanah Air, khususnya berupa analisis tentang dinamika, upaya pencegahan dan penanganan konflik antar kelompok. Artikel *Ike Herdiana* membahas gagasan Revolusi Mental sebagai kontrol sosial untuk kasus perdagangan manusia (*human trafficking)*. Bab ini ditutup oleh tiga artikel yang membahas Revolusi Mental dalam kaitannya dengan tema-tema khusus keberagaman masyarakat: *Juliana Murniati; Saparinah Sadli, Livia Iskandar, & Hana Panggabean;* serta nilai budaya Jawa dari *Retno Suhapti* masing-masing membahas tentang semangat kerja sama, kesetaraan jender, dan nilai budaya Jawa.

Bagian keempat dan terakhir, *Revolusi Mental dalam Organisasi/Komunitas,* berisi empat artikel yang membahas penerapan Revolusi Mental dalam konteks organisasi atau komunitas. *Wisnubrata* membahas tentang pentingnya perubahan budaya organisasi yang mengarah pada perubahan mentalitas dan budaya kerja individu. *Benedicta Prihatin Dwi Riyanti* mengaitkan ide Revolusi Mental wirausaha dalam konteks global. *Sarlito Wirawan Sarwono* mengajukan gagasan tentang penerapan Revolusi Mental dalam mengkritisi penggunaan tes proyeksi dalam komunitas Psikologi di Indonesia. Mengakhiri bab sekaligus seluruh rangkaian tulisan dalam buku, *Riza Sarasvita* mengemukakan gagasan tentang pentingnya formalisasi Psikologi Praktik di Indonesia. Sesuatu yang sebetulnya telah lama ditunggu-tunggu oleh kalangan praktisi Psikologi di Tanah Air.

Akhir kata, para editor mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan para kontributor tulisan atas segala dukungan maupun sambutan hangat untuk menyumbangkan gagasan yang memungkinkan terbitnya buku pertama *Seri Sumbangan Psikologi untuk Bangsa* ini. Kepada seluruh sidang pembaca, kami ucapkan selamat menikmati.

Jakarta, Mei 2015

Tim Editor
Hana Panggabean, A. Supratiknya, J. Seno Aditya Utama

Daftar Acuan

"Jokowi dan arti revolusi mental" (2014, 17 Oktober). Diunduh tanggal 9 Februari 2015 dari http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental

Ferlanti, F. (2010). The New Life Movement in Jiangxi Province, 1934–1938. *Modern Asian Studies, 44,* 961–1000.

Jabbusch, S. (2007). *"The Great Leap Forward": How China biggest attempt for modernization failed.* Naskah, tidak dipublikasikan.

Kai-shek, Chiang. (1934a, 15 Mei). (Nan Ye, Trans.). The Guidelines of New Life Movement. *Central Daily News.*

Kai-shek, Chiang. (2000). Essentials of New Life Movement (Speech, 1934). Dalam Wm. Theodore de Bary & Richard Lufrano (Eds.), *Sources of Chinese Tradition: From 1600 through the Twentieth Century. Volume 2* (h. 341–344). New York: Columbia University Press.

"Mikhail Sergeyevich Gorbachev". (tanpa tahun). Diunduh tanggal 10 Februari 2015 dari http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/gorbachev-mikhail-sergeyevich.html

Powell, N. (2012). The effect of *Glasnost* on the dissolution of the Soviet Union. *The Concord Review, 22*(3), 107–127.

Soekarno. (1957). Revolusi mental. *Pusara, 19*(5/6), 32–36; 39–41.

Widodo, Joko. (2014, 10 Mei). Revolusi mental. *Kompas,* h. 6.

Widodo, Joko, & Kalla, Jusuf. (2014). *Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Visi misi, dan program aksi.* Jakarta: Tanpa penerbit.

PENGANTAR KETUA UMUM HIMPSI

Menjadi bagian dari sebuah revolusi mental yang sesungguhnya merupakan tantangan terbesar dari kepengurusan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) periode 2014-2018. Revolusi mental melibatkan refleksi tajam untuk kembali ke nilai dasar karakter dan mentalitas bangsa yang dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada komitmen dan kesungguhan dalam cara pandang, sikap dan perilaku dalam menghadapi suatu situasi.

Menyadari kemajemukan di segala bidang kehidupan dan sebagai organisasi profesi yang anggotanya secara nyata bergelut dengan kemajemukan tersebut, maka dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa situasi dan kemudian menjabarkan revolusi mental tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan ini dilatih dengan mengalami sendiri atau belajar dari pengalaman orang lain.

Buku **Revolusi Mental: Makna & Realisasi** adalah seri pertama dari rencana penerbitan reguler tahunan dalam kepengurusan HIMPSI. Seri sumbangan pemikiran Psikologi untuk bangsa Indonesia ini berisi kompilasi gagasan/ide/pemikiran/opini dari komunitas Psikologi terhadap permasalahan-permasalahan bangsa. Tulisan yang tersaji dalam buku ini mencoba untuk menyelaraskan konsep dan teori Psikologi berkaitan dengan situasi/persoalan serta implementasi konkrit tentang revolusi mental yang bisa dan sudah dijalankan.

Sungguh membanggakan bahwa penerbitan perdana ini mampu mengkompilasi 33 tulisan yang telah diseleksi dan melalui proses evaluasi untuk memastikan tulisan yang mampu menginspirasi pembacanya. Penghargaan saya sampaikan pada sejawat yang sudah mengirimkan tulisan, tim editor yang luar biasa dari Kompartemen 4 dan juga bagi semua pihak yang ikut berperan dalam penerbitan buku ini. Harapan saya agar kontribusi HIMPSI

lewat tulisan ini mampu menstimulasi terselenggaranya diskusi yang bermanfaat serta mendorong munculnya pembawa perubahan *'agent of change'* dalam kemajemukan bangsa kita tercinta. Revolusi mental bermula dari diri sendiri dan dari membaca tulisan di buku ini.

HIMPSI berkarya untuk bangsa

Dr. Seger Handoyo, Psikolog
Ketua Umum

Mei 2015

DAFTAR ISI

BAGIAN III Sosial Kemasyarakatan

BAGIAN IV Organisasi/Komunitas

BAGIAN I

"Membaca" Revolusi Mental

1
Revolusi Mental Melalui Pembangunan Sosial

Bagus Takwin

"It is difficult to be a good person in the absence of good society. The difficulty actually comes from failures of the larger institutions on which our common life depends." (Bellah *et al.* 1992 p.4)

Pendahuluan

Revolusi Mental merupakan jargon yang menggugah banyak orang Indonesia sejak diajukan oleh Jokowi Widodo saat ia mencalonkan diri menjadi presiden. Lepas dari apa maknanya, banyak orang menyambut dan mendukung gagasan ini. Dalam beberapa diskusi tentang Revolusi Mental yang ikuti, para peserta memaknainya sebagai sesuatu yang sangat memberi harapan. Dari diskusi-diskusi itu pula diperoleh catatan bahwa agar Revolusi Mental tidak hanya menjadi jargon kosong, melainkan benar-benar dapat terlaksana dan mengubah situasi Indonesia menjadi jauh lebih baik perlu dirumuskan suatu Rencana Strategis Revolusi Mental.

Di sisi lain, perenungan lebih mendalam dapat membawa kita kepada pemahaman bahwa makna dari Revolusi Mental memiliki dasarnya dalam sejarah pemikiran ilmu sosial dan praktik sosial masyarakat yang sudah ada selama ini. Revolusi Mental, dengan demikian, bukan sekadar jargon atau slogan politik, melainkan sebuah konsep yang memiliki dasar dalam perbendaharaan ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, dan manajemen. Dalam, psikologi, di tataran individual, kita dapat temukan berbagai penjelasan mengenai perubahan mentalitas secara cepat, seperti melalui psikoterapi, intervensi sosial, dan riset tindakan lainnya. Dalam sosiologi, kita dapat temukan penjelasan mengenai perubahan mentalitas orang-orang dalam sebuah masyarakat yang terjadi dalam waktu cepat, baik melalui penemuan baru, perubahan struktur sosial, maupun fasilitasi proses

sosial yang mendorong orang-orang berubah. Dalam manajemen, kita temukan penjelasan mengenai bagaimana konsep manajemen yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor menghasilkan revolusi mental. Dengan demikian, perumusan Rencana Strategis Revolusi Mental mendapatkan dasar pijakannya pada ranah akademik dan ilmiah.

Dari berbagai literatur mengenai perubahan sosial dan individual, dapat ditarik benang merah bahwa perubahan mentalitas selalu terjadi dalam konteks sosial. Kutipan dari Robert N. Bellah dkk (1992) di atas memberikan pertunjukan mengenai perlunya masyarakat yang baik untuk menghasilkan orang yang baik. Sebaik-baiknya pendidikan dan pembangunan terhadap individu, jika masyarakatnya tidak baik maka individu yang baik sulit dihasilkan. Paling jauh hanya segelintir atau sekelompok kecil orang baik yang muncul dalam masyarakat yang buruk, sedangkan kebanyakan orang di situ akan ikut terseret oleh keburukan masyarakatnya. Oleh karena itu, perbaikan individu harus selalu disertai dengan perbaikan masyarakat. Dengan dasar ini, Rencana Strategis Revolusi Mental dirumuskan: Pembangunan sosial untuk menghasilkan Revolusi Mental.

Secara singkat, Revolusi Mental dipahami dalam dua arti, yaitu (1) sebagai proses perubahan mentalitas orang Indonesia melalui perubahan unsur-unsur utama masyarakat; dan (2) sebagai perubahan mentalitas yang diharapkan dapat dihasilkan dari proses perubahan mentalitas orang Indonesia. Dua pengertian ini diperlukan untuk dapat menjalankan Revolusi Mental dan memperoleh hasil yang diharapkan. Pengertian pertama membantu kita untuk menentukan langkah-langkah strategis dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan agar perubahan mentalitas dapat terjadi. Pengertian kedua membantu kita untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana proses perubahan itu mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk kepentingan perumusan Rencana Strategis Revolusi dibuat kelompok kerja (Pokja) Revolusi Mental yang tergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK. Saya ikut sebagai anggota Pokja yang diketuai oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Apa yang saya paparkan dalam tulisan ini sebagian merupakan ringkasan dari naskah rencana strategis yang sudah dihasilkan Pokja Revolusi Mental, dengan beberapa catatan tambahan konseptual yang saya ambil dari khazanah literatur psikologi. Di bagian-bagian selanjutnya tulisan ini, saya akan memaparkan pengertian Revolusi Mental, pembangunan sosial, langkah-langkah strategis, nilai-nilai strategis instrumental, dan garis besar kegiatan Revolusi Mental.

Pengertian Revolusi Mental

Sebelum membahas pengertian Revolusi Mental, perlu dibahas apa itu mental. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang akar katanya adalah *mens*, berarti jiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan jiwa. Konsep ini berkembang menjadi *mentality* (mentalitas) yang artinya mencakup baik karakteristik dan kapasitas mental, cara dan kapasitas berpikir, merasa dan bertindak, maupun aktivitas mental yang sifatnya batiniah. Faktor yang memengaruhi mentalitas mencakup kondisi fisik, hereditas, lingkungan, hasrat, hambatan, motif, *instinc* (naluri), dan pengalaman khusus. Dari sini bisa dipahami bahwa mentalitas seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan pengaruh ini signifikan dalam menentukan mentalitas.

Belakangan ini, istilah mentalitas merujuk pada karakteristik mental yang didasari oleh standar tertentu, mencakup nilai (*value*), norma, sikap, cara pikir, sifat, pola pengolahan informasi dan pengambilan keputusan serta orientasi tindakan. Pengertian mentalitas mencakup juga kemampuan untuk mereformasi masyarakat, mengembangkan diri sendiri, mengadopsi kemampuan belajar sendiri dari pengalaman dan peristiwa sejarah, mengurangi isolasi diri, serta seperti yang dikatakan Sokrates, mampu belajar sendiri, hidup dan menghidupi di dalam masyarakat.

Mentalitas memiliki kaitan erat dengan karakter. Bahkan karakter adalah pengertian khusus dari mentalitas. Karakter adalah fungsi mentalitas integral (Vernal, 1918). Istilah karakter digunakan untuk membedakan mentalitas yang berintegritas (integritas mental) dengan mentalitas yang terpecah-pecah (penyimpangan mental). Karakter dapat dipahami juga sebagai kualitas mental.

Dari ahli psikologi kepribadian Gordon W. Allport kita memahami bahwa karakter merupakan bentuk khusus kepribadian. Allport (1961) mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamik sistem psikofisik dalam individu yang menentukan karakteristik dari tingkah laku dan pikirannya. Sedangkan karakter adalah kepribadian yang dievaluasi. Artinya, karakter adalah segi-segi kepribadian yang ditampilkan keluar diri, dan disesuaikan dengan nilai dan norma tertentu. Karakter, dengan demikian, adalah kumpulan sifat mental dan etis yang menandai seseorang. Kumpulan ini menentukan orang seperti apa pemiliknya. Karakter juga menentukan apakah seseorang akan mencapai tujuan secara efektif, apakah ia apa adanya dalam berurusan dengan orang lain, apakah ia akan taat kepada hukum, apakah ia dapat bekerja sama, dan sebagainya. Karakter diperoleh melalui pengasuhan, pendidikan dan pengalaman lainnya meskipun potensialitasnya ada pada setiap orang. Untuk membentuk karakter yang kuat, orang perlu menjalani serangkaian

proses pembelajaran, pelatihan dan peneladanan. Dengan demikian, lingkungan sosial dan fisik ikut berperan membentuk karakter individu.

Perlu ditegaskan, karakter tidak bersifat pribadi melainkan menunjukkan ciri suatu kelompok bahkan suatu bangsa. Oleh karena karakter adalah kepribadian yang dievaluasi berdasarkan nilai dan norma tertentu yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tertentu, maka pada dasarnya karakter selalu bersifat sosial. Karakter dapat dipahami sebagai perwujudan mentalitas yang dinilai baik oleh sebuah kelompok atau masyarakat. Lebih jauh lagi, pengertian karakter tidak terbatas pada kondisi kejiwaan pribadi melainkan juga meluas pada cara berpikir, berperilaku, sikap, sifat (seperti disiplin, sopan santun, kreativitas dan sebagainya), serta kualitas kepribadian yang menjadi ciri suatu masyarakat seperti kejujuran, integritas, kepatuhan terhadap hukum, sikap dan gaya kerja, kemandirian, serta etos kerja.

Dengan dasar pengertian mental, mentalitas, dan karakter tersebut Revolusi mental didefinisikan. Revolusi Mental merupakan upaya untuk mengubah karakter orang Indonesia. Perubahan karakter bukan sekadar perubahan kondisi jiwa perorangan, melainkan perubahan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, yang harus mengalami revolusi adalah seluruh masyarakat Indonesia. Revolusi mental, pertama-tama adalah usaha untuk mengubah masyarakat Indonesia; mengubah struktur sosial, kultur, dan proses sosial masyarakat Indonesia. Nantinya perubahan di level masyarakat itu akan mendorong individu menyesuaikan diri di dalamnya, dalam arti mengubah diri, mengubah lingkungan, dan menemukan lingkungan baru yang memadai. Pada praktiknya, interaksi antara masyarakat dan indvidu yang akan menghasilkan perubahan karakter orang Indonesia; menghasilkan perubahan mentalitas orang Indonesia.

Dengan mendefinisikan Revolusi Mental sebagai revolusi untuk membenahi karakter orang Indonesia secara revolusioner (cepat dan mendasar), maka ada beberapa asumsi dasar yang perlu disepakati.

1. Karakter orang bukan sesuatu yang merupakan sifat dasar yang menetap, melainkan sesuatu yang terbentuk sebagai respons terhadap kondisi sosial tertentu yang dialami oleh masyarakatnya selama bertahun-tahun. Dengan demikian karakter orang dapat diubah dengan mengubah kondisi sosial di masyarakatnya.

2. Istilah "revolusi" merujuk kepada serangkaian tindakan yang cepat dan mendasar, bukan sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan dan pemaksaan. Dengan dasar in, tindakan yang bersifat revolusioner itu perlu dilakukan secara terorganisasi, terencana, teratur dan terukur.

3. Revolusi Mental yang akan dilakukan bangsa Indonesia perlu dipahami sebagai suatu gerakan seluruh masyarakat (melibatkan pemerintah dan warga negara) dengan cara yang cepat untuk menguatkan nilai-nilai yang secara strategis amat diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk mampu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, menciptakan ketertiban umum, menghasilkan kesejahteraan pada rakyatnya, dan menegakkan kedaulatan negara di Era Globalisasi ini. Revolusi mental merupakan usaha pengisian lebih lanjut kemerdekaan Indonesia dengan menguatkan nilai-nilai "instrumental strategis" yang secara kontekstual dibutuhkan pada saat ini dan pada kurun waktu mendatang. Nilai-nilai yang dikembangkan itu merupakan cermin dari nilai-nilai dasar bangsa yaitu Pancasila dan Trisakti sebagai pijakan strategis Pemerintahan Jokowi-JK.

4. Berdasarkan berbagai kajian, dapat dipahami bahwa secara sosiologis kondisi lemahnya karakter orang Indonesia saat ini (tidak mandiri, individualistik, koruptif, tidak kreatif dan sebagainya) sudah tertanam dalam kebudayaan kita dalam kurun waktu yang relatif panjang sehingga tampak seperti bagian inheren orang Indonesia. Untuk dapat mengubahnya diperlukan upaya mengubah sebagian dari kebudayaan bangsa yang mengalami "pembusukan", sekaligus juga mengembangkan unsur-unsur positif kebudayaan kita yang perlu dipertahankan. Dengan kata lain, persoalan mental bangsa Indonesia adalah masalah "kebudayaan".

Seperti yang sudah disinggung terdahulu, Revolusi Mental dapat dipahami baik sebagai proses maupun sebagai hasil dari proses. Sebagai proses, Revolusi Mental adalah proses pembangunan sosial (termasuk budaya), atau pembangunan masyarakat secara sistemik dan holistik. Revolusi Mental berbeda dengan pembangunan "sektor-sektor" atau hanya menjamin sebagian hak individu, melainkan secara keseluruhan membangun warga negara menjadi masyarakat sipil yang merdeka, tercerahkan, dan sejahtera. Pembangunan sosial adalah perbaikan manusia dalam dimensi sosialnya. Dengan dasar pengertian ini, Pokja Revolusi Mental menawarkan konsep "Pembangunan Sosial" yang bersifat sistemik-sosietal yang dikaitkan langsung pada unsur dasar suatu masyarakat: struktur sosial, kultur dan proses sosial.

Sebagai hasil, Revolusi Mental adalah hasil dari pembangunan sosial secara sistemik dan holistik. Dalam arti ini, Revolusi Mental adalah perubahan mentalitas yang terjadi secara cepat, mendasar dan luas. Lebih jauh lagi, Revolusi Mental sebagai hasil dari perubahan mentalitas perlu dipahami dari pengaruh dan dampak perubahan mentalitas di berbagai ranah kehidupan masyarakat Indonesia. Tercapainya Revolusi Mental bukan

hanya ditandai oleh perubahan pola tingkah laku, melainkan juga ditandai oleh terjadinya peningkatan di berbagai ranah kehidupan itu.

Pembangunan Sosial

Dari pengertiannya, Revolusi Mental dapat dipahami sebagai proses perubahan mentalitas orang Indonesia yang menghasilkan kekuatan karakter orang Indonesia. Untuk dapat terjadi perubahan seperti itu diperlukan pembangunan sosial. Perubahan di tataran individual saja tidak memadai untuk mengubah mentalitas orang-orang dalam masyarakat secara keseluruhan. Selama sistem sosial yang berfungsi tidak memfasilitasi tampilnya tindakan-tindakan yang baik dari orang-orang yang tercakup di dalamnya, tidak dapat diharapkan akan muncul orang-orang berkarakter kuat dalam jumlah banyak.

Istilah pembangunan sosial di sini merujuk kepada pengertian "...peningkatan kualitas norma dan nilai dalam pranata sosial yang menghasilkan pola interaksi atau, lebih dalam lagi, pola relasi sosial (terutama menyangkut hubungan kekuasaan), baik antar individu maupun kelompok" (Wirutomo, 2013:105; lihat juga Wirutomo, 2014). Berdasarkan definisi ini, pembangunan sosial dipahami sebagai perbaikan manusia dalam dimensi sosialnya. Implikasinya: partisipasi masyarakat bukan sekadar alat atau cara, melainkan tujuan. Dalam keikutsertaan yang aktif dan kreatif dalam pembangunan, hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki aspirasi, harga diri dan kebebasan diwujudkan dan sekaligus ditingkatkan mutunya. Penekanan pembangunan sosial adalah pemerataan sarana dan hak-hak manusia yang paling dasar.

Pembangunan sosial pada intinya mencakup pembangunan unsur sistem sosial yang paling mendasar yaitu pembangunan struktur sosial, kultur dan proses sosial. Sistem sosial adalah serangkaian pola hubungan timbal-balik yang ada antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga, serta membentuk satu kesatuan yang utuh. Lebih rinci lagi, sebuah sistem sosial adalah seperangkat prinsip moral-politik-ekonomi yang diwujudkan dalam suatu masyarakat hukum, lembaga, dan pemerintah, yang menentukan hubungan, ketentuan asosiasi, antara orang-orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu (Rand, 1996|1997). Untuk kepentingan analisis, sistem sosial dibagi menjadi tiga unsur utama: struktur sosial, kultur dan proses sosial (Wirutomo, 2013).

Struktur Sosial

"Struktur sosial adalah pola hubungan, terutama hubungan kekuasaan, antara kelompok sosial dalam bentuk stratifikasi, komposisi, diferensiasi sosial" (Wirutomo, 2013:106). Dalam sebuah masyarakat, para anggotanya menjalani hubungan satu sama lain mengikuti pola tertentu. Pola hubungan itu menentukan arah, kualitas dan hasil tindakan individu. Dalam hubungan yang melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan berbeda, contohnya, maka kelompok sosial yang lebih kuat dan berkuasa akan mampu memaksa, memerintah, atau memberi kendala pada pihak atau kelompok yang lain. Anggota tertentu yang lebih kuat dan berkuasa dapat memaksa anggota yang lain untuk menghasilkan tindakan dan produk tertentu.

Struktur sosial memiliki kekuatan. Kekuatan itu dapat dilembagakan secara legal-formal (seperti undang-undang dan kebijakan pemerintah) sehingga secara resmi dapat memaksa orang melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kekuatan itu dapat juga tidak dilembagakan tetapi memiliki daya memaksa, misalnya kekuatan "memaksa" dari perusahaan/produsen yang meskipun tidak memiliki kekuatan hukum resmi untuk memerintah tetapi efektif mengatur kehidupan masyarakat luas melalui iklan, fasilitas fisik yang diciptakan dan sebagainya. Di luar struktur sosial masih ada faktor lain yang memiliki "kekuatan struktural" (*structural forces*) yang mampu memaksa tindakan manusia, di antaranya struktur demografi, struktur fisik kota dan sebagainya.

Pembangunan struktural terkait Revolusi Mental bertujuan untuk menghasilkan struktur yang dapat bekerja dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan usaha menyeimbangkan hubungan kekuasaan antar pemerintah dan warga atau golongan kaya dan miskin melalui kebijakan pembangunan serta undang-undang yang menguntungkan rakyat. Pembangunan struktural perlu dilakukan untuk memperbaiki struktur yang eksklusif (tidak adil, diskriminatif) menjadi inklusif (adil, memberikan kesamaan hak). Melakukan koreksi (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar agar terjadi keseimbangan hubungan kekuasaan antar pemerintah-warga atau golongan kaya-miskin dan membuat kebijakan pembangunan serta undang-undang yang mewajibkan pengalokasian ruang kota untuk PKL dan tanah untuk petani merupakan contoh dari pembangunan struktural.

Kultur

Menurut Wirutomo (2013:107), "Kultur adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging (*internalized*) pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk

pola perilaku dan sikap anggota masyarakat (dari dalam)." Isi dari kultur adalah nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan. Nilai adalah unsur mendasar dari kultur yang menjadi standar, petunjuk umum, dan motivator tingkah laku mereka yang menganutnya. Pembangunan kultural dalam konteks Revolusi Mental pada intinya adalah menguatkan nilai-nilai yang menjadi standar, petunjuk umum, dan motivator tingkah laku yang menunjang pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, menciptakan ketertiban umum, menghasilkan kesejahteraan pada rakyatnya, dan menegakkan kedaulatan negara Indonesia.

Kultur yang telah tertanam di suatu masyarakat tidak selalu merupakan cara hidup terbaik untuk menghasilkan kesejahteraan dan martabat masyarakat. Bisa jadi unsur budaya yang ada justru menghambat kesejahteraan masyarakat. Kebiasaan yang dihasilkan kultur tidak mudah dihilangkan karena telah mendarah daging pada anggota masyarakat. Bisa juga kebiasaan itu dipertahankan oleh kelompok tertentu atau tokoh masyarakat dalam rangka melindungi kepentingannya. Untuk mengubahnya diperlukan pembangunan kultural yang dapat meningkatkan kualitas sistem nilai, menghilangkan adat istiadat yang menghambat kesejahteraan rakyat baik secara langsung (melalui sosialisasi, edukasi dan sebagainya) maupun tidak langsung (melalui pembangunan struktural dan proses sosial).

Salah satu contoh pembangunan kultural terjadi pada masa Orde Baru, yaitu program pembangunan untuk menanamkan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa melalui program P4. Contoh lain, di Solo Jokowi pernah mengembangkan kebijakan *eco-cultural City* yang salah satu programnya adalah mengembangkan budaya non-kekerasan dengan menginstruksikan Satpol PP untuk tidak menggunakan pentungan dalam menertibkan kota. Menentukan nilai ideal tertentu sebagai basis dari pembangunan bangsa, termasuk pembangunan struktural dan membangun gelanggang remaja untuk mengembangkan budaya kreatif generasi muda, merupakan contoh pembangunan kultural.

Proses sosial

Proses sosial, menurut Wirutomo (2013:107), adalah "…segala dinamika interaksi sehari-hari antar anggota masyarakat yang belum terstruktur (*structured*) maupun mengkultur (*cultured*)." Proses sosial yang dinamis dan kreatif memfasilitasi dan mendorong individu dan kelompok mengekspresikan aspirasi secara relatif bebas; melakukan negosiasi antar anggota masyarakat, mulai dari debat kusir di warung kopi, seminar, dialog di TV, bahkan interaksi antar warga di dunia maya dan demonstrasi.

Proses sosial merupakan elemen dasar kehidupan sosial yang sangat penting. Realitas sosial adalah hasil bentukan interaksi antar individu dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, proses sosial mengkonstruksi realitas sosial. Pembangunan proses sosial adalah pembangunan kondisi kultural maupun struktural yang dapat memberi ruang lebih luas bagi pengembangan kuantitas maupun kualitas proses sosial di kalangan warga masyarakat.

Membuka ruang publik yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara kreatif (gelanggang remaja, taman bermain, panggung-panggung kreatif dan sebagainya) merupakan contoh pembangunan proses sosial. Contoh lainnya, membuka kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan opininya, seperti kebebasan berorganisasi, diskusi publik, unjuk rasa, dan sebagainya.

Dalam kenyataan dan praktiknya, struktur, kultur dan proses tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memengaruhi, saling berpotongan, dan saling menopang. Sebuah peraturan, misalnya peraturan penggunaan bahan lokal untuk industri, merupakan wujud dari struktur yang akan memengaruhi proses di masyarakat berupa peningkatan produksi bahan lokal yang melibatkan banyak tenaga kerja lokal sehingga terjadi perubahan tingkah laku dalam proses kerja yang pada nantinya mengubah pula pola pikir dan keyakinan sehingga akhir mengubah kultur. Dalam melakukan pembangunan sosial secara strategis perlu dipertimbangkan secara cermat akan mulai dari mana. Penentuan prioritas mana yang akan dibangun perlu didasari oleh pertimbangan dampak dari pembangunan yang akan menjadi prioritas. Misalnya, pembuatan undang-undang atau aturan yang merupakan wujud pembangunan struktural bisa jadi menjadi prioritas pertama karena dampaknya dapat menggerakkan proses sosial yang konstruktif dan menguatkan nilai-nilai yang menguatkan kultul dan sejalan dengan pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan Sosial Berbasis Nilai

Langkah paling dasar dari Revolusi Mental adalah menentukan nilai-nilai apa yang hendak dijadikan dasar karakter yang mencirikan bangsa Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa pertama, nilai-nilai itu harus diperlakukan sebagai "nilai strategis-instrumental", artinya nilai yang diperlukan guna memperbaiki keadaan masyarakat Indonesia, mulai dari menata kehidupan bersama, menghasilkan pemerintah yang dapat dipercaya, memfasilitasi aktivitas konstruktif warga negara, meningkatkan kemandirian, kreativitas dan produktivitas, hingga memenangkan persaingan dalam kancah internasional. Nilai strategis yang akan dibenahi

untuk kurun waktu tertentu jumlahnya tidak banyak agar benar-benar dapat ditanamkan secara efektif.

Kedua, nilai-nilai yang akan dikembangkan dan dikuatkan itu tidak disakralkan atau dikaitkan dengan agama tertentu, sehingga tidak mengundang interpretasi, kontroversi dan sentimen keagamaan. Nilai-nilai itu harus dapat diterima secara nasional, disetujui dan didukung oleh berbagai golongan dan daerah sebagai nilai strategis-instrumental. Dengan menetapkan prioritas pengembangan nilai strategis-instrumental ini tidak berarti kita meninggalkan nilai dasar yang ada, sebaliknya justru menguatkan. Penanaman nilai instrumental itu hanya untuk kepentingan strategis. Setelah nilai-nilai itu kuat, selanjutnya dapat dikembangkan nilai-nilai yang lain yang relevan dengan kebutuhan Indonesia.

Nilai-nilai itu harus menjadi dasar ukuran kesuksesan para pejabat negara, mulai dari presiden, menteri, hakim, jaksa, walikota dan sebagainya. Penerapan nilai itu perlu dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan ukuran yang jelas. Setiap lembaga birokrasi punya target spesifik mengenai apa yang akan dihasilkan dalam rangka meningkatkan kualitas mental dan karakter masyarakat berdasarkan nilai-nilai itu.

Di sini pengertian nilai yang dipadankan dengan istilah *value* dalam bahasa Inggris. Pengertian nilai menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Schwartz (1992;4), yaitu:

> *"Values (1) are concepts or beliefs, (2) pertain to desirable end states or behaviors, (3) transcend specific situation, (4) guide selection or evaluation of behavior and events, and (5) are ordered by relative importance."*

Dari definisi tersebut diketahui bahwa nilai adalah konsep atau *belief* (keyakinan). Maksudnya nilai sebagai konsep adalah nilai merupakan ide atau pikiran tentang sesuatu hal atau kelas dari suatu hal, khususnya ide yang digeneralisasi. Manusia berpikir dalam kerangka konsep-konsep tertentu. Oleh karena nilai adalah konsep, maka nilai merupakan suatu kerangka yang digunakan manusia dalam berpikir tentang sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan nilai sebagai konsep. Konsep itu dipercayai oleh yang menganutnya sehingga berperan sebagai *belief* atau keyakinan, lebih khususnya *belief* preskriptif, yaitu keyakinan yang menentukan makna tindakan akhir tertentu mana yang diinginkan atau tidak diinginkan. Menurut Allport (dikutip Rokeach, 1973) "Sebuah nilai adalah sebuah *belief* yang mendasari manusia dalam bertindak sesuai dengan preferensi."

Nilai erat kaitannya dengan tujuan akhir atau tingkah laku yang diinginkan. Suatu nilai mendorong seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang sesuai dengan nilai itu dan menjauhkan seseorang dari tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai itu.

Nilai meliputi dan melampaui situasi-situasi khusus. Artinya nilai berfungsi tidak hanya pada situasi tertentu tetapi pada berbagai situasi. Nilai memengaruhi berbagai tingkah laku dalam berbagai situasi. Nilai membimbing pemilihan dan evaluasi tingkah laku dan peristiwa. Ditampilkan atau tidaknya tingkah laku dipengaruhi oleh nilai, begitu pula dalam penentuan baik buruknya tingkah laku atau kejadian. Nilai disusun berdasarkan tingkat kepentingan relatif. Dalam diri individu, nilai diatur susunan kepentingannya mulai dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Nilai-nilai yang dianggap paling penting merupakan nilai utama dan nilai-nilai lainnya merupakan nilai sekunder.

Nilai memiliki komponen kognitif, afektif, dan behavioral. (1) Komponen kognitif berisi keinginan, (2) komponen afektif berisi perasaan di mana seseorang bisa memiliki rasa emosional terhadap sesuatu, (3) komponen behavioral berisi variabel *intervening* yang mengarahkan tingkah laku ketika nilai bekerja dalam diri seseorang. Dalam mengarahkan tingkah laku nilai dapat dibedakan menjadi nilai instrumental dan nilai terminal.

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi modus dari tingkah laku seseorang. Nilai ini sering tercermin dalam tingkah laku individu sehari-hari dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari individu. Nilai terminal merupakan nilai akhir individu. Dengan nilai terminal, individu menentukan tujuan hidupnya.

Nilai diorganisasikan ke dalam sistem nilai. Sistem nilai adalah:

> *"…an enduring organization of beliefs concerning preferable modes of conduct or end-states of existence along a continuum of relative importance."* (Rokeach, 1973).

Di dalam sistem nilai, nilai-nilai diatur sedemikian rupa sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain. Nilai-nilai saling memengaruhi satu sama lain dan kadangkala saling bertentangan. Di dalam sistem nilai ini juga dibedakan nilai instrumental dan nilai terminal.

Nilai berperan dalam memengaruhi tingkah laku sebagai standar, petunjuk umum dan motivator dalam bertingkah laku. Sebagai standar, nilai menjadi patokan bagi individu untuk menentukan posisinya dalam berhadapan dengan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Nilai juga menjadi predisposisi bagi kita untuk menyatakan suka atau tidak suka terhadap berbagai macam hal. Dia juga mengarahkan penampilan kita di depan orang lain. Sebagai standar, nilai juga menjadi patokan bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita dan orang lain. Nilai juga dipakai untuk menentukan apakah seseorang bermoral atau tidak dan seringkali dipakai sebagai standar untuk memengaruhi orang lain dan diri kita, untuk dijadikan patokan dalam menentukan mana belief dan sikap yang baik dan sebaiknya dilakukan.

Sistem nilai merupakan petunjuk umum bagi individu dalam bertingkah laku. Ketika menghadapi suatu situasi tertentu sistem nilai bekerja dan memberi saran-saran kepada individu untuk bertindak. Sistem nilai selalu aktif dalam situasi apa pun. Nilai-nilai yang ada di dalamnya membentuk suatu struktur mental yang lebih komprehensif dari pada masalah-masalah yang diberikan oleh suatu situasi tertentu. Hal ini memungkinkan sistem nilai untuk memberikan petunjuk secara umum pada kegiatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Sebagai motivator, nilai dan sistem nilai mendorong individu untuk bertingkah laku dengan cara tertentu dan mencapai tujuan-tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai instrumental memiliki sifat motivasional karena menawarkan sejumlah mode untuk bertingkah laku. Nilai ini berfungsi sebagai pengarah tingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan alat untuk memilih tingkah laku tertentu agar tujuan tertentu dapat dicapai. Karena fungsinya menentukan tingkah laku-tingkah laku yang harus ditampilkan, nilai ini berperan sebagai mode tingkah laku. Mode tingkah laku tersebut biasanya sudah lolos dari seleksi budaya sehingga bisa diterima oleh norma masyarakat. Oleh karena itu individu aman untuk mengikuti mode tersebut. Nilai terminal memiliki sifat motivasional karena menawarkan satu tujuan 'super' yang melampaui tujuan sesaat, biologis, dan menuntut kebutuhan segera. Dengan adanya nilai terminal, individu termotivasi untuk bertingkah laku tertentu agar tujuan yang sesuai dengan nilai tersebut bisa dicapai.

Kerangka Kebijakan Strategis

Untuk menjalankan Revolusi Mental diperlukan kerangka kebijakan strategis yang perlu digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang dimuat dalam Usulan Rencana Strategis Revolusi Mental yang dihasilkan Pokja Revolusi Mental Tim Transisi Jokowi-JK, saya kutip kerangka kebijakan strategis itu.

1. Mengembangkan kebijakan, UU, PP, Perda, dan instruksi pembangunan kualitas kehidupan sosial budaya dalam arti yang lebih luas termasuk struktur, nilai, dan proses implementasinya. Merumuskan nilai strategi yang menjadi prioritas dalam 5 tahun yang disetujui dan didukung oleh mayoritas dari berbagai golongan dan daerah.

2. Mengembangkan kelembagaan yang kuat untuk membenahi kebijakan, strategi dan implementasi revolusi mental sehingga menghasilkan kualitas masyarakat berdaulat, mandiri, berdikari. Pengembangan kelembagaan ini termasuk menyediakan lembaga

atau satuan tugas khusus penggerak revolusi mental. Lembaga atau satuan tugas ini bukan hanya berfokus memperbaiki kelemahan atau krisis budaya Indonesia, tetapi termasuk memetakan dan mengembangkan potensi-potensi budaya kita yang selama ini terpendam sehingga kreativitas kesenian kita misalnya tidak kalah dengan India, ataupun Korea Selatan. Lembaga atau satuan tugas ini tidak berbentuk kementerian atau departemen karena kebudayaan bukanlah sektor dan tidak menjadi sektor. Lembaga atau satuan tugas ini langsung di bawah Presiden karena lingkupnya bersifat sistemik dan holistik. Lembaga atau satuan tugas ini bertanggung jawab untuk merumuskan sistem nilai yang menjadi prioritas secara bertahap. Misalnya selama periode 5 tahun pertama, pemerintah mengembangkan sistem nilai gotong royong salah satu komponen dasar negara Pancasila. Nilai strategis lain mungkin kemandirian dan anti korupsi. Nilai strategis ini merupakan instrumen untuk kompetisi dalam era globalisasi. Menggalang partisipasi *stakeholder* untuk merumuskan nilai-nilai strategis

3. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga lintas sektor, dan *stakeholder* lain, serta membuka ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan nilai strategis dan produk budaya.

4. Meningkatkan koordinasi, kerja sama lintas sektoral dalam pengembangan nilai-nilai strategis dan produk budaya.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membentuk budaya nasional lembaga-lembaga kehidupan sosial budaya berbasis masyarakat. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat untuk berperan serta dalam pembentukan kehidupan sosial budaya.

6. Memperkuat dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi produk-produk kehidupan sosial budaya termasuk pemikiran, karya tulis, barang dan jasa.

7. Menghasilkan dan mensosialisasikan produk-produk sosial budaya termasuk nilai-nilai strategis khas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan mampu menangkal pengaruh globalisasi yang negatif.

Prinsip Revolusi Mental

Dalam menjalankan Revolusi Mental ada 6 prinsip yang dipegang. Sebagaimana yang dimuat dalam Usulan Rencana Strategis Revolusi Mental yang dihasilkan Pokja

Revolusi Mental Tim Transisi Jokowi-JK, saya kutip keenam prinsip itu.

1. Berbasis Nilai: Fokus pada nilai strategis instrumental untuk mendorong Kemajuan Indonesia. Revolusi mental bukan serangkaian proyek yang dijalankan pemerintah melainkan aktivasi, instusionalisasi dan internalisasi nilai di masyarakat dengan melibatkan seluruh warga, baik secara kolektif maupun individual.

2. *Political will* (kehendak politik): revolusi mental memerlukan *political will* untuk menjamin komitmen pemerintah yang bersifat lintas sektoral.

3. Lintas sektoral: koordinasi seluruh lembaga negara dan komunitas, tidak boleh diserahkan hanya kepada satu kementerian atau lembaga tertentu.

4. Partisipatoris: Revolusi mental bersifat partisipatif, melibatkan kolaborasi pemerintah, pengusaha, masyarakat sipil, dan akademisi.

5. Berkesinambungan: Revolusi mental diawali program pemicu ("*value attack*") untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkrit dan cepat, dilanjutkan dengan program-program pengembangan dan penguatan.

6. Kemudahan: Disain program harus *user friendly* (mudah bagi pengguna), populer, sistemik-holistik yang dapat menjadi gaya hidup warga.

7. Berorientasi pada nilai publik: nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial (moralitas publik), bukan mengatur moralitas privat.

8. Terukur: Revolusi Mental harus dapat diukur dampaknya.

Nilai-Nilai Strategis Instrumental

Dari 30 *Focus Group Discussion* (FGD) di empat provinsi yang melibatkan akademikus, seniman, pemikir budaya, tokoh agama, pengusaha, birokrat, LSM, aktivis internet, kelompok pemuda dan mahasiswa diperoleh serangkaian nilai yang dianggap strategis untuk memperbaiki mentalitas masyarakat Indonesia. Dari serangkaian nilai itu dipilih enam nilai berdasarkan kesesuaiannya dengan Trisakti. Enam nilai itu mencakup nilai (1) kewargaan; (2) dapat dipercaya; (3) mandiri; (4) kreatif; (5) gotong-royong; dan (5) saling menghargai.

Nilai ini sejalan dengan Trisakti yang mencakup berdaulat dalam politik, kemandirian dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nilai kewargaan dan dapat dipercaya sejalan dan merupakan instrumen strategis dari pencapaian kedaulatan

dalam politik. Nilai mandiri dan kreatif sejalan dan merupakan instrumen strategis dari pencapaian kemandirian dalam ekonomi. Nilai gotong-royong dan saling menghargai sejalan dan merupakan instrumen strategis dari pencapaian berkepribadian dalam kebudayaan.

Di tahap awal revolusi mental, enam nilai tersebut diharapkan disosialisasi dan diinternalisasi oleh bangsa Indonesia. Nantinya setelah enam nilai ini berfungsi dalam diri individu maupun pada masyarakat Indonesia, nilai-nilai strategis instrumental lainnya dapat dikembangkan.

Nilai Kewargaan

Nilai kewargaan adalah keyakinan bahwa setiap orang adalah warga dari masyarakatnya, memiliki hak dan berkewajiban mempertahankan, merawat, memajukan dan mengembangkan masyarakatnya. Lebih jauh lagi, nilai kewargaan merupakan konsep atau keyakinan mengenai pentingnya peran warga dalam suatu negara untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan masyarakat serta membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun masyarakat itu terdiri dari orang yang berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Di dalam nilai kewargaan terkandung nilai keadilan. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi hak setiap orang, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama dan *fair* terhadap setiap orang.

Dalam nilai kewargaan terkandung juga kepercayaan pada masyarakat, yaitu keyakinan bahwa kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat adalah hal yang baik dan kehidupan bersama itu akan membawa setiap orang kepada tujuan yang baik.

Di dalam nilai kewargaan tercakup pula nilai tanggung jawab, yaitu keyakinan bahwa orang bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain yang ada di masyarakatnya, wajib mengambil peranan dalam mempertahankan, merawat, memajukan dan mengembangkan masyarakatnya.

Nilai Dapat Dipercaya

Nilai dapat dipercaya adalah keyakinan mengenai pentingnya perilaku bertanggung-jawab, terus terang, tulus dan dapat dipercaya, menolak pemalsuan fakta dari realitas,

menolak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta menepati janji, memegang komitmen dan setia.

Di tataran individual, nilai ini memandu dan mendorong penganutnya untuk menampilkan perilaku bertanggung jawab, terus terang dan tulus, serta tindakan yang memberikan kesan dapat dipercaya pada diri orang lain yang bertemu dengannya. Di tataran kolektif, dapat dipercaya memandu orang-orang di masyarakat untuk menampilkan perilaku yang menunjukkan integritas dan komitmen pada apa yang menjadi tugasnya, dapat diandalkan dan terbuka. Di posisi pejabat publik, nilai dapat dipercaya memandu dan mendorong para pejabat publik untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, dapat diandalkan, memiliki kompetensi memadai untuk melaksanakan tugas, serta menyelesaikan tugas secara baik pada waktunya. Di tataran negara, nilai dapat dipercaya mendorong negara dan pemerintahnya untuk memiliki kapasitas yang memadai mengelola negara dan melayani warganya, menunjukkan kewibawaan baik kepada warganya maupun kepada negara-negara lain melalui kemampuan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Lebih jauh lagi menampilkan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka. Negara yang dapat dipercaya adalah negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mensejahterakan rakyatnya dan berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia secara independen dan bebas.

Dapat dipercaya sebagai sifat merujuk pada segi karakter moral dan diasosiasikan dengan atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, menyampaikan apa adanya dan keterusterangan, termasuk keterusterangan perilaku, bersama dengan tidak adanya tindakan berbohong, menipu, mencuri, korupsi dan sebagainya. Orang atau pranata yang dapat dipercaya berkomitmen, setia, berkemampuan, adil, dan tulus.

Nilai Mandiri

Nilai mandiri adalah keyakinan mengenai pentingnya mengandalkan diri sendiri atau usaha dan kemampuan sendiri daripada yang diberikan atau disediakan oleh orang lain. Nilai mandiri juga merupakan keyakinan bahwa diri sendiri mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup, serta mampu memandu diri sendiri menjalani kehidupan. Nilai mandiri mendorong orang untuk memiliki kemampuan dan keberanian untuk mendengarkan diri sendiri, bertindak dengan inisiatif sendiri dan mengandalkan diri sendiri daripada orang atau hal lain. Nilai mandiri tidak hanya memandu dan mendorong orang-orang tetap mengendalikan hidupnya sendiri, melainkan juga pada akhirnya berkontribusi dalam lingkungannya.

Di tataran kolektif, nilai mandiri memandu dan mendorong kelompok atau masyarakat untuk mengandalkan sumber daya dan kemampuan mereka. Nilai ini mendorong kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan mencegah ketergantungan kepada pihak lain.

Nilai Kreatif

Nilai kreatif adalah keyakinan mengenai pentingnya kemampuan untuk memecahkan masalah dan mencipta sesuatu (barang, jasa, teori, penjelasan, cara, metode, dan sebagainya) secara inovatif dan baru atau menggunakan pandangan baru.

Nilai kreatif menilai baik kreativitas. Kreativitas sendiri adalah kecenderungan untuk menghasilkan atau mengenali ide, alternatif, atau kemungkinan yang berpotensi memiliki guna dalam memecahkan masalah, komunikasi dengan orang lain, dan menghibur diri kita sendiri dan orang lain. Kreativitas adalah tindakan mengubah ide-ide baru dan imajinatif menjadi kenyataan. Kreativitas melibatkan dua proses: berpikir, kemudian memproduksi. Inovasi adalah produksi atau pelaksanaan ide. Perlu ditegaskan, kreativitas bukan hanya menggunakan imajinasi, melainkan penggunaan imajinasi yang diikuti dengan tindakan penciptaan. Memiliki ide-ide besar dan pikiran tidak cukup untuk menjadi kreatif, tanpa menghasilkan hal baru.

Nilai Gotong-royong

Nilai gotong-royong adalah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan.

Pengertian gotong royong sendiri adalah upaya bersama yang bersifat saling bantu membantu untuk kepentingan dan kebahagiaan semua orang yang terlibat. Dalam bentuk kongkretnya, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Gotong royong melibatkan kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat untuk melakukan setiap kegiatan dengan cara bekerja sama dan saling membantu. Dengan kesadaran setiap orang dalam masyarakat untuk saling membantu dan menghasilkan sinergi gotong royong dapat dilakukan.

Di dalam gotong-royong tercakup nilai kerja sama, yaitu keyakinan pentingnya untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang menguntungkan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dengan nilai ini, kerja sama dinilai baik, tepat dan patut dilakukan. Nilai ini menempatkan kerja sama lebih baik daripada persaingan atau kompetisi.

Nilai gotong-royong didasari oleh keyakinan bahwa:

a. manusia tidak hidup sendiri melainkan hidup bersama dengan orang lain atau lingkungan sosial;

b. pada dasarnya manusia itu tergantung pada manusia lainnya;

c. manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya; dan

d. manusia perlu menyesuaikan dirinya dengan anggota masyarakat yang lain.

Nilai Saling Menghargai

Nilai saling menghargai adalah keyakinan mengenai pentingnya dapat memahami, menghargai dan menghormati orang lain. Nilai ini menempatkan manusia sebagai sesuatu yang berharga. Diri sendiri dan orang lain dinilai penting dan wajib dihargai dan dihormati. Berdasarkan nilai saling menghargai, kemampuan untuk memahami data dan informasi mengenai orang lain tanpa disertai tindakan mendiskreditkan pribadi atau kelompok yang dipahami adalah hal yang baik. Dengan saling menghargai, bukan berarti kita menerima begitu saja apa yang dirasakan, dipikirkan dan dilakukan orang lain, melainkan berusaha memahami secara memadai orang lain tanpa praduga atau prasangka yang dapat menghasilkan *bias* dalam memahami orang atau kelompok lain.

Di dalam nilai saling menghargai tercakup pula empati, yaitu respons afektif dan kognitif yang kompleks terhadap tekanan emosional yang dialami orang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa peduli dan mencoba menyelesaikan masalah, serta mengambil perspektif orang lain.

Garis Besar Program Revolusi Mental

Secara garis besar, program Revolusi Mental terdiri atas tiga kelompok, yang diberi nama (1) Indonesia Ramah; (2) Indonesia Mandiri; dan (3) Indonesia Kita. Setiap kelompok program mencerminkan dua nilai strategis yang diturunkan dari Trisakti seperti yang dimuat dalam tabel di bawah ini.

Ketiga kelompok program ini diselenggarakan dalam usaha mencapai tujuan Revolusi Mental. Selain ketiga kelompok program ini, dirancang juga program penunjang pelaksanaan revolusi mental mencakup riset dan pengembangan, sosialisasi dan advokasi revolusi mental.

Kelompok program "Indonesia Ramah" mencakup program-program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi tampilnya perilaku sesuai dengan nilai strategis instrumental, khususnya pada birokrasi dan ranah pelayanan publik. Kelompok program "Indonesia Mandiri" mencakup program-program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi kemandirian dan kreativitas masyarakat Indonesia sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang baik serta memiliki daya saing tinggi di level internasional. Kelompok program "Indonesia Kita" mencakup program-program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan sosial-budaya sehingga dapat menghasilkan "ke-kita-an yang kuat dalam kehidupan bersama di Indonesia.

Berikut ini tiga kelompok program yang saya kutip dari Usulan Rencana Strategis Revolusi Mental yang dihasilkan Pokja Revolusi Mental Tim Transisi Jokowi-JK.

Program Indonesia Ramah

1. Program aksi untuk menghadirkan pemerintah di masyarakat melalui perbaikan penampilan birokrasi.

   Ujung tombak birokrasi harus senyum, sopan, cepat tanggap, peduli, tulus, andal, terpercaya dan menjaga mutu. Untuk dapat menghasilkan kondisi ini dibuat satu

Tabel 1.
Program Revolusi Mental

Trisakti	Berdaulat Politik	Berdikari Dalam Ekonomi	Berkepribadian Dalam Kebudayaan
Nilai	Kewargaan	Mandiri	Gotong Royong
	Dapat Dipercaya	Kreatif	Saling Menghargai
Program	Indonesia Ramah	Indonesia Mandiri	Indonesia Kita

SOP (*standar operating procedure*) yang menjadi pegangan petugas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

2. Program perubahan kebijakan yang menghambat penguatan nilai-nilai strategis instrumental.

3. Program pembangunan sistem monitoring yang menjadi satu kesatuan dalam tahap perencanaan, implementasi, dan pelaporan program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai usaha untuk pengendalian mutu.

4. Program pemberian 1000 penghargaan oleh presiden kepada pahlawan-pahlawan yang melakukan kebaikan dan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial-budaya dalam keseharian mereka.

5. Program penominasian dan pemberian penghargaan oleh warga bagi petugas pelayanan publik terbaik versi rakyat.

6. Program penyediaan portal partisipasi warga dalam pembangunan yang menampung inisiatif, usulan, dan pengaduan. Program ini diselenggarakan melalui kerja sama antara pemerintah, netizen, CSO, dan akademisi.

7. Program "Blusukan Tematik" Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah rawan bencana, daerah potensial, dan pulau terdepan dengan tema yang disesuaikan dengan konteks wilayah yang dikunjungi dan isu yang sedang berkembang di masyarakat.

8. Program pembentukan konsorsium untuk membantu penyelenggaraan revolusi mental yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, komunitas, LSM, dan akademisi di tingkat nasional dan lokal.

Program Indonesia Mandiri

1. Program penguatan kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar.

2. Program pemberian insentif pengurangan pajak bagi pengusaha Indonesia yang mengembangkan produk lokal yang inovatif.

3. Kolaborasi pemerintah dan pengusaha dalam menyelenggarakan "Indonesia Bazaar" di luar negeri.

4. Instruksi presiden kepada pengusaha untuk berkolaborasi mempromosikan revolusi mental, mencakup pemasangan iklan di berbagai media, iklan produk, in-line text, penyediaan fasilitas publik (tempat sampah, fasilitas aktivitas warga di ruang publik).

5. Program dukungan bagi inisiatif pengusaha kecil dan menengah dalam membuka pasar atau sentra yang menjual produk lokal yang inovatif, kreatif dan berkualitas dengan harga terjangkau.

Program Indonesia Kita

1. Program pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman, atlet, dab ilmuwan yang berjaya di tingkat nasional dan internasional.

2. Program perbaikan kurikulum untuk menghasilkan pendidikan yang ditujukan membentuk karakter dengan menyinergikan pendidikan formal, informa dan nonformal, serta menyeimbangkan aktivitas akademik dengan aspek psikomotor dan keterampilan sosial.

3. Program pengembangan kualitas guru.

4. Program kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyaman dan keamanan di ruang publik.

5. Program "*Value Attack*, berupa sosialisasi dengan cara yang menarik dan kreatif tentang nilai-nilai strategis yang penting dalam hidup bermasyarakat seperti: antri, bersih: buang sampah pada tempatnya, anti pungli, dan lain-lain di fasilitas-fasilitas publik di seluruh Indonesia melalui instruksi presiden dan memo kepada kepala daerah serta menggerakkan partisipasi LSM, relawan, Media.
   Bentuk konkritnya adalah penyebaran pesan yang memuat nilai-nilai strategis instrumental dalam beragam bentuk seperti sticker, spanduk, film pendek, film dokumenter, iklan, games, aplikasi komputer, signage, kegiatan publik, *happening arts*, dan *event* olah raga dengan tema revolusi mental di tingkat kabupaten/kota. Pembuatan pesan mengenai revolusi mental dan nilai-nilai strategis instrumental itu dalam beragam media diperlombakan. Bagi pemenangnya disediakan insentif berupa pembiayaan untuk menjalankan program.

6. Sinergi program yang digagas komunitas yang memiliki dampak positif ke dalam program pemerintah.

7. Program stimulasi pembuatan film layar lebar dan miniseri dengan tema revolusi mental. Sebagian dijalankan dalam bentuk hibah yang disayembarakan. Dalam program ini disediakan sponsorship bagi pemenang.
8. Program nonton bersama revolusi mental di layar tancap (sebanyak 500 layar tancap) di kampung/desa.
9. Dialog budaya antara pemerintah dan jejaring komunitas revolusi mental, mencakup komunitas kreatif, ormas, pemuda, pengusaha, tokoh keagamaan, tokoh adat, akademisi, media, polisi, organisasi profesi, sekolah dan lain-lain.
10. Program menguatkan dan revitalisasi budaya maritim di daerah pesisir.

Program Penunjang

1. Peningkatan penelitian dan pengembangan kehidupan sosial budaya. Tujuan untuk mempelajari, memperoleh informasi, serta lesson untuk mengembangkan kebijakan, perundangan, strategi, program dan proyek pembangunan kehidupan sosial budaya di berbagai sektor kehidupan.
2. Advokasi dan sosialisasi mengenai pemahaman kehidupan sosial budaya yang dinamis kepada pemerintah, pengusaha, masyarakat dan semua *stakeholder* melalui cara yang kreatif dan efektif.
3. Pengembangan sistem pemerintahan di berbagai tingkatan termasuk pusat, daerah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public (*good governance*).
4. Pengembangan kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan kehidupan sosial budaya termasuk pengembangan kota modern yang tertata rapi dan konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan terbebas dari berbagai persoalan menahun termasuk macet, banjir, pemukiman kumuh, penyediaan air dan kondisi sanitasi yang tidak memadai.
5. Pengembangan sistem manajemen termasuk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, pencatatan dan laporan dalam penyelenggaraan pembangunan kehidupan sosial budaya.
6. Pengembangan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, media, seniman, budayawan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan *stakeholder* lain dalam menyelenggarakan berbagai program dan proyek kehidupan sosial dan budaya.
7. Pengembangan pilot project pembangunan kehidupan sosial budaya.

Indikator Keberhasilan

Agar Revolusi Mental dapat diukur keberhasilannya, diperlukan indikator-indikator dari pencapaian Revolusi Mental. Sebagai pembangunan sosial, salah satu indikator keberhasilan Revolusi Mental adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang baik. Dari berbagai literatur dan pengalaman di beberapa negara, dapat diperoleh metode pengukuran masyarakat yang baik. Dari Jordan (2010) diperoleh dimensi dari konstruk teoretik masyarakat yang baik sebagai berikut.

1. Hubungan Antar-Manusia: kualitas sosial, keluarga masyarakat dan hubungan interpersonal; sejauh mana masyarakat koheren dan harmonis.
2. Ekonomi: tingkat kemakmuran ekonomi dan daya beli masyarakat; sejauh mana pekerjaan yang bermanfaat dan menawarkan potensi pertumbuhan dan pembangunan.
3. Lingkungan dan Infrastruktur: kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan hidup; sejauh mana lingkungan binaan menyenangkan dan berfungsi dengan baik, serta sejauh mana infrastruktur tersedia dan berfungsi secara efektif dan efisien.
4. Kesehatan: apakah orang-orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang baik dan makanan sehat; apakah pekerjaan, rumah dan lingkungan masyarakat umumnya aman.
5. Keamanan dan Perdamaian: apakah kejahatan rendah dan orang-orang merasa aman di rumah mereka dan di tempat umum; apakah masyarakat dipengaruhi oleh perang atau terorisme.
6. Budaya dan Hiburan: apakah ada budaya yang kaya dan bermanfaat, baik ’budaya tinggi’ maupun ‘budaya populer’; apakah ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi bermanfaat.
7. Spiritualitas, Agama dan Filsafat: apakah ada akses ke ajaran agama dan spiritual dan kesempatan untuk mempraktikkan agama seseorang pilihan; apakah ada akses ke ajaran filosofis dan ide-ide tentang bagaimana menjalani hidup.
8. Pendidikan: apakah ada pendidikan yang memungkinkan orang untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat; apakah pendidikan secara intelektual memperkaya warga.
9. Tata Kelola: apakah ada demokrasi, keadilan dan kebebasan berekspresi; apakah keadilan transparan dan konsisten, dan apakah masyarakat diatur dengan kasih sayang dan kesetaraan.

Ringkasan tentang kategori kunci dan cara mendapatkan data dari indikator masyarakat yang baik disajikan dalam tabel 2.

Kepercayaan Publik terhadap pemerintah juga dapat menjadi salah satu dari indikator keberhasilan Revolusi Mental, terutama terkait dengan program Indonesia Ramah yang hendak mengupayakan peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Berikut

Tabel 2.
Kategori Kunci dan Indikator Masyarakat yang Baik

No	Dimensi dan Kata Kunci	Kategori Indikator Kunci	Cara Mendapatkan Indikator
1	Hubungan antar manusia	Komunitas, perkawinan, integrasi rasial, pengasuhan orang tua, percintaan, pertemanan	Survey
2	Ekonomi	Pemenuhan kebutuhan dasar, Kemakmuran/kekayaan, kemewahan, pekerjaan, perkembangan pribadi	HDI, indeks Kebahagiaan, Survey
3	Lingkungan dan Infrastruktur	Lingkungan alamiah, keberlanjutan lingkungan, lingkungan buatan, transportasi, energi, Komunikasi	Indeks lingkungan hidup yang ada dan data infrastruktur
4	Kesehatan	Kesehatan fisik, kesehatan mental, perlindungan dari serangan/ gangguan, pencehahan kecelakaan, keselamatan, harapan hidup	Riskesdas, Survey, data Pemda
5	Keamanan dan Perdamaian	Kejahatan/kriminalitas, tingkah laku antisosial, terorisme, perang sipil/ konflik horisontal, konflik vertikal, perang	Data polisi, analisis berita di media massa
6	Budaya dan Hiburan	Budaya tinggi, budaya populer, kesenian, hiburan, olah raga, rekreasi, waktu luang	Data pemerintah, survey
7	Spiritualitas, Agama dan Filsafat	Akses dan kebebasan dalam spiritualitas, agama, filsafat	Data pemerintah, survey, analisis berita di media massa
8	Pendidikan	Pendidikan, pengembangan intelektual, pemberdayaan pribadi, penilaian, hak kekayaan intelektual, riset	Data Kemendikbud, survey kepuasan stakeholder, data HAKI, jumlah terbitan ilmiah, jumlah artikel ilmiah, paten
9	Tata Kelola	Kebebasan politik, kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan berpendapat, keadilan, welas asih, kesetaraan	Survey, analisis berita di media massa, laporan masyarakat

ini salah satu alternatif konstruk kepercayaan publik dengan dimensi dan indikatornya yang disarikan dari Osborne dan Gaebler (1996), Nyhan (2000), serta Robbins dan Coulter (2005).

Tabel 3.
Konstruk Kepercayaan Publik: Dimensi dan Indikatornya

No	Dimensi	Indikator
1	Persepsi kesesuaian layanan publik dan harapan publik	Penilaian warga bahwa layanan publik telah sesuai dengan harapan publik
2	Performa layanan publik	Penilaian warga bahwa layanan publik sudah dilakukan secara maksimal
		Penilaian warga bahwa pemerintah sudah berusaha secara maksimal dalam melayani masyarakat
3	Integritas	Penilaian warga pemerintah sudah selaras dalam janji dan pelaksanaan layanan publik
		Penilaian warga bahwa pemerintah tidak pernah terlibat dalam kasus legal yang menyangkut layanan publik
		Penilaian warga bahwa layanan publik sesuai dengan visi-misi pemerintah
4	Kompetensi	Penilaian warga bahwa pemerintah menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam memberikan pelayanan publik
		Penilaian warga bahwa pemerintah menggunakan pengetahuan dan keterampilan interpersonal dalam memberikan pelayanan publik
		Penilaian warga bahwa pemerintah menggunakan jasa ahli dalam menjalankan dan merumuskan layanan publik
		Penilaian warga bahwa mereka merasa terlibat dalam program yang dibuat pemerintah
5	Konsistensi	Penilaian warga bahwa layanan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat diandalkan
		Penilaian warga bahwa layanan publik yang didesain pemerintah sesuai dengan rancangan
		Penilaian warga bahwa pelayanan publik selalu menjamin kualitas terbaik dalam pelaksanaannya
6	Loyalitas	Penilaian warga bahwa pemerintah menunjukkan komitmen melalui layanan publik yang diberikan
		Pemerintah mau mendengarkan suara rakyat melalui kebijakan yang bersifat *win-win solution*
		Penilaian warga bahwa pemerintah menjamin keamanan masyarakat dalam pelaksanaan layanan publik
7	Keterbukaan	Penilaian warga bahwa mereka merasa pemerintah sudah mau terbuka dalam hal informasi yang bersifat publik
		Penilaian warga bahwa pemerintah sudah terbuka mengenai rekam jejak pejabat publik
		Pemerintah bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam merumuskan dan melaksanakan pelayanan publik

Pembangunan sosial berbasis nilai sebagai wujud dari usaha Revolusi Mental Indikator menjadikan penguatan nilai sebagai sasarannya. Untuk mengetahui keberhasilan penguatan nilai strategis instrumental diperlukan indikator dari setiap nilai itu. Tabel ini menyajikan ringkasan indikator dari setiap nilai itu.

Tabel 4.
Indikator Nilai-nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental

No	Nilai	Indikator
1	Kewargaan	Saling menghargai; toleransi; berani mengungkapkan pendapat; taat aturan; mau berbuat yang terbaik untuk masyarakat; dedikasi dan kesetiaan demi keberhasilan bersama; menempatkan kepentingan masyarakat dalam prioritas utama; mengenali kebaikan yang ada pada kelompok lain; aksi komunitas yang mengedepankan kepentingan bersama.
2	Dapat dipercaya	Berterus-terang; berkata sesuai dengan kenyataan; tidak melebih-lebihkan; menolak pemalsuan fakta dari realitas; menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan; menepati janji; berkomitmen dengan fakta-fakta realitas; setia; menampilkan tindakan secara tulus; menyelesaikan tugas dengan baik; menjalankan sumpah jabatan; bekerja profesional; dapat diandalkan sebagai pelayan publik; bersungguh-sungguh dalam bekerja; menjalankan amanat; menunjukkan hasil nyata.
3	Kemandirian	Mengandalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan; berusaha untuk dapat berfungsi lebih baik dalam masyarakat; terdorong untuk terus mengembangkan dan meningkatkan keterampilan hidup dan kompetensi; memperjuangkan kebahagiaan; menjaga keberlanjutan hidup dengan kerja keras; optimalisasi apa yang ada pada diri sendiri; mengambil kendali penyelesaian tugas; mengandalkan diri untuk menyelesaikan tugas; menyadari dan menerima tanggung-jawab penuh terhadap diri sendiri; bekerja dengan baik untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
4	Kreativitas	Selalu berusaha menemukan cara-cara dan solusi baru; berusaha membawa ide yang baru menjadi ada; bergairah dan berkomitmen untuk menemukan ide; alternatif, atau kemungkinan baru; mampu melihat hal-hal dan situasi dengan cara baru dan dari sudut dan perspektif yang berbeda; terbuka pada informasi dan situasi baru; percaya pada pentingnya imajinasi dan seni; menyukai hal dan aktivitas yang bervariasi; mengupayakan peningkatan jumlah produk yang dapat dihasilkan; produktif; menampilkan perilaku kreatif dalam frekuensi tinggi; mengupayakan keunikan jawaban atau solusi dari masalah.

No	Nilai	Indikator
5	Gotong royong	Berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang yang dapat disumbangkannya kepada kebersamaan; menilai bekerja sama akan memberikan hasil yang lebih baik dan efisien dari bekerja sendiri-sendiri; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mencegah terjadinya konflik; berusaha menemukan titik temu di antara pihak-pihak yang bertikai; menghindari pembahasan atau pertentangan untuk hal-hal kecil; mencari hal-hal yang dapat dipertemukan dan dipadukan dari berbagai pihak guna memperoleh hasil yang lebih baik; mendengarkan kata hati dan berusaha memahami orang lain dengan kebaikan dan kekuatannya; tidak mendesak dan tidak memaksa orang lain; mengajak orang untuk saling memahami dan menemukan solusi bersama bagi masalah yang dihadapi; tidak berlebihan dan berusaha menempatkan segala sesuatu sesuai tempat dan porsinya; menghargai pencapaian dan kontribusi orang lain; menghargai keputusan bersama; berusaha untuk membuat keputusan melalui musyawarah untuk mufakat; percaya ada maksud baik orang lain; menghindarkan diri dari prasangka buruk; berkontribusi secara memadai dalam kelompok; menaati kesepakatan bersama; saling percaya; mau melayani dan menerima pelayanan orang lain; berusaha membangun atmosfer yang menyenangkan.
6	Saling menghargai	Menunjukkan kepekaan terhadap apa yang diinginkan dan diharapkan orang lain; mengantisipasi kebutuhan orang lain; merasakan emosi orang lain; menunjukkan kepedulian terhadap orang lain; mau menyimak, mendengarkan, memperlakukan orang lain sebagai pihak yang setara dengannya walaupun berbeda; mendukung dan menenangkan orang lain; membuat orang lain merasa nyaman; membantu orang lain menghilangkan emosi negatif; memiliki kata-kata yang baik untuk setiap orang; membuat orang lain merasa diterima; menyediakan waktu untuk berada bersama orang lain; berusaha memahami orang lain dan kejadian menggunakan berbagai perspektif; merasa tak nyaman melihat orang lain menderita; merasakan dan memahami penderitaan orang lain; menilai orang lain penting; berusaha memahami alasan tindakan orang lain; merasa terhubung dengan orang lain.

Semua indikator tersebut masih perlu diperhalus dan dipertajam agar dapat secara operasional dikenali dan diukur. Proses penghalusan dan penajaman itu masih berlangsung hingga tulisan ini dibuat.

Penutup

Revolusi Mental melalui pembangunan sosial merupakan upaya yang tidak mudah dan keberhasilannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Agar rencana strategis Revolusi Mental dapat dijalankan ada prasyarat yang perlu dipenuhi. Revolusi ini harus dimaknai dan dijalankan sebagai usaha bersama. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu penerimaan terhadap nilai-nilai yang akan ditanamkan pada masyarakat luas. Sosialisasi, promosi dan fasilitasi penerimaan nilai-nilai strategis instrumental di masyarakat Indonesia sangat perlu dilakukan. Lebih jauh lagi, perlu diusahakan gerakan sosial nasional Revolusi Mental yang didukung oleh jaringan kerja sama yang terpadu antar organisasi masyarakat sipil seperti lembaga keagamaan, LSM, ormas, bahkan setiap partai politik, dan sebagainya.

Komitmen penuh dari pemerintah Indonesia dengan menampilkan *political will* dan keteladanan bagi warga negara juga menjadi syarat dari terlaksananya Revolusi Mental. Komitmen itu perlu dibarengi dengan kesiapan pemerintah untuk melakukan perombakkan kebijakan, peraturan, sistem kelembagaan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang menghambat perkembangan nilai-nilai itu (perubahan struktural).

Agar Revolusi Mental berlangsung secara holistik dan sistemik, diperlukan kelembagaan yang bersifat non-sektoral (*non-departementa*l) berupa konsorsium beranggotakan birokrat, pengusaha, masyarakat sipil, akademisi yang secara khusus diberi tugas membantu Presiden untuk menggerakkan, memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan revolusi mental (menyiapkan segala instrumen yang diperlukan (penajaman konsep, kebijakan, peraturan, melakukan kajian dan penelitian, mengembangkan instrument pengukuran indikator, dan sebagainya).

Revolusi Mental perlu dimaknai sebagai landasan pembangunan di segala sektor kehidupan untuk menjamin keberhasilan membangun bangsa Indonesia yang lebih maju. Sekali lagi, Revolusi Mental tidak hanya mencakup individual saja, melainkan mencakup semua aspek sistem sosial. Revolusi Mental merupakan usaha untuk menghasilkan perubahan kebudayaan, dalam arti perubahan rasa, cipta, dan karya yang terintegrasi dalam semua sektor kehidupan. Perubahan itu harus dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam politik, mandiri dan kreatif dalam ekonomi, dan berkarakter dalam kebudayaan. Agar perubahan dan dampak positifnya menjadi nyata, setiap warga perlu terlibat, melibatkan diri dan dilibatkan. Perubahan dan perkembangan selalu membutuhkan usaha. Tak ada perubahan, baik secara fisikal maupun intelektual, tanpa usaha, tanpa kerja. Perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia membutuhkan usaha sebanyak

mungkin orang Indonesia. Jika kita ingin Indonesia menjadi lebih baik, tumbuh dan berkembang, maka kita harus terlibat di dalamnya, berusaha mewujudkannya. Tanpa keterlibatan, perubahan dan perkembangan itu hanya angan-angan. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan tentang ini, "*You must be the change you wish to see in the world*."

Daftar Acuan

Allport, G.W. (1937). *Personality: A Psychological Interpretation*. New York: Holt.

Allport, G.W. (1961). *Becoming: Basic Consideration for a Psychology of Personality*. New Haven: Yale University Press.

Bellah, R.N., Madsen, R., Sullivan, W.M., Swidler, A., & Tipton, S.M. (1992). *The Good Society*. New York: Vintage Books.

Jordan, P.W. (2010). The Good Society Framework–Understanding Quality of Life. *Social Indicators Network News (SINET), International Society for Quality-of-Life Studies,* October 2010.

Nyhan, R.C. (2000). Changing the paradigm: Trust and its role in public sector organizations. *Jurnal American Review of Public Administration,* March 2000, Vol. 30, No. 1: 87-109.

Osborne, D. & Gaebler, T. (1996). *Mewirausahakan Birokrasi* (terj. Abdul Rasyid). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.

Rand, A. (1967|1966). *Capitalism: The Unknown Ideal* (paperback 2nd ed.). New York: Signet.

Robbins, S.P. & Coulter, M. (2005). *Management*. Eight Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Rokeach, M. (1973). *The nature of human values*. New York: Free Press.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 25) (pp. 1-65). New York: Academic Press.

Vernal, G.G. (1918). *Character As An Integral Mentality Function*. New York: National Committee For Mental Hyegiene, Inc.

Wirutomo P. (2013). Mencari makna pembangunan sosial: Studi kasus sektor informal di kota Solo. *Jurnal Sosiologi Masyarakat,* Vol. 18, No. 1: 101–120.

Wirutomo P. (2014). Sociological reconceptualization of social development: With empirical evidence from Surakarta City, Indonesia. *Asian Social Science,* Vol. 10, No. 11: 283–293.

2
Memaknai Konsep Revolusi Mental Jokowi dalam Pendekatan Psikologi

Hamdi Muluk

Konsep revolusi mental ala Presiden ketujuh RI Ir. Joko Widodo (akrab dipanggil Jokowi) pertama kali dilontarkan dalam sebuah kolom opini di Harian Kompas tanggal 10 Mei 2014, ketika yang bersangkutan baru memulai awal masa kampanye sebagai calon presiden yang akan bertarung melawan Prabowo Subianto. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah artikel opini di harian ini mendapat respons balik yang sangat banyak. Menurut penanggung jawab opini di harian tersebut, tidak kurang dari 300-an artikel tanggapan yang masuk mengomentari artikel Joko Widodo ini, walaupun hanya beberapa yang dimuat oleh redaksi sebagai tanggapan balik terhadap artikel ini. Mendadak sontak, artikel ini mengundang pelbagai macam tanggapan baik yang memuji, mengelaborasi, dan tentu saja yang mengkritik dengan pedas, bahkan tidak jarang juga yang mencaci-maki, terutama di media sosial dan di internet. Dengan kata lain bisa dikatakan artikel ini memang fenomenal dan layak diperbincangkan sampai saat ini. Sampai saat ini gagasan tentang revolusi mental tersebut bahkan dijadikan salah satu program pembangunan oleh pemerintahan sekarang.

Kritik yang sepertinya kurang penting adalah komentar-komentar yang menyangsikan bahwa seorang Joko Widodo—yang notabene bukan intelektual yang terampil menulis opini—menulis sendiri artikel tersebut. Belakangan, dengan santun Jokowi mengatakan bahwa penulisan artikel tersebut memang dibantu tim, tapi keseluruhan gagasan berasal dari beliau sendiri. Kecaman yang lain, ada yang menuduh Jokowi melakukan "plagiat", karena di hari yang sama di koran Sindo terbit artikel dengan judul yang sama oleh Romo Beny Susastyo, tetapi dengan kandungan isi yang berbeda sama sekali. Karena memang tuduhan ini tidak tepat, perdebatan mengenai kesamaan judul ini tidak lagi mendapat respons dari publik. Respons berikutnya dari publik justru berkembang menjadi lebih konstruktif mempersoalkan aspek-aspek substantif yang memang perlu dibicarakan.

Kritikan yang cukup mendasar adalah soal penggunaan dan pertangungjawaban konsep "Revolusi Mental" itu sendiri. Apakah terminologi ini misalnya cukup *valid* secara akademik? Apakah terma (*term*) ini sudah mengandung kejelasan maksud yang bersifat jelas (*clear*), distingtif dan merujuk (*denotatif*) kepada suatu hal yang sama? Apakah konsep ini masih bersifat ambigu? Apakah konsep ini hanya sekedar sebuah slogan atau justru mengandung "gagasan-gagasan besar" yang akan mempunyai implikasi akademik (teoretik) dan praktis (kebijakan) yang luas?.

Kritikan pertama soal terminologi revolusi mental itu sendiri, kalau kita telusuri berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah soal peristilahan ilmiah *(scientific term)* yang pembakuannya diturunkan mulai dari dasar filosofis, paradigma keilmuan dan teoretik yang digunakan (*Theoretical approaches/Paradigm*), kemudian diturunkan lagi menjadi konsep teoretik (*Theoretical concept*), kemudian diturunkan lagi menjadi semacam *variable* atau konstrak (*Constructs*), terlihat bahwa istilah ini memang tidak dijumpai dalam khasanah ilmiah. Implikasinya; Anda jangan berharap bisa meneliti *variable* "revolusi mental" itu begitu saja sebagai salah satu dari *variable* penelitian anda, terlepas dari disiplin mana pun yang akan anda pakai, apakah itu Sosiologi, Antropologi, Politik apalagi Psikologi.

Penelusuran dengan memakai database ilmiah *(Proquest Social Sciences, Informit, Social Sciences Citation Index, PsycInfo* dan *Google scholar*) menghasilkan cuma satu *entry* dalam bahasa Inggris dengan *term* yang lengkap *'mental revolution'* seperti termuat dari judul artikel Jokowi: Revolusi mental. Istilah itu cuma digunakan untuk sebuah judul buku yang dieditori oleh Daniel Nelson (1992) yang berjudul: *A mental revolution: Scientific management since Taylor*. Buku ini berisi sembilan bab *(chapter)* oleh penulis yang berbeda-beda, dimaksudkan untuk mengenang *(a tribute to)* bapak Ilmu Manajemen F.W. Taylor yang meninggal tahun 1915. Daniel Nelson pada bab pertama memperkenalkan konsep *scientific managemen*t dari F.W. Taylor yang intinya berisi penerapan prinsip-prinsip ilmiah terutama soal; efisiensi kerja, soal buruh, aturan-aturan kerja, budaya kerja yang kita kenal sebagai ilmu manajemen modern sekarang dalam konteks industri di abad ke 20. Anda pasti tahu Frederick Winslow Taylor adalah penemu prinsip yang disebut sebagai *"time and motion studies*". Saya tidak akan membahas panjang lebar konsep F. W. Taylor, bagi yang berminat tersedia banyak bacaan tentang ini, paling tidak bisa membaca buku Nelson (1922). Ilustrasi di atas cuma untuk menunjukkan bahwa istilah revolusi mental (kalau dalam bahasa Inggris *"Mental Revolution"*) bukanlah istilah yang baku akademik baik sebagai sebuah pendekatan, konsep teoretik, apalagi variabel yang utuh (utuh dalam artian tidak mempunyai makna yang beragam), baik itu dalam ilmu terkait yang agak dekat dengan istilah tersebut, seperti: Sosiologi, Antropologi, Manajemen, dan Psikologi, maupun

ilmu yang agak jauh seperti Politik, Teknik dan Ilmu alam lainnya. Oleh karena itu kita perlu menelaah terlebih dahulu secara deskriptif konsep "revolusi mental" ala Jokowi ini tersebut langsung dari artikel yang dimuat di Opini Koran Kompas tanggal 24 Mei 2014 tersebut, untuk kemudian baru kita tafsir sesuai dengan kebutuhan.

Konsep Revolusi Mental Jokowi

Untuk memudahkan memahami konsep revolusi mental yang ditawarkan oleh Jokowi, saya menyajikannya secara skematis dalam gambar 1 berikut. Tesis utama yang ingin disampaikan Jokowi adalah usaha membangun Bangsa *(Nation Building)* seperti yang diamanatkan oleh UUD 45 yaitu; masyarakat yang adil makmur, sejahtera, berkeadilan sosial hanya dapat dicapai dengan terlebih dahulu membangun karakter bangsanya *(Character building)*. Usaha membangun karakter ini tidak hanya bisa dilakukan dengan cara transformasi kelembagaan semata, namun justru yang terpenting adalah transformasi dalam kebudayaan, cara berperilaku, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai.

Jokowi memulai pembahasannya dengan mengemukakan apa yang sudah terjadi di Indonesia pasca reformasi (tahun 1998-2014). Menurut Jokowi, kita sudah mengalami banyak perubahan atau transformasi dalam aspek struktural atau kelembagaan (saya menggambarkannya di bagian atas dalam bagan di gambar.1). Perubahan ini menurut

Gambar 1. Bagan Konsepsi Revolusi Mental Jokowi

Jokowi baru menyentuh aspek "fisik" dari keseluruhan proses transformasi Indonesia yang kita inginkan. Menurut Jokowi kita telah melakukan banyak perombakan institusional misalnya: mengamandemen UUD, menambah undang-undang baru, membuat banyak lembaga baru (KPK, DPD, KY, dan banyak lembaga lainnya), otonomi daerah, dan mengadakan pemilu yang demokratis. Namun hal ini menurut Joko Widodo baru sebatas perubahan institusi. Walaupun ekonomi tumbuh (tetapi ketimpangan pendapat juga besar), namun perilaku korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, sifat-sifat rakus, sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat-sifat oportunis masih merajalela. Hal ini membuat Jokowi mempertanyakan, "Apa yang salah dengan bangsa ini?"

Lebih tepatnya, Jokowi menulis seperti ini:

> *"..Namun, di sisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini? Pada bagian lain ia menegaskan: "Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan" (KOMPAS, 10 Mei 2014 hal 6).*

Jika memakai bagan di gambar 1 diatas, bagian bawah yaitu transformasi dalam paradigma, *mindset*, cara pandang, perilaku, nilai-nilai dan bahkan budaya—menurut Jokowi—belum kita lakukan secara serius. Padahal, aspek inilah menurut Jokowi yang lebih berperan dalam membangun karakter bangsa, yang pada akhirnya akan berkontribusi penting dalam membangun bangsa (*Nation Building)* secara keseluruhan. Untuk itu Jokowi menawarkan perubahan yang cukup radikal, dan oleh karena itu ia menamakannya sebuah "revolusi". Lebih tepatnya Jokowi mengatakan sebagai berikut:

> *"..Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan* ***revolusi mental*** *menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan..... "Penggunaan istilah "revolusi" tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah" (KOMPAS, 10 Mei 2014 hal 6).*

Dalam artikel di *Kompas* tersebut, Jokowi juga secara eksplisit mengatakan akan menggunakan kerangka ideologi Trisakti dari Bung Karno sebagai "roh" dari gerakan revolusi mental tersebut. Tiga pilar dari konsep Trisakti adalah: 1) Indonesia yang berdaulat secara

politik, 2) Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan 3) Indonesia yang berkepribadian secara sosial budaya.

Dengan melakukan analisa deskriptif terhadap konsep Revolusi Mental Jokowi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, apa yang dimaksud Jokowi dengan konsep "Mental" ternyata tidak hanya sebatas konstrak psikologis yang bersifat dunia "dalam" *(intangible)*. Kata-kata Mental (baik dalam bahasa Inggris, maupun Indonesia) memang berasal dari kata Latin, *mens*, yang artinya kurang lebih jiwa atau berkaitan dengan jiwa. Istilah mental acapkali memang dikaitkan dengan disiplin ilmu Psikologi yang diberi mandat untuk mempelajari tingkah laku manusia (*Human Behavior*), khususnya *individual behaviour.* Tingkah laku itu bisa yang tampak (*tangible, observable*) seperti; berjalan, berkata, minum, berpakaian, memukul dan sebagainya, maupun yang tidak tampak mata (*non-observable*), seperti: berpikir, merasa, bersikap. Konstruk mental itu awalnya memang dimaksudkan kepada seorang manusia (individu) tertentu saja. Namun Sosiologi dan Antropologi kemudian mengembangkan istilah "Mentalitas" untuk merujuk kepada karakteristik mental sekelompok orang tertentu, kebudayaan atau masyarakat tertentu yang mencakup nilai-nilai *(values),* norma, sikap, cara pikir, sifat, pola perilaku serta orientasi tindakan. Dalam hal ini, konsep mental sudah bukan lagi *"property"* individu, tetapi sudah meluas kepada kelompok dan masyarakat. Kita misalnya mengenal istilah: "mentalitas petani", "mentalitas pengusaha", "mentalitas priyayi", "mentalitas pegawai", "mentalitas bangsa", "mentalitas bobrok" dan seterusnya.

Tampaknya bagi Jokowi istilah Mental dipakai untuk "menampung" segala hal yang berkaitan dengan cara pandang dan pola pikir, sifat-sifat, *mindset*, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku, baik itu individu, kelompok, dan masyarakat luas. Dengan istilah Mental seperti yang dimaksud diatas, tidak ada lagi dikotomi antara dunia batin dan dunia ragawi. Tindakan kasat mata selalu dilandasi oleh suatu daya-daya mental di dalamnya. Sebaliknya daya-daya mental tadi tidak bisa terbentuk tanpa adanya pengalaman fisik. Saling memengaruhi antara konstrak mental dan fisik (ragawi) adalah keniscayaan. Bahwa yang ingin ditransformasikan oleh Jokowi adalah sebuah konstrak besar yang bernama "Mental", maka dalam konteks gagasan Jokowi kali ini, membeda-bedakan dan menarik batas secara tegas antara yang mana yang memang merupakan struktur sosial, mana yang merupakan perilaku sosial, dan yang mana yang merupakan kultur sosial tampaknya tidak terlalu relevan dan sengaja dibikin melebur serta saling terkait satu sama lainnya. Titik temu antara ketiga hal ini mungkin akan terjembatani dengan memahami kultur atau mentalitas tadi sebagai sebuah kumpulan cara pandang, pola pikir, sifat-sifat, *mindset*,

nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku baik itu Individu, kelompok, dan masyarakat luas (bangsa).

Kedua, bagi Jokowi inti dari konsep revolusi mental itu kurang lebih adalah suatu usaha transformasi untuk mengubah sebuah keadaan lama yang kita yakini sebagai sesuatu yang negatif (buruk) menjadi suatu tatanan yang lebih baik. Apa yang ingin ditransformasikan? Ya mentalitas dalam pengertian utuh di atas. Dengan begitu, sebenarnya secara tidak langsung kita berbicara tentang suatu gagasan perubahan sosial dalam arti yang lebih luas.

Ketiga, Jokowi tidak bermaksud melakukan perubahan itu secara evolutif, alamiah, dan tidak terencana. Dengan pemakaian istilah "Revolusi", perubahan atau transformasi yang dinginkan Jokowi adalah suatu perubahan yang berlangsung menyeluruh dan sampai keakar-akarnya (radikal), berlangsung dalam waktu yang cepat dan direncanakan secara sistematis, terukur dan terencana.

Keempat, bagi Jokowi revolusi mental ini harus dijadikan sebuah gerakan nasional yang bersifat masif, yang prosesnya harus mulai dari atas ke bawah *(top-down process)*, namun sekaligus juga memerlukan partisipasi masyarakat yang bersifat bawah ke atas *(bottom-up process)*. *Top-down* dalam hal ini berarti bahwa gerakan nasional ini harus mempunyai kerangka hukum dan kebijakan yang jelas, serta dianggarkan dalam pos negara. Sekali dicanangkan gerakan ini harus menjadi gerakan nasional yang terus menerus, berkesinambungan.

Kelima, lokus dan atau domain perubahan atau transformasi yang diinginkan bisa meliputi individu, kelompok, golongan, institusi dan pada akhirnya masyarakat luas (bangsa Indonesia). Intervensi sosial dalam hal ini harus secara taktis merancang perencanaan strategis untuk menyasar proses transformasi di setiap tingkatan, lokus, dan domain supaya bisa berjalan secara tepat sasaran.

Konsep Revolusi Mental Jokowi dalam Pendekatan Psikologi

Lantas bagaimana kita memaknai konsep revolusi mental ala Jokowi dalam konteks Ilmu Psikologi?

Barangkali harus digarisbawahi dulu, bahwa gagasan Jokowi tentang revolusi mental ini memang berada pada tataran praktis, bukan pada tataran teoretik-konseptual. Jokowi memang terkesan memakai konsep-konsep teoretik tertentu, seperti misalnya konsep

"mental", "kebudayaan", "*mindset*", "transformasi", "perubahan sosial" dan sebagainya, namun pemakaian konsep-konsep teoretik tidak menjadi maksud utama gagasan revolusi mental ini. Untuk selanjutnya tugas masing-masing disiplin ilmu lah mengurai konsep-konsep teoretik (untuk konteks penelitian ilmiah misalnya harus diturunkan lagi menjadi variabel atau konstrak yang lebih spesifik).

Jika melihat dari maksud, isi dan kandungan utama dari gagasan revolusi mental ini dan kita persandingkan dengan konsep-konsep teoretik—terutama dari perspektif ilmu-ilmu sosial—maka setidak-setidaknya ada dua interpretasi utama terhadap konsep Revolusi mental Jokowi tersebut.

Pertama, bagian terbesar dan terutama inti dari gagasan Revolusi mental Jokowi ini dapat ditafsirkan sebagai tawaran dan sekaligus tantangan terhadap teori-teori perubahan sosial *(social change theories)*. Kelompok-kelompok teori-teori perubahan sosial biasanya memang berinduk pada Sosiologi sebagai paradigma teoritis yang utama. Namun suatu perubahan sosial mencakup juga didalamnya perubahan pada aspek-aspek lain, seperti perubahan institusi (kelembagaan) baik itu institusi politik, hukum, sosial, budaya, dan juga tentunya perilaku. Dengan demikian membicarakan perubahan sosial juga akan mengundang cabang disiplin ilmiah lain seperti: ekonomi, politik, hukum, antropologi dan psikologi sosial.

Terdapat banyak definisi dan pengertian tentang perubahan sosial, namun tidak terlalu perlu kita membahas satu persatu. Definisi yang sederhana misalnya bisa anda dapatkan dalam buku klasik perubahan sosial dari Zaltman (1974), yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan dalam struktur dan fungsi dari unit sosial atau sistem sosial. Secara umum perubahan sosial dapat dimaknai sebagai perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan, struktur, dan sistem sosial lainnya. Perubahan ini pada umumnya akan diikuti juga dengan perubahan pada cara masyarakat berperilaku, atau pada kultur masyarakat yang bersangkutan. Banyak kelompok-kelompok teori sosial yang dipelajari di bawah pendekatan Sosiologi, Ekonomi politik, Antropologi dan sebagian Psikologi sosial. Beberapa pendekatan teoretik yang terkenal Di antaranya 1) Teori-teori sosial klasik (teori evolusi, Max Weber, Smelser, Durkheim, Parson, Rostow, Coleman), 2) Teori modernisasi (Alex Inkeles, David McClellad, Robert N Bellah), 3) Teori dependensi Klasik (Dos Santos, Teori ketergantungan Amin). Bagi yang ingin mengetahui teori-teori ini lebih dalam bisa membaca Alvin Y. So. (1990), Suwarsono & So, A.Y (1991).

Terkait perubahan sosial yang dalam tradisi ilmu-ilmu Makro (Sosiologi, Antopologi, Politik, Ekonomi) di mana kelompok disiplin ilmu ini lebih mendekatinya

dalam perubahan pada struktur, maka psikologi (mungkin lebih dekat ke psikologi sosial) akan memfokuskannya pada perubahan dalam cara berperilaku atau pada aspek kultur (terutama perubahan pada nilai-nilai). Namun harus dipahami juga bahwa antara faktor kultur dan struktur saling terkait satu sama lain. Manusia berperilaku tidak bisa dilepaskan dari konteks (atau struktur) di mana ia berada. Faktor struktur akan menentukan juga (di luar faktor *personality*) bagaimana manusia berperilaku. Sebaliknya perubahan pada cara berperilaku, cara merasa, cara berpikir, atau perubahan dalam sistem nilai pada akhirnya juga akan mendorong terjadinya perubahan pada struktur. Dalam cara pandang seperti ini maka psikologi yang berbicara tentang perubahan sosial (*the psychology of social change*) perlu meluaskan spektrum pembahasannya kepada aspek kebijakan (*policy*). Perubahan struktur hanya dimungkinkan kalau ada perubahan pada kebijakan sosial (*social policy*). Dalam hal ini psikologi harus mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan temuan-temuan dalam psikologi ke dalam kebijakan sosial (*social policy*) yang berimplikasi kepada terjadinya perubahan dalam struktur (Thomas & Robertson, 1992).

Selain psikologi sosial dan psikologi politik sebenarnya ada cabang psikologi yang meluaskan spektrum kajiannya kepada perubahan sosial, yaitu psikologi komunitas (*community psychology*) (Thomas & Veno, 1992; Schneiderman, 1988). Psikologi komunitas akan memfokuskan perhatiannya pada perubahan perilaku dalam lingkup komunitas tertentu, tempat di mana perubahan sosial ke arah lingkup yang lebih luas bisa dimulai. Psikologi komunitas bermaksud menciptakan atau mengubah sistem sosial dengan fokus utama pencapaian tatanan yang lebih baik tingkat komunitas berbasis pemenuhan kesejahteraan (*wellbeing*). Dalam konteks perubahan sosial yang dimaksud dalam pendekatan psikologi sosial, psikologi politik dan psikologi komunitas ini, perubahan sosial lebih difokuskan pada perubahan yang direncanakan (*planned social change*) dengan menyasar kepada perubahan di tingkat pola pikir (*changing mindset*), sikap-sikap (*changing attitudes*), nilai-nilai (*changing values*) dan perubahan kebiasaan-kebiasaan (*changing habit*) dan perilaku (*changing behavior*) dari individu-individu, kelompok dan masyarakat.

Menyangkut topik perubahan sosial dengan kata kunci perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*) dalam database penelitian psikologi di PsycInfo, penelusuran per 1 Februari 2015 menemukan 4611 *entry*. Dari semua topik *entry* itu tidak semuanya selalu relevan dengan variabel-variabel psikologis. Penyempitan dengan menggunakan kata kunci perubahan perilaku *(change of behavior)* hanya menghasilkan artikel sekitar 960. Dari *entry* sebanyak itu kurang lebih 30% didominasi oleh penggunaan *Theory of Planned behavior* dan atau *Theory of reasoned action* dari Fishben & Ajzen (1975). Riviu terkini tentang perkembangan teori ini bisa dilihat di Ajzen (2012). Anda juga dapat

membaca Hardeman, *et al* (2002) tentang riviu mengenai seberapa jauh penerapan teori-teori *Planned behavior* untuk melakukan intervensi perubahan perilaku (*behaviour change interventions*) dalam pelbagai bidang, mulai dari kesehatan, problem sosial, olah raga, transportasi, dan sebagainya.

Paradigma lain yang sering dipakai untuk melakukan intervensi perubahan perilaku dalam rangka mengusahakan perubahan sosial yang direncanakan adalah kelompok teori *Social Cognitive Model* (untuk riviu lihat; Rhodes, R.E., & Mark, R, 2012). Kelompok teori ini berasumsi bahwa perubahan perilaku dapat dilakukan dengan cara *modelling* tingkah laku orang lain, membangkitkan motivasi dan menimbulkan keyakinan *(behavioral efficacy)* bahwa setiap perubahan akan bisa mempunyai konsekuensi yang menyenangkan dan sekaligus menghindarkan konsekuensi negatif. Termasuk juga dalam kelompok teori ini paradigma seperti *Health belief model* (HBM) dan *Self determination theory* (SDT).

Ajakan bagi psikologi untuk mulai "ke luar" dari sekedar ranah individual kepada ranah yang lebih besar, yaitu kelompok dan bahkan masyarakat (*societal*) banyak disuarakan oleh para peneliti di bidang perubahan sosial ini (Thomas & Veno, 1992; Breakwell & Lyons, 1996; Sharma, & Monteiro, 2016; Schneiderman, 1988; Liu, 2014; Liu & Bernardo,2014; Schneider & Stokols, 2009), namun tetap melibatkan variabel-variabel psikologi (seperti; kognisi, emosi, nilai-nilai dan perilaku) dalam analisis dan model-model penelitiannya. Bahkan dalam hal ini bisa dicatat tokoh-tokoh seperti Bronfenbrenner (1992) juga menggunakan pendekatan yang lebih makro dalam model perkembangan manusia (*human development*).

Menyangkut perubahan sosial yang direncanakan ini (*planned social change*) ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan. Pertama, perubahan sosial selalu mengandung kemungkinan konsekuensi yang menyenangkan (kemajuan, prestasi, dan sebagainya) ataupun yang tidak menyenangkan (trauma, pengorbanan, dll). Semua strategi perubahan harus mencoba memaksimalkan konsekuensi positif dan menekan sesedikit mungkin konsekuensi negatif. Kedua, perubahan sosial harus dikomunikasikan atau disosialisasikan sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengerti mau kemana dan bagaimana arah perubahan tersebut. Ketiga, lokus dari mana perubahan (misalnya: individual, keluarga, kelompok, komunitas dan naik sampai ke *level* masyarakat) harus diindentifikasi dengan jelas. Keempat, identifikasi ini akan berkaitan dengan strategi apa (misalnya; kampanye, persuasi, *social marketing*, gerakan sosial, perubahan organisasi, penggunaan medial sosial, kesenian, perundang-undangan, dan sebagainya) yang akan digunakan sebagai *tools* untuk perubahan sosial tersebut. Kelima, peran pemimpin *(leader dan leadership)* dan pelopor

atau agen perubahan (*change agent*) menjadi penting supaya perubahan bisa dimulai dan dijaga keberlangsungannya (*sustainability*).

Dengan berpegang kepada lima asumsi di atas, maka terlihat banyak peran yang bisa dimainkan psikologi terkait hal di atas. Anda bisa membaca banyak literatur seputar perubahan sikap (*attitudes change*)—yang terkini—bisa dibaca karya Petty & Briñol (2015). Anda juga bisa membaca bagaimana kemajuan suatu bangsa (misal: kebahagiaan, modernisasi) berkaitan dengan transformasi atau perubahan nilai-nilai. Anda bisa membaca karya Inglehart, *et al.* (2008) dan Wezel (2013) tentang *survey* dunia (*word surveys*) mengenai perubahan nilai-nilai yang dialami bangsa-bangsa di dunia. Dalam konteks organisasi anda pasti kenal bahwa perubahan organisasi (*organizational change*) dimulai dengan mengubah atau memperkenalkan budaya organisasi (*organizational culture*) yang baru (lihat; Cameron & Quinn, 2011). Sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan menjadikan nilai-nilai: integritas, kejujuran, komitmen pada kesempurnaan *(excellency),* kerja keras, dan inovasi sebagai nilai utama *(core values)* dari perusahaan. Nilai-nilai ini harus dicoba untuk diinternaliasi dalam praktik kerja sehari-hari. Kita juga harus bisa membayangkan bahwa dalam lingkup negara internalisasi nilai-nilai utama sebuah bangsa (*core values of the nation*) juga harus dirumuskan. Psikologi sangat bisa urun rembuk dalam mengemukakan pelbagai macam strategi untuk mengubah keyakinan (*beliefs*), nilai-nilai (*values*), sikap-sikap (*attitudes*) dan bahkan perilaku (*behavior*), Di antaranya semacam *cognitive strategy* (kampanye, persuasi, *counter-beliefs,* konseling, tutorial, reedukasi, dll), atau strategi *emotive* (*rational emotive therapy, The behavioral affective associations model,* dll) dan atau strategi modifikasi perilaku. Penelusuran dengan menggunakan database Psycinfo setidak-tidaknya menemukan lebih dari 9.000-an artikel tentang psikologi perubahan sikap, perilaku dan kebiasaan-kebiasaan. Dengan kata lain sebenarnya Psikologi bisa banyak punya berkontribusi dalam rangka mensukseskan gerakan "Revolusi mental" ini dengan menganggap bahwa hakikat revolusi mental sesungguhnya adalah melakukan perubahan sosial lewat perubahan keyakinan-keyakinan *(beliefs),* nilai-nilai (values), sikap-sikap *(attitudes)* dan kebiasaan-kebiasaan *(habits)* dan perilaku *(behavior).* Semuanya ini sebenarnya ranah ilmu psikologi.

Tafsiran kedua tentang gagasan revolusi mental ini adalah: konsepsi revolusi mental sebagai teori pembangunan *(developmental theory)* atau model/strategi pembangunan. Pertanyaan penting yang sering diajukan adalah apa saja yang menjadi indikator pencapaian pembangunan? Apakah cukup dengan mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi atau fisik (seperti: mall, jalan raya, bangunan) semata? Bagaimana pembangunan kehidupan sosial budaya, perilaku sosial? Pertanyaan penting kedua adalah: dengan memakai

kapital atau modal *(capital)* apa sebuah pembangunan negara dilakukan? Model-model pembangunan yang klasik pada umumnya melihat kepada kapital uang (*financial* atau *economic capital*), atau teknologi (*technological capital*) atau sumber daya alam (SDA) yang bersifat fisik sebagai modal pembangunan, dan tentu saja indikator pembangunan akan diukur dengan pencapaian aspek-aspek fisik tersebut. Revolusi mental yang ditawarkan Jokowi seakan ingin membalik paradigma pembangunan dengan melandaskan pada asumsi bahwa model-model pembangunan ke depan akan lebih banyak mengandalkan pada usaha pengkapitalisasian modal sosial, budaya dan modal psikologis.

Modal fisik (uang, barang, material, teknologi atau SDA) memang perlu ada pada taraf tertentu untuk membangun suatu bangsa, namun ini saja tidak cukup. Para ahli sosial belakangan ini, terutama Di antaranya Robert Putnam (Putnam, 2001) melihat bahwa kemajuan suatu bangsa ternyata juga lebih banyak ditentukan oleh modal sosial *(social capital)* dalam bentuk ikatan-ikatan sosial yang saling mempercayai (*social bonding* dan *social trust*). Fukuyama (1996) sebelumnya sudah mengatakan bahwa kepercayaan *(trust)* itu adalah sesungguhnya hakikat dari sejarah dan kemanusiaan. Pergulatan sejarah adalah sejarah membangun rasa percaya *(trust)*. Sebuah bangsa yang kehilangan rasa saling percaya tinggal menunggu kehancuran. Bank dunia kemudian mengadopsi gagasan tentang modal sosial ini sebagai alternatif paradigma pembangunan di dunia (laporan bisa dilihat di kertas kerja Christiaan & van Bastelaer, 2001).

Pada sisi lain pembangunan juga perlu mengembangkan apa disebut Bourdieu (1986) sebagai modal atau kapital budaya (*Cultural capital*). Bordieu membedakan antara kapital fisik (terutama kapital ekonomi, atau sesuatu yang bisa ditranfser ke dalam bentuk uang) dengan kapital "non fisik" yang ia sebut sebagai modal budaya (*Cultural capital)* yang bersifat lebih luas menyangkut pengalaman hidup, nilai-nilai, cara berperilaku. Secara lebih konkrit misalnya Bordieu beranggapan pendidikan *(educational system)* termasuk di dalam modal budaya yang ia maksud. Membangun negara melalui strategi modal budaya ini salah satunya adalah dengan cara membangun sistem pendidikan. Menarik untuk menyimak kajian empiris Kim & Kim (2009) di Korea Selatan dengan memakai konsep Bourdieu ini. Temuan mereka memperlihatkan bahwa modal budaya berkaitan dengan tingkat kebahagiaan *(happiness)* dan *psychological well-being* warganya. Temuan mereka ini sebagai bukti bahwa modal budaya adalah unsur penting untuk kemajuan Korea Selatan.

Pada sisi yang lebih mikro, para psikolog mengembangkan kapital lain yang disebut sebagai modal psikologis (*Psychological capital*). Modal psikologis *(psychological capital)* adalah konsep yang dikembangkan peneliti dari *University of Nebraska's Gallup Research Center* (Fred Luthans, Bruce Avolio, Carolyn M. Youssef). Teori ini terinspirasi dari gerakan

Psikologi positif yang banyak berfokus kepada pengembangan aspek-aspek positif dari manusia ketimbang berbicara tentang gangguan-gangguan mental atau aspek "negatif" dari diri manusia. Kapital (atau modal) psikologis ini (sering disingkat sebagai PsyCap) tadinya dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku poisitif di konteks organisasi. Ada empat konstrak besar yang menjadi modal atau kapital psikologis, yaitu: harapan (*hopes*), efikasi diri (*self efficacy*), optimisme (optimism), dan ketangguhan (*resiliency*) (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007; Luthans & Youssef, 2004). Tesis dari teori ini adalah perubahan organisasi ataupun mungkin mengubah keadaan sosial yang lebih besar—pada intinya—adalah dengan memperkuat modal atau kapital psikologis ini. Kunci dari transformasi adalah dengan membangkitkan harapan, efikasi diri, optimisme dan daya lentur (*resiliency*). Modal ini yang seharusnya diperkuat oleh sebuah organisasi untuk menjadi sebuah organisasi yang tangguh. Perkembangan dan aplikasi konsep kapital psikologis ini tampaknya cukup booming dalam dunia penelitian dan terapan psikologi di dunia, tercatat per tanggal 22 Februari 2015 terdapat sekitar 2417 artikel mengenai psychological capital ini dalam pelbagai konteks penerapan (industri, sosial, sekolah).

Penutup

Gagasan Revolusi mental presiden Joko Widodo ini harus dilihat sebagai ajakan bagi ilmu psikologi untuk mulai mengambil bagian yang lebih banyak dalam isu-isu pembangunan. Dengan membuka anatomi lebih detil tentang gagasan revolusi mental ini terbukalah ruang riset dan intervensi bagi psikologi untuk masalah-masalah kebangsaan.

Ada beberapa catatan penting bagi komunitas psikologi yang perlu diperhatikan. Pertama, psikologi perlu keluar dari arus utamanya yang hanya berurusan dengan masalah-masalah domestik. Psikologi perlu lebih banyak berurusan dengan soal-soal publik. Kedua, psikologi perlu membekali dirinya dengan keterampilan melihat lebih jauh implikasi temuan-temuannya dengan kebijakan publik (*public policy*). Undangan mengenai hal ini sudah dilontarkan oleh Joko Widodo dengan revolusi mentalnya.

Daftar Acuan

Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. In Van Lange, Paul A. M., Kruglanski, Arie W. & Higgins, E. Tory (Eds.), *Handbook of theories of social psychology* (vol 1) (pp. 438–459). Sage Publications Ltd, Thousand Oaks, CA.

Alvin Y. So. (1990). *Social change and development: Modernization, dependency and world-system theories* (No. 178). Sage.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook for theory and research for the sociology of education* (241–258). Westport, CT: Greenwood Press.

Breakwell, G.M., & Lyons, E. (Eds).(1996). *Changing European identities: Social psychological analyses of social change*. Butterworth-Heinemann, Woburn, MA.

Bronfenbrenner, U. (1992). Ecological systems theory. In R. Vasta (Ed.), *Six theories of child development: Revised formulations and current issues* (pp. 187–249). London: Jessica Kingsley.

Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2011). *Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework*. John Wiley & Sons.

Christiaan, G., & van Bastelaer, T. (2001). Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendation from the Social Capital Initiative. *Social Capital Initiative Working Paper* No. 24. Word Bank.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Fukuyama, F. (1996). *Trust: Human nature and the reconstitution of social order*. Simon and Schuster.

Hardeman, W., Johnston, M., Johnston, D.W., Bonetti, D., Wareham, N.J., & Kinmonth, A.L. (2002). Application of the theory of planned behaviour in behaviour change interventions: A systematic review. *Psychology & Health, 17*(2), 123–158.

Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C., & Welzel, C. (2008). Development, freedom, and rising happiness: A global perspective (1981-2007).*Perspectives on Psychological Science, 3*(4), 264–285.

Kim, S., & Kim, H. (2009). Does cultural capital matter?: Cultural divide and quality of life. *Social Indicators Research, 93*(2), 295–313.

Liu, J.H. (2014). What Confucian philosophy means for Chinese and Asian psychology today: Indigenous roots for a psychology of social change. *Journal of Pacific Rim Psychology, 8*(2), 35–42.

Liu, J.H., & Bernardo, A.B.I. (2014). Social psychology for social change: Foundations for and introduction to a program of action-oriented research. *Journal of Pacific Rim Psychology, 8*(2), 29–34.

Luthans F., & Youssef, C.M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. *Organizational Dynamics*, 33(2), 143–160

Luthans F., Youssef, C.M., & Avolio, B.J. (2007) *Psychological capital*. New York, NY: Oxford University Press.

Nelson, D. (Ed.). (1992). *A mental revolution: Scientific management since Taylor*. Ohio State University Press.

Petty, R.E., & Briñol, P. (2015). Processes of social influence through attitude change. *APA handbook of personality and social psychology, volume 1: Attitudes and social cognition.* (pp. 509–545) American Psychological Association, Washington, DC.

Putnam, R.D. (2001). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.

Rhodes, R.E., & Mark, R. (2012). Social cognitive models. In Acevedo, E.O, (Ed). *The Oxfordhandbook of exercise psychology* (pp. 27–294). Oxford University Press, New York, NY.

Schneider, M., & Stokols, D. (2009). Multilevel theories of behavior change: A social ecological framework. *The handbook of health behavior change* (3rd ed.). (pp. 85–105) Springer Publishing Co, New York, NY.

Schneiderman, L. (1988). *The psychology of social change.* Human Sciences Press, New York, NY.

Sharma, R., & Monteiro, S. (2016). Creating social change: The ultimate goal of education for sustainability. *International Journal of Social Science and Humanity, 6*(1), 72–76.

Sheth, J.N., & Frazier, G.L. (1982). A model of strategy mix choice for planned social change. *Journal of Marketing,* 46(1), 15–26.

Suwarsono & So, A.Y (1991). *Perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Thomas, D., & Veno, A. (Eds.). (1992). *Psychology and social change: Creating an international agenda*. Dunmore.

Thomas, D.R., & Robertson, N.R. (1992). A conceptual framework for the analysis of social policies. In Thomas, D., & Veno, A. (Eds.). (1992). *Psychology and social change: Creating an international agenda*. Dunmore.

Welzel, C. (2013). *Freedom rising.* Cambridge University Press.

Zaltman, G., Kotler, P., & Kaufman, I. (1972). *Creating social change.* Oxford: Holt, Rinehart & Winston.

3
Revolusi Mental dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia: Suatu Tinjauan Psikologi

Ngurah Sumitra

Pendahuluan

Pemerintahan era Presiden Joko Widodo–Yusuf Kalla telah mendeklarasikan perlunya suatu "*Revolusi Mental*" untuk membangun karakter manusia Indonesia agar kembali ke karakter dasar manusia Indonesia yang positif seperti santun, ramah, bergotong royong dan berbudi pekerti. Sifat-sifat luhur bangsa Indonesia ini dipercaya adalah merupakan sumber dari etos kerja yang positif dan berintegritas, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Terlepas dari kontroversi yang muncul atas istilah revolusi mental pada saat kampanye pemilihan presiden baru-baru ini, jika dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka tentunya suatu revolusi mental akan dapat berguna untuk mendorong terjadinya transformasi kepribadian bangsa menuju ke arah yang lebih baik.

Mengingat pembicaraan mengenai karakter manusia adalah merupakan domain ilmu psikologi, maka pengurus pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) bermaksud untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat luas tentang konsep revolusi mental ini, sesuai dengan bidang peminatan ilmu psikologi dan terapannya. Dalam rangka untuk mendukung tujuan mulia dari Himpsi inilah, maka saya memilih tema "*Revolusi Mental dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia*" sebagai landasan dari tulisan saya. Untuk itu, saya akan mencoba untuk membahas kondisi bangsa saat ini dan apa tantangan yang dihadapi ke depan, sehingga kita memerlukan suatu "*revolusi mental*" untuk mentransformasikan karakter bangsa Indonesia menjadi lebih baik agar dapat mencapai cita-cita para *founding fathers* kita, yaitu "*NKRI yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*".

Indonesia di Era Globalisasi

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang dapat divisualisasikan dalam tiga lapisan atau tingkatan. Pada lapis terdalam atau level individual dan keluarga, telah terjadi perubahan sosial yang sangat berbeda dari generasi *baby boomer* yang lahir sebelum tahun 1960-an. Telah terlihat adanya perubahan perilaku kolektif kalangan remaja di era sekarang ini, yang lahir di tahun 2000 an, yang disebut generasi Z, atau generasi era global yang *IT minded*. Mereka hidup di lingkungan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan sosial masyarakat yang tinggi, dengan dukungan perlengkapan dan teknologi yang modern dan canggih (Holroyd, 2011). Sebagai akibat dari proses globalisasi yang menuntut IT *friendly,* dewasa ini sudah menjadi keharusan bagi anak-anak dan remaja pelajar kita untuk memiliki *gadgets* seperti telepon genggam, tablet, dan laptop, yang pada tingkat tertentu, ketergantungannya justru menjadi kontra produktif bagi kinerja mereka. Sebagai contoh di saat suatu keluarga membutuhkan kebersamaan, masing-masing anggota keluarga justru sibuk berkomunikasi melalui media sosial dengan rekan-rekannya.

Sesuai dengan gambaran julukan sebagai generasi Z, yang disebut juga sebagai "*Digital Generation*", "*Net Generation*" atau *"Generasi Platinum"* dengan stereotipiknya yang khas dan unik, yaitu mereka cenderung melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan (*multi tasking*), lebih menyukai hal-hal yang bernuansakan multimedia, lebih menyukai berinteraksi dengan teman-teman di dunia maya seperti melalui *facebook, tweeter,* dan *YM*, sangat berbakat dalam belajar menyukai kegiatan yang menyenangkan, namun mudah frustasi dalam melakukan kegiatan yang sesungguhnya menuntut kreativitas kecil, bertindak kurang disiplin, serta memiliki pola hidup dan pola pikir lebih suka segala sesuatu yang *instant* (Sudrajat, 2012). Kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi setiap negara bangsa, termasuk Indonesia.

Pada lapis tengah atau level institusional dan nasional, tantangan yang nyata adalah terjadinya penetrasi budaya asing tanpa adanya filter yang memadai. Sebagai contoh dapat kita lihat dari munculnya perilaku kolektif yang tidak sehat sebagai dampak dari euphoria demokratisasi dan kebebasan individual atas nama menjunjung HAM (Hak Asasi Manusia) yang kebablasan. Adanya kecenderungan untuk menuntut kebebasan individu (termasuk kebebasan pers) yang semakin mengemuka, yang melampaui batas kewajaran sebagai masyarakat dengan standar kehidupan dengan nilai-nilai kolektivitas dan harmonisasi sosial. Aksi demonstrasi yang anarkis, demonstrasi buruh yang menyabot atau menduduki ruas jalan tol, dan lain sebagainya, adalah contoh-contoh kebebasan ekspresi yang tidak sesuai dengan norma kepatutan. Di antara anak bangsa masih sering terjadi konflik-konflik

horizontal yang justru saling merusak dan menghancurkan sesama saudara sendiri. Padahal di negara asal dari demokrasi liberal itu sendiri, pembatasan hak individu untuk bertindak anarkis sangat dibatasi oleh penegakan hukum yang sangat ketat (Indrayana, 2008).

Pada lapis terluar atau level internasional atau global, tantangan sekaligus ancaman terbesarnya dan merupakan sumber dari kedua tantangan sebelumnya, adalah terjadinya proses globalisasi. Sebuah babak periode sejarah manusia yang memiliki visi, cara berpikir dan cara kerja yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Roland Robertson (1993) dengan gamblang merumuskan arti globalisasi dalam pernyataannya sebagai berikut: *"Globalization as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole."* Di balik proses mengecilnya dunia, terjadilah intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu keseluruhan, yang tidak lagi dapat dipecah-pecah ataupun diingkari begitu saja. Peningkatan dan intensifikasi kesadaran itu dengan sendirinya menumbuhkan pula perhatian dan kepedulian terhadap dunia secara keseluruhan pada abad ke-21 ini, bahkan rangkaian manifestasi kehidupan baru, mulai dari persepsi sampai pada pola kerja serta perilaku global.

Robertson menyampaikan bahwa implikasi dari adanya globalisasi ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, terbukanya berbagai kesempatan untuk mewujudkan kegiatan serta interaksi secara global, baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan, industri, usaha dan jasa maupun pendidikan. Kedua, tumbuhnya bentuk-bentuk kerja sama Di antara bangsa-bangsa, baik secara global maupun regional, dengan melibatkan seluruh wilayah negara atau sebagian daripadanya, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik dan sosial budaya. Ketiga, terjadinya strukturisasi yang mencakup wilayah dan kawasan dunia sebagai satu keseluruhan global, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dan ke empat adalah diadopsinya nilai-nilai global yang universal. Namun demikian, hal ini tidak berarti tenggelamnya nilai-nilai budaya lokal, karena antara kedua budaya tersebut akan tercipta saling keterarahan. Nilai-nilai universal menjadi relevan sejauh dituangkan ke dalam nilai budaya lokal, sedangkan nilai lokal akan diterima sejauh diletakkan dalam konteks nilai universal. Dengan demikian, globalisasi membawa dua arah yang berlawanan, seperti universalisasi dan partikularisasi, homogenisasi dan diferensiasi, integrasi dan fragmentasi. Di samping itu globalisasi membawa pula relativisasi dalam nilai dan dalam kehidupan manusia, yang sekaligus menunjukkan juga interdependensi antar bangsa (Sastrapratedja, 1996).

Saya menyadari bahwa ada sementara pihak yang mempertanyakan apakah nasionalisme masih relevan di era globalisasi pada saat ini? Fakta-fakta memang menunjukkan bahwa barisan korporasi dan individu pemain global baru telah muncul sebagai akibat

globalisasi perekonomian dunia. Di awal abad ke 21, sudah tercatat 51 dari 100 kekuatan ekonomi terbesar bukan lagi berbentuk negara, tetapi merupakan berbagai perusahaan multinasional (Samhadi, 2006). Pendapatan perusahaan mobil nomor satu dunia dari AS, *General Motor*, sudah menyamai kombinasi PDB (produk domestik bruto) tiga negara: Selandia Baru, Irlandia dan Hongaria. Bahkan aset dari perusahaan transnasional (TNCs) terbesar dunia, *General Electric* sudah mencapai US $ 647,483 Milyar, atau hampir tiga kali lipat PDB Indonesia.

Melalui kekuatan finansial yang mereka miliki, perusahaan-perusahaan tersebut sudah mampu memengaruhi pengambilan keputusan pada tingkatan tertinggi di berbagai pemerintahan dan bahkan mampu menentukan arah pergerakan perdagangan dan perekonomian global. Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi dan pasar bebas, pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, dan bahkan juga ideologi dan nasionalisme negara sudah tidak dapat dibendung lagi dan telah semakin menjadi keniscayaan, atau diistilahkan oleh pakar strategi global dari Jepang, Kenichi Ohmae (1990), sebagai "dunia yang tanpa tapal batas" (*The Borderless World*).

Untuk itu kita dapat membandingkan diri dengan Swiss. Hal ini mengingat penelitian Hamish McRae (1994), menemukan bahwa salah satu komponen penting, bahkan mungkin terpenting, yang dapat memengaruhi pertumbuhan sebuah negara adalah kapasitas dari negara tersebut untuk belajar (*the capacity to learn*) (McRae, 1994). Agar dapat tumbuh dan berkembang, suatu negara harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain. Swiss adalah suatu negara yang terdiri dari 32 Kanton, di mana setiap Kanton memiliki agama (Katolik dan berbagai sekte Protestan) serta bahasa dan etnis yang berbeda (Jerman, Perancis, Italia dan Romania) (Steinberg, 2000). Swiss adalah satu-satunya negara di benua Eropa daratan yang secara internal berhasil menghindarkan diri dari perang saudara yang disebabkan oleh perbedaan agama (Katolik versus Protestan) dan bahasa (Jerman versus Perancis) yang menghancurkan banyak negara-negara Eropa di abad ke 16. Swiss mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1291 melalui perang yang dilakukan oleh "Tentara Rakyat" nya terhadap Kerajaan Austria yang menjajahnya. Seratus tahun kemudian, seluruh teritorial Swiss telah berhasil dibebaskan oleh tentara tersebut. Selama 400 tahun kemudian, peperangan terjadi di sekelilingnya, dan negara-negara kecil seperti Swiss hilang dicaplok oleh negara yang lebih besar, kecuali Swiss.

Banyak pengamat yang menganggap konsep "Tentara Rakyat" inilah yang banyak berperan dalam menciptakan identitas bangsa Swiss yang satu (McPhee, 1984). Pada saat pemuda Swiss mencapai usia 20 tahun dan melaksanakan latihan wajib militer pertamanya

di Pusat Pendidikan Rekrut (*Rekrutenschule*), maka seringkali ditempat inilah ia akan bertemu dan untuk pertama kalinya bergaul dengan dekat dengan rekan senegaranya yang berbeda agama, etnis dan bahasa, yang berasal dari Kanton yang lain. Setiap warga negara Switzerland yang sudah berumur 18 tahun diharuskan untuk menjalani wajib militer dan mengikuti latihan-latihan lanjutan secara periodik, sampai yang bersangkutan berumur 49 tahun.

Melalui proses latihan dan pelaksanaan tugas sebagai seorang "Tentara Rakyat" inilah, maka identitas rakyat Swiss sebagai satu bangsa merdeka, yang muncul dari sejarah pengorbanan para pendahulunya, dapat terbentuk. Kebanyakan dari kita jika berbicara tentang Switzerland, tentunya akan berpikir tentang jam tangan, pisau lipat, bank, coklat dan pegunungan Alpine yang berselimutkan salju abadi. Tidak demikian halnya dengan orang Swiss. Jika ditanya tentang identitas nasionalnya, maka mayoritas dari mereka dengan bangga akan menyatakan "Tentara Rakyatnya". Bahkan di era "dunia tanpa batas" pada saat ini, Swiss yang dikenal sebagai negara modern yang liberal dan demokratis, masih menjunjung tinggi nasionalisme mereka, di mana siapa pun warga negara Swiss, dibelahan dunia manapun mereka berada, jika mereka mencoba untuk menolak mengikuti wajib militer, maka berdasarkan hukum, tanpa terkecuali mereka akan dipenjarakan (Cummings, 1998).

Dari contoh Swiss ini, maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme di era globalisasi ini masih sangat relevan, dan justru nasionalisme yang tinggilah yang akan dapat menyelamatkan kita dari pengaruh negatif globalisasi. Nasionalisme yang kita inginkan bukanlah nasionalisme sempit yang anti segala yang berbau asing seperti yang ditunjukkan oleh Myanmar dan Korea Utara, tetapi lebih pada nasionalisme yang didasari oleh semangat cinta tanah air. Untuk itulah, maka kita harus merenung kembali apa tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara? Jika kita konsisten dengan komitmen para *founding fathers* kita, maka kita harus siap untuk menyatakan bahwa tidak lain adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila dan UUD 1945.

Abad Asia (*Asian Century*)

Banyak pakar yang telah memprediksikan bahwa abad ke-21 akan menjadi miliknya bangsa Asia (Samhadi, 2006). Diperkirakan bahwa pada tahun 2050 lebih dari separuh produk nasional bruto dunia akan berasal dari negara-negara di kawasan Asia. Cina dan bukan Amerika Serikat akan menjadi pemain terkuat dunia, diikuti India yang 'menikung' di posisi ketiga. Selanjutnya, Uni Eropa akan berada di urutan keempat dan Jepang menduduki

posisi kelima. Masalahnya bagi kita semua adalah di mana posisi Indonesia pada saat itu? Suatu konsultan manajemen terkemuka di dunia, McKinsey Global Insitute (2012), dalam laporannya tentang potensi Indonesia di masa depan, memprediksikan bahwa pada tahun 2030, 90 juta orang Indonesia akan naik menjadi bagian dari kelas menengah, sehingga Indonesia akan memiliki lebih banyak kelas menengah dari negara lain di dunia ini kecuali Tiongkok dan India (Oberman, dkk., 2012). Namun demikian, laporan yang sama juga mencatat bahwa untuk mencapai kondisi tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan produktivitasnya menjadi 4.6% per tahun, atau dengan kata lain 60% lebih tinggi dari dekade sebelumnya ! Pertanyaannya, sanggupkah kita melaksanakan hal ini?

Padahal dalam era globalisasi saat ini, setiap negara akan bersaing untuk memperjuangkan dan mempertahankan posisinya masing-masing. Dan seperti pernah disampaikan oleh mantan Presiden Soeharto, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, sekarang Indonesia sudah berada di depan pintu gerbang globalisasi. Pada tahun 2015, negara-negara ASEAN sudah akan memberlakukan *Asean Free Trade Area* atau AFTA, suatu kawasan bebas perdagangan di negara-negara Asean dengan pasar sebesar 500 juta orang. Hal ini berarti tidak akan ada lagi hambatan tarif, ataupun tarif yang sangat minimal di kawasan Asean. Dan AFTA hanyalah pembuka, mengingat forum *Asia-Pacific Economic Cooperation*, atau APEC yang mencakup negara-negara ASEAN plus negara-negara di Asia Pacific termasuk pusat-pusat kekuatan ekonomi dunia seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat, juga sudah berkali-kali mengusulkan adanya *Asia Pacific Free Trade Area*. Pertanyaannya tentunya: apakah kita siap? Untuk AFTA saja, apakah para pengusaha, birokrat, buruh dan komponen-komponen bangsa lainnya siap bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam yang sekarang mulai menunjukkan ketangguhannya. Belum lagi jika dikaitkan dengan APEC. Pertanyaan ini tentunya menjadi sangat penting mengingat konsekuensinya akan sangat besar bagi bangsa Indonesia jika kita tidak siap. Tentunya kita tidak ingin untuk tetap menjadi *"sleeping giant"* (McCleery, 1990). Suatu negara yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah, tetapi tidak dapat menunjukkan eksistensinya secara proporsional sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Michael Porter (1990), seorang pakar manajemen dan strategi bisnis yang meneliti mengapa satu negara bisa lebih unggul dari yang lainnya, menemukan bahwa kemajuan suatu negara tidaklah ditentukan oleh kekayaan alam yang berlimpah atau keunggulan komparatif, tetapi lebih ditentukan oleh *keunggulan kompetitif*, atau kemampuan dari suatu bangsa dalam menghasilkan daya saing, sehingga mampu menciptakan produk-produk yang berkualitas. Dalam hal keunggulan komparatif, Indonesia memiliki kekayaan alam yang

berlimpah dan iklim yang bersahabat, bahkan *"tongkat, kayu dan batu pun bisa jadi tanaman"*. Ironisnya, justru hal ini membuat kita terlena dan tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki untuk menghasilkan karya-karya unggulan yang diapresiasi dunia. Swiss, yang hanya 11% dari daratannya yang bisa ditanami, melalui perusahaan makanan multinasional Nestle-nya, mampu menjadi negara produsen makanan terbesar di dunia (de Aenlle, 2001). Dan yang lebih menakjubkan, adalah kenyataan bahwa Swiss sebagai suatu negara yang tidak memiliki perkebunan cokelat, justru dikenal sebagai pembuat cokelat terbaik di dunia (Budiyono, 2007).

Demikian juga untuk keunggulan kompetitif, kita belum dapat berbuat banyak dan masih tertinggal dengan negara lain. Merujuk pada data tentang komparasi daya saing suatu negara yang berasal dari laporan *The Global Competitiveness Report* 2013-2014 (Schwab, Sala-i-Martin & Brende, 2013), tingkat keunggulan kompetitif perusahaan-perusahaan Indonesia berada pada urutan 61 dari 148 negara yang disurvei. Bandingkan dengan Singapura yang berada di urutan 13 dunia dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, serta Malaysia pada peringkat 27 dan Thailand di urutan 43. Louis Kraar (1993), seorang pengamat negara-negara industri baru di Asia Timur, bahkan meramalkan jika bangsa Indonesia tidak mampu memperbaiki etos kerja dan menurunkan tingkat korupsinya yang sangat tinggi, maka diperkirakan dalam satu dekade mendatang, Indonesia hanya akan menjadi halaman belakang *(back yard)* dari Asia Timur.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan nasionalisme Indonesia pada saat ini yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki; bagaimana memperbaiki sektor pendidikan kita yang tertinggal dari negara-negara tetangga, bahkan dibandingkan dengan negara yang dahulu belajar dari kita sekalipun, dan bagaimana meyakinkan rakyat kita agar patuh hukum dan memiliki integritas. Kemudian, faktor kedua adalah masalah budaya bangsa kita sendiri. Dalam disertasi Doktor Brigjen TNI Sumantri, mantan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat (tahun 1958-1962), di Universitas Leiden, Belanda, ditemukan bahwa bangsa Indonesia dapat dijajah selama hampir 350 tahun oleh Belanda, antara lain karena memiliki karakteristik yang emosional, pendendam dan tidak senang melihat rekannya menjadi lebih maju. Dalam era globalisasi saat ini, di mana hanya mereka yang dapat menunjukkan kinerja tinggi sajalah yang akan dapat bertahan, maka tentunya budaya seperti itu tidak akan dapat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan posisi yang terhormat di masa depan. Kita harus dapat menggali kembali nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang luhur, yang berdasarkan Pancasila yang telah berhasil menyatukan seluruh komponen bangsa dan merebut kemerdekaan.

Faktor yang ketiga adalah masalah militansi bangsa. Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Zulrizka Iskandar, MSc., militansi itu sendiri adalah "semangat yang tinggi atau keteguhan untuk berjuang menghadapi kesulitan, di mana secara psikologis terkait di dalamnya faktor motivasi yang sangat kuat" (Iskandar, 2006). Dengan demikian, jika kita berbicara tentang militansi bangsa Indonesia berarti kita berbicara tentang seberapa tangguh bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai kesulitan yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini, dapat kita katakan bahwa militansi bangsa kita pada saat ini, terutama jika dilihat dari motivasi berprestasinya, dapat dikategorikan sebagai belum memadai. Hal ini dapat dilihat antara lain dari daya saing produksi barang dan jasa kita yang rendah. Prestasi olah raga kita melorot tajam, sedangkan posisi kita yang sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi belum juga membaik. Faktor yang terakhir adalah jati diri kita yang masih labil. Tak berlebihan jika sesungguhnya bangsa Indonesia masih dianggap sebagai bangsa yang masih dalam proses pencarian jati diri atau *"A nation in waiting"* (Schwarz, 1994).Walaupun Pancasila sebagai filosofi bangsa sudah disepakati sebagai jati diri, nilai dan konsensus yang diwariskan oleh para *founding fathers* kita, sehingga harus selalu dijaga oleh generasi penerus, masih banyak anak bangsa yang mencari jati diri yang lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti liberalisme, kapitalisme, fundamentalisme, maupun komunisme.

Revolusi Mental untuk Membangun Karakter Bangsa

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka saya berpendapat bahwa kita tidak perlu menganggap globalisasi sebagai suatu ancaman. Globalisasi adalah proses historis yang berjalan melalui tahap-tahap yang sepenuhnya berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yang logis. Walaupun memang harus kita waspadai bahwa liberalisme ekonomi mempunyai peran besar dalam menggelindingkan globalisasi, dan hal ini menunjukkan betapa besar kekuatan yang terkandung di dalamnya dan pengaruh yang dimilikinya.

Persaingan justru terkonsentrasi dalam kekuatan sumber daya manusia dan kepandaian memperjuangkan masing-masing kepentingan dalam berbagai bentuk kerja sama dengan menentukan persyaratan dan aturan mainnya. Oleh karena itu, kewaspadaan perlu diarahkan kepada kondisi dalam masyarakat kita sendiri, kepada kelemahan dan kerawanan yang dengan sadar ataupun tidak kita sadari telah kita ciptakan, kita perlu mawas diri. Karena itu, apakah di masa depan kita dapat menjadi bangsa yang unggul di era globalisasi ini akan sangat tergantung dari sejauh bangsa kita sanggup untuk memanfaatkannya. Sejauh mana kita dapat meningkatkan kemampuan kita jika dibandingkan dengan kemampuan

bangsa-bangsa lain, terutama yang sudah termasuk negara industri baru dan negara industri maju? Untuk itu, saya berpendapat memang kita perlu melakukan berbagai perubahan *mindset* atau revolusi mental agar bangsa Indonesia dapat bertahan dan kemudian berhasil mengarungi arus globalisasi.

Dalam hal ini saya menawarkan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah memperkuat komitmen kita pada cita-cita para pendiri bangsa, yaitu tercapainya "Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." Ben Anderson (1983), dalam karya klasiknya tentang nasionalisme, mendefinisikan suatu bangsa sebagai suatu "*imagined communities*," suatu komunitas imajiner, bukan suatu komunitas riil yang seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain setiap harinya, namun merupakan suatu komunitas imajiner yang dikonstruksi secara sosial oleh para anggotanya, sehingga mereka semua merasa memiliki dan bersedia untuk berjuang untuk suatu konsep abstrak tersebut. Kita adalah bangsa yang boleh dikatakan paling plural di dunia, yang menurut bapak Syarwan Hamid saat beliau menjadi Kepala Staf Teritorial dulu, memiliki "indeks perpecahan tertinggi di dunia." Kita plural dari segi agama, semua agama besar dunia ada di Indonesia. Kita plural dari segi geografi, suku, bahasa dan ras, dan tidak ada negara lain yang lebih plural dari kita dalam hal ini. Kita juga sangat plural dari sisi peradaban dan pertumbuhan ekonomi, di mana masih ada saudara kita yang hidup sebagai pemburu dan peramu di pedalaman Papua, namun sebaliknya banyak rekan-rekan kita di Jakarta yang pekerjaan dan kehidupannya tidak berbeda dengan metropolis paling modern di belahan dunia lain, menjadi pialang saham dengan jam kerja yang disesuaikan dengan pasar modal di New York, London ataupun Tokyo. Menurut saya, suatu kondisi imajiner "Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945" lah yang dapat menyatukan kita. Visi inilah yang walaupun memiliki potensi yang sangat besar untuk pecah, namun berhasil membuat Indonesia tidak pecah. Indonesia yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita tersebut, menurut saya adalah suatu komunitas imajiner yang telah dapat mengikat kita semua sekian lama dengan kuat, apa pun latar belakang kita.

Terkait dengan langkah pertama, menurut saya langkah kedua adalah kita perlu merumuskan kembali jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Joshua Searle-White (2001) dalam bukunya "*The psychology of nationalism*" menjelaskan bahwa satu unit analisis yang dapat secara koheren menjelaskan tentang kuatnya nasionalisme yang bersifat individual maupun sosial adalah identitas atau jadi diri. Untuk membangkitkan nasionalisme maka mau tidak mau kita harus memiliki jati diri yang jelas. Untuk itu, kita harus mampu menggali kembali nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita sehingga kita dapat

menjadikan Pancasila sebagai suatu *way of life* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi suatu kontrak sosial antara berbagai komunitas yang ada di negara kita.

Dalam hal ini, saya ingin mengutip pandangan dari almarhum Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof. Dr. Riswandha Imawan (2004), yang menyatakan adanya lima nilai-nilai utama yang harus ditumbuhkembangkan kembali untuk mengatasi permasalahan jati diri bangsa Indonesia. Nilai pertama, adalah semangat kebersamaan yang dapat mengatasi nafsu individual. Nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia sangat mengagungkan rasa kebersamaan (*guyub*), santun dan bersahaja, dan kita dapat melihatnya dalam sila-sila Pancasila. Untuk itu, menurut saya pendidikan karakter atau budi pekerti bagi generasi digital kita menjadi sangat penting. Bagaimana agar anak-anak muda dari Gen Y kita tetap memiliki karakter yang Pancasilais. Nilai kedua adalah sikap kemandirian. Suku-suku yang hidup di tempat terpencil di Indonesia, mampu bertahan hidup di tempat yang sangat ekstrim secara mandiri. Nilai ini tentunya amat diperlukan di era persaingan pada saat ini. Nilai ketiga adalah tingkat toleransi yang sangat tinggi. Gambaran bahwa masyarakat Indonesia eksklusif dan menutup diri adalah tidak benar, karena Bangsa Indonesia pada dasarnya bersikap cukup ramah terhadap kaum pendatang, selama ada rasa saling hormat-mengormati terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nilai keempat adalah aspek keimanan, di mana seluruh kelompok etnis di Indonesia mengenal adanya Tuhan dalam berbagai bentuk dan sebutan. Dan nilai terakhir adalah rasa nasionalisme. Nilai ini adalah perekat bangsa sekaligus pemicu semangat untuk maju. Dalam era perjuangan kemerdekaan, nasionalisme terbukti mampu menjadi "garis pembatas dan benteng terakhir" untuk menyikapi segala persoalan yang dihadapi bangsa.

Kemudian, menurut saya langkah yang terpenting adalah meningkatkan militansi bangsa ini. David McClelland (1961), seorang profesor psikologi dari Universitas Harvard, yang meneliti mengapa satu bangsa bisa lebih maju dari bangsa yang lainnya, menemukan bahwa kunci dari keberhasilan bangsa-bangsa yang maju adalah adanya kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*, atau N-Ach) pada masyarakat di suatu bangsa. Sebagai contoh, McClleland menemukan karya-karya tulisan yang muncul di masyarakat Inggris di era Revolusi Industri menunjukkan adanya motivasi berprestasi yang tinggi jika dibandingkan dengan karya-karya tulisan yang muncul pada saat itu di negara lain yang ditelitinya, seperti Spanyol. Pada dasarnya McClleland menemukan bahwa orang-orang yang motif berprestasinya tinggi akan memikirkan untuk melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain dengan hasil capaian yang diusahakan untuk melebihi ukuran yang ditetapkannya sendiri. Sedangkan dalam tingkah laku sehari-harinya ia akan mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya sendiri, berupaya mencari umpan-balik tentang apa yang

sudah dilakukannya, memilih risiko yang menantang tetapi masih realistik dan berupaya untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif. Mengingat McClleland juga menemukan bahwa pada prinsipnya motivasi berprestasi dapat ditingkatkan, baik dalam konteks individual, maupun dalam konteks kelompok, maka dalam rangka untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan meningkatkan militansi bangsa, tidak ada alternatif lain, kecuali menyebarkan virus "motivasi berprestasi" pada seluruh komponen bangsa (Miron & McClelland, 1979).

Dalam konteks Indonesia masa kini, saya rasa apa yang seringkali disampaikan oleh presiden kita yang ketujuh, bapak Joko Widodo mungkin ada benarnya. Kita memang harus merevolusi mental, dan disinilah disiplin ilmu psikologi dapat memberi banyak sumbangan pemikiran. Selama ini kita telah dininabobokan oleh dongeng-dongeng bahwa kita adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Para peneliti bidang ekonomi memberikan istilah *resource curse*, atau kutukan sumber daya alam, untuk menggambarkan bagaimana negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada negara-negara dengan sumber daya alam sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali (Auty, 1993). Di depan saya sudah membahas contoh Swiss, tapi kita bisa menambah lagi daftar negara-negara yang perekonomiannya maju namun tidak memiliki banyak sumber daya alam seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dll.

Mungkin kita perlu mencontoh Norwegia. Norwegia adalah negara yang tingkat perekonomiannya menempatkannya pada kategori negara kaya dengan pendapatan per kapita di tahun 2013 menduduki ke empat tertinggi di dunia sebesar US $ 55,398 (Anonim, 2014). Norwegia adalah salah satu penghasil minyak terbesar di dunia yang bukan anggota OPEC, dengan sumber-sumber minyak yang melimpah di laut Utara. Namun demikian yang menarik adalah bahwa ekonomi Norwegia maju di luar keuntungan dari penjualan minyak. Norwegia menjadi pelopor dari apa yang disebut dengan Dana Energi, atau *Energy Fund*. Sesuai dengan konstitusi Norwegia, seluruh keuntungan dari penjualan sumber daya minyak di Norwegia harus diinvestasikan ke Dana Energi, dan setiap tahunnya hanya 4% dari nilai total Dana Energi ini yang boleh digunakan untuk menutup Anggaran Belanja pemerintah Norwegia (Anderson, Curristine & Merk, 2006). Alasan pemerintah Norwegia adalah bahwa keuntungan dari sumber daya alam haruslah disimpan untuk generasi berikutnya karena suatu saat sumber daya alam ini akan habis. Di lain pihak, Norwegia menempatkan pendidikan pada porsi yang sangat penting. Dari Anggaran belanja mereka, sekitar 40% dialokasikan untuk pendidikan, sehingga tidaklah mengherankan jika sumber daya mereka menjadi kompetitif.

Apa yang dilakukan oleh Norwegia tentunya merupakan suatu terobosan yang sangat radikal bagi negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun demikian sekarang justru mulai banyak negara lain yang juga kaya akan sumber daya alam yang ingin mengikuti langkah Norwegia. Pemerintah Norwegia yang berkuasa harus mencari sumber pendapatan lainnya untuk menggerakkan ekonominya, dan rakyatnya tidak merasa kaya akan sumber daya alam, karena sehari-hari mereka tidak dimanjakan oleh kekayaan yang didapat dari sumber daya alam mereka tersebut. Dengan kata lain mereka terhindar dari kutukan sumber daya alam dan justru dipacu untuk menjadi kompetitif. Disinilah menurut saya kita perlu merevolusi mental kita. Kita sebaiknya tidak lagi menggembar-gemborkan bahwa kita kaya akan sumber daya alam.

Untuk bangkit dan menang di era globalisasi, maka yang harus kita dorong adalah militansi anak-anak muda kita untuk memiliki *need of achievement*, memiliki kebutuhan untuk berprestasi. Anak-anak muda kita perlu memiliki semangat militansi untuk rela berkorban demi kepentingan bersama, dengan tidak mengenal lelah bekerja dengan keras untuk menghasilkan prestasi yang terbaik, dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Penutup

Demikianlah tulisan saya mengenai revolusi mental dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Saya berharap tulisan yang masih jauh dari sempurna ini dapat memberikan sedikit masukan dalam proses pembangunan karakter bangsa sehingga cita-cita para *founding fathers* kita, yaitu NKRI yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 lambat laun semakin terwujud.

Daftar Acuan

Anderson, B., Curristine, T., & Merk, O. (2006). Budgeting in Norway. *OECD Journal on Budgeting, 6*(1), 7-44.

Anonim (2014). http://en.wikipedia.org/wiki/Norway.

Auty, R. M. (1993). *Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis.* London: Routledge.

Budiyono, Z. (2007, 30 Januari). Yudhoyono, daya saing dan negara terhormat, *Pikiran Rakyat*, hal. 1.

Cummings, B. (1998). *The Swiss Army: Other than the knife what is the point ?* Washington, DC: National War College.

de Aenlle, C. (2001, 6 Oktober). Nestle, World's largest food producer, sits on a comfortable pile of cash. *International Herald Tribune*.

Holroyd, J. (2011, 20 Juli). Talkin' 'bout my label, *Sydney Morning Herald*.

Imawan, R. (2004). Makalah pada seminar nasional tentang jati diri bangsa di Gedung Juang DHD 45 Jl Mayjen Sungkono Surabaya, 9 November 2004.

Indrayana, D. (2008). *Negara antara ada dan tiada: Reformasi hukum ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Iskandar, Z. (2006). Masih adakah militansi pada bangsa Indonesia saat ini? *Karya Virajati, 109*, 32-39.

Kraar, L. (1993, 31 Oktober). The new power in Asia. *Fortune*, 38-44.

McCleery, R. (1990). ASEAN country profile-Indonesia: A sleeping giant no longer, private investment and trade opportunities, *Economic Brief (2).* Honolulu, HI: East-West Center.

David McClelland. (1961). *The achieving society*. Princeton: Van Nostrand.

McPhee, J. (1984). *Neutral and armed to the teeth*. New York: Farrar, Straus & Giroux.

McRae, H. (1994). *The world in 2020*. Boston: Harvard Business School Press.

Miron, D. & McClelland, D. (1979). The impact of achievement motivation training on small businesses. *California Management Review, 21*(4), 13-28.

Oberman, O, Dobbs, R., Budiman, A., Thompson, F. & Rossé, M (2012, September). *The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential*. McKinsey Global Institute.

Ohmae, K. (1990). *The borderless world: Power and strategy in the interlinked economy*. New York, NY: Harper Business.

Porter, M. (1990). *The competitive advantage of nations*. London: The Macmillan Press.

Robertson. R. (1993). *Globalization*. London: Sage.

Samhadi. S.H. (2006, 20 Mei). Globalisasi dan Indonesia 2030. *Kompas Cyber Media*.

Sastrapratedja, M. (1996). *Pancasila dan globalisasi*. Makalah dalam Seminar Nasional Pendidikan Pancasila, Magelang, 29-31 Juli 1996.

Schwab, K., Sala-i-Martin, X. dan Brende, B. (2013). *The global competitiveness report 2013-2014*. Jenewa: World Economic Forum.

Schwarz, A. (1994). A nation in waiting: Indonesia in the 1990s. Sydney: Allen & Unwin.

Searle-White, J. (2001). The psychology of nationalism. New York, NY: Palgrave.

Steinberg, J. (2000). *Why Switzerland*? Cambridge: Cambridge University Press.

Sudrajat, A. (2012). *Generasi Z dan implikasinya terhadap pendidikan*. Diunduh dari http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/10/05/generasi-z-dan-implikasinya-terhadap-pendidikan.

4
Desain (R)evolusi Mental dalam Pembangunan Karakter Bangsa

Ifa Hanifah Misbach

Pengantar

Pemikiran mengenai desain revolusi mental pada tulisan ini dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut

1. Memahami Mental (Revolusi vs Evolusi)
2. Cara Kerja Proses Mental
3. Mengubah Karakter Bangsa Secara Kolektif
4. Lokomotif Penggerak Perubahan Karakter
5. Desain Revolusi Mental (Revolusi vs Evolusi)

Memahami Mental (Revolusi vs Evolusi)

Untuk mewujudkan revolusi mental, diperlukan jembatan konsep antara revolusi dan mental, yaitu evolusi. Berdasarkan sejarah munculnya revolusi, makna revolusi lahir dari dunia sains terhadap munculnya penemuan baru sebagai sejarah pembuka masa depan yang mematahkan fakta atau dalil lama yang dianggap usang derajat manfaatnya. Revolusi juga kemudian merambah pada dunia politik dengan bentuk perlawanan radikal yang bersifat sangat cepat untuk mengubah sistem tatanan sosial yang sedang berlangsung. Dunia bisnis dan budaya pun tidak terlepas dari munculnya revolusi sebagai tonggak lahirnya paradigma baru menggantikan paradigma lama (Latif, 2014).

Untuk memahami mental, ilmu psikologi yang berbasis pada kajian perilaku banyak membahas mental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku. Berdasarkan kajian ilmu psikologi, perilaku dibedakan menjadi dua (Hergenhan, 2005). Pertama, perilaku *overt* adalah perilaku yang tampak dan dapat diamati langsung oleh panca indera (contoh: makan,

berjalan, dan lain-lain). Kedua, perilaku *covert* adalah perilaku yang tidak tampak, tidak dapat diamati langsung oleh panca indera (contoh: proses mental). Misalnya, seseorang yang lapar akan tergerak untuk melakukan aktivitas makan. Orang luar sebagai pengamat akan mudah melihat bahwa aktivitas makan merupakan bentuk perilaku *overt*. Namun demikian, proses berpikir di dalam pikiran seseorang yang lapar tadi, sebelum memutuskan jenis makanan apa yang akan dipilih, tempat makan mana yang akan dikunjungi, tidaklah bisa diamati langsung. Perilaku *covert* adalah bentuk-bentuk proses mental yang menyangkut struktur kehidupan alam bawah sadar manusia seperti emosi, motivasi, sensasi, persepsi, belajar, berpikir, pengambilan keputusan, memori, mimpi, aspirasi dan harapan (James, 1950).

Karena mental menyangkut cara kerja alam bawah sadar yang tidak dapat diamati, maka perubahan dalam struktur mental bisa terjadi melalui revolusi atau evolusi dalam merubah perilaku sebagai produk akhir yang dapat diamati.

Jika yang terjadi perubahan perilaku dengan cara evolusi seperti dalam perspektif biologi (Richard, 2001), maka kekurangannya adalah laju perubahan perilaku terjadi sangat lambat seperti halnya perubahan bertahap dari satu generasi ke generasi berikutnya, namun kelebihannya tidak menimbulkan efek *shock* dan meninggalkan jejak perubahan perilaku spesifik yang cenderung stabil dan menetap. Sebaliknya, kelebihan revolusi mental adalah laju perubahan perilaku terjadi cepat namun jejak perilaku yang dihasilkan belum tentu stabil dan menetap. Kenapa? Karena secara alamiah, perubahan perilaku dengan cara revolusi akan membuat efek *shock* pada zona kenyamanan perilaku lama yang sudah menjadi kebiasaan di dalam proses mental. Jadi, intervensi perubahan dari luar yang bersifat sangat cepat namun tidak dibarengi dengan kesiapan mental dari dalam diri, biasanya menimbulkan ketegangan (*tension*) pada sistem keyakinan (*belief*) yang berisi nilai-nilai lama dan kerangka berpikir (*mindset*) seseorang di dalam melihat dunia, yang tidak mudah goyah dalam hanya dalam hitungan jam. Artinya, secara esensi revolusi dan evolusi sama-sama memiliki makna perubahan baru, perbedaannya terletak pada laju perubahan dan stabilitas dari jejak perilaku yang muncul apakah menetap atau tidak.

Jika pemerintahan yang baru bertujuan melakukan revolusi mental secara masif dalam konteks mengubah dari perilaku buruk menjadi perilaku baik, maka kekurangan revolusi mental harus dapat diantisipasi. Kekurangan cara kerja revolusi adalah peluang perubahan perilaku yang diharapkan berpeluang tidak menetap secara stabil. Mengubah perilaku seseorang saja sulit apalagi merubah karakter satu bangsa yang majemuk dalam hal keyakinan agama, suku dan ideologi. Lalu bagaimana caranya merubah struktur mental yang baru secara kolektif untuk menghasilkan perubahan perilaku yang baru yang kolektif?

Cara Kerja Proses Mental

Sebelum membongkar mental seseorang, kita harus jernih dulu membedakan apa itu nilai, perilaku, karakter, dan identitas. Setelah itu, kita perlu melihat apa keterkaitan antara nilai, perilaku, karakter dan identitas dalam membentuk proses mental seseorang.

Nilai bersifat *covert* karena memiliki sifat abstrak yang bekerja di alam bawah sadar seseorang sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh panca indera. Nilai adalah sumber yang diyakini seseorang yang terjadi dalam wilayah psikologis alam bawah sadar yang disebut keyakinan *(belief)* yang menjadi petunjuk arah yang mendorong seseorang bertindak (Hjelle & Ziegler, 1981). Secara sederhana, nilai adalah apa yang kita yakini, belief adalah mengapa kita meyakini hal tersebut. *Belief* yang sudah mewujud menjadi sesuatu yang kita yakini benar akan membangun kerangka berpikir *(mindset)* seseorang di dalam memandang dunianya.

Karena nilai tidak dapat diamati oleh panca indera, maka yang dapat diamati adalah objek yang mewujudkan nilai itu. Contohnya, ada orang yang dinilai jujur di lingkungan kita. Kejujuran masih berupa nilai pada saat panca indera kita tidak bisa mengamati kejujuran karena bersifat abstrak. Yang dapat diamati oleh indera kita adalah perilaku konkrit dari orang yang jujur tersebut. Misalnya, ketika orang tersebut menemukan dompet yang bukan miliknya, orang tersebut melakukan serangkaian tindakan mengembalikan dompet itu pada pemiliknya meskipun ia tidak mengenal sang pemilik dompet.

REVOLUSI MENTAL = REVOLUSI NILAI ALAM BAWAH SADAR

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa revolusi mental adalah revolusi nilai alam bawah sadar. Membongkar mental adalah membongkar nilai, jadi bukan langsung mengoreksi perilakunya terlebih dahulu. Jadi adalah kesia-siaan jika pemerintahan baru ingin langsung seketika mengubah perilaku rakyatnya tanpa pemerintah berhasil menemukan terlebih dahulu nilai-nilai apa yang diyakini kebanyakan rakyatnya. Artinya, jika ingin melakukan suatu perubahan perilaku, maka yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah temukan dulu *chip* dari struktur mental yaitu nilai inti sebagai *core belief* yang diyakini seseorang untuk melakukan pergeseran *belief,* yang merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi manusia baru, dalam arti memiliki kerangka berpikir (*mindset*) yang baru, *belief* yang lama harus dimusnahkan dan digantikan dengan *belief* yang baru. Inilah mengapa memahami nilai merupakan hal mendasar untuk memahami apa yang terjadi di balik perilaku seseorang.

Lalu apa bedanya perilaku dengan karakter? Perilaku belum tentu menjadi karakter. Syarat agar perilaku menjadi karakter adalah terjadinya proses kebiasaan yang berulang-ulang. Artinya, perilaku yang terus dilakukan konsisten berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah yang membentuk karakter (Lickona, 1997). Karakter seseorang itulah yang menjadi identitas diri dengan label yang dilekatkan oleh lingkungan sebagai ciri sifat orang tersebut, misalnya rajin, malas, pemberani, dan lain-lain. Artinya, karakter adalah kebiasaan perilaku yang di dalamnya mengandung *belief* yaitu keyakinan nilai-nilai apa saja yang dibawa seseorang.

Untuk mempermudah pemahaman cara kerja nilai, perilaku, karakter dan identitas dalam membentuk proses mental seseorang, terdapat gabungan pendekatan dari para ahli psikologi Allport, Erickson dan Freud (dalam Hergenhan, 2005). Intinya, perubahan perilaku selalu dimulai dari perubahan nilai *(value),* keyakinan *(belief),* kompetensi *(skill)* yang akan membentuk identitas baru berdasarkan prinsip gunung es (*iceberg identity),* sebagaimana nampak pada Gambar 1.

Mengubah Karakter Bangsa Secara Kolektif

Dalam konteks merubah karakter bangsa secara kolektif, pendekatan konvensional *bottom-up* bahwa nilai ditransfer dari pemimpin ke lapisan bawah akan berjalan lebih lama dibandingkan dengan nilai yang datang dari aspirasi lapisan bawah akan lebih efektif. Karena nilai yang berasal dari pemimpin hanya akan mewujud sebatas 'menjadi' nilai, tetapi jika
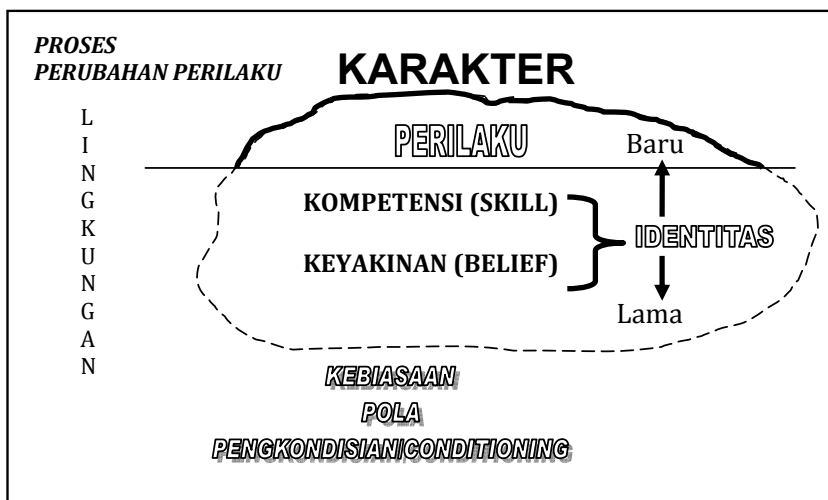
Gambar 1. Iceberd Identity

nilai berasal dari seluruh lapisan bawah maka nilai akan membuat rakyat merasa 'memiliki' nilai. Jika rakyat merasa memiliki nilai bersama atas dasar persamaan aspirasi perubahan maka seluruh energi bangsa ini akan bergerak pada satu tujuan besar yang sinergis. Itulah esensi gotong royong yang menjadi basis dalam pembangunan karakter bangsa.

Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diubah oleh orang lain atas dasar paksaan. Nilai tidaklah bisa dipaksakan atau di-*install,* nilai hanya bisa ditemukan. Karena itu, jajaran pemimpin tidak bisa memaksakan nilai pribadinya atau bahkan meng-*install* nilai pada lingkungannya, yang bisa dilakukan adalah para pemimpinlah yang harus menemukan nilai-nilai kolektif apa yang diyakini rakyatnya.

Cara menemukan nilai pada rakyat Indonesia adalah kita harus berpikir jernih melihat komposisi suku bangsa yang mendiami Indonesia terdiri lebih dari 400 suku bangsa yang memiliki perbedaan nilai dan filosofi yang berbeda. Karena itu kita perlu menganalisa nilai-nilai kolektif pada tiap suku bangsa di Indonesia sebagai jembatan mengetahui struktur mental kolektif tiap kelompok yang mewujud dalam perilaku-perilaku *overt* yang dapat diamati.

Namun demikian, cara ideal menemukan nilai pada seluruh rakyat Indonesia ini sulit dilakukan dengan rentang geografis di Indonesia yang luas. Kesulitan ini bisa kita antisipasi, dengan memanfaatkan cara sederhana yaitu melakukan *appreciative inquiry* dengan metode survei pada berbagai lapisan rakyat Indonesia. *Aprreciative inquiry* adalah jenis pertanyaan yang menggiring *mindset* individu untuk menghargai kekuatan positif individu serta orang-orang di sekitarnya (Cooperrider, 1980). Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai:

1. Nilai-nilai untuk menjadi karakter baik apa saja yang dianggap penting untuk ditanamkan pada anak cucu agar membawa bangsa Indonesia maju.
2. Praktik baik apa di lingkungan keluarga yang sudah dijalankan dan membawa perubahan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil *pooling survei* tersebut, ambil nilai mayoritas yang memiliki kesamaan nilai-nilai untuk menjadi karakter baik untuk dijadikan basis revitalisasi nilai-nilai baru membawa bangsa Indonesia ke depan. Cara menjaring aspirasi rakyat dari bawah merupakan metode riset partisipatif *bottom-up* yang sejalan dengan gagasan *the wisdom of crowd* yang digagas oleh Galton (1907) bahwa akurasi *core belief* kolektif akan lebih valid dengan mendapatkan aspirasi yang beragam dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda dibandingkan hanya mengandalkan pada segelintir ahli untuk merumuskan nilai-nilai karakter yang tepat bagi bangsa Indonesia.

Contoh, misalnya kita ambil contoh tiga perilaku yang ingin diubah karena kebanyakan orang bersepakat bahwa karakter bangsa Indonesia yang sulit berubah adalah korupsi, tidak tepat waktu, buang sampah sembarangan. Maka jika perilaku buruk terlanjur menjadi masif dan menjadi kebiasaan buruk maka akan dipersepsi secara kolektif sebagai *core belief* bangsa bahwa itulah identitas menjadi orang Indonesia yang suka korupsi, tidak tepat waktu, buang sampah sembarangan meskipun bisa saja secara individual, seseorang tidak melakukan korupsi, datang selalu tepat waktu dan menjaga kebersihan tetapi ia akan terkena label identitas kolektif yang dilekatkan bangsa lain terhadap kebanyakan orang Indonesia.

Berdasarkan prinsip cara kerja *iceberg identity* (lihat Gambar 1) dalam mengubah perilaku secara masif, maka perlu ada intervensi masif dari lingkungan luar untuk mengubah perilaku buruk. Caranya adalah menciptakan pola-pola *conditioning* berupa intervensi lingkungan untuk membuat program-program sistematis pengulangan perilaku yang sama secara terus menerus dan konsisten, dan selanjutnya perubahan dapat terlihat hasilnya dalam satu tahun. Satu contoh, kenapa orang Indonesia yang biasanya buang sampah sembarang menjadi tertib tidak buang jika di Singapore? Artinya kondisi yang berbeda membuat pola perilaku berbeda. Kondisi di Singapore yang menerapkan sistem *punishment* membayar denda sekitar satu juta rupiah bagi yang membuang sampah sembarangan sangat efektif bagi orang Indonesia yang memiliki nilai dalam sistem *belief*-nya bahwa amatlah merugi kehilangan satu juta rupiah tanpa mendapatkan apa-apa. Artinya kondisi yang diciptakan dengan penegakan aturan hukum yang jelas dan dipatuhi seluruh orang secara konsisten akan membuat pola perilaku buruk berubah. Jika pola perilaku berubah maka kebiasaan berubah. Jika kebiasaan berubah maka identitas lama di alam bawah sadar mulai bergeser karena nilai juga otomatis berubah, dari yang tadinya merasa menjadi orang yang tidak memiliki nilai memprioritaskan kebersihan menjadi orang yang mencintai kebersihan. Jika nilai sebagai hal yang melekat pada *belief* berubah maka *belief* berubah menjadi keyakinan baru, jika belief berubah maka orang akan terpikir kemampuan atau skill baru apa untuk mempertahankan identitas baru menjadi orang yang mencintai kebersihan, maka dengan sendirinya perilaku *overt* yang tampak di permukaan juga berubah. Perilaku *overt* yang dilakukan menjadi kebiasaan itulah yang akan menjadi karakter tanpa perlu mendapat perintah dari siapa pun. Di titik itulah, karakter mewujud menjadi karakter personal. Jika sejumlah karakter personal mewujud bersama akan menjadi karakter kelompok. Jika karakter kelompok memiliki banyak kesamaan dengan karakter kelompok lainnya yang berbeda keyakinan agama, suku dan ideologi maka akan mewujud menjadi karakter bangsa (*nation character).*
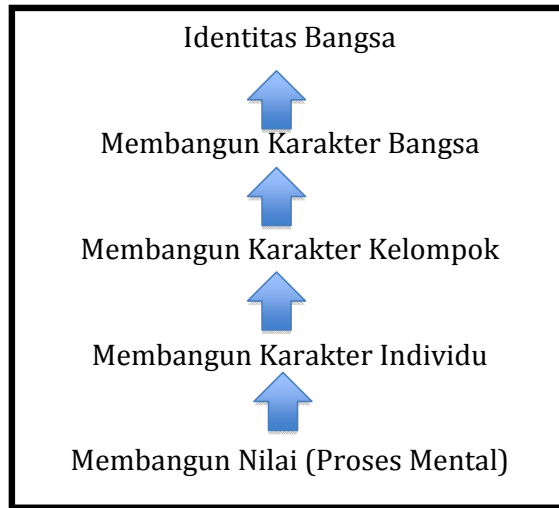
Gambar 2 Proses Membangun Nilai (Proses Mental) Menuju Karakter Bangsa

Lokomotif Penggerak Perubahan Karakter

Perubahan perilaku secara kolektif membutuhkan banyak model yang memiliki *role* yang signifikan sebagai lokomotif penggerak perubahan karakter. Perubahan karakter sendiri `tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya di mana masyarakat saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Catatan penting adalah perlu dipastikan terlebih dulu bahwa para model ini sudah memahami keselarasan pandangan setelah mendapatkan hasil *pooling survei* nilai mayoritas yang dianggap dapat menjadi karakter baik untuk dijadikan basis revitalisasi nilai-nilai baru membawa bangsa Indonesia ke depan.

Dalam konteks budaya, Indonesia masih dihinggapi budaya feodalistik yang membuat posisi orang yang memiliki *power*, jabatan, kekayaan atau status sosial yang lebih tinggi dipandang memiliki posisi superior (Lubis,2001). Dalam budaya feodalistik, posisi superior dipersepsi memiliki power yang lebih besar memiliki pengikut dibandingkan dengan orang dengan posisi inferior dalam hal jabatan, kekayaan atau status sosial. Oleh karena itu, tidak bisa ditawar perubahan perilaku secara kolektif akan lebih mudah jika dimulai dari para pemimpin bangsa yang menduduki pucuk-pucuk pimpinan strategis yang akan menjadi role model mengubah karakter rakyat Indonesia, dari mulai presiden, wakil presiden, jajaran menteri dan penjabat eselon, seluruh anggota MPR/DPR, hakim, aparat penegak hukum, pimpinan ormas, kepala daerah, pimpinan perusahaan, pimpinan perguruan tinggi, para pemuka adat, para pimpinan agama, kepala sekolah, guru dan orang

tua. Merekalah pula yang harus terlebih dulu memperbaiki karakternya sebelum mengubah karakter generasi muda karena *role* yang melekat pada mereka mengandung *power* besar sebagai *role model* untuk mengubah perilaku rakyat.

Desain Revolusi Mental

Prinsip mendesain revolusi mental untuk menjadi karakter baik harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Sederhana.
2. Mudah direplikasi.
3. Bisa dilakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan.

Desain perilaku menggunakan prinsip *iceberg identity* bisa dilakukan dengan contoh desain program-program konkrit, sebagai berikut:
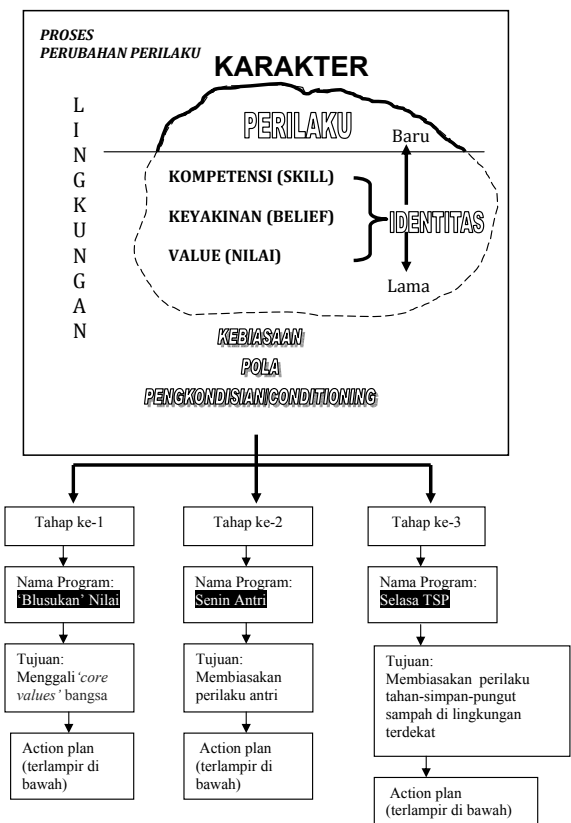
Gambar 3. Desain Revolusi Mental

Nama Program : *Blusukan* Nilai

Tujuan : Menggali *'core values'* bangsa sebagai dasar membangun karakter positif yang datang dari

Tabel 1.
Action Plan Tahap ke-1

Langkah	Durasi Waktu	Aktivitas Konkrit	Target Prioritas Sasaran	Cara Mengirim	PJ Aktivitas
Ke-1	100 hari pertama	Menyebarkan survei (*on-line* menyebarkan melalui *website* dan *off-line* di berbagai harian surat kabar) pada berbagai lapisan rakyat Indonesia dengan mengajukan pertanyaan mengenai: Nilai-nilai penting untuk menjadi karakter baik apa yang dianggap penting untuk ditanamkan pada anak cucu untuk membawa bangsa Indonesia maju. Praktik baik apa di lingkungan keluarga yang sudah dijalankan dan membawa perubahan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.	Seluruh keluarga di Indonesia Seluruh lembaga pemerintahan Seluruh lembaga swasta Seluruh asosiasi profesi Seluruh ormas-ormas Seluruh lembaga pendidikan	Submit on-line Mengirim jawaban melalui surat pos	Lembaga independen yang ditunjuk pemerintah baru

Langkah	Durasi Waktu	Aktivitas Konkrit	Target Prioritas Sasaran	Cara Mengirim	PJ Aktivitas
Ke-2	Hari ke 101 s/d 300	Dari hasil *pooling survei*, diambil sejumlah (bisa diambil 5) nilai mayoritas yang memiliki kesamaan nilai-nilai untuk menjadi karakter baik.			Lembaga independen yang ditunjuk pemerintah baru
		Mengumumkan resmi kepada publik hasil *pooling survei* yang telah diolah, diambil sejumlah nilai mayoritas yang memiliki kesamaan nilai-nilai untuk menjadi karakter baik untuk dijadikan basis revitalisasi *'core values'* baru untuk membawa bangsa Indonesia maju.			
Ke-3	Hari ke 301 s/d 600	Menitipkan sejumlah *core values* yang baru untuk dijadikan basis program-program pendidikan karakter serta praktik baik di lembaga-lembaga pendidikan	Seluruh keluarga di Indonesia Seluruh lembaga pendidikan		

Nama Program : 'Senin Antri'

Tujuan : Membiasakan perilaku antri

Tabel 2.
Action Plan Tahap ke-2

Langkah	Durasi Waktu	Aktivitas Konkrit	Target Prioritas Sasaran	PJ Aktivitas
Ke-1	Tahun ke-2	– Membiasakan 15 menit awal/ hari Senin memulai aktivitas belajar dengan antri masuk kelas – Simulasi antri di ruang-ruang di lingkungan sekolah (kantin, perpustakaan, keluar masuk gerbang) – Simulasi antri di tempat-tempat umum	Seluruh lembaga pendidikan PAUD/SD/ SMP/SMA	Lembaga pendidikan PAUD/SD/ SMP/SMA

Nama Program : 'Selasa TSP'

Tujuan : Membiasakan perilaku tahan-simpan-pungut sampah di lingkungan terdekat

Tabel 3.
Action Plan Tahap ke-3

Langkah	Durasi Waktu	Aktivitas Konkrit	Target Prioritas Sasaran	PJ Aktivitas
Ke-1	Tahun ke-2	– Membiasakan 15 menit awal/hari Selasa belajar membuang sampah pada tempatnya. – Simulasi memilah sampah organik dan non-organik	Seluruh lembaga pendidikan PAUD/ SD/SMP/SMA	Lembaga pendidikan PAUD/ SD/SMP/SMA

Catatan:
Program tahap 1 sampai dengan 3 merupakan contoh program sederhana yang dapat direplikasi secara nasional dengan cara yang mudah dan dapat dimodifikasi sesuai dengan konteks lokal.

Daftar Acuan

Allport, G.W. (1964). *The open system in personality theory.* Dalam H.M Ruitenbeek (Ed.), *Varieties of personality theory* (pp. 149-166). New York: E.P. Dutton.

Erikson, E.H (1985/1950). *Childhood and society.* New York: Norton.

Freud, S. (1969/1940). *An outline of psychoanalysis* (rev.ed.). New York: Norton.

Galton, F. (1907). Letters to the editor: The Ballot-Box. *Nature* 75. Retrieved by Derek Sivers.

Hergenhahn, B.R. (2005). *An introduction to the history of psychology* (5^{th} ed.). Toronto: Thomson Learning.

Hjelle & Ziegler. (1981). *Personality theories: Basic assumptions, research, and applications.* Manchester, IL: McGraw Hill.

James, W (1980/1890). *The principles of psychology* (Vols. 1 and 2). New York: Dover. Latif, Y. (2014, 24 Agustus). Menjalankan revolusi mental. *Harian Kompas Cetak.*

Lickona, T. (1997). Educating for character: A comprehensive approach. Dalam A. Molinar, (Ed.), *The construction of children's character* (pp.45-62). Chicago, IL: The National Society for the Study of Education.

Lubis, M. (2001). *Indonesian people.* (5^{th} ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Richard E.L., Ofria, C., Claus O., Wilke, Wang. J.L., & Adami, C. (2001). Evolution of digital organisms at high mutation rates leads to survival of the flattest. *Nature, 412*(6844): 331–333.

BAGIAN II

Dunia Pendidikan dan Keluarga

5
Karakter sebagai Hasil Pendidikan: Yang Personal dan yang Sosial

Nani Nurrachman

Pendahuluan

Kata karakter seringkali menjadi bahan perbincangan, apalagi jika terkait dengan suatu perbuatan yang tercela pada diri seseorang dan yang merugikan orang lain. Karakter seringkali dipakai pula sebagai pengganti kepribadian, bahkan dikaitkan dengan ciri identitas seseorang. Apa pun pengertian yang dipakai, pengertian karakter merujuk kepada ciri-ciri pribadi orang per orang.

Tokoh psikologi Gordon W. Allport merumuskan karakter sebagai *'personality evaluated'* (dalam Hall & Lindzey, 1985). Di sini karakter dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah mengalami internalisasi dalam diri seseorang. Maka dikatakan: seseorang memiliki karakter baik atau buruk. Sedangkan sampai seberapa dalam seseorang itu meyakini dan mendasarkan sikap perilaku pada nilai-nilainya tersebut, dipakai untuk menggambarkan kuat lemahnya karakter orang tersebut. Pengertian lain yang lebih umum sifatnya merujuk kepada karakter sebagai *'who the person is'* atau siapakah dan bagaimanakah (sebenarnya) orang itu. Dalam konteks ini karakter merujuk pada bagaimana seseorang menghadapi dan mengatasi berbagai situasi dalam kehidupannya, baik kehidupan personal maupun kehidupan sosialnya. Pada sisi yang lain, kata *personality* pada dasarnya berasal dari kata *persona* yang berarti topeng. Carl Gustav Jung (dalam Hall & Lindzey, 1985)adalah tokoh utama dalam psikologi dalam atau *depth psychology* yang memakai kata persona ini untuk menggambarkan bahwa setiap orang menutupi wajah dirinya yang asli dengan topeng ketika tampil dalam situasi sosial. Mengapa manusia perlu topeng? Supaya wajah asli dapat menyesuaikan dirinya dengan norma dan kebiasaan sosial yang ada; supaya ia dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sosialnya; supaya ia dapat memainkan perannya secara tepat sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan sejuta supaya lainnya yang diharapkan oleh orang atau kelompok lain dari dirinya. Jika pengertian Allport tentang karakter disinergikan

dengan pengertian Jung tentang persona/topeng, terasa bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa dihadapkan pada persoalan eksistensial. Menjadi dirinya sendiri atau menjadi seseorang sebagaimana dikehendaki oleh orang lain? Pilihan apa pun yang diputuskan mencerminkan karakter individu tersebut. Namun ini menjadi suatu hal yang problematik ketika ia dihadapkan pada situasi yang kompleks karena bukan saja menyangkut dirinya tetapi juga bisa memengaruhi orang lain.

Karakter Personal *versus* Karakter Sosial

Suatu krisis dalam kehidupan tidaklah serta merta membuat seseorang berkarakter tetapi cukup banyak bisa menyibak bagaimana karakter dirinya. Krisis kehidupan bisa menghadapkan dirinya pada suatu persimpangan jalan: karakter diri sebagaimana ia tampil secara otentik atau kompromi sebagaimana ia diinginkan atau dicitrakan oleh orang lain. Berbeda dengan kedua pengertian di atas yang merujuk karakter secara personal, pengertian lain dari karakter merujuk kepada proses pengembangan karakter itu sendiri. Bertitik tolak dari rumusan '*character is a never ending proses*' (Soedarsono, 2002) setiap kali seseorang dihadapkan kepada situasi krisis diri, ia bisa memilih serta memutuskan sikap yang diambil berdasarkan apa yang ia yakini atau tidak yakini. Karakter merupakan inti dari perkembangan dan pengembangan diri pribadi manusia. Sejalan dengan pengertian karakter yang dikaitkan dengan kehidupan sosial yang lebih dinamis, karakter seseorang dapat dipahami sebagai integrasi yang dinamis dan stabil antara karakter personal dengan beragam peran sosial yang diembannya. Di sini karakter sudah memiliki dimensi sosial, tidak hanya dilekatkan pada pribadi. Bila fenomena karakter demikian diadopsi oleh sejumlah besar pribadi sebagai suatu kelompok dalam kehidupan sosial, maka hal ini bisa menggambarkan karakter sosial kelompok, komunitas bahkan bangsa.

Teori Fromm (1947, 1955) menguraikan secara panjang lebar mengenai berbagai macam karakter sosial ini. Namun menurut Maccoby (2002), Fromm tidak membedakan antara karakter personal dengan karakter sosial secara jelas. Secara konkrit, karakter sosial merupakan konsep yang sukar untuk dijelaskan karena pengertian aspek sosial di sini mencakup berbagai aspek psikolog, sosiologi, antropologi dan ekonomi dari kehidupan masyarakat. Kesemua aspek ini saling kait-mengait dan memengaruhi dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan. Akibatnya mudah terjadi kerancuan pengertian antara karakter personal orang per orang dengan karakter sosial. Karakter sosial direduksi dan dideskripsikan dengan aspek karakter personalnya. Seorang guru dan seorang birokrat bisa digambarkan memiliki karakter yang mengandung sifat-sifat toleran, terbuka, bertanggung jawab. Namun

karena konteks sosialnya berbeda, karakter sosialnya pun berbeda pula. Yang guru boleh jadi toleran terhadap perbedaan latar belakang, terbuka terhadap pengetahuan baru serta memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya, sedangkan yang birokrat toleran terhadap proses pekerjaan dan lini prosedural yang harus dilalui, terbuka terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan, dan bertanggung jawab terhadap atasannya.

Maccoby selanjutnya mengatakan bahwa berbagai nilai yang dinamis ataupun sikap emosi yang dimiliki oleh suatu kelompok, yang tercermin melalui karakter sosialnya, dapat dipahami sebagai budaya (kelompok) yang terinternalisasi dan berkelindan dengan karakter personalnya. Dalam konteks pendidikan, bagaimana nilai-nilai yang diinternalisasikan oleh sekelompok siswa teman sepermainan berkelindan dengan nilai-nilai seorang siswa anggota kelompok tersebut dalam pergaulan di sekolahnya. Budaya (pendidikan) sekolah tidak hanya memberikan gambaran ideal tetapi juga makna dari suatu perilaku. Hal ini memungkinkan adanya variasi karakter sosial yang berbeda. Misalnya, siswa yang obsesif akan berbeda dengan anak didik yang reseptif tetapi terbuka. Interaksi krusial terletak pada tepat (*'fit'*) tidaknya karakter personal anak dengan budaya kelompoknya. Pada umumnya karakter sosial anak belum berurat-akar pada karakter personalnya karena masih mencari bentuk. Kelompok teman sepermainan memberi dirinya tempat dan pengakuan. Ini pula sebabnya, anak kemudian cenderung mudah 'terbawa' arus konsensus, kompromi yang berlaku dalam kelompoknya tersebut di tengah-tengah perubahan masyarakat yang terjadi. Sekalipun demikian masih ada sekelompok kecil siswa-anak yang tetap berpegang pada nilai keyakinan dan tetap bertahan bahkan produktif di tengah-tengah perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks pendidikan pertanyaannya adalah jika karakter personal anak didik sedikit banyak terbentuk dan mulai berkembang di dalam lingkungan keluarga, maka karakter sosial yang bagaimanakah yang dituju melalui pendidikan di sekolah?

Karakter Sosial

Dalam pengertiannya secara luas, pendidikan merupakan salah satu mata rantai dari proses sosialisasi yang mencakup penguasaan akan pengetahuan dan pembelajaran berbagai keterampilan serta sikap. Secara langsung maupun tidak dan sadar maupun tidak sadar, pendidikan menopang pembentukan kepercayaan (*'beliefs'*) dan nilai-nilai moral pada diri anak didik (Lambas & Holborn, 2004).

Jelaslah dari pengertian umum ini bahwa pendidikan memiliki berbagai aspek yang berdampak luas pada tatanan sosial dan kualitas kehidupan masyarakatnya. Pada suku-suku terasing misalnya, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan keseharian

lainnya. Anak-anak belajar melalui pengalaman kebersamaannya dengan orang-orang dewasa lainnya. Pun pembelajaran yang diberikan oleh orang dewasa dalam kelompoknya dilakukan dalam bentuk kegiatan rutin sehari-hari: berburu, mengais, bercocok tanam dan sebagainya. Pada masyarakat modern yang sudah lebih terdiferensiasi, lembaga-lembaga pendidikan berkembang dengan tugas mendidik yang dibebankan secara khusus pada profesi guru. Pendidikan formal secara massal, klasikal mulai dibentuk sejalan dengan industrialisasi kehidupan masyarakat. Contoh yang jelas dapat kita lihat pada dua negara yang dinyatakan kalah pada Perang Dunia II dan hancur-lebur kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Ketika kalah dalam Perang Dunia II dan harus membangun negerinya kembali, Jerman masih memiliki modal lapisan terpelajar masyarakatnya. Setelah perang Jerman membangun perekonomiannya dan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia dalam waktu relatif singkat. Sebaliknya, akibat dijatuhkannya bom atom pada Perang Dunia II Jepang bukan saja hancur tetapi juga tidak memiliki modal sosial sumber daya manusia, tetapi mampu bangkit kembali melalui pendidikan keterampilan sehingga memiliki tenaga kerja yang handal dan berdisiplin tinggi. Gambaran kebangkitan kembali suatu bangsa yang kalah dan hancur sebagai akibat perang ini tidak lepas dari gambaran karakter sosialnya sebagai suatu bangsa.

Dalam konteks demikian, maka pemahaman akan berbagai perspektif tentang pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat perlu disadari. Pengertian perspektif di sini merujuk kepada suatu proses kesinambungan antara proses dan hasil pendidikan dengan tujuan dibutuhkannya suatu tatanan masyarakat yang baik secara sosiologis. Menurut Lambas & Holborn (2004) Di antara sejumlah perspektif yang dikenal, ada empat yang dapat diajukan di sini, yaitu persepektif fungsionalis, perspektif liberal, perspektif posmodernis, dan perspektif interaksionis.

Perspektif fungsionalis

Perspektif ini bertitik tolak dari dua pertanyaan dasar mengenai pendidikan: (1) apakah fungsi dari pendidikan bagi suatu masyarakat secara keseluruhan; pertanyaan ini mengacu pada kontribusi pendidikan bagi pelestarian nilai-nilai yang disepakati bersama dan rasa solidaritas antar sesama warga; dan (2) apa dan bagaimanakah hubungan fungsional yang ada antara pendidikan dengan berbagai sistem sosial lainnya; pertanyaan ini mengarah pada hubungan antara pendidikan dengan sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara.

Secara umum perspektif ini mengarah pada fokus kontribusi pendidikan terhadap pemeliharaan kesinambungan sistem sosial. Selanjutnya Lambas dan Holborn menytir

tokoh sosiologi Emile Durkheim yang menekankan nilai-nilai komitmen sosial, rasa saling memiliki (*'sense of belonging')* dan perasaan bahwa kepentingan sosial lebih tinggi dari kepentingan pribadi. Baginya, pembelajaran sejarah memiliki fungsi mempertautkan kehidupan individu dengan masyarakatnya. Jika pembelajaran sejarah diberikan kepada anak-anak secara hidup maka mereka diharapkan bisa melihat dirinya sebagai suatu bagian dari kelompok bangsa yang lebih besar. Hal ini dapat mengembangkan kesadaran dan komitmen untuk tetap melangsungkan hidup kelompok sosial masyarakatnya. Pada perspektif ini sekolah memiliki peran yang berbeda dari keluarga dan masyarakat. Sekolah merupakan 'miniatur kehidupan sosial' yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan keluarga tetapi dalam bentuk yang paling sederhana dari bentuk suatu masyarakat.

Perspektif liberal

Perspektif dengan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh besar pada pendidikan di Amerika Serikat, John Dewey, ini berpandangan bahwa tujuan utama pendidikan adalah pengembangan *'well being'* individu dan baru kemudian secara tidak langsung masyarakatnya. Bagi Dewey, tugas pendidik adalah mendorong individu untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya sebagai pribadi manusia. Seseorang diharapkan belajar melalui mengalami atau melalui melakukan sesuatu dari pada diberi tahu tentang sesuatu. Baginya, suatu sistem pendidikan adalah bagian yang vital bagi kehidupan demokrasi yang ditandai dengan fleksibilitas dan toleransi di mana setiap individu dapat saling bekerja sama secara sederajat.

Perspektif posmodernis

Dipengaruhi oleh pandangan Lyotard, perspektif ini berpandangan bahwa pendidikan membebaskan manusia dari keterbelakangan dan ketidaktahuan melalui penyebaran pola pikir rasional dan ilmiah sehingga masyarakat terlepas dari belenggu kepercayaan-kepercayaan yang irasional dan keterbelakangan tradisi. Salah satu sistem yang diajukan oleh perspektif ini adalah pengakuan terhadap pluralisme budaya dan adanya kebutuhan bagi kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Bagi Usher dan Edwards (dalam Lambas & Holborn, 2004), berbagai kelompok yang berbeda ini dapat membentuk pendidikannya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, misalnya pendidikan sepanjang hayat, eksplorasi dan pengakuan terhadap perbedaan budaya serta adanya pendidikan khusus bagi dan oleh kelompok-kelompok yang termarjinalisasi.

Perspektif interaksionis

Bagi penganut perspektif ini, pendekatan pengembangan inteligensi, pengaruh budaya dan stratifikasi sosial yang ada bersifat deterministik. Perilaku manusia ditentukan dan diarahkan oleh berbagai faktor di luar diri yang berada di luar kendali dirinya. Berlawanan dengan pandangan lainnya, penganut perspektif interaksionis memandang bahwa untuk memahami perilaku manusia perlu diperhitungkan kondisi subjektif dan makna yang diberikan oleh individu tersebut terhadap berbagai stimulus dalam lingkungan sosialnya. Dalam hal ini orang lain, khususnya yang signifikan, merupakan sumber stimulus eksternal yang penting. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain akan diinterpretasikan dan dimaknai secara subjektif. Bagi penganut ini, konsep diri seseorang terbentuk dari interaksinya dengan orang lain.

Karakter Sosial dalam dan untuk Pendidikan di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar ke empat di dunia, dengan kekayaan alam yang berlimpah dan keberagaman budaya yang demikian majemuk serta dibangun atas dasar sumpah: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, pada tahun 1928. Namun hingga kini gejala-gejala perilaku menyimpang masih relatif menonjol. Pada tingkat individual, perilaku korup, pelanggaran etika jabatan hingga sikap putus asa dalam bentuk membunuh bahkan bunuh diri merupakan gejala umum. Pada tingkat kelompok, perilaku kekerasan, konflik sosial hingga warga masyarakat yang main hakim sendiri bukan sesuatu yang jarang terjadi. Lalu, mengapa pada saat terdapat lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan, justru karakter sosial wajah masyarakat Indonesia demikian negatif dan lemah?

Dalam hal ini kita perlu memahami dua ciri utama yang menonjol dalam budaya kehidupan keseharian masyarakat Indonesia, yakni kolektivisme dan budaya *'powerdistance'*. Dua ciri ini ditandai oleh kecenderungan untuk berorientasi pada pihak yang memiliki sumber dan memegang kekuasaan dan hubungan relasional yang sifatnya hirarkis (Setiadi, 2008). Jika ciri *'power distance'* ini kita letakkan dalam konteks interaksi guru – anak didik, maka hal ini dapat menimbulkan serta membiasakan sikap ketergantungan pada sesuatu yang lebih tinggi, lebih tahu dan lebih menentukan (nilai) diri siswa. Secara positif, ciri budaya demikian ini dapat memberikan peluang bagi guru untuk menerapkan sikap-sikap positif kepemimpinannya dalam bentuk apa yang selama ini dikenal sebagai gagasan landasan dalam mendidik Ki Hajar Dewantoro (Raka *et al.*, 2011) dalam konteks budaya Jawa: "Ing ngarso sung tulodo" – di depan memberikan teladan; "Ing madyo mangun karso"

– di tengah membangun motivasi, dan "Tutwuri handayani" – dari belakang memberikan inspirasi.

Namun dari sisi lain ciri '*power distance*' ini dapat menimbulkan sikap pasif pada anak didik dan upaya agar selalu dapat 'mengambil hati' gurunya. Hal ini bisa berkembang menjadi sikap ABS (asal bapak senang). Sementara bagi guru, pemenuhan kebutuhan akan pengakuan yang berlebihan dapat menimbulkan arogansi yang bertentangan dengan proses pembelajaran dan pendidikan itu sendiri.

Dalam interaksi antar sesama anak didik, maka yang lebih pandai, lebih mampu secara material, lebih besar secara fisik dapat memiliki pengaruh yang kuat. Jika tidak dikelola secara tepat dan proporsional maka hal ini dapat menimbulkan kebiasaan-kebiasaan sikap perilaku yang tidak diinginkan kelak di masyarakat. Sikap-sikap eksklusivisme, '*bullying*', dan pembentukan geng adalah contoh-contoh konkrit dari bentuk yang lebih besar dan nyata destruktifnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Sisi positifnya adalah pembentukan kebiasaan untuk melindungi yang lemah oleh yang kuat, sifat membagi kepada yang kurang mampu oleh yang lebih mampu.

Pengaruh ciri '*power distance*' terkait dengan ciri kolektivisme ditandai dengan ketakutan untuk mengambil keputusan yang berbeda dari kepentingan kelompok, untuk menjadi diri yang berbeda dari anggota kelompok. Namun secara positif ciri ini dapat mensolidasikan kesadaran bahwa menjadi guru bukan saja suatu pekerjaan tetapi sebagai tugas mulia melalui sikap profesional dan etis dalam wadah organisasi profesi yang kredibel, bermartabat dan terhormat. Pengakuan ini tidak datang secara formal kelembagaan tetapi terutama dari sikap dan kondite anggota-anggotanya. Secara negatif, inisiatif, kebebasan berekspresi dalam mengajar kurang dihargai karena semua harus berjalan secara sama dan seragam. Padahal ada pernyataan yang menyatakan, '... *a teacher does not teach what he/she knows or what he/she wants but a teacher teaches what he/she is*' (dalam Soedarsono, 2005). Dalam konteks interaksi antar anak didik, secara positif ciri kolektivisme dapat mengembangkan perasaan solidaritas antara sesama, kekompakan dalam bekerja sama dan sikap toleran. Sedangkan sisi negatifnya adalah sama seperti yang disebutkan pada contoh 'power distance' di atas.

Perlu disadari bahwa baik sisi positif maupun sisi negatif dari kedua ciri budaya ini menyumbang pada pengembangan karakter sosial anak kelak dalam bentuk wawasan dan sikap. Melalui penggambarannya tentang bangsa Indonesia, Tilaar (2007) melihat bahwa pengembangan karakter sosial anak tidaklah terlepas dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia mempunyai pengalaman sejarah, baik yang positif maupun negatif, yang sama

dan menyatu. Sebagai bangsa Indonesia, kemajemukan masyarakatnya mengakui adanya keinginan menunjukkan kekayaan budaya lokal dan nasionalnya. Untuk ini diperlukan rasa toleransi yang tinggi, pengakuan terhadap perbedaan dan tumbuhnya rasa dan sikap percaya terhadap sesama (*'social trust'*). Selanjutnya menurut Tilaar wawasan dan sikap ini dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah pada beberapa hal. Pertama, pada pembentukan konsensus atas nilai-nilai moral dan kebajikan bersama dari norma-norma sosial yang ada. Kedua, melalui dialog lintas kelompok sebagai upaya menjembatani kemajemukan. Terakhir, adanya penghargaan atas perilaku yang diperlihatkan oleh individu maupun kelompok yang dianggap sebagai bentuk '*modelling*'.

Namun baik sisi negatif maupun positif kedua ciri budaya yang menjadi landasan pengembangan karakter sosial ini memiliki satu kesamaan, yaitu tidak dapat diajarkan dalam bentuk pembelajaran yang sifatnya instruksional melainkan interaksional baik di dalam maupun di luar kelas. Inilah yang disebut oleh Dewey (dalam Santrock, 2001) sebagai '*hidden curriculum*' dari program pembelajaran di sekolah. Bagi Santrock kurikulum tersembunyi ini dicerminkan melalui atmosfir moral yang merupakan bagian dari keseluruhan atmosfir sekolah. Dengan lain perkataan atmosfir sekolah adalah budaya sekolah yang tercipta melalui berbagai aturan, orientasi dan sikap etis profesional guru dan pengelola serta materi pelajaran itu sendiri. Guru adalah *'role model'* dari perilaku etis bagi anak-anak didiknya. Aturan kelas dan hubungan antar teman merupakan sarana dan wahana bagi timbul dan berkembangnya sikap-sikap negatif maupun positif sebagai sesama anak didik. Melalui manajemen pendidikan yang baik, teratur serta transparan, pengelola pendidikan memberikan cerminan sistem nilai yang dianut sekolah tersebut.

Dengan demikian mengupas masalah peran psikologi pendidikan dalam pembentukan karakter sosial bangsa melibatkan faktor-faktor perspektif pendidikan, anak didik yang mengembangkan karakter individual dan sosialnya, guru sebagai tokoh sentral serta fungsi sekolah yang bukan hanya sekadar lembaga formal tempat penyelenggaraan pendidikan dilangsungkan melainkan juga sebagai sarana simulasi kehidupan bermasyarakat dari para warganya, dalam hal ini guru, anak didik serta pengelola lainnya.

Menurut James Arthur (dalam Tilaar,2007) sebagai suatu lembaga sosial sekolahpun memiliki sejumlah fungsi: (1) mempromosikan hak dan tanggung jawab siswa sebagai warga negara; hal ini diterapkan melalui pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral dengan komitmen sebagai warga negara yang berpartisipasi melalui ciri-ciri empati, peka dan peduli terhadap apa yang terjadi terhadap sesama dan lingkungannya; (2) mempromosikan pengertian kebaikan bersama (*'common goods'*); partisipasi bersama demi kepentingan dan tujuan bersama mengajarkan perlunya
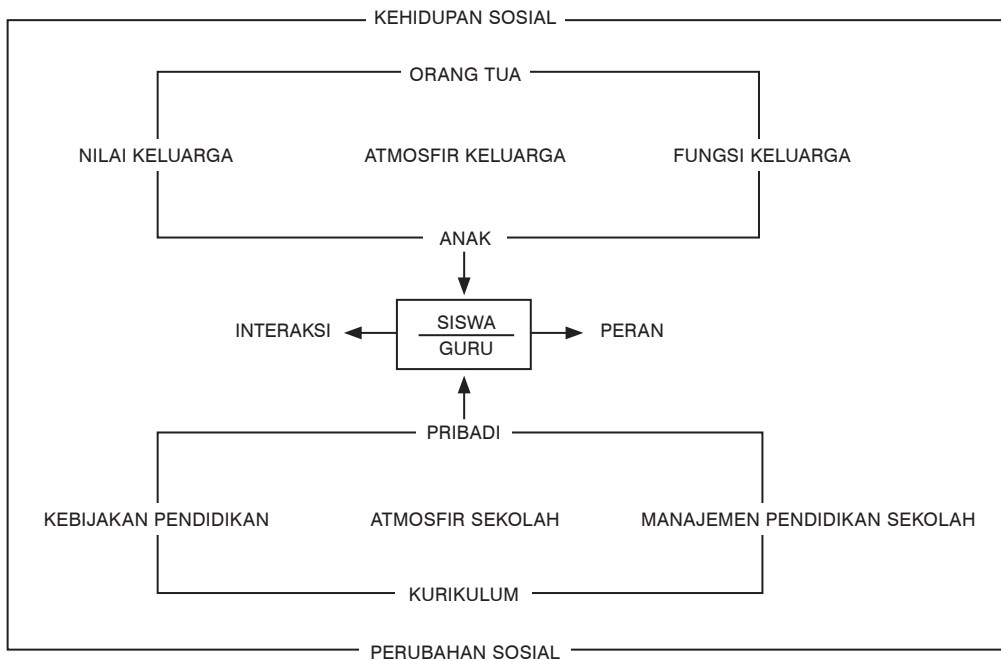
Gambar 1. Hubungan Antar Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pembentukan dan Pengembangan Karakter Personal dan Karakter Sosial

pertimbangan akan adanya keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan yang lebih besar; (3) memiliki perspektif komunalitas terhadap kelompok dan budaya lokal yang ada dalam masyarakat; melatih sikap keterbukaan terhadap keberagaman dalam pola kehidupan di berbagai sektor kehidupan masyarakat lingkungannya; (4) mengadopsi struktur demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; di sini peran Komite Sekolah sama pentingnya dengan manajemen sekolah dalam mengelola proses belajar mengajar yang terjadi. Secara skematis hubungan antara kesemua faktor yang berpengaruh dalam pembentukan dan pengembangan karakter personal dan karakter sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema di atas merupakan kerangka konteks dari sejumlah faktor yang saling berkontribusi terhadap pembentukan dan pengembangan karakter personal dan karakter sosial anak yang akan berkembang dan berperan sebagai warga negara dari masyarakat dan bangsanya. Tinjauan dinamis keterkaitan antar faktor yang multivariat tersebut dapat dilakukan berdasarkan perspektif pendidikan yang dapat dipilih dan diterapkan sebagaimana diuraikan di atas. Sedangkan prinsip dasarnya tentu mengacu pada berbagai

kebijakan pendidikan yang telah digariskan oleh Pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional yang dianut.

Oleh karena itu pemerintah perlu menyadari bahwa dalam merancang program pendidikan secara nasional perlu disadari pertama-tama bahwa pendidikan bukanlah sarana dan wahana pengembangan kompetensi semata. Yang pertama dan utama adalah pendidikan seharusnya berorientasi pada pengembangan karakter anak didik. Dengan karakter maka nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat terinternalisasikan melalui kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstra-kurikuler di sekolah. Oleh karena itu pula perhatian terhadap guru sebagai pengajar dan pendidik perlu diperhatikan dari segi kompetensi dan kesejahteraannya. Tanpa ini mustahil guru dapat menjadi *role model* bagi anak didiknya. Namun karakter tidak bisa diajarkan melalui apa yang diketahui dan diajarkan oleh guru melainkan berupa proses pembelajaran itu sendiri melalui bentuk *modelling* yang diperoleh anak didik melalui interaksi dengan gurunya.

Penutup

Psikologi pendidikan kiranya perlu memahami semua faktor yang telah diuraikan di atas agar dapat mendudukkan masalah pembentukan karakter bangsa dalam tempatnya secara tepat sesuai dengan ilmu dan tujuan pendidikan itu sendiri. Pembentukan dan pengembangan karakter, baik personal maupun sosial, adalah suatu proses yang berjalan tanpa henti dan tampil dalam bentuk penilaian orang atau kelompok lain terhadap diri atau kelompok di mana seseorang menjadi anggota. Pendidikan merupakan sarana dan wahana lanjutan dalam pengembangan karakter anak didik. Oleh karena itu, sekolah bukan hanya tempat penyelenggaraan pendidikan tetapi sekaligus merupakan 'miniatur masyarakat' di mana anak didik dapat mensimulasikan sikap dan perilakunya sebagai calon warga negara dalam arti sepenuhnya. Guru dan praktisi pendidikan lainnya merupakan tokoh sentral dalam proses pengembangan karakter anak secara utuh dalam aspek kognitif dan aspek afektif yang tercermin dari kemampuan melakukan berbagai pertimbangan rasional atas dasar nilai moral, pelatihan kepekaan afek atas dasar 'rasa' dan pertimbangan nurani. Hal ini selanjutnya akan tampil dalam berbagai sikap dan perilaku santun yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan kedewasaan diri anak didik. Dalam melakukan proses pembelajaran, guru dan praktisi pendidikan lainnya hendaknya menyadari bahwa melalui dan dalam pendidikan itu sendiri *'... knowledge is power but character is more'*.

Daftar Acuan

Fromm, E. (1947). *Man for himself.* New York: Holt, Rinehart and Winston.

Fromm, E. (1955). *The sane society*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Hall, C., & Lindzey, G. (1985). *Introduction to theories of personalities*. New York: John Wiley and Sons.

Lambas, M.H., & Holborn, M. (2004). *Sociology. Themes and Perspectives* (6th ed.). London: Harper Collins.

Maccoby, M. (2002). Toward a science of social character. *International Forum of Psychoanalysis, 11*, 33–44.

Raka, G., *et al*. (2011). *Pendidikan karakter di sekolah. Dari gagasan ke tindakan.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Santrock, J.W. (2001).*Educational psychology*. Boston: McGraw Hill.

Setiadi, B. (2008). *Relevansi Psikologi Lintas Budaya dalam memahami Kepemimpinan Global*. Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Psikologi. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Soedarsono, S. (2002*). Character building. Membentuk watak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Soedarsono, S. (2005). *Hasrat untuk berubah. The willingness to chang*e. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia. Etnisitas dan identitas bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

6
Menumbuh-kembangkan Generasi Berintegritas Moral

Irwanto

Latar Belakang

Indonesia tidak kekurangan manusia cerdas dan sistem pendidikan kita tidak gagal total dalam mendidik anak pandai. Berita tentang anak Indonesia yang menjuarai berbagai kompetisi akademik secara nasional maupun internasional cukup menggembirakan. Bersamaan dengan itu berita ironis tentang orang-orang Indonesia cerdas pandai yang menyandang sederet gelar akademik dan menduduki posisi publik sangat terhormat tetapi terjerat kasus korupsi dan kejahatan lainnya tak kalah marak. Orang-orang cerdas pandai tetapi berperilaku merugikan kepentingan publik inilah tolok ukur keberhasilan sebenarnya dari sektor pendidikan dan religius kita.

Gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, dalam waktu sebulan menduduki jabatannya, menguak adanya perompakan besar-besaran terhadap hasil kelautan kita oleh anasir-anasir asing disertai bukti-bukti penangkapan yang riil, telah membongkar rahasia bertahun-tahun sebelumnya. Menteri-menteri sebelumnya yang berpendidikan lebih baik, tentu tidak kalah cerdas, dan mempunyai kekuasaan yang sama, bahkan mungkin lebih tinggi jika berasal dari angkatan bersenjata RI dari Ibu Susi. Tetapi selama puluhan tahun, tidak ada yang berani mengungkapkan kenyataan pahit ini. Mereka semua disumpah di atas kitab suci dan berdasarkan UUD 1945 serta Pancasila, tetapi hanya sang menteri yang lulusan SMP yang menunjukkan tindakan tegas berdasarkan apa yang dia ketahui – dan tentu meyakini bahwa tindakannya benar. Menteri-menteri sebelumnya tidak mungkin tidak tahu, tetapi absen mengambil tindakan. Tidak ada keberanian? Kurang keyakinan kah? Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah?

Kecerdasan dan aplikasinya dalam hidup menjadi manusia pandai memang tidak mudah. Kecerdasan membantu manusia memecahkan banyak sekali persoalan hidup, tetapi

tidak semua masalah dalam hidup manusia cukup dipecahkan dengan otak saja. Keberanian untuk mengambil keputusan (dan risikonya), serta keyakinan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik sementara belum semua risiko dapat dipertimbangkan, bukan persoalan kecerdasan saja – tetapi determinasi. Determinasi yang dilandasi pertimbangan etika dan moral meloncat lebih jauh dari sekedar kecerdasan karena telah masuk ke ranah *deeper knowledge* – kombinasi antara pengetahuan atas suatu subjek tertentu dengan intuisi untuk memutuskan sesuatu yang diyakininya "benar". Inilah yang saya maksud sebagai integritas moral (Koehler & Harvey, 2004). Dalam situasi ketidakpastian itu individu dapat terjebak bias, melakukan tindakan yang diketahuinya merupakan perilaku salah, dengan alasan adanya kepentingan-kepentingan mendesak tertentu sehingga dapat dimaafkan atau merasa dilindungi oleh anggota kelompoknya (Jiang dkk, 2011).

Bagaimana menumbuh kembangkan karakter yang mempunyai integritas moral pada anak-anak kita sehingga berbagai peristiwa memalukan yang kita nikmati seperti sinetron dalam periode pasca reformasi politik dapat diperkecil? Ini tentu merupakan "One million US dollar question" yang tidak mudah dijawab. Tetapi jika proses ini mau tidak mau harus segera dimulai sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia yang kuat dan hebat, maka kita harus bersama-sama mencari jalan keluarnya. Untuk itu perlu segera disadari bahwa tugas menumbuh-kembangkan karakter anak yang berintegritas bukan tanggung jawab satu pihak saja. Orang tua, komunitas religius, komunitas media dan industri lainnya, serta negara harus mau mengambil tangung jawab yang serius. Pihak-pihak ini tidak lagi saling menuding yang memojokkan pihak lain bertanggung jawab terhadap kemerosotan moral anak muda atau anggota legislatif.

Kajian Psikologi Mengenai "Perbuatan Baik"

Jika mempelajari literatur disiplin ilmu psikologi mengenai apa yang kita ketahui tentang integritas, perbuatan baik, perilaku pro-sosial, dan berbagai aspek perilaku manusia yang dianggap "mulia", "soleh", "baik", "bermoral" – maka kita semua akan sangat pesimis dalam tugas Nawacita membangun karakter bangsa. Berikut ini beberapa penelitian yang dapat dikutip di tengah maraknya penelitian serupa yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah.

Manusia mudah bertekuk lutut pada otoritas yang kecil atau ringan

Experimen Milgram (1974) disebut sebagai studi emperimental mengenai "Kepatuhan terhadap Otoritas" (*Obedience to authority*) – walau dalam iklannya pada mahasiswa disebut sebagai studi tentang memori. Eksperimen dilakukan di Universitas

Yale (USA) pada tahun 1961, 3 bulan setelah dimulainya sidang terhadap penjahat perang Nazi Jerman Adolf Eichmann di Yerusalem. Dalam eksperimen ini[1] subjek eksperimen diminta untuk menghukum "mahasiswa" yang menjawab salah pada pertanyaan yang diajukan dengan kejutan listrik (*electric shock*). Hasilnya sangat mengagetkan. Walau subjek eksperimen adalah orang-orang yang dipilih karena dianggap sering berbuat baik, beragama, tidak pernah melakukan kekerasan, mempunyai pandangan etik dan moral yang jelas – tetapi dalam eksperimen tersebut mereka mudah sekali diperintah untuk melakukan tindakan keji menyiksa orang (katanya "mahasiswa" yang sedang belajar) hanya karena jawabannya salah. Dalam eksperimen yang dilakukan beberapa kali melibatkan 100 subjek penelitian, 65% subjek mau melakukan kejutan mematikan setinggi 450 volt. Dalam kesimpulannya, Milgram menyatakan bahwa dalam situasi yang sama, orang Amerika tidak akan kalah kejinya dengan Nazi Jerman. Walau penelitian ini dikritik karena melanggar etika penelitian (subjek menanggung rasa bersalah setelah mengikuti eksperimen), sampai hari ini penelitian Milgram menjadi referensi penting tentang mudahnya manusia tunduk pada kekuasaan (Baumrind, 1964).

Perbuatan baik dalam studi psikologi

Dalam pemikiran awam dan keyakinan sehari-hari kita percaya bahwa ada orang yang pada dasarnya baik sehingga dalam situasi apa pun ia akan tetap berbuat baik. Disiplin ilmu psikologi tampaknya memberikan bukti-bukti yang kurang mendukung. Walau banyak psikolog yang percaya bahwa "kebaikan" atau "kebajikan" (*virtue*) yang didukung oleh nilai-nilai religius mampu tertanam dalam diri manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian dan temperamen manusia (McCullough & Willoughby, 2009; Saroglou, 2010). Meskipun demikian, sebuah kajian kritis yang mengupas berbagai penelitian empirik menunjukkan bahwa religiositas tidak serta merta akan berkorelasi dengan perbuatan baik. Bagi mereka yang menyatakan dirinya religius karena pertimbangan sosial, perbuatan baik (dalam hal ini kebanyakan perbuatan membantu orang lain atau perilaku pro-sosial) bersifat sangat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran untung-ruginya melakukan tindakan itu yang akan berdampak pada dirinya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengaku sebagai orang baik dan religius gagal untuk berbuat baik karena *by stander efect* misalnya atau alasan untung-rugi lainnya (Galen, 2012).

Mereka yang memiliki keyakinan akan pentingnya berbuat baik pada orang lain disertai keyakinan bahwa perbuatannya selalu dimonitor oleh otoritas di luar kekuasaannya, cenderung lebih konsisten dalam berbuat baik karena ia tidak terlalu mempedulikan apa

pandangan atau kata orang lain di sekitarnya. Mereka ini disebut sebagai manusia yang mempunyai keyakinan religiositas yang instrinsik.

Terjerembabnya manusia bermoral

Peristiwa memalukan yang terjadi pada seorang Hakim Konstitusi senior dan seorang Menteri Agama di dalam Kabinet Bersatunya Presiden Yudhoyono karena kasus korupsi merupakan contoh terjerembabnya orang yang diyakini mempunyai standar moral tinggi ke dalam lembah hitam. Kajian-kajian psikologi menyebut peristiwa seperti itu sebagai contoh dari berlakunya *moral licensing* dan *moral cleansing* (Effron, 2012; Effron, Monin, Miller, 2012; Effrom & Monin, 2010; Gollwitzer & Keller, 2010; Gollwitzer, Keller, & Brown, 2012; Garza, Bucheli, Espinosa, Muñoz, 2011).

Dalam khasanah kajian kognitif Leon Festinger (1919–1989) berteori bahwa seseorang yang secara kognitif meyakini norma-norma tertentu dalam perbuatan baik, maka ia akan merasa sangat gelisah ketika ia melakukan tindakan yang diketahuinya adalah salah. Gejala ini disebut disonansi kognitif (Festinger, 1957). Mengapa mereka yang tahu bahwa tindakannya itu salah masih melakukannya lagi berulang-ulang? Apakah perasaan seseorang dapat menjadi tumpul karena faktor-faktor tertentu? Peneliti di bidang disonansi kognitif menyatakan bahwa rasionalisasi – yaitu mencari alasan yang rasional atas perbuatan yang salah akan membantu menetralkan "ketidak nyamanan" batin atau kegelisahan yang dirasakan. Semakin sering rasionalisasi dilakukan semakin tipis keyakinan yang dipercaya itu dirasakan perlu untuk dipraktikkan dan semakin tidak berfungsinya rasa bersalah.

Studi eksperimental sosial mengenai *moral licensing* memperkaya hasil dari riset di bidang disonansi kognitif dengan menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya bukan makhluk yang setia pada keyakinannya sendiri. Sebagai manusia yang rasional dan pengambil keputusan yang sadar, manusia lebih sering mempertimbangkan konsekuensi perilakunya di mata orang lain dan di matanya sendiri dan bukan semata-mata karena keyakinan atau kepercayaan tertentu.

Orang bijak selalu mengatakan bahwa lingkungan yang buruk akan mengubah orang baik jadi buruk. Walau pernyataan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kejahatan yang sebenarnya ada di luar diri manusia, studi psikologi dengan jelas menunjukkan bahwa awal dari segalanya justru dalam diri manusia itu sendiri (Jun 2013). Seseorang dapat memperoleh *credential* bahkan *license* menjadi orang baik ketika ia berasosiasi dengan orang-

orang yang mempunyai reputasi baik. Dengan demikian, ia menjadikan dirinya sebagai *in-group member* dari kelompok tersebut (Kouchaki, 2011).

Tidak sedikit orang seperti ini yang ada dalam partai politik besar di Indonesia. Seorang yang pernah dipenjara karena kasus korupsi dapat menjadi salah satu pengurus partai besar dan berbuat sama seperti yang dilakukan oleh partai itu di depan masyarakat umum (bersedekah, membela rakyat kecil, dekat dengan tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya.). Dalam statusnya yang baru ia tak hanya memperoleh reputasi (*credential*) sebagai orang baik, tetapi di bahkan memperoleh penghargaan positif dari rekan-rekannya (*licensing*). Ketika ia melakukan kesalahan, maka *credential* dan *licensing* inilah yang akan melindungi dia dari hukuman kelompok maupun publik (Effron, 2012; Garza dkk 2013). Bahkan kesalahan yang sudah bersifat publik pun dapat diputihkan kembali melalui pengakuan peer-group (Brown, Tamborski, Wang, Barnes, Mumford, Connelly, Devenport, 2011; Gollwitzer & Keller, 2010).

Berbagai penelitian di atas hanya menunjukkan bahwa banyak sekali masalah internal dan ekesternal yang menentukan perilaku seseorang. Pelajaran yang diperoleh tampaknya selaras dengan nasihat kebajikan orang Jawa, yaitu "*Ojo* atau *Ora pamrih*"[2]. Dalam kalimat pendek itu, seorang yang ingin berbuat baik, dilarang untuk mempertimbangkan untung-rugi dari kebajikannya. Selama orang tidak berpikir apa keuntungan atau reaksi orang lain terhadap dirinya, maka perbuatan baik dapat dipertahankan untuk kebaikan itu sendiri.

Membangun Lingkungan yang Mendukung (*enabling environment*)

Pelajaran yang dapat ditarik dari sekelumit eksperimentasi sosial dalam disiplin ilmu psikologi adalah bahwa manusia pada umumnya tidak akan mampu mempertahankan dirinya untuk menjadi manusia berwatak dan bermoral sekaligus karena manusia dalam kodratnya adalah makhluk rasional. Rasionalitas jelas merupakan kekuatan manusia karena banyak persoalan dapat dipecahkan karena adanya aspek rasionalitas dalam diri manusia. Meskipun demikian, banyak penelitian empirik di bidang moral yang juga menunjukkan bahwa rasionalitas inilah justru titik lemah dari perkembangan manusia untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh bermoral.

Seperti telah dikatakan di depan, persoalan moralitas bukan sekedar persoalan yang dapat didekati dengan kecerdasan intelektual yang dekat hubungannya dengan rasionalitas. Menjadi manusia berwatak yang berlandaskan moral perlu loncatan ke alam "keyakinan" atau *deep knowlege*. Orang Jawa sangat memahami bahwa akan sulit untuk konsisten dengan

nilai-nilai moral kita, termasuk dalam perbuatan baik, jika kita selalu berpikir apa reaksi orang lain, apa konsekuensi tindakannya itu pada dirinya sendiri. Akan tetapi kita tidak dapat menafikan kenyataan bahwa sebagian besar manusia (seperti dalam eksperimen Milgram) butuh bantuan untuk mendekati tujuan untuk "menjadi (*being*)" manusia yang berwatak dan bermoral. Salah satunya adalah dalam bentuk penciptaan lingkungan yang mendukung.

Secara sadar kita semua mengakui kelemahan-kelemahan seperti yang diuraikan di atas, oleh karena itu kita bersama-sama harus membangun lingkungan yang mendukung. Ada lima lingkungan penting yang perlu mengalami perubahan tingkat ketiga, yaitu keluarga, pendidikan, keagamaan, kerja, dan politik.

Keluarga: Habitus? Keluarga merupakan unit terkecil dari kelompok manusia yang mempunyai hubungan sosial erat dan kesediaan berkorban antar anggota kelompok terbesar. Dalam kelompok inilah anak memperoleh contoh perilaku dan pendidikan pertamanya tentang nilai-nilai moral, etika, dan agama. Oleh karena itu, keluarga sering diharapkan sebagai "habitus" perbuatan baik. Persoalannya adalah waktu anak berada dalam lingkungan keluarga semakin menurun setelah anak berusia 12 tahun. Di samping itu, anak-anak Indonesia menghadapi berbagai kondisi rentan karena keutuhan Orang tua, kemiskinan, tidak dimilikinya identitas hukum, dan lain-lain yang menghadapkan anak pada risiko kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran (Irwanto & Kusumaningrum, 2014). Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, menjaga anak tetap bersama Orang tua, dan memperkecil risiko eksploitasi, penelantaran dan kekerasan merupakan prioritas perlindungan anak nasional (RPJMN, 2015). Intervensi berupa *parenting skill practices* untuk Orang tua dapat menjadi input penting dalam upaya membangun habitus perbuatan baik di rumah.

Sektor pendidikan kekuatan dan kelemahannya: perlu renovasi mendasar. Nawacita 8[3] dalam pembangunan karakter bangsa mengandalkan sektor pendidikan sebagai "kendaraan" kebijakan publik utama. Ini masuk akal karena lebih dari 92% anak Indonesia masuk dalam sistem ini minimal 3 sampai dengan 6 tahun dalam daur kehidupan mereka. Sekolah merupakan wahana pertama anak mempelajari sesuatu dari dan percaya pada figur otoritas yang bukan Orang tua sendiri. Bagi anak yang terbiasa dengan Orang tuanya, sekolah merupakan loncatan besar dalam membangun kepercayaan diri dan pada orang lain.

Dalam konteks ini, anak juga belajar keterampilan sosial karena harus hidup dan bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Dalam hal belajar dan prestasi belajar, anak

tidak hanya dapat membandingkan upaya dan hasil belajarnya dengan diri sendiri, tetapi juga dengan kebanyakan anak seusia di sekitarnya. Komparasi sosial ini penting karena menjadi bagian pengalaman anak yang menyadarkan kelemahan dan kekuatannya (dalam konteks pendidikan).

Dalam konteks sekolah formal, idealnya anak juga mempelajari informasi yang telah mengalami pra-seleksi. Informasi yang dianggap relevan dan cocok untuk anak-anak saja yang disajikan untuk menambah pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mengembangkan kepribadiannya. Dalam kerangka inilah, intervensi untuk membentuk perilaku atau pribadi anak tertentu dapat dikemas dan dijalankan sebaik mungkin.

Kekuatan lain dari sektor pendidikan adalah terlibatnya orang-orang dengan kualifikasi tertentu untuk mendidik anak. Idealnya guru-guru adalah SDM terseleksi yang mempunyai kompetensi untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan. Bahwa dalam kenyataannya masih belum ideal, memang dibutuhkan waktu lama untuk merestorasi pendidikan kita dan pendidikan di manapun. Pendidikan adalah institusi yang cenderung konservatif, super hati-hati dalam menerima dan menjalankan perubahan.

Terlepas dari berbagai kekuatan di atas, dengan cepat kita juga dapat menunjukkan berbagai penyakit kronis dalam sistem pendidikan kita. Salah satunya adalah pengajaran yang bersifat menghapal dan reproduktif. Anak tidak diajak melakukan pemecahan masalah secara kreatif tetapi sekedar meniru atau mengulang kembali cara pemecahan masalah yang telah diajarkan dan dihapalkan. Dengan demikian, maka pendidikan direduksi sekedar menjadi pengajaran saja.

Kreativitas tumpul hampir di semua pelajaran, terutama ilmu-ilmu sosial karena pendekatan yang dogmatis (hanya ada satu jawaban yang benar) atau keterbatasan dari pengetahuan pengajarnya. Pelajaran sejarah, misalnya, penuh dengan kesempatan untuk berpikir kritis dan inovatif. Tetapi di kebanyakan kelas di Indonesia kita hanya belajar tokoh, tahun, tempat, dan satu penjelasan yang dianggap benar tentang kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Anak jarang sekali belajar untuk bertanya: Mengapa? Bagaimana? Dan melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang ada.

Sebagai contoh: Mengapa Pangeran Diponegoro dan pasukannya yang bersenjata lebih sederhana menakutkan Belanda sehingga Jenderal de Kock menerapkan strategi Benteng Stelsel? Bagaimana Benteng Stelsel dijalankan? Bagaimana Pangeran Diponegoro mengatur strategi perangnya? Mengapa ketika ditangkap Diponegoro tidak segera dibunuh? Jika anda yang menjadi Pangeran Diponegoro, apa yang akan anda lakukan untuk menghancurkan Benteng Stelsel?

Dari statistik dari Kemendiknas menunjukkan bahwa baru 51% guru sekolah dasar dan menengah yang memenuhi standar pendidikan S-1. Kualitas guru merupakan komponen penting dalam pendidikan. Oleh karena itu memastikan terpenuhinya kualitas pendidikan guru serta memastikan distribusi guru berkualitas yang adil dan merata secara nasional perlu tindak kebijakan mendesak[4].

Kelemahan berikutnya dari pendidikan kita adalah telah terjadinya kesenjangan akses dan kualitas di semua jenjang di semua propinsi, kabupaten dan kota. Artinya tidak semua anak memiliki akses yang sama mudah dan terjangkau dan tidak semua anak menikmati pendidikan yang sama kualitasnya. Hal ini akan mempunyai dampak tersendiri pada pendidikan karakter melalui sekolah. Kesenjangan ini ditambah dengan beban-beban kesenjangan lainnya, terutama kesenjangan ekonomi, informasi, akses layanan kesehatan, dan kesempatan kerja (Patunru & Kusumaningrum, 2013) akan mempersulit pembangunan lingkungan yang mendukung kejujuran, *fairness,* dan kesempatan yang sama untuk masa depan mereka.

Mengatasi berbagai kesenjangan tersebut merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar. Jika setiap anak tidak memperoleh kesempatan yang sama dan kualitas pendidikan yang sama, maka pendidikan karakterpun akan bermasalah besar (SMERU, 2011). Kesadaran akan tantangan seperti inilah yang menyebabkan bahwa Nawacita mungkin akan membutuhkan waktu satu generasi dengan asumsi bahwa setiap pimpinan nasional yang terpilih pasca Joko Widodo mempunyai komitmen yang sama seriusnya.

Tuhan dapat disuap! Kenyataan di masyarakat sangat memprihatinkan. Semua perbuatan baik dalam bentuk uang tunai atau barang yang tertulis di baliho atau di iklan-iklan sosial disertai dengan iming-iming kehidupan kekal di surga. Seolah-olah niat seseorang beragama dan berbuat baik karena adanya "kewajiban" menabung dalam artian kuantitatif – baik frekuensi perbuatan maupun jumlah yang diberikan pada orang lain. Keselamatan non-duniawi dapat dibeli selagi masih hidup. Tuhan tidak menghiraukan lagi dari mana asal barang dan uangmu –asal engkau gunakan untuk kebaikan orang lain, maka dosamu akan dihapuskan. Begitu kira-kira pesan tersirat dalam komunikasi publik di ranah religiusitas kita saat ini.

Pendidikan agama di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas publik di sekolah dan di rumah. Jika sejak dini, religiusitas manusia Indonesia dicetak dalam semangat "ekonomi pasar" – maka kita tidak perlu bermimpi akan mempunyai generasi yang berwatak dan bermoral tinggi. Sektor religius mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempraktikkan falsafah Jawa dalam perbuatan baik tanpa pamrih. Oleh karena

itu, tokoh-tokoh serta pengelola institusi keagamaan harus sangat berhati-hati dalam mengomunikasikan keyakinan mereka pada umat, terutama yang masih kecil dan muda. Jika dalam kehidupan sehari-hari setiap perbuatan dapat bersifat transaksional, maka perbuatan baik dan religius seharusnya dapat mengatasi transaksi yang bersifat untung rugi semata. Teruslah berbuat baik walau sering dikecewakan karena berbuat baik itu baik bagimu, Penciptamu, dan orang-orang di sekitarmu. Kurang lebih begitulah harapannya.

Sektor kerja yang adil: dapatkah diwujudkan? Dunia kerja yang bermartabat (*decent work*) merupakan salah satu ukuran keberhasilan individu, keluarga, dan masyarakat. Harga diri seseorang (termasuk keluarga dan komunitasnya) diukur dari pekerjaan apa yang dilakukan dan seberapa besar otoritasnya. Meskipun demikian, di negara kita perlu revolusi mendasar dalam dunia kerja yang telah bermartabat (bukan pekerjaan-pekerjaan yang melawan norma masyarakat). Walau kejujuran, dedikasi, dan loyalitas merupakan syarat dari sebuah pekerjaan yang baik, dalam kenyataannya kejujuran dan dedikasi serta loyalitas pada organisasi malah merugikan. Terutama dalam berbagai pekerjaan yang lebih mementingkan loyalitas dari pada prestasi kerja, inovasi, kompetisi sehat, dan sebagainya.

Sektor kerja adalah sektor yang penuh dengan jebakan moral, baik karena jenis aktivitas yang dilakukan, kurang berjalannya proses penilaian hasil kerja yang objektif dan transparan, serta kurangnya kepemimpinan yang dapat dijadikan panutan etika kerja. Oleh karena itu, sektor ini perlu membenahi diri sehingga nilai-nilai kebaikan benar-benar merupakan bagian dari budaya organisasi dan bukan hanya pemanis bibir. Penegakan kode etik kerja, penerapan asesmen kerja yang fair, berbasis kompetensi, dan transparan, serta kepemimpinan dan manajemen yang menunjukkan integritas moral perlu menjadi menu pembangunan budaya kerja yang bermartabat.

Politik hukum rimba: yang lemah jangan coba-coba

Arena politik kita dapat dipotret beberapa elemennya. Dari sisi kandidat atau calon anggota partai politik, maka kultur partai politik hanya menarik bagi orang-orang yang gemar bermain dalam kekuasaan, orang-orang yang melihat peluang ekonomi yang besar, serta orang-orang yang sekadar berpartisipasi untuk memperoleh citra publik sebagai orang berguna walau hanya sebagai pengikut.

Dari sisi alasan didirikannya partai sebagai lembaga politik, diasumsikan ada yang karena alasan pencucian uang, mencoba-coba keberuntungan dengan berasosiasi dengan partai lainnya, kepentingan umat beragama, dan tentunya kepentingan kekuasaan yang melekat dalam fitrah dunia politik.

Jika ditengok kiprah lembaga-lembaga atau partai politik yang ada, maka jelas sekali adanya "*games of throne*" - semua yang merasa kuat ingin menjadi raja. Dalam praktiknya terjadi eksploitasi lembaga publik dan lembaga pemerintahan untuk kepentingan lembaga politik. Manusia yang mewakili lembaga politik memperoleh tekanan kuat untuk menjadi mesin partai dalam mengeruk keuntungan material yang akan menjadi modal untuk memperoleh sumber daya dalam merebut simpati publik. Perbuatan yang dilandaskan pada moral dan etika politik tipis sekali – karena bukan itu tujuan utamanya.

Kekuasaan harus dapat dicapai melalui kekuatan moneter, oligarki, atau tipu muslihat. Praktik politik di lembaga yudikatif terlihat seperti di hutan – yang kuat menggalang teman-teman sehaluan politik pasti menang – walau harus bertentangan dengan kosnstituennya sendiri. Mereka enggan terlibat dalam *institutional reform* yang sangat dibutuhkan untuk mencapai cita-cita reformasi karena sibuk dengan menjaga kesejahteraan dan keselamatan dirinya. Oleh karena itu, dunia politik di Senayan sering terasa seperti dunia sinetron.

Politik yang bermartabat harus dimulai dengan calon-calon yang memenuhi kualifikasi pendidikan maupun moral etika yang baik. Transparansi publik dalam proses pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mematikan hal ini, walau masih sangat sulit. Tetapi kalau mekanisme ini dibrangus, publik akan selalu memilih kucing dalam karung, maka kendali mutu dalam proses seleksi tidak terjadi.

Dewan etik dari masing-masing partai harus dapat berjalan sejajar dengan tujuan atau visi misi partai. Oleh karena itu, elemen ini perlu diisi oleh orang-orang yang berani berteriak dan menyatakan tidak setuju pada praktik-praktik yang membusukkan organisasi partainya di antara konstituen.

Hal yang sama perlu berlaku di lembaga Yudikatif, Dewan Etik harus dipilih lebih independen dari parti-partai yang berpartisipasi. Jika dewan ini tumpul, maka DPR dan MPR akan menjadi sarang penyamun yang merajalela dan melemahkan pemerintahan.

Hal terakhir di ranah politik adalah perlunya mekanisme partisipasi langsung dari konstituen untuk ikut mengendalikan anggota-anggota partai politik yang mereka pilih. Suara konstituen perlu mempunyai tuah dalam masa depan anggota terpilih. Bagaimana hal ini diakomodasikan, perlu pemikiran tersendiri.

Membangun Keterampilan "Tanpa Pamrih"

Bagaimana menjawab faktor internal (dari dalam individu), terutama rasionalitas, yang sering menjadi jebakan tikus untuk tidak konsisten dalam bertindak. Ini tidak berarti bahwa manusia harus menghindari rasionalitas – karena tidak mungkin, tetapi membangun keterampilan tertentu atas dasar rasionalitas tersebut.

Dalam kultur Jawa dan di budaya lainnya, orang percaya bahwa berbuat baik pada orang lain itu menguntungkan karena dengan menanamkan budi baik dan membuat orang "berhutang budi" akan bermanfaat dalam hidupnya di masa mendatang. Inilah bentuk "*self-licensing*" dalam budaya kita – karena kita telah menanam budi, maka ketika kita melakukan kesalahan kita akan dimaafkan karena dikenal sebagai orang yang "berbudi" (Merritt, Effron, & Monin, 2010).

Sebaliknya filsafat Jawa juga mengajarkan bahwa salah satu cara untuk dapat hidup konsisten dengan keyakinan kita adalah dengan berlatih bertindak tanpa dihantui oleh hasil akhirnya (akibatnya) untuk diri sendiri. Bertindak tanpa pamrih ini diajarkan karena kalau setiap tindakan itu selalu memikirkan hasil akhirnya (terutama untung-ruginya), maka hasil akhir itulah yang menjadi tujuan utama dari tindakannya dan pada akhirnya memengaruhi alasan mengapa ia seharusnya melakukan tindakan tersebut[5]. Kalau seseorang ingin menolong seseorang yang mengalami luka-luka serius karena kecelakaan lalu lintas tetapi berpikir ia akan tertahan di rumah sakit atau kantor polisi dan menjadi sangat repot, maka ia mungkin akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinannya yaitu pura-pura tidak melihat dan pergi meninggalkan korban. Kekhawatiran akan konsekuensi perbuatan baiknya pada akhirnya berakibat pada tindakan yang membahayakan orang yang hendak ditolongnya.

Agar mampu melakukan hal itu, sejak masa kanak-kanak orang harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sirkular, bukan linier. Berpikir linier adalah cara berpikir berbasis kausalitas sederhana yaitu "tindakan A mengakibatkan B". B adalah akibat terakhir dari A. Berpikir sirkular, mengajar anak bahwa B bukan akibat terakhir dari A karena A yang awalnya adakah akibat, dapat berubah menjadi sebab yang mengakibatkan C dan seterusnya. Sebab dan akibat berputar bergantian sehingga menimbulkan situasi dan kondisi yang kompleks. Hukuman fisik orang tua dan guru pada anak juga sering dianggap sebagai alat kausal yang bersifat linier. Anak yang nakal dipukul kakinya dengan rotan dengan harapan ia menghentikan tindakannya yang merugikan. Apa yang terjadi, dia menjadi menangis dan marah dan tindakannya menjadi lebih problematik yang menyebabkan Orang tua makin berang dan memukul lebih keras (dan seterusnya).

Keterampilan ini tidak mudah dikuasai oleh anak ketika pendidikan dan pengajaran di rumah dan di sekolah mau hasil instan. Dialog dengan anak tidak memperoleh ruang dan waktu yang memadai. Orang tua dan guru lebih senang mengelola perilaku anak dengan menghukum dan memberi *reward* seolah itulah hasil yang paling diharapkan. Jarang terjadi bahwa anak diajak untuk berpikir bahwa hukuman yang dia alami atau *reward* yang ia terima hanya merupakan bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar dan bermakna bagi hidupnya di masa depan. Melalui proses refleksi-diri seperti itu, manusia belajar bahwa keuntungan dari tindakan sesaat dapat menjadi modal jangka panjang dan menimbulkan proses belajar selanjutnya. Ia dibantu untuk melihat bahwa keuntungan sesaat bukanlah hasil akhir yang paling ideal dan paling diinginkan.

Penutup

Persoalan berbuat baik justru menghasilkan *moral licensing* yang mendorong orang tidak merasa bersalah ketika melakukan tindakan yang dianggap melanggar moral dan etika memang perlu disikapi. Meskipun demikian, teori ini dan sejenisnya belum berhasil menjawab secara memuaskan mengenai persoalan bagaimana mengatasi jebakan moral tersebut dan keterampilan hidup apa saja yang dibutuhkan. Jangan bertindak berdasarkan pamrih dalam bahasa Jawa merupakan gabungan keterampilan *self-restraint, self-reflection, self-awareness,* dan *critical-thinking* dalam psikologi yang dapat dipupuk oleh orang tua di rumah atau diajarkan di sekolah. Tidak ada jalan pintas dalam mendidik karakter dan integritas. Jalan panjang dan berliku harus ditempuh dan investasi memadai dalam perubahan lingkungan sehingga menjadi lingkungan yang mendukung cita-cita Nawacita perlu dikawal kepastiannya. Seperti telah dijelaskan di depan, masih banyak hal yang tidak diketahui bagaimana memastikan proses tumbuh kembang anak yang berkarakter dan berintegritas. Kita mengetahui kelemahan manusia dan harus berikhtiar untuk mencari cara mengatasinya. Selama semangat untuk menjadi lebih baik tetap tumbuh, kita berhak optimis dengan masa depan yang lebih baik.

Catatan Akhir

1. Baca: http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment atau lihat dokumentasinya di: https://www.youtube.com/watch?v=yr5cjyokVUs
2. Terima kasih telah diingatkan oleh Ni Made Tinduk yang disertasinya menginspirasi artikel ini.

3. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019: - Buku 1: halaman 68.
4. Antara News: http://www.antaranews.com/berita/397722/kemdikbud-akui-kualitas-guru-masih-rendah
5. Lihat: https://edwindramora.wordpress.com/2014/03/11/kawruh-jawa-intisari-ajaran-dharma-jawa-jawatatwa/

Daftar Acuan

Baumrind, D. (1964). Some thoughts on ethics of research: After reading Milgram's "Behavioral Study of Obedience". *American Psychologist, 19*(6): 421–423. doi:10.1037/h0040128.

Brown, R.P., Tamborski, M., Wang, X., Barnes, C.D., Mumford, M.D., Connelly.S., & Devenport, L.D. (2011). Moral credentialing and the rationalization of misconduct. *Ethics Behavior. 21*(1), 1–12. doi:10.1080/10508422.2011.537566.

Effron., D.A. (2012). Hero or hypocrite? A psychological perspective on the risks and benefits of positive character evidence. *Bimonthly E-journal of American Society of Trial Consultans, 24,* 46-51.

Effron, D.A., Monin, B., & Miller, D.T. (2012, in press). The unhealthy road not taken: Licensing indulgence by exaggerating counterfactual sins. *Journal of Experimental Social Psychology*. doi: 10.1016/j.jesp.2012.08.012

Effron. D. A., & Monin. B. (2010). Letting people off the hook: When do good deeds excuse transgressions? *Personality and Social Psychology Bulletin, 36*(12), 1618-1634. doi: 10.1177/0146167210385922.

Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. California: Stanford University Press.

Koehler, D.J., & Harvey, N. (Eds) (2004). *Blackwell handbook of judgment and decision making.* New York: Wiley-Blackwell. Khususnya Chapter 15 hal. 297-315. \

Galen, W. (2012). Does religious belief promote prosociality? A critical examination. *Psychological Bulletin***,** *138*(5), 876–906.

Garza, P.B., Bucheli, M., Espinosa, M.P., & Muñoz T.G. (2011). *Moral cleansing and moral licenses: Experimental evidence,* 1-18. Financial aid from MICINN (ECO2009-09120 and ECO2010-17049), Gobierno Vasco (DEUI, IT-313-07) and Junta de Andalucía-Excelencia (P07.SEJ.02547).

Gollwitzer, M., & Keller, L. (2010). What you did only matters if you are one of us: Offender's group membership moderates the effect of criminal history on punishment severity. *Social Psychology, 41*(1), 20-26. doi:10.1027/1864-9335/a000004

Gollwitzer, M., Keller., L & Braun, J. (2012). Retributive punishment in a social context. Dalam E. Kals, & J. Maes, (Eds). *Justice and conflict*: *Theoretical and empirical contribution* (pp.169-196). Heidelberg: Springer.

Irwanto & Kusumaningrum, S. (2014). *Memahami kerentanan: Penelitian mengenai keadaan yang berdampak pada pemisahan keluarga dan kehidupan anak di dalam maupun di luar pengasuhan keluarga*. Jakarta: Bappenas, UNICEF, dan Pusat Kajian Perlindungan Anak – FISIP Universitas Indonesia.

Jiang, J., Kou, Y., Wang, F., Wu, Y., Li, Y-M., Li, Y., Yang, Y., & Wang, X. (2011). Emotional reactions to scandal: When does moral character make a difference? *Asian Journal of Social Psychology, 14*, 207-216. doi:10.1111/j.1467-839X.2011.01344.x

Jun, G. (2013). *Toward a general model of moral regulation: How fluctuation in general integrity influences moral behavior.* Disertation Abstracts International Section A; Humanities and Social Sciences. Dissertation number AAINR82387/ accession number 2013-99010-474. ProQuest information & Learning, US.

Kouchaki, M. (2011).Vicarious moral licensing: The influence of others past moral actions and moral behavior. *Journal Personality and Social Psychology, 101*(4), 702-715.

Merritt. A.C., Effron, D.A., & Monin. B. (2010). Moral self-licensing: When being good frees us to be bad. *Social and Personality Psychology Compass, 4*(5), 344-357, doi: 10.1111/j.1751-9004.2010.00263.x.

Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: An experimental view*. Harper-Collins.

McCullough, M.E., & Willoughby, B.L.B. (2009). Religion, self-regulation, and self-control: Associations, explanations, and implications. *Psychological Bulletin, 135,* 69–93. doi:10.1037/a0014213

Patunru, A.A., & Kusumaningrum, S. (2013). *Reducing inequality to improve the wellbeing of children: Learning lessons from indonesia for the Post-MDGs Agenda*. Report to Save the Children (Indonesia).

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta: Bappenas.

Saroglou, V. (2010). Religiousness as a cultural adaptation of basic traits: A five-factor model perspective. *Personality and Social Psychology Review, 14,* 108–125. doi:10.1177/1088868309352322

SMERU (2011). *National report: Indonesia. Child poverty and disparities in Indonesia. Challenges for inclusive growth*. Jakarta: Smeru, Bappenas, and UNICEF.

7
Diperlukan: Revolusi Mental dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia

Solita Sarwono

Sketsa Kehidupan Masyarakat Indonesia

Ibukota Jakarta mempunyai reputasi kurang menyenangkan: lalu lintas macet dan banjir. Reputasi ini bahkan membuat wisatawan asing enggan datang ke Jakarta. Mereka lebih suka terbang langsung ke Bali atau Yogyakarta yang mempunyai daya tarik seni-budaya. Namun masalah kemacetan lalu lintas bukanlah monopoli kota Jakarta. Banyak warga kota-kota lain yang mengeluh tentang meningkatnya kemacetan. Bogor, Bandung bahkan Yogyakarta pun sudah mulai padat kendaraan bermotor yang seringkali sulit diatur.

Kebersihan umum pun tidak dapat dijadikan kebanggaan bangsa. Sampah berserakan di pasar, jalanan, tempat umum dan memenuhi sungai-sungai, menyebabkan kebanjiran. Toilet umum di terminal bis, bandara, pusat belanja, kantor-kantor, rumah makan, hotel (termasuk hotel berbintang) masih belum bersih dan sering tidak ada air mengalir. Kebersihan/higiene makanan juga banyak yang masih di bawah standar, terutama yang dijual di pasar atau kaki lima. Untung sudah ada upaya memperbaiki sarana sanitasi tempat-tempat umum, seperti misalnya di stasiun-stasiun kereta api.

Indonesia jarang menjadi juara di gelanggang olahraga dan mutu pendidikannya rendah, tetapi memperoleh peringkat dunia yang sangat tinggi dalam hal korupsi. Di mana-mana terjadi korupsi. Bukan hanya korupsi uang, juga korupsi waktu. Korupsi dikatakan sudah menjadi budaya masyarakat. Pembentukan KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) adalah tindakan konkret untuk menangani masalah ini. KPK berani menyeret koruptor di kalangan pejabat tinggi, sehingga peringkat Indonesia pada daftar negara paling korup sedunia sudah mulai menurun.

Sekolah-sekolah dari berbagai strata menjamur di seantero Nusantara. Siswa-siswa berebut mencari perguruan tinggi, dan setiap tahun puluhan bahkan ratusan ribu sarjana diluluskan oleh berbagai perguruan tinggi. Tetapi mutu pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi Indonesia masih rendah. Menanggapi antusiasme Orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, program pendidikan diperdagangkan. Orang tua dan masyarakat membayar sangat mahal untuk mendidik anak mereka. Namun mereka di bodohi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang rendah mutu. Anak-anak muda ini akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan karena rendahnya mutu pendidikan yang mereka ikuti, atau karena program studi yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan tersebut tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.

Jika sudah mendapat pekerjaan, tidak sedikit orang yang tidak bekerja secara optimal. Pasif, menunggu perintah atasan, kurang kreatif, tidak tepat waktu (jam karet), mengisi waktu dengan ngobrol, main sms, merokok atau 'ngerumpi'. Kebiasaan seperti ini sering terlihat di kalangan Pegawai Negeri Sipil/PNS yang sadar bahwa mereka tidak dapat dipecat sehingga merasa tidak perlu berprestasi, kreatif atau bekerja keras. Untuk naik pangkat dipakai pendekatan pribadi: mematuhi perintah dan menyenangkan hati atasan.

Perilaku konsumtif dan budaya pamer makin marak. Orang berbelanja berlebihan dan membeli barang-barang serta pakaian bukan karena perlu, melainkan karena ingin ikut mode terakhir. Penampilan dan materi menjadi lebih penting daripada 'isi'/bobot seseorang. Gejala ini tampak pula di kalangan masyarakat desa. Demi memuaskan keinginan untuk memiliki benda-benda yang dapat meningkatkan status sosial, orang bersedia berhutang bahkan korupsi.

Meski tidak semua penduduk Indonesia berperilaku negatif seperti uraian di atas, tetapi begitulah gambaran umum yang ditemukan di Indonesia, di kota maupun desa.

Krisis Mental

Perilaku masyarakat seperti sketsa di atas, merupakan cerminan dari mentalitas warga yang lebih mementingkan diri sendiri daripada mempedulikan kebutuhan dan keinginan orang lain. Menyerobot di kala lalu lintas macet, karena ingin lebih cepat tiba di tempat tujuan; membuang sampah di sungai padahal perbuatan itu dapat menimbulkan banjir; datang terlambat atau tidak menepati janji, sehingga merugikan orang lain; membeli barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau makan-makan di tempat mewah hanya karena ingin menaikkan status sosialnya, sementara banyak orang (termasuk

penjaja toko/pramuniaga dan pelayan restoran/pramusaji) yang hidup pas-pasan bahkan kekurangan.

Sikap tidak peduli itu ada kalanya disertai dengan ambisi untuk menonjolkan diri dan memperoleh kekuasaan, yang kadang-kadang dilakukan dengan menghalalkan segala cara dan tega menokok kawan seiring atau saudara sendiri. Orang-orang yang rendah hati, suka mengalah, apalagi yang lemah (kurang tinggi pendidikannya, kurang mampu, kurang berani bicara), menjadi tersingkirkan. Masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis mental.

Mengapa sampai terbentuk kondisi masyarakat seperti itu? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya:

1. Meningkatnya materialism, individualism dan hedonism, mengikuti *trend* gaya hidup modern.
2. Menguatnya *ego-centrisme* dan menurunnya kepedulian sosial.
3. Penggunaan demokrasi yang hanya menekankan kebebasan mengungkapkan pendapat dan memperoleh hak pribadi, namun kurang menekankan rasa tanggungjawab individu.
4. Kecenderungan untuk bersikap konformistis, yaitu mengikuti perilaku kelompok atau lingkungannya.
5. Merosotnya otoritas Orang tua, pendidik dan penegak hukum.
6. Lemahnya sistem dan pelaksanaan penegakan hukum.
7. Bergesernya norma sosial dan melunturnya penghayatan etika pergaulan dan etika profesi.
8. Gabungan dari beberapa faktor tersebut di atas.

Membina dan mempertahankan situasi yang aman, nyaman dan teratur bagi semua warga adalah kewajiban bersama, baik secara perorangan maupun kolektif (*individual and collective responsibilities*). Guna memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia, diperlukan perubahan dalam mentalitas, pola pikir dan perilaku individu dan masyarakat. Agar dampak dari perubahan mentalitas itu dapat dirasakan dan dilihat, upaya perubahan itu perlu dilakukan secara massal, di segala lapisan masyarakat dan mencakup segala usia. Edukasi untuk mengubah mentalitas dan membina karakter harus dilakukan sedini

mungkin melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta melalui interaksi sosial. Keluarga merupakan unit utama tempat pemberian edukasi secara intensif dalam bidang ilmu, pengembangan karakter dan penyerapan nilai-nilai agama, etika dan norma sosial. Agar hasil edukasi ini dapat diterapkan, perlu disediakan dukungan dalam sistem pranata sosial dan penegakan hukum. Upaya perbaikan mental masyarakat secara massal dan terstruktur semacam ini dapat disebut sebagai revolusi mental.

Idealnya, penanaman nilai baik-buruk, norma sosial, kejujuran dan kepedulian terhadap keinginan/kepentingan orang lain dilakukan sejak kecil. Orang tua dan pendidik menjadi tokoh yang ditiru anak (tokoh panutan). Sekalipun secara alamiah seorang ibu memiliki hubungan batin yang lebih dekat dengan anaknya daripada seorang ayah, namun pengasuhan dan pendidikan anak seharusnya menjadi tanggungjawab bersama, yaitu ibu dan ayah. Pendidikan yang baik akan membentuk kepribadian yang tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati, jujur, mau membantu orang lain dan bertanggungjawab atas tindakannya. Agama pun mengajarkan kejujuran, rendah hati dan kepedulian terhadap sesama serta mendorong kesediaan individu untuk membantu orang lain, terutama membantu kelompok yang lemah.

Sayangnya, yang terjadi adalah tidak semua guru berkompetensi mengajar. Motivasi menjadi guru rendah, karena imbalan yang diterima oleh para guru tidak seimbang dengan berat beban kerjanya. Mengambil profesi guru bukan karena ingin menjadi pendidik namun karena terpaksa, gagal masuk ke jurusan lain. Banyak guru yang mengajar di perkotaan, yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Murid-muridnya adalah anak-anak keluarga mampu yang terbiasa menilai segala sesuatu dari segi materi. Tidak heran jika anak-anak itu memandang rendah atau tidak menghormati guru mereka. Wibawa guru menurun sehingga sulit menegakkan disiplin di sekolah. Penegak hukum pun dapat disuap sehingga aturan dan sanksi sulit ditegakkan secara konsisten.

Kurikulum pendidikan dasar kurang menekankan pembentukan karakter dan pengembangan pribadi anak didik. Metode pengajaran bersifat otoriter dan dogmatis, membatasi kebebasan anak didik untuk melakukan explorasi dan untuk bersikap kritis (memberi dan menerima kritik dengan baik). Di kelas terlalu banyak diajarkan hal-hal yang sebetulnya kurang perlu bagi pembinaan pengetahuan dan keterampilan dasar serta pembinaan karakter. Banyaknya mata ajaran yang tidak perlu dan metode mengajar yang kurang interaktif serta membatasi kreativitas anak didik membuat proses pembelajaran menjadi berat, menekan dan kurang menyenangkan. Mutu hasil pendidikan kurang baik. Apalagi kurikulum pendidikan nasional sering diganti, tanpa ditunjang oleh kesiapan guru dalam hal materi ajaran maupun teknik baru.

Intensitas pengajaran agama (terutama agama Islam) makin meningkat selama 20 tahun terakhir ini. Anak-anak belajar mengaji sejak kecil, di rumah dan di sekolah bahkan dimasukkan ke pesantren. Jumlah sekolah-sekolah Islam bertambah banyak. Para ibu dan bapak rajin mengikuti kelompok-kelompok pengajian. Setiap hari Jumat para karyawan kantor, toko dan pabrik meminta izin untuk sholat Jumat. Mesjid-mesjid besar kecil dipadati jemaah pada saat sholat Jumat maupun sholat tarawih selama bulan Ramadhan. Jumlah warga yang menjalankan ibadah haji maupun umroh makin banyak.

Namun korupsi, pergaulan sex bebas, konsumsi alkohol, tindakan kekerasan (KDRT, perkosaan, perampokan sampai pembunuhan) makin marak. Ini merupakan kontroversi dan menunjukkan inkosistensi dengan perilaku religious yang dipelajari masyarakat dari ajaran-ajaran agama. Apakah mungkin pengajaran agama itu kurang dihayati maknanya? Kemungkinan lain, mengingat karakter masyarakat Indonesia yang konformistis, masyarakat mengikuti kegiatan/ritual agama karena 'mode', untuk pamer atau agar mereka tidak dianggap 'aneh' oleh lingkungannya. Tampaknya rasa malu karena tidak dapat mengikuti gaya hidup orang banyak, lebih besar daripada rasa malu karena melakukan korupsi.

Pendidikan yang baik di rumah dan di sekolah perlu memperoleh penguatan (*reinforcement)* dan dukungan *(support)* dari warga masyarakat sekitar maupun dari sistem hukum dan tatanan sosial. Individu yang mau berperilaku disiplin, patuh aturan, bersopan-santun dan bekerja keras sesuai kewajibannya, lama-lama akan menjadi apatis bahkan berbalik melanggar aturan-aturan yang tadinya selalu dipatuhinya, jika dia tidak menerima dukungan dari teman sebaya, rekan sekerja, tetangga dan masyarakat luas. Individu yang disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas, misalnya, akan merasa dirugikan oleh orang lain yang seenaknya saja menyerobot jalan sehingga menambah kemacetan atau jika dia melihat orang lain diberi perlakuan khusus setelah menyuap polisi yang bertugas. Atau karyawan yang selalu datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, justru dimusuhi oleh rekan-rekan sekantornya karena dianggap ingin 'cari muka' dan memalukan yang lain. Guru yang menolak uang suap dari Orang tua murid, ditertawakan dan dianggap bodoh oleh rekan-rekannya.

Pendek kata, di kalangan anak nakal, anak yang baik dianggap abnormal. Di lingkungan orang-orang yang senang korupsi, orang yang jujur dianggap abnormal. Orang-orang yang dianggap abnormal seringkali dikucilkan, di-*bully* atau ditekan supaya mau mengikuti norma yang berlaku di kelompok itu. Tidak setiap orang mampu menahan tekanan orang-orang di sekitarnya (*peer pressure*). Reaksi individu terhadap situasi yang menekan itu dapat berbeda-beda. (a) pergi meninggalkan kelompok tersebut (lari dari

masalah); (b) menjadi apatis (tidak ikut korupsi tetapi membiarkan rekan-rekannya melakukan korupsi); (c) mengubah perilakunya sendiri dan menyesuaikannya dengan perilaku kelompok (ikut-ikut korupsi) dan (d) bereaksi keras menentang kelompok itu (konfrontasi) yang akan menyebabkannya disingkirkan dari kelompok.

Revolusi Mental – Bagaimana Caranya?

Dewasa ini sudah diambil inisiatif untuk mengubah sikap mental bangsa Indonesia oleh kelompok-kelompok warga yang merasa prihatin tentang situasi ini. Misalnya melatih kejujuran, kebersihan, disiplin antri, mengurangi kebiasaan 'jam karet' dan memberikan contoh keteladanan dalam berperilaku. Sayangnya skala upaya-upaya tersebut masih terlalu kecil untuk mengubah sikap, pola pikir dan perilaku bangsa.

Mengubah perilaku tidaklah mudah, apalagi jika perilaku itu sudah mengakar dalam budaya masyarakat. Terdapat aneka teori dan model tentang perubahan perilaku (Comm GAP, 2010). Salah satunya adalah Fogg Behavior Model (Fogg, 2011) yang mengidentifikasi tiga elemen dasar yang diperlukan untuk mengubah perilaku, yaitu adanya motivasi, kemampuan dan faktor pemicu/*trigger* yang dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku. Ketiga elemen itu harus ada agar perubahan dapat terjadi. Jika salah satu elemen tidak ada maka perubahan perilaku tidak terjadi.

Di samping memerlukan tiga elemen dasar itu, individu masih mempertimbangkan hambatan/kesulitan, baik yang objektif maupun subjektif, yang dapat mengurungkan niat untuk berubah. Sebaliknya ada juga keuntungan yang akan diperoleh jika individu mengubah perilakunya. Individu membandingkan beratnya kendala dan besarnya keuntungan sebelum memutuskan untuk berubah atau untuk tetap mempertahankan sikap dan perilakunya yang lama. Sekalipun telah memutuskan untuk berubah atau tidak, keputusan itu masih dapat berubah karena dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Sikap positif keluarga, rekan kerja dan teman bergaul terhadap perilaku baru individu, akan memperkuat perilaku itu. Sebaliknya, kritik orang di sekitarnya akan membuat individu kembali ke perilakunya yang lama.

Suatu faktor yang sering menghambat proses perubahan perilaku adalah rasa takut. Takut akan konsekuensi dari perubahan itu terhadap dirinya, takut terhadap pandangan kritis orang lain atau takut menghadapi ketidakpastian. Mengantisipasi sesuatu yang belum dikenal, menimbulkan rasa was-was, stress dan tidak nyaman. Mencoba sesuatu yang baru tentu mempunyai risiko. Makin besar risiko yang akan dihadapi, makin sulit ide baru itu

diterima. Kondisi dan hal-hal yang sudah biasa dilakukan/dialami, memberikan rasa aman karena individu telah memahami risiko dan konsekuensinya. Itu sebabnya orang lebih suka mempertahankan status quo yang memberikannya rasa aman, sekalipun kondisi tersebut mungkin tidak nyaman.

Pembentukan karakter dan perbaikan sikap mental individu memerlukan *input* yang berkali-kali, terus menerus, dalam jangka waktu panjang. Pemberian edukasi yang bersifat sporadis hanya akan menghasilkan perbaikan yang sementara, tidak permanen. Agar revolusi mental dapat membuahkan hasil yang permanen, diperlukan *commitment* dari berbagai pihak (Orang tua, pendidik, penegak hukum, pemimpin, pemuka agama, pemuka masyarakat dan pemerintah) untuk mengadakan edukasi terus menerus dengan metode yang bervariasi, membuat peraturan dan menerapkannya secara konsisten dan tanpa pandang bulu, serta memberikan contoh perilaku yang baik di dalam keluarga, sekolah, lingkungan pekerjaan maupun dalam masyarakat.

Besar tantangan bangsa kita untuk memperbaiki karakter, terutama karakter generasi muda. Hal itu merupakan tanggungjawab kita bersama, secara individual maupun kolektif. Keliru, jika masyarakat mengharapkan atau menyerahkan tanggungjawab perbaikan karakter kepada pemerintah. Sebagai anak bangsa, kita wajib melakukan perbaikan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan diteruskan ke lingkungan kita. Pemerintah bertugas memfasilitasi proses edukasi dan penataan aturan/hukum agar perubahan sikap dan perilaku bangsa Indonesia dapat terwujud. Kita harus bersikap optimistis dan segera memulai gerakan revolusi mental agar krisis mental ini tidak berlarut-larut lebih lama.

Daftar Acuan

CommGAP. (2010). *Theories of behavior change*. The World Bank. Diunduh dari http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/BehaviorChangeweb.pdf

Fogg, B. J. (2011). What Causes Behavior Change? Diunduh dari http://www.behaviormodel.org/

8
Revolusi Mental: Membangun Karakter Bangsa Melalui Penerapan Nilai Religius

Tiwin Herman

Hingar bingar kampanye Presiden tahun 2014 ini sangatlah terasa. Berbeda dengan sebelumnya, untuk tahun 2014 ini, sedari awal, kandidat yang maju hanya 2 pasang calon sehingga masyarakat langsung hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu nomor urut 1 atau nomor urut 2. Dengan tidak adanya pilihan calon lain, maka masyarakat seolah menjadi terbelah Di antara kedua pilihan tersebut.

Dalam kampanyenya, salah satu kandidat yaitu pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mempunyai program yang selalu didengungkan dalam kampanyenya yaitu Revolusi Mental. Sementara bila memperhatikan Visi Misi pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diserahkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), tidak terlihat adanya uraian mengenai Revolusi Mental itu sendiri, baik sebagai suatu konsep maupun sebagai suatu program aksi. Penjelasan mengenai Revolusi Mental diberikan baru dijelaskan oleh Joko Widodo dalam suatu diskusi dengan tajuk jargon tersebut di Balai Kartini, pada hari Jumat (17/10/2014). Menurut Joko Widodo, revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera.

Lebih lanjut ia mengatakan: “Tapi saya juga *ndak* tahu kenapa, sedikit demi sedikit (karakter) itu berubah dan kita *ndak* sadar. Yang lebih parah lagi *ndak* ada yang *nge*-rem. Yang seperti itulah yang merusak mental,” ujar Jokowi. Menurutnya, perubahan karakter bangsa merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa. “Oleh sebab itu, saya menawarkan ada sebuah revolusi mental,” ujar Jokowi.

Terminologi "revolusi", kata Jokowi, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Kata revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. "Kalau ada kerusakan di nilai kedisiplinannya mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, *mindset.* Titik itulah yang kita serang," ujar Jokowi. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk adalah lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. "Kita harus mengembalikan karakter warga negara ke apa yang menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, identitas kita," tegas Jokowi. Ia berkeyakinan, dengan komitmen pemerintah yang kuat disertai kesadaran seluruh warga negara, Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Pengertian

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Revolusi diartikan sebagai perubahan yang cukup mendasar di suatu bidang, sementara Mental diartikan sebagai batin dan watak atau yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Menurut Arthur S. Reber & Emily Reber, pengertian mental secara umum adalah berkaitan dengan pikiran. Pengertian dari sisi psikologi perilaku, yaitu yang menjelaskan tentang proses berpikir, sementara pengertian dari sisi fungsionalisme yaitu yang berkaitan dengan aspek fungsional adaptif kesadaran. Dari berbagai uraian diatas, maka Revolusi Mental dapat diartikan sebagai perubahan yang mendasar dalam proses berpikir manusia.

Berkaitan dengan jargon Revolusi Mental yang dikemukakan oleh Joko Widodo maka pengertian Revolusi Mental yang dimaksud adalah perubahan mendasar dalam proses berpikir manusia Indonesia untuk kembali pada karakter orisinal bangsa, yaitu yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong.

Ketika berbicara karakter, maka pada umumnya kata tersebut juga merujuk pada kata kepribadian. Kepribadian berasal dari kata Latin *"persona"* yang berarti topeng. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu atas sistem psikofisis yang menentukan penyesuaian dirinya yang khas terhadap lingkungannya. Merujuk pada pengertian Allport ini, maka tampak ada peran aktif dari individunya untuk menyesuaikan diri terhadap faktor-faktor eksternal yang datang dari luar dirinya, baik dengan cara berpikir, bertutur maupun bertindaknya. Sementara untuk karakter (*watak*) Allport mengisyaratkan norma tertentu atas dasar mana individu-individu atau perbuatannya dinilai. Jadi karakter adalah suatu konsep etis yang ditegakkan dalam diri seseorang.

Seseorang dikatakan berkarakter bila perilakunya konsisten dengan nilai-nilainya, dan dianggap berkarakter baik bila konsisten mempertahankan moral baiknya. Sementara seseorang dikatakan memiliki kepribadian baik, bila trampil berkomunikasi dan terampil berinteraksi secara sosial di mana pun berada. Kepribadian terbentuk bagaimana seseorang berpikir, bertutur dan bertindak secara khas dirinya dalam merespons lingkungannya.

Karakter maupun kepribadian selalu merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Segala sesuatu yang berasal dari luar dirinya diolah, dipahami dan dicerna secara selektif berdasarkan karakternya. Ada proses yang melibatkan faktor eksternal dan faktor internal seorang individu dalam mengolah semua respons yang datang pada dirinya. Pada titik ini maka menjadi jelas bahwa seseorang berkepribadian baik, belumlah tentu mempunyai karakter yang baik dan sebaliknya. Sebagai contoh ada seseorang yang begitu kukuh dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ia memilih untuk tidak menerima berbagai gratifikasi ataupun bentuk-bentuk penyuapan lain. Bahkan ketika istrinya masuk rumah sakitpun ia tidak bersedia menerima bantuan dari orang-orang yang dianggapnya mempunyai kepentingan. Karakternya yang teguh ini disisi lain dapat menyulitkan hubungan sosialnya. Contoh lain, ada seorang pebisnis yang sangat terampil bergaul, mempunyai jaringan yang luas dan banyak disenangi oleh teman-temannya karena sikapnya yang hangat. Untuk melancarkan bisnisnya, ternyata ia seringkali melakukan gratifikasi yang sudah jelas dilarang oleh Negara. Tidak jarang ia pun sering melakukan penyuapan agar bisnisnya lancar. Dibalik kepribadiannya yang baik, ternyata ia mengorbankan karakternya.

Masyarakat Indonesia Masa Kini

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari lingkungan di mana ia berada. Setiap individu terhubung baik dengan lingkungan rumah, lingkungan kantor/ sekolah, maupun lingkungan masyarakatnya. Pada saat ini, banyak terjadi ketidak-selarasan norma Di antara lingkungan-lingkungan tersebut. Apa yang tidak diperbolehkan di rumah, ternyata di luar rumah justru mendapatkan legitimasinya. Contoh tidak boleh merokok di rumah, tetapi di lingkungan *peers*, merokok justru sebagai syarat untuk masuk dalam komunitas tersebut. Contoh lain, di rumah selalu seluruh anggota keluarga diminta untuk berbuat jujur, tetapi sang kepala keluarga malah tertangkap basah sedang menyuap.

Berita tentang penangkapan koruptor yang tadinya adalah dosen teladan dari satu perguruan tinggi ternama atau pengobatan dengan cara-cara tidak masuk akal yang dilakukan oleh seorang ustad, atau seorang anak yang menuntut ibunya 1 milyar rupiah untuk mengganti rumah yang ditinggali ibunya yang sudah tua atau sepasang kekasih

membunuh teman kuliahnya dan sebagainya menggambarkan bagaimana sebuah karakter dikorbankan. Belum lagi kasus maraknya demo yang disertai perilaku merusak, mengumbar hujatan terhadap seseorang di dunia maya, banyaknya video mesum yang beredar dengan pelaku pelajar atau orang dengan kedudukan terhormat, dan sebagainya. Semakin lama kasus-kasus yang mengemuka ke masyarakat semakin memberi gambaran kondisi masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari karakter bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong sebagaimana yang dilansir Joko Widodo.

Menurut Thomas Lockona sebagaimana dikutip oleh Ratna Megawangi, ada "tanda-tanda zaman" yang harus diwaspadai karena kalau tanda-tanda itu sudah ada, sebuah bangsa akan menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda itu adalah: 1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, 2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, 3) pengaruh *peer-group* yang kuat dalam tindak kekerasan, 4) meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba, seks bebas dan alkohol, 5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, 6) penurunan etos kerja, 7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, 8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, 9) ketidak jujuran yang begitu membudaya, 10) rasa saling curiga dan kebencian Di antara sesama.

Dari berbagai contoh kasus-kasus diatas, agaknya yang mengarah ke tanda-tanda tersebut sudah jelas terlihat. Akankah ini berarti bahwa kita sudah menjadi bangsa sedang yang menuju ke jurang kehancuran? Sampai dititik ini maka Revolusi Mental yang dicanangkan Joko Widodo akan menemukan tantangan yang berat. Belum lagi masa kepemimpinannya hanya berbatas waktu selama 5 tahun. Apakah mungkin jargon tersebut dapat terwujud dalam masa tersebut?

Menariknya mengamati berbagai kasus yang ada dari berbagai pemberitaan, hampir semua kegaduhan tersebut terjadi di kota-kota besar atau paling tidak di ibukota propinsi dan minimal ibukota kabupaten. Di berbagai tempat di seluruh pelosok Indonesia, masih banyak ditemukan kesantunan, ketulusan, keramahan, kegotong-royongan yang menjadi perilaku kesehariannya. Ketika penulis baru-baru ini menjelajah ke gugusan kepulauan Maluku Tengah, dan singgah ke pulau Haruku di bagian selatan, penulis menemukan sekelompok orang sedang mengolah pohon sagu untuk diambil sagunya. Penulis kemudian singgah dan secara bergurau menyatakan ingin merasakan seperti apa Papeda yang menjadi makanan pokok masyarakat disana dan berasal dari sagu. Dengan sigap seorang ibu kemudian langsung mengajak penulis ke dapurnya untuk melihat bagaimana membuat Papeda dan kemudian menghidangkannya disertai masakan kuah kuningnya (sejenis sup ikan berkuah kuning). Kepuasan dan kebahagiaan terpancar dari pemilik rumah ketika penulis menyatakan bahwa ternyata papeda itu lezat. Sambil bersantap, tuan rumah

bertanya mengenai Jakarta dan kehidupannya. Ia sempat menyatakan empatinya terhadap orang Jakarta yang begitu lama untuk sampai di kantor atau sebaliknya ketika harus pulang. Setelah selesai bersantap, penulis menawarkan sekiranya perlu penggantian biaya untuk semua hidangan yang telah disantap. Dengan halus semua ditolaknya, malah ditawarkan untuk berkunjung lagi ke daerahnya dengan mengajak teman-teman supaya lebih banyak lagi orang Jakarta yang bisa merasakan lezatnya Papeda dan kuah kuningnya. Ia ingin agar orang-orang jauh bisa merasakan keindahan dan kelezatan kuliner di daerahnya yang menurutnya cukup jarang dikunjungi orang dari pulau Jawa.

Dalam menjalankan tugas diseantero wilayah Indonesia, terlepas dari suku apa dan daerah mana, baik dari pulau Weh sampai Arso di Jayapura ataupun Merauke, maka perilaku santun, tulus, ramah dan kegotong-royongan masih banyak mewarnai perilaku keseharian masyarakat kita.

Mengutip apa yang dikatakan Francis Fukuyama dalam bukunya Megawangi, bahwa bangsa yang bisa maju adalah bangsa yang mempunyai *social capital*, yaitu *high trust society*. Ciri-cirinya adalah masyarakat yang individu-individunya layak dipercaya. *High trust society* adalah karakter bangsa yang nilai-nilai integritas, kerja sama, tenggang rasa, etos kerja tinggi dan bertanggung jawab menjadi corak perilaku kehidupannya sehari-hari. Sementara Thomas Friedman mengatakan bahwa modal dasar untuk bisa bersaing di pasar global ada *free market democracy*, yaitu negara demokratis yang bersih dan bebas dari korupsi, yang pada intinya bermuara pada karakter juga.

Apa yang disampaikan para ahli di atas, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan karakter bangsa kita. Bangsa Indonesia Di samping dikenal sebagai bangsa dengan karakter yang santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong, juga dikenal sebagai bangsa yang religius. Terlepas dari apa agamanya, tetapi banyak sudah hasil penelitian yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas bangsa Indonesia cukup tinggi.

Menjadi pertanyaan berikut adalah, bila kenyataannya demikian, lalu apa yang salah sampai sebagian dari kita menjadi banyak yang berperilaku beringas atau brutal sebagaimana contoh kasus di atas? Mengapa kita menjadi bangsa yang mudah marah?

Senyatanya harus diakui bahwa nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa tersebut sudah mulai tergerus, utamanya di kota-kota besar. Pelan tetapi pasti pergeseran nilai-nilai ini akan meluas yang akhirnya akan mengimbas ke seluruh negeri. Kehidupan masyarakat yang sekarang pragmatis atau hedonis atau konsumtif sering menjadi penjelasan atas pergeseran nilai-nilai kehidupan ini. Norma sosial memang akan terus berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada masyarakatnya. Berbeda dengan norma sosial, norma

agama tidak akan berubah sampai akhir zaman. Untuk kembali pada karakter bangsa, diperlukan suatu upaya untuk menangkal hal tersebut, yaitu melalui pembangunan karakter bangsa berlandaskan pada nilai-nilai religius yang sampai pada tataran yang kongkrit.

Membangun Karakter

Ada suatu premis dalam membangun karakter yang mengatakan bahwa *character building is a never ending process*, yang artinya semenjak janin berada dalam kandungan sampai hayat dikandung badan, semestinya selalu melakukan pembangunan karakter. Karakter itu perlu dan dengan sengaja dibangun, dibentuk, ditempa, dimatangkan serta dimantapkan. Seperti kita ketahui, membangun karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan rumah, lingkungan sosialnya, masyarakat dan meluas di dalam kehidupan berbangsa dan selanjutnya. Menurut Soemarno Soedarsono, pendiri yayasan Jati Diri Bangsa, karena pembangunan karakter adalah proses tiada henti, maka pembangunan karakter dibagi dalam 3 (tiga) tahapan pembangunan karakter, yaitu pada masa usia dini (anak) yang disebut sebagai tahap pembentukan, masa remaja yang disebut sebagai tahap pengembangan dan usia dewasa disebut sebagai tahap pemantapan dan selanjutnya pelaksanaan.

Berkaitan dengan hal ini, boleh jadi Joko Widodo merasa ada masalah dalam kurikulum sekolah yang mengabaikan pendidikan karakter dan lebih menekankan pada pengajaran ilmu dan teknologi. Ini kemudian yang diubah dengan memberikan porsi besar kepada pendidikan karakter di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta memberikan pengajaran ilmu dan teknologi di tingkat pendidikan tinggi.

Membangun karakter dilakukan melalui tahap penanaman nilai-nilai, penanaman nilai yang boleh dan tidak boleh, menanamkan kebiasaan dan terakhir adalah memberi teladan yang sangat penting artinya dalam pembangunan karakter.

Nilai-nilai religi yang akan ditanamkan kepada anak-anak, tentu kesemuanya berawal dari rumah. Kesediaan orang tua untuk menanamkan nilai dan mendampingi anak agaknya akan menjadi terkendala ketika kedua orang tua harus bekerja dan anak dititipkan pada asisten rumah tangga. Interaksi anak yang lebih sering dengan asisten, ditambah dengan intensitas hubungan, pelan tetapi pasti, akan memudahkan nilai-nilai asisten yang akan tertanam kepada si anak dibandingkan nilai-nilai orang tuanya.

Sementara di sisi lain, harus diakui, bahwa pendidikan agama di sekolah formal masih lebih banyak diarahkan kepada penambahan pengetahuan saja. Hanya pada level

kognitif. Tidak pernah memperhatikan bagaimana pendidikan ini berdampak pada pengubahan perilaku. Ada kesenjangan antara pengetahuan agama (*cognition*) dan perilaku (*action*). Seolah-olah bila anak dapat menjawab ujian atau tes pelajaran agama dengan baik maka dianggap sudah berperilaku baik. Padahal itu tidak berkorelasi langsung. Boleh jadi hal ini yang mengemuka. Dengan pengetahuan agamanya yang baik, maka ia paham bagaimana harus mengikuti ritual agamanya, bagaimana ia harus bersikap sebagai penganut agama tersebut. Semua dalam tataran kognitif. Nilai-nilai tersebut tidak terinternalisasi dalam dirinya, sehingga perilakunya belum mencerminkan makna dari nilai-nilai yang dianutnya. Seberapa aktif peran orang tua dalam penanaman nilai-nilai pada masa dini ini akan menentukan seberapa teguh anak kelak memegang nilai-nilainya.

Ketika anak sedikit lebih besar sampai remaja adalah masa penanaman pada nilai-nilai yang boleh tidak boleh dan penanaman kebiasaan. Pemeran utamanya tetaplah orang tua. Penguasaan mengucapkan kata terima kasih, maaf dan minta tolong secara tepat, semestinya sudah harus dimiliki anak. Sementara hal-hal yang tidak boleh, misalnya seperti membuang sampah sembarangan, menyakiti orang lain, berbicara kasar, mengambil barang milik orang lain, berdusta, dan sebagainya. Kemudian penanaman kebiasaan untuk menepati janji, tepat waktu, tidak menyalahkan orang lain dan menerima tanggung jawab, adalah nilai-nilai yang semestinya sudah terinternalisasi ketika anak menginjak remaja. Keberhasilan penanaman kebiasaan ini, tergantung dari adanya teladan. Teladan utamanya adalah orang tua dan orang-orang dewasa lainnya yang dianggap dapat menjadi panutan.

Pernahkah anda bertanya kepada anak anda mengapa ia tidak menepati janji atau mengapa ia terlambat? Bila jawabannya sesuatu yang berada di luar dirinya (misalnya karena macet, atau karena tidak ada angkot atau karena diajak teman dan sebagainya), maka percayalah, ia sedang menyalahkan orang lain atau situasi. Ia sedang menggunakan kambing hitam dan - mohon maaf - mungkin ia juga sedang meneladani seseorang.

Penanaman nilai-nilai, kemudian mengenalkan yang boleh dan tidak, penanaman kebiasaan dan teladan adalah satu rangkaian membangun karakter yang kesemuanya berawal dari rumah dengan orang tua sebagai tokoh sentralnya. Penerapan keteladanan yang konsisten dalam perilaku sehari-hari, diharapkan dapat membantu anak dapat tampil sebagai pribadi yang berkarakter. Sebagai ilustrasi, meski menonton televisi yang sama, mendapatkan jaringan telekomunikasi yang sama yang berarti mendapat informasi yang sama, tetapi karena nilai-nilai religi yang diyakininya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat di pedesaan atau lebih tepatnya di Haruku Selatan tetap dapat tampil dalam perilaku santun, tulus, ramah dan penuh kegotong-royongan.

Penerapan Revolusi Mental

Revolusi Mental memerlukan strategi yang tepat agar tidak berhenti sebatas jargon. Strategi yang tentunya berisi arah yang akan dilaksanakan berdasarkan tahapan, target pada setiap tahap, langkah pencapaian dan metode evaluasinya. Sebagai contoh bila yang akan di"revolusi"kan adalah Indonesia yang bebas korupsi, maka keutamaan yang harus dikedepankan adalah kejujuran. Salah satu evaluasinya adalah ketika seseorang dihadapkan pada situasi ujian yang menyulitkan dirinya, ia tidak lagi berpikir akan menyontek atau tidak karena kejujuran sudah menjadi bagian diri dirinya.

Revolusi Mental juga harus menjadi sebuah gerakan perubahan manusia Indonesia untuk kembali pada karakter bangsanya. Untuk itu perlu mendapat perhatian seluruh masyarakat, tetapi bukan pada tataran politis namun lebih pada kehendak dari setiap warga negara untuk bersedia menjalankan kehidupan dengan memegang teguh karakter bangsa. Revolusi Mental memerlukan kerja sama seluruh *stake holder* bangsa. Revolusi Mental harus menjadi *civil society*, yaitu gerakan para warga negara untuk melaksanakan perubahan secara berkelanjutan bagi kehidupan bersama. Untuk itu tidak perlu menunggu kebijakan tetapi dapat dimulai dari diri sendiri atau keluarga sendiri dengan langkah-langkah kongkrit untuk mengubah kebiasaan baru yang berdampak terhadap terwujudnya kebaikan hidup berbangsa dan bernegara dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas.

9
Pendidikan Karakter: Revolusi Mental dalam Bidang Pendidikan

Sukma Rahastri Kanthi & Ike Herdiana

Pendahuluan

Dewasa ini gambaran kebobrokan karakter bangsa semakin fulgar diperlihatkan dan menjadi tayangan langganan dalam setiap berita yang disuguhkan disetiap rumah-rumah sejak terang hingga petang. Berita mengenai penculikan, kekerasan, pemerkosaan, peperangan hingga pembunuhan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya sudah bukan lagi gambaran yang aneh untuk dijumpai dalam berita. Meskipun pada dasarnya 'hati nurani' setiap pemirsa selalu bertanya-tanya bagaimana mungkin manusia melakukan hal serupa bahkan pada sesamanya.

Lebih menyedihkan lagi bentuk perilaku yang sangat bisa untuk dikategorikan sebagai perilaku *amoral* tersebut kini tidak hanya dilakukan oleh manusia dewasa saja namun juga telah merambah kalangan anak-anak. Mari kita tengok kembali kasus yang terjadi pada 5 Oktober 2014 di depan Pasar Modern, Perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Tiga pelajar yang usianya masih tergolong remaja, membunuh rekannya seorang pelajar juga di sebuah sekolah SMK dengan cara menggorok lehernya. Alasannya, ketiganya adalah sakit hati karena korban memaki mereka (beritasatu.com). Kasus ini menggambarkan bahkan anak-anak yang 'berpendidikan' belum mampu menunjukkan perilaku manusia yang 'terdidik'. Hal tersebut sangat kontras dengan makna pendidikan yang disebut-sebut oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran *(intellect)*, dan tubuh anak. Namun pada kenyataannya pendidikan kini belum cukup mampu untuk membawa seluruh peserta didik menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik dan berkarakter sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

Perilaku pelajar indonesia seperti tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, budaya tak tahu malu, tata nilai dan norma yang semakin merosot tidak hanya di perkotaan tapi sudah merambah ke pedesaan (Zuriah, 2007). Atribut sekolah tampaknya belum mampu membuat anak didik betul-betul terpelajar dan memperhatikan etika dalam berperilaku. Disinilah fungsi pendidikan bagi masyarakat Indonesia mulai dipertanyakan keeksistensiannya.

Jika kita tengok kenyataan dilapangan sampai detik ini sistem pendidikan di indonesia masih memandang bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan kepintaran belaka. Masyarakat masih memandang bahwa nilai angka yang tinggi adalah hasil yang sangat penting untuk dikejar dalam proses pendidikannya. Tetapi pada dasarnya sekolah bukan hanya sekedar tempat *transfer of knowledge* saja. Seperti yang dikemukakan oleh Fraenkel (dalam Azra, 2006) bahwa sekolah tidak semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai *(value oriented enterprise*). Lebih lanjut Fraenkel mengutip John Childs yang menyatakan bahwa, sekolah adalah organisasi sistem yang dalam dirinya merupakan sebuah usah moral (*moral enterprise*) karena merupakan usaha sengaja masyarakat manusia untuk mengontrol pola perkembangannya (Fraenkel dalam Azra, 2006). Dari pernyataan Fraenkel tersebut dapat kita pahami bahwa pada dasarnya ada yang perlu dirubah dari paradigma masyarakat terkait dengan pendidikan di Indonesia. Kepintaran dan angka bukanlah semata-mata hal yang harus dikejar dalam pendidikan, namun bagaimana transfer nilai dan usaha moral yang dikembangkan didalamnya mampu dikembangkan secara efektif. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang beradap dan berkarakter Indonesia dapat terwujud.

Bergesernya pandangan akan fungsi pendidikan yang telah berkembang selama ini akan berdampak terhadap output dari pendidikan itu sendiri. Dewasa ini dapat kita saksikan bahwa banyak orang yang mengaku berpendidikan tinggi tidak mencerminkan perilaku yang seimbang atau bahkan sangat timpang dengan gambaran perilaku yang digadang-gadang pasti dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi. Perilaku yang bermoral dan beradap. Sudah banyak contoh orang dengan pendidikan tinggi melakukan korupsi. Orang dengan pendidikan tinggi menganiaya sesamanya. Output seperti inikah yang kita harapkan dari pendidikan Indonesia ke depan? Tentu saja bukan. Untuk berkembang dan menjadi negara yang adidaya, Indonesia tidak hanya butuh manusia-manusia yang pandai secara intelektual saja, melainkan manusia yang juga bermoral, beradap dan bermartabat. Manusia yang berkarakter. Manusia yang mencerminkan detil-detil nilai pancasila dalam setiap pikiran perbuatan dan perkataannya.

Lalu pertanyaan yang kemudian muncul, harus dimulai darimanakah perubahan keadaan seperti saat ini. Revolusi seperti apakah yang harus digagas dan diaplikasikan. Jawabannya akan kita kembalikan lagi pada pendidikan kita. Perubahan yang paling mendasar harus dimulai dari pandangan akan pendidikan dan segala sistem yang mengikatnya. Perubahan yang tidak hanya perubahan sistem tetapi perubahan pandangan dan keyakinan yang harus dilakukan secara serentak, konsisten dan bersama-sama. Namun bagaimana caranya? Bagaimana kita membangun kesadaran semua elemen pendidikan ini untuk dapat mengembalikan esensi pendidikan dalam menegakkan karakter berbasis etika dan moral?

Revolusi Mental Dalam Bidang Pendidikan

Penegakan kembali pendidikan karakter secara holistik sangatlah mendesak untuk digalakkan. Mengingat bahwa pendidikan sendiri merupakan pilar pembangunan bangsa, bersamaan dengan ekonomi, pendidikan merupakan sebuah ukuran bagi negara untuk menentukan indeks perkembangannya. Di samping itu efek dari pendidikan akan menciptakan efek domino bagi kehidupan masyarakat di masa depan. Sehingga pendidikan yang berbasis karakter merupakan langkah pertama yang perlu diterapkan jika ingin membentuk mental bangsa yang tangguh, mampu bersaing di masa depan, bermoral dan berkarakter. Gagasan mengenai pendidikan karakter memanglah bukan pertama kali disebutkan. Gagasan ini sudah muncul sejak tahun 2010 dan dicanangkan untuk dilaksanakan hingga tahun 2025 (Puskurbuk-Balitbang,tanpa tahun).

Namun gagasan mengenai pendidikan karakter seolah-olah hanya jalan di tempat. Hal ini dikarenakan masih belum ada kesepakatan dan pemahaman yang jelas antara pembuat sistem dan pelaksana terkait dengan karakter seperti apa dan bagaimana yang mesti dibangun. Pemahaman yang terlalu sempit tentang makna pendidikan juga merupakan suatu aspek yang menjadi hambatan dalam mengembangkan pendidikan karakter. Selain itu, pemerintah seolah-olah hanya jalan sendiri tanpa menggandeng agen-agen pendidik yang justru merupakan aspek penting dalam mengaplikasikan gagasan pendidikan karakter.

Perubahan mendasar yang perlu segera dilakukan dalam menegakkan kembali pendidikan karakter bagi bangsa ini adalah memperluas pandangan masyarakat terkait dengan pendidikan. Selama ini masyarakat memandang bahwa pendidikan adalah lahan untuk mendapatkan kepintaran, nilai ujian berupa angka yang tinggi, dan jaminan ijazah (Adinda, 2014). Seseorang seringkali dianggap tidak berhasil jika nilai ujiannya rendah. Padahal, nilai ujian dan ijazah saat ini seringkali tidak menggambarkan kualitas dari peserta

didik itu sendiri. Pandangan ini masih terjadi sampai saat ini padahal pendidikan karakter sudah dijalankan. Hasilnya adalah wacana pendidikan karakter tidak menghasilkan buah maksimal. Padahal secara konsep, program pendidikan karakter harusnya mampu menjadi tonggak awal kebangkitan pendidikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pandangan tersebut yang pertama-tama perlu diubah dari benak masyarakat.

Perlu dilakukan sosialisasi dan aksi besar-besaran yang mampu merubah pandangan masyarakat. Sasaran dari sosialisasi ini tentu saja bukan hanya guru atau siswa saja, namun juga keluarga siswa, lingkungan siswa dan bahkan seluruh lapisan masyarakat seperti para pembuat lapangan pekerjaan yang selama ini seringkali menjadi alasan masyarakat memandang bahwa ijazah adalah hal nomor satu dalam sekolah. Pemerintah dan para pembuat kebijakan harusnya mampu menggerakkan para pemudanya dalam rangka memperkenalkan perubahan ini pada seluruh masyarakat. Sehingga program yang sudah sedemikian bagusnya tidak menguap ketika sudah diterapkan di masyarakat, yang disebabkan pandangan terhadap pendidikan yang masih sempit. Pendidikan pada dasarnya merupakan ladang pengembangan potensi dan karakter pesertanya. Seperti yang disebutkan Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran *(intellect),* dan tubuh anak, bukan hanya untuk mendapat nilai angka yang tinggi saja.

Thomas Lickona dalam (Marzuki, 2012) menyebutkan, secara terminologis karakter adalah " *A reliable inner dispotion to respond to situations in a morally good way.*" Selanjutnya Lickona menambahkan, "*Character so conveived has three interrelated parts, moral knowing, moral feeling, and moral behaviour*". Artinya karakter yang baik harus meliputi pengetahuan kebaikan, lalu menumbuhkan komitmen (niat) terhadap kebaikan dan pada akhirnya melakukan kebaikan itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Hal ini juga ditunjang oleh penelitian Sartono (2011) bahwa ada 4 pilar dasar nilai moral pendidikan karakter yaitu: olah pikir (*intelectual development*), olah hati *(spiritual and emotional development),* olah raga dan kinestetik *(physical and kinestetic development),* dan olah rasa dan karsa *(affective and creativity development).* Atas dasar apa yang telah diungkapkan di atas, pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai

yang telah menjadi kepribadiannya. Pandangan tersebut juga merupakan poin penting yang perlu dipahamkan pada seluruh aspek pendidik di Indonesia.

Pandangan lain yang perlu dirubah dalam memandang pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan bukan semata-mata tugas sekolah atau institusi terkait untuk melaksanakannya. Melainkan tugas bersama seluruh bangsa untuk menegakkan mendidikan yang ramah, menyenangkan dan tidak hanya mengembangkan intelektual melainkan juga menguatkan karakter peserta didik yang berdasar nilai-nilai pancasila.

Kita tidak boleh lupa bahwa dalam pendidikan ada tiga komponen penting yang perlu untuk dilibatkan yaitu keluarga masyarakat dan sekolah. Rantai yang terjalin antara ketiga komponen ini tidak bisa terputus atau bahkan berjalan sendiri-sendiri. Keluarga, Sekolah, dan masyarakat adalah *education network* yang nantinya akan bisa mewujudkan keberhasilan pendidikan karakter yang *holistic* dan revolusioner (Azra, 2006). Pembentukan dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan yang harmonis (Azra, 2006).

Keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Sebagaimana yang dinyatakan Philips, bahwa keluarga hendaknya menjadi *school of love,* sekolah untuk kasih sayang (Philips, 2000). Anak yang merupakan bibit masa depan bangsa harusnya mendapatkan nutrisi kasih sayang dan teladan tentang pentingnya saling mengasihi sesama dari keluarga. Kasih sayang dan penghargaan yang diterima anak dalam keluarga akan meningkatkan *self esteem* anak (Rakhmat, 1997). *Self esteem* yang tinggi ini akan pada gilirannya menjadikan anak memiliki perasaan mampu menghadapi kesulitan, siap terhadap tantang dimasa depan. Anak dengan self esteem yang tinggi juga akan mampu mengembangkan kemampuannya dengan lebih baik karena kemampuan mereka dihargai dan merekapun menghargai apa yang mereka miliki. Dengan demikian karakter positif yang pada dasarnya telah dimiliki anak akan dapat dikuatkan.

Selain itu keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seseorang anak dididik dan dibesarkan. Fungsi keluarga utama seperti yang telah diuraikan di dalam resolusi majelis umum PBB adalah "keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera". Seorang pakar pendidikan, William Bennett, mengatakan bahwa:

"…. the biological, psychological, and educational well-being of our children depend on the well-being of the family…The family is the original and most effective Department of Health, Education and Welfare. If it fails to teach honesty, courage, desire for excellence, and a host of basic skills, it is exceedingly difficult for any other agency to make up its failures"

("kesejahteraan fisik, psikis, dan pendidikan anak-anak kita sangat tergantung pada sejahtera/tidaknya keluarga….Keluarga adalah tempat yang paling orisinal dan efektif dari Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi lembaga-lembaga lain untuk memperbaiki kegagalan-kegagalannya") (Kasriyati, tanpa tahun).

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya titik utama untuk memulai pendidikan karakter terletak pada fungsi keluarga. Sehingga semakin menegaskan bahwa sudah seharusnya keluarga bukan hanya dijadikan sebagai faktor kedua bahkan faktor kesekian dalam pembentukan karakter bangsa. Namun keluarga juga harus berjalan bersama dengan sekolah dan tidak hanya pasrah pada sistem yang ada dan mengatur pendidikan anak mereka.

Sudah saatnya pemerintah menggandeng keluarga sebagai agen pendidikan untuk melaksanakan program pendidikan ini. Sehingga seperti yang telah disebutkan, pendidikan akan karakter akan semakin terkuatkan dalam lingkungan keluarga. Setidaknya anak akan mendapatkan informasi yang sama ketika dia berada di rumah dan di sekolah. Informasi yang sama dan seimbang ini akan dapat membentuk dasar yang baik dan tidak menimbulkan konflik pada diri anak.

Selain itu seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai suku dengan karakter yang begitu berbeda di setiap sukunya, pembangunan karakter dalam Revolusi Mental di bidang pendidikan perlu memperhatikan keragaman tersebut. Pembangunan karakter di Jawa berbeda dengan pembangunan karakter di Kalimantan bahkan Papua dan wilayah-wilayah lainnya. Kita perlu menyadari bahwa Indonesia merupakan negara multikutural yang tentunya budaya-budaya tersebut akan membentuk karakter yang beragam pula. Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pemerintah tidak bisa memaksakan satu cara dan nilai saja dalam membentuk dan membangun karakter peserta didik.

Perlunya penerapan kurikulum yang berbasis kemasyarakatan dan budaya adalah salah satu inovasi yang perlu diterapkan dalam rangka mewujudkan revolusi mental dalam bidang pendidikan ini. Dalam pelaksanaan pendidikan pemerintah perlu memberikan kebebasan pada pendidik untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan masyarakat

dan budaya yang berkembang. Sehingga nilai yang disampaikan melalui sekolah dan nilai serta budaya yang berkembang di masyarakat sekitar dapat saling menguatkan untuk membentuk karakter peserta didik yang positif.

Kurikulum berbasis budaya dan masyarakat dapat juga dipahami sebagai inovasi kurikulum yang ingin mengedepankan pengembangan segenap potensi peserta didik atas dasar watak, peradaban, dan martabat. Kurikulum perlu dikaitkan dengan tatanan nilai kemanusian yang berlaku di masyarakat. banyaknya materi pelajaran bukan lagi merupakan prioritas utama pengembangannya namun yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan dimensi-dimensi kurikulum yang menghalangi mampu membuka pengekang-pengekang perkembangan potensi peserta didik (Tilaar, 1999).

Sinergisitas antara sekolah, keluarga dan masyarakat ini akan terbentuk jika ada strategi turun ke bawah yang dilakukan pemerintah untuk memasyarakatkan sistem ini. Dengan memberdayakan perangkat desa, pemuda, ilmuwan dan praktisi-praktisi pendidikan untuk mensosialisasikan program ini secara serentak. Sehingga ketika konsep pendidikan karakter akan dilaksanakan maka semua anggota masyarakat siap untuk menerimanya.

Sekolah sendiri merupakan Institusi yang memiliki tugas penting dalam rangka meningkatkan informasi dan teknologi siswa. Namun disisi lain sekolah juga memilki tugas dalam membentuk kapasitas bertanggung jawab siswa dan bijak dalam mengambil keputusan (Asriati, 2011). Oleh sebab itu sekolah memerlukan disiplin yang tinggi dalam membentuk dan membangun karakter, karena hal ini tidak mudah namun juga tidak akan sesulit yang dibayangkan jika semua dilakukan dengan konsisten. Dalam hal ini diperlukan refleksi mendalam untuk membuat rentetan moral menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk watak atau tabiat seseorang. karakter menjadi sebuah identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan inilah kualitas seseorang diukur.

Sekolah harus menjadi penggerak utama dalam pendidikan yang bebas di mana pendidikan sebaiknya bersifat universal dan tidak memihak. Dengan demikian tujuan pendidikan efisiensi sosial, pembentukan berwarganegaraan, dan penciptaan manusia berkarakter bisa terwujud. Sekolah yang secara mikro merupakan *leadingsector,* harus mampu berupaya memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di sekolah. Terdapat prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah (Asriati, 2011): (1) Berkelanjutan, prinsip ini mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai

dari satuan pendidikan; (2) melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah; (3) nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan, prinsip ini mengandung makan bahwa materi nilai pendidikan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa, nilai ini tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep teori, melainkan harus dikembangkan melalui berbagai aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor; (4) proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan aktif dan menyenangkan, poin ini merupakan titik tekan yang harus diperhatikan. Bahwa sekolah harus mampu mewujudkan proses belajar yang menyenangkan untuk siswa didik dan dilakukan secara aktif oleh siswa bukan guru.

Rekomendasi

Revolusi pendidikan Indonesia adalah merubah secara mendasar pandangan masyarakat mengenai pendidikan itu sendiri. Merubah pandangan tentang pendidikan adalah lahan untuk mendapatkan uang, pandangan tentang sekolah adalah tempat untuk berlomba-lomba mendapatkan kepintaran dan angka semata. Pandangan-pandangan seperti itu perlu dihilangkan dari benak masyarakat jika ingin mewujudkan pendidikan karakter yang benar-benar berkarakter. Lalu perlunya ditanamkan pemahaman bahwa pendidikan adalah

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan menghasilkan manusia yang berkarakter terdapat tahapan yang perlu diwujudkan. Tahapan ini tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh sekolah apa pun institusi melainkan juga harus dipahami oleh tiga komponen penting yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. Rantai yang terjalin antara ketiga komponen ini tidak bisa terputus atau bahkan berjalan sendiri-sendiri. Keluarga, Sekolah, dan masyarakat adalah *education network* yang nantinya akan bisa mewujudkan keberhasilan pendidikan karakter yang *holistic* dan revolusioner (Azra, 2006). Kerja sama dan konsistensi antara ketiga aspek tersebut haruslah ditegakkan dan berjalan bersama-sama. Tidak hanya sekolah yang dijadikan ujung tombak dalam mengubah mental bangsa namun ketiga aspek ini perlu bersama-sama menjadi ujung sehingga perubahan yang dimaksud dapat tercapai dengan baik. Rekomendasi yang bisa diambil berdasarkan analisa kami di atas adalah sebagai berikut:

1. Revolusi pandangan bahwa sekolah adalah lahan untuk mendapatkan kepintaran dan nilai tinggi dirubah menjadi bahwa sekolah merupakan lahan untuk transfer nilai dan pengembangan moral. Perubahan ini dilakukan melalui sosialisasi dan aksi besar-besaran yang mampu merubah pandangan masyarakat. Sasaran dari sosialisasi ini

tentu saja bukan hanya guru atau siswa saja, namun juga keluarga siswa, lingkungan siswa dan bahkan seluruh lapisan masyarakat seperti para pembuat lapangan pekerjaan yang selama ini seringkali menjadi alasan masyarakat memandang bahwa ijazah adalah ukuran utama.

2. Pemerintah dan para pembuat kebijakan harusnya mampu menggerakkan para praktisi pendidikan, pemuda, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan utamanya sekolah dalam rangka memperkenalkan perubahan ini pada seluruh masyarakat.
3. Pembangunan rantai yang terjalin antara ketiga komponen *education network.* Keluarga, Sekolah, dan masyarakat adalah *education network* yang nantinya akan bisa mewujudkan keberhasilan pendidikan karakter yang *holistic* dan revolusioner.
4. Perlu adanya kurikulum yang dibuat harusnya dapat mengakomodir semua kebutuhan anak tidak hanya akademis, namun juga pengembangan aspek spiritual, budaya, seni dan kemasyarakatan. Kurikulum perlu dikaitkan dengan tatanan nilai kemanusian yang berlaku di masyarakat. banyaknya materi pelajaran bukan lagi merupakan prioritas utama pengembangannya namun yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan dimensi-dimensi kurikulum yang menghalangi mampu membuka pengekang-pengekang perkembangan potensi peserta didik
5. Evaluasi terhadap semua kegiatan pendidikan harus dilakukan secara regular, pengembangan atau bahkan perubahan yang dilakukan harus pro siswa. Dengan demikian, hasil kerja keras dari elemen pemerintah, masyarakat, pendidik akan nyata dirasakan secara positif oleh peserta didik.

Daftar Acuan

Asriati, N. (2011). Grand Design Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah. Jurnal Visi Ilmu Pendidikan (J-VIP) Vol. 6, No. 3, 590–604

Azra, A. (2006). *Paradigma baru pendidikan nasional.* Jakarta: Kompas.

Kneller, G.F (1971). *Introduction to the philosophy of education, Second ed.* New York: John Wiley & Sons, Inc.

Marzuki. (2012). *Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah. Jurnal pendidikan Karakter* .

Philips, C. Thomas, (2000). *Family as the school of love.* Makalah pada National conference of Character Building: Jakarta.

Rakhmat, J. (2006). *Catatan Kang Jalal.* Bandung: Remaja Rrosdakarya.

Sartono. (2011). Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. *Makalah tidak diterbitkan.*

Adinda S., A.J. (2014, September 11). *harian indoprogress.* Diakses pada 27 Januari 2015 dari indoprogress.com: http://indoprogress.com/2014/09/revolusi-mental-dalam-pendidikan

10
Lupakanlah *Student Centered Learning*

Juneman Abraham

Model pembelajaran di Indonesia dan di dunia telah mengalami beberapa kali revisi. Dengan berbagai varian dan labelnya, pada dasarnya sejarah dunia pendidikan telah melaksanakan dua model besar pembelajaran, yakni pembelajaran berpusat pada guru (*teacher-centered learning*; TCL) dan pembelajaran berpusat pada siswa (*student-centered learning*; SCL).

Pada TCL, penguasa pengetahuan adalah guru. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi pada masa di mana atmosfer "kegelapan" menguasai sekolah-sekolah. Pada saat itu, pengetahuan dan ilmu terlebih yang mutakhir sangat sulit diperoleh. Dosen-dosen dan guru-guru dikirim ke luar negeri untuk menimba ilmu dari para mahaguru maupun dari perpustakaan yang diibaratkan "*oase*" pengetahuan. Saat tiba di tanah air, tidak mengherankan bahwa guru bak "dewa ilmu". Berkat kemurahan hati para gurulah, para siswa memperoleh "pencerahan". Oleh karena para siswa tidak memiliki alternatif sumber ilmu yang memadai, maka hal-hal yang disampaikan oleh guru hanya dapat diterima, ditelan apa adanya, tanpa dapat diperdebatkan. Mengapa? Sebab perdebatan yang baik membutuhkan referensi sebagai alasnya. Sementara referensi yang dimiliki siswa tidak mungkin ada yang lebih maju daripada yang dimiliki oleh guru (pada masa itu). Dengan perkataan lain, siswa sangat bergantung pada guru. Kita sulit bersikap kritis terhadap seseorang atau sesuatu di mana kita total menggantungkan diri padanya.

Guru yang mulanya memiliki otoritas akademik, entah melalui "efek halo", kemudian juga menjadi otoritas moral. Guru adalah sang kebenaran. Oleh karenanya, segala bentuk disiplin yang diterapkan oleh guru (termasuk hukuman fisik) dipandang sebagai proses pemurnian bagi siswa untuk menjadi "benar" dan "bermoral". "Sabda" guru adalah sabda yang keramat. Yang ideal bagi siswa adalah mencatat, mengingatnya, dan mengulangi atau menerapkannya secara persis. Para Orang tua siswa pun umumnya memaklumi hal ini.

Guru didukung penuh oleh para Orang tua pada hampir apa pun yang dilakukan oleh guru.

"Kemauan guru" menjadi penentu segala-galanya dalam proses pembelajaran. Aspirasi siswa teredam. Siswa menjadi semacam angka atau statistik. Sukses siswa, sukses kelas, semata-mata memuaskan pikiran dan hasrat guru itu. Oleh karena didefinisikan oleh guru, logis jika "sukses" itu menjadi kurang (atau, tidak) bermakna bagi siswa!

Model pembelajaran yang demikian memang tidak mengundang dinamika di kelas. Suasana pembelajaran menjadi kaku, dingin, dan, kata anak sekarang, "*garing!*". Pembelajaran yang demikian memang bisa "makan hati" lagi "menyakitkan" (di mata siswa).

Namun demikian, tunggu dulu... "Aneh tapi nyata"-nya, siswa banyak yang memuji kebesaran, kearifan, dan kebestarian gurunya setelah lulus. Jasa guru diakui tiada tara yang menjadikannya bisa berkarya dan "bisa jadi orang" seperti sekarang ini. Cek saja memoar orang-orang ternama dan begawan di bidangnya. Anda hampir pasti akan menemukan jasa guru di dalamnya. Hal ini mengingatkan kita kepada film-film Shaolin. Murid awalnya tidak mengerti sama sekali apa yang diperintahkan gurunya. Murid ingin belajar Kung Fu malah disuruh guru menimba dan mengangkat air. Umumnya setelah murid menyelesaikan tahapan pembelajarannya, lalu "turun gunung" dan menghadapi lawan-lawannya di lapangan, murid teringat episode-episode pembelajaran oleh gurunya (kadang sambil menangis!). Murid lalu baru benar-benar merasakan manfaat dari perintah-perintah yang awalnya seperti tidak relevan dan tanpa makna tersebut. Biasanya pada saat itu, guru telah tiada. Murid mengunjungi makam guru dan memberikan penghormatan tanda bakti.

Bertahun-tahun kita "dikuasai" oleh kultur TCL. Ada yang puas (tentu saja terutama para guru). Banyak yang tidak puas, dan disuarakan oleh filosof dan pakar pembelajaran. TCL dipandang tidak "manusiawi". Manusia diklaim seperti "gelas" (yang dituangi air dari guru sebagai "kendi"), seperti "robot" (yang menjadi objek manipulasi guru untuk dibentuk sebagaimana yang guru inginkan). Datanglah arus pragmatisme, konstruktivisme, humanisme, dan konstruksionisme, yang digunakan untuk menggugat dan menggeser sama sekali TCL. Inilah era SCL (*student-centered learning*)!

Student-Centered Learning

Imbas arus pragmatisme mengatakan bahwa pembelajaran mesti menjawab kebutuhan konkret siswa dalam hidup kesehariannya. Oleh karenanya, baik metode maupun isi pembelajaran yang digunakan oleh guru perlu dievaluasi terus-menerus seiring dengan kemampuan dan "kemauan" atau aspirasi siswa (demokratis!). Argumennya, jika pembelajaran dikemas sesuai dengan kapasitas dan keinginan siswa, maka iklim pembelajaran menjadi menyenangkan, maka siswa akan gemar belajar (tanpa disuruh sekalipun!), maka materi yang disampaikan lebih mudah mendarah daging dan "menubuh" (*embodied*).

Imbas arus konstruktivisme mengatakan bahwa pembelajaran mesti melibatkan penafsiran yang dibangun oleh si pembelajar sendiri berdasarkan gagasan dan pengalaman yang diterimanya. Jadi TCL keliru karena memberikan "barang (pengetahuan) jadi", apalagi barang tersebut "barang impor" (dari luar negeri) yang belum tentu sesuai dengan situasi siswa di rumah, di tetangga, di RT, dan di tanah airnya.

Imbas arus humanisme mengatakan bahwa pembelajaran mesti memperlakukan manusia sebagai manusia, yang sedang berproses memanusiakan dirinya. Artinya, pendidikan mesti mengarah pada pertumbuhan manusia sebagai makhluk yang mampu mengaktualisasikan segenap potensi dirinya secara otonom.

Imbas arus konstruksionisme mengatakan bahwa pembelajaran di ruang kelas merupakan kontributor penyusun realita sosial. Oleh karenanya, pembelajaran mesti diarahkan untuk mengubah kondisi sosial menuju kebaikan bersama (*common good*). Siswa mesti memiliki kepekaan dan merasa gelisah apabila pengalaman dan observasinya berjumpa dengan ketidakadilan dalam kehidupan sosialnya. Siswa diajak untuk membangun (dan memelihara!) kesadaran kritis bahwa tindakannya tidaklah hanya dipengaruhi (secara pasif) oleh situasi sosial, melainkan juga memengaruhi situasi itu.

Salah satu implikasi dari arus filosofis tersebut adalah bahwa intervensi dalam kehidupan sosial seringkali membutuhkan tindakan bersama dari para pelajar berdasarkan pengetahuan yang dibangunnya. Siswa ingin (dan dapat) mengubah kenyataan sosial.

Berdasarkan arus-arus filosofis tersebut, salah satu konsekuensi terpenting dari SCL adalah pembelajaran berdiferensiasi (*differentiated instruction*). Dalam pembelajaran ini, dimensi-dimensi pembelajaran disesuaikan dengan dimensi-dimensi situasi dari tiap-tiap siswa. Hal ini mengingatkan kita kepada pendekatan berpusat pada pelanggan (*customer-centric*) yang dikenal dalam dunia pemasaran. Guna menarik pelanggan, kegiatan sentral

yang perlu dilakukan adalah pemrofilan pelanggan. Hal yang perlu diprofilkan adalah keseluruhan aspek dari pelanggan itu sendiri, baik fisik, psikologis, sosial, kalau perlu, spiritual. "Pelanggan" dalam pendidikan adalah siswa. Berdasarkan profil menyeluruh dari siswa itulah, pembelajaran dilakukan dan dievaluasi. Guru merupakan fasilitator yang merangsang seluruh kemungkinan yang ada pada siswa (sebagaimana didefinisikan oleh siswa itu sendiri) sehingga profilnya menjadi semakin baik dan berdaya dari waktu ke waktu.

Keterbatasan SCL

Model pembelajaran SCL bukanlah tanpa kelemahan. Sejumlah kelemahan telah cukup nyata seperti bahwa tidak semua siswa dapat efisien dan efektif belajar/bekerja dalam kelompok (yang sudah menjadi "tradisi" SCL); bahwa sumberdaya pengajar yang benar-benar memahami filosofi dari SCL dan sungguh-sungguh mau mengeluarkan upaya ekstra untuk mempraktikkannya secara penuh masih sangat terbatas; bahwa sebagian siswa sesungguhnya merasa "tersesat dan kehilangan arah" tanpa kejelasan panduan, peta jalan, klarifikasi, dan penyimpulan dari guru; bahkan (yang lebih menyedihkan!) guru malah minim persiapan dan kurang tergerak untuk terus-menerus mendalami keilmuannya (padahal sudah disertifikasi!). Sebagian siswa malah mengidentikkan SCL dengan "*Ah kami paling disuruh presentasi dan tugas-tugas kelompok melulu oleh guru! Enak ya jadi guru zaman sekarang!*".

Di atas semua itu, penulis melihat adanya gejala-gejala yang mendasar yang seyogianya patut kita perhatikan. Penulis mencermati bahwa belakangan survei sistematis maupun tulisan pribadi yang bertemakan "karakteristik guru yang disukai siswa" cukup marak. Sejumlah kualitas yang cukup konsisten muncul adalah humoris, memotivasi, bersahabat (*friendly*), memberikan teladan, perhatian, tidak mudah marah, sampai dengan dermawan (dengan berbagai interpretasinya; salah satunya adalah: memberikan kisi-kisi soal ujian!). Guru-guru dituntut untuk memenuhi sejumlah kualitas tersebut. Namun demikian, tidak banyak survei sistematis yang menangkap "karakteristik siswa yang disukai guru" dan meminta siswa untuk sedikitnya memahami dan mencoba mengambil *perspective taking* dari sisi guru. Gejala non-resiprokal ini patut kita cermati. Padahal, jika kita sepakat bahwa guru mesti mampu mengapresiasi kondisi siswa yang beragam, maka kita juga mesti sepakat bahwa siswa pun perlu diajak untuk belajar mengapresiasi kondisi guru yang beragam. Kegagalan memahami hal ini akan berakibat "mutiara dari sang guru" tidak akan keluar karena tertutup kabut ekspektasi siswa melulu. Masalah di lapangan

timbul karena satu pihak menuntut mode pluralitas (guru memahami kondisi siswa yang beragam) sedangkan pihak *counterpart*-nya (siswa) tidak diminta. Akhirnya, yang terjadi kedua belah pihak saling mengeluh. Siswa merasa tidak dipahami oleh guru. Sebaliknya, di kalangan para guru muncul keluhan serupa. Guru merasa tidak dipahami oleh siswa. Rasanya tidak jarang kita mendengar keluhan guru, "*Siswa sekarang tidak seperti siswa yang dulu. Dibandingkan siswa di masa lalu, siswa sekarang 'kurang ajar', 'tidak sopan', 'sulit diajar', dan sebagainya.*" Simak juga keluhan umum terhadap siswa, sebagaimana nampak pada Gambar 1.
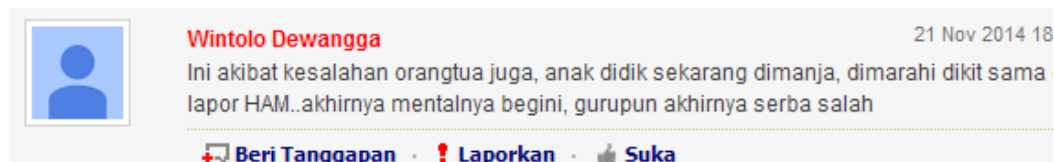
Gambar 1. Keluhan terhadap siswa dan Orang tuanya
(sumber: http://news.detik.com/read/2014/11/14/180950/2748891/10/terlibat-tawuran-20-siswa-sma-109-dikeluarkan-pihak-sekolah)

Mencermati komentar di atas, kalau menggunakan terminologi Mochtar Lubis tentang ciri manusia Indonesia (feodalistik), mungkin dapat dibahasakan: "'Feodalisme guru' kini bergeser menjadi 'feodalisme siswa'". Sinisme dan "kekacauan" ini, menurut hemat saya, tidak dapat diselesaikan secara memadai baik dengan intensifikasi TCL atau pun intensifikasi SCL. Mengapa? Karena persoalannya terletak pada *aktivitas* dan *interaksi*. Kita seringkali mengatribusikan lokus penyebab masalah dalam dunia pendidikan ada pada guru (sehingga kita menafikan TCL) atau pada murid (sehingga kita menafikan SCL). Tentu saja, baik pada TCL maupun SCL, unsur aktivitas dan interaksi ada di dalamnya, namun bukan fitur natural melainkan hanya menjadi instrumen menuju koordinat pusat (*center*), yaitu guru atau siswa. Mungkin saja memang ada masalah pada kepribadian, kompetensi, dan keterampilan lembut (*soft skill*) dari guru maupun siswa. Namun demikian, pemahaman kita tidak akan utuh jika tidak meneropong *aktivitas interaksional* yang terjadi antara guru dan siswa serta sistem sekolah. Dengan perkataan lain, jika ingin melakukan penelitian yang lebih serius, lakukanlah penelitian dengan *unit analisis* ini.

Team-Centered Learning

Hal yang sedang saya bicarakan dalam paragraf terakhir di atas saya sebut sebagai *Team-centered Learning* (MCL). Saya berpendapat, MCL adalah model pembelajaran

yang tepat dan matang untuk saat ini. Saya akan menjelaskannya dengan menggunakan perspektif psikologi perkembangan yang sederhana.

Mengikuti alur psikologi perkembangan, TCL merupakan model pembelajaran yang mengandaikan siswa berada fase "kanak-kanak". Siswa adalah kertas putih yang "ditulisi" oleh gurunya. Ini pun ada syaratnya. Anak-anak diandaikan memenuhi syarat dan kapasitas untuk "ditulisi". Sebagaimana pada fase perkembangan kanak-kanak, diandaikan manusia kecil itu tidak berdaya. Anak dituntut untuk mengerti kemauan Orang tua. Orang tua (analogi guru) lah yang dianggap paling mengerti hal-hal yang terbaik untuk si anak (analogi siswa). Patut diingat juga bahwa tidak ada Orang tua yang memiliki intensi sadar untuk "mencelakakan" anaknya sendiri. Kita ingin mengatakan bahwa TCL mengandung kebaikannya sendiri.

SCL dalam alur perkembangan ini analog dengan fase "remaja". Pembelajaran berpusat pada siswa. Sekelompok mahasiswa membuat video di Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=MxFNlOXAP94) yang kiranya tepat menggambarkan dinamika yang terjadi pada model pembelajaran ini: "*Karena Remaja Ingin Dimengerti*". Preferensi dan gaya belajar dari pelajar menjadi pusat perhatian. Guru merupakan fasilitator atau moderator. Segenap perangkat keras dan lembut diadakan untuk pelajar agar pelajar mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. SCL pun sesungguhnya mengandung kebaikannya sendiri.

Nah, kini saatnya kita memasuki model pembelajaran yang lebih matang! Analoginya dalam alur perkembangan adalah fase "dewasa". Setelah "Orang tua ingin dimengerti oleh (dan mendefinisikan apa saja dari) anak" (TCL) dan "remaja ingin dimengerti oleh Orang tua" (SCL), tibalah saatnya "anak dan Orang tua berusaha untuk saling mengerti". Asumsinya adalah bahwa terdapat kebenaran dalam kedua model pembelajaran sebelumnya. Apakah itu? *Pertama*, siswa menginginkan kegiatan belajar yang bermakna dan menekankan pelibatan dirinya (SCL). *Kedua*, guru juga ingin bereksperimen dengan beragam isi, teknik, dan praktik untuk mengaktualisasikan pembelajaran versinya. Kumulasi pengetahuan dan kebijaksanaan guru tidaklah mungkin tidak ada artinya. Dengan melihat kebenaran-kebenaran ini, refleksi dan pemecahan masalah bersama lalu menjadi aktivitas kunci yang perlu dikembangkan.

Kita sering mendengar bahwa ada di antara guru-guru kita yang pendidikannya tinggi, bahkan pernah belajar di luar negeri, namun dicap "tidak bisa mengajar" oleh siswanya. Mendengar hal ini, jika menggunakan paradigma *Team-centered Learning*, maka kita harus menelaah bagaimana interaksi berlangsung. Hal yang menarik dalam interaksi ini

adalah bahwa “Siswa dapat ‘membelajarkan’ gurunya dalam proses interaksional” (Konteks 1). Bukanlah hal ini juga yang sering kita dengar dari para guru dan dosen? “Saya tidak hanya mengajar dari para (maha)siswa, tetapi juga belajar dari mereka”. Yang kebanyakan terjadi selama ini jika kasus serupa itu terjadi adalah “Siswa ‘meninggalkan’ gurunya” (Konteks 2). Saya cukup yakin bahwa guru yang dicap “tidak bisa mengajar” itu jika “ditaruh” (berada) dalam dua konteks yang berbeda, akan menghasilkan *outcome* belajar yang berbeda bagi semua. Besar kemungkinan “mutiara” si guru keluar dan menampakkan keindahannya, dan pada gilirannya berdampak pada siswa, pada Konteks 1; dan “mutiara tertutupi lumpur”, dan semua (di)-“kalah”-(kan), pada Konteks 2.

Dalam teori komunikasi mutakhir dikatakan bahwa *makna terdapat dalam interaksi (yang diupayakan terus-menerus)*. Makna *bukan* terdapat pada diri komunikator, *bukan* juga eksis dalam diri komunikan. Selanjutnya, dalam teori kecerdasan yang menganut konstruksionisme sosial ini, inteligensi bukan terdapat pada (otak) person melainkan terdapat pada jejaring sosial. Apa artinya? Sudah saatnya kita tidak lagi menaruh “pusat” pembelajaran pada guru atau pun siswa. Pusat pembelajaran adalah aktivitas menjadi tim (“*teaming*”) dan tim itu sendiri. Sebagaimana sebuah tim sepakbola (atau tim pertunjukan teater), setiap anggota perlu menyadari bahwa dirinya adalah anggota sebuah tim. Kegagalan atau keberhasilan merupakan proses interaksi interdependensional; jadi tidak mudah untuk meletakkan “beban” kesalahan, mengkambinghitamkan salah satu pihak atas suatu kegagalan pembelajaran. Apabila menerapkan paradigma pelayanan, tidak ada yang semata-mata melayani dan tidak ada yang semata-mata dilayani. Semua anggota tim (berusaha, dengan sungguh) saling melayani, karena pusatnya adalah tim. Namun demikian, hasil dan kebanggaannya dapat dipetik oleh siapa pun anggota tim.

Sintesis

Iwan Pranoto, Guru Besar Matematika pada Institut Teknologi Bandung (https://groups.google.com/forum/#!msg/bn-indonesia/RT83dzZBH5c/0XVJ8ovLbnwJ), berargumen di *Kompas* baru-baru ini (24 November 2014) pada kolom Opini:

> *“Beberapa edukator menunjuk masalah pengajaran sebagai penyebabnya. Bagi yang rutin mendatangi dan mengamati pengajaran di persekolahan, memang umumnya terlihat murid mendengar pasif dan kurang aktif membangun pemahaman di kelas. Keterampilan mengajar mungkin saja penyebabnya. Namun, ada kemungkinan rendahnya keterampilan mengajar justru merupakan dampak ketimbang penyebab masalah. .... Seberapa pun pahamnya seseorang pada metode mengajar, jika dia tidak memahami makna pembagian 1/3: 2/5, pengajaran matematikanya akan menjadi sebuah ceramah. Dia akan menuangkan pengetahuan mutlaknya ke benak*

para murid. Murid yang seperti busa penyerap akan dipaksa mematuhi prosedur cara menghitung tanpa paham alasan di balik perhitungan itu.... Sebaliknya, jika seorang guru memahami keilmuannya serta bergairah mengajar, tentunya dia akan termotivasi mempelajari teori belajar dan metode mengajar. Dia akan bersemangat meningkatkan pemahaman pedagoginya. Terlebih, berlatih diri dalam metode mengajar menjadi masuk akal karena dia ingin mengajak muridnya belajar sekaligus menikmati kasmaran belajar yang dialaminya. Syarat utama, guru harus memahami keilmuannya. Ada dua area yang perlu dibenahi. Pertama, pada program penyiapan guru perlu dikembangkan sebuah kurikulum baru yang memberikan porsi besar pada pemahaman keilmuan. Calon guru mutlak perlu mengalami kasmaran belajar keilmuannya. Yang akan mengajar sejarah harus pernah merasakan nikmatnya kasmaran menyelami sejarah dan menelitinya...."

Dengan cara pandang yang telah saya kemukakan di atas, saya dapat mengaplikasikannya guna menganalisis pernyataan Iwan Pranoto di atas. Sebenarnya hal yang disampaikan Iwan merupakan perdebatan antara TCL dan SCL. Pada TCL, bukankah guru harus memahami keilmuannya? Pada SCL, bukankah guru sekarang "dibombardir" dengan segala macam "teknik mengajar" (dan diminta untuk mengikuti ragam pelatihannya!) yang diklaim berorientasi pada siswa?

Menggunakan paradigma dialektika dari Immanuel Kant, saya mengandaikan, jika *Teacher-centered learning* (TCL) merupakan "tesis" dan *Student-centered learning* (SCL) merupakan "anti-tesis", maka *Team-centered learning* (MCL) merupakan "sintesis"-nya. Sintesis berarti mengambil kebaikan, keunggulan dari tesis dan anti-tesis kemudian mengelaborasinya menjadi sebuah "tesis" baru (ialah sebuah *gestalt*, bukan sekadar penjumlahan, melainkan totalitas konfigurasi baru) yang lebih memadai untuk menjawab kebutuhan dunia pendidikan saat sekarang yang sedang "galau". Generalisasi dari gagasan MCL ini adalah, misalnya, "*teaming*" dapat dilakukan antara sekolah dan masyarakat, antara warga dan pemerintah, antara pemimpin dan pengikut.

Di saat dunia psikologi industri dan organisasi sudah pesat dengan riset-riset mengenai "*team learning*" dalam *learning organization*, dunia (psikologi) pendidikan masih berkutat dengan "*student-centered learning*" bahkan mengklaim, mungkin secara "ilusif", bahwa *team-centered learning* merupakan bagian total darinya. Saya menandaskan, mulai sekarang, "Lupakanlah" *Student-centered Learning.*

Kita sungguh memerlukan banyak riset, kajian, dan praktik untuk mendudukkan gagasan *Team-centered learning* pada hakikat dan tempatnya yang persis. Inilah yang menurut hemat saya merupakan salah satu revolusi mental yang penting dalam dunia pendidikan kita.

11
Mengajak Kaum Muda Belajar Bernegosiasi

Danny I. Yatim

Seringkali muncul pembicaraan atau tulisan yang menyatakan keprihatinan terhadap generasi muda Indonesia, yang seakan semakin merosot kualitasnya, seakan kita menyatakan generasi muda sebelumnya jauh lebih baik daripada generasi muda sekarang. Apa memang betul demikian? Bukankah pepatah lama mengatakan *air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga* atau seperti kata pepatah Belanda yang sering kita adopsi, *buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya (deappel valt niet ver van de boom)*?

Bila kita ingin agar kaum muda kita mengatasi ketertinggalan kita dengan bangsa lain, maka revolusi mental barangkali perlu dimulai dari kaum tua dulu, khususnya profesi psikologi. Dengan demikian buah yang jatuh nantinya menjadi sesuatu yang indah karena pohonnya pun sudah dibuat lebih kokoh.

Dua hal yang sekilas tampak tidak berhubungan akan disorot dalam tulisan ini, yaitu tawuran dan kemampuan bernegosiasi. Ada pendapat bahwa masyarakat yang nyaman hidup dalam perbedaan adalah karena fasih keterampilan bernegosiasinya.

Tawuran dan Negosiasi

Dari waktu ke waktu kita sering mendengar berita tentang perkelahian antar pelajar yang acapkali menimbulkan keprihatinan. Berbagai pakar kemudian bisa mengeluarkan pendapat di koran, radio, televisi dan seminar mengenai penyebab terjadinya tawuran tersebut, tetapi hingga kini masih belum pernah ditemukan jalan keluar yang terbaik. Terkadang berita tentang tawuran muncul secara tiba-tiba, lalu lambat laun tenggelam di antara berita lainnya.

Berbagai macam alasan diajukan dan umumnya yang disalahkan adalah generasi muda: *kaum muda sekarang kurang memiliki rasa hormat terhadap otoritas, nilai-nilai luhur kita mulai luntur pada remaja, anak muda sekarang ingin cepat menyelesaikan persoalan tanpa memperhatikan lingkungannya*, atau *mudah terpengaruhnya kaum muda terhadap media massa dan globalisasi*. Kadangkala yang dikambinghitamkan adalah kehidupan urban yang makin individualistik, sehingga orang tidak lagi peduli pada lingkungan sekitarnya.

Betulkah demikian? Tentu semua pendapat para ahli itu perlu diverifikasi karena berupa asumsi yang belum tentu berdasarkan fakta. Bila kehidupan individualistik mewarnai kehidupan urban, maka tawuran seharusnya takkan terjadi karena tawuran justru sifatnya kolektif. Para pelajar biasanya tidak berani melakukan perkelahian secara individual. Bila tawuran itu terjadi akibat globalisasi, juga tidak masuk akal, sebab jarang terdengar berita tentang tawuran pelajar di luar negeri.

Saparinah Sadli dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa masyarakat kita bersifat reaktif. Bila ada suatu kejadian, wartawan pun berdatangan mewawancarai psikolog, lalu kenakalan remaja menjadi hangat dibicarakan di media massa. Sikap serupa inilah yang menyebabkan kurang efisiennya penanggulangan kenakalan remaja. Masih ada kecenderungan bersikap reaktif, dan tiba-tiba memfokuskan perhatian pada sesuatu yang sebenarnya sudah mulai dipermasalahkan sejak dulu, tetapi sering menghilang pembahasannya ("Guru Tak", 1976). Mungkin Anda akan kaget mengetahui bahwa pernyataan Saparinah Sadli di atas terbaca pada majalah *Tempo* hampir empat dekade yang lalu. Dalam wawancara tersebut, Ibu Sadli bahkan merujuk kejadian perkelahian remaja di klub malam Niagara di Jakarta tahun 1972, dan ditambahkan pula bahwa topik kenakalan remaja sudah menjadi pembahasan sejak tahun 1966.

Dengan demikian kurang tepat bila tawuran dikatakan merupakan gejala baru akibat modernisasi. Jadi betulkah tawuran itu sebenarnya masalah lama yang timbul tenggelam, dan bukan karena pengaruh luar? Atau merupakan fenomena yang dikhawatirkan mereka yang mungkin dulu semasa mudanya adalah pelaku juga? Apakah memang remaja selalu mempunyai sifat agresif dan sikap tak peduli? Ataukah lingkungan yang menyebabkannya?

Agresi diartikan sebagai perilaku yang merugikan atau mencederai orang lain. Perilaku ini acapkali disertai penampilan tidak bersahabat, sikap tidak peduli, dan secara psikologis, kecenderungan ini mengandung unsur mencari kepuasan diri. Bila dia tidak mendapatkan kepuasan tersebut, maka dia akan mencarinya melalui tindakan agresi.

Tawuran pelajar di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta, sebagaimana kita lihat cenderung dilakukan secara massal, secara beramai-ramai, dan karena ikut-ikutan teman. Seringkali dikatakan remaja memang punya sifat cepat terpengaruh dan ikut-ikutan ("*Violent students*", 2007). Konon ada unsur kesetiakawanan, misalnya karena si pelajar tidak senang melihat temannya diserang. Jadi apakah memang pada dasarnya mereka punya kecenderungan berperilaku agresif, tetapi dipicu oleh kesetiakawanan kelompok? Ada juga yang menyorot dari segi identitas kelompok. Pelajar merasa sangat kuat ikatannya dengan kelompok (*"Sekolah gue diserang sekolah lain. Harus gue bela"*).

Fawzia Aswin Hadis (dalam Saad, 1998) dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa tawuran pelajar mungkin disebabkan budaya kita yang sangat mengagungkan kebanggaan kelompok. Di samping itu juga terbatasnya ruang terbuka di kota besar, seperti misalnya tak ada ruang berolahraga atau melakukan kegiatan santai bersama-sama, membuat kaum muda sulit membangun hubungan baik dengan orang lain. Seperti tikus yang diletakkan dalam tabung eksperimen yang sempit dan menyesak, maka manusia juga ingin melepaskan diri mencari kebebasan. Hal ini sejalan dengan temuan Saad (1998) bahwa agresivitas remaja di DKI Jakarta antara lain terkait dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, di samping juga berhubungan negatif dengan kualitas hubungan dengan Orang tua dan konsep diri.

Istilah 'tawuran" sendiri berasal dari bahasa daerah yang menunjukkan pertikaian. Tawuran desa sudah sejak dulu ada, sehingga mengapa kita harus heran bila terjadi tawuran pelajar? Sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa masyarakat kita mungkin memang senang dengan kekerasan, dan kurang mampu melakukan negosiasi bila mengalami konflik. Apa yang dilihat sehari-hari oleh kaum muda adalah pencerminan masyarakat kita juga, seperti misalnya kecurangan, premanisme, kelakuan para politisi, perilaku korupsi yang menghalalkan berbagai cara yang sesungguhnya tak layak, penyerangan terhadap kelompok yang berbeda pendapat. Bahkan dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan lembaga terhormat negara kita, pernah beberapa kali terjadi kericuhan dan pertikaian fisik, seperti pada 16 Maret 2005 dan 28 Oktober 2014, dan disaksikan oleh seluruh pemirsa televisi di seantero Nusantara. Kedua peristiwa itu dilakukan oleh orang dewasa yang berpenampilan resmi dan professional.

Sistem pendidikan di sekolah pun secara tidak langsung mengagungkan kekerasan fisik. Pada peringatan Hari Kemerdekaan, misalnya, seringkali yang ditampilkan para siswa adalah suasana medan perang dan pasukan bambu runcing. Dari puluhan pahlawan nasional pun lebih banyak yang merupakan pahlawan di medan perang secara fisik, dan hanya segelintir yang merupakan pahlawan karena berjuang melalui pikiran dan tulisannya.

Pendidikan di sekolah masih belum menekankan pentingnya suatu konflik diselesaikan secara nalar dan damai. Berapa banyak pelajar kita belajar tentang perundingan dan negosiasi? Padahal kita merdeka dari penjajahan justru karena para pemimpin bangsa melakukan perundingan dan negosiasi, dan bukan hanya karena perang bambu runcing.

Ini barangkali perlu menjadi sebuah renungan bagi para psikolog dan pendidik, agar bias mencoba menggali lebih dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang bernafaskan perundingan dan negosiasi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam Konperensi Meja Bundar, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, dan Perjanjian Linggarjati? Bahkan apa juga yang terjadi dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Negosiasi seperti inilah yang sebenarnya membawa kita menjadi negara Republik Indonesia yang berdaulat. Sesungguhnya kita tidak akan maju bila hanya meminta kaum muda menghafal nama-nama serta tanggal terjadinya semua perundingan tadi. Ada baiknya kaum muda diberi kesempatan mengkaji isi perundingan dan proses yang terjadi di dalamnya sehingga kita menjadi negara berdaulat.

Peristiwa sejarah lain yang juga tak pernah kita tahu lebih mendalam adalah Kongres Pemuda 1928 di Batavia. Tanyakan kepada semua siswa -- dan juga psikolog — mengenai bunyi Sumpah Pemuda. Semua mungkin bisa melafalkannya, tetapi bila ditanyakan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kongres tersebut, sayang sekali tak banyak yang tahu. Kita tak pernah tahu revolusi mental dalam kongres yang melibatkan 71 anak muda yang sangat idealis itu. Sanggupkah pelajar Indonesia dewasa ini diajak melakukan hal sama seperti tahun 1928, sehingga tidak dituding sibuk bertawuran atau berhura-hura? Tentu saja bisa, bila Orang tua dan sekolah menyediakan wadahnya.

Sudah saatnya sekolah menjadi wadah bagi kaum muda untuk belajar bernegosiasi. Konflik dapat diatasi dengan diplomasi, sekalipun harus berdebat dan tarik urat, namun bisa dilakukan dengan cara santun. Konflik individual antara Soekarno, Sjahrir, dan Hatta karena perbedaan prinsip yang digambarkan dalam film *Soekarno* (Punjabi & Bramantyo, 2013) bisa merupakan contoh baik untuk menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan pertikaian fisik, bahwa orang bisa *agree to disagree*. Cara mengatasi konflik dengan destruktif dan agresif haruslah merupakan jalan keluar terakhir, atau bahkan tidak sama sekali. Mungkin para psikolog dan pendidik bisa merancang konsep *conflict resolution* dengan gaya khas untuk kamu muda bangsa kita, yang intinya berpegangan pada prinsip bahwa semua konflik bisa dikelola dan diselesaikan bila pihak yang bertikai itu dipertemukan. Resolusi konflik adalah konsep yang sudah sering dilakukan dalam pelatihan bidang manajemen, lalu mengapa tidak diterapkan juga dalam pendidikan di sekolah?

Kemampuan Berbahasa dan Bernegosiasi

Pada tahun 1970-an Slamet Iman Santoso (1979) menyampaikan buah pemikiran tentang pentingnya kemampuan berbahasa dalam fungsinya mencerdaskan bangsa. Dari kemampuan bahasa inilah kita bisa menyampaikan pemikiran yang deskriptif maupun proposisional yang diperlukan dalam lapangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pemikiran yang jelas, terang dan tepat *(clear and accurate thinking)* dengan sendirinya akan dinyatakan dalam bahasa yang singkat, jelas dan tepat pula. Oleh karena itu dalam sistem pendidikan kita perlu sekali siswa diberikan latihan membaca dan menganalisis tulisan para ilmuwan ulung agar kita pun bisa menghasilkan karya serupa.

Namun apa kenyataannya sekarang? Kemampuan berbahasa lulusan SMA masih sangat lemah. Apakah karena pengajaran bahasa Indonesia di sekolah masih tampak terlalu ditekankan pada hafalan tata-bahasa dan istilah linguistik, tanpa melatih keterampilan berbahasa itu sendiri? Keterampilan berbahasa hanya bisa dicapai bila siswa diekspos pada berbagai variasi penggunaan bahasa, seperti prosa, puisi, dan retorika. Hingga kini masih sering kita temui kesalahan paling sederhana, yaitu tidak bisa membedakan penulisan *di* sebagai awalan dan *di* sebagai kata depan penunjuk tempat. Demikian pula sulitnya kaum muda sekarang mengungkapkan perasaannya, sehingga yang keluar hanyalah kalimat seperti *"Perasaan saya gimana gitu"* (kalimat ambigu yang tidak menjelaskan perasaannya) atau bertutur bahwa *"Dia terus bilang gini gini gini"* (tetapi tidak jelas apa yang dikatakan orang yang sedang dibicarakannya).

Ada keprihatinan bahwa ini adalah akibat media massa, terutama televisi, yang tidak mendidik bangsa kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi apakah ini hanya muncul pada kaum muda saja? Dengarlah pidato kaum dewasa, iklan dan pengumuman di jalan raya dan pertokoan. Berapa banyak yang bisa menulis dengan tata bahasa yang baik dan benar dan berapa banyak pula yang betul-betul bisa berbahasa dengan singkat, jelas, dan tepat seperti yang dikatakan Santoso di atas. Kemampuan berbahasa sangat penting menjadi alat bernegosiasi karena dengan bahasalah kita mengungkapkan pikiran dan perasaan serta sudut pandang kita

Itu baru bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Belum lagi bila kita ingin membicarakan kemampuan berbahasa asing. Dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, kita termasuk bangsa yang kemampuan bahasa Inggrisnya sedang (*Education First*, 2013; "*Global language*", 2014), tetapi masih jauh dari sempurna bila diminta melakukan diskusi, apalagi bernegosiasi. Meskipun bisa ada argumen bahwa wajar saja kemampuan bahasa Inggris kita berada di bawah kemampuan bangsa-bangsa tetangga yang pernah dijajah

Inggris dan Amerika Serikat, namun itu tidak selayaknya menjadi alasan bila memang kita ingin maju. Mengapa, misalnya, pada zaman kolonial, lulusan SMA bisa fasih minimal tiga bahasa asing, yaitu bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris, di samping bahasa ibunya? Lagi-lagi orang bisa berargumentasi bahwa hanya kelompok elite yang mengenyam pendidikan di zaman kolonial, tetapi itu juga bukan alasan mengapa kita tak bisa berbahasa yang baik. Eksposur pada bahasa Inggris sudah terlalu banyak ada di sekitar kita, dengan adanya film, lirik lagu pop, internet, televisi asing, dan iklan, namun mengapa masih sedikit orang Indonesia yang tampil di arena internasional?

Ketika penulis masih kuliah, seorang dosen Yapsir Gandhi Wirawan (komunikasi pribadi, Maret 1976) menyatakan bahwa ada dua kebijakan berbahasa yang dianut sebuah negara. Ada negara yang tetap mempertahankan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, sehingga semua pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir melalui bacaan buku asli yang ada. Negara seperti ini biasanya adalah bekas jajahan Britania Raya, seperti India dan Singapura. Kelompok yang kedua adalah negara-negara yang bangga akan bahasa nasionalnya, tetapi tidak mengabaikan pentingnya mengejar kemajuan pengetahuan dan teknologi sehingga semua buku diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasanya. Negara-negara seperti ini adalah Perancis, Jerman, Jepang dan Cina. Indonesia tidak berada di antara keduanya: pengajaran bahasa Inggris lemah sedangkan terjemahan pun tidak ideal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Itu adalah ucapan seorang psikolog hampir empat dekade lalu, dan keadaan Indonesia kini (dalam hal tadi) masih sama saja. Pantas saja pakar bahasa Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana (1986) pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial agar lembaga bahasa dibubarkan saja, karena menurut beliau lembaga bahasa sepatutnya ikut membantu mencerdaskan bangsa dengan melakukan terjemahan besar-besaran buku ilmu pengetahuan, teknologi dan sastra. Penulis pernah menyampaikan bahwa gaya bahasa orang Indonesia masih pada batas penggunaan bahasa campur-aduk Inggris-Indonesia tanpa menguasai kedua-duanya dengan baik dan benar. Akibatnya muncul istilah-istilah rancu seperti *happy wedding*, *breakfasting,* dan *thanks before* serta istilah salah kaprah seperti penggunaan kata prosesi untuk upacara, padahal artinya iring-iringan, dan kata kondusif tanpa diikuti keterangan *kondusif untuk* apa (Yatim, 2014).

Salah satu kekhawatiran yang sedang muncul saat ini adalah diberlakukannya *ASEAN Economic Community.* Sebagaimana diungkapkan Yuniarti (2014), dengan diberlakukannya perjanjian kerja sama antar negara ASEAN tersebut maka dalam waktu dekat sangat mungkin Indonesia akan kebanjiran psikolog negara tetangga yang perlahan akan "merebut" lahan kita. Kekhawatiran ini pernah dibahas dalam milis psiindonesia

hampir 13 tahun lalu (Mahayana, 2001) dengan adanya AFTA 2003, sehingga muncul usulan dalam diskusi agar setiap psikolog asing diminta mengikuti sertifikasi pemahaman budaya Indonesia terlebih dahulu. Usulan menarik, namun tidak akan menjadi praktis apabila bangsa kita sendiri belum dibekali kemampuan berbahasa yang baik, nalar, dan logis, sehingga terampil bernegosiasi dalam berinteraksi dengan siapa pun.

Kontribusi psikologi untuk revolusi mental

Ada beberapa kontribusi yang perlu dan bisa diberikan psikologi untuk bangsa kita. Pertama, mengubah cara pengajaran bahasa Indonesia maupun bahasa asing agar kaum muda menguasai bahasa sebagai alat menyampaikan pikiran dan perasaan dengan cara yang elegan, ilmiah, dan profesional

Kedua, merancang modul pendidikan kemampuan bernegosiasi bagi para pelajar. Barangkali semacam program *Getting to Yes* dari *Harvard Negotiation Project* (Fisher, Ury,& Patton, 1981) yang disusun mengikuti konteks Indonesia dan disesuaikan usia remaja.

Ketiga, universitas mulai menggalakkan penelitian tentang perilaku budaya bangsa kita, termasuk perilaku berkomunikasi dan berbahasa. Pemahaman akan perilaku budaya memang telah muncul di beberapa perguruan tinggi, tetapi masih perlu banyak langkah lagi untuk memahami cara kaum muda Indonesia dapat hidup nyaman sebagai manusia global, atau seperti diistilahkan Panggabean (2014) sebagai *global Indonesians*. Salah satu prasyarat menjadi *global Indonesians* adalah kenyamanan berbahasa, dan tentu bukan sekadar berbahasa sehari-hari saja.

Keempat, temuan studi perilaku tersebut kemudian perlu disebarkan dan "diterjemahkan" menjadi materi ajar bagi siswa, sehingga sejak dini kaum muda sudah memahami cara bernegosiasi dengan mengandalkan kemampuan berbahasa.

Kelima, semua itu tidak akan bermanfaat bila kaum muda sendiri tidak diberikan ruang untuk bernegosiasi, dan wadah tersebut dapat dimulai dari lembaga pendidikan formal.

Daftar Acuan

Alisjahbana, S.T. (1986). *Bahasa Indonesia menyongsong masyarakat dan kebudayaan abad ke-21*. Makalah tidak diterbitkan dalam Temu Budaya, Jakarta, 16-18 Oktober 1986.

Education First. (2013). *EF English Proficiency Index 2013*. London: Education First.

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1981). *Getting to yes: How to negotiate agreement without giving in.* New York: Houghton-Mifflin.

Global language survey links English proficiency to economic and social development. (2014, 29 Januari). *ICEF Monitor.*

Guru tak bisa beli hukum. (1976, 8 Mei). *Tempo.*

Lubis, M. (2010). *Manusia Indonesia*. Ceramah 6 April 1977. Jakarta: Yayasan Obor.

Mahayana, D. (2001). *Menjemput masa depan*. Pesan diunggah pada 19 Februari 2001 di http://psiindonesia.yahoogroup.com.

Panggabean, H.R.G. (2014) *Merawat keselarasan sosial menuju keunggulan global.* Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 30 September 2014.

Punjabi, R. (Produser) & Bramantyo, H. (Sutradara). (2013). *Soekarno*[film]. Jakarta: MVP Pictures.

Saad, H. (2003). *Perkelahian pelajar, potret siswa SMU di DKI Jakarta*. Yogyakarta: Galang Press.

Santoso, S.I. (1979) *Pembinaan watak: Tugas utama pendidikan.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Violent student brawls a part of life in Asia's swelling cities. (2007). *Things Asian*. 26 December 2007.

Yatim, D. I. (2014). *Language style among global Indonesians.* Makalah disampaikan pada 14th International Conference of Language and Social Psychology, Honolulu, 20-23 Juni 2014.

Yuniarti, K. W. (2014). *Indonesia sebagai bangsa yang madani: Mengikis karakter inferior kronis, membuka mindset yang mendunia*. Makalah disampaikan pada Kongres X Himpunan Psikologi Indonesia, Manado, 11-14 September 2014.

12
Ruang untuk Remaja

Helmi Firmansyah

Akhir-akhir ini kita dibuat gelisah dengan beberapa perilaku remaja seperti kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku seksual sebelum menikah, narkoba, bunuh diri hingga tawuran. Kenakalan remaja saat ini tidak hanya didominasi di kota-kota besar, bahkan sudah meluas ke daerah-daerah dengan berbagai macam bentuk dari yang masih kenakalan hingga masuk kategori kriminal. Kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada sesama remaja. Kenakalan remaja sudah menggangu ketertiban umum bahkan baru-baru ini seorang ibu di Pekanbaru Riau meninggal dunia dikarenakan terkena lemparan batu para pelajar yang tawuran (Repubilka.co.id, 2015). Pada periode Januari-Oktober 2013 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak, 2014) mencatat ada 229 kasus tawuran pelajar dan 19 siswa meninggal dunia. Fakta tersebut cukup mengkhawatirkan dikarenakan tindakan mereka bukan lagi kenakalan remaja namun masuk ke dalam kategori kriminal. Meluasnya kenakalan remaja ke berbagai wilayah dan meningkatnya kategori kenakalan menjadi kriminal, sudah sepantasnya bila remaja mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius.

Dibalik permasalahan yang melingkupi remaja, mereka adalah individu-individu yang diharapkan mampu berkontribusi bagi bangsa ini mengingat populasi remaja pada tahun 2014 diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik berjumlah sekitar 64,7 juta (2014). Jumlah tersebut merupakan potensi angkatan kerja yang cukup menjanjikan. Selain potensi tenaga kerja ada peran yang lebih utama bagi remaja yaitu sebagai aset bangsa, masa depan bangsa ini akan kita serahkan kepada mereka dalam beberapa tahun ke depan. Remaja akan menempati posisi-posisi penting baik dalam pemerintahan, perekonomian, dan juga berperan dalam kemajuan peradaban. Oleh karena itu kondisi bangsa kita yang akan datang, keadaan peradaban pada masa tua kita nanti salah satunya ditentukan oleh kita dalam mempersiapkan para remaja saat ini. Menjadi pertanyaan kemudian apakah

lingkungan dan sistem pendidikan sekarang sudah cukup mendukung untuk menjadikan remaja mengeluarkan potensi terbaiknya?

Guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh remaja sebaiknya kita kenali lebih jauh mengenai dinamika perkembangan remaja. WHO memberi batasan usia remaja antara 10-20 tahun. Dalam rentang usia tersebut mereka mengalami perubahan fisiologis dan psikologis yang awam disebut masa pubertas. Salah satu perubahan psikologis yang terjadi pada remaja adalah mulai membangun hubungan dengan orang-orang di luar keluarganya dan salah satu cara untuk membentuk hubungan tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian dengan lingkungan, salah satunya dengan teman sebaya atau *peer group*, baik sesama jenis atau berlainan jenis (Hurlock, 1990). Wajar apabila remaja lebih sering berinteraksi dengan teman sebayanya, hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Csikzentmihalyi & Larson (Putri, 2012) yang menemukan bahwa rata-rata remaja di Amerika menghabiskan waktu sekitar 24 jam dalam seminggu bersama-sama dengan teman sebaya mereka di luar sekolah.

Supaya remaja dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya untuk berinteraksi dengan sebaya dan melakukan kegiatan yang produktif diperlukan ruang-ruang untuk berekspresi dan menyalurkan energinya. Hal tersebut coba difasilitasi dengan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah selepas jam belajar mengajar, namun dalam perkembangannya ekstrakulikuler kurang menarik lagi bagi remaja. Ekstrakulikuler sepertinya belum mampu menjadi ruang yang tepat bagi remaja untuk menyalurkan energinya, hal tersebut dimungkinkan karena ekstrakulikuler yang ada tidak memunculkan ketertarikan dan cenderung monoton, seperti dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta "kami masih mengumpulkan data, banyak anak-anak yang tidak mau aktif di ekskul" (Mulyanto,2011).

Ketika kegiatan ekstrakulikuler di sekolah kurang diminati oleh para remaja, maka tidak mengherankan apabila remaja pada saat ini lebih sering melakukan aktivitas "nongkrong" (hanya duduk-duduk, bersenda gurau tanpa menghasilkan sesuatu, dan cenderung membuang waktu) dengan teman sebayanya baik itu di mini market, *coffe shop*, warung 24 jam, persewaan permainan paly station, *game center* bahkan dipinggir-pinggir jalan ataupun tempat keramaian. Tempat-tempat tersebut saat ini lebih banyak digunakan remaja untuk berkegiatan, dibandingkan gedung olahraga, perpustakaan ataupun tempat-tempat di mana remaja bisa menggunakan waktunya untuk mengembangkan diri.

Di samping itu kebutuhan perkembangan pemikiran remaja yang mulai muncul adalah egosentris. Santrock (1995),mengatakan bahwa perilaku mengundang perhatian

umum terjadi pada masa remaja, mencerminkan egosentrisme dan keinginan untuk tampil di atas pentas, diperhatikan dan terlihat mengundang perhatian. Perhatian atau apresiasi oleh lingkungan diberikan kepada remaja apabila mereka mempunyai kemampuan, kepedulian, ataupun prestasi dalam bidang apa pun. Sedangkan kemampuan, kepedulian ataupun prestasi tidak akan muncul apabila kegiatan yang lebih banyak mereka kerjakan hanyalah "nongkrong". Karena dengan nongkrong tidak akan memberikan dampak postitif pada perilaku remaja yang akan diakui atau diapresiasi oleh orang lain.

Remaja yang hanya mempunyai aktivitas nongkrong, akan mencari cara untuk tetap mendapatkan perhatian atau pengakuan dari lingkungannya. Apa yang akan terjadi apabila remaja yang tidak memiliki kemampuan, kepedulian, ataupun prestasi namun ingin mendapatkan perhatian? Hal yang paling mungkin terjadi adalah perilaku kenakalan remaja bahkan prilaku melanggar hukum ataupun prilaku-prilaku yang kontraproduktif. Dengan melakukan hal-hal yang melawan norma sosial mereka akan merasa dianggap berani, lain dari yang lain, atau diperhatikan oleh lingkungan karena dampak yang muncul dari perbuatannya, meskipun hal tersebut kurang baik.

Menghindari perilaku-perilaku kontraproduktif pada remaja dibutuhkan ekstrakulikuler yang mampu mengikuti perkembangan jaman khususnya perkembangan dunia remaja, sehingga mampu menarik minat remaja untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti oleh remaja tidak semata-mata hanya berlatih dan berlatih, namun dibutuhkan kompetisi yang berjenjang sehingga dapat memacu para remaja untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan diberikan apresiasi bila remaja berprestasi dalam ekstrakulikuler yang ditekuni.

Kompetisi yang terukur mampu menurunkan kenakalan remaja, seperti yang pernah dilakukan oleh Chicago Housing Authority (CHA) yang menawarkan liga bola basket tengah malam (*The Midnight Basketball League*-MBL). CHA menawarkan liga bola basket tengah malam pada anggota-anggota geng anak muda sebagai alternatif kegiatan. Dengan aturan yang ketat dan pendampingan yang diberikan dalam satu tahun terakhir semua peserta yang ikut dalam kompetisi (160 orang) tidak terlibat dalam kejahatan, seperti yang disampaikan oleh Simons FInaly dan Yang (Santrock,1995). Kompetisi berjenjang yang terukur dengan aturan-aturan yang jelas dan pendampingan yang baik akan membuat remaja lebih disiplin dan menjauhi hal-hal yang kontraproduktif. Namun bila remaja tidak ingin menjadi profesional dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dijalani, setidaknya dapat memberikan ruang untuk berkumpul, berinteraksi, dan mengembangkan diri dengan produktif.

Bukan tidak mungkin sistem kompetisi dan pendampingan dalam liga bola basket tersebut diterapkan di Indonesia, tentunya disesuaikan dengan budaya bangsa dan karakter remaja kita saat ini. Berdasarkan pengamatan penulis kegiatan ekstrakulikuler yang didampingi oleh tenaga yang berkompeten telah diterapkan di SMAN 6 Yogyakarta. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Rudy Prakanto (Kompas,2014) yang waktu itu mengajar Biologi, beliau mencoba mengajak kepada siswa untuk berani membuat karya ilmiah melalui penelitian. Di bawah bimbingan bapak Rudy dan tim, kegiatan penelitian siswa-siswi SMA 6 mampu menyabet beberapa penghargaan tingkat nasional hingga internasional. Citra SMAN 6 Yogyakarta yang sebelumnya dikenal sebagai sekolah yang sering terlibat tawuran perlahan mulai hilang, bahkan memproklamirkan diri menjadi sekolah riset.

Satu kegiatan ekstrakulikuler saja apabila di kelola dengan baik terbukti mampu memberikan dampak yang positif bagi remaja. Kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler yang mampu menarik minat remaja dan dikelola dengan baik dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih produktif. Kegiatan ekstrakulikuler tersebut sebaiknya mampu menyalurkan energi baik fisik maupun pikiran, mampu menjadi sarana untuk berkumpul, berinteraksi, dan mempunyai target atau mampu berkompetisi. Target atau sistem kompetisi menjadi penting karena membuat kegiatan tersebut lebih dinamis tidak hanya menjadi rutinitas yang monoton. Di samping itu remaja akan tertantang dengan dirinya sendiri serta menumbuhkan tanggungjawab dan disiplin pada dirinya untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan agar tujuannya tercapai dan mampu berkompetisi.

Kegiatan ekstrakulikuler sebaiknya tidak terbatas di sekolah masing-masing, tapi bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah terdekat. Hal tersebut untuk mensiasati keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dan lebih menghemat biaya. Kegiatan ekstrakulikuler bersama antar sekolah akan mempertemukan sesama pelajar antar sekolah. Pertemuan siswa antar sekolah dengan tensi emosi yang rendah bisa menjadi ajang silaturahmi dan interaksi sehingga mampu mengurangi egosentrisme sekolah yang sering menimbulkan aksi tawuran.

Selain disekolah perlu juga diperbanyak sarana dan prasarana bagi remaja untuk berekspresi, baik berupa taman publik ataupun sarana olahraga yang nyaman dan mampu diakses semua kalangan. Setelah ruang-ruang tersedia diperlukan kegiatan-kegiatan yang bervariasi yang mampu mengundang minat remaja. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan pendampingan, bisa bekerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa dari universitas-universitas, komunitas-komunitas, seni, hobi, ataupun persatuan olahraga. Remaja sebaikanya tidak hanya diberikan fasilitas, namun tetap didampingi oleh pendamping

yang berkompeten. Perlunya pendampingan dari pihak berkompeten agar mendapatkan informasi yang benar sehingga mampu berlatih dengan benar pula.

Ketika remaja sudah nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang diikuti sesekali perlu didatangkan idola mereka dalam kegiatan tersebut. Sebagai contoh apabila ekstrakulikuler basket sudah berjalan dengan baik tidak ada salahnya mengundang atlet basket yang sudah berprestasi. Atlet tersebut diminta untuk memberikan motivasi, memberikan nilai-nilai hidup mengenai kerja keras, disiplin, toleransi dan lain sebagainya. Dengan diberikan motivasi oleh idolanya, diharapkan akan memberikan semangat pada remaja untuk lebih giat berlatih. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh idolanya diyakini akan lebih diperhatikan oleh remaja, Idola atau *"public figure"* diyakini mampu memberikan pengaruh bagi penggemarnya. Munculkan kembali idola-idola yang layak menjadi contoh, agar remaja tidak salah memilih idola.

Selain kegiatan ekstrakulikuler, remaja perlu juga mendapatkan penyuluhan mengenai perkembangan masa remaja, permasalahan yang muncul pada masa remaja, gambaran mengenai masa depan, yang melibatkan idola-idola remaja dan lembaga terkait. Evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan lakukan pemetaan minat bakat, agar mereka melakukan kegiatan berdasarkan apa yang mereka minati dan mengembangkan bakat yang dimiliki. Kegiatan yang diikuti berdasarkan minat dan bakatnya akan membuat potensi remaja berkembang secara maksimal. Pemetaan minat bakat juga berfungsi untuk menghindari remaja yang sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui arah dan tujuan dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Dari beberapa pemaparan diatas, sejalan dengan program pemerintah saat ini yang akan melakukan kebijakan pendidikan dasar 70% ditekankan pada budipekerti dan pembangunan karakter peserta didik.. Penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan Kewarganegaraan (*civil education*).

Karakter mulai dibentuk dengan mengenalkan mereka pada beberapa kegiatan baik itu olahraga, seni ataupun keilmuan melalui ekstrakulikuler, bebaskan mereka memilih sesuai dengan minatnya dan ajak mereka untuk bertanggungjawab dengan pilihannya. Pendampingan oleh orang yang berkompeten akan memastikan bahwa remaja mendapat informasi dan pelatihan dari orang yang tepat. Kompetisi yang dilakukan berguna untuk membentuk disiplin dalam berlatih dan kompetitif dalam bertanding.. Penyuluhan-penyuluhan yang diberikan akan memberikan pengetahuan mengenai dinamika masa remaja agar mereka lebih mengenal dirinya. Dengan melibatkan idola-idola remaja

diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik bagi remaja dalam berbudi pekerti maupun berkarir secara profesional.

Kegiatan-kegiatan terstruktur yang telah dipaparkan di atas diharapkan mampu menjadi resep untuk me-revolusi mental para remaja dari aktivitas “nongkrong” menjadi kegiatan yang produktif. Revolusi mental ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari sekolah, pemerintah, swasta dan masyarakat. Semua lapisan masyarakat mempunyai peran yang menentukan dalam mengantarkan remaja menjadi remaja yang sehat jiwanya dan mampu berkarya dalam perkembangan bangsa ini ke depan.

Daftar Acuan

Badan Pusat Statistik (2014). Tahun 2014, kependudukan indonesia alami *triple burden*. Diunduh dari http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1030 pada 15 Desember 2014.

Hurlock, E.B. (1990). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

Komnas Anak (2014). Cegah tawuran, Menteri Anis: Banyak ekskul jadul. Diunduh dari http://www.tempo.co/read/2014/12/14/173628424/Cegah-Tawuran-Menteri-Anies-Banyak-Ekskul-Jadul/ pada 10 Desember 2014.

Mulyanto. (2011). *Ekstrakurikuler tak ampuh atasi tawuran pelajar*. Diunduh dari http://bola.kompas.com/read/2011/12/03/11102034/Ekstrakurikuler.Tak.Ampuh.Atasi.Tawuran.Pelajar pada 15 Desember 2014.

Prakanto, R (2014, 21 Januari). Guru yang menginspirasi siswa cinta penelitian. *Kompas*.

Putri, P.U (2012). *Hubungan peer group dengan perilaku seksual remaja pada di SMA Negeri 103 Jakarta Timur*. Skripsi (tidak diterbitkan), Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Republika. (2015, 27 Januari). *Ibu rumah tangga tewas jadi korban tawuran pelajar*. Diunduh 30 Januari 2015 dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/27/nit3sl-ibu-rumah-tangga-tewas-jadi-korban-tawuran-pelajar.

Santrock, J.W. (1995). *Life span development: Perkembangan masa hidup*. Jakarta: Erlangga.

13
Peranan Emosi Malu dan Bersalah Terhadap Sikap Remaja tentang Korupsi

Tri Dayakisni & Zakarija Achmat

Pendahuluan

Berdasarkan survey *Transperency Internasional* pada 2011 hingga 2012, indeks korupsi (IPK) Indonesia masih mencapai angka 3 yang berarti bahwa Indonesia menempati peringkat ke 100 dunia dari 183 negara terkorup di dunia. Hal ini berarti kalau dibandingkan dengan IPK Indonesia sepuluh tahun yang lalu, tahun 2002 dan 2003, korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat.

Sementara itu, data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan jumlah kasus korupsi selama 2010-2012 yang sebenarnya menurun, kembali meningkat signifikan pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus yang diselidiki KPK, kejaksaan, dan kepolisian mencapai 448 kasus, Pada tahun 2011 menunjukkan penurunan menjadi 436 dan 2012 hingga 402 kasus. Namun, pada 2013 jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus, dan pada 2014 jumlah kasus korupsi diperkirakan meningkat lagi, mengingat selama semester pertama tahun 2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus (Asyhad, 2014).

Menurut Alatas (1983) suatu tindakan dapat disebut korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan pemberi. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, hal ini juga bisa dipandang sebagai korupsi. Sama halnya seperti nepotisme yang berarti pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan public tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Dengan demikian terdapat tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu, penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Kartono (2014) mengemukakan definisi yang lebih umum, korupsi adalah segala tingkah

laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Nampaknya ada berbagai definisi korupsi tergantung sudut pandang yang digunakan. Meskipun demikian, persamaan yang mendasari perbedaan tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain (Wibowo, 2013).

Korupsi menjadi momok yang menakutkan karena dampaknya yang sangat merugikan bagi negara. Berdasarkan penelitian beberapa ahli, dampak yang merugikan dari korupsi adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan berkurangnya alokasi dari belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan, serta efisiensi alokasi sumber daya (Gathy, Paternostro & Rogolini, 2003). Bahkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adanya korupsi telah melemahkan landasan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga berakibat pada rasio yang lebih rendah dari jumlah total dan investasi swasta pada rata-rata pendapatan nasional. Dengan demikian, secara ekonomi korupsi telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa menjadi rendah, sementara di sisi lain secara psikologis adanya korupsi juga menyebabkan rendahnya rasa saling percaya (*trust*) antar orang dan kurangnya penghargaan pada norma-norma hukum. Padahal adanya trust menjadi salah satu modal sosial untuk membangun kemajuan suatu bangsa.

Menurut penelitian beberapa ahli, perilaku korupsi sendiri dapat bermula dari tindakan-tindakan yang dianggap remeh khususnya perilaku yang mengarah pada *unethical behavior* yang umumnya dilakukan oleh pelajar misalnya menyontek saat mengerjakan tugas sekolah, menjiplak karya orang lain, membohongi guru atau orang tua, menyuap, dan sebagainya. Sementara bukti empiris menunjukkan bahwa seringnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugas sekolah yang merupakan wujud *academic misconduct* adalah problem serius dan berkorelasi dengan sikap yang mengarah pada *unethical behavior* dalam kerja termasuk perilaku korupsi (McCabe, Trevino & Butterfield, 1996; Nonis & Swift, 2001; Sims, 1993). Dengan demikian, perilaku korupsi dapat terintis sejak sebelum individu dewasa dan pada saat sebelum ia menduduki posisi yang memiliki tanggung jawab melayani publik.

Oleh karena itu, pencegahan terhadap tindakan korupsi perlu dilakukan sedini mungkin, apalagi mengingat fenomena yang terjadi sekarang ini. Generasi muda dihadapkan dengan esposure terus-menerus tentang tindakan korupsi yang dilakukan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan mereka. Hal ini mencerminkan budaya permisif di lingkungan masyarakat kita terhadap tindakan korupsi. Kepermisifan yang menyampaikan suatu pesan bahwa berperilaku korupsi adalah suatu norma yang wajar

saja nampak juga terlihat pada pelaku korupsi yang menunjukkan rasa tidak menyesal, ataupun merasa malu dan bersalah atas tindakannya tersebut. Adanya *emotional display* dari role model yang tidak menunjukkan perasaan malu, menyesal dan bersalah memberikan suatu informasi yang penting bagi pengamat untuk membingkai (memaknai) situasi tersebut. Ketika perilaku diasosiasikan dengan perasaan bersalah dan rasa malu yang ditunjukkan orang lain, maka pengamat dapat mempelajari perilaku itu sebagai tidak etis dan merasakannya sebagai sanksi internal sehingga menghambat untuk berperilaku tidak etis di masa yang akan datang. Jika yang ditampilkan adalah emosi yang sebaliknya, maka ada kecenderungan pengamat akan memaknai perilaku itu sebagai normatif. Jika *role model* itu adalah tokoh yang diidentifikasi, maka pengamat akan semakin kuat untuk meniru dan konform dengan norma dari si pelaku korupsi. Hal ini yang mendasari penjelasan terjadinya fenomena *emotional contagion* sebagai salah satu media penyebarluasan perilaku korupsi.

Seharusnya melakukan perilaku tidak etis dapat memicu perasaan negatif seperti emosi malu dan bersalah dan kecemasan (Eisenberg, 2000; Massi, 2005), dan antisipasi mengalami perasaan negatif yang akan mengikuti perilaku tidak etis akan membatasi perilaku yang melanggar etika. Emosi moral juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan tindakan etika (dalam Ruedy, N.E., *et al*., 2013).

Prof Dr. J.E. Sahetapy dalam dialog di radio tentang kepemimpinan nasional "Membangun Budaya Malu" (2014), mensinyalir bahwa maraknya korupsi di segala aras kehidupan di Indonesia berkaitan erat dengan menurunnya rasa bersalah dan rasa malu dalam hati nurani orang-orang yang terlibat korupsi di Indonesia. Fenomena ini juga ditemukan dalam studi yang dilakukan Royanto (2013) terhadap generasi tua (berusia antara 65-75 tahun) dan generasi muda (25-35 tahun) di Jabodetabek, ternyata ada perbedaan emosi malu dan emosi bersalah antara generasi tua dan generasi muda. Pada generasi tua mereka menunjukkan emosi malu dan emosi bersalah yang lebih tinggi dibandingkan generasi muda. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa saat ini tengah terjadi perubahan yang cukup besar dalam generasi muda di Indoensia, di mana mereka belum mengembangkan emosi malu maupun emosi bersalah, sehingga tidak mengherankan bila terjadi banyak masalah perilaku pada generasi muda. Padahal emosi malu dan emosi bersalah merupakan emosi moral yang menghubungkan pengetahuan moral dengan tindakan moral (Tangney, J.P., Stuewig, J., & Mashek, D.J., 2007). Dalam beberapa hal, perasaan bersalah dan malu sebenarnya dapat mencegah perilaku-perilaku kriminal (Wortley, tanpa tahun). Menurut Kroll & Egan (dalam Tangney, *et al.,* 2007), rasa malu dan rasa bersalah sebagai emosi moral memberi motivational force—suatu kekuatan dan energi untuk melakukan tindakan baik dan untuk menghindari tindakan buruk. Emosi ini berperan penting dalam

penilaian moral (*moral judgment*), pengalaman emosi juga mengikuti penilaian moral seperti menyaksikan perilaku immoral menyebabkan emosi negatif dan menyaksikan kebijakan moral menyebakan perasaan positif, pengalaman emosi memperteguh penilaian moral seperti dengan membuat tindakan-tindakan immoral kelihatan lebih tidak bermoral (Huebner, *et al*., 2008; Avramova & Inbar, 2013).

Emosi Malu dan Bersalah

Emosi malu dan bersalah adalah perasaan yang dikaitkan dengan evaluasi secara standard (oleh diri sendiri atau orang lain) karena telah gagal memenuhi standar dan norma yang berkaitan tentang apa yang baik, benar, pantas, dan diinginkan. Oleh karena itu, emosi malu dan emosi bersalah juga sering diacu sebagai emosi moral (Tangney & Stuewig, 2014). Selain itu, diacu sebagai "*self-conscious*" emotions karena mensyaratkan konsep tentang self, atau kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai objek evaluasi (Tracy& Robins, 2004).

Dalam arus utama riset tentang emosi, umumnya para ahli dari Barat membedakan antara emosi malu dan emosi bersalah, meskipun kedua emosi ini terjadi ketika seseorang telah melakukan pelanggaran yang menghasilkan penilaian negatif oleh orang lain, tetapi emosi ini berbeda dalam asalnya pelanggaran (kesalahan) itu. Ketika orang mengatribusikan pelanggaran itu kepada aspek *self* yang global dan stabil ("Aku tidak percaya, aku telah melakukan itu"), mereka mengalami malu, tetapi ketika orang mengatribusikan pelanggaran (kesalahan) itu kepada tindakan atau keadaan sementara ("Aku tidak bisa meyakini saya melakukan itu"), mereka mengalami emosi bersalah. Emosi malu selalu dipandang lebih menghancurkan konsep diri dan harga diri seseorang daripada perasaan bersalah. Apalagi emosi malu biasanya melibatkan penilaian negatif oleh orang lain (baik nyata atau hanya dibayangkan), sedang emosi bersalah melibatkan penilaian negatif oleh diri sendiri. Dengan kata lain, emosi malu memiliki orientasi eksternal (yang berorientasi kepada orang lain)' sedang emosi bersalah memiliki orientasi internal (yang berorientasi kepada diri sendiri). Dengan demikian, emosi malu dikaitkan dengan perasaan takut mengekspos kekurangan diri di depan orang lain. Sedangkan emosi bersalah dikaitkan dengan perasaan takut karena tidak hidup sesuai dengan standar yang dimilikinya. Sehingga emosi malu sering terjadi dalam kehadiran orang lain, lebih sensitif terhadap isyarat kontekstual dan lebih menaruh perhatian kepada reaksi orang lain daripada emosi bersalah.

Kenyataannya pembedaan antara emosi malu dengan emosi bersalah kurang bisa diterapkan dalam masyarakat kolektif atau *interdependent selves*. Misalnya studi Li

et al. (2004) membuktikan bahwa orang Cina memandang rasa bersalah sebagai salah satu komponen dari rasa malu daripada sebagai suatu konstruk yang terpisah. Sebab sebenarnya ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, beberapa istilah dalam bahasa Cina yang berkaitan dengan rasa malu hampir selalu diterjemahkan sebagai rasa bersalah (misal *Kui*), atau kombinasi dari rasa malu dan rasa bersalah (misal *xiusan* dan *xiukui*). Selain itu, dalam beberapa budaya kolektif lainnya, perbedaan atribusi (persepsi tentang kausalitas) antara emosi malu dan emosi bersalah juga tidak menonjol sebagaimana di masyarakat Barat yang individualistik.

Dalam beberapa konteks kultur non-Barat emosi malu tidak hanya dihargai, tetapi juga dipandang sebagai suatu respons emosi yang pantas terhadap kegagalan. Nilai positif yang diberikan pada emosi malu dalam kontek kultur non Barat nampaknya konsisten dengan tujuan saling ketergantungan dari penipisan diri (*self-effacement*), penyesuaian terhadap standar dan norma kelompok, dan perbaikan diri. Hasil studi Kitayama, Markus, Matsumoto dan Norasakunkit (1997) menunjukkan bahwa orang Jepang memandang kejadian kegagalan yang memunculkan kritik diri (*self-criticism*) lebih berhubungan dengan harga diri mereka daripada orang Amerika. Hal ini berarti menilai diri sendiri secara negatif, suatu komponen inti dari emosi malu, tidak dipandang secara universal sebagai menyakitkan secara psikologis. Pandangan negatif tentang diri sendiri mungkin memiliki informasi dan motivasi yang bermakna dalam kontek masyarakat kolektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang tua pada budaya Cina lebih suka menggunakan teknik mempermalukan (*shaming techniques*) dalam strategi pendidikan mereka daripada orang tua Amerika (Fung, 1999; Fung & Chen, 2001; Fung, Lieber & Leung, 2003). Orang tua Cina siap membahas dan mengungkapkan kesalahan anak mereka di depan orang asing untuk menimbulkan emosi malu dan untuk mensosialisasikan anak untuk berperilaku yang pantas. Sehingga, anak-anak Cina belajar kata emosi malu sejak usia dini daripada anak-anak Amerika ataupun Inggris.

Dengan demikian, emosi malu yang memiliki dampak negatif pada budaya Barat, dan pandangan orang Barat bahwa emosi malu sebagai emosi moral buruk sedang emosi bersalah adalah emosi moral yang baik, tidak terbukti secara universal. Studi lintas budaya menunjukkan dampak secara fisik, psikologis dan sosial yang beragam pada berbagai budaya. Emosi malu lebih baik dan memiliki akibat yang lebih adaptif pada masyarakat kolektif, yakni sebagai signal untuk lebih hati-hati dalam membina hubungan dengan orang lain (dalam Ying Wong & Jeanne Tsai, tanpa tahun).

Temuan dari Lapangan

Bertolak dari pendapat Alatas, yang dimaksud sikap terhadap korupsi adalah keyakinan, perasaan maupun kecenderungan terhadap tindakan korupsi yang meliputi penyuapan, pemerasan dan nepotisme. Dengan menggunakan skala GASP (*guilt and shame proneness scale*) dari Cohen dan Wolf (2011) yang diadaptasi penulis (α = 0,820) dan skala sikap terhadap korupsi yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori sikap triadik mengikuti pendapat Alatas (α = 0,789), dan dengan partisipan terdiri atas pelajar Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Madiun sebanyak 197 siswa, diperoleh hasil-hasil pengamatan sebagai berikut.

Pertama, ada korelasi negatif yang signikan (r = -0,158) antara emosi malu dan bersalah secara bersama-sama dengan sikap terhadap korupsi. Artinya, semakin tinggi emosi malu dan bersalah yang dialami secara bersama-sama oleh para responden, maka semakin negatif sikap mereka terhadap korupsi. Kontribusi variabel emosi malu dan bersalah secara bersama-sama dalam membentuk sikap negatif terhadap korupsi adalah 2,49%.

Kedua, jika hubungan antara emosi malu dan bersalah dengan sikap terhadap korupsi dianalisis secara terpisah, maka hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara emosi malu dengan sikap terhadap korupsi (r = -0,148) dan ada korelasi negatif yang signifikan antara emosi bersalah dengan sikap terhadap korupsi (r=-0,288). Kontribusi variabel emosi malu dalam membentuk sikap negatif terhadap korupsi adalah 2,19%, sedangkan kontribusi variabel emosi bersalah dalam membentuk sikap negative terhadap korupsi adalah 8,29%.

Ketiga, remaja yang memiliki sikap positif terhadap korupsi (kategori tinggi) sebanyak 99 (50,3%) remaja, sedangkan yang memiliki sikap negatif terhadap korupsi (kategori rendah) sebanyak 98 (49,7%) remaja. Sementara terkait emosi malu dan bersalah, sebanyak 115 (58,4%) remaja memiliki kategori tinggi dan sebanyak 82 (41,6%) remaja memiliki kategori rendah.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa hanya dengan melakukan antisipasi atau memprediksi adanya perasaan negatif (perasaan malu dan bersalah) yang mengiringi perilaku yang melanggar etika akan mencegah individu melakukan perilaku tersebut (Baumester, Vohs, De Wall, & Zhang, 2007). Temuan ini juga sesuai dengan hasil review Day (2014) terhadap beberapa studi yang membuktikan bahwa ada korelasi negatif antara emosi bersalah dengan perilaku tidak etis. Individu yang memiliki emosi bersalah yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk berperilaku tidak etis daripada individu yang lebih rendah emosi bersalahnya. Temuan ini didukung

oleh hasil studi laboratorium tentang pemberian insentif untuk berbohong kepada orang lain yang menunjukkan bahwa 45% dari individu yang emosi bersalahnya rendah berbohong kepada orang lain, sedangkan hanya 20% dari individu dengan emosi bersalah tinggi yang berbohong. Dalam setting dunia kerja, individu yang lebih tinggi emosi bersalahnya juga lebih sedikit melakukan tindakan yang *counterproductive* ataupun melakukan tindakan yang menyakiti orang lain. Skor emosi bersalah tinggi juga berkorelasi dengan rendahnya perilaku kenakalan pada remaja. Dengan demikian emosi bersalah memiliki peranan dalam meregulasi perilaku moral. Individu yang memiliki emosi bersalah akan lebih mungkin mengalami empati, sehingga mudah merasa iba, dan akhirnya memiliki perhatian atau mempertimbangkan efek tindakannya terhadap orang lain.

Braithwaite (dalam Gadd & Jefferson, 2013) juga menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat kriminalitas yang rendah adalah masyarakat yang kuat rasa malunya dan bijaksana. Individu-individu yang mengambil jalan kejahatan adalah mereka yang terisolasi dari rasa malu atas perbuatan keliru. Braithwaite membandingkan masyarakat Jepang dan masyarakat Barat. Tingkat kiminalitas pada masyarakat Jepang lebih rendah daripada masyarakat Barat, karena di Jepang rasa malu atas pelanggaran hukum lazim ditanggung oleh seluruh masyarakat dan bukan hanya oleh pelaku. Menurut Meilala (2012), terkait penghukuman dan rasa malu sebagai alat kontrol sosial diduga terdapat kasus-kasus dan subjek-subjek tertentu di mana membuat orang atau kelompok orang merasa malu lebih efektif mencegah kriminalitas daripada menghukum mereka.

Rasa malu merupakan bentuk kontrol sosial yang dipilih secara bebas dan bukan merupakan bentuk kontrol sosial represif yang tergantung pada kepatuhan yang dipaksakan. Individu seharusnya lebih rentan terhadap malu ketika mereka terlibat dalam hubungan interdependensi. Rasa malu lebih efektif ketika individu dalam masyarakat komunitarian. Rasa malu meningkat dalam masyarakat modern, tetapi pada saat yang sama kesadaran atas rasa malu menurun. Hal ini membuat mempelajari rasa malu sebagai tugas yang sangat sulit, terutama ketika banyak rasa malu menghilang tanpa diakui (Gadd & Jefferson, 2013).

Temuan ini juga membuktikan bahwa kontribusi variabel emosi malu maupun bersalah terhadap sikap yang tertuju kepada korupsi adalah kecil. Hasil meta analisis Kish-Gephart, Harrison dan Trevin (2010) menemukan bahwa kontribusi afek moral memang kecil, walaupun berkorelasi negatif secara signifikan dengan *ethical behavior decision-making* dalam arti pengambilan keputusan untuk berperilaku tidak etis (dalam Burke, R.J., dkk., 2011). Penjelasan yang lebih masuk akal mengapa emosi malu dan bersalah kontribusinya kecil, adalah adanya kemungkinan bahwa pelaku justru lebih merasakan adanya emosi positif, karena membayangkan munculnya perasaan bahagia, misalnya memiliki harta yang

banyak atau keuntungan yang lebih banyak daripada kerugian yang ditanggungnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa melakukan perilaku tidak etis (*unethical behavior*) justru menimbulkan perasaan positif jika pelaku membayangkan adanya ganjaran, munculnya perasaan otonomi diri, perasaan bangga karena telah berani melanggar etika (Ruedy, E.R. *et al*., 2013).

Setelah dilakukan analisis secara terpisah, ternyata kontribusi emosi bersalah lebih besar daripada emosi malu terhadap sikap remaja kepada korupsi. Emosi bersalah dibandingkan emosi malu lebih muncul ketika individu melakukan tindakan kesalahan yang sifatnya pribadi daripada publik, meskipun memang individu dapat juga mengalami emosi bersalah untuk perbuatan buruk di depan publik dan mengalami emosi malu untuk perbuatan buruk secara pribadi. Emosi malu akan menghambat perilaku tidak etis selama ada pengawasan dari publik atau orang lain, sedangkan emosi bersalah akan menghambat perilaku meskipun tanpa pengawasan atau kehadiran orang lain.

Dengan demikian, nampaknya secara kultural di Indonesia peranan emosi bersalah lebih menonjol daripada emosi malu dalam menghambat tindakan korupsi. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Meliala (2012), bahwa masyarakat Indonesia lebih mirip budaya Barat ketimbang budaya Jepang. Bila budaya Barat cenderung *self-oriented*, maka budaya Jepang amat melihat orang lain sebagai acuan perilakunya. Hukuman di Jepang muncul dalam bentuk *shaming* itu sendiri karena telah berbuat sesuatu yang bakal memalukan rekan, sekolah, guru atau orang tua. Di Barat emosi malu dianggap lebih negatif daripada emosi bersalah, sebab emosi malu cenderung diikuti dengan perilaku menarik diri seperti menghindari orang lain, Sedangkan emosi bersalah lebih berkaitan dengan perilaku memperbaiki diri, seperti mengambil tanggung jawab pribadi, meminta maaf, dan usaha-usaha lainnya.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa sikap remaja yang positif terhadap korupsi hampir seimbang jumlahnya dengan yang memiliki sikap negatif. Temuan ini hampir sama dengan temuan penelitian sebelumnya (Yudhistira & Tri Dayakisni, 2013). Dengan menggunakan partisipan sebanyak 232 siswa SMA Negeri 7 Malang, terbukti remaja yang memiliki sikap positif terhadap korupsi sebesar 51,29% sedangkan yang mempunyai sikap negatif terhadap korupsi sebesar 48,71%. Hal ini berarti, meskipun sebagian remaja menolak dan bahkan menganggap korupsi sebagai suatu kejahatan, namun ternyata sebagian yang lain masih menganggap korupsi sebagai perilaku yang wajar bahkan ada kecenderungan/keinginan pada mereka untuk melakukannya. Tentunya keadaan ini memprihatinkan dan menyisakan persoalan bagi bangsa kita, sebab kendati tidak mewakili gambaran seluruh

remaja di Indonesia temuan ini mencerminkan masih banyak remaja yang bersikap positif atau mendukung tindakan korupsi.

Dengan demikian, penanaman nilai-nilai kemajuan suatu bangsa semestinya tidak hanya berorientasi pada kesuksesan maupun kerja keras, tapi juga penanaman rasa malu. Karena bisa jadi seorang koruptor menjunjung tinggi nilai kerja keras, namun tidak menjunjung tinggi rasa malu, amanah dan empati (Pranadji, 2004). Maka perlu ditanamkan rasa malu dan terutama rasa bersalah kepada generasi muda, sehingga emosi moral tersebut dapat menghambat individu untuk bertindak tidak etis yang akan merugikan orang lain. Penanaman emosi malu dan bersalah dapat disisipkan dalam pendidikan karakter baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di sekolah maupun masyarakat, baik melalui pesan-pesan pendidikan secara eksplisit maupun modeling (pentauladanan). Dengan begitu pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan nilai-nilai tentang amanah, dapat dipercaya, sikap hormat, sikap bertanggung jawab, berlaku adil dan jujur baik kepada diri sendiri maupun orang lain, kepedulian, kejujuran, keberanian, kerja keras, integritas, dan kesadaran kewarganegaraan, namun juga perasaan malu dan bersalah. Dalam hal ini orang tua sebagai agen sosalisasi primer sangat besar peranannya mengingat kenyataan yang ditemukan dalam penelitian Yudhistira dan Tri Dayakisni (2013) bahwa sebagian remaja mempersepsikan orang tua mereka kurang memberikan pendidikan karakter (44.82% dari 232 siswa). Padahal dalam penelitian tersebut pendidikan karakter orang tua terbukti berkorelasi negatif dengan sikap remaja terhadap korupsi. Pembentukan karakter positif dapat dikembangkan melalui pembiasaan nilai-nilai, baik nilai sosial maupun agama yang diinternalisasikan melalui interaksi sosial. Karakter yang telah terbentuk diharapkan di masa mendatang dapat mengakar kuat dan menjadi prinsip hidup dalam kehidupan selanjutnya.

Daftar Acuan

Alatas, S.H. (1981). *Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer.* Jakarta: LP3ES.

Asyhad, M.H. (2014). *Kasus korupsi di Indonesia meningkat di 2013-2014*. Diunduh 3 Oktober 2014 dari http://intisarionline.com/read/kasus-korupsi-di-Indonesia-meningkat-di-2013-2014.

Avramova, Y.R. &Inbar, Y. (2013, March/April). Emotions and moral judgment. *Advanced Review, 4*.

Burke, R..J., Tomlinson, & Cooper, C.L. (2011). *Crime and corruption in organization: Why it occurs and what to do about it*. Diunduh 10 November 2014 dari http://www.gowerpublishing.com/isbn/9780566089817.

Cohen, T.R., Wolf, S.T., Panter, A.T., & Insko, C.A. (2011). *Guilt and shame proneness scale.*

Day, M.V. (2014). Guilt. In T.R. Levine (Ed). *Encyclopedia of deception* (pp.427-429). Thousand Oaks, C.A: Sage. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483306902.n164

Gadd, D., & Jefferson, T. (2013). *Kriminologi psikososial: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gatti, R., Patternostro, S., & Rigolini, J. (2003, August). Individual attitude toward corruption. Do social effect matters? *World Bank Policy Research Working Paper 3122*.

Holmes, L. (1999). *Corruption, weak states and economic rationalism: Central and Eastern Europe.* Paper presented at the Princenton University, Central European University Joint Conference on Corruption, Budapest, 29 October- 6 November 1999.

Huebner, B., Dwyer, S., & Hauser, M. (2008). *The role of emotions in moral psychology.* Elsevier.

Kartono, K. (2014). *Patologi sosial*. Jakarta: Rajawali.

Meliala, A. (2012). Antara menghukum atau mempermalukan: Upaya memodifikasi perilaku. *Makara, Sosial-Humaniora, 8*(3), 90-96.

Nonis, S., & Swift, C.O. (2001). An examinations of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. *Journal of Education for Business, 77*(2), 69-77.

Nussbaum, M.C. (2004). *Hiding from humanity: Disgust, shame and the law*. New Jersey: Princeton University Press.

Pattison, S. (2003). *Shame: Theory, therapy, theology*. New York: Cambridge University Press.

Pranadji, T. (2004). Perspektif pengembangan nilai-nilai sosial-budaya bangsa. *AKP, 2*(4), 324-339.

Royanto, L.R. (2014). Emosi malu dan emosi bersalah: Masih adakah pada masyarakat Indonesia? Dalam A. Supratiknya, Faturochman, & H. Panggabean (Eds.), *Integritas, keberbedaan & kesejahteraan psikologis: Kontribusi psikologi dalam menjawab tantangan bangsa masa kini*. Jakarta: HIMPSI.

Ruedy, N. E., Moore, C., Gino, F., & Schweitzer, M.E. (2013). The cheater's high: The unexpected affective benefits of unethical behavior. *Journal of Personality and Social Psychology. 105*(4), 531-548.

Sahetapy. (2014). *Transkrip dialog radio tentang kepemimpinan nasional "Membangun Budaya Malu"*. KBR 68H Jakarta.

Sims, R.L. (2003). The relationship between academic dishonesty and ethical business practices. *Journal of Education for Business, 68*(4), 207-212.

Tangney, J.P., Stuewig, J., & Mashek, D.J. (2007). Moral emotion and moral behavior. *Annual Review of Psychology, 58*, 345-372.

Wong, Y., & Tsai, J. (2005). *Cultural models of shame and guilt*. Diunduh 11 Oktober 2005 dari http://Psych.Stanford.edu/-tsailab/PDF/yw07sce.pdf

Wortley, R. (tanpa tahun). *Guilt, shame and situational crime prevention*. School of justice Administration. Griffith University, Brisbane 4111. Australia.

Yudhistira, R., & Dayakisni, T. (2013). *Pentingnya pendidikan karakter untuk mencegah perilaku korupsi*. Naskah tidak dipublikasikan. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.

14
Pembelajaran Kognitif Sosial dan Konsep Taman Siswa Sebagai Sarana untuk Mengurangi Budaya Kekerasan di Sekolah

Friandry Windisany Thoomaszen

Pengantar

Indonesia merupakan suatu Negara dengan banyak daerah, pulau, suku, dan budaya. Dengan keberagaman ini, ditemukan beragam masalah dan diperlukan bentuk penanganan yang berbeda pula, karena itu diperlukan revolusi mental yang bervariasi pada berbagai budaya. Pada tulisan ini, penulis mengangkat masalah kekerasan yang dianggap sebagai kebiasaan dan budaya dari masyarakat di NTT. Perilaku orang dewasa yang memarahi, mencubit, memukul, dan mengatakan bodoh adalah pemandangan yang biasa bagi masyarakat NTT. Bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk anak belajar dan mengembangkan diri berubah menjadi tempat yang tidak aman dan ramah.

Guru yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi murid, sebaliknya memberikan contoh yang kurang baik karena mengajar dengan metode kekerasan pada murid. Guru memiliki pandangan bahwa "di ujung rotan ada emas", yang artinya untuk menghadapi anak-anak NTT yang sudah terbiasa dididik dengan keras maka kekerasan adalah metode yang paling tepat untuk merubah perilaku nakal (menyimpang) murid menjadi lebih rajin dan pintar.

Budaya dapat memengaruhi prinsip dan pola pikir masyarakat dalam mendidik serta membesarkan anak. Budaya adalah perilaku dan keyakinan masyarakat luas serta cara seseorang untuk menjaga tingkah lakunya (WHO, 2002). Kekerasan pada anak terjadi di beberapa budaya karena nilai-nilai tradisional mendukung konsep hukuman fisik, pengejekan, dan penghinaan (dalam Salkind, 2008).

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau tenaga fisik secara sengaja, mengancam, melawan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan luka-luka,

kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau pelanggaran hak. Kekerasan merupakan bentuk perlakuan buruk baik secara fisik, emosional, dan/atau seksual, penelantaran atau perlakuan lalai atau eksploitasi terhadap anak (WHO, 2014). Untuk memutus rantai kekerasan ini diperlukan revolusi mental dengan cara mengubah pola pikir guru dan menjadi guru teladan (*role model*) sehingga mampu mengubah budaya NTT yang mendukung kekerasan serta menghasilkan murid yang berkualitas dan berkarakter.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kasus kekerasan pada anak terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Polda NTT tercatat bahwa pada tahun 2007–2011 terdapat 1. 724 kasus kekerasan pada anak. Pada tahun 2007 terdapat 132 kasus kekerasan, lalu tahun 2008 sebanyak 195 kasus, tahun 2009 sebanyak 358 kasus, tahun 2010 sebanyak 301 kasus dan tahun 2011 semakin meningkat dengan jumlah kasus 738 kasus (Tampubolon, Adi, Hayati, Hasyim, 2011).

Penelitian Bunga dan Ekowarni (2010) menemukan bahwa anak di kota Kupang sangat terbiasa dengan pola pengasuhan yang otoriter, misalnya semua diatur dan ditentukan orang dewasa (Orang tua dan guru), anak tidak punya hak untuk bertanya, kekerasan menjadi pilihan terakhir ketika menyelesaikan konflik, anak harus menuruti semua kemauan orang dewasa tanpa boleh membantah. Setiap hari anak diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, akhirnya anak telah terbiasa dan tidak menganggap itu sebagai masalah.

Ada empat tipe utama kekerasan pada murid yaitu kekerasan fisik, psikis (emosional), seksual, dan penelantaran (Doherty & Berglund, 2008). Untuk di lingkungan sekolah, guru sering menggunakan jenis kekerasan hukuman badan (*corporal punishment*). Hukuman badan adalah penggunaan tekanan/paksaan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman yang dipercayai sebagai tindakan disiplin dalam mengontrol atau mendidik seorang anak (dalam Salkind, 2008). Selanjutnya, penulis akan fokus membahas kekerasan fisik, psikis, dan hukuman badan karena jenis tersebut sangat sering dilakukan oleh guru-guru di NTT.

Penulis melakukan *focus group discussion* (FGD) pada murid yang berasal dari berbagai suku di NTT seperti Sabu, Timor, Sumba, Kupang, Belu, dan Alor. Semua murid memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan guru. Guru sering memberikan hukuman fisik dan psikis seperti memukul, menampar, menghina, memberikan julukan/nama yang negatif, dan memaki (berkata tidak sopan). Guru juga memanfaatkan tenaga murid ketika memberikan nilai/hasil belajar. Contohnya, guru meminta murid untuk membantu membersihkan rumah, kandang, dan sawah/kebun. Jika murid melakukan

perintah guru maka ia akan memperoleh nilai yang baik dan naik kelas. Dengan berbagai situasi yang kurang menyenangkan tersebut, beberapa murid lebih memilih untuk tidak masuk ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tidak dipahami dengan baik.

Selain itu, cara mengajar guru dianggap kurang menarik karena guru menjelaskan materi dengan cara membaca buku, mencatat, kurang memberikan kesempatan untuk murid menyampaikan pendapat atau bertanya, dan hanya memberikan banyak tugas tanpa ada penjelasan materi. Masalah tersebut sangat bertolak belakang dengan pendapat John Dewey yang menganggap anak adalah pelajar yang aktif, bukan pelajar pasif yang hanya duduk, diam, dengar, dan hafal. Anak perlu belajar cara untuk berpikir dan beradaptasi dengan dunia di luar sekolah. Anak mampu merenungkan solusi terhadap masalah yang terjadi. informasi/pengetahuan tidak secara langsung dituangkan (diisi) dalam pikiran anak, melainkan anak didukung untuk menjelajahi/menyelidiki dunianya, mencari dan menemukan pengetahuan, merefleksi, dan berpikir kritis (dalam Santrock, 2009).

Hasil wawancara dengan pihak kepala sekolah dan guru di salah satu SMP Kota Kupang didapatkan data bahwa guru berpikir bahwa dengan melakukan kekerasan seperti mencubit, menjewer telinga, dan berlutut adalah hal yang biasa dan cara yang tepat agar anak taat dan disiplin. Alasan guru berpikir demikian karena ia melihat Orang tua murid berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah serta memiliki karakter yang keras sehingga guru tidak mungkin untuk bersikap lembut pada anak. Hasil pengamatan penulis ketika berkunjung ke beberapa sekolah di Kota Kupang yaitu ada beberapa guru yang memegang kayu atau penggaris berukuran kecil yang digunakan untuk mendisiplinkan murid. Jika ada murid yang melanggar aturan atau tidak mematuhi perintah guru maka murid akan dipukul menggunakan kayu atau penggaris tersebut.

Dari berbagai jenis kekerasan yang dialami murid dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu (Salkind, 2008; WHO, 2002; Moffatt, 2003):

1. Anak menderita secara fisik (luka, sakit, perasaan tidak nyaman)
2. Anak menjadi takut untuk mencoba hal baru
3. Mengajari anak untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah
4. Kehilangan kepercayaan diri
5. Mengganggu daya konsentrasi anak
6. Kurang motivasi untuk belajar, mengerjakan tugas, masuk kelas, dan ke sekolah karena merasa tidak bahagia

7. Meningkatkan agresitivitas dan melakukan kekerasan pada temannya
8. Menurunkan kualitas generasi berikutnya
9. Menganggu fungsi motorik, bahasa, dan bicara
10. Mengalami kesulitan belajar
11. Menarik diri dari lingkungan teman sebaya

Hasil wawancara dari 35 mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kupang didapatkan data bahwa mereka sudah terbiasa mendapatkan kekerasan fisik dan psikis oleh guru sejak SD hingga SMA bahkan Perguruan Tinggi. Karena pengalaman tersebut, mahasiswa memiliki pandangan yang sama dengan gurunya yaitu "di ujung rotan ada emas". Mereka memiliki pandangan bahwa kekerasan yang mereka alami pada masa lalu yang membuat mereka menjadi orang yang berhasil saat ini. Karena itu, mahasiswa beranggapan bahwa kekerasan dapat membantu perilaku anak yang nakal, tidak disiplin, dan bodoh. Berarti dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran utama dalam membentuk pola pikir dan perilaku murid. Guru berhasil mentransfer pola berpikirnya tentang kekerasan dan menjadi model perilaku kekerasan terhadap murid untuk juga melakukan kekerasan. Salah satu faktor kekerasan terus menerus menjadi budaya di sekolah karena pola pikir dari guru sebagai model dalam proses pembelajaran. Jadi, guru perlu diberikan pemahaman tentang filosofi pendidikan dan cara mendisiplinkan anak dengan cara yang positif.

Hakikat Pendidikan dan Konsep Taman Siswa Berdasarkan Pandangan Ki Hajar Dewantara

Guru perlu melakukan revolusi mental dengan cara memahami makna pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Sudarto, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, murid yang mengalami kekerasan di sekolah belum merasakan arti pendidikan yang mampu memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai pelaku kekerasan di sekolah juga belum menjalankan arti dan tujuan pendidikan. Ki Hajar memandang pengajar sebagai mitra para murid untuk menemukan pengetahuan. Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan melainkan kegiatan yang memungkinkan murid membangun sendiri pengetahuannya. Baginya perlu dihindari pendidikan yang

hanya menghasilkan orang yang sekadar menurut dan melakukan perintah (pelajar pasif). Karena itu, penting bagi seorang murid untuk menyadari alasan dan tujuan ia belajar (Raharjo, 2010).

Ki Hajar yang memakai semboyan "Tutwuri Handayani", menempatkan pengajar sebagai orang yang berada di belakang, membimbing dan mendorong murid untuk belajar, memberi teladan, serta membantu murid membiasakan dirinya untuk menampilkan perilaku yang bermakna dan berguna bagi masyarakatnya (Raharjo, 2010). Ki Hajar menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan membantu murid menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakatnya. Menjadi manusia merdeka berarti (a) tidak hidup terperintah; (b) berdiri tegak karena kekuatan sendiri; dan (c) cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Singkatnya, pendidikan menjadikan orang mudah diatur tetapi tidak bisa disetir (dalam Trianita, Leo, & Sinaga, 2012).

Maka Ki Hajar (dalam Taucid, 2004) memiliki gagasan pendidikan yang dinamakan Taman Siswa, yang berasaskan pada:

1. Mengatur Diri Sendiri
2. Kemerdekaan Batin, Pikiran, dan Tenaga bagi anak-anak
3. Kebudayaan Sendiri
4. Pendidikan yang Merakyat
5. Percaya pada kekuatan Sendiri
6. Membelanjai Diri Sendiri
7. Keikhlasan dari Para pendidik dan Pengajar Dalam Mendidik Anak-Anak

Pada dasarnya, asas pertama dan kedua tersebut mengandung arti bahwa adanya kemerdekaan pada diri manusia untuk mengolah cipta, rasa dan karsa yang dimiliki untuk kemajuan sejati yang diperoleh melalui pengembangan kodrati. Sedangkan asas ke tiga sampai ke lima menegaskan bahwa kita sebagai bangsa harus percaya dengan kemampuan dan pengetahuan sendiri tetapi tanpa mengabaikan pengetahuan dari bangsa lain. Sedangkan asas ke enam menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus berusaha tanpa menyusahkan orang lain dan asas yang ke tujuh mengandung arti harus adanya keikhlasan atau kerelaan dari setiap pendidik dalam memberikan atau mendampingi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan pengetahuan yang dimiliki (Taucid, 2004).

Dalam proses pembelajaran, penulis menerapkan konsep ini pada murid yang pernah mengalami kekerasan di sekolah dengan cara memberikan murid kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan belajar dari kesalahan. Sebelum diterapkan konsep Ki Hajar, perilaku belajar murid cenderung pelajar pasif yang duduk, dengar, takut menyampaikan pendapat, dan hanya mencatat. Penulis memberikan pemahaman kepada murid tentang arti dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar, lalu konsep tersebut mulai diterapkan di kelas. Hasilnya murid menunjukkan perubahan perilaku belajar menjadi lebih banyak murid yang berani berbicara, bertanya, dan menjawab. Murid mengatakan bahwa mereka merasa lebih dihargai dengan metode ini sehingga semakin termotivasi untuk belajar, aktif, dan rajin masuk kelas.

Penerapan Pembelajaran Kognitif Sosial di Sekolah

Albert Bandura sebagai tokoh yang mengembangkan pendekatan ini mengatakan dengan belajar, secara kognitif murid dapat mengubah pengalamannya. Pembelajaran kognitif sosial mengidentifikasi pembelajaran sebagai faktor utama teori perkembangan kepribadian dan fungsi manusia yang didasarkan pada kognitif, interaksi sosial, efikasi, *modeling* (pembelajaran observasional), dan pengaturan diri (*self-regulatory*) (dalam Santrock, 2009).

Ada tiga faktor yang saling berinteraksi timbal balik dalam pembelajaran yaitu perilaku, lingkungan, dan kognitif (dalam Santrock, 2009). Faktor kognitif mempunyai peran penting dalam perubahan perilaku dan lingkungan. Inilah manfaatnya melakukan revolusi mental yang mana untuk mengubah suatu lingkungan bahkan bangsa sekalipun harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakatnya.

Efikasi diri yang merupakan bagian dari faktor kognitif memiliki makna sebagai keyakinan diri bahwa individu mampu menguasai situasi dan menciptakan hasil yang positif. Efikasi diri mempunyai pengaruh yang kuat pada perilaku (dalam Salkind, 2008). Karena itu, guru dan murid perlu memiliki efikasi diri yang tinggi sehingga dapat mengalami perubahan perilaku yang positif seperti tidak menerapkan kekerasan di sekolah.

Pembelajaran observasional (*observational learning*) adalah pembelajaran yang meliputi perolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan cara mengamati orang lain sebagai model (imitasi). Dua variabel penting dalam pembelajaran observasional adalah tujuan dan harapan. Seseorang yang menentukan tujuan yang spesifik akan lebih baik memperlengkapi diri untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti meningkatkan motivasi, efikasi diri, dan belajar (dalam Salkind, 2008).

Bandura (dalam Santrock, 2009) menyusun tahap-tahap penerapan pembelajaran observasional yaitu:

1. Perhatian. Individu memperhatikan tindakan model kemudian menirukannya, mengikuti yang dilakukan dan dikatakan. Dalam banyak kasus, guru adalah model berstatus tinggi bagi murid, yang berarti murid akan lebih menaruh banyak perhatian pada guru daripada pegawai atau staff.

2. Memori. Untuk menirukan tindakan seorang model, individu harus mengodekan informasi dan menyimpannya dalam memori. Memori murid akan meningkat ketika guru memberikan demonstrasi yang hidup, logis, dan jelas.

3. Produksi. Individu mampu untuk mengamati dan menyimpan dalam memori namun mengalami kendala ketika menerapkannya karena terbatas pada kemampuan motorik. Oleh karena itu, Pengajaran, bimbingan, dan latihan dapat membantu murid meningkatkan pelaksanaan motoriknya.

4. Motivasi. Biasanya individu mampu untuk mengamati, mengingat, dan menerapkan dengan kemampuan motorik yang baik namun ia tidak termotivasi untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Karena itu diperlukan penguatan untuk membantu seperti berikan penghargaan kepada model, berikan penghargaan kepada murid, instruksikan murid untuk membuat pernyataan yang memperkuat diri seperti "bagus, saya dapat melakukannya"; "baik saya telah melakukannya dengan baik untuk mengerjakan sebagian besar hal ini dengan benar, jika saya terus mencoba pasti saya bisa selesaikan dengan baik", perlihatkan bahwa perilaku tersebut membawa hasil yang kuat pada murid.

Manfaat utama pembelajaran observasional (dalam Sankind, 2008) yaitu:

1. Mengurangi perilaku agresif termasuk kekerasan di sekolah

2. Mendukung perilaku prososial seperti altruism (mengutamakan kepentingan orang lain), menghibur orang lain, empati, murah hati, dan saling berbagi

3. Meniru perilaku dan sikap moral yang positif.

Pembelajaran dengan pengaturan diri terdiri atas pembangkitan diri dan pemantauan diri atas pikiran, perasaan, dan perilaku dengan tujuan untuk mencapai suatu sasaran. Sasaran dapat berupa sasaran akademik (meningkatkan pemahaman saat membaca, mengajukan pertanyaan yang relevan) dan sasaran sosioemosional (mengendalikan kemarahan, menjalin

hubungan yang ramah dan positif) (dalam Santrock, 2009). Karakteristik individu (guru dan murid) yang menerapkan teknik pengaturan diri (Winne, 2005) yaitu:

1. Menetapkan target sasaran untuk memperluas pengetahuan dan mempertahankan motivasi
2. Sadar akan keadaan emosi dan mempunyai strategi untuk mengelola emosi
3. Secara berkala, memantau kemajuan ke arah target sasaran
4. Menyempurnakan atau merevisi strategi berdasarkan kemajuan yang dicapai
5. Mengevaluasi rintangan yang mungkin timbul dan melakukan adaptasi

Boekaerts (2006) menemukan bahwa murid yang berprestasi tinggi menerapkan pembelajaran dengan pengaturan diri. Para murid menetapkan sasaran pembelajaran yang lebih spesifik, menggunakan banyak strategi, memantau diri sendiri dan secara sistematis mengevaluasi kemajuannya. Guru dapat membantu murid menerapkan pengaturan diri. Perkembangan pengaturan diri dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu pemodelan dan efikasi diri. Model merupakan sumber penting untuk menyampaikan keterampilan pengaturan diri. Murid dapat mengamati guru melakukan strategi mengelola kemarahan yang efektif untuk mengurangi perilaku kekerasan di sekolah. Dengan itu, murid percaya bahwa mereka juga mampu merencanakan dan mengelola kemarahan dengan efektif, yang dapat menciptakan situasi sekolah yang ramah, tanpa kekerasan, dan proses pembelajaran yang menyenangkan (dalam Santrock, 2007).

Bersama-sama dengan konsep taman siswa, penulis juga telah mencoba menerapkan pendekatan observasional dalam proses pembelajaran. Setiap murid diminta untuk membuat tujuan dan target yang akan dicapai dalam satu semester ke depan. Lalu membuat target jangka pendek setiap harinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, beberapa murid menunjukkan perubahan perilaku seperti membaca materi (belajar mandiri) sebelum masuk kelas. Lalu materi yang sudah dibaca, murid jelaskan dan bagikan kepada teman sekelasnya sehingga proses pembelajaran di kelas murid menjadi lebih aktif dan guru menjadi fasilitator yang bertugas mendampingi dan memotivasi. Guru juga bertindak sebagai model yang baik seperti tidak melakukan kekerasan dan menerapkan disiplin positif pada murid. Secara kognitif, murid paham bahwa kekerasan bukan cara yang baik dalam pembelajaran.

Rancangan awal penerapan pembelajaran kognitif sosial adalah guru diberikan pelatihan untuk memahami tentang hakikat dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar dan mengamati model/guru yang berhasil menerapkan metode mengajar yang positif bagi perkembangan murid. Jika pola pikir dan keyakinan guru tentang kekerasan sudah berubah maka guru dapat diajarkan teknik regulasi diri dengan membuat tujuan dan target untuk mengajar dengan ramah dan menyenangkan. Ketika guru sudah paham dan menerapkan pembelajaran ini di kelas, ia dapat memberikan pengaruh yang positif kepada murid untuk membuat tujuan dan target dalam belajar sehingga murid lebih aktif dan tidak melakukan kekerasan di sekolah.

Guru yang mendorong murid untuk menjadi pelajar dengan pengaturan diri menyampaikan pesan bahwa murid bertanggung-jawab untuk perilakunya sendiri, menjadi berpendidikan, dan menjadi warga Negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pengaturan diri merupakan pembelajaran berdasarkan pengalaman pribadi yang membutuhkan partisipasi aktif dan dedikasi murid (dalam Santrock, 2007).

Kesimpulan

Dengan menerapkan konsep taman siswa dan pembelajaran kognitif sosial secara bersama-sama, dapat membantu mengurangi kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Intinya adalah guru sebagai model perlu melakukan revolusi mental dengan cara merubah pola pikir menjadi lebih positif dalam mengajar maka perilaku guru di sekolah juga lebih positif kepada murid. Guru juga dapat menjadi model yang baik sehingga dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku murid.

Tujuan jangka panjang dari revolusi mental dalam pemberantasan kekerasan di sekolah adalah menghasilkan pelajar dan manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakatnya. Murid tidak lagi hidup terperintah; dapat berdiri tegak karena kekuatan sendiri; dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib.

Daftar Acuan

Boekaerts, M. (2006). Self-regulation and effort investment. Dalam W. Damon & R. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology* (6th ed.). New York: Wiley.

Bunga, B., & Ekowarni, E. (2010). *Hubungan antara persepsi anak terhadap kekerasan dan pola pengasuhan otoriter terhadap konsep diri anak di lingkungan etnis Sabu dan Rote.* Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Doherty, D., & Berglund, D. (2008). *Psychological abuse. A discussion paper.* Ottawa: Public Health Agency of Canada.

Moffatt, G.K. (2003). *Wounded innocents and fallen angels: Child abuse and child aggression*. Westport: Praegar.

Santrock, J.W. (2009). *Psikologi pendidikan (Educational psychology)* (ed. ke.3). Jakarta: Salemba Humanika.

Salkind, N.J. (Eds.).(2008). *Encyclopedia of educational psychology*. California: SAGE.

Rahardjo, S. (2010). *Ki Hajar Dewantara. Biografi Singkat 1889-1959*. Yogyakarta: Garasi House Of Book.

Sudarto, K.T. (2008). *Pendidikan modern dan relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara.* Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

Tampubolon, L.H., Adi, R., Hayati, E.N., & Hasyim, N. (2007). *Pengkajian mengenai kekerasaan terhadap anak di Kabupaten Sikka dan Ende, NTT.* Research Report. Jakarta: Unicef Indonesia.

Tauchid, M. (2004). *Perjuangan dan ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

Trianita, L.N., Leo, H., & Sinaga, I.T.P. (2012). *Strategi kebudayaan dalam pendidikan karakter (Studi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Paulo Freire).* Makalah disampaikan dalam *The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future*, Bali, 9-10 Februari 2012.

Winne, P.H. (2005). Key issues in modeling and applying research on self-regulated learning. *Applied Psychology: An International Review, 54*, 232-238.

World Health Organization (WHO). (2002). *World report on violence and health*. Geneva: World Health Organization Press.

World Health Organization (WHO). (2014). *Global status report on violence prevention 2014*. Geneva: World Health Organization Press.

15
Peran Guru sebagai Agen Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

Neivy Dewi Diniyar

Pendahuluan

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa darurat kekerasan seksual pada anak (KSA) menjadi ancaman di Indonesia. Menurut Laporan akhir tahun 2013 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sebanyak 3.023 kasus pelanggaran hak anak terjadi di Indonesia dan 58% atau 1.620 anak jadi korban kejahatan seksual. Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah korban kekerasan seksual pada anak tahun 2013 naik hingga mencapai 60% (Komnas PA, 2013). Dilihat dari klasifikasi usia, dari 3.023 kasus tersebut, sebanyak 1.291 kasus (45%) terjadi pada anak berusia 13 hingga 17 tahun, korban berusia 6 hingga 12 tahun sebanyak 757 kasus (26%), dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 849 kasus atau 29%.

Tingginya kasus KSA juga dapat dilihat dari beberapa data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat (BPPM) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Untuk wilayah yogyakarta, Data dari BPPM Provinsi DIY menjelaskan bahwa pada tahun 2009, jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan pada anak adalah kekerasan seksual, yakni sebanyak 152 kasus (72,7%). Jenis kekerasan pada anak yang paling banyak dilakukan di tahun 2010 tetap berupa kekerasan seksual, yakni sebanyak 113 kasus (61,4%). Sumber data lain diperoleh dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) provinsi DIY mengenai angka kejadian kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh LPA provinsi DIY. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2001 hingga 2012 selalu ada kasus KSA yang ditangani LPA provinsi DIY. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya selalu terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk wilayah Jakarta, Komnas PA menyatakan kekerasan seksual terhadap anak di Ibu Kota mengalami peningkatan. Sekretaris Jenderal Komnas Anak Samsul Ridwan

mengatakan peningkatan itu terjadi hampir setiap tahunnya. "Kecenderungannya tiap tahun meningkat," kata Samsul kepada Tempo (Tempo.co, 10 Mei 2014). Komnas Anak mencatat sebanyak 342 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Jakarta pada Januari-April 2014. Sebanyak 52 persen atau sekitar 175 kasus merupakan kejahatan seksual. Sedangkan sepanjang 2013 tercatat ada 666 kasus kekerasan anak yang terjadi di Jakarta, dengan 68 persennya merupakan kekerasan seksual. Samsul menyatakan data tersebut merupakan fakta bahwa sekolah menjadi tempat yang cukup rawan bagi anak-anak. Dari 175 kasus tersebut, 40 persen kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekolah sehingga menjadikannya tempat paling rawan terhadap anak. Sedangkan angka untuk lingkungan tempat tinggal, dia menyatakan, cukup tinggi karena terjadi sebanyak 30 persen dari total kejadian. "Kalau persentase di jumlah, 70 persen kekerasan seksual terhadap anak justru ada di sekolah dan rumah," kata Samsul (Tempo.co, 10 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa guru TK di wilayah Gamping dan Godean Yogyakarta, selama ini usaha prevensi KSA berbasis sekolah belum dilakukan secara optimal, terutama di tingkat pendidikan taman kanak-kanak. Guru-guru selama ini belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kekerasan seksual pada anak dan juga belum mengetahui upaya pencegahan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah. Guru-guru menyampaikan bahwa mereka mengetahui terjadinya kasus-kasus KSA di media massa seperti televisi dan koran. Mereka merasa prihatin dengan beberapa berita yang mereka lihat dan dengar di media massa mengenai kasus-kasus KSA tersebut, namun mereka masih merasa kesulitan dan belum yakin dapat menyampaikan materi mengenai pencegahan KSA kepada anak muridnya secara tepat. Oleh karena itu penulis memiliki ide untuk memberikan pelatihan kepada guru sebagai sarana untuk memberikan informasi dan keterampilan bagi guru dalam upaya meningkatkan efikasi diri guru dalam mengajar materi KSA sebagai bentuk pencegahan KSA berbasis sekolah. Melalui pelatihan yang diberikan, diperoleh hasil bahwa keyakinan guru dalam menyampaikan materi pencegahan KSA dapat meningkat. Guru dapat menyampaikan materi pencegahan KSA dengan menggunakan bahasa dan media yang tepat sesuai dengan usia siswa.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak RI no.23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. UU PA no. 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU RI No.23 tahun 2002).

Kekerasan seksual pada anak adalah bentuk pelecehan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk mendapatkan rangsangan seksual. Pelaku pelecehan seksual pada anak-anak pada sebagian besar kasus yang terjadi adalah orang yang dekat dengan korban, sehingga risiko anak menjadi korban menjadi besar. Margaritoiu (2010) menyampaikan bahwa kekerasan seksual pada anak akan memberikan dampak yang bervariasi pada kepribadian korban seperti reaksi emosi, persepsi diri, reaksi fisik dan somatis, seksualitas, dan hubungan sosial. Efek dari kekerasan seksual (seperti kecemasan, depresi, perilaku agresif, perilaku menarik diri dari pergaulan) tergantung pada intensitas dan frekuensi dari kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual pada anak-anak, maka perlu upaya pencegahan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak. Pencegahan primer diperlukan untuk menekan terjadinya kasus KSA. Wurtele (dalam Scholes, 2002) menyampaikan bahwa inilah saat bagi orang dewasa untuk berkontribusi dalam melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman dengan mengimplementasikan intervensi pencegahan yang meliputi guru, orang tua, dan praktisi sebagai pendekatan interdisipliner yang memiliki potensi besar dalam menjaga anak-anak agar aman dari KSA.

Kesejahteraan psikis anak menjadi isu strategis jika mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa. Tentunya kita berharap bahwa pengelolaan bangsa ke depannya akan lebih baik jika ditangani oleh generasi yang sejahtera dan tanggu secara fisik dan psikis. Selama ini penanganan KSA masih bersifat parsial dan belum integratif. Sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk bekerja sama dalam usaha Pencegahan KSA. Kerja sama antar pihak ini akan terwujud dapat dilakukan secara optimal jika ada kerja sama yang menyeluruh dari segala pihak.

Kekerasan Seksual pada Anak

Menurut *The National Center of Child abuse and neglect* Kekerasan seksual pada anak (KSA) adalah kontak seksual antara anak dan orang yang lebih dewasa yang menggunakan anak sebagai pemuas nafsu seksualnya. KSA didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas seksual terhadap anak yang dilakukan baik oleh orang dewasa, anak yang lebih tua usianya, maupun anak yang berusia sebaya dengan korban (Allgeier & Allgeier, 2009; Finkelhor,2009; Kinnear, 2007). Okoroafor (2012) mengemukakan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah penyalahgunaan kekuasaan ketika orang yang lebih tua, kuat dan berpengetahuan mengambil keuntungan dari anak untuk memuaskan kepuasan

emosi dan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan perbuatan fisik dan sebuah pengalaman psikologis. Yang dimaksud dengan perbuatan fisik bahwa kekerasan terhadap anak melibatkan sentuhan dan non-sentuhan. Sebagai pengalaman psikologis dimaksudkan bahwa kekerasan pada anak merepresentasikan penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas. Pelaku kejahatan memuaskan kepuasan emosional dan seksualnya, dan anak-anak sebagai korban terluka serta mengalami kebingungan.

KSA meliputi kontak seksual, seperti mencium anak secara intim, membelai anak dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual, seks oral, memasukkan jari atau penis ke dalam vagina atau anus atau pengalaman seksual non-kontak, seperti ekshibisionisme, mengintip anak saat berpakaian atau mandi, dan mengekspos anak untuk pornografi (Finkelhor, 2009; Freyd, 2005; Wurtele, 2009 dalam Goldman, 2012).

Berdasarkan data kasus KSA yang terjadi di Indonesia, dapat diperoleh gambaran bahwa kasus KSA cenderung meningkat setiap tahunnya. Kasus KSA menjadi mengkhawatirkan karena KSA berisiko terjadi pada semua anak baik laki-laki maupun perempuan, pelaku KSA dapat siapa saja baik orang yang dekat dengan anak maupun tidak, dan KSA dapat terjadi di mana saja baik di lingkungan rumah maupun sekolah.

Kekerasan seksual pada anak-anak dapat mengakibatkan trauma fisik, mental, sosial, maupun perilaku. Selanjutnya, KSA mempunyai dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Wohab dan Akhter (2010) menyatakan bahwa anak yang memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan dalam waktu yang lama akan menyebabkan rendahnya harga diri, perasaan tidak berharga, dan pandangan yang tidak baik terhadap seks. Anak juga menjadi pendiam dan curiga terhadap orang dewasa, dan akan tertekan dalam kehidupannya. Mereka tidak dapat menaruh perhatian sepenuhnya terhadap pekerjaan dan tugas-tugas yang lain. Briere & Runtz (dalam Meyerson, 2002) menemukan bahwa orang dewasa yang mengalami kekerasan seksual waktu anak-anak menderita permasalahan emosional dan perilaku di kemudian hari. Perkembangan emosi, sosial, dan fisik yang unik yang terjadi selama periode kejadian KSA menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap fungsi psikologis korban pada kelompok umur tertentu (Hussey & Singer, 1993; Williamson, Borduin, & Howe, 1991 dalam Meyerson, 2002).

Margaritoiu (2010) menyampaikan hal yang sama bahwa kekerasan seksual pada anak akan memberikan dampak yang bervariasi pada kepribadian korban seperti reaksi emosi, persepsi diri, reaksi fisik dan somatis, seksualitas, dan hubungan sosial. Efek dari kekerasan seksual (seperti kecemasan, depresi, perilaku agresif, perilaku menarik diri dari

pergaulan) tergantung pada intensitas dan frekuensi dari kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

Kilpatrick (dalam Okofoar, 2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa KSA dapat mencederai kondisi emosional psikologis dan kesehatan fisik. Kesulitan emosi dan perilaku ini dapat menimbulkan gangguan yang signifikan pada perkembangan anak normal dan seringkali berdampak selamanya, yang mengarah kepada disfungsi dan stress ketika memasuki masa dewasa. Konsekuensi terjadinya KSA tidak terbatas pada korban saja tetapi juga berpengaruh kepada masyarakat secara keseluruhan.

Guru Sebagai Agen Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Sekolah

KSA memberikan dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan bagi korban dan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan terjadinya kasus KSA. Bloom (1996) menyatakan bahwa dasar prevensi dan intervensi kasus-kasus penyimpangan individu, yaitu: (1) meningkatkan kekuatan individu (*Increasing individual strengths*) dan mengurangi kelemahan individu (*decreasing individual limitation*), (2) meningkatkan dukungan sosial (*increasing social support*) dan mengurangi tekanan sosial (*decreasing social stresses*), dan (3) meningkatkan kemudahan yang ditimbulkan dari lingkungan fisik dan mengurangi kesulitan yang ditimbulkan dari lingkungan fisik.

Wurtele & Kenny (2001) menyatakan bahwa prevensi dapat dilakukan langsung kepada anak maupun kepada pihak-pihak di lingkungan sekitar anak yang merupakan agen penting dalam upaya pencegahan KSA. Prevensi primer berbasis sekolah dapat dilakukan melalui psikoedukasi yang diberikan oleh guru sebagai agen pencegahan KSA kepada para siswanya. Upaya ini merupakan upaya prevensi dalam meningkatkan kekuatan individu yaitu meningkatkan kekuatan siswa dengan cara memberikan pengetahuan mengenai pencegahan KSA dan keterampilan menjaga diri agar terhindar dari KSA. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa, kurangnya pengetahuan anak mengenai KSA merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya KSA (Finkelhor, 2007; Kenny, dkk., 2008).

Prevensi KSA semakin banyak dan berkembang, termasuk edukasi yang berbasis pada Orang tua dan anak yang diajarkan guru melalui sistem pendidikan di sekolah (Kenny, Capri, Reena, Kolar, Ryan & Runyon, 2008). Arnold (dalam Scholes, 2012) menyatakan bahwa peran signifikan guru semakin dikenal, dengan memahami bahwa partisipasi pendidik merupakan sesuatu yang penting dalam kesuksesan pencegahan berbasis sekolah.

Pohan, dkk (2011) menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi, membentuk sikap dan mengembangkan keterampilan. Goldman (2014) mengemukakan bahwa guru, sebagai pendidik dan pengasuh profesional anak, idealnya ditempatkan untuk berkontribusi terhadap perlindungan anak. Guru diharapkan dapat memfasilitasi pencegahan KSA di kelas. Wurtele (dalam Scholes, 2012) juga menyampaikan bahwa guru memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan KSA dan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pemahaman yang berkontribusi pada keamanan anak-anak dalam penjagaan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Okoroafor (2012) pada guru taman kanak-kanak di Nigeria bertujuan untuk menggali pengetahuan guru mengenai prevensi KSA pada anak-anak. Hasil penelitiannya menunjukkan guru kurang memahami konsep KSA sehingga perlu di dorong untuk fokus pada pencegahan dini KSA dengan membangun pengetahuan masyarakat tentang KSA. Penelitian yang dilakukan oleh Hurtado, Katz, Ciro, dan Guttfreund (2013) pada 100 guru di Salvador, menyimpulkan bahwa seluruh guru yang menjadi subjek penelitian setuju bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengajar siswa tentang pelecehan seksual sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan. Disimpulkan juga bahwa guru Salvador yang memiliki pengetahuan tentang deteksi dan pelaporan KSA akan mendukung sebuah program yang dapat melatih mereka untuk berbicara kepada siswa mereka tentang topik KSA.

Di Indonesia, hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramastri, Prawitasari, Prabandari, dan Ekowarni, (2011) mengenai guru sekolah dasar sebagai agen pengubah untuk prevensi terhadap kekerasan seksual pada anak-anak, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan guru pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama, tetapi rerata kedua kelompok tersebut berbeda. Rerata pengetahuan mengenai KSA setelah intervensi lebih tinggi pada kelompok eksperimen. Peningkatan pengetahuan antara sebelum dan sesudah intervensi program, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol menunjukkan bahwa intervensi program memengaruhi pengetahuan kedua kelompok. Dengan demikian disimpulkan bahwa para guru layak sebagai agen pengubah dalam melakukan prevensi terhadap KSA.

Wash (dalam Scholes, 2012) mengemukakan bahwa guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap positif terhadap perlindungan anak dapat berkontribusi dalam keamanan para siswanya. Kenny (2008) menyampaikan hal yang sama bahwa program prevensi seharusnya juga melibatkan orang tua dan guru dengan memberikan pengetahuan kepada mereka. Guru yang dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif dapat merespons dan membantu anak-anak yang dianiaya, termasuk mereka

yang menjadi korban dari berbagai macam kejahatan, dengan meningkatkan potensi belajar mereka dan memastikan keselamatan masa depan mereka (Walsh, 2011).

Umumnya, program pencegahan pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak memiliki tiga tujuan utama yaitu mengajarkan anak-anak untuk mengenali KSA, memberi mereka keterampilan untuk menghindari penyalahgunaan, dan mendorong mereka untuk melaporkan pelecehan yang pernah mereka alami, sedang dialami, atau dialami di masa yang akan datang (Kenny, 2008;. Repucci & Herman, 1991).

Guru sebagai agen pencegahan KSA berbasis sekolah, dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para siswanya agar terhindar dari KSA. Davis & Gidycz (2000) menjelaskan bahwa program pencegahan KSA yang dirancang untuk siswa dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa bentuk program, misalnya beberapa program yang diterapkan ke siswa hanya memiliki satu sesi saja, sementara yang lain memiliki beberapa sesi. Materi yang diajarkan guru kepada siswa dalam upaya pencegahan KSA dapat merujuk pada materi pencegahan KSA dari *National Sexual Violence Resource Center* (2011), yaitu:

1. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak mengenai pencegahan KSA, meliputi:
    a. Pengenalan tentang konsep 'zona pribadi' dan bagian tubuh yang tergolong 'pribadi'.
    b. Penjelasan mengenai berbagai jenis sentuhan yang pantas dan tidak pantas yang mereka alami.
    c. Penjelasan mengenai adanya kemungkinan bahwa seseorang yang dikenal atau disukai oleh anak dapat mencoba untuk menyakiti mereka.
    d. Mengajarkan kepada anak untuk mempercayai institusi mereka baik kepada orang-orangnya maupun terhadap situasi institusi.
    e. Pengetahuan tentang perkembangan kesehatan seksual.
    f. Pengetahuan mengenai nama-nama yang benar untuk bagian tubuh (misalnya, penis, vagina, payudara, bokong, atau dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak disesuaikan dengan usianya) sehingga anak-anak dapat secara akurat melaporkan apa yang telah terjadi pada diri mereka.

2. Mengajarkan keterampilan kepada anak-anak agar terhindar dari KSA, meliputi:

   a. Mengajarkan bahwa anak dapat menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyentuh tubuh mereka.

   b. Mengajarkan bahwa ketika ada orang lain yang menyentuh mereka dengan cara yang bertentangan dengan keinginan mereka atau dengan cara yang membuat mereka tidak nyaman, mereka bisa mengatakan "tidak" atau meninggalkan orang tersebut atau lari, lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang dewasa yang dapat mereka percaya.

3. Mendorong anak-anak untuk melapor jika mereka mengalami KSA, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

   a. Mengajarkan kepada anak untuk mengidentifikasi orang dewasa yang dapat dipercaya.

   b. Menyampaikan kepada anak bahwa KSA terjadi bukan karena kesalahan anak.

   c. Mengajarkan kepada anak-anak jika seseorang menyentuh mereka dengan cara yang membuat mereka tidak nyaman, mereka harus selalu mengatakan orang dewasa yang dapat dipercaya.

   d. Menyampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak harus menjaga rahasia tentang seseorang yang menyentuh mereka dengan cara yang membuat mereka tidak nyaman.

   e. Menyampaikan bahwa mereka akan dipercaya dan masih dicintai jika mereka memberitahukan mengenai terjadinya kasus KSA yang mereka alami.

Langkah-langkah Mengatasi Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas PA, LPA, dan BPPM terlihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak (KSA) semakin meningkat setiap tahunnya. KSA dapat dialami oleh siapa saja baik anak laki-laki maupun perempuan, pelakunya dapat siapa saja baik orang yang dekat ataupun tidak dekat dengan korban, dan dapat terjadi disegala kalangan. KSA mengakibatkan dampak negatif bagi para korban baik secara fisik, emosi dan sosial. Berdasarkan beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa korban KSA mengalami reaksi emosi negatif, seperti kecemasan, depresi, perilaku agresif, perilaku menarik diri dari

pergaulan, dan mengalami reaksi fisik somatis. Korban KSA cenderung masih mengalami trauma baik secara fisik maupun psikis dalam jangka waktu yang lama.

Menurut konsep umum dalam revolusi mental, menyatakan bahwa revolusi mental terkait dengan cara seseorang dalam berpikir, merasa dan bertindak. Pemaparan data dan informasi mengenai dampak negatif KSA bertujuan untuk mengubah cara berpikir semua pihak yang terkait bahwa kasus KSA ini tidak lagi kasus orang-perseorangan, namun ini merupakan kasus global yang membutuhkan usaha pencegahan secara bersama. Dengan cara berpikir yang demikian semua pihak dapat merasa terlibat sebagai pihak yang juga memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya pencegahan KSA. Pikiran dan perasaan mengenai adanya tanggung jawab bersama dalam upaya pencegahan KSA akan mendorong semua pihak untuk dapat bertindak dan terlibat secara aktif dalam melakukan upaya pencegahan KSA.

Pencegahan primer terhadap terjadinya KSA menjadi hal yang penting untuk dilakukan baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Khusus di sekolah, upaya pencegahan KSA dapat dilakukan yaitu dengan pencegahan KSA berbasis sekolah dengan guru yang bertindak sebagai agen pencegahan KSA. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang strategis dalam menyebarluaskan informasi, memberikan pengetahuan, dan mengajarkan keterampilan mengenai pencegahan KSA kepada para siswanya. Pengetahuan dan keterampilan pencegahan KSA dapat diberikan kepada siswa baik secara khusus, misalnya dengan penyusunan kurikulum khusus pencegahan KSA, maupun dengan memasukkan materi pencegahan KSA ke dalam materi pelajaran yang memiliki keterkaitan dengan tema pencegahan KSA, misalnya pada mata pelajaran olahraga atau biologi yaitu pembahasan mengenai tubuh atau perkembangan kesehatan seksual, atau mata pelajaran agama. Materi pencegahan KSA disampaikan kepada siswa dengan memperhatikan tingkatan usia masing-masing siswa, misalnya untuk jenjang TK, materi pencegahan KSA dapat diberikan pada saat materi mengenai pengenalan bagian tubuh dan cara melindungi bagian tubuh yang penting. Untuk jenjang SD, materi pencegahan KSA dapat diberikan saat mata pelajaran Olah Raga, IPA atau Agama. Untuk jenjang SMP dan SMA, materi pencegahan KSA dapat diberikan saat mata pelajaran Olah Raga atau Biologi tentang perkembangan seksual dan kesehatan seksual ataupun pelajaran Agama tentang adab berinteraksi dengan orang lain.

Upaya pencegahan berbasis sekolah ini juga dapat diwujudkan secara lebih optimal jika ada kerja sama antara pihak terkait seperti dinas pendidikan dan para guru. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mengadakan pelatihan yang dikhususkan untuk para guru dalam rangka pencegahan KSA. Materi pelatihan yang diberikan meliputi pengetahuan mengenai KSA dan keterampilan mengajar pencegahan KSA. Pengetahuan mengenai KSA bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya melakukan upaya pencegahan KSA dengan melihat fakta dan data yang terjadi. Pengetahuan ini meliputi data kasus KSA yang terjadi di lapangan, dampak negatif KSA, deteksi dini korban KSA, dan bukti bahwa guru dapat menjadi agen KSA. Sedangkan keterampilan mengajar KSA bertujuan agar guru memiliki keterampilan yang memadai ketika menyampaikan materi pencegahan KSA kepada siswanya. Keterampilan mengajar pencegahan KSA ini meliputi cara membuat desain materi pencegahan KSA, pemilihan media yang tepat, pemilihan bahasa dan cara penyampaian yang tepat sesuai dengan usia siswa.

2. Pembentukan agen pencegahan KSA di setiap sekolah yang bertugas untuk:

   a. Melakukan monitoring terhadap guru dalam implementasi guru sebagai agen pencegahan KSA di kelas masing-masing.

   b. Membuat program psikoedukasi kepada orang tua siswa dalam upaya pencegahan KSA. Sehingga upaya pencegahan KSA ini dapat dilakukan secara optimal baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Daftar Acuan

Allgeier, E.R., & Allgeier, A.R. (1991). *Sexual interactions* (3rd ed.). Lexington, D.C.: Health and Company.

Bloom, M. (1996). *Primary prevention practises.* London: Sage.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. (2011). *Buku data pilah 2011.* Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. (2011). *Buku profil gender dan anak 2011.* Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Davis, M.K., & Gidycz, C.A. (2000). Child sexual abuse prevention programs: A meta-analysis. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 29*, 257-265.

Finkelhor, D. (2007). Prevention of child sexual abuse through educational programs directed toward children's pediatrics. *Pediatrics, 120,* 640-645.

Goldman, J.D.G., & Grimbeek, P. (2014). Child sexual abuse an mandatory reporting intervention preservice content preferred by student teachers. *Journal of child sexual abuse, 23*(1), 1-16.

Kenny, M.C., Capri, V., Kolar, R.R., Ryan, E.E., & Runyon, M.K. (2008). Child sexual abuse: From prevention to self-protection. *Child abuse Review, 17,* 36-54.

Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2013). Kasus KSA yang ditangani LPA Provinsi DIY tahun 2001 sampai dengan 2012. Yogyakarta: Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Margaritoiu, A., & Aftimie, S. (2012). Abused children's self-esteem. *Social and Behavioral Sciences, 46,* 4580-4584.

Meyerson, L.A., Long, P.J., Miranda, R., & Marx, B.P. (2002). The influence of childhood sexual abuse, physical abuse, family environment, and gender on the psychological adjusment of adolescents. *Child Abuse & Neglect, 26,* 387-405.

National Sexual Violence Resource Center. (2011). *Child sexual abuse prevention: Program for children*. Enola: National Sexual Violence Resource Center.

Okoroafor, & Clara, N. (2012). Primary prevention knowledge of parents and teachers of nursesy and play group on childhood sexual abuse. *International Journal of Evaluation and Research in Education, 1*(2), 73-78.

Paramastri, I., Prawitasari, J.E., Prabandari, Y.S., & Ekowarni, E. (2011). Guru Sekolah Dasar sebagai agen pengubah untuk prevensi terhadap kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 14,* 84-91.

Pohan, M.N., Hinduan, Z.R., Riyanti, E., Mukaromah, E., Mutiara, T., Tasya, I.A., Sumintardja, E.N., Pinxten, W.J.L., & Hospers, H.J. (2011). HIV-AIDS prevention through a life-skills school based program in Bandung, West Java, Indonesia: Evidence of empowerment and partnership in education. *Procedia Social and Behavioral Sciences, 15,* 526–530.

Repucci, N.D., & Herman, J. (1991). Sexuality education and child sexual abuse prevention programs in the schools. *Review of Research in Education, 17,* 127-166.

Scholes, L., Jones, C., Hunt, C.S., Rolfe, B., & Pozzebon, K. (2012). The teachers' role in child sexual abuse prevention program: Implications for teacher education. *Australian Journal of Teacher Education, 37.*

Walsh, K., Louise, L., McInnes, E., & Mathews, B. (2011). Locating child protection in preservice teacher education. *Australian Journal of Teacher Education, 36*(7).

Wohab, M.A., & Akhter, S. (2010). The effects of childhood sexual abuse on children's psychology and employment. *Procedia Social and Behavioral Sciences, 5,* 144-149.

Wurtele, S.K., & Kenny, M.C. (2010). Partnering with parents to prevent child sexual abuse. *Child Abuse Review, 19,* 130-152.

www.tempo.co/read/news/2014/05/11/064576850/Komnas-Anak-Kekerasan-Seksual terhadap-Anak-Meningkat.

16
Uji Coba Modul Pelatihan BEMO (Bersahabat dengan Emosi) sebagai Langkah Awal untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Pelajar Indonesia

Regisda Machdy

Kesehatan Mental

Kesehatan mental telah menjadi perhatian masyarakat global di akhir abad ke-20. WHO (1996) pada saat itu mempublikasikan Global Burden of Disease Study, sebuah studi mengenai total populasi yang hidup dengan ketidakmampuan tertentu, menunjukkan bahwa gangguan mental berada di lima tertinggi pada gangguan kesehatan. Selain itu, *Surgeon General's Report* (1999), sebuah laporan *U.S. Public Health Service* yang kerap berfokus pada kesehatan fisik, untuk pertama kalinya menggulirkan isu mengenai kesehatan mental. Hal ini dilandasi oleh fakta bahwa gangguan mental adalah penyebab nomor dua untuk berbagai jenis gangguan kesehatan dan kematian dini.

Seiring dengan urgensi tersebut, kesehatan mental telah memegang peran strategis dalam kebijakan-kebijakan mengenai kesehatan (*World Health Organization*, 2006). Program-program *screening* dan prevensi untuk kasus-kasus seperti bunuh diri dan depresi menjadi contoh program-program kesehatan mental yang sering digalakkan di negara maju. Tidak cukup hanya disitu, program kesehatan mental juga merambah pada dunia pendidikan (Christner & Mennuti, 2009). Di Amerika, sebagai contoh, kebijakan mengenai kesehatan mental di sekolah diwujudkan dengan penyediaan profesional untuk memberikan pelayanan kesehatan mental terhadap siswa. Hasil survei terakhir menunjukkan bahwa 96% sekolah melaporkan telah mempunyai sedikitnya satu staf yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan mental (www.schoolmentalhealth.org/-).

Berkaca pada kebijakan internasional, terutama di negara maju, kesehatan mental telah diwujudkan dalam aksi nyata. Melihat pada negara Indonesia, Sebenarnya kesehatan mental telah menjadi bagian dari konsep sehat (UU Kesehatan No.36, 2009). Sayangnya, fokus dari program pengembangan kesehatan mental di Indonesia baru sebatas merespons

bencana, seperti bencana tsunami aceh dan bom bali (Good, Good, & Grayman, 2013), pembebasan pasung (Ryan, 2013), dan pelayanan jasa psikolog di puskesmas (*Centre for International Mental Health*, 2013). Isu mengenai kesehatan mental di sekolah belum menjadi perhatian dunia pendidikan di Indonesia di semua jenjang pendidikan.

Berkaitan dengan promosi kesehatan mental pada konteks pelajar sekolah, diperlukan adanya suatu program yang dapat meningkatkan faktor protektif dari kesehatan mental pelajar. Kesehatan mental merupakan konstruk yang luas, untuk mempromosikan kesehatan mental, diperlukan langkah awal untuk memulai program promosi, prevensi dan intervensi kesehatan mental. Peneliti melakukan *preliminary study* dengan menganalisis isi 'kicauan' 20 remaja SMA di media sosial *Twitter.* Hasil dari *content analysis* yang dilakukan menunjukkan bahwa 31,78% 'kicauan' remaja dipenuhi dengan emosi negatif. Buechel dan Berger (2013) menemukan bahwa banyaknya frekuensi remaja melakukan *microblogging* di media sosial diakibatkan rendahnya regulasi emosi. Padahal kemampuan regulasi emosi yang baik merupakan indikator penting dari kesehatan mental seseorang (Saxena, Dubey, & Pandey, 2011). Berdasarkan aspek kesehatan mental remaja, data *preliminary study* ini pun memperlihatkan bahwa dominasi perasaan negatif dalam kondisi remaja menunjukkan ketidaktercapaian salah satu aspek kesehatan mental yakni *emotional functioning* (Roeser, 1999), di mana remaja kurang mampu memahami, mengkomunikasikan, dan meregulasi emosinya (Gross & Munoz, 1995).

Regulasi Emosi

Regulasi emosi adalah kemampuan yang membedakan antara manusia dan spesies primata lainnya (Davidson, Fox, & Kalin, 2007). Jika saja manusia, atau remaja khususnya, mampu mengelola emosi maka mereka akan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan tidak akan menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang sebagaimana yang banyak tersorot dalam media. Regulasi emosi sendiri merupakan proses yang bertanggung jawab dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosional untuk mencapai tujuan dan beradaptasi dalam tuntutan situasi sosial tertentu (Thompson, 1994).

Intervensi dan prevensi akan kemampuan regulasi emosi remaja semakin dibutuhkan dewasa ini. Hal ini didasari oleh tiga fakta yang ditemukan oleh peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh *Center for Public Mental Health* yang bekerjasama dengan Palang Merah Norwegia di empat kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur (2010) menunjukkan bahwa 41,5% remaja mengalami emosi negatif di sekolah dan tidak puas terhadap kehidupannya di sekolah. Kedua, mudah sekali ditemui kasus-kasus penyimpangan perilaku yang dilakukan

siswa seperti bunuh diri, tawuran, dan membolos. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga mencatat bahwa kasus tawuran dan bunuh diri meningkat di akhir tahun 2012. Komnas PA menyebutkan bahwa penyebab dari berbagai kasus tersebut adalah frustrasi, reaktif secara emosional, dan sulit mengontrol diri (detiknews.com, 2012). Ketiga adalah *preliminary* study seperti yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengawali program promosi, prevensi, dan intervensi kesehatan mental melalui pelatihan regulasi emosi untuk remaja di Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun langkah awal yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah menguji coba modul pelatihan regulasi emosi secara empirik.

Pelatihan merupakan salah satu bentuk psikoedukasi. Pelatihan atau psikoedukasi menjadi semakin penting dilakukan karena bertujuan untuk pemerataan pelayanan kepada seluas-luasnya masyarakat (Supratiknya, 2011). Hal ini dilandasi fakta bahwa jumlah psikolog dan jumlah total warga di Indonesia tidak seimbang.

Peneliti melakukan psikoedukasi di bidang regulasi emosi dalam rangka mengupayakan amanah yang tertera dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Pelatihan regulasi emosi adalah wujud bakti penulis untuk melatihkan olah rasa pada remaja SMA di Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah program pelatihan meningkatkan kemampuan regulasi emosi remaja di sekolah. Pelatihan regulasi emosi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu program yang dirancang secara sistematis dan terencana mengenai regulasi emosi bagi remaja untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi. Pelatihan regulasi emosi ini akan disusun dalam sebuah modul pelatihan yang disusun dengan tujuan mencapai kemampuan dalam lima aspek regulasi emosi sebagaimana yang diajukan oleh Gross dan Thompson (2007) yaitu *situation selection, situation modification, attentional deployment, cognitive change,* dan *response modulation*. Mengikuti saran dari Supratiknya (2011) bahwa pelatihan sebaiknya diberi nama yang menarik agar meningkatkan keinginan partisipan untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan dalam penelitian ini diberi nama BEMO yang merupakan singkatan dari pelatihan "Bersahabat dengan Emosi". Selain itu, BEMO juga merupakan akronim dari empat sesi pelatihan yakni: (1) **B**edakan Situasi, (2) **E**liminasi dan Fokus, (3) **M**enjernihkan Pikiran, dan (4) **O**lah Perilaku. Sesi "Bedakan Situasi" merupakan sesi yang diturunkan dari aspek *situation*

selection dan *situation modification*. Sesi "Eliminasi dan Fokus" merupakan sesi yang berisikan materi *attentional deployment*. Sesi "Menjernihkan Pikiran" merupakan sesi yang berisikan materi dari aspek *cognitive change*. Terakhir, sesi "Olah Perilaku" merupakan penjabaran dari aspek *response modulation*.

Pelatihan dalam penelitian ini menggunakan model *experiential learning*. *Experiential learning* merupakan model pelatihan yang memungkinkan instruksi dapat diberikan dengan cara multisensori dan bervariasi (Siberman, 1998). Supratiknya (2011) mengungkapkan bahwa metode belajar *experiential learning* memiliki siklus yang dimulai dengan mengalami (*experiencing*), yaitu individu belajar menjalani atau melakukan hal-hal yang akan dipelajarinya. Dalam tahap ini aktivitas yang dilaksanakan dapat berupa permainan, bermain peran, demonstrasi, pengisian lembar kerja dan lain-lain. Selanjutnya, individu akan melakukan proses pengungkapan (*publishing*) atas pengalaman belajar yang dilakukannya dengan menceritakan pemikiran dan perasaannya. Setelah pengungkapan, individu memproses (*processing*) pemikiran dan perasaannya sehingga mendapatkan poin-poin pembelajarannya. Tahap berikutnya adalah melakukan generalisasi (*generalizing*) di mana individu menarik kesimpulan umum mengenai hal-hal yang telah dipelajari berdasarkan proses-proses sebelumnya. Selanjutnya, individu mengaplikasikan (*applying*) hal-hal yang sudah dipelajari dan memulai lagi proses belajarnya.

Modul BEMO yang diciptakan oleh peneliti akan dievaluasi menggunakan dua evaluasi yang disarankan oleh Supratiknya (2011). Pertama adalah evaluasi hasil, atau evaluasi kebermanfaatan yang dirasakan oleh subjek pelatihan. Kedua adalah evaluasi kinerja yang merupakan evaluasi dari proses berjalannya modul tersebut. Sejalan dengan dua jenis evaluasi tersebut, tulisan ini bertujuan memaparkan: (1) hasil evaluasi modul BEMO secara empirik yang diterapkan pada remaja SMA; dan (2) pengaruh pelatihan BEMO terhadap regulasi emosi remaja di SMA.

Temuan dari Lapangan

Dengan menggunakan 8 responden dari populasi remaja sebuah SMA di Yogyakarta yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Fink, 2003), yaitu memiliki kasus penyimpangan perilaku sedang menurut catatan Kepolisian dan memiliki kondisi regulasi emosi yang juga sedang untuk memudahkan mengamati pengaruh eksperimen (Cook & Campbell, 1979); serta menggunakan instrumen berupa *Skala Regulasi Emosi* (r_{it} = 0,241-0,447; *Alpha* = 0,703) yang dikembangkan mengikuti aspek-aspek regulasi emosi yang dikemukakan oleh Gross dan Thompson (2007), *Uji*

Pemahaman Materi terdiri dari 10 pertanyaan berformat jawaban singkat untuk memastikan bahwa responden mengalami peningkatan regulasi emosi karena memahami materi yang diberikan dan bukan karena bias lain (Azwar, 1998), *Uji Evaluasi Modul* terdiri dari 13 pertanyaan berformat pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban untuk mengevaluasi kualitas konten dan pelaksanaan modul meliputi aspek proses pelatihan, peralatan, perlengkapan pelatihan, materi, dan *trainer* mengikuti rekomendasi Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006), *Observasi* partisipatorik (Hayes, 2000) oleh pengamat menggunakan metode pencatatan data berupa *checklist* untuk menilai kesesuaian proses pelatihan dengan panduan dalam modul meliputi konten prosedur yang ditempuh *trainer* maupun respon subjek pada setiap sesi pelatihan, dan *Wawancara post-experimental* (Christensen, 2006) atau *debriefing* untuk mengevaluasi modul pelatihan melalui diskusi dengan partisipan tentang tujuan dan detil pelaksanaan penelitian; serta dengan menerapkan desain *one group pretest-posttest* yang biasa digunakan untuk melakukan uji coba suatu program baru (Christensen, 2006; Cook & Campbell, 1979) dan dengan menggunakan partisipan dalam jumlah sedikit untuk memastikan bahwa setiap partisipan mengalami siklus *experiential learning* (Supratiknya, 2011); serta dengan menerapkan triangulasi metode dalam analisis data (Poerwandari, 1998) meliputi Skala Regulasi Emosi, uji pengetahuan, wawancara untuk mengevaluasi kemampuan regulasi emosi partisipan setelah pelatihan serta observasi, evaluasi modul, wawancara untuk mengevaluasi modul dan pelaksanaan pelatihan, diperoleh temuan-temuan sebagaimana dipaparkan dalam bagian berikut.

Skala Regulasi Emosi. Dengan uji *paired sample t-test,* terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara skor *pre-test* regulasi emosi (*M*=41,38; *SD*=4,838) dan skor *post-test* regulasi emosi (*M*=48,88; *SD*=5,303) dengan skor *post-test* lebih tinggi dibandingkan skor *pre-test* (t= -5,086, p<0,001). Dengan uji korelasi didapatkan bahwa sumbangan efektif pelatihan BEMO terhadap regulasi emosi adalah sebanyak R^2=42%. Dari perbandingan skor kelompok, terdapat kenaikan rerata skor kelompok sebesar 5,5, yaitu dari rerata skor *pre-test* 41.38 ke rerata skor *post-test* 48.88. Secara individual, setiap partisipan mengalami kenaikan skor regulasi emosi setelah mengikuti pelatihan BEMO kecuali seorang partisipan yang mengalami penurunan 1 poin. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa 62.5% subjek berpindah dari kategori sedang menjadi kategori tinggi dalam meregulasi emosi.

Uji Pemahaman Materi. Dari hasil penelitian deskriptif, tujuh partisipan mendapatkan nilai bagus dan masuk dalam kategori tinggi. Artinya, mayoritas partisipan dapat memahami konten materi sehingga semuanya berada dalam kategori tinggi terkecuali pada seorang partisipan yang berada dalam kategori sedang dengan skor 65.

Uji Evaluasi Modul. Dari lima komponen yang dinilai (waktu, proses pelaksanaan, *trainer*, materi, dan peralatan-ruangan), empat komponen diberi nilai tinggi dan hanya komponen waktu diberi nilai sedang oleh seluruh partisipan pelatihan.

Observasi. Hasil observasi pelaksanaan pelatihan BEMO yang dipandu oleh *trainer* dan *co-trainer* menunjukkan bahwa 97,5% berjalan sesuai modul di mana *trainer* mengikuti dengan rinci alur dan instruksi-instruksi yang telah dirancang dalam modul. Observasi dari sisi partisipan menunjukkan bahwa 90,91% partisipan mengikuti tiap-tiap proses yang telah dirancang dalam modul.

Wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipan merespons secara positif pelatihan yang diberikan. Seluruh partisipan juga telah mempraktikkan materi yang diberikan pada kehidupan sehari-harinya. Data wawancara juga mengkonfirmasi bahwa semua partisipan pelatihan merespons positif terhadap lima komponen pelaksanaan modul, kecuali terhadap komponen waktu yang dinilai kurang banyak pada beberapa sesi.

Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi emosi adalah kemampuan yang dapat dilatihkan kepada individu karena regulasi emosi merupakan sebuah proses yang melibatkan proses level rendah (otomatis) dan proses level tinggi (proses kognitif) sebagaimana dijelaskan oleh Hariri dan Forbes (2007). Pelatihan regulasi emosi dalam penelitian ini melatih partisipan untuk dapat memilih, memodifikasi situasi dan mengarahkan atensi terhadap situasi untuk memengaruhi emosi yang diinginkan, serta menilai dan memaknai situasi yang dihadapi, sekaligus mengendalikan pengungkapan respons fisiologis, eksperiensial dan keperilakuan secara tepat dengan menyesuaikan tuntutan sosial tertentu, guna mencapai keseimbangan emosional sesuai dengan aspek-aspek yang dioperasionalkan (Gross & Thompson, 2007).

Penelitian ini dapat meningkatkan regulasi emosi remaja karena remaja mendapatkan kesempatan untuk melatihkan kemampuan regulasi emosinya. Hal ini selaras dengan penelitian Saxena, Dubey, dan Pandey (2011) yang menjelaskan bahwa remaja harus diberikan kesempatan untuk melatihkan kemampuan regulasi emosinya, karena jika tidak maka remaja tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal pada lingkungan sosialnya.

Kembali pada dua jenis evaluasi yang direkomendasikan oleh Supratiknya (2011) yakni evaluasi hasil dan evaluasi kinerja, pelatihan dalam penelitian ini dapat dikatakan berhasil ditinjau dari kedua evaluasi tersebut. Dari sisi evaluasi hasil, kemampuan regulasi partisipan penelitian meningkat ditinjau dari perubahan skor pada skala regulasi emosi, skor yang tinggi pada uji pengetahuan, dan kebermanfaatan materi yang didapatkan peserta yang terekam pada data wawancara. Sedangkan dari sisi evaluasi kinerja proses, penyelenggaraan

modul pelatihan “BEMO” atau pelatihan “Bersahabat dengan Emosi” berjalan dengan baik ditinjau dari data uji evaluasi modul, data observasi, dan data wawancara. Pembahasan kedua jenis evaluasi ini akan dijelaskan secara rinci pada sub bahasan berikut.

Evaluasi dan Konklusi

Tentang Hasil. Dari total delapan partisipan yang semuanya memiliki *baseline* kemampuan regulasi emosi pada level sedang, lima berpindah kategori menjadi pada level tinggi. Rerata peningkatan skor regulasi emosi kedelapan partisipan penelitian adalah 7,63. Semua partisipan mengalami peningkatan kecuali satu yang justru mengalami penurunan skor sebesar satu poin (-1).

Sejalan dengan kenaikan skor pada skala regulasi emosi, data uji pemahaman materi juga menunjukkan hasil pada kategori tinggi, satu partisipan yang berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ketujuh partisipan lain memahami materi pelatihan sehingga kenaikan skor regulasi emosi bukan diakibatkan oleh proses maturasi atau histori yang dialami partisipan selama rentang waktu pelatihan dan pengambilan data *post-test* sebagai bentuk-bentuk ancaman eksperimen (Azwar, 2011).

Partisipan yang mengalami penurunan skor regulasi emosi ternyata juga berada pada kategori sedang pada uji pemahaman materi. Hal ini mengindikasikan bahwa yang bersangkutan belum memahami materi secara kognitif sehingga tidak bisa menghayati materi yang diberikan secara afektif (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).

Data wawancara menunjukkan bahwa seluruh partisipan secara positif merasakan manfaat materi yang diberikan. Beberapa juga telah berhasil mempraktikkan materi yang didapatkan pada pelatihan ketika mengalami situasi yang tidak menyenangkan, khususnya mengalihkan pikiran ke hal-hal yang lebih menyenangkan, berpikir positif, dan relaksasi. Bahkan, salah satu dengan bangga menyatakan bahwa ia sudah mengajarkan kepada teman dekatnya untuk mempraktikan materi yang ia dapatkan dari pelatihan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa partisipan telah mampu menghayati materi sampai level keterampilan sebagaimana dijelaskan oleh Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006).

Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan bahwa uji evaluasi hasil yang dialami partisipan sudah masuk pada dua level evaluasi yang diajukan oleh Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006). Pada level pertama atau level reaksi, partisipan memberikan komentar positif tentang pelatihan BEMO karena merasakan manfaat yang didapat dari pelatihan. Partisipan juga merasakan bahwa pelatihan disampaikan dalam suasana menyenangkan

dan menarik. Pada level kedua atau pembelajaran, partisipan telah menghayati materi baik dari segi kognitif (melalui uji pengetahuan), afektif (melalui skor skala regulasi emosi), maupun segi keterampilan (melalui wawancara).

Tentang Kinerja. Perubahan yang dialami partisipan baik pada level kognitif, afektif, maupun keterampilan regulasi emosi didapatkan dari proses pembelajaran yang baik. Kualitas baik proses pembelajaran tersebut tampak dari kualitas proses pelaksanaan modul pelatihan. Evaluasi proses ini dilakukan dengan triangulasi data uji evaluasi modul, observasi proses berjalannya modul, dan wawancara.

Observasi dilakukan dengan menggunakan metode *checklist*. Pada tiap sesi *observer* memegang dua lembar observasi. Lembar pertama adalah lembar pengamatan *trainer-co-trainer* untuk melihat kesesuaian pelaksanaan pelatihan dengan modul yang telah dirancang. Lembar kedua untuk mengamati respons perilaku peserta dalam mengikuti pelatihan. Dari sisi *trainer*, pelatihan BEMO yang dipandu oleh *trainer* dan *co-trainer* 97,5% berjalan sesuai modul dalam arti *trainer* mengikuti dengan rinci alur dan instruksi-instruksi yang telah dirancang dalam modul. Kendala dari sisi *trainer* adalah waktu yang terbatas sehingga terdapat satu indikator pada proses *applying* di sesi "Olah Perilaku" yang tidak berjalan. Dari sisi partisipan, 90,91% mengikuti tiap-tiap proses yang telah dirancang dalam modul. Ketidakberjalanan modul sebesar 9,09% dari sisi partisipan terjadi karena beberapa partisipan tidak fokus akibat menggunakan *gadget* dalam beberapa kesempatan, seperti ketika *trainer* menyampaikan materi pada sesi *generalizing*. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran partisipan dan proses berjalannya modul berada diatas 90% sedangkan ketidaklancaran terjadi hanya karena kendala-kendala teknis.

Hasil uji evaluasi modul dan wawancara menunjukkan bahwa baik konten maupun teknis pelaksanaan modul BEMO sudah efektif. Dari segi komponen waktu pelatihan, data evaluasi sesi B-E dan M-O berada pada kategori sedang. Artinya, waktu yang dialokasikan untuk setiap sesi, pengisian lembar kerja, dan diskusi adalah cukup, kendati hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipan masih merasakan waktu diskusi perlu diperpanjang.

Saran partisipan terkait waktu diskusi ini cukup menarik untuk ditilik karena partisipan merasakan bahwa selama proses diskusi mereka menemukan banyak hal seperti inspirasi, masukan, dan pelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian regulasi emosi pada remaja dengan model *experiential learning* oleh Welsh (2010), yang menemukan bahwa proses diskusi membantu mereka menemukan *insight*. Hal ini juga selaras dengan penelitian Saxena, Dubey, dan Pandey (2011) yang menyarankan bahwa remaja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan regulasi emosi. Fase *experiencing* dengan

diskusi seperti ini sangat membantu peserta untuk belajar mengenali diri; memahami, memilih, memodifikasi, dan memberi atensi pada suatu situasi; memaknai sebuah kejadian dan melakukan pengungkapan emosi secara tepat sesuai tuntutan sosial.

Ditinjau dari komponen proses, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pelaksanaan modul berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini terlihat dari tanggapan partisipan mengenai jumlah anggota diskusi yang cukup, kelancaran proses permainan dan juga diskusi yang dilakukan selama proses pelatihan. Temuan unik yang didapatkan adalah pengakuan dua partisipan bahwa pada tahap *publishing* dan melalui proses menyatakan pendapat membuat mereka dapat belajar dari yang lain. Seorang partisipan menambahkan bahwa proses menyatakan pendapat sesuai fase *experiencing* (permainan, kasus, lembar kerja), pada awalnya membuat ia terpaksa berpikir, namun pada akhirnya membantunya menemukan *insight* dari apa yang dipelajari.

Terkait komponen materi, peralatan, dan *trainer* seluruh partisipan memberikan evaluasi yang sangat baik terhadap ketiga komponen ini. Terkait materi, partisipan merasa bahwa materi pelatihan unik dan dikemas secara menarik. Hal ini juga membuat mereka mudah menghafalkan materi dan bahkan mempraktikkannya kepada diri sendiri dan mengajarkannya kepada teman dekat. Hal ini juga didorong oleh suasana belajar menyenangkan yang dibawakan oleh *trainer*.

Hasil uji evaluasi modul dan wawancara menunjukkan bahwa partisipan mendapatkan kebermanfaatan dari proses-proses yang dilalui dalam pelatihan. Proses *experiencing* membantu mereka mengalami sebuah konsep sehingga materi yang diberikan tidak sekedar konsep abstrak semata (Siberman, 1998). Proses *publishing* membantu partisipan untuk memikirkan kembali apa yang dirasakan sehingga menemukan *insight* dari proses pemikirannya sendiri sebelum diverbalisasikan. Partisipan juga berkesempatan untuk belajar dari pendapat dan pengalaman partisipan lain pada proses *processing.* Hal ini selaras dengan temuan Welsh (2010) bahwa remaja dapat menemukan *insight* melalui kedua proses ini dalam siklus *experiential learning.* Pada proses *generalizing*, ide-ide partisipan yang telah dikeluarkan pada proses *publishing* dan *processing* diolah oleh *trainer* menjadi sebuah konsep utuh. Proses ini adalah salah satu elemen penting dalam *experiential learning* karena tanpa proses ini, aktivitas yang dialami partisipan pada tahap *experiencing* akan menjadi sekedar aktivitas hura-hura tanpa makna (Supratiknya, 2011). Proses terakhir yakni *applying*, adalah proses yang menguji pemahaman partisipan terkait materi yang diberikan untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Proses ini menjadi penting karena mendorong partisipan untuk mampu mempraktikkan materi yang telah didapatkan selama pelatihan pada kehidupan sehari-hari.

Konklsusi. Sebagai kesimpulan, modul pelatihan "Bersahabat dengan Emosi" (BEMO) yang menggunakan model *experiential learning* merupakan modul yang efektif baik secara konten dan pelaksanaan dan telah berhasil meningkatkan kemampuan regulasi emosi baik pada level reaksi, pengetahuan, afeksi, dan keterampilan sehingga bisa diaplikasikan oleh partisipan pelatihan dalam kehidupan sehari-hari. Revisi yang disarankan untuk modul ini adalah penambahan jumlah waktu pada sesi *experiencing* sehingga peserta dapat lebih mengeksplorasi dirinya terutama pada bagian pengisian lembar kerja. Kesimpulan akhir, modul pelatihan BEMO kiranya efektif digunakan sebagai modul pelatihan saat mengawali program promosi, prevensi, dan intervensi kesehatan mental di Indonesia.

Daftar Acuan

Azwar, S. (2011). *Reliabilitas dan validitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buechel, E., & Berger, J. (2013). *Facebook therapy: Why people share self-relevant content online.* Advertising and Consumer Psychology Conference, San Diego, CA.

Center for Mental Health Service. (1999). *Mental health. A Report of Surgeon General.* National Institute of Mental Health.

Center for Mental Health Studies. (2013). *Workshop on Psychologists and the Indonesian Mental Health System.* 13-17 May, 2013, Melbourne, Australia. Diunduh 26 Juni 2014 dari http://cimh.unimelb.edu.au: http://cimh.unimelb.edu.au/learning_and_teaching/short_courses/psychologists_and_the_indonesian_mental_health_system

Christner, R.W., & Mennuti, R.B. (2009). *School-based mental health*. New York: Routledge.

Christensen, L.B. (2004). *Experimental methodology* (9th ed.). Boston: Pearson.

Cook, T.D., & Campbell, D.T. (1979). *Quasi-experiment: Design and analysis issues for field settings*. Boston: Houghton Mifflin.

Davidson, R. J., Fox, A., & Kalin, N. H. (2007). Neural bases of emottion regulation in nonhuman primates and humans. Dalam J. J. Gross (Ed.),, *Handbook of emotion regulation* (pp. 3-25). New York: Guilford Press.

Fink, A. (2003). *How to sample in survey.* London: Sage.

Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. Dalam J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation*. New York: Guilford.

Gross, J.J., & Munoz, R.F. (1995). Emotion regulation and mental health. *American Psychological Association D12.* Diunduh 9 Januari 2014 dari http://spl.stanford.edu/pdfs/1995%20Clinical%20Psychology%20Science%20and%20Practice%20-%20Emo.%20Reg.%20and%20Mental%20Health.pdf

Hariri, A. R., & Forbes, E. E. (2007). Genetics of Emotion Regulation. Dalam J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation* (hal. 110-134). New York: Guilford.

Hayes, N. (2010). *Doing psychological research*. Buckingham: Open University Press.

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluation at four levels.* San Fransisco: Berret & Koehler Publishser.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Psikoedukasi.

Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan kualitaif dalam penelitian psikologi*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Ryan, H. (2013, May 25). *'Chains free' mental health campaign in Indonesia may end pasung.* Diunduh 26 Juni 2014 dari Pacificscoop.co.nz: http://pacific.scoop.co.nz/2013/05/chains-free-mental-health-campaign-in-indonesia-may-end-pasung/

Roeser, R.W. (1999). Academic functioning and mental health in adolescence: Patterns, Progressions, and routes from childhood. *Journal of Adolescent Research, 14* (2), 135-174.

Saxena, P., Dubey, A., & Pandey, R. (2011). Role of emotion regulation. Difficulties in predicting mental health and well-being. *SIS J. Proj. Psy. & Mental Health, 18,* 147-155.

Schoolmentalhealth.org. (tanpa tahun). *Fact sheet on school mental health services*. Diunduh 26 Juni 2014 dari http://schoolmentalhealth.org.

Siberman, M. (1998). *Active training: A handbook of techniques, design, case examples, and tips*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass.

Supratiknya (2011). *Merancang program dan modul psikoedukasi*. Yogyakarta: Universitas Sanartha Dharma.

Thompson, R.A. (1994). Emotion regulation: a theme in search of definition. *Monographs of The Society for Research in Child Development, 59*(23), 25-52.

Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Welsh, K.A. (2010). *Emotion regulation, risk taking and experiential learning: A methodological exploration.* Disertasi tidak dipublikasikan, University of Texas, Austin.

World Health Organization. (1990). *Global burden of disease study.* WHO Publication.

World Health Organization. (2006, October). *45th edition basic document, supplement*. Diunduh 17 Sesember 2013 dari http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf.

Komnas PA: Sepanjang 2012, 13 anak bunuh diri karena putus cinta (2012). Diunduh 10 Februari 2014 dari News.detik.com: http://news.detik.com/read/2012/12/21/164521/2124791/10/komnas-pa-sepanjang-2012-13-anak-bunuh-diri-karena-putus-cinta.

17
Revolusi Mental Dimulai dari Keluarga: Upaya Menyembuhkan Diri (*Healing*) dari *Internalized Racism*

Anastasia Satriyo

Tulisan ini berangkat dari pengalaman pribadi penulis yang memperlihatkan bagaimana *stereotype* itu disosialisasikan lewat *social learning* sehingga sejak kecil menjadi bagian diri individu dan dapat terinternalisasi dan menjadi salah satu *value* yang dibawanya ke masa dewasa.

***Internalized racism* di tengah kebhinekaan**

Suatu hari saat jam istirahat di kelas 3 SD, saya berbincang dengan tiga orang teman di pinggir lapangan olahraga. Entah apa topik obrolan awal kami, tapi kemudian perbincangan berlanjut dengan teman saya berkata seperti ini, "Kata mama aku, nanti kalau udah besar aku nikah aku bolehnya nikah sama yang Cina aja." Lalu saya bertanya, "Kenapa hanya boleh sama orang Cina aja? Kan orang di dunia ini beraneka ragam?" Ia menjawab, "Nggak tau. Pokoknya kata mama aku gitu, aku kalau udah besar nanti menikah harus menikah dengan orang Cina."

Saat di bangku SMP sepulang sekolah, saya melihat pertengkaran dua Ibu yang ternyata dipicu karena dua anak laki-laki mereka berkelahi di sekolah saat jam pelajaran. Kedua Ibu tersebut saling beradu mulut karena tidak terima anaknya dipukul oleh anak yang lain. Mereka beradu mulut dengan penuh emosi, mengeluarkan amarah tanpa berusaha mencari solusi dari permasalahan lalu di detik-detik akhir adu mulut mereka kehabisan kata-kata. Di saat kehabisan kata-kata ini, mereka saling melontarkan kalimat umpatan yang membawa identitas etnis mereka masing-masing. "Dasar orang Batak!", kata ibu yang satu. "Dasar orang Cina!", balas ibu yang satunya lagi. Lalu keduanya saling bertatap-tatapan dengan garang sambil memeluk anak masing-masing. Setelah itu keduanya pulang ke arah yang berlawanan tanpa penyelesaian masalah. Saya yang menyaksikan peristiwa ini hanya

bisa menatap nanar dan tercenung. Peristiwa yang saat itu tidak bisa saya pahami dan jelaskan dengan kata-kata namun terpatri dalam ingatan dan batin.

Lalu di tahun ini, ketika bangsa kita sedang riuh dengan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Kepala Daerah isu rasisme mencuat dalam kehidupan politik, masyarakat dan mengisi ruang-ruang media. Perbincangan mengenai siapa calon pemimpin yang kompeten sering dikaitkan dengan identitas suku calon pemimpin. Tak jarang isu rasisme dipakai oleh kelompok organisasi masyarakat tertentu untuk menjatuhkan dan menunjukkan penolakan terhadap calon pemimpin daerah tertentu. Mengapa isu rasisme ini begitu seksi sebagai bola panas yang dapat memengaruhi opini publik terhadap calon pemimpin?

Di tahun ini, saya juga sempat mengajar kelas Bina Iman Anak di gereja. Perkenalan pertama saya dengan anak-anak berusia 6-10 tahun tersebut disambut dengan pertanyaan, "Kakak orang apa?" Saya mencoba memperjelas, "Maksudnya orang apa gimana?". "Iya, maksudnya suku apa gitu kak?" Saya jawab, "Saya orang Indonesia". Jawaban saya ini tampaknya tidak memuaskan mereka. Mereka bertanya lagi, "Iya, kak orang Indonesia tapi sukunya apa?". Saya terperangah. Dalam kurun waktu 10 tahun saya bisa mendapat pertanyaan yang sama dari sekelompok anak-anak yang mempertanyakan identitas kesukuan. Pertama saya mendapat pertanyaan seperti ini dari teman-teman sekolah saya. Sepuluh tahun kemudian, saya ditanya seperti ini oleh anak-anak yang seusia teman-teman sekolah saya dahulu. Sama-sama bertanya hal yang sama, "Sukunya apa" lalu merasa menemukan kelegaan dan kenyamanan ketika saya menjawab suku yang sama dengan mereka. Di ruang kelas Bina Iman, saya menjawab, "Ayah saya Jawa, Ibu saya Keturunan Tionghoa." Lalu seorang anak berceletuk dari arah belakang, "Sama dong aku orang Jawa juga." Wajah-wajah anak yang lain terlihat diam dan sedikit bingung. Lalu saya menjawab kembali, "Teman-teman saya ada yang orang Batak, orang Manado, orang Padang, orang Ambon dan orang Flores". Lalu wajah anak-anak lain yang sukunya mungkin terwakili menunjukkan raut wajah sumringah.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tersendiri dalam diri saya, mengapa isu suku menjadi begitu penting untuk masyarakat Indonesia. Secara spesifik mengenai identitas kesukuan (*cultural identity*), rasisme dan prasangka (*prejudice*) antar suku. Topik ini merupakan hal yang penting untuk bangsa Indonesia yang terdiri dari suku yang beraneka ragam. Kehidupan di kota-kota besar mempertemukan orang dari berbagai suku serta agama untuk hidup bertetangga di lingkungan rumah, berteman di lingkungan sekolah dan di lingkungan kerja atau sekedar berpapasan di jalan.

Internalized racism dan penanaman nilai

Sejak tahun 1930an, rasisme telah menjadi topik yang diperbincangkan dalam Psikologi Sosial (Augostinos, 2013). Rasisme dipandang sebagai isu yang kompleks dan memerlukan berbagai perspektif untuk memahami rasisme yang terentang dari tataran internalisasi individu hingga memengaruhi struktur dan keputusan politik sampai sikap antar kelompok. Oleh karena itu, pemahaman dan penelitian mengenai isu rasisme, prasangka antar kelompok dan identitas kesukuan dalam hidup bersama yang penuh keanekaragaman perlu menjadi salah satu perhatian jika ingin menciptakan Revolusi Mental dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia.

Rasisme dapat didefinisikan sebagai prasangka dan diskriminasi, berbagai tingkah laku aksi maupun sikap yang mensubordinasi seseorang atau kelompok karena ras, warna kulit atau etnisitas. Rasisme merupakan *belief* yang dimiliki individu maupun sekelompok individu yang melihat orang yang berbeda ras lebih inferior atau superior sehingga memunculkan perilaku diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja, institusi maupun dalam masyarakat. Rasisme muncul sebagai konsep yang dibentuk dan dipelajari kemudian muncul dalam perilaku sebagai prasangka (*prejudice*). Prasangka adalah sikap, opini dan perasaan menyukai (*favorable*) atau tidak menyukai (*favorable*) mengenai seseorang atau suatu kelompok yang dibentuk tanpa pengetahuan, alasan dan pemikiran tertentu.

Rasisme muncul dalam bentuk *individualized racism* dan *institutional racism. Racism* muncul secara *overt* maupun *covert*. Rasisme yang muncul secara *overt* dilakukan oleh individu yang menyebabkan kematian, cedera dan luka serta kerusakan bangunan tempat tinggal atau sarana publik lainnya. Rasisme yang muncul secara *covert*, tidak terlihat secara terbuka dan muncul dalam masyarakat melalui lembaga maupun kekuatan yang dihormati di masyarakat.

Di Indonesia rasisme yang muncul secara individual dan *overt* terjadi dalam bentrokan antar etnis di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat antara etnis Bali dan etnis Sumbawa ("Bentrokan antar-etnis, 2013). Setahun sebelumnya juga terjadi bentrokan antar warga dari etnis Bali dan Lampung di Lampung Selatan ("Tawuran Antarwarga, 2012) dan bentrokan antara kelompok Betawi dan warga Ambon di Depok ("FBR dan Warga Ambon", 2012). Peristiwa bentrokan antar etnis yang paling lama dan memakan korban paling besar adalah kerusuhan Sampit di tahun 2001 antara warga etnis Madura dengan Dayak yang masih memengaruhi kehidupan bermasyarakat hingga sekarang. Sepuluh tahun setelah

kerusuhan Sampit, warga Dayak masih menolak kehadiran pendatang dari Madura yang ingin tinggal di dekat mereka ("Warga Cempaka", 2010).

Rasisme yang muncul secara *covert* terlihat dalam ajang pencarian bakat yang marak disiarkan di televisi. Calon penyanyi yang berbakat meminta dukungan dari masyarakat yang berlatar belakang suku atau asal daerah yang sama dengan dirinya. Padahal jika ingin menghasilkan penyanyi atau pekerja seni yang memang kompeten dan berbakat seharusnya bakat si penyanyi itu sendiri yang digunakan untuk menggalang dukungan. Bukan semata karena asal daerah atau suku yang sama. Lalu pada tahun 2014 ini muncul pernyataan sikap dari Forum Betawi Rempuk (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan unjuk rasa menolak Ahok menjadi gubernur dengan alasan karena Ahok beretnis Tionghoa.

Rasisme merupakan prasangka yang muncul bersama dengan kekuatan (*power*) sehingga penting untuk memahami bagaimana prasangka (*prejudice*) dapat dimiliki oleh individu sebagai bagian dari kelompok. Individu memelajari bagaimana bersikap dan menyesuaikan diri di dalam kelompok masyarakat melalui proses sosialisasi yang dialami sejak kelahirannya sampai dewasa. Sosialisasi yang pertama dialami oleh individu adalah sosialisasi di dalam keluarga sehingga penulis memiliki hipotesa bahwa prasangka juga dipelajari dan disosialisasikan pertama kali kepada individu melalui sosialisasi di dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan teori Aboud (1988 dalam Briscoe, 2003) tentang *socio-cognitive developmental theory* yang menjelaskan perkembangan anak dalam memahami prasangka. Perkembangan anak memahami prasangka sejalan dengan perkembangan kemampuan kognitifnya berdasarkan tahap perkembangan Piaget (Briscoe, 2003). Orang tua dan keluarga menjadi agen sosialisasi pertama bagi anak dalam mensosialisasikan pemahaman mengenai prasangka pada anak. Proses sosialisasi merupakan pembelajaran seumur hidup tentang bagaimana menjadi anggota dari kelompok sosial mulai dari kelompok sosial terkecil, yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat, warga suatu negara sampai menjadi bagian dari warga dunia. Sosialisasi dipelajari melalui interaksi antar manusia (Sage Publication, 2012). Melalui *social world model* dapat dilihat berbagai lapisan dalam interaksi sosial yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Sejalan dengan pengalaman interaksi dan sosialisasi, manusia mengembangkan pemahaman tentang dirinya sendiri (*development of the self*).

Proses sosialisasi di tingkat mikro melibatkan interaksi antara Orang tua terhadap anak dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma dan sistem kepercayaan yang dianut. Hasil dari proses sosialisasi adalah *self* (diri individu). Secara mendasar, *self* merujuk pada persepsi yang dimiliki oleh diri kita sendiri mengenai siapa diri kita. Melalui proses sosialisasi terjadi interaksi dan pembentukan persepsi berdasarkan bagaimana orang lain merespons diri
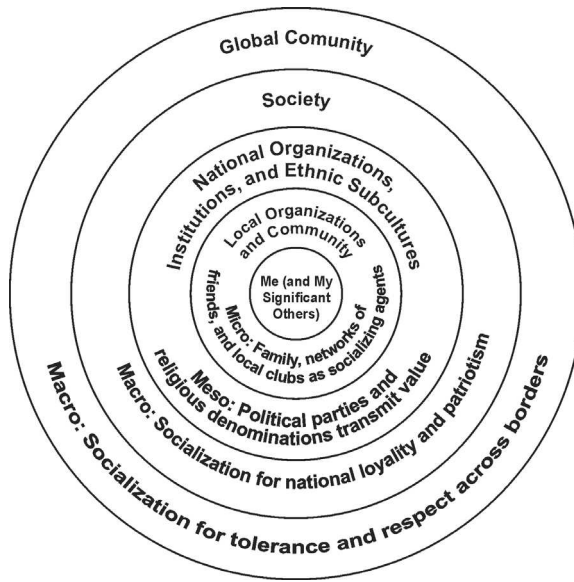
Gambar 1. *Social World and Level of Analysis* dari Chapter 4 "Socialization" Sage Publication (2012)

kita. Perkembangan dari *self* membantu individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar bagaimana berfungsi di tiap tahap dari *social world*.

Terkait dengan sosialisasi dari prasangka (*prejudice*) yang dilakukan di tingkat mikro, pada akhirnya akan memunculkan *internalized racism* yang dapat mengarah pada *self-degradation* dan *self-alienation*. *Internalized racism* menurut Lipsky (2007) adalah *"personal conscious or subconscious acceptance of the dominant society's racist views, stereotypes and biases of one's ethnic group. It gives rise to patterns of thinking, feeling and behaving that result in discriminating, minimizing, criticizing, finding fault, invalidating, and hating oneself while simultaneously valuing the dominant culture."*

Kontribusi Psikologi dalam Proses Pembentukan Identitas Diri

Ketika interaksi dan sosialisasi di dalam keluarga dapat membentuk pemaknaan baru terhadap identitas diri yang tak hanya menekankan pada identitas kesukuan yang berujung pada superioritas suku sendiri (*etnosentrisme*) dan memandang rendah pada suku yang lain. Lupa bahwa berbagai kelompok suku yang beragam di Indonesia memiliki benang merah ideologis yang menyatukan sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Ilmu Psikologi dapat berperan dalam membantu setiap individu yang menjadi agen sosialisasi

di dalam berbagai tingkatan *social world* dan *level of analysis* untuk membantu terciptanya Revolusi Mental dalam diri individu maupun kelompok. Di tataran individu, ilmu psikologi membantu proses *healing* pada individu sehingga mampu menerima pengalaman masa lalu untuk mengkonstruksi gambaran diri yang positif di masa sekarang. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh individu membuatnya mampu menerima kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri tanpa perlu mendegadrasi orang lain apalagi menstereotipe orang lain hanya berdasarkan identitas suku dan kelompok yang belum tentu benar. Ilmu psikologi juga dapat membantu Orang tua dalam pengasuhan kepada anak sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhkembangan identitas diri (*self identity*) yang sehat pada anak sehingga di kemudian hari dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang tidak menilai individu hanya berdasarkan suku dan ras semata, memiliki mekanisme pengelolaan emosi yang sehat dan mampu mengatasi konflik lewat dialog bukan dengan kekerasan. Di tataran meso, ilmu psikologi dapat ikut memberikan intervensi di tingkat sekolah untuk mencegah dan merekonsiliasi perilaku *bullying* serta mengajarkan *living values* PBB sebagai landasan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kerja sama Orang tua dan sistem sosial yang lebih luas di sekitar anak seperti sekolah dan institusi agama dalam membentuk pandangan bahwa setiap manusia sama-sama bernilai dan bermartabat, bukan hanya menilai manusia dari suku, ras atau agama dibutuhkan sehingga dapat menciptakan individu-individu di dalam masyarakat Indonesia yang dapat menghargai keunikan dan keberagaman, yang dapat menghargai ke-Bhinneka-an.

Menurut saya pribadi, keberhasilan dari Revolusi Mental di Indonesia salah satunya adalah terjadinya *healing* dari *internalized racism* dan mulai mendefinisikan diri (*self*) diri sendiri maupun menilai orang lain berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat, keunikan dan keberagaman manusia yang memiliki potensi, kompetensi dan kualifikasi diri yang unik sebagai individu. Revolusi Mental terjadi ketika seorang anak menceritakan atau memperkenalkan teman kepada Orang tuanya di rumah, pertanyaan pertama yang diberikan oleh Orang tua bukan lagi "Teman kamu sukunya apa?" tapi bagaimana temannya tersebut berteman dengan anaknya, bagaimana ia bersikap dan memperlakukan orang lain, bagaimana sehari-hari perilakunya di kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak semakin mengenal individu temannya sebagai pribadi dan diri yang unik. Dari pengalaman sehari-hari yang menilai orang dari potensi dan kompetensi diri bukan karena sukunya semata, anak akan belajar dan tersosialisasi hingga dewasa nantinya untuk dapat memilih Kepala Daerah atau pemimpin di berbagai sektor bukan hanya karena stereotipe terhadap suku tertentu. Anak juga mampu menghargai teman dan orang-orang di lingkungan sekitarnya yang beragam dengan perasaan aman bukan tanpa prasangka. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang mengancam tetapi sebagai realita hidup yang dialami

sehari-hari sebagai konsekuensi hidup di negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangir-Talaud sampai Pulau Alor.

Proses sosialisasi di dalam keluarga menjadi krusial dalam menciptakan Revolusi Mental pada diri individu maupun di tingkat masyarakat. Keluarga dimulai dari Orang tua yang mensosialisasikan dan mentransmisikan nilai-nilai dan harapan masyarakat kepada anak. Orang tua dimulai dari pasangan individu dewasa yang berkomitmen untuk membentuk keluarga dan terlibat dalam prokreasi untuk melahirkan generasi dan kehidupan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Maka revolusi mental dimulai dari individu dewasa yang memiliki kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman yang hidup di dalam keluarga maupun masyarakat secara simultan. Saya bermimpi suatu hari Indonesia beserta elemen masyarakat, kelompok, keluarga dan individu di dalamnya berada pada kondisi di mana kita menghargai dan menerima keberagaman sebagai realita.

Beberapa langkah praktis sudah mulai dilakukan. Di antaranya keluarga-keluarga dengan Orang tua yang memiliki kesadaran akan isu *internalizd racism* ini dengan sadar memaparkan anak dengan keberagaman di lingkungan sekitarnya. Anak juga melihat sendiri contoh konkrit dari Orang tua yang berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama dan status sosial-ekonomi. Ini menjadi pintu masuk pembentukan diri (*self*) anak melalui *modeling*. Dialog antara Orang tua dan anak juga memfasilitasi anak untuk memahami fenomena yang terjadi di sekitarnya sekaligus menyadari pula reaksi psikis dan batinnya sendiri. Anak belajar menyaring sosialisasi nilai-nilai (*values*) yang ia peroleh dari lingkungan sekitarnya dengan *values* yang ia miliki sendiri.

Di sekolah-sekolah, kegiatan *Live In* dan Bakti Sosial menjadi kesempatan bagi anak-anak sebagai peserta didik untuk mengalami interaksi dan melihat kehidupan dari kelompok orang yang berbeda dari yang ia temui sehari-hari. Berdasarkan penjelasan dari teori kontak sosial, semakin sering terjadi kontak sosial dengan kelompok yang berbeda semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan dalam persepsi terhadap suatu kelompok yang pada akhirnya mengurangi *stereotyping* dan *racism*.

Di lingkungan masyarakat, telah ada kelompok masyarakat bernama Sabang Merauke yang menggagas suatu program pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia dengan tujuan membuka cakrawala anak-anak Indonesia untuk menanamkan nilai ke-bhinneka-an sehinga mereka dapat memahami, menghargai, serta menerima keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ("Sabang Merauke", 2015).

Kegiatan ini dilakukan selama waktu libur sekolah yang mengajak anak-anak dari berbagai daerah untuk tinggal di daerah lain selama dua minggu. Selama masa pertukaran

ini, anak-anak akan tinggal bersama keluarga angkat yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan pencapaian penghidupan yang baik sehingga bisa menjadi panutan dalam hidup anak. Setelah melakukan program selama dua minggu, anak-anak difasilitasi untuk memaknai pengalaman yang telah dialami pasca program. Proses *debriefing* seperti ini membantu anak-anak memahami dan memaknai pengalaman barunya sehingga dapat merekonstruksi sekaligus menginternalisasi nilai-nilai keberagaman dalam dirinya. Komunitas Sabang Merauke sendiri berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia memiliki keragaman etnis, budaya, agama serta bahasa yang memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa yang besar namun menghadapi tantangan. Salah satunya, bahwa keberagaman di Indonesia masih menjadi hal yang tabu untuk didiskusikan. Berbagai konflik yang berkaitan dengan kesukuan dan keagamaan masih dianggap sebagai topik yang sensitif untuk dibicarakan secara terbuka dalam suasana yang terbuka dan kondusif.

Di tataran pemerintah, melalui program Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia materi dan topik tentang keberagaman dapat menjadi salah satu topik bahasan dalam kegiatan pembelajaran di pelajaran sosial, budaya dan pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan konkrit yang dapat dipraktikkan langsung oleh anak-anak sebagai peserta didik. Paradigma ke-bhinneka-an seharusnya menjadi ruh yang melandasi pendidikan anak-anak Indonesia, baik formal maupun informal. Proses penyadaran ini (awakening) ini niscaya akan membantu terciptanya Revolusi Mental di Indonesia yang poros utama perubahannya dimulai dari keluarga. Sungguh ironis melihat masyarakat Indonesia yang hakikat dan kenyataannya merupakan bangsa dengan masyarakat yang penuh keberagaman namun paradigma yang ditumbuhkan dan disosialisasikan adalah paradigma kesukuan yang bersifat etnosentrisme maupun primordialis. Kita adalah bangsa majemuk kelautan yang menggunakan paradigma *continent* seakan-akan kita ini sama dalam cara hidup, berkegiatan dan mencari nafkah, demikian Anies Baswedan pernah berujar dalam salah satu pidatonya. Justru karena kita berbeda-beda maka keberagaman seharusnya menjadi landasan dalam bagaimana kita mempersepsikan diri, orang lain, dan dunia di sekitar kita (*world view*) yang pada akhirnya memengaruhi keputusan-keputusan hidup sehari-hari dan cara kita berperilaku serta berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita.

Daftar Acuan

Augostinos, M. (2013)."Psychological perspective on racism" diakses dari http://www.psychology.org.au/Content.aspx?ID=5271# tanggal 15 Desember 2014.

Autry, S. (2010). Racial socialization and racial identity construction of African American children regarding racial issues and prejudice (Disertasi). *California Lutheran University*. Diakses dari http://search.proquest.com/docview/822780199/489ED723AC8C48A1PQ/1?accountid=17242

Bobo, L., & Fox, C. (2003). Race, racism, and discrimination: Bridging problems, methods, and theory in Social Psychological Research. *Social Psychology Quarterly*. 66, 319-332.

Briscoe, A. (2003). The Interrelationships among parental racial identity, racial socialization, and children's prejudice and tolerance (Disertasi). *University of California*. Diakses dari http://search.proquest.com/docview/305211846/FAB4ABA075D64EEEPQ/14?accountid=17242 tanggal 15 Desember 2014.

Sage Publication (2012). Socialization: Becoming human and humane diakses dari http://www.sagepub.com/upm-data/45619_4.pdf tanggal 15 Desember 2014.

Lipzky, S. (2007). Internalized racism. Diakses dari http://www.nypolisci.org/files/PDF%20FILES/Chapter%20IV_%207_%20internalized%20racism.pdf tanggal 15 Desember 2014.

Hatta, R. (22 Januari 2013)."Bentrokan antar etnis terjadi di Sumbawa". *Liputan 6*. Diakses dari http://news.liputan6.com/read/494122/bentrok-antar-etnis-terjadi-di-sumbawa tanggal 15 Desember 2014.

Harjono, Y. (28 Oktober 2012). "Tawuran antarwarga kembali pecah di Lamsel". *Kompas.com*. Diakses dari http://regional.kompas.com/read/2012/10/28/12522399/Tawuran.Antarwarga.Kembali.Pecah.di.Lamsel tanggal 15 Desember 2014.

Rahman, K. (17 Juli 2010). "Warga Cempaka Kalimantan Selatan tolak pendatang dari Madura". *Tempo.co*. Diakses dari

http://www.tempo.co/read/news/2010/07/17/179264187/Warga-Cempaka-Kalimantan-Selatan-Tolak-Pendatang-dari-Madura tanggal 15 Desember 2014.

Tentang Kami (2 Februari 2015). Diakses dari www.sabangmerauke.org.

Tirta, I. (18 November 2010). "FBR dan Warga Ambon bentrok di Depok". *Tempo.co.* Diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2012/11/18/064442484/FBR-dan-Warga-Ambon-Bentrok-di-Depok tanggal 15 Desember 2014.

18
Pengembangan *Social Stories* Punakawan: Media Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal

Listyo Yuwanto

Pentingnya Pendidikan Karakter

Pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi diri individu sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan. Pendidikan yang ideal meliputi pengembangan area kognitif dan afeksi sehingga seharusnya terjadi keseimbangan antara pendidikan intelektual dan karakter untuk membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan luhur.

Salah satu isu nasional pendidikan saat ini adalah upaya peningkatan karakter positif. Banyak kasus menunjukkan produk pendidikan nasional yang selama ini terlalu menekankan pendidikan kognitif berdampak pada lemahnya karakter (Yuwanto, 2012a). Pendidikan karakter menekankan pada pembentukan ataupun pengembangan karakter positif, kemampuan sosial dan emosi individu (Richardson, Tolson, Huang, & Lee, 2009). Beberapa bentuk karakter positif antara lain berpikir kritis, kejujuran, keadilan, bertanggungjawab, komitmen untuk pengembangan karakter positif lainnya (Battistich, Schaps, Watson, Solomon, & Lewis, 2000).

Usia dini merupakan masa emas (*golden age*) dalam mempelajari sesuatu yang dapat menjadi prediksi keberhasilan/perilaku yang positif anak pada tahap berikutnya. Pendidikan anak usia dini diharapkan dapat mengembangkan potensi positif anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama dengan dimilikinya karakter yang bertanggungjawab, disiplin, jujur, peduli, serta tangguh.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang pendidikan anak usia dini yang menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan non formal (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2013a). Pendidikan Anak

Usia Dini di Indonesia memiliki batasan usia yaitu pendidikan bagi anak-anak berusia 0-6 tahun (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2013b). Sejak lahir hingga usia 2 tahun, anak berada pada tahapan sensori motor yang berarti bahwa anak belajar melalui sensorinya. Mulai usia 3 tahun hingga 6 tahun anak berada pada tahapan pra-operasional konkrit yang berarti bahwa anak mulai belajar mengenali objek menggunakan kata-kata. Pada tahapan ini, kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Aplikasinya, pendidikan karakter anak usia dini harus disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, meliputi proses belajar, bentuk stimulasi, ataupun target belajar yang ditetapkan.

Media Pendidikan Karakter

Terdapat beberapa jenis media yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan karakter pada anak-anak usia dini (Yuwanto, 2012a):

1. *Cerita bergambar.* Cerita bergambar seperti komik seharusnya dapat menjadi media pendidikan karakter. Membuat cerita bergambar menjadi media pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara membuat ceritanya semenarik mungkin, mengandung cerita kehidupan sehari-hari, bersifat pendek, dan menonjolkan isi pendidikan karakter yang menjadi target penyampaian. Pada akhir cerita bisa diberikan sesi untuk tanya jawab tentang muatan pendidikan karakter utamanya, yaitu karakter positif atau negatif yang ada pada cerita.

2. *Mewarnai gambar.* Anak usia dini sangat menyukai aktivitas mewarnai gambar. Pendidikan karakter dapat disampaikan menggunakan media mewarnai gambar. Sekarang ini terdapat buku mewarnai gambar dengan disertai cerita. Buku semacam ini bisa sedikit dimodifikasi dengan cara memberikan muatan pendidikan karakter pada cerita yang terdapat didalamnya. Pada bagian akhir Orang tua bisa memberikan penjelasan tentang gambar yang telah diwarnai dan memberikan penjelasan karakter positif atau negatif yang terdapat dalam buku mewarnai gambar yang dilengkapi dengan cerita.

3. *Dongeng.* Cerita dongeng dapat dijadikan sarana pendidikan karakter dengan cara memasukkan ke dalamnya pendidikan karakter yang akan disampaikan kepada anak-anak seperti pada cerita bergambar ataupun mewarnai gambar. Setelah mendongeng, pendidik harus melakukan dialog dengan anak-anak tentang karakter positif atau negatif yang ada di dalam dongeng.

4. *Wayang* atau *boneka*. Media wayang atau boneka merupakan media yang menarik bagi anak-anak karena sifatnya yang konkret, lucu, dan memungkinkan terjadinya dialog antara tokoh wayang atau boneka dengan anak-anak. Tokoh wayang atau boneka yang mewakili karakter positif dapat menjadi model bagi anak-anak.

5. *Musik* dan *drama*. Musik yang ceria dan drama yang menarik juga dapat menjadi media pendidikan karakter bagi anak-anak. Lirik lagu ataupun dialog drama memiliki kekuatan besar untuk menyampaikan pendidikan karakter. Yang paling penting, harus terjadi dialog antara anak-anak dan penyampai pendidikan karakter.

6. *Social stories*. *Social stories* adalah rangkaian cerita pendek yang dibuat dengan memperhatikan sudut pandang siswa dan mengandung instruksi-instruksi tentang perilaku positif. Cerita pendek ini terdiri atas 4-6 kalimat pendek yang menggambarkan sebuah situasi sosial, kemungkinan reaksi orang dalam situasi tersebut, dan pernyataan direktif mengenai respons sosial yang diharapkan ataupun yang seharusnya dilakukan. Cerita semacam ini memberikan informasi tentang sesuatu yang terjadi pada suatu situasi, penyebabnya, dan apa yang seharusnya dilakukan yang dirancang/dibuat sesuai tingkat perkembangan individu (Thieman & Goldstein, 2001). *Social stories* dapat disajikan dalam bentuk teks/bacaan atau dapat dipadukan dengan gambar sederhana, *clip art* atau foto untuk mendukung pemahaman anak-anak. Juga dapat dikombinasikan dengan boneka dalam penyampaiannya sehingga menjadi lebih konkret dan menarik minat anak-anak.

Semua media pendidikan karakter di atas sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Aplikasi masing-masing media dalam pendidikan karakter anak usia dini harus diusahakan agar sungguh-sungguh sesuai dengan karakteristik kelompok anak usia dini yang dihadapi, khususnya terkait sifatnya yang harus menarik dan konkret. Di bagian berikut akan diuraikan salah satu bentuk aplikasi *social stories,* khususnya *Social Stories* Punakawan.

Sejarah *Social Stories* Punakawan

Ide penggunaan *social stories* Punakawan sebagai media pendidikan karakter anak usia dini berawal dari program *trauma healing* anak-anak pengungsi erupsi Gunung Merapi di Shelter Gondang I Wukirsari Cangkringan Sleman tahun 2011 dengan menggunakan media Punakawan (Yuwanto, Adi, & Karlinda, 2013). Pasca program *trauma healing* Yuwanto (2012c) mengembangkan *social stories* Punakawan sebagai media pendidikan

karakter anak usia dini. *Social stories* Punakawan sebagai media pendidikan karakter anak usia dini mengalami tiga pengembangan berdasarkan hasil evaluasi kemanfaatannya. Pengembangan pertama berfokus pada adaptasi *social stories*, dialog interaktif antara anak-anak dan pembawa *social stories*, serta narasi penutup karakter yang ditanamkan. Pengembangan kedua berfokus pada penerapan lagu tradisional bermuatan karakter dalam *social stories* Punakawan. Pengembangan ketiga menambahkan penerapan permainan tradisional bermuatan karakter dalam *social stories* Punakawan.

Pengembangan Pertama *Social stories* Punakawan

Pengembangan pertama *social stories* Punakawan berfokus pada adaptasi *social stories* asli menjadi *social stories* Punakawan. Adaptasi meliputi penyesuaian *script social stories* dalam bentuk dialog, pengadaan peraga menggunakan wayang kulit Punakawan, dan pengadaan narasi penutup sebagai rangkuman tentang karakter yang ditanamkan.

Pembuatan *social stories* tidak dapat dilepaskan dari karakteristik tokoh wayang yang lazim dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan nilai luhur budaya Jawa yang mendasari sikap dalam kehidupan sehari-hari. Punakawan adalah karakter yang unik dan khas dalam pewayangan di Indonesia (Yuwanto, 2012b). *Semar* digambarkan dengan bentuk yang

Gambar 1. Figur Punakawan yang terdiri atas Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong (Yuwanto, 2013).

samar-samar, bermuka pucat, dan menyimbolkan kesederhanaan, kejujuran, menyayangi orang lain, tidak gembira secara berlebihan ketika mendapatkan kebahagiaan dan tidak pula sedih secara berlebihan ketika mendapatkan kesulitan. *Gareng* digambarkan sebagai figur dengan bagian tubuh yang tidak sempurna berupa kekurangan pada bagian kaki, tangan, dan matanya. Karakter Gareng adalah berhati-hati dalam hidup, selalu menjaga perkataan dan perbuatan. Figur *Petruk* digambarkan dengan bagian-bagian tubuh yang panjang sebagai simbol berpikir panjang sebelum berperilaku dan sabar dalam menjalani kehidupan. *Bagong* memiliki bentuk seperti Semar namun berwarna hitam sebagai simbol kesederhanaan, kesabaran, dan selalu melakukan refleksi terhadap perilaku.

Cerita dalam *social stories* ini tidak seperti cerita asli pewayangan karena masih terlalu kompleks untuk dipahami oleh anak usia dini. Pendidikan karakter disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai moral yang lazim ditemui anak-anak. Hal ini memungkinkan proses belajar anak-anak yang melibatkan asimilasi (anak-anak merespons sesuai pengetahuan yang telah dimiliki) dan akomodasi (anak-anak menyerap pengetahuan baru tentang karakter). Anak usia dini dengan rentang usia antara 0-6 tahun berada pada tahap perkembangan kognitif *sensorimotor* dan *preoperational thinking*. Sensorimotor menekankan pada interaksi antara anak-anak dengan objek belajar secara langsung.

Aplikasinya adalah anak mempelajari pendidikan karakter dengan objek konkret wayang dalam cerita kehidupan sehari-hari yang ditemui anak. *Social stories* yang diberikan berupa cerita pendek sederhana sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan tahap perkembangan kognitif *preoperational thinking* anak-anak usia dini. Tahap *preoperational thinking* menekankan belajar konsep sederhana dan mengembangkan kemampuan konservas, yaitu kemampuan menyadari bahwa ukuran, jumlah, panjang, substansi, luas benda tertentu akan tetap sama meskipun direpresentasikan pada anak-anak dalam bentuk yang berbeda. Harapannya anak akan menerapkan karakter dari satu situasi pada situasi-situasi serupa yang membutuhkan penerapan karakter yang sama.

Social stories memiliki panduan sebagai berikut (Yuwanto & Anton, 2012):

1. Teks dibuat seminim mungkin, maksimal satu kalimat direktif dan tiga kalimat deskriptif dan atau kalimat perspektif.

2. Ditulis secara sederhana.

3. Pengaturan kata-kata dan kalimat harus menekankan konsep-konsep utama.

4. Kalimat deskriptif disusun dengan menggunakan istilah yang memungkinkan fleksibilitas agar dapat diterapkan dalam berbagai situasi.

Contoh *social stories* perilaku menolong:

> *Saya suka bermain*
> *Saat sedang bermain saya mendengar nama saya dipanggil*
> *Saya lalu mendatangi orang yang memanggil nama saya*
> *Ternyata orang yang memangil nama saya membutuhkan pertolongan*
> *Dia butuh kertas untuk menggambar*
> *Dia meminta tolong mengambilkan kertas yang berada di atas meja*
> *Saya mencoba mengambilkan kertas itu untuknya*
> *Setelah itu saya bisa bermain dan dia bisa menggambar dengan kertas yang saya ambilkan*
> *Saya senang bisa menolong*

Langkah-langkah dalam membuat *social stories* untuk pendidikan karakter anak usia dini dengan menggunakan wayang Punakawan adalah sebagai berikut:

1. Lakukan pengamatan (observasi) terhadap perilaku anak-anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Melalui observasi tersebut dapat ditentukan karakter positif atau negatif yang ditampilkan anak dalam bentuk perilaku. Karakter yang diperoleh melalui hasil observasi menjadi dasar penyusunan *social stories*.

2. Susunlah *social stories* berupa rancangan (*script*) dalam bentuk dialog.

3. Satu *script social stories* harus mengandung satu karakter yang akan disampaikan.

4. *Social stories* disesuaikan dengan karakter masing-masing tokoh punakawan. Jika yang hendak ditanamkan adalah karakter positif maka dipilih tokoh punakawan yang memiliki karakter positif.

5. Usahakan terjadi dialog antara pembawa *social stories* dan anak-anak usia dini, sehingga *script* harus mengandung bagian yang memungkinkan terjadinya interaksi.

6. Buatlah narasi yang memuat rangkuman karakter yang ditanamkan sebagai penutup.

   Contoh narasi sebagai penutup:

   Nah, senang adik-adik melihat cerita tadi? (menunggu jawaban dari anak-anak usia dini). Tadi di dalam cerita ada siapa saja ya? (Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng). Tadi siapa yang kehilangan buku ya? (menunggu jawaban dari anak-anak usia dini). Iya benar sekali Petruk kehilangan buku. Kemudian apa yang dilakukan Petruk? Kemudian apa yang dilakukan Bagong? (membantu Petruk mencari buku). Menurut adik-adik, Bagong membantu Petruk mencari buku termasuk perilaku yang baik?

Iya perilaku membantu yang dilakukan Bagong termasuk baik. Lain kali kalau yang meminta bantuan ke adik-adik seperti yang dialami Bagong, apa yang akan dilakukan? (membantu). Iya benar sekali membantunya. Setelah itu Bagong bisa main bola lagi.

Gambar 2. *Social Stories* Punakawan untuk Pendidikan Karakter Anak Usia Dini.

Tabel 1. Contoh *Script Social Stories* Punakawan untuk Penanaman Karakter Perilaku Menolong (Yuwanto & Batuadji, 2012).

Bagong	Halo, teman-teman nama saya Bagong, wah lapangan di sini luas ya, Bagong jadi ingin main bola
Gareng	Bagong... Bagong....
Bagong	Wah, lagi enak-enaknya Bagong main bola, ada yang panggil-panggil Bagong, nih, siapa ya yang panggil-panggil? Eh ternyata Kak Gareng.. ada apa Kak Gareng?
Gareng	Gong, Kak Gareng lagi membantu Kak Petruk mengerjakan PR, tapi Kak Gareng lupa meletakkan buku kamus, tolong Kak Gareng dong mencari buku kamus
Bagong	Waduh Kak Gareng dan Kak Petruk butuh bantuan Bagong nih, Bagong sedang asyik main bola. Bagaimana ya? Bagong harus bagaimana nih teman-teman? Bantuin nggak ya?
Semar	Bagong, kamu lagi apa kog seperti melamun?
Bagong	Eh Romo Semar, Bagong sedang bingung. Bagong sedang main bola, tapi Kak Gareng minta tolong Bagong mencari buku kamus untuk membantu Kak Petruk buat PR.
Semar	Bagong, lihat Kak Gareng, Kak Gareng menonton tv bersama Romo Semar, kemudian membantu Kak Petruk mengerjakan PR. Kalau Bagong membantu Kak Gareng mencari buku, PR nya Kak Petruk bisa cepat selesai, dan Bagong bisa main bola lagi

Bagong	Iya ya Romo, kalau begitu Bagong mencari buku dulu ya teman-teman membantu Kak Gareng (Bagong membantu mencari buku)... wah akhirnya ketemu, Kak Petruk, Kak Gareng ini buku kamusnya ketemu
Gareng	Wah terima kasih ya Bagong
Petruk	Iya Bagong, terima kasih ya, sekarang Kak Petruk bisa mengerjakan PR lagi
Bagong	Teman-teman Bagong senang bisa membantu mencari buku, sehingga Kak Gareng bisa membantu Kak Petruk mengerjakan PR. Sekarang ayo Bagong main bola lagi...

Pengembangan Kedua *Social stories* Punakawan: Lagu Tradisional

Budaya Jawa memiliki kekayaan ragam seni, salah satu di antaranya adalah lagu tradisional Jawa. Seiring perkembangan jaman, lagu tradIsional Jawa semakin jarang dinyanyikan karena tergerus oleh perkembangan jaman. Anak-anak lebih sering menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Lagu tradisional Jawa menggambarkan ekspresi perasaan, aspirasi pemikiran ataupun nuansa psikologis yang tetap dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengikuti perkembangan jaman. Lagu tradisional Jawa atau yang sering dikenal dengan lagu dolanan anak memiliki nilai budaya dan pekerti yang sangat luhur.

Penyusunan *social stories* Punakawan dengan menambahkan lagu tradisional didasarkan pada prinsip bahwa perilaku atau karakter positif yang ditanamkan harus sesuai dengan muatan lagu tradisional yang diajarkan dan dinyanyikan bersama dalam sesi *social stories* Punakawan.

Contoh narasi sebagai penutup:

Nah, senang adik-adik melihat cerita tadi? (menunggu jawaban dari anak-anak usia dini). Tadi di dalam cerita ada siapa saja ya? (Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng). Tadi siapa yang kehilangan buku ya? (menunggu jawaban dari anak-anak usia dini). Iya benar sekali Petruk kehilangan buku. Kemudian apa yang dilakukan Petruk? Kemudian apa yang dilakukan Bagong? (membantu Petruk mencari buku). Sambil mencari buku, Bagong menyanyikan lagu Gugur Gunung bersama adik-adik semua, nah tahu tidak makna lagu itu apa? Saling membantu, bersatu, rukun, bahu-membahu, bergotong-royong, dan ikhlas.

Menurut adik-adik, Bagong membantu Petruk mencari buku termasuk perilaku yang baik? Iya perilaku membantu yang dilakukan Bagong termasuk baik. Lain kali kalau yang meminta bantuan ke adik-adik seperti yang dialami Bagong, apa yang akan dilakukan? (membantu). Iya benar sekali membantunya.

Tabel 2. Contoh *Script Social Stories* Punakawan untuk Penanaman Karakter Perilaku Menolong dengan Pengembangan Lagu Tradisional

Bagong	Halo, teman-teman nama saya Bagong, wah lapangan di sini luas ya, Bagong jadi ingin main bola
Gareng	Bagong... Bagong....
Bagong	Wah, lagi enak-enaknya Bagong main bola, ada yang panggil-panggil Bagong, nih, siapa ya yang panggil-panggil? Eh ternyata Kak Gareng.. ada apa Kak Gareng?
Gareng	Gong, Kak Gareng lagi membantu Kak Petruk mengerjakan PR, tapi Kak Gareng lupa meletakkan buku kamus, tolong Kak Gareng dong mencari buku kamus
Bagong	Waduh Kak Gareng dan Kak Petruk butuh bantuan Bagong nih, Bagong sedang asyik main bola. Bagaimana ya? Bagong harus bagaimana nih teman-teman? Bantuin nggak ya?
Semar	Bagong, kamu lagi apa kog seperti melamun?
Bagong	Eh Romo Semar, Bagong sedang bingung. Bagong sedang main bola, tapi Kak Gareng minta tolong Bagong mencari buku kamus untuk membantu Kak Petruk buat PR.
Semar	Bagong, lihat Kak Gareng, Kak Gareng menonton tv bersama Romo Semar, kemudian membantu Kak Petruk mengerjakan PR. Kalau Bagong membantu Kak Gareng mencari buku, PR nya Kak Petruk bisa cepat selesai, dan Bagong bisa main bola lagi
Bagong	Iya ya Romo, kalau begitu Bagong mencari buku dulu ya teman-teman membantu Kak Gareng

(Bagong membantu mencari buku)
Ayo teman-teman sambil mencari buku, kita menyanyi bersama judulnya Gugur Gunung, yang belum bisa mari mengikuti Bagong menyanyi (mengajak anak-anak usia dini)

Ayo (ayo) kanca (kanca) ngayahi karyane praja
Kene (kene) kene (kene) gugur gunung tandang gawe
Sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulya ning Negara
Siji (loro) telu (papat) maju papat-papat
Diulang-ulung ake pamrih enggal rampunge
Holobis kontul baris holobis kontul baris
Holobis kontul baris holobis kontul baris

Terjemahan:
Marilah (marilah) kawan (kawan) mengerjakan tugas negara
Kemarilah bahu-membahu/bergotong royong bekerja
Menyatu, rukun bersama-sama dengan kawan
Bekerja dengan ikhlas untuk kejayaan negara
Satu dua tiga empat maju empat-empat
Dilakukan secara estafet agar pekerjaan segera selesai
Holobis kontul baris holobis kontul baris
Holobis kontul baris holobis kontul baris

Bagong	Wah akhirnya ketemu, Kak Petruk, Kak Gareng ini buku kamusnya ketemu
Gareng	Wah terima kasih ya Bagong
Petruk	Iya Bagong, terima kasih ya, sekarang Kak Petruk bisa mengerjakan PR lagi
Bagong	Teman-teman Bagong senang bisa membantu mencari buku, sehingga Kak Gareng bisa membantu Kak Petruk mengerjakan PR. Sekarang ayo Bagong main bola lagi...

Pengembangan Ketiga *Social stories* Punakawan: Permainan Tradisional

Pengembangan ketiga *social stories* Punakawan adalah dengan menambahkan permainan tradisional yang ada di dalam script *social stories*. Permainan tradisional Jawa memiliki nilai luhur pembentukan karakter namun mulai luntur dengan perkembangan jaman sehingga perlu dilestarikan. Dengan demikian *social stories* Punakawan pengembangan ketiga terdiri atas *social stories*, lagu tradisional, dan permainan tradisional. Harus terdapat konsistensi muatan karakter yang hendak ditanamkan antara *social stories*, lagu tradisional, dan permainan tradisional. Ringkasan pelaksanaan *social stories* Punakawan pengembangan ketiga adalah sebagai berikut: anak-anak akan mendengarkan *social stories*, terjadi dialog interaktif antara anak-anak dan pembawa *social stories*, mendengarkan dan menyanyikan lagu tradisional, belajar dan memainkan permainan tradisional, serta narasi penutup karakter yang hendak ditanamkan.

Contoh narasi sebagai penutup:

Nah, senang adik-adik melihat cerita tadi? (menunggu jawaban dari anak-anak usia dini). Tadi di dalam cerita ada siapa saja ya? (Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng). Tadi siapa yang kehilangan buku ya? (menunggu jawaban dari anak-anak usia dini). Iya benar sekali Petruk kehilangan buku. Kemudian apa yang dilakukan Petruk? Kemudian apa yang dilakukan Bagong? (membantu Petruk mencari buku). Sambil mencari buku, Bagong menyanyikan lagu Jaranan bersama adik-adik semua, nah tahu tidak makna lagu itu apa? Kita harus hormat dan santun kepada orang lain, selain itu kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama dengan orang lain. Menurut adik-adik, Bagong membantu Petruk mencari buku termasuk perilaku yang baik? Iya perilaku membantu yang dilakukan Bagong termasuk baik. Lain kali kalau yang meminta bantuan ke adik-adik seperti yang dialami Bagong, apa yang akan dilakukan? (membantu). Iya benar sekali membantunya. Nah, tadi kan Bagong mengajak teman-teman main jaranan, nah sebelum main jaranan bersama Bagong ayo kita belajar bermain jaranan dulu ya, (kemudian anak-anak usia dini diajarkan bermain jaranan, menari dengan menggunakan media jaranan terbut dari bambu).

Tabel 3. Contoh *Script Social Stories* Punakawan untuk Penanaman Karakter Perilaku Menolong dengan Pengembangan Lagu dan Permainan Tradisional.

Bagong	Halo, teman-teman nama saya Bagong, wah lapangan di sini luas ya, Bagong jadi ingin main bola
Gareng	Bagong... Bagong....
Bagong	Wah, lagi enak-enaknya Bagong main bola, ada yang panggil-panggil Bagong, nih, siapa ya yang panggil-panggil? Eh ternyata Kak Gareng.. ada apa Kak Gareng?
Gareng	Gong, Kak Gareng lagi membantu Kak Petruk mengerjakan PR, tapi Kak Gareng lupa meletakkan buku kamus, tolong Kak Gareng dong mencari buku kamus
Bagong	Waduh Kak Gareng dan Kak Petruk butuh bantuan Bagong nih, Bagong sedang asyik main bola. Bagaimana ya? Bagong harus bagaimana nih teman-teman? Bantuin nggak ya?
Semar	Bagong, kamu lagi apa kog seperti melamun?
Bagong	Eh Romo Semar, Bagong sedang bingung. Bagong sedang main bola, tapi Kak Gareng minta tolong Bagong mencari buku kamus untuk membantu Kak Petruk buat PR.
Semar	Bagong, lihat Kak Gareng, Kak Gareng menonton tv bersama Romo Semar, kemudian membantu Kak Petruk mengerjakan PR. Kalau Bagong membantu Kak Gareng mencari buku, PR nya Kak Petruk bisa cepat selesai, dan Bagong bisa main bola lagi
Bagong	Iya ya Romo, kalau begitu Bagong mencari buku dulu ya teman-teman membantu Kak Gareng

(Bagong membantu mencari buku)
Ayo teman-teman sambil mencari buku, kita menyanyi bersama judulnya Jaranan, yang belum bisa mari mengikuti Bagong menyanyi (mengajak anak-anak usia dini)

Jaranan-jaranan… jarane jaran teji
sing nunggang Ndara Ngabehi, sing ngiring para abdi
jeg jeg nong..jeg jeg gung, jrek ejrek turut lurung
gedebug krincing gedebug krincing, prok prok gedebug jedher

Terjemahan:
Berkuda-berkuda…kudanya tinggi besar
Yang naik Tuan Besar, yang mengiring para abdi
jeg jeg nong..jeg jeg gung, prok prok menyusuri jalanan
gedebug krincing gedebug krincing, prok prok gedebug jedher

Bagong	Wah akhirnya ketemu, Kak Petruk, Kak Gareng ini buku kamusnya ketemu
Gareng	Wah terima kasih ya Bagong
Petruk	Iya Bagong, terima kasih ya, sekarang Kak Petruk bisa mengerjakan PR lagi
Bagong	Teman-teman Bagong senang bisa membantu mencari buku, sehingga Kak Gareng bisa membantu Kak Petruk mengerjakan PR. Sekarang Bagong mau main lagi tapi Bagong ingin main yang lain bersama teman-teman. Mau tidak teman-teman? Sekarang kita main jaranan ya…...

Manfaat *Social stories* Punakawan

Penerapan *social stories* Punakawan sebagai media pendidikan anak usia dini awalnya diberikan kepada 4 pendidik PAUD Shelter Pengungsi Merapi Gondang 1 Wukirsari Cangkringan Sleman. Program ini mendapatkan penghargaan dari Tanoto Foundation sebagai pelatihan guru inovatif/kreatif/kritis yang meningkatkan relevansi pendidikan dan perannya dalam menjawab permasalahan masyarakat dan kebudayaan. Implikasinya program pelatihan diperluas, sehingga jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan pelatihan meningkat menjadi 35 orang yang tergabung dalam PAUD Gugus IV Desa Kepuharjo Sleman. Selama 5 minggu, pendidik PAUD mendapatkan pembekalan melakukan *social stories* Punakawan sebagai media pendidikan karakter usia dini. Materi pembekalan meliputi pendidikan karakter, karakteristik anak usia dini, media pendidikan anak usia dini, pengenalan karakter Punakawan, *social stories*, penyusunan *social stories* untuk pendidikan karakter, dan praktik *social stories*. Pembekalan *social stories* yang telah dilakukan menghasilkan 5 buah *script social stories* yang memenuhi kualifikasi *social stories* dan dapat diterapkan.

Hasil *monitoring* dan evaluasi program pelaksanaan *social stories* Punakawan sebagai media pendidikan karakter terhadap 14 pendidik anak usia dini yang telah menerapkannya dalam pembelajaran menunjukkan sejumlah. Manfaat *social stories* punakawan diukur menggunakan *self repport* secara kualitatif terdiri atas: (a) kesulitan yang dialami saat memberikan *social stories* punakawan, (b) manfaat metode *social stories* untuk pendidikan karakter anak usia dini, dan (c) perubahan perilaku anak usia dini sebelum dan setelah mendapatkan *social stories* punakawan.

Hasil menunjukkan 11 (78,6%) pendidik anak usia dini menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam memberikan *social stories* punakawan, dan 3 (21,4%) mengalami kesulitan. Pendidik anak usia dini yang mengaku mengalami kesulitan disebabkan karena tidak memiliki wayang kulit punakawan sehingga ketika hendak memberikan materi kepada anak usia dini harus meminjam terlebih dahulu kepada gugus PAUD lain. Kesulitan yang dialami pendidik anak usia dini ini dapat dikategorikan sebagai hambatan teknis berupa kurangnya fasilitas penunjang untuk menyelenggarakan *social stories* punakawan sebagai media pendidikan karakter anak usia dini. Seluruh pendidik anak usia dini menyatakan bahwa *social stories* memberikan manfaat terbukti dari adanya indikasi perubahan perilaku anak sebelum dan setelah mendapatkan *social stories* punakawan. Perubahan perilaku meliputi perilaku menolong, menjaga kebersihan, menghormati orang lain, dan lebih disiplin dalam belajar (Yuwanto, & Adi, 2014).

Implikasi

Social stories punakawan dapat digunakan sebagai media alternatif untuk pendidikan karakter anak usia dini. *Social stories* Punakawan merupakan media pendidikan karakter anak usia dini berbasis kearifan lokal dengan keunikan: (a) berupa cerita pendek yang memuat karakter positif dalam kehidupan sehari-hari, (b) bersifat konkret dan lucu, ditambah penggunaan media wayang kulit punakawan yang memungkinkan interaksi secara langsung dengan anak-anak melalui dialog dan sentuhan fisik sesuai tahapan perkembangan kognitif sensorimotor dan praoperasional, serta (c) mengandung sisipan permainan dan tembang/lagu tradisional yang bermuatan karakter. *Social stories* punakawan menjadi lebih menggambarkan budaya bangsa karena dipadukan dengan penggunaan lagu dan permainan tradisional.

Prinsip penerapan *social stories* Punakawan dapat diaplikasikan dengan menggunakan media lain berdasarkan pada budaya lain yang ada di Indonesia. Misal, penggunaan wayang golek Punakawan khas Sunda yaitu Semar, Cepot, Petruk dan Gareng, atau penggunaan wayang Cengblong yang merupakan wayang khas Bali. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan sehingga melalui pendidikan karakter berbasis media budaya lokal juga dapat menjadi bagian dari sosialisasi budaya terhadap generasi muda sejak dini seraya menumbuhkan karakter positif dan kebanggaan terhadap budaya bangsa Indonesia.

Daftar Acuan

Battistich, V., Schaps, E., Watson, M., Solomon, D., & Lewis, C. (2000). Effects of the child development project on students' drug and other problem behaviors. *Journal of Primary Prevention, 21,*75-99.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. (2013a). *Pendidikan anak usia dini*. Diunduh dari http://www.paud.kemdiknas.go.id/article/detail/pendidikan _anak_ usia_dini-2.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. (2013b). *Mengenal pendidikan anak usia dini*. Diunduh dari http://www.paud.kemdiknas.go.id/article/detail/memahami_ pendidikan_anak_usia_dini.

Richardson, R.C., Tolson, H., Huang, T.Y., & Lee, Y.S. (2009). Character education: Lessons for teaching social and emotional competence. *Children & Schools, 31*(2), 71-78.

Thiemann, K.S., & Goldstein, H. (2001). Social stories, written text cues, and video feed back: Effects on social communication of children with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis, 34*(4), 425-446.

Yuwanto, L. (2012a). *Memanfaatkan berbagai media untuk pendidikan karakter*. Diunduh dari http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/44/Memanfaatkan-Berbagai-Media-untuk-Pendidikan-Karakter.html

Yuwanto, L. (2012b). *Model belajar dari karakter punakawan*. Diunduh dari http://www. ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/53/Model-Belajar-dari-Karakter-Punakawan.html

Yuwanto, L. (2012c). Ruang pertemuan dusun jambu: Asal ide pendidikan karakter melalui punakawan. Dalam L. Yuwanto & K. Batuadji (Eds.), *Untaian bunga-bunga kesadaran dan butir-butir mutiara pencerahan: Kumpulan catatan reflektif kami di Merapi* (pp. 18-20). Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya.

Yuwanto, L., & Anton, O.A. (2012). Social stories. Dalam L. Yuwanto (Ed.), *Social stories ala punakawan: Media pendidikan karakter anak usia dini* (pp. 11-14). Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya.

Yuwanto, L., & Batuadji, K. (2012). Karakter menolong. Dalam L. Yuwanto (Ed.), *Social stories ala punakawan: Media pendidikan karakter anak usia dini* (pp. 45-51). Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya.

Yuwanto, L., Adi, C.M.P., Karlinda, G. (2013, Oktober). *Social stories punakawan (clown-puppet) as a means of traumatic healinginterventionforchildrenaftermount Merapi disaster*. Dipresentasikan pada Capacity Building Workshop, Building Individual and Organizational Capacity for Psychological Intervention after Disasters in Asia and Pacific Region, Beijing, China.

Yuwanto, L. (2013). *Cerita punakawan seri live in: Asrham Gandhi Candi Dasa*. Surabaya: ILS Indonesia.

19
Mengasah Empati, Menebar Peduli: Sebuah Upaya Meningkatkan Perilaku Prososial pada Anak

Kamsih Astuti

Pengantar

Sekolah adalah tempat kedua setelah rumah, di mana anak menghabiskan sebagian waktunya. Di sekolah anak menjalani hampir dari separuh harinya dengan berbagai aktivitas: belajar, bermain, dan aktivitas interpersonal lain yang melibatkan guru, pegawai sekolah, maupun teman-temannya. Sekolah juga menjadi tempat bagi anak untuk belajar berbagai macam perilaku seperti berbagi, menolong, menghargai orang lain, toleransi, tetapi di sekolah juga sering terjadi tindakan yang bersifat menyakiti dan merugikan orang lain. Hal itu masih sering terjadi di berbagai sekolah di Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir kita dikejutkan dengan pemberitaan di media massa mengenai berbagai tindakan berbau kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Pemberian hukuman fisik oleh guru terhadap murid, kekerasan yang dilakukan pelajar senior terhadap adik kelasnya, tawuran pelajar antar sekolah, tindakan 'pemalakan' yang dilakukan sekelompok siswa Sekolah Dasar terhadap teman sekolahnya, adalah contoh-contoh nyata masih terjadinya kasus kekerasan dalam setting pendidikan. Sebuah ironi memang, sekolah yang mestinya sebagai tempat mendidik anak untuk menjadi insan yang berprestasi dan berkarakter justru diwarnai dengan tindakan-tindakan yang dapat merusak prestasi dan karakter anak. Hasil penelitian Yayasan Sejiwa (2008) terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya menunjukkan bahwa 67% pelajar menyatakan bahwa *bullying* pernah terjadi di sekolah mereka. Pelakunya teman, kakak kelas, adik kelas, guru, kepala sekolah, hingga preman di sekitar sekolah. Kemudian berdasarkan data KomNas Perlindungan Anak per November 2009, setidaknya terjadi 98 kasus kekerasan fisik, 108 kekerasan seksual, dan 176 kekerasan psikis pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah.

Maraknya berbagai tindak kekerasan di sekolah tentu menjadi keprihatinan bagi banyak pihak mengingat dalam Pasal 54 ayat 1, UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dengan demikian hendaknya sekolah diciptakan sebagai lingkungan yang dijauhkan dari nilai-nilai kekerasan dan perilaku anti sosial dan diwarnai dengan nilai-nilai dan perilaku positif seperti berbagi, peduli, kerja sama, dan menolong orang lain,

Dengan demikian anak yang tumbuh dalam lingkungan yang damai, penuh persahabatan dan nilai-nilai positif lain akan tumbuh menjadi anak yang perilaku kesehariannya juga diwarnai dengan nilai-nilai positif seperti nilai-nilai prososial. Namun demikian lingkungan sekolah yang seperti itu tentu sulit ditemui, karena masih sering diberitakan di media massa tentang maraknya tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Situasi di sekolah yang mestinya merupakan situasi yang menyenangkan, penuh dengan aktivitas yang bermanfaat dan dilakukan dengan suka cita, dapat berubah menjadi situasi yang tidak nyaman bahkan menakutkan. Adanya tindakan-tindakan yang diwarnai oleh kekerasan ini menunjukkan tidak adanya empati dan kepedulian terhadap orang lain.

Empati, Perilaku Prososial, dan Agresi

Empati adalah respons afektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain (Baron & Byrne, 2005). Secara afektif orang yang berempati merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan secara kognitif orang yang berempati memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa mereka merasa demikian. Menurut Batson (1991) empati adalah pengalaman menempatkan diri pada keadaan emosi orang lain seolah-olah mengalaminya sendiri. Empati juga didefinisikan sebagai kemampuan menempatkan diri sendiri dalam kondisi psikologis orang lain dan melihat situasi dalam sudut pandang orang lain (Hurlock, 2006). Empati mendorong orang untuk melakukan pertolongan altruistis.

Empati berhubungan dengan berbagai tindakan positif terhadap orang lain. Batson dkk. (dalam Myers, 2010) menjelaskan bahwa empati berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: memiliki keinginan untuk meringankan penderitaan orang lain, mencegah agresi/ cenderung tidak mendukung perang dan bentuk agresi lain, meningkatkan kerja sama dan sikap positif terhadap kelompok yang mendapat stigma tertentu seperti tuna wisma dan orang dengan HIV/AIDS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa empati berhubungan dengan perilaku prososial (Asih dan Pratiwi, 2010), berkorelasi negatif dengan perilaku

merokok di tempat umum (Sari, Ramdhani, & Elisa, 2008). Orang yang berempati juga lebih termotivasi untuk menolong orang lain dan menghentikan tindakan agresinya (Batson, 1991). Sebaliknya, anak yang melakukan agresi terhadap orang lain biasanya kurang berempati, sedikit memiliki perhatian terhadap distres orang lain, dan memiliki kesulitan dalam meregulasi emosinya (Eisenberg, dalam Gill & Calkin, 2003). Dengan demikian empati akan berhubungan dengan perilaku prososial dan berkurangnya perilaku agresi.

Baron dan Byrne (2005) mendefinisikan perilaku prososial sebagai segala tindakan yang menguntungkan orang lain. Perilaku prososial mencakup perilaku yang dimaksudkan untuk menguntungkan orang lain seperti menolong, menenangkan, berbagi, bekerja sama, menentramkan, membela, beramal, dan menunjukkan kepedulian (Schroeder dkk., 1995). Individu yang berempati terhadap orang lain akan dapat merasakan distres yang dialami orang lain dan memahami mengapa ia merasa demikian. Pemahaman bahwa distres memberikan sesuatu yang tidak nyaman mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang dapat mengurangi distres orang lain, misalnya menunjukkan kepedulian, menenangkan orang yang sedang stres, atau memberikan pertolongan yang membuat orang lain merasa lebih nyaman.

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak pernah lepas dari tindakan-tindakan prososial, mengingat sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari orang lain dalam menjalani kehidupan. Kesediaan untuk bekerja sama dan membantu orang lain penting untuk dilakukan dalam berbagai setting kehidupan dan perilaku ini harus ditumbuhkan sejak dini sehingga kelak ketika menjadi individu dewasa maka sikap dan perilaku kesehariannya akan diwarnai dengan nilai-nilai prososial dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu faktor disposisional yang mendasari untuk tumbuhnya perilaku prososial adalah empati. Terdapat tiga teori yang menjelaskan peran empati dalam tindakan prososial (Baron & Byrne, 2005; Gross, 2010).

Hipotesis empati-altruis

Hipotesis ini menjelaskan bahwa tidakan prososial terhadap orang lain semata-mata didorong oleh keinginan untuk menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Motivasi untuk menolong menjadi sangat kuat sehingga individu yang memberi pertolongan bahkan bersedia untuk terlibat dalam tindakan yang berbahaya bahkan mengancam nyawanya.

Hipotesis kesenangan empatik

Hipotesis ini menjelaskan bahwa perilaku prososial dimotivasi oleh keinginan untuk merasa lebih enak karena telah melakukan hal yang positif untuk orang lain. Menolong orang lain akan menimbulkan rasa senang karena tindakannya menimbulkan pengaruh positif terhadap orang lain.

Model arousal-cost reward

Model ini menjelaskan bahwa orang akan mengalami *arousal* akibat distres orang lain dan memperlihatkan reaksi empatik secara emosinal terhadap krisis dan masalah orang lain. Baik orang dewasa maupun anak-anak tidak hanya melaporkan merasakan empati tetapi mereka juga mengalami keterbangkitan secara fisiologis oleh distres orang lain. Pada anak-anak prasekolah mereka akan menangis jika melihat temannya menangis. Adanya *arousal* inilah yang menyebabkan perilaku menolong.

Ketiga teori di atas menjelaskan bahwa empati berperan penting dalam perilaku prososial. Empati akan berhubungan dengan perilaku-perilaku prososial seperti menolong, bekerja sama, memberi donasi, dan anak yang lebih banyak terlibat dalam perilaku prososial akan cenderung menghindari tindakan-tindakan yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain (Eron dan Huesmann, 1994). Hasil penelitian Gentlle, Anderson, dan Yukawa dkk. (2009) juga menunjukkan bahwa paparan game prososial merupakan prediktor negatif untuk perilaku agresi dan menjadi prediktor positif untuk perilaku prososial. Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian yang menggunakan berbagai metode dengan melibatkan subjek dari berbagai usia dan berbagai latar belakang budaya. Dengan demikian untuk menumbuhkan sikap dan perilaku prososial dan menghindarkan anak dari tindakan-tindakan yang bersifat agresif dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan empati. Upaya ini dapat dilakukan sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah.

Peran Orang tua dan Guru dalam Menumbuhkan Empati Pada Anak

Dalam diri manusia empati bisa muncul dengan sendirinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Strayer (dalam Baron & Byrne, 2005), setiap manusia dilahirkan dengan kapasitas biologis dan kognitif untuk merasakan empati, tetapi pengalaman spesifiknya akan menentukan apakah potensi bawaan tersebut akan dihambat atau menjadi bagian penting dalam dirinya. Anak-anak yang mau berbagi miliknya bisa jadi merefleksikan

kemampuannya untuk membayangkan perasaan orang lain. Kemampuan ini akan semakin tumbuh dengan baik jika senantiasa diperkuat oleh lingkungannya.

Orang tua di rumah maupun guru di sekolah memiliki peran sentral dalam menumbuhkan empati pada anak. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengasah/meningkatkan empati pada anak. Dalam hal ini keluarga memiliki arti penting sebagai model dan sebagai sumber standar perilaku eksplisit (Eisenberg & Fabbes, dalam Papalia, Old, & Friedman, 2008). Jika orang tua mengajarkan empati pada anak, maka anak biasanya juga mengembangkan empati kepada anak yang lain. Terdapat hubungan yang jelas antara regulasi emosi orang tua dan anak-anaknya, orang tua yang simpatik memiliki anak-anak yang juga simpatik. Di dalam keluarga orang tua dapat berperan sebagai model bagi anak dalam mengembangkan sikap empati. Anak akan belajar dari perlakuan yang diterima dari Orang tua terhadap dirinya. Jika Orang tua senantiasa menunjukkan sikap yang empatik maka anak akan belajar untuk itu. Pada gilirannya anak akan mengembangkan sikap yang sama dengan Orang tuanya. Anak belajar dengan mengobservasi apa yang dilakukan dan dikatakan Orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan empati pada anak:

1. Mengasah empati dapat dimulai dari hal-hal sederhana, yaitu mengajak anak untuk berbagi makanan pada teman, membantu teman yang sedang punya kesulitan, menjenguk orang sakit, memberikan mainan, buku-buku, atau baju yang sudah tak terpakai pada anak-anak lain, atau memberi makan siang kepada para tunawisma, dan sebagainya. Dengan cara ini anak belajar untuk bisa beramal dengan berbagai cara yang baik selain dengan uang.

2. Orang tua/guru perlu menyisihkan waktu khusus untuk berbicara tentang pentingnya berbuat baik untuk orang lain. Hal ini akan lebih baik dilakukan pada saat anak sedang menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan secara langsung. Misalnya ketika melihat seorang pengemis di jalan, berilah contoh untuk memberinya uang atau makanan. Dengan berbagai kondisi dan kasus nyata yang dilihatnya sendiri, anak akan lebih peka dan tergerak untuk membantunya. Dalam hal ini anak perlu disadarkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk membantu orang lain.

3. Cara lain untuk mengasah empati adalah dengan mengajak anak untuk bertemu orang-orang yang secara fisik membutuhkan pertolongan, misalnya ke panti asuhan, panti jompo, atau daerah-daerah kumuh. Dengan melihat atau bergaul bersama-sama mereka, kita akan banyak mempelajari sisi lain dari kehidupan. Kita juga akan semakin bersyukur atas segala karunia yang kita peroleh.

4. Empati juga dapat ditingkatkan dengan melibatkan anak dalam aktivitas-aktivitas prososial seperti memberi bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti korban bencana alam atau bertemu dengan anak-anak lain yang ada dalam kondisi kurang beruntung seperti mereka yang tinggal di panti asuhan. Pengalaman langsung berada dalam situasi kurang menguntungkan ini akan dapat menumbuhkan empati pada anak yang pada gilirannya akan mendorong untuk munculnya perilaku prososial. Sebagaimana dikatakan oleh Cole (dalam Baron dan Byrne, 2005), anak-anak yang belajar untuk bertingkah laku baik memiliki komitmen kuat untuk menolong orang lain dan bukan menyakiti mereka.

5. Di samping keluarga, teman sebaya dan guru juga menjadi model dan penguat perilaku prososial pada anak. Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk menumbuhkan empati pada anak. Pendidikan karakter yang berisi program-program untuk mengajarkan anak bersikap dan perilaku positif seperti jujur, berperilaku positif, menghargai orang lain, dan bertanggungjawab adalah menjadi bagian penting yang harus dilakukan di sekolah selain tuntutan-tuntutan prestasi akademis yang harus dipenuhi oleh siswa.

6. Bermain peran dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan empati pada siswa. Bermain peran merupakan permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar anak yang akan mengembangkan imajinasi dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Bermain peran adalah bermain yang menggunakan daya khayal anak untuk berpura-pura bertingkah laku seperti benda atau makhluk tertentu, seperti orang tertentu atau hewan tertentu, berada dalam situasi tertentu yang dalam dunia nyata tidak terjadi (Moeslicahtun, dalam Fitri dan Prasetyaningrum, 2012). Bermain peran melatih anak untuk berada dalam situasi tertentu sehingga diharapkan anak dapat merasakan dan memahami jika ia berada dalam situasi tersebut. Cara ini cukup efektif untuk menumbuhkan empati pada anak, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian Fitri dan Prasetyaningrum (2012) bahwa bermain peran berpengaruh terhadap empati pada anak.

7. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan empati pada anak adalah dengan dongeng. Dengan dongeng guru dan Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai empatik pada anak. Dongeng efektif untuk meningkatkan empati pada anak, tetapi kombinasi antara dongeng dan bermain peran paling efektif untuk meningkatkan empati pada anak (Fitri dan Prasetyaningrum, 2012). Namun demikian Orang tua atau guru tidak cukup memberikan dongeng saja, tetapi yang terpenting adalah memberikan contoh nyata agar bisa ditiru anak, karena anak akan lebih mudah belajar dari apa yang dilihat dibandingkan apa yang didengar.

Penutup

Empati tidak cukup hanya ditumbuhkan dan diajarkan pada anak. Hal yang lebih penting adalah bagaimana mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Membiasakan anak untuk berempati pada orang lain adalah langkah awal untuk membiasakan anak berperilaku positif terhadap orang lain. Kebiasaan ini dimulai dari dalam keluarga dan dikembangkan di sekolah sebagai lingkungan sosial utama yang berperan penting dalam membentuk perilaku anak. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran Orang tua dan guru di sekolah. Kedua pihak harus saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam mendidik dan membentuk karakter anak yang empatik sehingga menjadi anak yang perilaku kesehariannya diwarnai dengan nilai-nilai prososial dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Daftar Acuan

Asih, G.Y., & Pratiwi, M.M.S. (2010). Perilaku prososial ditinjau dari empati dan kematangan emosi. *Jurnal Psikologi Universitas Muria Kudus, 1*(1). 33-42.

Baron, R., & Byrne, D. (2005). *Psikologi sosial* (Ratna Djuwita dkk., Tr,). Jakarta: Erlangga.

Batson, C.D. (1991). *The altruism question: Toward a social psychological answer.* Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Eron, L.D., & Huesmenn, L. R. (1994). The relation of prosocial behavior to the development of aggression and psychopathology**.** *Aggressive Behavior, 10,* 201-211.

Fitri, T., & Prasetyaningrum, J. (2012). Pengaruh dongeng dan bermain peran dalam mengembangkan empati pada anak usia dini. *Jurnal Psikologi Indoensia*, *9*(1) 42-56.

Gentlle, D.A., Anderson, C., Yukawa. S., Ihori, N., Saleem, M., Ming, K.L. dkk. (2009) The effects of prosocial video games on prosocial behavior: International evidence from correlational, longitudinal, and experimental studies. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *10*, 1-12.

Gill, K.L., & Calkins, S.D. (2003). Do aggressive/destructive toddlers lack concern for others? Behavioral and physiological indicators of empathic responding in 2-year-old children. *Development and Psychopathology*, *15*, 55-71.

Gross, R. (2010). *Psychology: The science of mind and behaviour*. Hodder Education: Anhachete.

Hurlock. E.B. (2006). *Child development*. New York: McGraw-Hill.

Indonesia anti bullying. (2009). Diunduh dari http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/11/22/brk,20091122-209789,id.html

Myers. D.G. (2010). *Social psychology* (10^{th} ed.). New York: McGraw Hill.

Papalia, D.E,. Old, S.W., & Feldman, R.D. (2008). *Human development*. New York: McGraw-Hill.

Sari, A.T.O, Ramdhani, N., & Eliza, M. (2008). Empati dan perilaku merokok di tempat umum. Diunduh tanggal 8 Desember 2014 dari *http://neila.staff.ugm.ac.id/wordpress/wpcontent/uploads/2008/02/empatijurnal.pdf*.

Schroeder, D.A., Penner L.A., Dovidio, J.F., & Piliavin, J.A. (1995). *The psychology of helping and altruism problems and puzzles*. New York: McGraw-Hill.

UU Nomor 32 Tahun 2014. Diunduh dari http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf, diunduh 20 Januari 2015.

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). (2008). *Bullying mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Jakarta: Grasindo.

BAGIAN III
Sosial Kemasyarakatan

20
Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Ichsan Malik

Satu tahun setelah reformasi awal tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik komunal bernuansa agama dan etnis di Maluku, Poso, dan Kalimantan Tengah. Kekerasan yang menyertainya sangat mengerikan. Sejak awal terjadi konflik di Maluku tanggal 19 Januari 1999 hingga Januari 2003, tercatat sebanyak 5.000 orang meninggal dunia, sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi, serta hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak (Yanuarti *et al*., 2003).

Upaya penyelesaian konflik di Maluku yang dilakukan oleh pemerintah sangat bervariasi dimulai dari pemberlakuan jam malam, perintah tembak ditempat bagi yang membawa senjata, pemberlakuan darurat sipil, serta perjanjian Malino pada bulan Februari 2002. Namun semua penanganan tersebut tidak membuahkan hasil maksimal dan bahkan konflik Maluku terus bergejolak dan terus memakan korban manusia, dan juga infrastruktur.

Analisis Dinamika Konflik

Pertanyaan yang muncul pada diri saya saat itu baik sebagai pengamat konflik maupun sebagai calon mediator konflik adalah, "Bagaimana mungkin sebuah perkelahian dua pemuda saja bisa membuat Maluku hancur lebur dan ribuan nyawa sudah melayang?" Pada saat itu saya sudah mulai memikirkan bahwa selain faktor-faktor yang menjadi latar belakang konflik, saya sudah melihat bahwa peran aktor-aktor konflik justru lebih berbahaya dalam membuat konflik semakin membesar. Pada saat yang bersamaan saya juga sudah mulai memikirkan bagaimana kita dapat mencegah konflik Maluku sejak awal.

Sejak pecah konflik di Maluku, saya mulai memahami bahwa situasi konflik dan pasca konflik adalah situasi dan kondisi yang sangat kompleks dan tidak linier (Gallo, 2012). Situasinya sangat dinamis, cepat berubah dan tidak statis (Druckman, 2005). Oleh karena itu diperlukan cara berfikir yang dinamis, mendalam dan holistik untuk memahaminya.

Para analisis konflik, mediator rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian hendaknya dapat memahami situasi dan kondisi dinamis ini sehingga analisa yang dilakukan menjadi lebih tepat serta intervensi yang dilakukan dapat lebih memberikan kegunaan. Lebih jauh dalam konteks konflik, kesalahan analisa awal dapat berakibat fatal bagi intervensi yang akan dilakukan.

Konsekuensi dari situasi dinamis ini bagi para peneliti adalah penggunaan metodologi yang cocok dalam penelitian atau kajiannya. Druckman (2005) menyatakan bahwa para analis atau peneliti konflik pada dasarnya harus memutuskan secara cerdas bahwa dalam situasi yang dinamis, abstrak, cepat berubah dan serta situasi yang spesifik serta unik maka basis analisis/risetnya haruslah lebih bersifat konstruktif, reflektif, kontekstual, dan cara berfikirnya lebih divergen.

Sedangkan bagi mediator yang mengupayakan rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian juga harus menyadari bahwa situasi yang sangat kompleks, spesifik, dan unik membutuhkan suatu pendekatan yang tepat guna dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Mau tidak mau kita harus menggunakan budaya setempat atau pendekatan lokal, serta menggunakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memecahkan masalah. Pada hakikatnya perspektif universal dalam rekonsiliasi tetap digunakan sesuai kebutuhan namun basisnya adalah kesadaran terhadap dinamika lokal.

Perspektif, kebiasaan dan cara-cara lokal dalam melakukan rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian ini digunakan oleh Ichsan Malik (2009) di Maluku. Gerakan Baku Bae Maluku adalah suatu gerakan perdamaian dari masyarakat korban dan pelaku konflik di Maluku. Kata "damai" diganti dengan kata "Baku Bae" kata damai dipersepsikan mengandung arti ada yang kalah dan ada yang menang dalam konflik, oleh karena itu masyarakat Maluku menolak kata damai ketika konflik sedang berada pada puncaknya. Dalam proses perdamaian yang sangat memperhatikan "budaya muka", maka setiap pihak dijaga agar jangan sampai kehilangan muka dalam proses rekonsiliasi. Filosofi untuk pembangunan perdamaian menggunakan nilai dan prinsip "Pela dan Gandong". Dalam masyarakat Maluku ada tradisi Pela Keras". Ketika dua Negeri Islam dan Kristen berperang secara berkepanjangan dan tidak ada yang kalah atau menang, maka pada akhirnya mereka akan mengangkat persaudaraan yang disebut "Pela Keras". Dengan pela ini maka kedua

Negeri telah diikat oleh sumpah dan kutukan apabila ada yang melanggar dan bahkan tidak boleh ada ikatan perkawinan Di antara masyarakat yang berpela.

Meskipun situasi dan kondisi konflik sangat kompleks dan cepat sekali berubah, namun fenomena konflik tetap dapat dideteksi sejak dini sehingga bisa direspons secara tepat. Galtung (1996) menyarankan untuk memahami konflik secara menyeluruh maka konflik bisa dilihat sebagai suatu penyakit. Untuk dapat menentukan penyakit yang sebenarnya maka kita harus dapat membedakan mana yang sekedar gejala dan mana yang menjadi sumber penyakitnya. Harus terpenting adalah melakukan diagnosa terlebih dahulu perihal penyakit, dan baru kita tentukan kemungkinan obat-obatnya, serta baru dilakukan *treatment* tahap demi tahap.

Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik yang tergambar di atas ini merupakan modifikasi dari *Titian Damai Framework* yang dibuat pada awalnya dalam rangka deteksi dini dan respons dini konflik, dikonstruksi oleh Ichsan Malik dan tim Institut Titian Perdamaian pada tahun 2010. Pada awalnya, kerangka deteksi dini dan respons dini ini hanya memiliki 3 komponen yaitu komponen eskalasi dan de-eskalasi, komponen faktor konflik, dan komponen aktor konflik. Namun dengan berjalannya waktu, dan bertumpu kepada pengalaman empirik dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di Indonesia, maka pada tahun 2013 komponen kerangka dinamis ini semakin komprehensif di mana terdapat 2 penambahan komponen, sehingga kerangka ini memiliki 5 komponen utama. Tambahan komponen tersebut adalah komponen pemangku kepentingan, serta
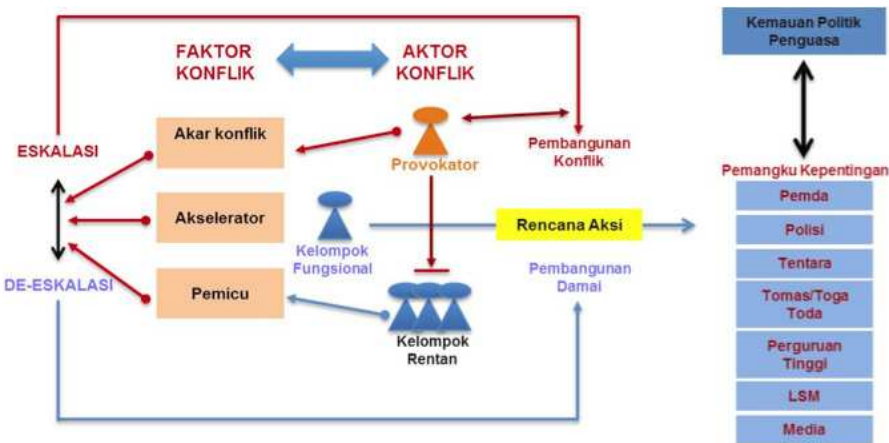
Gambar 1. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.

Mengapa kerangka ini kini disebut sebagai Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik? Jawabannya meliputi dua hal dasar: Pertama, analisa situasi dan kondisi konflik dan paska konflik haruslah analisa yang bersifat dinamis sebagaimana yang diuraikan di atas pada paper ini. Kedua, dari pengalaman empirik menjadi mediator konflik maka dapat diasumsikan bahwa konflik bisa muncul dari kelima komponen tersebut. Bisa muncul dari eskalasi konflik yang dibiarkan terus meningkat, tapi konflik bisa juga dimulai dari factor pemicu konflik yang adekuat, atau bisa juga bisa muncul akibat dari efektifnya provokator konflik memengaruhi kelompok-kelompok rentan yang agresif dan mudah dimobilisasi. Perspektif yang dikembangkan haruslah yang bersiat holistik dan terintegrasi dalam melihat 5 komponen yang ada karena semua komponen tersebut saling terkait, saling berkontribusi dan saling memberikan pengaruh baik untuk terjadinya konflik maupun perdamaian. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih mendetil kelima komponen tersebut:

1. **Tingkat eskalasi dan de-eskalasi**
   Eskalasi terjadi ketika derajat konflik meningkat, ketegangan meluas dan mobilisasi massa. Kondisi ini kemudian diikuti dengan terjadinya krisis pada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik. Berlanjut dalam bentuk jatuhnya korban akibat kekerasan terbatas ataupun akibat kekerasan massal. Eskalasi yang terus meningkat akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya pembangunan konflik. Begitu juga sebaliknya jika eskalasi telah dapat dideteksi dan dikendalikan, misalnya dengan adanya musyawarah atau pertemuan untuk menyelesaikan konflik sehingga krisis mulai teratasi, ketegangan dan mobilisasi dapat dikendalikan. Kondisi tersebut adalah proses de-eskalasi konflik yang akan mendorong terjadinya pembangunan perdamaian. Akan tetapi, menurunnya tingkat eskalasi tidak serta merta akan menjadikan konflik selesai. Masih ada beberapa komponen lainnya yang dapat mendorong terjadinya konflik.

2. **Faktor konflik**
   Ada tiga elemen dalam faktor konflik yang akan menjadi pra kondisi yang mendorong meningkatnya eskalasi konflik yaitu:
   a. **Elemen pemicu konflik** adalah faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik bisa dalam bentuk pembunuhan, perkelahian pemuda, ataupun pemilihan kepala daerah. Elemen pemicu ini kadangkala bisa dianalogikan dengan API yang menyambar dan dapat langsung membakar rumput yang kering.

b. **Elemen akselerator konflik** adalah reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik. Reaksi ini apabila dibiarkan akan terus meluas dan semakin mendalam. Akselerator adalah katalisator yang dapat menyebarkan konflik kesegala arah. Elemen ini bisa dianalogikan dengan ANGIN panas yang menyebarkan api sehingga kebakaran semakin meluas.
   c. **Elemen akar konflik**. Penyebab struktural adalah sumber konflik yang sebenarnya dan paling mendasar. Misalnya seperti kebijakan negara maupun kebijakan global dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya yang menyangkut kehidupan. Diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Ketidakbecusan suatu pemerintahan dalam pengelolaan masyarakat dan sumber daya. Atau bahkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan korupsi. Penyebab struktural ini bisa dianalogikan sebagai hamparan RUMPUT KERING yang mudah terbakar.

3. **Aktor konflik,** sebuah komponen yang kontribusinya sangat besar untuk meningkatkan eskalasi konflik. Ada tiga kategori dari aktor konflik yang perlu diperhatikan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik yaitu:
   a. **Provokator**, yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik. Aktor ini kadangkala memiliki logika yang abnormal tentang peristiwa yang terjadi atau faktor-faktor dalam konflik. Logikanya yang abnormal biasa disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif. Logika yang abnormal tentang situasi biasanya ditelan bulat-bulat oleh kelompok berikutnya yaitu:
   b. **Kelompok Rentan,** persepsi dari kelompok rentan dan pernyataan dari provokator akan menyebabkan semakin meningkatnya eskalasi konflik.
   c. **Kelompok Fungsional**, yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Berdasarkan Undang–undang, maka aktor fungsional untuk penyelesaian konflik dan pencegahan konflik adalah polisi dan pemerintahan daerah/pusat. Dari pengalaman konflik yang terjadi selama ini, maka aktor fungsional gagal memotong pengaruh dari provokator kepada kelompok-kelompok rentan, dan terlambat atau tidak mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk menghentikan konflik.

4. **Pemangku kepentingan atau *stakeholders*** adalah elemen-elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik. Elemen pemangku kepentingan terdiri dari: polisi, militer, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga) dan tokoh adat (Toda), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), peneliti, serta media massa. Oleh kelompok fungsional maka komponen pemangku kepentingan ini

diharapkan untuk dapat berkomunikasi, memberi kontribusi, bekerja sama, dan saling berkoordinasi dengan mereka untuk mencegah terjadinya konflik dan menghentikan konflik jika sudah terjadi. Selain itu kelompok pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjadi pihak-pihak yang pro-aktif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Jemput bola, tidak hanya menunggu bola. Menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah.

5. **Kemauan politik dari penguasa**. Kemauan politik ini terefleksi dalam dua hal, pertama terlihat dari inisiatif dan kepemimpinan dari para penguasa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara tuntas, tidak membiarkan konflik ini terus membara dan bahkan menyebar ke seluruh penjuru. Kedua adalah adanya produk-produk hukum/kebijakan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Pada konteks Indonesia, secara normatif telah ada Undang-undang Penanganan Konflik Sosial yaitu UU No. 7 tahun 2012, serta adanya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, serta berbagai keputusan Menteri terkait dengan pengelolaan dan penyelamatan sumber daya. Namun persoalannya adalah bagaimana UU dan peraturan ini diinterpretasikan dan ditegakkan agar dapat digunakan untuk menghentikan konflik dan mencegah konflik.

Kelima komponen utama kerangka dinamis pencegahan dan penyelesaian konflik ini akan saling berpengaruh, berinteraksi, dan saling memberikan kontribusi untuk mencegah konflik. Untuk itu, kunci utama dalam mencegah dan menangani konflik terletak pada kecermatan dalam mendeteksi eskalasi konflik kemudian melakukan upaya untuk melakukan de-eskalasi konflik. Selanjutnya dibutuhkan adanya ketajaman analisis dari faktor penyebab konflik yang dilanjutkan dengan kemampuan untuk memperkuat aktor fungsional, meredam provokator, dan mengontrol kelompok-kelompok rentan. Hal berikutnya adalah kemampuan dalam menjalin koordinasi yang efektif dengan seluruh elemen pemangku kepentingan supaya konflik dapat dihentikan. Pada akhirnya adalah bagaimana berdasarkan regulasi yang ada para pemimpin mampu melakukan manuver, inisiatif, dan melakukan suatu keputusan untuk menghentikan konflik dan mencegah konflik secara menyeluruh.

Pelajaran dari Lapangan

Pelajaran pertama yang menyebabkan munculnya kebutuhan yang sangat mendesak bagi kerangka pencegahan konflik sejak dini dimulai dengan adanya kejadian ulang tahun RMS (Republik Maluku Selatan) tanggal 25 April 2014 di Ambon, Maluku yang menelan

korban jiwa hingga 39 orang. Saya dan tim yang sedang berada di Ambon menyaksikan adanya pengkondisian peningkatan eskalasi konflik, dimulai dari adanya pembunuhan di Pulau Seram pada tanggal 21 April 2004, pembunuhan seorang pemabuk di daerah Poka pada tanggal 23 April 2004, ditambah perdebatan yang sengit dimedia massa antara TNI, Polisi, dan Maluku Media Centre yang akan menyelenggarakan seminar tentang RMS pada tanggal 24 April 2004. Adanya ancaman tembak di tempat bagi pengibar bendera RMS. Terjadinya pengungsian dari desa Aboru karena adanya stigma RMS. Kemudian juga adanya mobilisasi massa untuk melakukan demo pada tanggal 25 April 2004. Menghadapi berbagai gejala tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada respons yang tepat guna untuk melakukan de-eskalasi konflik. Maka ketika sniper membunuh beberapa demonstran, konflik pecah kembali di Ambon. Namun konflik tidak meluas seperti peristiwa 19 Januari 1999.Hal yang menguntungkan adalah pada 25 April 2004 itu kami telah siap dengan respons dini yang adekuat untuk melakukan de-eskalasi konflik serta menangani secara efektif ketegangan dan mobilisasi massa. Dengan penanganan yang tepat maka dapat diduga konflik tidak akan meledak.

Pelajaran kedua, diperoleh pada tahun 2006, dua tahun setelah saya dan tim Institut Titian Perdamaian membuat kerangka dasar pencegahan konflik yang terdiri dari 3 elemen dasar yaitu eskalasi, faktor konflik, dan aktor konflik serta melakukan penerapan kerangka tersebut di Ambon, Maluku dan Pontianak, Kalimantan Barat. Ternyata pencegahan konflik tidak akan efektif apabila tidak ada jaringan (*network*) yang kuat di masyarakat untuk membantu melakukan deteksi dini eskalasi konflik, serta melakukan pengorganisasian bagi kelompok-kelompok rentan yang mudah dimobilisir oleh provokator. Selain itu dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dari pemerintah dan petugas keamanan untuk melakukan upaya deteksi dini dan tidak membiarkan eskalasi konflik terus meluas.

Pelajaran ketiga, didapatkan ketika pecah kerusuhan pada bulan Januari 2013 di Kabupaten Sumbawa. Pemicunya adalah kecelakaan yang melibatkan seorang polisi beretnis Bali dan kekasihnya dari etnis Samawa/Sumbawa. Kondisi ini menimbulkan adanya demo dari masyarakat, distorsi informasi yang meluas di masyarakat. Dimulai dari lemparan batu kemudian meluas menjadi pembakaran rumah orang Bali di seluruh kota Sumbawa. Pemerintah Kabupaten sudah melakukan konsolidasi dengan seluruh pihak seperti polisi, TNI, pemuka agama, dan pemuka adat untuk menyelesaikan kerusuhan yang terjadi namun ternyata hal ini tidak efektif. Pelajaran penting dari peristiwa ini menggambarkan pentingnya kemauan politik yang kuat dari pemerintah jika ingin mencegah konflik. Selain itu juga dibutuhkan suatu perencanaan aksi yang lebih proaktif dari seluruh para pihak yang berkepentingan untuk pencegahan konflik, respons yang reaktif justru dapat membuat konflik semakin membesar.

Pelajaran keempat diperoleh pada tahun 2014, ketika elemen kerangka deteksi dini dan respons dini akhirnya lengkap menjadi 5 elemen dasar dan dicoba untuk diterapkan dalam konflik sumber daya alam di 5 Taman Nasional di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Riau, dan Jambi. Ternyata kerangka deteksi dini dan respons dini ini efektif digunakan untuk mencegah konflik di Taman Nasional, bahkan dapat juga digunakan sebagai kerangka resolusi konflik, karena kelima elemen dasar tersebut dapat dijadikan dasar kegiatan intervensi untuk penyelesaian konflik. Pelajaran penting lainnya dibutuhkan suatu tim kerja yang solid dan kompeten untuk dapat melakukan pencegahan dan resolusi konflik atau deteksi dini dan respons dini, tim ini harus bekerja secara berkelanjutan untuk melakukan analisa pencegahan konflik sekaligus melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Catatan terakhir adalah konflik dapat terjadi di seluruh Indonesia baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Konflik itu dapat terjadi akibat eskalasi konflik yang dibiarkan saja untuk terus membesar, mobilisasi masa yang menimbulkan anarki di mana-mana, atau bahkan bisa muncul dari kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Tapi yang paling penting adalah bagaimana respons kita untuk mencegah maupun menyelesaikan konflik dengan efektif. Indikator elemen konflik dapat kita lihat sehingga kita dapat mencegah konflik sejak awal dan tidak terus menerus menjadi pemadam kebakaran yang selalu terlambat memadamkan api konflik.

Kerangka Dinamis Sebagai Wujud dari Revolusi Mental

Perubahan "*mind-set*" serta "kemandirian" dalam perilaku dan ketika membuat suatu perubahan adalah hakikat dari revolusi mental. Perwujudan dari prinsip revolusi mental ini tercermin di dalam kerangka dinamis. Di mana analisa yang dilakukan sudah tidak statis, dan linier lagi seperti yang umum dilakukan sebelumnya, akan tetapi analisa terhadap situasi dan kondisi konflik sudah menjadi lebih dinamis, konstruktif, dan kontekstual. Perspektif dalam kerangka pencegahan dan resolusi konflik sudah tidak parsial lagi akan tetapi sudah menjadi lebih holistik dan terintegrasi.

Analisa yang dinamis dan perspektif yang holistik akan dapat secara efektif dan tepat guna untuk menyelesaikan dan mencegah konflik. Selama ini pada umumnya upaya penyelesaian konflik ibaratnya seperti pemadam kebakaran yang tiba dilokasi ketika kebakaran itu sudah hampir menghanguskan suatu wilayah. Kita selalu terlambat. Melalui cara pandang yang baru dalam melihat konflik, maka kita akan lebih pro-aktif

dalam menyelesaikan konflik dan dalam melakukan antisipasi-antisipasi guna mencegah konflik sejak awal.

Kebutuhan untuk adanya kerangka analisa yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik dan pencegahan konflik di Indonesia semakin mendesak untuk masa mendatang, mengingat konflik yang menggunakan identitas agama dan etnik akan tetap mengancam pada masyarakat kita. Konflik dengan identitas agama dan etnik di dalam kajian ilmu Psikologi Perdamaian dikatagorikan sebagai "*intractable conflict*" (Bar-Tal, 2000; Coleman, 2006). Konflik dengan identitas agama dan etnik adalah konflik yang sangat sulit diselesaikan, dan hampir tidak ada harapan untuk diselesaikan. Karakteristik dari konflik semacam ini yaitu selalu terkait dengan sejarah dominasi masa lalu, isunya sangat kompleks saling berkaitan antara budaya, politik, dan ekonomi. Proses konfliknya sangat emosional, penuh penghinaan, penuh kekerasan, seluruh pihak yang berkonflik terlibat secara total, dan intensitas kekerasannya sangat tinggi.

Pada akhirnya sebagai penutup dari tulisan ini adalah semacam pengharapan dari diri penulis yaitu kerangka dinamis penyelesaian dan pencegahan konflik ini dapat dimanfaatkan untuk kerangka penelitian maupun aksi-aksi pencegahan dan penyelesaian konflik. Karena kerangka semacam ini tidak akan berkembang dan ada gunanya apabila tidak diterapkan untuk menyelesaikan dan mencegah konflik yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan melalui implementasinya akan lahir kembali elemen-elemen baru yang dapat membuat kerangka dinamis ini semakin lengkap, tepat guna, dan komprehensif.

Daftar Acuan

Bar-Tal, D. (2000). From intactable conflict through conflict resolution to reconciliation: Psychological analysis. *Political Psychology, 21*(2), 601-627.

Coleman, P. (2006). Conflict, complexity and change: A meta-framework for addressing protracted, intractable conflict-III. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 12* (4), 325-348.

Druckman, D. (2005). *Doing research: Methods of inquiry for conflict analysis*. California: SAGE Publication, Inc.

Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Oslo: PRIO.

Gallo, G. (2012). *Conflict theory, complexity and systems approach: Research paper system research and behavioral science*. Wiley: Online Library.

Institut Titian Perdamaian. (2005). *Mari mencegah konflik*. Jakarta: ITP dan TIFA Foundation.

Malik, I., Kusumadewi, L.R., Widyanti, S. (2007). *Bergerak bersama mencegah konflik*. Jakarta: ITP dan TIFA Foundation.

Malik, I., Kusumadewi, L.R., Widyanti, S. (2007). *Belajar mengelola konflik*. Jakarta: ITP dan TIFA Foundation.

Malik, I. (2006). Bakubae, intervensi kreatif, dan resolusi konflik di Maluku. *Jurnal Psikologi Sosial, 12*(2), 95-104.

Yanuarti. S., *et al.* (2003). Konflik di Maluku Tengah: Penyebab, karakteristik dan penyelesaian jangka panjang. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

21
Revolusi Mental dan Pencegahan Konflik Antar Kelompok: Mengurangi Internalisasi Identitas Kelompok yang Berlebih Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Kelompok

Ichlas Nanang Afandi

Pengantar

Keutuhan NKRI yang menjadi dambaan kita bersama, salah satunya ditentukan pada bagaimana mereduksi gesekan antar kelompok yang sangat rentan terjadi. Tentu bukanlah pekerjaan mudah mewujudkan hal tersebut, mengingat betapa majemuknya kelompok yang ada di bangsa ini. Merumuskan metode pencegahan konflik antar kelompok berbanding lurus dengan fakta yang disebut di atas. Mereduksi sentimen-sentimen antar kelompok pada suatu area dengan kemajemukan yang besar memerlukan analisis yang komprehensif serta energi yang besar. Farrel & Meyer (dalam Duffy & Wong, 2003) menyebutkan bahwa pencegahan kekerasan dan konflik antar kelompok hendaklah komprehensif dan memperhatikan berbagai aspek. Namun kita dapat memulai melakukannya dari sebuah area yang menjadi representasi kemajemukan bangsa ini. Revolusi mental untuk mengurangi konflik antar kelompok dapat kita mulai dari Universitas-Universitas yang ada di negeri tercinta ini.

Konflik Antar Mahasiswa di Makassar: Sebuah Gambaran Ideal Bagaimana Identitas Kelompok Berperan

Mengapa mahasiswa Makassar? Pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Fakta-fakta yang terjadi baik yang terliput media ataupun tidak, sudah dapat menggambarkan mengapa mahasiswa Makassar sangat tepat dijadikan “sampel” untuk menjelaskan terjadinya konflik antar kelompok.

Hipotesis awal yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah bahwa konflik antar mahasiswa di Makassar disebabkan oleh internalisasi identitas

kelompok secara berlebihan yang kemudian menghasilkan sentimen antar kelompok (salah satu manifestasinya adalah ketika salah satu anggota kelompok tersakiti maka anggota kelompok lain akan ikut merasakan tanpa perlu memahami substansi permasalahan yang sebenarnya).

Jika kita cermati lebih jauh lagi, konflik antar mahasiswa yang terjadi di Makassar sangat jarang melibatkan mahasiswa dari fakultas yang sama. Konflik yang terjadi biasanya melibatkan mahasiswa dari fakultas yang berbeda, misalnya: fakultas Teknik vs fakultas Hukum atau fakultas Teknik vs FISIP, atau antar fakultas lainnya yang berasal dari fakultas yang berbeda. Berikut fakta-fakta yang memperkuat argumen tersebut (sumber: Kompas, Selasa, 30 Desember 2008):

1. Tanggal 26 Februari 2008, di Universitas Hasanuddin Makassar terjadi tawuran yang melibatkan mahasiswa fakultas Teknik, fakultas Ekonomi, fakultas Sosial dan Politik (FISIP), serta fakultas Hukum. Setidaknya enam mahasiswa terluka akibat perang batu. Diduga, hal tersebut terkait dengan kasus pemukulan yang terjadi sebelumnya.

2. Tanggal 23 September 2008, di Universitas Negeri Makassar terjadi tawuran antar mahasiswa fakultas Seni dan Desain dengan mahasiswa fakultas Teknik. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

3. Tanggal 3 November 2008, di Universitas 45 Makassar terjadi tawuran antar mahasiswa fakultas Teknik dengan mahasiswa fakultas Hukum. Penyebab pastinya tidak diketahui, namun diduga karena cekcok salah seorang mahasiswa fakultas Teknik dengan seorang mahasiswa fakultas Hukum. Alat-alat yang digunakan dalam tawuran sangat mengerikan karena menggunakan senjata tajam (parang dan badik), batu, hingga senjata rakitan (busur dan papporo'). Tercatat beberapa mahasiswa mengalami luka yang cukup serius

4. Tanggal 18 Oktober 2008, di Universitas Islam Makassar terjadi tawuran antara mahasiswa FISIP dengan mahasiswa fakultas Teknik. Tawuran diduga terjadi karena masalah penyelenggaraan pesantren mahasiswa. Seorang mahasiswa sempat dirawat di RS karena dadanya terkena lemparan batu. Dua mahasiswa lain luka memar. Sejumlah motor rusak dan kaca masjid kampus pecah.

Fakta yang dikemukakan di atas erat kaitannya dengan internalisasi identitas kelompok secara berlebihan yang kemudian memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan terjadinya konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok Mahasiswa yang terjadi di Makassar sebagai akibat internalisasi identitas kelompok secara berlebihan

pada akhirnya memunculkan prasangka dan stereotiping negatif satu kelompok terhadap kelompok lain, yang kemudian memunculkan sentimen dan diskriminasi lintas kelompok. Stott & Reicher (1998) melalui penelitiannya menemukan besarnya pengaruh persepsi akan perbedaan-perbedaan (heterogenus) suatu kelompok terhadap kelompok lain yang kemudian menjadi penyebab terjadinya kekerasan antar kelompok.

Identitas Kelompok: Konsep, dan Perannya Terhadap Terjadinya Konflik antar Kelompok

Teori Identitas Kelompok mengkonstruksi pemahaman mengenai bagaimana hubungan antar kelompok, dan menjadi elemen kunci dalam menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku individu dalam kelompok sosialnya. Identitas kelompok menjelaskan bagaimana keanggotaan seseorang dalam sebuah kelompok mengarahkannya dalam mempersepsi orang lain dan dirinya sendiri (Tajfel, dalam Code & Zap, 2009). Tajfel dan Turner (dalam Dovidio, dkk, 2010) menyebut identitas kelompok sebagai respons individu untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian dari sistem kelompok yang ditempatinya. Dalam kondisi demikian, kebutuhan kelompok, tujuan kelompok, dan standar-standar kelompok, melebihi kebutuhan, tujuan, dan juga standar pribadi (Dovidio, dkk, 2010).

Bagaimana identitas kelompok kemudian berperan dalam terjadinya konflik dibuktikan oleh beberapa penelitian. Drury & Winter (2004) melalui studi literatur yang dilakukannya menemukan fakta bahwa identitas kelompok merupakan sumber terbesar terjadinya kekacauan atau kekerasan massa, termasuk kekerasan di dunia kampus. Sementara Reicher & Stott (dalam Drury & Reicher, 1999) menyatakan bahwa identitas kelompok merupakan faktor pemberdaya yang paling hebat terhadap terjadinya aksi kelompok. Dalam penelitian yang dilakukannya, Drury & Reicher (1999) menemukan besarnya pengaruh identitas kelompok terhadap terjadinya proses-proses dinamika kelompok yang menghasilkan perilaku-perilaku kelompok (kolektif), termasuk perilaku agresif.

Besarnya pengaruh identitas kelompok terhadap terjadinya konflik antar kelompok juga dibuktikan oleh kajian yang dilakukan Hewstone & Greenland (2000) yang menemukan bahwa faktor identitas kelompok merupakan faktor terdepan yang menentukan terjadinya konflik antar kelompok. Dalam kajian literatur yang dilakukannya, Hewstone & Greenland menganalisis beberapa faktor yang menentukan terjadinya konflik antar kelompok. Berdasarkan atas kajian literatur tersebut, mereka menemukan bahwa faktor identitas kelompok jauh lebih berperan dibandingkan faktor-faktor lain seperti etnosentrisme dan faktor konflik kelompok realistis.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Riketta (2005) yang menelaah peran identitas kelompok dan penerimaan terhadap kelompok lain terhadap terjadinya konflik antar kelompok. Dalam studi tersebut, Riketta menemukan bahwa individu yang relatif tinggi identitas kelompoknya lebih rendah penerimaannya terhadap kelompok lain yang kemudian mempertinggi risikonya untuk terlibat konflik antar kelompok. Studi yang dilakukan Riketta ini, semakin memperkuat argumen bahwa identitas kelompok yang tinggi merupakan prediktor yang sangat luar biasa terhadap terjadinya konflik antar kelompok (kekerasan antar kelompok). Terri, dkk (2000) melalui penelitian yang dilakukannya juga menemukan adanya hubungan antara identitas kelompok terhadap terjadinya sikap dan perilaku antar kelompok (termasuk perilaku kekerasan).

Identitas kelompok yang kemudian menghasilkan kategorisasi diri atas kelompok, biasanya akan menghasilkan bias dalam memandang kelompok lain. Bias dalam memandang kelompok lain merupakan faktor yang mempertinggi risiko terjadinya konflik antar kelompok. Dalam sebuah sudi yang dilakukannya, Hewstone, dkk (2002) menemukan besarnya peran bias dalam memandang kelompok lain terhadap terjadinya kekerasan sosial. Dari kajian yang mereka lakukan, dapat disimpulkan bahwa bias dalam memandang kelompok lain menjadi dasar terbentuknya identitas kelompok, kategorisasi diri pada kelompok, yang kemudian menghasilkan prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok lain, dan memunculkan upaya suatu kelompok untuk mendominasi kelompok lain. Elemen-elemen yang disebutkan tersebut merupakan elemen-elemen yang mempertinggi risiko terjadinya konflik antar kelompok (kekerasan sosial).

Internalisasi identitas kelompok secara berlebihan akan menghasilkan bias dalam memandang kelompok lain. Bias inilah yang kemudian mempertajam prasangka dan streotipinng, yang pada akhirnya memunculkan perilaku diskriminatif satu kelompok ke kelompok lain.

Mengurangi Internalisasi Identitas Kelompok yang Berlebih Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Kelompok

Identitas kelompok merupakan ikhwal yang tidak mungkin dihilangkan pada diri individu. Sebagai makhluk sosial, sepanjang kehidupanya, disadari atau tidak, individu selalu menjadikan sebuah kelompok tertentu sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku (internalisasi identitas kelompok). Untuk itu, upaya yang dapat kita lakukan hanyalah mengurangi internalisasi yang salah dan berlebih pada identitas kelompok yang ada pada diri tiap-tiap individu. Pengurangan internalisasi identitas kelompok secara tepat, akan

mengurangi bias individu dalam memandang kelompok lain, yang pada akhirnya akan mereduksi sikap diskriminatif dan permusuhan terhadap kelompok lain. Jika ini dapat tereduksi, maka potensi terjadinya konflik dapat diminimalisir. Brew & Miller (dalam Hewstone & Greenland, 2000) menyatakan bahwa cara paling ideal mencegah terjadinya konflik antar kelompok adalah dengan mengurangi pengaruh identitas dan kategorisasi kelompok yang menghasilkan diskriminasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan antar kelompok.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan asumsi bahwa dunia kampus (Universitas) merupakan representasi alami dari kemajemukan bangsa Indonesia, maka upaya-upaya yang dimaksud akan dimulai dari Universitas. Harapan yang dibangun ialah, jika dalam Universitas telah terbangun suasana yang kondusif dan terbebas dari konflik yang signifikan, maka insya Allah hal itu akan berimbas pada suasana bangsa dan negara yang juga kondusif serta terbebas dari konflik antar kelompok.

Farrel & Meyer (dalam Duffy & Wong, 2003) menyebut pencegahan konflik antar kelompok dalam lingkungan Universitas fokus pada bagaimana membangun kepercayaan dan penghargaan pada orang lain dalam kelompok yang berbeda, tetap memperhatikan kondisi alami dari timbulnya konflik, bagaimana me-manajemen kemarahan, bagaimana meng-klarifikasi nilai *(values)*, bagaimana konsekuensi dari berkelahi (konflik fisik), dan menemukan alternatif penyelesaian masalah tanpa harus berkelahi (konflik fisik).

Berikut hal-hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi internalisasi identitas kelompok yang berlebih pada Mahasiswa:

1. Pelatihan terhadap dosen untuk meningkatkan keterampilan resolusi konflik dan pemahaman akan perbedaan kelompok (fakultas) pada Mahasiswa. Pada konteks bangsa dan negara, pelatihan dilakukan pada aparat negara (Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua RT/RW, serta Tokoh-Tokoh Masyarakat)

2. Perekrutan, pelatihan, dan pengawasan terhadap Mahasiswa untuk kemudian dijadikan "agen" resolusi konflik yang "sehat" dan pemahaman akan perbedaan kelompok (fakultas) dalam kampus. Pada konteks bangsa dan negara, perekrutan dan pelatihan dilakukan kepada siapa saja anggota masyarakat yang berminat. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali.

3. Instruksi kelas untuk meningkatkan keterampilan resolusi konflik yang "sehat" dan pemahaman akan perbedaan kelompok pada mahasiswa. Pada konteks bangsa dan negara kegiatan ini dapat dilakukan di gedung-gedung pemerintah atau di area-area

publik. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali, misalnya setiap hari sabtu minggu ke empat.

4. Pelaksanaan "jigsaw" antar fakultas (diskusi silang antar fakultas) untuk mengurangi persepsi akan perbedaan fakultas serta meningkatkan rasa kebersamaan sebagai satu kesatuan mahasiswa. Topik-topik yang didiskusikan adalah isu-isu dan kejadian-kejadian kontemporer mengenai kekerasan yang terjadi dalam dunia kampus. Pada konteks bangsa dan negara, "jigsaw" dapat dilakukan antar suku, agama, ras, dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan dilakukan untuk mengurangi persepsi akan perbedaan yang ada serta meningkatkan kebersamaan sebagai satu kelompok bangsa dan negara Indonesia. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali, setelah kegiatan instruksi kelas (butir 3) dilaksanakan.

5. Pelaksanaan upacara bersama (semua fakultas) bagi mahasiswa baru untuk mengurangi besarnya persepsi akan perbedaan antar fakultas. Kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan perkuliahan mahasiswa baru (tahun ajaran baru) dimulai.

6. Pelaksanaan sosial artistri (sosiodrama) yang substansinya adalah pemberian gambaran pada mahasiswa baru bahwa pelaku tindak kekerasan (tawuran) adalah seorang yang tidak berpendidikan, tidak beradab, tidak berakal sehat, serta tidak berbeda dengan hewan yang hanya mengandalkan otot. Kegiatan dilakukan setelah kegiatan upacara bersama (butir 4) dilaksanakan.

Penutup

Bukanlah hal yang mudah mengurangi internalisasi identitas kelompok yang berlebih pada Mahasiswa dan masyarakat umum. Meski demikian, tidaklah bijak untuk hanya tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa dalam menanggapi masalah tersebut. Mengurangi internalisasi identitas kelompok yang berlebih pada Mahasiswa, terlebih masyarakat umum bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, diharapkan dapat mewujudkan asa kita bersama dalam menciptakan bangsa dan negara yang bebas dari konflik antar kelompok yang sangat merugikan, tidak hanya bagi kita yang hidup saat ini, namun juga bagi anak cucu kita yang kelak akan mendiami bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Daftar Acuan

Mewaspadai upaya penuggangan aksi mahasiswa. (2008, Desember). *Kompas.*

Code, J.R., & Zap, N. (2009). Social identities, group formation, and the analysis of online communities. IGI Global.

Drury, J., & Reicher, S. (1999) The intergroup dynamics of collective empowerment: substantiating the social identity model of crowd behavior. *Group Processes & Intergroup Relations*, *2*(4), 381-402.

Drury, J., & Winter, G. (2004, Winter). Social identity as a source of strength in mass emergencies and other crowd events. *International Journal of Mental Health, 32*(4), 77–93.

Dovidio, J.F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V.M. (2010). Prejudice, stereotyping, and discrimination: Theoretical and empirical overview. Dalam J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. M. Esses (Eds.), *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination* (pp. 3-28). London: Sage.

Duffy, K., & Wong, F. (2003). Community psychology. Boston, MA: Pearson Education.

Hewstone, M., dkk (2002). Intergroup bias. *Annual Review of Psychology, 53*, 575-604.

Hewstone, M., & Greenland, K. (2000). Intergroup conflict. *International Journal of Psychology, 35*(2), 136-144.

Riketta, M. (2005). Cognitive differentiation between self, ingroup, and outgroup: The roles of identification and perceived intergroup conflict. *European Journal of Social Psychology, 35*, 97–106.

Stott, C., & Reicher, S. (1998). Crowd action as intergroup process: Introducing the police perspective. *European Journal of Social Psychology, 28*, 509-529.

Terry, D.J., dkk. (2000). Attitude-behaviour relations: The role of in-group norms and mode of behavior decision making. *The British Journal of Social Psychology*; *39*, 337.

22
Menentang Diskriminasi, Merentang Persaudaraan

Clara Moningka & Steven Wijaya

"Orang tua saya tidak memperbolehkan saya berpacaran dengan orang yang berbeda suku dari saya"
"Orang tua saya tidak pernah berbicara mengenai perbedaan",
"Keluarga saya mengajarkan saya bahwa suku dan agama saya yang paling baik"

Kutipan di atas adalah apa yang diutarakan mahasiswa saya di dalam kelas Psikologi Lintas Budaya. Ketika saya ajak berdiskusi mengenai perbedaan, mereka semula cenderung diam, berbisik-bisik dengan teman di sebelahnya, sampai ada satu mahasiswa yang berani angkat suara menceritakan mengenai perbedaan agama dan suku antara ayah dan ibunya. Ia menceritakan bahwa hal ini kerap menjadi konflik dan pergulatan dalam dirinya sendiri. Baru kemudian yang lain angkat bicara dan mulai memperbincangkan mengenai perbedaan.

Perbedaan dalam masyarakat bukanlah sesuatu hal yang baru dibicarakan. Di kota besar seperti Jakarta yang sudah merupakan wadah percampuran berbagai individu dari berbagai bangsa atau etnis (*melting pot*), konflik dan berbagai perdebatan mengenai perbedaan, diskriminasi, dan prasangka tetap masih hangat. Yang paling mengkhawatirkan, hal ini juga dialami oleh para golongan terpelajar. Bayangkan di saat modernitas merambah ke berbagai sektor, isu mengenai perbedaan tetap hangat bahkan kerap kali menimbulkan konflik.

Di negara kita, Indonesia dengan semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika"* atau berbeda-beda tetapi satu jua, konflik antar suku dan etnis akrab di masyarakat kita. Sebut saja konflik Dayak dan Madura, konflik di Ambon antar penganut agama yang berbeda, bahkan konflik antar suku di Papua. Asas yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat kita di mana perbedaan seharusnya mempersatukan, sepertinya hanya sekedar istilah saja.

Sangat disayangkan bahwa semboyan yang begitu indah; tidak hanya dari arti namun juga pengejawantahannya hanya sia-sia belaka. Kita tinjau saja konflik antar etnis yang seringkali muncul, yaitu konflik antara etnis keturunan Tionghoa dengan etnis pribumi.

Etnis Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak abad ke-9 pada masa Dinasti Tang (618-907). Saat itu banyak orang Tionghoa datang ke Indonesia untuk tujuan berdagang. Namun dengan waktu tempuh yang lama, banyak dari orang Tionghoa tersebut menetap di Indonesia. Masuknya budaya Tionghoa ke Indonesia turut memberikan warna pada budaya asli Indonesia, misalnya pada relief bangunan, motif batik, dan kesenian lainnya. Hal ini merupakan proses akulturasi, perpaduan dua kebudayaan yang sebenarnya sangat unik. Etnis Tionghoa sendiri memiliki budaya yang unik dengan beragam ritual. Masyarakat Tionghoa juga kerap memiliki keberakaran yang kuat terhadap budayanya. Mereka cenderung mempertahankan budaya leluhur yang ada.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Biro Pusat Statistik tahun 2010, jumlah etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 1.2% dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Meskipun menjadi kelompok minoritas, namun peranan etnis Tionghoa di Indonesia tidaklah kecil. Dalam bidang perekonomian, 90% perekonomian di Indonesia dikendalikan oleh etnis Tionghoa (Adidharta, 2013). Etnis Tionghoa bahkan terlibat dalam perang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan, banyak dari warga keturunan Tionghoa yang memberikan kontribusi dalam bidang olahraga (sebut saja Susy Susanti dan Alan Budikusuma), pendidikan, dan lain sebagainya. Meskipun sudah memberikan peranan yang cukup banyak bagi negeri ini, namun etnis Tionghoa tetap mendapatkan perlakuan diskriminasi dari kelompok pribumi.

Jika ditelusuri pada awalnya etnis Tionghoa yang menetap di Indonesia hidup berdampingan dengan warga setempat. Tidak pernah terjadi bentrokan diantara mereka sampai adanya VOC (*Veeregnigde Oost Indische Compagnie*), kamar dagang Belanda di Indonesia. VOC dengan politik memecah belah (*devide et impera*) berusaha memisahkan warga etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat. Secara wilayah atau tempat tinggal, etnis Tionghoa dipisahkan dari warga setempat. Mereka dianggap sebagai warga timur asing (*vreemde-oosterlingen*) yang statusnya lebih tinggi dari masyarakat setempat (*inlander*) (Wijayakusuma, 2005). Politik memecah belah ini dilakukan karena VOC merasa terancam dengan etnis Tionghoa yang memiliki andil besar dalam perdagangan dan dapat hidup berdampingan. Politik memecah belah tersebut menyebabkan penduduk setempat memiliki prasangka terhadap warga etnis Tionghoa. Pada kenyataannya, warga etnis Tionghoa sendiri mendapatkan perlakuan yang tidak baik, seperti peraturan harus adanya ijin tinggal, perampasan harta, bahkan dipenjara dengan alasan yang tidak jelas, sampai

terjadi pembantaian massal tahun 1740 yang dikenal dengan tragedi berdarah Angke (kali Angke). Dalam peristiwa itu kurang lebih 10.000 warga etnis Tionghoa terbunuh. Tidak hanya dibunuh, mereka juga difitnah ingin mengambil alih Batavia, sehingga kaum bumi putra menjadi marah dan apatis terhadap mereka (Wijayakusuma, 2005). Rasa marah dan prasangka yang terjadi masih bertahan sampai saat ini. Hal ini sesuai teori Jung mengenai ketidaksadaran kolektif (*collective unconsciousness*).

Pardede, dkk. (2002) juga mengemukakan bahwa masyarakat pribumi membangun dan memiliki prasangka bahwa semua etnis Tionghoa adalah komunis dan karena prasangka tersebut muncullah sikap-sikap diskriminasi. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, semua WNI Keturunan Tionghoa tidak diperkenankan untuk menggunakan nama Tionghoa mereka. Mereka harus mengubah nama mereka dan wajib memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia yang merupakan sebuah kartu identitas tambahan (Gusti, 2010).

Perlakuan diskriminasi ini pun berlanjut hingga tindakan anarkis berupa kerusuhan anti Cina. Kerusuhan tersebut berupa penjarahan, perusakan dan pembakaran properti-properti milik kaum Tionghoa dan memuncak pada saat pecahnya kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan ini mengakibatkan banyak pertokoan dan perusahaan milik warga negara keturunan Tionghoa yang dirusak dan dihancurkan oleh massa, dan yang lebih parah lagi adalah ratusan wanita keturunan Tionghoa yang menjadi korban pelecehan seksual, pemerkosaan sampai pembunuhan secara brutal.

Diskriminasi ini sangatlah sulit untuk dihilangkan karena adanya stereotipe dan prasangka terhadap seseorang atau kelompok orang. Stereotipe ini bersifat otomatis, akan aktif tanpa disadari orang yang bersangkutan (Bargh, Chartrand, Greenwald & Banaji dalam Sanderson, 2010). Stereotipe sendiri merupakan hasil dari pembelajaran sosial (Sanderson, 2010). Meskipun sulit untuk dihilangkan, namun diskriminasi masih dapat ditekan dengan cara mengurangi munculnya stereotipe. Dalam hal ini pengurangan stereotipe dan prasangka dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah interaksi, memberlakukan kesetaraan, menciptakan identitas yang lebih umum, belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain, dan mempelajari informasi tentang orang lain (Sanderson, 2010). Dampak dari diskriminasi sendiri adalah rasa cemas, tidak aman, bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan, sementara rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Terlepas dari permasalahan perlakuan diskriminasi yang diterima oleh etnis Tionghoa, telah terjadi percampuran antara budaya lokal dengan budaya Tionghoa.

Contohnya adalah kebaya encim yang mengandung unsur Betawi. Akulturasi pun terlihat dari segi bahasa yang digunakan oleh etnis Tionghoa di mana mereka juga menggunakan bahasa nasional, Bahasa Indonesia, pada keseharian mereka (Coppel, 2003). Dalam hal ini akulturasi memang sudah terjadi, namun bagaimana pandangan etnis Tionghoa sendiri terhadap akulturasi ini mengingat sejarah yang telah menorehkan kenangan buruk bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa ini?

Berdasarkan *APA Dictionary of Psychology* (2007), akulturasi adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai sosial budaya, ide, kepercayaan, dan perilaku antara budaya asli dengan budaya asing yang terjadi pada individu maupun kelompok. Menurut Bourhis (2013), akulturasi merujuk pada proses di mana kebudayaan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas dapat dipengaruhi dan dapat berubah karena adanya kontak interkultural. Menurut Berry (dalam Bourhis & Montreuil, 2004), akulturasi terjadi pada kedua belah pihak, baik pihak minoritas maupun pihak mayoritas dan hal ini ditujukan agar mereka dapat beradaptasi terhadap keberagaman. Matsumoto dan Juang (2013) juga memberikan pendapat senada berkenaan dengan akulturasi, yaitu proses individu mengadopsi budaya yang berbeda dengan budaya asli individu tersebut dan memahaminya. Proses ini sangat penting bagi setiap individu dewasa ini karena dengan itu mereka dapat mempertahankan dan menyesuaikan diri di lingkungan mereka yang baru.

Perlu adanya pengetahuan mengenai orientasi akulturasi pada kelompok mayoritas dan minoritas, yang ditujukan untuk program intervensi. Di Quebec, Canada, program intervensi terhadap diskriminasi dilakukan sedini mungkin yaitu di pendidikan dasar. Anak-anak dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan diskriminasi seperti dilabel bodoh, tidak bisa, dan tidak rapi. Tentu saja eksperimen ini dilakukan dengan kontrol yang sangat ketat. Pada eksperimen ini, anak-anak yang mendapatkan perlakuan diskriminasi merasa sedih, marah, apatis. Berarti mereka merasakan penderitaan orang yang mendapatkan perlakuan tersebut. Namun apabila peran mereka ditukar, di mana yang tadinya didiskriminasikan menjadi kelompok yang diunggulkan, mereka cenderung akan merasa senang dengan posisi atau keadaan tersebut. Jelas terlihat dari penelitian ini bahwa walaupun ada kesadaran betapa sedihnya menjadi orang yang didiskriminasikan, pada dasarnya individu akan menikmati keadaan di mana mereka dianggap superior.

Berdasarkan adanya keprihatinan terhadap konflik dan praktek diskriminasi yang terjadi di Indonesia, Wijaya dan Clara (2014) membuat suatu penelitian mengenai orientasi akulturasi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Penelitian ini bertujuan menjadi landasan intervensi bagi tragedi diskriminasi yang terjadi di negeri ini. Penelitian ini

menggunakan *The Interactive Acculturation Scale* (IAM). Skala pengukuran menggambarkan mengenai bagaimana proses akulturasi yang terjadi pada kelompok nasionalis/warga negara mayoritas, kelompok nasionalis/warga negara minoritas maupun imigran (Bourhis & Montreuil, 2013). Terdapat lima kategori orientasi yang mungkin muncul yaitu:

Integration, para anggota kelompok minoritas memandang diri mereka sebagai invidu yang memiliki dua buah kebudayaan yaitu kebudayaan asli mereka dan juga hasil adaptasi dari budaya tempat mereka tinggal. Dalam hal ini mereka berkeinginan melakukan kontak dalam kelompok maupun di luar kelompok budayanya.

Individualism, kelompok mayoritas memandang individu bukan berdasarkan asal kelompoknya.

Assimilationism, kelompok minoritas diharuskan untuk mengadopsi kebiasaan-kebiasaan dari kelompok mayoritas yang sebenarnya kurang mereka sukai.

Separation, adalah sikap yang bertolak belakang dengan prinsip *integrationism,* di mana kelompok minoritas akan berusaha mempertahankan keaslian nilai-nilai budaya mereka tanpa mau diusik oleh kebudayaan dari kelompok mayoritas.

Marginalization, adalah sikap acuh tak acuh dari kelompok minoritas di mana mereka tidak mau mempertahankan kebudayaan asli mereka, namun segan beradaptasi dengan budaya kelompok mayoritas.

Skala IAM sendiri terdiri dari 25 aitem yang terbagi menjadi lima dimensi: budaya (*culture*), pernikahan *(endogamy/exogamy),* tempat tinggal (*housing*), pekerjaan (*employment*), dan bahasa *(language)*. Wijaya dan Clara (2014) juga menambahkan *Focus Group discussion* dan kuesioner terbuka berkenaan dengan akulturasi untuk mengetahui perasaan, sikap WNI etnis Tionghoa saat ini dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa poin terbesar adalah pada orientasi *integrationism;* di mana secara umum WNI keturunan Tionghoa merasa bahwa mereka merupakan bagian dari NKRI. Mereka memiliki budaya asli yang mereka pelihara, namun mereka juga telah beradaptasi dengan budaya Indonesia, bahkan ada dari mereka yang melakukan proses sosialisasi pada keturunannya; di mana budaya asal mereka adalah budaya Indonesia dan secara turun temurun mengajarkan budaya tersebut kepada anak mereka. Sebagai keturunan ke-2 dan ke-3 mereka sendiri sudah kurang mengenal budaya asli Tionghoa. Walaupun penelitian ini belum mewakili populasi etnis Tionghoa di Indonesia, namun terlihat bahwa ada potensi untuk bersatu dan mau menerima yang perlu dijaga.

Pada dimensi pernikahan, sampel pada penelitian ini lebih memilih orientasi *separatism*, sedangkan *assimilationism* mendapatkan skor terendah. Dalam hal ini mayoritas responden memilih untuk menikah dengan sesama keturunan Tionghoa, walaupun ada juga yang memilih untuk menikah dengan orang berbeda etnis. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan budaya asal/asli. Pada dasarnya setiap orang akan merasa nyaman bila menjadi bagian dari *in-group.* Dalam hal ini, *in-group* yang dimaksud adalah etnis itu sendiri. Pada dimensi tempat tinggal WNI keturunan Tionghoa mau bergabung dengan siapa saja. Mayoritas responden lebih memilih untuk bertempat tinggal di lingkungan yang terdapat etnis Tionghoanya maupun kelompok pribuminya.

Pada dimensi *employment* atau pekerjaan, orientasi yang dominan adalah *integrationism*. Dimensi ini menunjukkan bahwa responden memilih untuk bekerja dengan rekan yang berasal dari etnis Tionghoa maupun kelompok pribumi. Pada dimensi yang terakhir, yaitu *language*, responden lebih mengarah kepada orientasi *individualism*. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa apa pun yang digunakan tidaklah menjadi masalah karena yang terpenting adalah kepribadian dari orang tersebut. WNI keturunan Tionghoa sendiri merasakan adanya hambatan untuk dapat benar-benar berbaur, karena adanya sejarah konflik yang berhubungan dengan SARA. Memang tidak semua WNI etnis Tionghoa merasakan hal tersebut, namun pada kenyataannya, adanya hambatan dalam berhubungan sosial karena stereotipe dan prasangka adalah hal yang perlu mendapat perhatian. Tidak jarang WNI etnis Tionghoa merasa mendapatkan penolakan dan mendapatkan kekerasan verbal. Mereka juga merasa bahwa etnis pribumi dengan status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan lebih tinggi dapat menerima mereka, sebaliknya warga pribumi dengan tingkat ekonomi rendah dan tingkat pendidikan yang kurang baik memiliki kecenderungan menolak keberadaan etnis Tionghoa. WNI etnis Tionghoa sendiri mempersepsi bahwa etnis pribumi menganggap mereka sebagai ancaman, yaitu hendak merampok kekayaan negeri ini dan kelompok pendatang yang menindas dan mendominasi.

WNI etnis Tionghoa sendiri merasa perlu adanya akulturasi, perlu adanya penerimaan dari kelompok mayoritas. Penerimaan tersebut menimbulkan rasa aman pada kelompok minoritas. Ada sebagian dari mereka merasa sudah tidak peduli terhadap konsep tersebut asalkan aman dan tidak diganggu. Berry (2006) mengemukakan bahwa seseorang yang mengalami perlakuan buruk (diskriminasi) kemungkinan akan sulit untuk berbaur dan menerima lingkungannya, dan bahkan dengan terpaksa meninggalkan budaya asal mereka.

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang menunjukkan betapa Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa merindukan adanya penerimaan dalam pergaulan

sosial mereka, bebas dari stereotipe dan prasangka. Seperti sudah disebutkan, di negara maju seperti Kanada dengan penduduk multi etnis mulai ada program anti diskriminasi sejak dini. Mereka menyadari bahwa penduduk minoritas cenderung mendapatkan tekanan. Hal ini terjadi sejak mereka kecil, di mana anak juga menjadi korban diskriminasi di sekolah karena etnis mereka. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dan adidaya yang juga menjunjung tinggi hak individual dan hak asasi manusia juga berupaya menekan diskriminasi yang masih terjadi secara laten, di mana dalam struktur masyarakat hal semacam ini masih terjadi.

Pada kenyataannya sangat sulit membuang perasaan negatif atau prasangka terhadap individu atau etnis lain. Sanderson (2010) bahkan mengemukakan bahwa tindakan diskriminasi tidak akan pernah hilang, namun paling tidak kita dapat mengurangi perilaku tersebut. Paparan mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan kita, termasuk berbagai penelitian mengenai diskriminasi dan prasangka tidak dimaksudkan untuk membuat kelompok individu tertentu menjadi cemas dan takut, namun malah membantu masyarakat untuk menyadari pentingnya *cultural empathy,* empati terhadap budaya. Masyarakat dapat merasakan bagaimana perasaan dari kelompok minoritas atau kelompok yang terpinggirkan.

Tindak diskriminasi pada dasarnya tidak terjadi pada etnis tertentu saja, namun juga pada gender, individu yang difabel, kelompok marginal, dan lain sebagainya. Melihat dampak negatif dari diskriminasi yang bahkan mengakibatkan trauma, perlu adanya kesadaran dari kita sebagai masyarakat yang multikultur dan multietnis. Revolusi mental, yaitu mental yang sehat dan terbuka termasuk dalam menyikapi perbedaan, perlu ditanamkan sejak dini. Jangan sampai generasi mendatang menjadi generasi yang penuh prasangka, penuh kebencian kepada individu ataupun etnis lain. Orientasi kita adalah bagaimana menghargai perbedaan individu yang ada, paling tidak berempati dan mau memahami budaya mereka.

Intervensi berupa kelas *jigsaw* di sekolah sebenarnya dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dasar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya bebas budaya, perlu memberikan contoh yang baik dan bukan mempertajam perbedaan yang ada. Mari kita menyadari bahwa individu lain adalah manusia yang sama dengan kita, gambaran Tuhan sendiri. Menghargai orang lain merupakan bentuk bahwa manusia beradab dan berakal budi. Lihatlah kualitas individual yang ada tanpa melihat atribut etnis, gender dan agama.

Saya jadi teringat ketika berkunjung ke kota kedua terbesar di Jawa timur; Malang, di mana saya dan teman-teman yang merupakan keturunan Tionghoa diperlakukan dengan sopan dan ramah oleh masyarakat mulai dari manager hotel sampai penjual pecel di pinggir jalan. Yang mengharukan, ketika kami ke gereja katedral Ijen di malam Natal ternyata masyarakat beragama muslim juga ikut menjaga keamanan gereja; bahkan ada perwakilan dari pemuda muslim yang menjadi tamu misa natal. Mereka tidak takut mengucapkan selamat Natal. Contoh yang sangat indah, menandakan betapa beradabnya manusia. Mari kita contoh hal ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Daftar Acuan

Adidharta, S. (2013). *Etnis China Tionghoa masih nomor satu kuasai bisnis dan ekonomi Indonesia*. Retrieved from http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/10/04/etnis-china-tionghoa-masih-nomor-satu-kuasai-bisnis-dan-ekonomi-indonesia-595596.html.

Ahira, A. (n.d.). *Peranan etnis Tionghoa dan sejarah kemerdekaan RI.* Diunduh dari http://www.anneahira.com/sejarah-kemerdekaan.htm

American Psychological Association. (2007). *APA dictionary of psychology* (G.R. Vandenbos, Ed..). Washington: American Psychology Association.

Anastasi, A., & Urbina, S. (2007). *Tes psikologi* (7^{th} ed.). Jakarta: PT Indeks.

Berstein, K. S., Park, S. Y., Shin, J., Cho, S., & Park, Y. (2011). Acculturation, discrimination and depressive symptoms among Korean immigrants in New York City. *Community Mental Health Journal, 47,* 24-34.

Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam., D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation identity, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review, 55*(3), 303-332.

Bourhis, R.Y., Barrette, G., El-Geledi, S., & Schmidt, R. (2009). Acculturation orientation and social relation between immigrant and host community members in California. *Journal of Cross-Cultural Psychology, 20,* 10.

Bourhis, R. Y., & Carignan, N. (2013). *Materials for Theme 4. Majority relation with majority communities: Acculturation, orientations, and social cohesion.*

Bourhis, R. Y., & Montruil, A. (2013, January). *Methodological issues related to the Host Community Acculturation Scale (HCAS) and the Immigrant Acculturation Scale (IAS): An update.* UQAM Working Paper, Département de Psychologie, Université du Quéabec à Montréal.

Badan Pusat Statistik. (2012). *Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Coppel, C. A. (2003). Kendala-kendala sejarah dalam penerimaan etnis Cina di Indonesia yang multikultural. *Antropologi Indonesia, 71,* 13-22.

Creswell, J.W. (2009). *Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (3rd ed). California: Sage.

Daniel. (2012). *Saatnya WNI Keturunan Tionghoa memberi bukti*. Diunduh dari http://politik.kompasiana.com/2012/01/24/saatnya-wni-keturunan-tionghoa-memberi-bukti-433404.html?ref=signin

Gusti. (2010). *SBKRI Masih diterapkan di daerah*. Diunduh dari http://www.ugm.ac.id/id/berita/2263-sbkri.masih.diterapkan.di.daerah

Jasmeena. (2012). *Mereka turut mengibarkan merah putih: Atlet-atlet keturunan Tionghoa*. Diunduh dari http://mjeducation.co/mereka-turut-mengibarkan-merah-putih-atlet-atlet-keturunan-tionghoa/

Kambali, A. (2011). *Menelusuri jejak Tionghoa di Jakarta*. Diunduh dari http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/10/menelusuri-jejak-tionghoa-di-jakarta-363698.html

Matsumoto, D., & Juang, L. (2013). *Culture and psychology* (5th ed.). Canada: Wadsworth Cengage Learning.

Medcal. (2014). *Inter-rater agreement (kappa)*. Diunduh dari http://www.medcalc.org/manual/kappa.php

Montreuil, A., & Bourhis, R.Y. (2004). Acculturation orientations of competing host communities toward valued and devalued immigrants. *International Journal of Intercultural Relations, 28*, 507-532.

Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2010). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

NASW. (2001). *NASW standards for cultural competence in social work practice*. Diunduh dari http://www.naswdc.org/practice/standards/NAswculturalstandards.pdf.

Poerwanto, H. (2005). *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.

Prasetijo, A. (2009). *Keberagaman budaya Indonesia*. Diunduh dari http://etnobudaya.net/2009/07/24/keberagaman-budaya-indonesia/

Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996-1999*. Honolulu: University of Hawai Press.

Sanderson, C.A. (2010). *Social psychology*. United States: Wiley.

Sam, D. L., & Berry, J. W. (2006). *Acculturation: Conceptual background and core components.* Cambridge Handbook of Acculturation.

Seniati, L., Yulianto, A., & Setiadi, B. N. (2008). *Psikologi eksperimen*. Jakarta: Indeks.

Setiadi, B. N. (2012). *Pengantar psikologi lintas-budaya dan psikologi indigenous*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Shiraev, E.B., & Levy, D.A. (2010). *Cross-cultural psychology: Critical thinking and contemporary applications* (4^{th} ed.). Boston: Pearson/Allyn Bacon.

Setiono, B.G. (2008). *Tionghoa dalam pusaran politik*. Jakarta: Transmedia.

Sontosudarmo, A., & Tukiran. (2003). *Keragaman etnis dalam pengelolaan wilayah.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Spector, P.E. (2008). *Industrial and organizational psychology* (5^{th} Ed.). United States: Wiley Publisher.

Sulistyawati dan Hadi, C.W. (2011). *Meneladani etos kerja Warga Tionghoa*. Diunduh dari http://profsuli.files.wordpress.com/2011/07/meneladani-etos-kerja-warga-tionghoa.pdf

Tan, M.G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wijayakususma, H. (2005). *Pembantaian massal 1740: Tragedi berdarah Angke*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wikipedia. (2014). *Tionghoa-Indonesia*. Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia.

Wikipedia. (2014). *Tionghoa Benteng*. Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa_Benteng.

Yuwanto, L. (2013). *Etnis Tionghoa (juga) penyebar agama Islam di Indonesia*. Diunduh dari http://www.ubaya.ac.id/2013/content/articles_detail/105/Etnis-Tionghoa--juga--Penyebar-Agama-Islam-di-Indonesia.html

23
Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Bernuansa Agama

Subhan El Hafiz, Yulmaida Amir & Anisia Kumala

Konflik Sosial sebagai Bencana

Indonesia adalah negara yang berada di daerah cincin api (*ring of fire*). Dengan kondisi ini Indonesia rentan dengan terjadinya bencana, namun bukan hanya bencana alam namun juga bencana dari masalah sosial. Dampak dari berkembangnya bencana sosial terlihat dari banyaknya konflik sosial yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Radikalisme yang berlatar belakang agama merupakan fenomena yang semakin mencemaskan kehidupan masyarakat dewasa ini. Gerakan-gerakan semacam tidak hanya menyerang orang/kelompok yang tidak segaris dengan perjuangannya, melancarkan aksi-aksi kekerasan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pada gilirannya, gerakan tersebut tidak hanya mendistorsi kebaikan agama, melainkan juga telah mengancam keamanan masyarakat secara umum.

Beberapa konflik terbaru yang muncul dalam lembaran sejarah Indonesia, antara lain: konflik Lampung, Sumbawa, Cikeusik, Sampang, Bogor, dsb. Sebagian konflik berasal dari masalah agama namun juga ada yang berasal dari masalah kesukuan, dll. Data tersebut belum termasuk konflik yang sudah menjadi kebiasaan dibeberapa wilayah, seperti tawuran antar kampung.

Beberapa kasus konflik sosial berlatar belakang agama yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini diantaranya: konflik Suni-Syiah di Sampang Madura, Konflik Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dan Konflik Gereja Yasmin, di Bogor. Konflik pertama terjadi pada awal 2012, konflik kedua pada awal 2011, dan konflik ketiga terjadi pada pertengahan 2011. Konflik pertama dan kedua menyebabkan munculnya pergesekan langsung hingga

menimbulkan korban materi dan jiwa, sedangkan konflik kedua sangat berpotensi terjadinya pecah konflik sosial namun dapat dicegah oleh aparat keamanan.

Konflik pertama merupakan konflik aliran Islam Sunni dan Syiah yang dipicu oleh perselisihan antara dua orang dalam satu keluarga. Konflik ini kemudian meluas hingga menyebabkan belasan rumah warga Syiah di bakar dan satu korban meninggal. Akibat konflik ini, warga Syiah yang tinggal di Sampang harus mengungsi karena khawatir adanya serangan terhadap mereka (Kompas.com, 26/8/2012).

Konflik kedua adalah konflik antara warga pengikut aliran Ahmadiyah dengan warga Sekitar yang menolak aliran Ahmadiyah. Konflik ini menyebabkan korban meninggal dan merusak rumah dan kendaraan pengikut Ahmadiyah (Kompas.com, 6/2/2011). Berbeda dengan konflik di Sampang, Ahmadiyah tidak diakui sebagai ajaran Islam oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga konflik seolah mendapatkan pembenaran.

Konflik ketiga adalah penolakan warga Bogor atas berdirinya gereja Yasmin di daerah mereka. Penolakan ini mendorong munculnya aksi protes yang hampir berujung pada konflik sosial antara dua kelompok hingga konflik dapat dicegah oleh aparat keamanan. Namun demikian, warga yang akan beribadah di Gereja harus mengurungkan niatnya tersebut (Kompas.com, 14/3/2011).

Berdasarkan tiga konflik diatas, pemerintah seolah selalu terlambat dalam penanganan potensi konflik sosial berlatar belakang agama tersebut. Masuknya petugas keamanan pada dua konflik pertama, terlihat agak terlambat karena korban sudah jatuh dan kerugian sudah muncul akibat konflik. Sedangkan pada konflik di Bogor, petugas keamanan berhasil mencegah adanya konflik langsung walaupun hal itu baru dapat dilakukan pada saat kedua kelompok hampir bertikai dalam konflik sosial.

Namun sebagaimana konsep bencana alam dan penanganan bencana alam, konflik sosial juga merupakan bencana yang perlu ditangani sedini mungkin. Oleh karena itu, bencana sosial juga harus memiliki sistem peringatan dini sehingga dampak negatif yang diakibatkan olehnya dapat ditekan seminimal mungkin. Berdasarkan konsep sistem peringatan dini maka asumsi terhadap konflik sosial adalah setiap konflik sosial tidak pernah terjadi secara tiba-tiba kecuali kita tidak bisa mengenali gejala sosial yang muncul.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah adakah gejala di masyarakat yang dapat diamati untuk menentukan seberapa besar potensi untuk terjadinya konflik sosial berlatar belakang agama? Beberapa artikel dan penelitian mencoba menjawab pertanyaan ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Schrodt dan Gerner (2000) serta Wulf

dan Debiel (2009) terhadap konflik yang berskala besar hingga melibatkan institusi negara. Artikel Wulf dan Debiel mencoba menjelaskan strategi penanganan konflik yang bersifat nasional dan regional, sedangkan penelitian Schrodt dan Gerner dalam keluasan area yang sama, yaitu negara, lebih fokus pada perubahan politik sebagai faktor untuk memprediksi konflik.

Pada level mikro, terdapat konsep anak tangga menuju terorisme (*staircase to terrorism*) dari Moghaddam (2005) yang dapat mendeteksi tingkat resiko seseorang melakukan aksi teror yang merupakan letupan dari konflik sosial. Namun demikian, model yang diajukan ini terlalu mikro sehingga sulit untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya konflik sosial yang lebih luas dalam wilayah seperti: desa, kecamatan, atau kabupaten. Selain itu, konflik sosial dalam cakupan yang lebih luas ini biasanya tidak selalu dilakukan oleh individu yang punya kecenderungan terorisme.

Milla (2013) mengatakan, berdasarkan rangkaian hasil penelitiannya, hanya sedikit orang yang memiliki kecenderungan radikal untuk menjadi pelaku teror. Hal ini menjadi dasar bahwa konflik sosial yang dilakukan oleh banyak orang secara massif hanya mungkin diikuti oleh sangat sedikit orang yang memiliki semangat radikalisme dan menjadi pelaku teror. Sedangkan sebagian besar pelaku justru orang "normal" yang tidak terbiasa dengan kekerasan namun terpancing oleh situasi psikososial hingga akhirnya ikut melakukan kekerasan yang menyebabkan munculnya konflik sosial.

Schmeidl dan Jenkins (1998) telah menulis artikel mengenai pentingnya sistem peringatan dini masalah kemanusiaan. Sistem peringatan dini yang dimaksud adalah perangkat analisis untuk menjadi pedoman melakukan analisa terhadap fakta yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya masalah kemanusiaan pada masa yang akan datang. Namun, Schmeidl dan Jenkins juga mengatakan bahwa diskusi akademis terkait masalah peringatan dini ini lebih banyak faktor penyebab munculnya konflik, misalnya kemiskinan, masalah politik, dan masalah etnik.

Akibatnya, sistem peringatan yang sudah dibuat terlalu jauh kebelakang hingga sulit untuk memprediksi kemungkinan terjadinya konflik dalam jangka waktu yang lebih singkat. Schmeidl dan Jenkins (1998) mengatakan sistem ini menyebabkan ketidakpastian para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Akhirnya sistem ini terkendala dalam kredibilitasnya karena sistem yang ada sulit untuk dibuktikan kebenarannya.

Creative Associates International (CAI), sebuah lembaga yang bertujuan mencegah konflik di Afrika, menawarkan beberapa model untuk mengatasi masalah konflik sosial.

Namun model tersebut tidak secara spesifik menunjukkan tahapan indikator yang dapat dijadikan dasar membentuk sistem peringatan dini masalah kemanusiaan berupa konflik sosial. Dua model yang ditawarkan oleh CAI adalah faktor untuk memperkirakan (*proximate factors*) dan faktor pemicu (*triggering factors*) konflik sosial.

Creative Associates International secara khusus juga menjelaskan beberapa faktor yang dapat meningkatkan gradasi konflik. Faktor-faktor tersebut terdiri dari: (1) meningkatnya intensitas dan jumlah keluhan terhadap kelompok lain, (2) meningkatnya kesadaran akan perbedaan yang mendorong munculnya persepsi dan sikap yang berbeda terhadap kelompok lain, (3) meningkatnya intensitas emosi dan psikis yang dibangun dalam kelompok dalam melihat dunia, (4) jumlah interaksi dan komunikasi langsung antar individu dalam kelompok, (5) level mobilisasi politik dan organisasi yang berada di belakang masing-masing kelompok, (6) kohesivitas antara pimpinan kelompok dan anggotanya, (7) jumlah perilaku bermusuhan, (8) penggunaan senjata untuk menghadapi atau mengancam kelompok lain, dan (8) jumlah kelompok yang menjadi pendukung masing-masing sisi.

Model dan perangkat sebagai sistem peringatan dini munculnya konflik sosial berdasarkan faktor yang diajukan oleh *Creative Associates International* lebih sesuai sebagai dasar pembentukan sistem peringatan dini konflik sosial. Berdasarkan faktor tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor mana yang muncul lebih dahulu dibanding faktor lain dan faktor mana yang muncul menjelang pecahnya konflik yang berpotensi menjadi masalah kemanusiaan. Dengan sistem ini diharapkan dapat dicegah terjadinya konflik sosial.

Alasan memilih konflik sosial berlatar belakang agama, selain fakta bahwa banyak konflik di Indonesia yang terjadi dalam nuansa agama, adalah karena penelitian ini juga ingin melihat paradoks yang terjadi di mana agama yang mengajarkan nilai kebaikan justru dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain. Dengan demikian, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana peran agama dalam diri seseorang pada sebuah konflik sosial dengan nuansa agama.

Radikalisme dan Konflik Sosial

Radikalisme agama sudah ada di Indonesia sejak lama, namun kembali menguat pada saat pecahnya konflik sosial bernuansa agama di Ambon yang ditandai dengan Laskar Jihad. Bräuchler (2004) mengklasifikasikan Laskar Jihad sebagai kelompok radikal Islam di Indonesia yang memiliki gerakan *on line* dan *off line*. Kondisi ini tidak hanya terjadi di

Indonesia namun juga terjadi di Spanyol (Barnosell, 2012) dan beberapa negara lain dengan latar agama masing-masing.

Selain itu, penelitian ini juga didasari penelitian lain yang menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta memiliki potensi mengarah pada radikalisme agama. Penelitian yang dilakukan oleh El Hafiz dkk. (2011) menemukan fakta bahwa masyarakat Jakarta memiliki potensi radikalisme agama yang ditandai dengan tingginya minat masyarakat terhadap konsep negara Islam dan pelaksanaan syariah di Indonesia. Namun demikian, dalam diskusi terhadap hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hal ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah membuat model sistem peringatan dini yang mengarah pada konflik sosial dengan berlatar belakang agama. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pencarian dan analisa data dari lokasi yang pernah mengalami konflik berlatar belakang agama di Indonesia. Namun konflik itu tidak boleh terlalu lama karena dikhawatirkan sudah hilang dari memori kolektif masyarakat.

Temuan dari Lapangan

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penggalian data terhadap masyarakat yang mengalami kondisi konflik sosial berlatar belakang agama, penelitin ini memilih lokasi di Sampang, Cikuesik, dan Bogor. Lokasi ini dipilih karena pada saat penelitian dilaksanakan konflik dengan latar belakang agama yang cukup kuat belum lama terjadi. Secara khusus, kasus Sampang merupakan konflik antar aliran agama, kasus Cikeusik merupakan konflik antara agama 'resmi' dan kelompok yang dianggap menghina dengan alirannya, sedangkan kasus Bogor merupakan konflik antar agama. Dengan tiga tipe konflik ini diharapkan dapat didapatkan gambaran yang lebih utuh dan lebih luas terkait dengan gradasi munculnya konflik. Keluasan dari tema lokasi penelitian diharapkan menghasilkan sistem yang akan memiliki efek generalisasi yang lebih luas.

Responden penelitian tidak dapat dispesifikkan karena banyaknya pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tak langsung dalam penelitian ini sebagai subjek penelitian. Dua kriteria responden ini muncul dari dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Subjek penelitian yang terlibat secara langsung umumnya responden yang terpilih untuk diwawancara sedangkan subjek yang tidak terlibat secara langsung adalah responden yang diobservasi.

Wawancara dilakukan dengan prinsip bola salju (*snowball*) di mana responden ditentukan berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Wawancara pertama ditentukan pada saat pemetaan masalah dan melihat pihak-pihak yang memiliki cukup informasi terkait dengan masalah yang akan digali. Selain data primer, dikumpulkan juga data sekunder yang berasal dari pihak yang terkait dengan konflik, seperti wartawan, kepolisian, dan LSM.

Tahap Eskalasi Konflik. Temuan lapangan tentang kerusuhan berlatar belakang radikalisme agama yang terjadi di Cikeusik, Bogor, dan Sampang menunjukkan tiga tahap atau *level* eskalasi konflik. *Tahap pertama* terjadi penguatan perbedaan antar kelompok yang dilakukan secara terbuka dan massif disertai kebencian terhadap kelompok lain. *Tahap kedua*, mulai terjadi konsolidasi keluar maupun kedalam pada masing-masing kelompok terkait ancaman yang berasal dari kelompok lawan. *Tahap ketiga*, prakonflik memasuki fase kritis di mana kondisi psikososial sudah siap dipicu untuk menjadi konflik yaitu adanya ancaman kekerasan dan penggunaan senjata terhadap kelompok lain baik dalam rangka penyerangan atau pertahanan. Tiga kondisi tersebut dipaparkan dalam Tabel 1.

Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial. Uraian yang lebih rinci tentang masing-masing tahap atau *level* eskalasi konflik yang bisa dipakai sebagai sistem peringatan dini konflik sosial adalah seperti diuraikan sebagai berikut.

Level Waspada. Level terendah terjadinya bencana konflik sosial, yaitu level waspada, adalah ketika masyarakat dalam sebuah komunitas mulai mempermasalahkan perbedaan dan menunjukkan ketidaksukaan terhadap perbedaan tersebut. Secara umum setiap individu berbeda satu dengan yang lain, namun mempermasalahkan perbedaan dan mulai menunjukkan ketidaksukaan dalam bentuk keluhan terkait dengan perbedaan adalah kondisi awal terjadinya konflik sosial. Keluhan ini dapat disebabkan adanya kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, persaingan politik, kekuasaan, dan sebagainya. Jumlah keluhan terhadap perbedaan yang ada antar kelompok meningkat. Manakala keluhan yang tidak dapat diselesaikan terkait perbedaan antar dua kelompok semakin banyak, maka semakin mudah konflik masuk pada fase berikutnya. Semakin besar keluhan maka kondisi ini dapat mengarahkan pada kebencian terhadap perbedaan.

Level Siaga. Pada level ini, berkembang kebencian terhadap kelompok lain dan kelompok tersebut diposisikan sebagai lawan. Kebencian mendorong berkembangnya persepsi bahwa kelompok lain sebagai penyebab masalah yang dihadapi oleh kelompok yang merasa dirugikan. Dengan demikian, cara untuk mengembalikan kondisi sebelumnya yang dianggap lebih baik adalah dengan menyingkirkan kelompok tersebut. Pada titik ini terjadi mobilisasi kekuatan politik yang ditandai dengan semakin menguat dan semakin

Tabel 1. Level Eskalasi Konflik

Tahap Konflik	Cikeusik	Bogor	Sampang
Waspada (level I) – penguatan perbedaan antar kelompok yang dilakukan secara terbuka kebencian terhadap kelompok lain – meningkatnya ketidakpuasan terhadap kelompok agama lain	• Adanya rasa tidak suka terhadap aktivitas pengajian yang dilakukan oleh seorang warga yang dianggap pengikut Ahmadiyah • Warga resah dengan bertambahnya anggota masyarakat yang mengikuti pengajian Ahmadiyah • Warga mempermasalahkan ketidak ikutsertaan warga Ahmadiyah dalam ritual keagamaan	• Kelompok merasa terganggu dengan adanya pembangunan Gereja di Yasmin, sudah ada isu kristenisasi • Persepsi pada masyarakat bahwa tentang GKI sebagai aliran yang "nakal" (bisa jadi menimbulkan reaksi dan resistensi yang lebih tinggi daripada aliran lain di Gereja)	• Kelompok Sunni merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan kelompok syiah yang banyak menyebabkan warga berpindah keyakinan. • Masing-masing kelompok menggunakan pengeras suara untuk menjelaskan dan menguatkan perbedaan antar kelompok yang disertai kebencian terhadap kelompok lain
Siaga (level 2) – konsolidasi yang lebih intens dari masing-masing kelompok untuk membangun kekuatan terkait ancaman dari kelompok lawannya – pencarian dukungan kepada pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat secara politis	• Upaya bersama yang dilakukan oleh banyak pihak yang untuk menolak kehadiran orang yang menyebarkan ajaran Ahmadiyah • Beredar isu akan adanya kunjungan dari Ahmadiyah pusat sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas Ahmadiyah yang dilakukan di daerah tersebut	• Mendesak kepada walikota Bogor untuk menarik IMB Gereja, dan walikota tidak melakukan putusan hukum atas perkara ini yang sudah dimenangkan di tingkat kasasi (untuk memberlakukan kembali IMB). • Menggandeng komuniyas muslim lain, Di antaranya Forkami, Komunitas Muslim Bogor, FPI untuk menolak Gereja. • Sudah mulai disuarakan di khutbah Jum'at di daerah sekitar Gereja tentang bahasa kristenisasi yang mungkin akan dilakukan oleh Gereja.	• Masing-masing pihak mendapat dukungan dari institusi atau individu yang dianggap mewakili kelompok yang lebih besar. • Meningkatnya intensitas pertemuan pemuka agama Suni terkait isu Syiah • Kelompok sunni mendapat dukungan dari kiai daerah lain, MUI, dan pemda dalam bentuk kebijakan • Kelompok syiah mendapat dukungan dari tokoh syiah nasional melalui pernyataan lisan yang disebarluaskan

Tahap Konflik	Cikeusik	Bogor	Sampang
		• Menyebar pamphlet yang berisikan ajakan untuk waspada terhadap Gereja Yasmin	
Awas (level 3) – perilaku kekerasan fisik maupun verbal – ancaman kekerasan dan penggunaan senjata baik dalam rangka penyerangan atau pertahanan	• Ancaman tindak kekerasan terhadap penyebaran ajaran Ahmadiyah. • Isu adanya batu dan bahan-bahan lain yang disiapkan sebagai senjata dalam rumah orang yang menyebarkan ajaran Ahmadiyah	• Sekelompok massa memblokade jalan/akses ke Gereja dengan membawa benda serta senjata tajam, dan tidak memperbolehkan jamaah mendekat ke Gereja.	• Sekelompok orang (suni) melakukan ancaman terhadap syiah terkait dengan rencana keberangkatan ke Bangil • Pemaksaan kelompok syiah untuk kembali ke rumah dengan makian dan ancaman penggunaan senjata • Isu adanya peledak di mushola kelompok syiah
Kondisi Akhir	• Penyerangan warga Ahmadiyah dan perusakan rumah dan aset	• Konflik dapat dihindari dengan kehadiran polisi di lokasi	• Penyerangan warga Syiah dan pembakaran puluhan rumah warga Syiah

sering terjadinya interaksi dalam kelompok yang bertujuan untuk konsolidasi dalam rangka menghadapi kelompok lawan. Pada level ini, penggunaan fasilitas publik, seperti balai desa, rumah ibadah, pengeras suara, surat terbuka, dan sebagainya semakin sering dilakukan untuk memobilisasi kekuatan dan menunjukkan kebencian pada kelompok lain. Pada level siaga ini mobilisasi kekuatan tidak hanya dilakukan ke dalam namun juga keluar dengan mencari dukungan pada tokoh atau institusi yang dianggap memiliki kekuatan politik yang lebih besar. Pada titik ini komunikasi antar anggota kelompok semakin intensif dalam rangka menghadapi kelompok lain. Dukungan politik secara terbuka atau terselubung oleh tokoh yang dianggap lebih memiliki kekuatan politik, baik dalam bentuk kunjungan maupun pernyataan publik, terhadap salah satu kelompok juga mengindikasikan menguatnya konsolidasi dalam kelompok.

Level Awas. Level awas adalah level tertinggi dalam tingkat kewaspadaan konflik sosial. Pada level ini, konflik sudah siap meledak dari gesekan sekecil apapun seperti kerusuhan antar pemuda, perebutan wilayah, kecelakaan kecil, masalah cinta, dan sebagainya. Pada level ini aparat keamanan maupun media sering melihat bahwa penyebab konflik hanya masalah sepele, padahal kondisi psikososial menunjukkan bahwa pemicu dapat muncul dalam bentuk yang akan menyebabkan pecah konflik. Pada level ini beberapa gejala psikososial yang muncul adalah perilaku bermusuhan yang ditunjukkan oleh satu kelompok pada kelompok lain, seperti ancaman, penghinaan, pengusiran, pembunuhan, penyerangan, dan sebagainya yang dilakukan secara masif. Ada perilaku bermusuhan yang ditunjukkan secara terbuka dan ada pula yang ditunjukkan secara terselubung. Perilaku bermusuhan ini menjadi pola interaksi antar kelompok yang berpotensi konflik.

Penggunaan senjata secara terbuka untuk mengancam ataupun hanya sebatas beredarnya isu adanya penggunaan atau persiapan senjata makin marak sehingga tiap orang merasa harus waspada dan menyiapkan diri untuk menyerang atau diserang. Pada level ini senjata menjadi investasi penting dalam kelompok. Senjata dapat berbentuk senjata tajam, batu, senjata api, atau senjata-senjata tradisional.

Diskusi, Kesimpulan dan Saran

Diskusi. Hasil penelitian membuktikan bahwa konflik sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Hal ini sesuai pernyataan *Creative Associates International* bahwa konflik sosial dapat diprediksi walaupun terjadi eskalasi yang sangat cepat dalam proses sosialnya. Namun untuk melihat faktor pemicu meletusnya sebuah konflik sosial, hampir tidak ada model yang berlaku umum sehingga apapun masalah

sebagai pemicunya jika kondisi psikososial sudah siap dan mengarah pada konflik maka konflik sosial sangat sulit untuk dihindari.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Milla (2013) bahwa radikalisme agama tidak selalu mengarah pada teorrisme. Dalam penelitian ini terbukti bahwa orang-orang umum yang awam terhadap konsep agama dapat ikut serta dalam gerakan anarkis dan konflik sosial yang jauh dari gambaran perilaku kesehariannya. Bahkan sebagian besar masyarakat di daerah di mana konflik terjadi tidak terlalu paham dengan perbedaan yang awalnya dijadikan alasan untuk menyerang kelompok lain dan menjadi sumber konflik sosial.

Model untuk mendeteksi konflik sosial akibat radikalisme agama yang dipaparkan di atas diharapkan dapat lebih reliabel dan mampu mengatasi kelemahan beberapa perangkat sistem peringatan dini lain sebagaimana dijelaskan oleh Schmeidl dan Jenkins (1998). Model ini diharapkan lebih reliabel karena berada pada level mezzo dan analisis masalah hingga munculnya konflik berada dalam rentang waktu dibawah dua tahun. Pembuktian reliabilitas model ini tetap harus dilihat di lapangan yang memiliki kondisi psikososial yang berpotensi konflik.

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi akibat radikalisme agama bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi melainkan dapat dideteksi sejak dini. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terjadinya konflik sosial akibat radikalisme agama berawal dari tahap keluhan akibat perbedaan dan upaya menunjukkan kebencian terhadap perbedan tersebut. Pada tahap berikutnya terjadi konsolidasi keluar dan ke dalam kelompok dalam rangka menguatkan kelompok sebagai upaya mengatasi kelompok lain. Pada tahap terakhir yang siap dipicu menjadi konflik sosial terbuka adalah adanya ancaman penggunaan senjata dan perilaku kekerasan (fisik maupun verbal) terhadap kelompok lain baik sebagai bentuk serangan atau pertahanan.

Saran. Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan kepada pemerintah dan pihak keamanan untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan sesuai berdasarkan fakta lapangan dan level kegawatan menuju konflik. Dengan tindakan yang tepat sesuai dengan levelnya diharapkan konflik sosial yang terjadi akibat radikalisme agama dapat dihindari. Secara khusus, perlu dilakukan kajian konseptual mengenai konsep penanganan dini konflik sosial berlatar belakang radikalisme agama agar tidak mencederai demokrasi dan kebebasan.

Daftar Acuan

Barnosell, G. (2012). God and freedom: Radical liberalism, republicanism, and religion in spain, 1808-1847. *International Review of Social History, 57*(1), 37-59. doi:http://dx.doi.org/10.1017/S0020859011000733

Bräuchler, B. (2004). Islamic radicalism online: The Moluccan mission of the laskar jihad in cyberspace. *The Australian Journal of Anthropology, 15*(3), 267-285. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/212592598?accountid=62688

Creative Associates International (2013, Juni). *Understanding conflicts and peace*. Diunduh Juni 2013 dari http://www.creativeassociatesinternational.com/CAIIStaff/Dashboard_GIROAdminCAIIStaff/Dashboard_CAIIAdminDatabase/resources/ghai/understanding.htm

El Hafiz, (2011, Juli). *Meaning of Jihad and Sharia in Jakarta citizen*. Makalah disampaikan dalam *International Conference of International Association of Cross Cultural Psychology (IACCP)*, Stellenbosch, South Africa.

Kompas.com (2011, 14 Maret). *Kronologi pemblokiran gereja di Bogor*. Diunduh dari http://megapolitan.kompas.com/read/2011/03/14/21475170/Kronologi.Pemblokiran.Gereja.di.Bogor

Kompas.com (2012, 26 Agustus). *Puluhan warga Syiah dievakuasi*. Diunduh dari http://regional.kompas.com/read/2012/08/26/22375533/Puluhan.Warga.Syiah.Dievakuasi

Kompas.com (2011, 6 Februari). *Empat orang dikabarkan tewas di Cikuesik*. Diunduh dari http://regional.kompas.com/read/2011/02/06/13202592/4.Orang.Dikabarkan.Tewas.di.Cikeusik

Kompas.com. (2012, 26 Agustus). *Bentrok di Sampang, satu tewas lima luka*. Diunduh dari http://regional.kompas.com/read/2012/08/26/17193393/Bentrok.di.Sampang..Satu.Tewas.dan.Lima.Luka

Milla, M.N. (2013, September). *Radikalisme pelaku terror*. Disampaikan dalam *Kuliah Umum Radikalisme Pelaku Terror*, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA, Jakarta.

Moghaddam, F. M. 2005. *The staircase to terrorism*. Diunduh dari www1.georgetown.edu/college/research/43296.html.

Religion and radicalism in July monarchy France: The French Catholic Church of the Abbe Chatel. (2005). *Reference and Research Book News, 20*(2). Diunduh dari http://search.proquest.com/docview/199716448?accountid=62688

Schmeidl, S., & Jenkins, J. C. (1998). The early warning of humanitarian disasters: Problems in building an early warning system. *The International Migration Review, 32*(2), 471-486. Diunduh dari http://search.proquest.com/docview/215277064?accountid=62688

Schrodt, P. A., & Gerner, D. J. (2000). Cluster-based early warning indicators for political change in the contemporary levant. *American Political Science Review,* 803-817.

Wulf, H., & Debiel, T. (2009). Conflict early warning and response mechanisms: Tools for enhancing the effectiveness of regional organisations? A comparative study of the AU, ECOWAS, IGAD, ASEAN/ARF and PIF.

24
Merawat dan Memperkukuh Ke-Bhinneka-an dengan Mengembangkan Kemampuan Komunikasi

Rayini Dahesihsari, Clara R.P Ajisuksmo, Juliana Murniati & Hoshael W. Erlan

Pendahuluan

Miris rasanya akhir-akhir ini semakin marak kita saksikan aksi mahasiswa yang berujung anarkis. Banyak diberitakan tawuran mahasiswa antar fakultas maupun antar kampus yang berujung pada penusukan dan pembakaran. Demikian pula unjuk rasa mahasiswa, baik di lingkungan internal kampus terhadap pimpinan perguruan tingginya, maupun di luar kampus terhadap aparat di tingkat pusat maupun daerah juga seringkali berlangsung ricuh, yang berujung pada bentrokan, bahkan penyanderaan, yang menimbulkan banyak korban. Hal ini tentu saja memprihatinkan karena posisi mahasiswa sebenarnya sangat strategis sebagai agen perubahan bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis dalam keragaman. Aspirasi luhur yang ingin diperjuangkan mahasiswa seringkali tertutup oleh cara-cara yang jauh dari keluhuran tujuan yang diperjuangkan. Alih-alih membela kepentingan masyarakat lemah yang terpinggirkan, unjuk rasa semacam ini justru dipandang meresahkan dan mengganggu.

Perilaku bentrok mahasiswa yang anarkis tersebut sebenarnya mewakili potret buram bentrokan antar kelompok masyarakat, mulai dari elite politik hingga masyarakat luas yang marak terjadi. Absen dan minimnya dialog dipandang sebagai salah satu penyebabnya. Kalaupun dialog dilakukan hanya sebatas meneriakkan kepentingan kelompoknya sendiri tanpa berusaha memahami sudut pandang kelompok lain. Di samping itu dialog yang ada umumnya baru terbatas pada dialog simbolik, sebatas retorika yang ditampilkan di media ataupun dalam wacana seminar dan diskusi. Sementara dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari kecurigaan dan konflik masih amat rentan untuk disulut.

Minimnya dialog dan cara berdialog yang lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya sendiri tanpa berusaha memahami dan menghargai sudut pandang kelompok

lain adalah bagian dari ekspresi melemahnya toleransi terhadap kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda yang potensial memunculkan konflik. Sejak tahun 2010, para penulis melakukan rangkaian studi mengenai topik ini, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melibatkan sekitar 1400 responden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Jogjakarta, Solo dan Makassar. Hasil penelitian memang menunjukkan adanya keengganan mahasiswa untuk berdialog dengan kelompok yang berbeda dari mereka karena mengantisipasi situasi yang kurang nyaman dari perbedaan pendapat. Jika dialog harus dilakukan, mereka kurang nyaman dengan dialog langsung yang bersifat tatap muka, dan lebih memilih menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui sarana komunikasi lain yang bersifat tidak langsung.

> *"konflik terjadi karena memang sulit bicara tentang perbedaan. Jika berhadapan dengan orang yang jelas berbeda, seringkali malas untuk berkomunikasi, karena takut ga nyambung, dan sudah mengantisipasi terjadinya debat akibat dari perbedaan prinsip".*

> *"kalaupun harus berkomunikasi biasanya memilih menggunakan sms, bbm, face book atau media lain, tidak nyaman untuk bertemu muka secara langsung dan berbicara secara tatap muka".*

Sebenarnya bangsa kita sangat kaya akan nilai budaya, seni dan tradisi lokal yang berjiwa multikultur dan mengedepankan harmoni sosial. Salah satu narasumber penelitian yang merupakan dosen pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di suatu perguruan tinggi ilmu seni di Jogjakarta menggunakan demonstrasi seni seperti tari Bedono, tembang Dandang Gulo, memainkan Bonang dan mengaitkan ekspresi seni tersebut dengan nilai-nilai luhur multikultur bangsa kita. Sayangnya berbagai bentuk kearifan hidup lokal yang berjiwa multikultur tersebut juga mulai memudar sehingga tidak lagi dikenali dan menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat secara luas (Nugrohadi, 2007). Sebaliknya benih intoleransi terhadap kelompok minoritas dan kelompok yang berbeda bahkan secara tidak disadari dipupuk sejak pendidikan usia dini (contoh, Riswan, 2007). Dampaknya adalah menurunnya toleransi terhadap kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai unsur masyarakat untuk mengatasi memudarnya harmoni sosial (contoh, al-Makassary & Suparto, 2010). Di sisi lain sampai saat ini eskalasi konflik antar kelompok dalam masyarakat masih terus meningkat frekuensi dan intensitasnya Kompleksitas masalah ini menuntut pendekatan yang komprehensif dalam menemukan solusinya. Tulisan ini menawarkan pendekatan dari perspektif psikologis yang menyasar pada pengembangan keterampilan yang cukup konkret untuk dipraktikkan, yaitu pengembangan kemampuan komunikasi akomodatif.

Peran Komunikasi dalam Konteks Kemajemukan Bangsa

Dalam konteks kemajemukan bangsa, perspektif komunikasi antar kelompok (Giles, Reid, & Harwood, 2010) menyatakan bahwa interaksi dalam keberbedaan lebih didasari oleh identitas kelompok dibanding sebagai individu. Menurut Gudykunst (1998), identitas kelompok terbentuk dan terpelihara melalui komunikasi. Aksen, dialek, kosa kata dan jargon yang khas digunakan oleh suatu kelompok akan memberikan identitas bagi kelompok tersebut sekaligus membuat batasan yang jelas antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Pada saat seseorang berkomunikasi dengan menggunakan atribut-atribut yang khas kelompoknya, secara otomatis akan terlihat siapa yang menjadi anggota kelompok tersebut dan siapa yang bukan. Mereka yang tidak paham ataupun tidak familiar dengan atribut yang digunakan akan merasa bukan bagian dari kelompok.

Konteks keberbedaan sebagai salah satu dimensi sosial yang dihadapi dalam komunikasi akan dipersepsi dalam bentuk asumsi tertentu yang kemudian mendorong motivasi dan mengarahkan strategi komunikasi yang dipilih individu (Assilamehou & Teste, 2013). Dalam konteks ini, individu seringkali memiliki motivasi untuk menonjolkan kelompoknya dan mendiskreditkan kelompok lain. Seperti kita ketahui dalam kebanyakan situasi, satu atau beberapa kelompok sosial lebih diuntungkan dan dominan dibanding kelompok lain, sehingga sering terjadi adanya riwayat persaingan dan ketidak-setaraan secara struktural maupun sosial antar kelompok. Beberapa studi menyimpulkan bahwa dalam situasi yang semacam itu seringkali anggota kelompok membuat jarak dalam berkomunikasi dengan pembicara lain yang berasal dari luar kelompoknya, misal dengan menekankan aksen dan dialek yang khas kelompoknya, menggunakan kosa kata yang secara eksklusif hanya digunakan oleh kelompoknya, ataupun menunjukkan pertentangan dan perbedaan dengan kelompok lain. Gaya berkomunikasi yang semacam ini umumnya disikapi secara lebih positif oleh anggota kelompok (Gallois, 2000; Gallois, Giles, Jones, Cargile & Ota, 1995), seperti temuan penelitian para penulis berikut ini:

> *"Jika berani keras dan menunjukkan identitas sebagai mahasiswa dalam memperjuangkan sesuatu di depan pimpinan universitas maka akan dianggap pahlawan oleh mahasiswa lain. Jadi penting untuk bicara kenceng".*

Banyak studi lain juga mengidentifikasi sumbangan dari bahasa sosial terhadap sikap diskriminatif dalam interaksi antar kelompok (contoh, Rubini, Moscatelli & Augusto Palmonari, 2007; Semin & Fiedler, 1991). Salah satu temuan penelitian para penulis juga menunjukkan hal tersebut:

"Orang dari seberang jika berbicara cenderung kasar dan kaku, jadi saya hanya berteman sekedarnya, ga berani terlalu terbuka dan bercanda berlebihan. Sekarang saya cukup was-was karena akan pindah kos bertetangga dengan asrama mereka".

Studi lain menunjukkan bahwa dalam konteks antar kelompok, pesan-pesan yang asertif dari individu di luar kelompoknya biasanya dianggap cenderung agresif dan penyampainya disikapi secara negatif (Gallois, 2002). Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang para penulis lakukan:

"Teman yang beda suku itu bicaranya nyablak, sangat terbuka dan langsung, kurang memperhatikan perasaan saya, kurang peka, sehingga sering menyakitkan. Saya menghindari pembicaraan intim dengannya yang berpotensi menyakitkan".

Namun dalam situasi yang tepat, cara berkomunikasi yang secara umum dipandang kurang pantas dapat saja dipandang cukup positif (contoh, Kamans dkk., 2014).

Dengan demikian komunikasi merupakan media yang sering digunakan, baik secara sadar maupun tidak, untuk menonjolkan perbedaan antar kelompok, mendiskreditkan kelompok yang berseberangan, yang kemudian menyulut konflik dan perpecahan, misal menggunakan atribut yang tersegmentasi pada kelompok tertentu, keberpihakan pada kelompok tertentu, ketidakpedulian ataupun kurang penghargaan pada kelompok lain.

Di samping itu komunikasi antar kelompok memiliki sejumlah karakteristik yang potensial menimbulkan kesalahpahaman dan bias informasi, karena informasi yang diterima akan cenderung disaring, diproses dan dimaknai sesuai sikap positif yang dikembangkan hanya pada kelompoknya sendiri. Akibatnya, sulit bagi dua pihak yang berasal dari kelompok yang berbeda untuk memiliki cara pandang yang sama dan mencapai kesepakatan, karena situasi yang sama sangat besar peluangnya untuk dipandang secara berbeda oleh dua kelompok yang bertentangan tersebut. Demikian pula penggunaan kata-kata yang sama juga tidak menjamin dimilikinya makna yang sama antara dua kelompok. Makna tertentu yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan bisa jadi dimaknai secara berbeda oleh pihak penerima pesan yang berada dalam kelompok yang berseberangan. Semakin berjarak pemaknaan informasi, potensi terjadinya kesalahpahaman dan konflik juga semakin tinggi. Penyebab dari suatu kejadian juga cenderung selalu dikaitkan dengan kategorisasi tersebut, di mana keberhasilan dan prestasi cenderung dikaitkan dengan kontribusi kelompoknya, sedangkan kegagalan dan masalah yang muncul diasosiasikan bersumber dari kelompok lain. Mekanisme ini menyebabkan sulitnya seseorang untuk mengakui kesalahan dari kelompoknya dan cenderung memojokkan dan mengkambing-hitamkan kelompok lain (Giles, Reid, & Harwood, 2010).

Apabila komunikasi merupakan salah satu sarana utama untuk membentuk dan memelihara suatu identitas kelompok, komunikasi tentunya juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antar kelompok untuk meningkatkan kohesivitas sosial. Intervensi terhadap kemampuan berkomunikasi dalam konteks komunikasi antar kelompok diasumsikan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi terbangunnya jembatan dalam hubungan antar kelompok. Dalam hal ini gaya komunikasi dapat diubah dengan menerapkan strategi linguistik tertentu agar dapat mengekspresikan nilai-nilai, sikap dan intensi yang diinginkan kepada teman bicaranya, seperti yang dibahas dalam *Communication Accommodation Theory* (CAT) (Assilamehou & Teste, 2013; Gallois, Giles, Jones, Cargille, & Ota, 1995).

CAT merupakan suatu kerangka teoretis yang bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan beragam penyesuaian yang dilakukan individu untuk menciptakan, memelihara atau mengurangi jarak dalam berinteraksi. Dalam hal ini CAT juga mengeksplorasi perbedaan cara individu dalam mengakomodasi komunikasinya, motivasi untuk melakukannya beserta konsekuensinya (Shepard, Giles, & Le Poire, 2001).

Beberapa hal yang menarik dari CAT yang sangat erat kaitannya dengan konteks hubungan antar kelompok adalah bahwa komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh gambaran situasi sesaat dan orientasi awal pelaku, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosio-historikal di mana interaksi terjadi. Dengan demikian komunikasi tidak sekadar pertukaran informasi tentang fakta, gagasan dan emosi, melainkan juga menegosiasikan keanggotaan kategori sosial selama terjadinya interaksi melalui proses akomodasi. Individu akan menggunakan strategi komunikasi tertentu, khususnya konvergensi dan divergensi, untuk mengekspresikan sikap mereka satu sama lain dan kelompok sosialnya (Giles & Ogay, 2007).

Strategi-strategi yang digunakan dalam komunikasi akomodatif meliputi *approximation strategies*, yaitu strategi komunikasi yang mengedepankan persamaan karakteristik komunikasi untuk menyesuaikan diri dan mendekatkan jarak sosial antara ke dua belah pihak; *interpretability strategies*, yaitu strategi untuk lebih memahami tingkat keterampilan dan kompetensi berkomunikasi dari pihak lain dengan cara mereduksi kompleksitas pembicaraan serta upaya untuk meningkatkan klarifikasi dari pesan yang ingin disampaikan; *discourse management strategies,* yaitu strategi untuk memahami kebutuhan dan kenyamanan pihak yang diajak berkomunikasi, seperti pemilihan topik yang dipahami dan nyaman bagi kedua belah pihak dan memahami sudut pandang dari pihak lain; serta *interpersonal control strategies,* yaitu strategi yang mengupayakan posisi yang setara antara kedua pihak yang berkomunikasi tanpa menonjolkan pihak yang posisinya lebih dominan

dan lebih berkuasa dibandingkan pihak yang lain (Gallois, Giles, Jones, Cargile, & Ota, 1995; Shepard, Giles, & Le Poire, 2001).

Dalam komunikasi antar kelompok, masalah yang muncul tidak hanya disebabkan oleh ”apa yang dikatakan” tetapi juga ”bagaimana hal yang dikatakan tersebut diinterpretasikan” (Condon, Michael Hect, Stella Ting-Tomey dalam Littlejohn & Foss, 2005). Strategi komunikasi yang akomodatif dapat membantu menjembatani perbedaan yang ada di antara kelompok dan membangun hubungan yang harmonis, dengan berbagi kesamaan, ketulusan untuk memahami dan menghargai pihak lain. Sayangnya keterampilan tersebut masih minim dipraktikkan selama ini dalam konteks keragaman, termasuk di kalangan mahasiswa.

Temuan penelitian para penulis menunjukkan masih minimnya frekuensi penggunaan komunikasi yang akomodatif pada mahasiswa ketika mereka berkomunikasi dengan kelompok lain (642 atau 53.63% dari responden jarang menggunakan komunikasi yang akomodatif). Di sisi lain, cara-cara berkomunikasi yang kurang menunjukkan penghargaan dan pemahaman terhadap kelompok yang berbeda lebih banyak dipilih. Strategi yang paling jarang digunakan adalah *approximation strategies* (708 atau 59.15% dari responden jarang menggunakannya) dan *discourse management strategies* (698 atau 58.31% dari responden jarang menggunakannya). Hal ini menunjukkan jarangnya mereka menyesuaikan diri dengan gaya berkomunikasi kelompok lain serta mengekspresikan ketulusan untuk memahami dan menghargai pihak lain.

Temuan tentang rendahnya penggunaan komunikasi akomodatif dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbeda juga diiringi temuan lain bahwa responden memiliki rasa percaya yang rendah kepada kelompok lain (552 atau 46.12% dari responden). Rasa percaya yang rendah tersebut terutama ditujukan pada kesediaan kelompok lain untuk berbuat baik bagi kepentingan kelompok mereka (718 atau 59.98% dari responden).

Pengembangan Kemampuan Komunikasi Akomodatif

Peran yang cukup strategis dari komunikasi yang akomodatif dalam membangun harmoni sosial pada konteks kemajemukan bangsa di satu sisi dan temuan penelitian akan minimnya penggunaan strategi komunikasi ini di kalangan mahasiswa di sisi lain, menunjukkan pentingnya upaya pengembangan kemampuan komunikasi ini. Sejumlah upaya dapat dilakukan untuk pengembangan kemampuan komunikasi akomodatif ini..

Salah satu temuan penelitian yang menarik adalah bahwa dari sebagian kecil mahasiswa yang telah menggunakan strategi komunikasi yang akomodatif dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbeda (173 atau 14.45% dari responden), mereka umumnya memiliki pengalaman interaksi yang luas dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dari mereka. Umumnya mereka relatif terbuka terhadap perbedaan, sehingga mengambil inisiatif untuk menambah pengalaman berinteraksi dengan kelompok yang berbeda seluas-luasnya. Mereka juga cenderung tidak ragu untuk menggali informasi dari kelompok lain tentang hal-hal yang menjadi keingintahuan mereka. Bahkan topik-topik yang sensitif menurut mereka tidak perlu dihindari untuk didiskusikan selama dilakukan dengan cara saling menghargai. Dalam hal ini cara berkomunikasi menurut mereka sangat berperan untuk menghindari salah paham dan konflik. Dengan ketulusan dan sikap saling menghargai, interaksi positif menurut mereka tetap dapat dijaga.

> *"Hal-hal yang sering menimbulkan konflik adalah apabila pertanyaan ataupun diskusi yang sama disampaikan dengan nada menilai, apalagi menganggap pihak lain bersalah dan hanya pihak kita yang paling benar. Pasti hal itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak lain".*

> *"Apabila pimpinan universitas lebih terbuka, welcome dan menghargai, tentunya akan ada reaksi yang positif juga dari mahasiswa"*

Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengalaman kontak dengan kelompok yang berbeda diasumsikan akan membantu menumbuhkan sikap positif terhadap kelompok lain yang tercermin dalam gaya komunikasi yang lebih akomodatif.

Pada tahun 2011, sebagai bagian dari hibah penelitian yang diterima para penulis, dikembangkan program pelatihan pengembangan kemampuan akomodatif bagi mahasiswa dari perguruan tinggi berbasis agama yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin umat agama Islam dan Kristen. Program pelatihan yang dilangsungkan sebanyak 2 kali, masing-masing diikuti sekitar 20 mahasiswa tersebut, mendapatkan sambutan positif dari peserta dan dirasakan manfaatnya oleh mereka. Metode pelatihan dalam bentuk diskusi kasus dan bermain peran yang interaktif dan variatif mampu mengembangkan keterampilan komunikasi akomodatif dan sikap pluralitas sebagai suatu habitus bagi peserta. Di samping itu durasi pelatihan selama 2 hari 1 malam juga merupakan media yang memadai untuk terjalinnya kontak informal dengan peserta dari kelompok agama lain. Mendukung *contact hypothesis,* teori klasik dari Allport (1958), sejumlah penelitian juga menunjukkan pengalaman interaksi dengan kelompok yang berbeda dapat meminimalkan konflik dan mereduksi prasangka sosial, karena kontak yang luas dengan orang-orang dari luar kelompok memungkinkan individu untuk mengambil peran dari sudut pandang luar kelompok, dan

tidak terkungkung oleh pemikiran berdasar superioritas kelompoknya sendiri semata (contoh Mallett dkk., 2008; Dovidio, Gaertner, & Kawakami, 2003).

Dengan demikian, program pelatihan yang diselenggarakan tersebut selain dari segi isi memberikan pembekalan keterampilan komunikasi yang akomodatif dan menumbuhkan rasa percaya, juga memberikan ruang dialog dan berinteraksi antar kelompok agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami sudut pandang masing-masing sebagai pribadi dan bukan semata sebagai bagian dari kelompok agama tertentu (Dahesihsari, Murniati, & Erlan, 2011). Dalam Hibah Penelitian tahun 2014, program pelatihan yang berbentuk modul tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk buku ajar untuk mata kuliah di perguruan tinggi yang terkait dengan pengembangan karakter kebangsaan, seperti Pancasila, Kewarganegaraan, dan Multikulturalisme. Dengan demikian pengembangan kemampuan ini dapat berlangsung secara lebih sistematis dalam program pendidikan di perguruan tinggi (Dahesihsari dkk., 2014).

Di samping memperluas pengalaman kontak sosial pada kelompok yang berbeda dan pelatihan, peran tokoh panutan juga dipandang penting dalam pengembangan kemampuan komunikasi. Peterson dan Seligman (2004) menyebutkan empat hal penting dalam membangun perilaku positif yang mengarah pada pembentukan karakter, yaitu pembiasaan, peneladanan, konsistensi, dan refleksi. Proses pembiasaan perlu diikuti oleh pemotivasian dan peneladanan agar hal-hal baik dapat terus dilakukan secara konsisten dan diperkuat melalui refleksi.

Mengenai tokoh panutan yang bisa memberikan motivasi dan peneladanan dalam berkomunikasi, temuan penelitian yang dilakukan para penulis menunjukkan bahwa cukup besar proporsi responden (456 atau 38.1% dari responden) yang tidak memiliki tokoh panutan dalam berkomunikasi. Angka ini adalah gabungan antara responden yang tidak memiliki tokoh panutan dalam berkomunikasi dan mereka yang menyebut dirinya sendiri sebagai tokoh panutan yang mengindikasikan tidak memiliki tokoh panutan. Di antara mereka yang memiliki tokoh panutan keluarga, ayah merupakan figur penting yang menjadi panutan dalam berkomunikasi. Di samping itu, jika diperhatikan lebih lanjut tokoh panutan dalam berkomunikasi lainnya sebagian besar adalah tokoh publik yang diakses melalui media, meliputi secara berturut-turut: Soekarno, Mario Teguh, Obama, Jokowi, Oprah, dan Habibie. Hal ini menunjukkan peran media yang cukup substansial untuk menyediakan figur panutan dalam berkomunikasi.

Sayangnya figur yang bisa dijadikan panutan dalam komunikasi yang akomodatif di media justru sangat minim, di tengah dominannya figur-figur dengan cara berkomunikasi

yang kurang santun, memojokkan pihak lain dan sarat kepentingan kelompok, termasuk di media sosial. Hal ini kemungkinan menjadi salah satu penyebab yang mendorong keterampilan komunikasi akomodatif mahasiswa belum berkembang.

Berdasarkan tabel di atas, keluarga dan media berperan cukup penting dalam menyediakan model dan panutan berkomunikasi secara positif bagi mahasiswa. Raka dkk. (2010) memang menyebutkan bahwa pendidikan di keluarga sangat penting dan menentukan dalam mengembangkan cara seseorang memandang orang lain yang berbeda darinya.

Selain keluarga dan media, menurut Raka dkk. (2010), faktor lingkungan lain yang cukup penting peranannya adalah sekolah. Dalam hal ini, peneladanan dari guru dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor yang penting dalam berbagai proses pendidikan, termasuk di pendidikan tinggi (Sudarminta, 2006). Sayangnya dari temuan di atas, guru/dosen hanya dipilih oleh 48 (4.01%) dari keseluruhan responden. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya peran institusi pendidikan dan figur guru/dosen pada khususnya untuk menjadi teladan bagi perilaku berkomunikasi mahasiswa.

Di antara sedikit figur guru/dosen yang dipilih responden sebagai tokoh panutan berkomunikasi dalam penelitian ini, ternyata mereka cukup banyak menggunakan strategi komunikasi akomodatif dalam berkomunikasi.

Tabel 1.
Tokoh Panutan Berkomunikasi bagi Mahasiswa (N = 1197)

Tokoh	Jumlah
Tidak ada	358
Diri sendiri	98
Keluarga	255*
Soekarno	88
Mario Teguh	87
Obama	80
Jokowi	72
Guru/dosen	48
Oprah Winfrey	46
Habibie	36
Teman dekat/sahabat	29
Total	**1197**

*Termasuk 75 orang yang menyebut ayah sebagai panutan.

"Nah kalau dengan mahasiswa kita memperlakukan mereka seperti anak sekaligus juga teman, mereka akan cair tidak berjarak tapi juga tidak kurang ajar dengan kita".

"Respek pada mahasiswa dan mendengarkan berbagai opini mereka. Menghindari kecenderungan yang sifatnya judgmental. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengungkapkan idenya".

"Tidak segan-segan mendatangi mahasiswa atau staf untuk berdialog, sekalipun berada dalam posisi lebih tinggi".

"Tetap mengedepankan "cara" ketika meminta/menegur mahasiswa yang salah, misalnya kata 'minta tolong', 'mohon..', sekalipun sadar kalau orang Makassar itu keras dan dikenal kasar".

Dengan mengedepankan cara berkomunikasi yang akomodatif, ternyata dosen-dosen tersebut mampu membuat mahasiswa merasa nyaman dan dihargai, Hal ini kemudian menginspirasi mahasiswa untuk meneladani cara dosen tersebut dalam berkomunikasi. Peran pendidik dan institusi pendidikan tampaknya masih perlu lebih dioptimalkan dalam pengembangan kemampuan komunikasi bagi mahasiswa.

Peran media yang substansial dalam menyediakan figur panutan bagi mahasiswa dalam berkomunikasi sebagai temuan penelitian menunjukkan bahwa di samping komunikasi yang bersifat interpersonal dan langsung, di era global saat ini masyarakat, termasuk mahasiswa, juga berkomunikasi secara intensif melalui media dalam berbagai bentuknya. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap peran media dalam memanaskan situasi konflik dan meningkatkan eskalasi konflik melalui keberpihakan pada salah satu pihak yang berkonflik. Menurut mereka, cukup banyak media yang penyampaian informasinya bersifat diskriminatif dan distortif ketika memaparkan suatu konflik sosial, sehingga informasi yang disampaikan media tersebut dipandang tidak dapat diandalkan dan tidak proporsional. Distorsi yang dimunculkan media massa memiliki peluang untuk memancing perbedaan dan pengelompokan di lingkungan masyarakat yang majemuk (Kartikawangi dkk., 2014).

Strategi komunikasi sebagai suatu keterampilan tidak lepas dari ciri kepribadian pelakunya yang akan memberikan warna kepada perilaku yang dimunculkan (contoh, McCroskey & Beatty, 2000 dalam Bakker-Pieper & de Uries, 2013). Konteks yang meliputi berbagai dimensi sosial yang kompleks di mana komunikasi terjadi juga akan menentukan persepsi dan motivasi berbagai pihak yang terlibat dalam berkomunikasi (Assilamehou & Teste, 2013).

Sesuai yang telah disampaikan di awal tulisan, pudarnya harmoni sosial dalam masyarakat kita saat ini adalah problem yang kompleks yang perlu ditinjau dari berbagai pendekatan secara komprehensif. Salah satu di antaranya adalah komunikasi akomodatif yang dapat berperan dalam mendorong terjadinya dialog yang berjalan secara menyejukkan dengan mengekspresikan keterbukaan untuk menghargai serta memahami sudut pandang yang berbeda sebagai bagian dari upaya menjembatani hubungan antar kelompok yang kurang harmonis.

Penutup

Keragaman bangsa Indonesia dengan lebih dari 491 etnis, 567 bahasa dan dialek, aneka agama dan berbagai kelompok merupakan ciri khas dan modal sosial bangsa yang membanggakan dan perlu dijaga agar tidak menjadi sumber dan pemicu konflik, kekerasan dan pertikaian. Ketika ada banyak ragam kelompok dengan nilai-nilai dan ciri khasnya masing-masing, hidup berdampingan secara harmonis sangat sulit untuk bisa terjadi dengan sendirinya. Kesadaran dan kemauan untuk terus belajar hidup berdampingan menjadi suatu bangsa yang majemuk sangat diperlukan. Dalam hal ini komunikasi merupakan salah satu faktor kuncinya. Strategi komunikasi yang akomodatif dapat membantu menjembatani perbedaan yang ada. Berbagi kesamaan, ketulusan untuk memahami dan menghargai pihak lain adalah beberapa hal Di antaranya yang berperan dalam membangun hubungan yang harmonis.

Dengan demikian idiom "Bhinneka Tinggal Luka" sebagai anekdot dari kegagalan bangsa dalam merawat kesakralan Bhinneka Tunggal Ika yang kita banggakan tidak perlu menjadi kenyataan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menjadi simbol dari semangat kebangsaan yang menyatukan ribuan kekhasan lokalitas yang berbeda-beda di Tanah Air perlu terus dijaga dan diperkukuh, khususnya melalui peran generasi mudanya.

Daftar Acuan

Allport, G.W. (1958). *The nature of prejudice*. Cambridge, Garden City, NY: Doubleday.

al-Makassary, R., & Suparto (Ed). (2010). *Cerita sukses pendidikan multikultural di Indonesia. Studi kasus program intervensi yayasan TIFA di Jakarta, Banten dan Yogyakarta*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Assilamehou, Y., & Teste. B. (2013). How you describe a group shows how biased you are: Language abstraction and inferences about a speakers's communicative intentions and attitudes toward a group. *Journal of Language and Social Psychology, 32*, 202-211.

Bakker-Pieper, A., & de Vries, R.E. (2013). The incremental validity of communication styles over personality traits for leader outcomes. *Human Performance, 26*, 1-19.

Dahesihsari, R., Kartikawangi, D., Ajisuksmo, C.R.P., & Sihotang, K. (2014). *Pengembangan keterampilan komunikasi akomodatif dan rasa percaya pada mahasiswa sebagai modal menuju terwujudnya harmoni sosial*. Laporan Penelitian Hibah Kompetitif Strategis Nasional DIKTI.

Dahesihsari, R., Murniati, J., & Erlan, H.E. (2011). *Membangun ikatan saling berbagi identitas dalam kemajemukan masyarakat Indonesia*. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Psikologi Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat IndonesiaFakultas Psikologi Universitas Airlangga.

Demo Salemba berbuntut penembakan mahasiswa (2014). www.republika.co.id/berita/nasional/umi.

Dibebaskan dari penyanderaan, Rektor Nommensen tidak ditangkap (2014). Nasional news.viva.co.id/news/read/4216.

Dovidio, J.F., Gaertner, S.I., & Kawakami, K. (2003). Intergroup contact: The past, present and the future. *Group Processes & Intergroup Relations, 6*(1), 5-21.

Gallois, C (2002). *Reconciliation through communication in intercultural encounters: Potential or peril*. Presidential address at the 52nd Annual International Communication Association (ICA) Conference. Seoul, Korea.

Gallois, C (2000). *Accommodating intercultural encounters: intergroup and interpersonal dimensions*. Proceeding of the 7th International Conference on Language and Social Psychology. Cardiff: UK

Gallois, C., Giles, H., Jones, E., Cargile, A.C., & Ota, H. (1995). Accommodating intercultural encounters. Elaboration and extensions. Dalam R.L. Wiseman (Vol. Ed.), *Intercultural communication theory, 15*, 115-147. Beverly Hills, CA: Sage.

Giles, H., Reid, S., & Harwood, J. (Eds). (2010). *The dynamics of intergroup communication*. New York: Peter Lang.

Giles, H., & Ogay, T. (2007). Communication accommodation theory. Dalam B.B. Whaley & W. Samter (ed), *Explaining communication contemporary theories and exemplars*. New Jersey: Lea.

Gudykunst, W.B. (1998). *Bridging differences: Effective intergroup communication* (3rd. ed). Thousand Oaks: Sage.

Habib Rizieq bicara blak-blakan soal Ahok, Demo FPI dan DPRD anti Ahok (2014). www.gatra.com/kolom dan wawancara 105617-habib rizieq-ahok, -kih,-dan,-kmp, -duduk bersama.html.

Kamans, E., van Zomeren, M., Gordijn, E., & Postmes, T (2014). Communicating the right emotion makes violence seem less wrong: Power congruent emotion lead outsiders to legitimize violence of powerless and powerful groups in intractable conflict. *Group Processes and Intergroup Relations, 17*(3), 286-305.

Kartikawangi, D., Dahesihsari, R., Ajisuksmo, C R.P., Sihotang, K., & Murniati, J. (2014). *Media dan harmoni sosial*. Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi: Masa Depan Komunikasi Masa Depan Indonesia.

Kesbangpolpenmas gelar dialog umat beragama (2014). www.isukepri.com/2014/06/kebangpol.

Littlejohn, S.W., & Foss, K.A. (2005). *Theories of human communication* (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Mallett, R.K., Huntsinger, J.R., Sunclair, S., & Swim, J.K. (2008). Seeing through their eyes: When majority group members take collective actions on behalf of an outgroup. *Group Processes & Intergroup Relations, 11* (4), 451-470.

Nugrohadi, G.E. (2007). *Merajut keragaman Indonesia dengan local wisdom yang multikultur.* Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Peterson, C., & Seligman, M.E.P. (2004). *Character strength and virtues*. New York: Oxford University Press.

Raka, G., Mulyana, Y., Markam, S.S., Semiawan, C.R., Hasan, S.H., Bastaman, H.D., & Nurrachman, N. (2010). *Pendidikan karakter di sekolah*. *Seri Pendidikan Karakter Yayasan Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Riswan, Y. (2007). *Ragam aksi agama dalam masyarakat. Program pembuatan diseminasi film pendek tentang eksklusivisme pada pendidikan anak usia dini.* Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Rubini, M., Moscatelli, S., & Palmpnari, A. (2007). Increasing group entitavity: Linguistic intergroup discrimination in the minimal group paradigm. *Group Processes & Intergroup Relations, 10*(2), 280-296.

Semin, G.R., & Fiedler, K. (1991). The linguistic category model, its bases, applications and range. *European Review of Social Psychology, 2,* 1-50.

Shepard, C.A., Giles, H., & Le Poire, B.A. (2001). Communication accommodation theory. Dalam W.P. Robinson & H. Giles (Eds), *The new handbook of language and social psychology* (pp33-56). England: John Wiley & Sons.

Sudarminta, J. (2006). *Pendidikan nilai-nilai kehidupan*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Nilai-Nilai Kehidupan Menuju Manusia Indonesia yang Bermartabat dan Berbudaya. Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya.

25
Modal Sosial Masyarakat Korban dalam Konteks Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek Kanal Banjir Timur (KBT) di DKI Jakarta

Pieter George Manoppo

Pendahuluan

"Langsung saja Pak, saya minta Rp 5 juta per meter persegi", seru seorang ibu dengan suara lantang, saat berlangsung sosialisasi pembebasan tanah untuk proyek Banjir Kanal Timur (KBT) di Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, awal Juni 2004. Begitulah lasimnya, warga yang terkena proyek KBT menyampaikan alasan pada saat ditanya, mengapa mereka meminta harga pembebasan tanah dan kompensasi yang oleh pihak Pemda DKI melalui Panitia 9 dianggap terlalu tinggi. Kondisi ini berakibat pada realisasi pembebasan tanah untuk proyek KBT pun tertunda-tunda. Sulit mencapai kesepakatan harga di antara Panitia 9 dengan warga korban (Kompas, 2004).

Fakta tersebut merupakan bagian perilaku konflik penguasaan asset dan akses pengelolaan sumber daya tanah antara Pemda DKI dengan warga pemilik tanah berkaitan pembebasan tanah proyek KBT. Pelaksanaan proyek KBT didukung instrumen kebijakan seperti *Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta* (NEDECO) Tahun 1973 dan *The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta* tahun 1991 dan *The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek* pada Maret 1997. Hasil studi dan master plan tersebut diperkuat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta (Kompas, 2006).

Pada 10 Juli 2003, pembangunan proyek KBT diresmikan Presiden Megawati. Tujuan proyek KBT adalah mempercepat pengendalian banjir serta melindungi wilayah Jakarta timur dan utara seluas 15.401 hektar sebagai kawasan industri, pergudangan, dan pemukiman dari aliran genangan air yang diakibatkan hujan lokal melalui sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung, namun implementasi proyek KBT terkendala

persoalan dana. Sekalipun sudah diresmikan, Presiden Megawati tidak segera memulai pembangunannya. Pembebasan tanah sebagai langkah pertama dan strategis terhambat ketika warga pemilik tanah bertahan pada tuntutan kompensasi di atas NJOP (Kompas, 2006).

Banyak riset telah membahas implementasi kebijakan proyek yang berfokus kebijakan pembebasan tanah dan masyarakat korban yang terbagi beberapa kecenderungan. *Pertama,* yang melihat pembebasan tanah dan kompensasi berdasar pandangan bahwa modal sosial esensi dalam proses perolehan, integrasi, dan pelepasan tanah sebagai inti kapabilitas sosial (Blyler dan Coff, 2003), khusus masyarakat asli dan tanahnya (Alias *et al*., 2010). Juga melihat hubungan pemilik dan tanahnya yang bermakna filosofis, antropologis, dan spiritual karena tanah adalah hak asasi. (Bahar, 2008). *Kedua,* dampak pembebasan tanah bagi peningkatan dan perbaikan distribusi pendapatan, serta mengatasi kemiskinan (Chitiga & Mabugu, 2008). *Ketiga,* riset landasan hukum kebijakan pembebasan tanah di Indonesia (Block Komunitas Hukum, 2007; www.walhi.or.id; Lubis, 2004; Simamora, 2009). *Keempat,* kaitan pembebasan tanah dengan perbaikan peran pemerintah dalam mengelola tanah dengan mengintegrasi para pihak dalam perencanaan tanah (Masum, 2010). *Kelima,* pembebasan tanah terkait dekolonisasi kesenjangan politik dan ekonomi masyarakat (Stephan & Benjamin, 2010); koalisi pemerintah dan pengemban tanah pengaruhi rendahnya standart kompensasi (Han & Vu, 2008). *Keenam,* riset tentang kapasitas lembaga negara dalam pembebasan tanah publik; memediasi konflik interest di antara para pihak (Appiah, 2007); konflik tanah dan politik (Anseeuw & Alden, 2010; Kombe, 2010); serta tanah dan HAM (Mitchell, 2010).

Berbagai riset tersebut memberi perhatian pada dampak kebijakan pembebasan tanah proyek berkaitan dengan aneka kondisi sosial pemilik tanah, namun hanya sedikit penelitian yang secara spesifik berfokus dampak kebijakan pembebasan tanah terhadap modal sosial masyarakat korban (Havel & Zaleczna, 2009). Sementara kondisi modal sosial dalam konteks kebijakan pembebasan tanah terus menjadi pertanyaan manajemen SDM yang perlu diteliti lebih jauh.

Fokus tulisan ini adalah "Kebijakan pembebasan tanah proyek KBT dan dampaknya terhadap modal sosial masyarakat korban di DKI Jakarta." Fokus tersebut dijabarkan ke dalam sub fokus permasalahan sebagai berikut: (1) bentuk-bentuk produk kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang pembebasan tanah untuk proyek KBT; (2) latar belakang dan tujuan (mengapa) produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT mengambil bentuk seperti itu; (3) dampak modal sosial masyarakat korban dari produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT dan implementasinya; (4) upaya Pemerintah

dan masyarakat korban memperbaiki pola kebijakan dan perkembangan modal sosial masyarakat korban sendiri.

Berdasar latar belakang di atas pertanyaan pokok yang hendak dicari jawabnya dalam tulisan ini adalah: (1) bagaimana bentuk produk-produk kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berkaitan dengan pembebasan tanah proyek KBT; (2) mengapa produk-produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT mengambil bentuk seperti itu; (3) bagaimana dampak kebijakan pembebasan tanah proyek KBT terhadap modal sosial masyarakat korban; dan (4) bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat korban memberdayakan efektivitas kebijakan pembebasan tanah dan modal sosial masyarakat korban?

Bertolak dari rumusan pertanyaan-pertanyaan di atas, tujuan tulisan ini adalah: (1) mengidentifikasi bagaimana bentuk produk-produk kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah (DKI) tentang pembebasan tanah untuk proyek KBT di DKI; (2) mengungkapkan latar belakang dan tujuan (mengapa) produk-produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT mengambil bentuk seperti itu; (3) menyingkap bagaimana "dampak modal sosial dan psikosoial masyarakat korban" yang ditimbulkan oleh adanya produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT dan implementasinya; dan (4) mengidentifikasi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat korban sendiri, dalam rangka merespons kebijakan pembebasan tanah dan pengembangan modal sosial masyarakat korban sendiri.

Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang mengambil lokasi di 13 Kelurahan sasaran proyek KBT yang tersebar dari Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, sampai dengan Kelurahan Marunda, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta yang dilaksanakan pada bulan September-November 2011.

Kebijakan Pembebasan Tanah

Pengertian dan Ruang Lingkup

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 mengatakan "setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah." Pada pasal 3 Perpres No.65 Tahun 2006 dikatakan Pelepasan

atau penyerahan hak atas tanah (pasal.2) berdasar prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah." (BPN RI, 2010; Silalahi, 2010). Menurut Arie S. Hutagalung "pembebasan tanah atau pelepasan hak atas tanah sebagai perbuatan hukum berupa tindakan melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat antara pemegang hak dan tanahnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Dengan cara memberikan ganti rugi/kompensasi kepada pemegang haknya, sehingga tanah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi tanah negara." (Hutagalung, 2010; Brown, 1990). Tanah dalam arti tempat memiliki dua segi, yaitu: segi hak (hukum), dan segi penggunaan (fisik). (Silalahi, 2010).

Dasar Perhitungan Ganti Rugi atau Kompensasi

Yang dipakai sebagai dasar perhitungan ganti rugi atau kompensasi adalah: (a) *tanah*: dengan NJOP dan Nilai Nyata dengan memperhatikan NJOP yang berjalan berdasar penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia (Pasal 15 ayat 1 huruf a Perpres 65 Tahun 2006); (b) *bangunan*, ditaksir oleh perangkat daerah di bidang bangunan; dan (c) *tanaman*, ditaksir perangkat daerah di bidang tanaman. Bentuk ganti rugi berupa: (a) uang dan atau tanah; (b) tanah pengganti; dan atau (c) pemukiman kembali; dan atau (d) gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c); serta (e) bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 13 Perpres No.65 Tahun 2006).

Konflik Tanah dan Pembangunan Berkelanjutan

Kombe (Wichery, 2009) menemukan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan publik di Tanzania, bahwa proses sosial, institusional, ekonomi, dan interest memainkan interaksi kunci dalam melahirkan konflik. Pemindahan hak, penilaian dan kompensasi yang tidak transparan dapat memicu konflik di antara negara dan pemilik lahan, serta mengancam sustainabilitas sosial, ekonomi dan perdamaian, khususnya masyarakat miskin. Kombe menemukan tiga tipe konflik pembebasan tanah untuk kepentingan umum, yakni: (1) kelambatan atau ketidakaadilan ganti rugi; (2) komunikasi yang miskin dan tidak terlibatnya pemilik tanah; dan (3) pemerintah yang miskin. Bahwa kebijakan tanah harus perhatikan pengentasan kemiskinan, hak properti atas tanah, dampak penguasaan dan penggunaan tanah, cara meningkatkan penguasaan kawasan atau *tenure security* (Deininger, 2004). Akar konflik tanah perkotaan, menurut Deininger terletak pada kelangkaan tanah, meningkatnya angka populasi penduduk perkotaan, hukum yang diskriminatif, tingginya ketidaksetaraan akses tanah dan perkembangan ekonomi masyarakat (Mollel & Lugoe, 2007).

HAM dalam Pembebasan Tanah dan Kompensasinya

Pembebasan tanah dalam pembangunan ekonomi terkait dengan hak asasi manusia sebagai standar kewajiban pembebasan tanah (Wallace, 2009:1-21); proteksi lingkungan, penanggulangan kemiskinan dan keadilan sosial pemilik tanah (Pfeffer *et al.*, 2002); hubungan tanah, bisnis, dan hak asasi di India (Tripathi, 2009); sebagaimana ditemukan Emanuelli (2006) terjadi kekerasan terhadap hak ECOSOC (hak ekonomi, sosial, budaya) masyarakat yang terkena proyek.

Psikososial Korban dan Hak Azasi atas Tanah

Ada tiga konsep teoretis yang menjelaskan persepsi psikososial masyarakat korban atas pembebasan tanah dan dampak kompensasinya terhadap modal sosial: (a) *loss aversion*, yaitu faktor di mana individu dan/atau kelompok merasakan kerugian atas kehilangan hak tanah selalu lebih besar dari keuntungan yang didapatnya (Tversky dan Kahneman,1991); (b) *endowment effect,* berkaitan dengan sikap individu atau kelompok yang lazimnya meminta lebih besar ganti-rugi untuk melepaskan apa yang menjadi haknya dari jumlah yang harus ia keluarkan sehingga hidupnya lebih baik (Zhang dan Fishbach 2000); dan (c) *status quo bias;* para pemilik tanah akan menghadapkan persoalan yang berkaitan dengan rasa nyaman dengan kondisinya sekarang ini baik secara fisik-tata ruang, sosial, kultural dan psikologis (Samuelson & Zeckhauser, 1988). Hak atas tanah dan konflik merupakan dampak kebijakan pembebasan tanah secara psikologis (Melani Lombard, 2012). Kebijakan pembebasan tanah sensitif konflik & dampak ekonomi, sosial, spasial dan lingkungan (Wehrmann, 2008) serta psikososial kompensasi pembebasan tanah itu sendiri (Johnson & Haque, 2014).

Spatial Plan dan City Land Use

Studi Muller-Jokel (2004) tentang pengaturan tanah sebagai strategi penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, mengatakan bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan tidak biasanya dicapai dengan adanya batas-batas kapling tanah. Dalam rangka itu, analisis spasial dipakai menemukan kekuatan sosial, ekonomi, politik, demografi, dan spasial sebagai faktor kemiskinan (Rupasingha dan Goetz, 2007).

Modal Sosial Masyarakat Korban

Pengertian dan Ruang Lingkup

Beberapa definisi tentang modal sosial antara lain: (a) "*refers to connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them....*"(Putnam, 2000); (b) "*.the rules, norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relation, social structure and society's institutional arrangements which enable members to achive their individual and community objectives.*" (Narayan *et al*., 1997). Modal sosial tidak bisa dilihat dalam suatu kevakuman sosial. Modal sosial bukan merupakan karakter individual atau organisasi, melainkan berkaitan dengan *relationships*. Karena itu, *owrnership* tidak dapat didefinisikan dengan *property rights* atau dengan pengejawantahan fisik, dalam kasus seperti finansial atau *human capital*, tetapi dengan kekentalan atau karakter dari keikatan sosial atau *social relationship* (Knorringa & Staveren, 2006). Tiga dimensi utama modal sosial menurut Liao dan Welsch (2005) adalah: (1) *modal struktural:* peran interaksi dan keikatan, di mana jaringan menyediakan akses sumber daya dan informasi bagi masyarakat; (2) *modal relasional: trust dan trustfulness,* yaitu peduli terhadap jenis-jenis hubungan personal masyarakat yang dimiliki masyarakat, seperti respek, *trust, trustfulness,* dan pertemanan; dan (3) *modal kognitif: berbagi norma;* norma akan eksis ketika penegakan hak mengontrol tindakan tidak oleh aktor, tetapi oleh pihak lain.

Modal Sosial dan Kebijakan Pelayanan Publik

Woolcock dan Narayan (2000) mengemukakan modal sosial sebagai norma dan jaringan yang memampukan masyarakat untuk bertindak secara kolektif dengan memperhatikan empat hal pokok: komunitas, jaringan, institusi, dan sinergi.Bagi Franke (2005) modal sosial adalah *tools* kebijakan publik. John Field (2003) mencatat kasus-kasus intervensi kebijakan dalam pembentukan modal sosial: (1) kemampuan masyarakat mengakses sumber daya; (2) kebijakan berdampak modal sosial, berefek samping pada erosi modal sosial, atau muncul modal sosial buruk; (3) kebijakan yang mengabaikan konsekuensi modal sosial, berakibat modal sosial dapat disalah-gunakan; dan (4) modal sosial membantu pemerintah hindari model defisit bagi mereka yang tidak diuntungkan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pengertian dan ruang lingkup modal sosial tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang modal sosial pada hakikatnya akan menyangkut tiga faktor utama, yakni: *ciri khas, dimensi, dan kategori*. *Pertama,* faktor **ciri khas modal sosial**. Berdasarkan hasil kajian teoretis tentang pengertian dan ruang lingkup modal sosial, ditemukan adanya enam ciri utama modal sosial, yakni: adanya norma, aturan, saling menerima dan percaya, kewajiban, saluran informasi, jaringan dan

hubungan kelembagaan, serta koordinasi tindakan atau penataan kelembagaan. *Kedua,* faktor **dimensi modal sosial** meliputi: *group and network, trust and solidarity, collective action and cooperation, information and communication, social cohesion and inclution,* serta *empowerment and political action. Ketiga,* faktor **kategori** yakni: struktural relasional, dan kognitif. Rekonstruksi hubungan kategori dan perspektif modal sosial tersebut sebagai kerangka kerja penelitian lapangan dan analisis data disajikan pada Tabel 1.

Kerangka Kerja dan Analisis Modal Sosial

Sebagai kerangka kerja dan analisis penelitian lapangan, perspektif modal sosial mengacu pada konstruk berikut. *Pertama,* **kategori kognitif:** faktor norma, nilai, dan keyakinan yang menjadi acuan terhadap perilaku dan sanksi. *Kedua,* **kategori relasional**: faktor saling percaya dan menerima yang berpengaruh terhadap kewajiban dan harapan komunitas; faktor akses informasi dan hubungan jaringan yang memengaruhi terbangunnya; dan faktor solidaritas dan sinergisitas. *Ketiga,* **kategori struktural:** faktor koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan serta faktor pemberdayaan dan tindakan politik. Penelitian lapangan menggali data dan fakta bagaimana kondisi enam perspektif dalam tiga kategori modal sosial tersebut dalam konteks kebijakan pembebasan tanah proyek KBT.

Gambaran Umum Teknik Pengumpulan Data

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk menjawab Sub Fokus (tujuan) Penelitian 1 yang bersumber dari (a) *informasi media massa* tentang KBT tahun 2004-2010,

Tabel 1.
Kerangka Kerja dan Analisis Modal Sosial

Perspektif	Kategori Modal Sosial		
	Struktural	**Relasional**	**Kognitif**
Ciri Khas Dan Dimensi	• Aturan dan peran • Prosedur dan keteladanan • Koordinasi tindakan/ penataan kelembagaan • Pemberdayaan dan tindakan politik	• Saling percaya dan menerima • Kewajiban • Budaya masyarakat • Kedermawanan • Komunikasi dan saluran informasi • Tindakan kolektif dan kerja sama • Solidaritas (kohensi sosial, inklusi) dan sinergi • Jaringan persaudaraan	• Norma • Nilai • Keyakinan • Sikap

(b) *hasil kajian hukum* beberapa pakar yang mengkaji kebijakan pembebasan tanah melalui Perpres No.36/2005 dan Perpres No.65/2006. Teknik dokumenter juga menjawab Sub Fokus (tujuan) Penelitian 2, yang masih terkait erat dengan Sub Fokus (tujuan) Penelitian 1. Teknik wawancara dan diskusi (FGD) dipakai untuk mengumpul data menjawab Sub Fokus (tujuan) Penelitian 3, dan Sub Fokus (tujuan) Penelitian 4. Data FGD diperoleh dari 12 kelompok diskusi yang terdiri dari masyarakat korban, aparat RT/RW dan kelurahan. Data wawancara diperoleh dari 6 Lurah, 9 aparat RW dan 14 aparat RT. Data melalui Teknik observasi diperoleh melalui keterlibatan langsung peneliti mengamati kondisi tata ruang wilayah (spasial) berkaitan dengan aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, suasana sosial dan emosi warga yang terkena pembebasan tanah. Teknik ini dipakai utamanya untuk klarifikasi berkaitan dengan Sub Fokus (tujuan) Penelitian 3 dan 4. Kerangka deskripsi dan sajian analisis data pada uraian temuan Sub Fokus (tujuan) Penelitian 1 sd 4., merujuk kerangka (alur) analisis data dari Miles dan Hubermas (1992), yakni melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan-temuan dari Lapangan

Bentuk Produk Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek KBT

Bentuk produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT diungkap dari dua sumber data, yaitu (1) informasi media cetak, dan (2) kajian para ahli.

Informasi Media Massa Cetak. Temuan tentang informasi media massa cetak yang disajikan pada Tabel 2 menggambarkan bahwa bentuk produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT, yakni: (a) bentuk produk kebijakan, secara dominan dan konsisten nampak pada instrumen Keppres dan Perpres yang didukung Master Plan berbasis hasil studi, peresmian proyek KBT oleh Presiden pada tingkat Pemerintah, serta Surat Keputusan Gubernur dan Walikota, peresmian proyek KBT oleh Gubernur pada tingkat Pemerintah Daerah DKI Jakarta; (b) **k**onten kebijakan**,** seluruh produk tersebut menegaskan posisi NJOP sebagai dasar perhitungan pembebasan tanah. Sementara NJOP sebagai dasar perhitungan pembebasan tanah proyek KBT tidak sejalan dengan UU.No.12/1985 dan UU.No.12/1994 yang menegaskan bahwa NJOP hanya diperuntukkan bagi kepentingan pajak dan bukan untuk kepentingan lain di luar perpajakan; (c) konteks proses sosial, nampak kepekaan dan sikap responsif Pemerintah dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap dilema musyawarah penetapan kompensasi pembebasan tanah antara P2T (panitia 9) dan masyarakat pemilik tanah, serta potensi provokasi dan konflik kekerasan sekitar proses pembebasan tanah.

Kajian Para Ahli. Temuan hasil studi tentang kajian para ahli tentang "bentuk dan makna produk-produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT", dengan menjadikan NJOP sebagai dasar perhitungan, merujuk Perpres No.36/2005 dan Perpres No.65/2006 pada kenyataannya rentan mengandung isu-isu krusial yang juga dikritisi masyarakat luas seperti: (a) keterlibatan pihak swasta dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum; (b) perlindungan hak asasi manusia pemilik tanah; (c) kelemahan kompensasi di Indonesia berbasis NJOP sebagai faktor konflik pertanahan, mencerminkan dominasi dan represi kekuasaan pemerintah; dan (d) spekulasi harga tanah menghambat kebebasan pemerintah membebaskan tanah berbasis NJOP yang didukung alokasi dana/anggaran pada APBN dan APBD.

Hasil deskripsi kajian para ahli memberikan gambaran konkrit bahwa bentuk produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT berbasis Perpres No.36/2005 dan Perpres No.65/2006 berciri represif dalam konteks dominasi kekuasaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, rentan melahirkan berbagai tindakan destruktif terhadap dimensi-dimensi modal sosial masyarakat. Temuan hasil studi tentang "jenjang kebijakan, produk, fokus, dan penanggung jawab" menggambarkan bahwa produk kebijakan publik yang berperan strategis dalam pembebasan tanah adalah Keppres dan Perpres (pusat), Keputusan Gubernur (provinsi) dan Keputusan Walikota (kabupaten/kota) dengan aktor utama yang bertanggung jawab adalah Presiden, Gubernur dan Walikota.
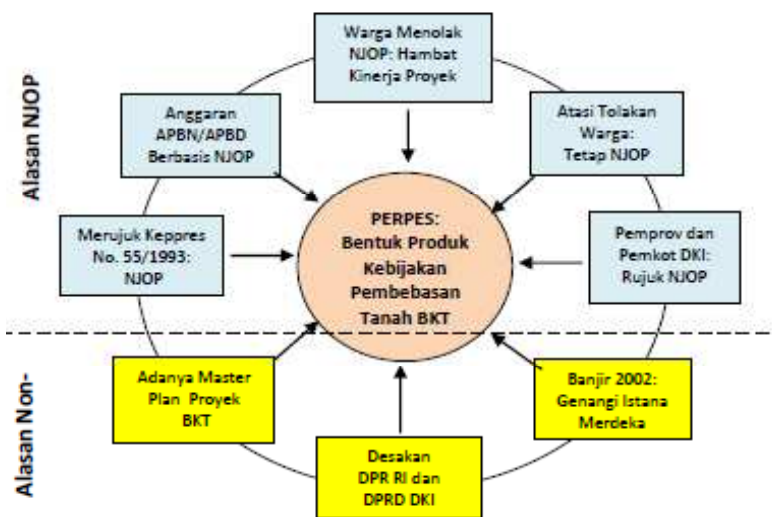
Gambar 1. Latar belakang dan tujuan produk kebijakan pembebasan tanah proyek BKT

Tabel 2.
Bentuk Produk Kebijakan Publik Proyek KBT

Produk Kebijakan Periode Sebelum Tahun 2004	Produk Kebijakan Periode Tahun 2004-2005	Produk Kebijakan Periode Tahun 2006-2009
▪ UU No.12 tahun 1985 dan UU No.12 tahun 1994 (NJOP hanya untuk kepentingan pajak, bukan yang lainnya). ▪ Keppres No.55/1993 ▪ Master Plan (1973) yang didukung hasil studi konsultan ahli (Jepang) tahun 1991. ▪ SK Gubernur DKI Jakarta No.43 tahun 2004 dan SK Wali Kota Jakarta Timur No.55 tahun 2004. ▪ Pengresmian proyek oleh pemerintah (Presiden Megawati) dan pemerintah daerah (Gubernur DKI).	▪ Alokasi anggaran melalui APBN dan APBD DKI Jakarta. ▪ Diterbitkannya Perpres No.36 tahun 2005 ▪ Penegasan NJOP sebagai basis pembebasan tanah, disertasi konsinyasi dan pencabutan hak atas tanah ▪ Respons pemerintah terhadap provokasi dan konflik kekerasan	▪ Diterbitkannya Perpres No.65 tahun 2006 sebagai respons atas tuntutas aspiratif elemen-elemen masyarakat. ▪ Dilema pendekatan musyawarah di Kelurahan dan konsinyasi melalui pengadilan.

Argumentasi Pilihan Kebijakan

Mengapa produk-produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT mengambil bentuk seperti itu? Temuan hasil studi membuktikan bahwa produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT pada kenyataannya terdiri atas alasan-alasan yang berfokus pada bersifat NJOP dan alasan-alasan yang non-NJOP. Secara komprehensif nampak pada Gambar 1. Alasan NJOP dengan indikator: merujuk Keppres No.55/1993 tentang NJOP, APBN/APBD berbasis NJOP, warga menolak NJOP: hambat kinerja proyek, atasi penolakan warga: tetap NJOP, Pemprov dan Pemkot DKI merujuk NJOP. Alasan non-NJOP: adanya *master plan* proyek KBT, desakan DPR RI dan DPRD DKI, banjir tahun 2002: genangi istana Merdeka.

Dampak Modal Sosial Masyarakat Korban

Dampak modal sosial masyarakat korban dalam konteks pembebasan tanah sebagai acuan studi seperti dikemukakan pada Tabel 1. Kerangka Kerja dan Analisis Modal Sosial terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. *Pertama,* kategori **modal struktural,** yang meliputi dimensi hukum dan peran, prosedur dan keteladanan, koordinasi tindakan atau penataan kelembagaan, pemberdayaan dan tindakan politik. *Kedua,* kategori **modal relasional** meliputi dimensi kepercayaan dan saling menerima, kewajiban, budaya sipil,

kedermawanan, komunikasi dan saluran informasi, tindakan kolektif dan kerja sama, solidaritas (kohesi sosial dan inklusi) dan sinergisitas, serta jaringan hubungan. *Ketiga,* kategori **modal kognitif** dengan dimensi norma, nilai, sikap, dan keyakinan. Studi dilakukan pada enam lokasi, yakni: Kelurahan Marunda, Cilincing, Rorotan, Cakung Timur, Pondok Kopi, Malaka Jaya.

Dampak dimensi modal struktural. Temuaan hasil studi di kelurahan sasaran (Tabel 3) menggambarkan bahwa dimensi yang dominan terkena dampak pembebasan tanah adalah pemberdayaan dan tindakan politik (6 kelurahan atau 100%), disusul dimensi hukum dan peran (4 kelurahan atau 66,65%). Dimensi modal struktural yang terkena dampak di bawah 50% adalah prosedur dan keteladanan, serta koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan (2 kelurahan atau 33,30%). Tabel tersebut secara mengejutkan menunjukkan bahwa dimensi pemberdayaan dan tindakan politik adalah dimensi yang merata terjadi di seluruh kelurahan (100%). Artinya, di sinilah dimensi krusial dampak pembebasan tanah proyek KBT dari perspektif kategori modal struktural. Sementara tidak kalah pentingnya kelurahan yang terkena dampak pada dimensi hukum dan peran mencapai empat kelurahan atau 66,65% atau di atas 60%. Dengan kata lain, kedua dimensi ini merupakan dimensi modal struktural yang paling krusial dialami dan dirasakan oleh masyarakat korban di 6 kelurahan sasaran proyek KBT. Data tersebut juga memberikan makna mendasar bahwa, dimensi krusial yang menjadi persoalan di seluruh kelurahan berkaitan dengan dampak pembebasan tanah proyek KBT adalah dimensi pemberdayaan

Tabel 3.
Dampak Dimensi-dimensi Modal Struktural Menurut Kelurahan Sasaran Proyek BKT

No	Kelurahan	Dampak Dimensi-dimensi Modal Struktural			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Marunda	v	–	v	v
2.	Cilincing	v	v	v	v
3.	Rorotan	–	–	–	v
4.	Cakung Timur	–	–	–	v
5.	Pondok Kopi	v	v	–	v
6.	Malaka Jaya	v	–	v	v
Total Kelurahan		4 = 66,65%	2 = 33,30%	2 = 33,30%	6 = 100%

Keterangan: dimensi-dimensi modal struktural.
1. Hukum dan peran
2. Prosedur dan keteladanan
3. Koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan
4. Pemberdayaan dan tindakan politik

dan tindakan politik berkaitan dengan *masa depan* masyarakat korban, bandingkan dengan dimensi hukum dan peran yang berfokus pada persoalan basis pembebasan tanah warga ***saat terjadi*** proses penetapan nilai kompensasi dan pembayarannya, yakni nilai NJOP. Ironisnya, fakta ini berbanding terbalik dengan temuan riset bahwa partisipanlah yang mengelola sendiri persoalan perpindahan, pemukiman kembali, pemulihan dan penataan hidup berkelanjutan, tanpa intervensi atau pendampingan dan pemberdayaan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Intervensi pemerintah dan pemerintah daerah dianggap selesai ketika telah terjadi "penetapan dan kesepakatan nilai pembebasan tanah berbasis NJOP dan pelaksanaan pembayarannya."

Dampak dimensi modal relasional. Temuan hasil studi sebagaimana nampak pada Tabel 4. Secara jelas menunjukkan dampak pembebasan tanah pada kategori modal relasional dominan indikasinya pada: dimensi *komunikasi dan saluran informasi* (6 kel = 100%), *tindakan kolektif dan kerja sama* (5 kel = 83.33%) serta *solidaritas dan sinergisitas* (5 kel = 83.33%) dari total kelurahan dimensi modal relasional. Hasil tersebut menunjukkan secara jelas bahwa (a) dimensi komunikasi dan saluran informasi merupakan dimensi modal relasional yang justru dialami partisipan di seluruh kelurahan dari mana partisipan berasal (6 kel = 100%).

Dimensi komunikasi dan saluran informasi merupakan pengalaman sadar partisipan menduduki prioritas tertinggi dampak pembebasan tanah proyek KBT dalam konstruk dimensi modal relasional partisipan. (b) Pada saat yang sama pengalaman partisipan ini

Tabel 4. Dampak Dimensi-dimensi Modal Relasional Menurut Kelurahan Sasaran Proyek BKT

No	Kelurahan	Dampak Dimensi–dimensi Modal Relasional							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Malaka Sari	v	–	–	–	v	v	v	–
2.	Pondok Kelapa	–	–	–	–	v	v	–	v
3.	Duren Sawit	v	–	v	–	v	–	v	–
4.	Pondok Bambu	–	–	–	–	v	v	v	–
5.	Cipinang Muara	–	–	–	–	v	v	v	–
6.	Cipinang Besar Selatan	–	–	–	–	v	v	v	–
Total Kelurahan		2	–			6	5	5	1

Keterangan dimensi modal relasional:

(1) Saling percaya dan menerima
(2) Kewajiban
(4) Budaya sipil
(5) Kedermawanan
(5) Komunikasi dan saluran informasi
(6) Tindakan kolektif dan kerja sama
(7) Solidaritas dan sinergisitas
(8) Jaringan hubungan (sosial)

Tabel 5. Dampak Dimensi-dimensi Modal Kognitif Menurut Kelurahan Sasaran Proyek BKT

No.	Kelurahan	Dampak Dimensi-dimensi Modal Kognitif			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Marunda	v	v	v	v
2.	Cilincing	v	v	v	v
3.	Ujung Menteng	v	v	v	v
Total Kelurahan		3 = 100%	3 = 100%	3 = 100%	3 = 100%

Keterangan dimensi modal kognitif:
(1) Norma (3) Sikap
(2) Nilai (4) Keyakinan

mengindikasikan bahwa dimensi tindakan kolektif dan kerja sama, solidaritas dan sinergisitas sebagai kekuatan modal sosial, mengalami destruksi karena kebijakan pembebasan tanah proyek KBT. (c) Hasil pemetaan juga menunjukkan bahwa dimensi saling percaya dan menerima (2 kel = 33.33%), budaya sipil (1 kel = 16.66%) dan jaringan hubungan (1 kel = 33.33%) sebagai potensi strategis untuk membangun modal sosial, juga mengalami dampak destruktif pembebasan tanah proyek KBT.

Dampak dimensi modal kognitif. Sebagaimana diuraikan pada Tabel.5. Temuan hasil studi membuktikan bahwa pembebasan tanah proyek KBT berdampak 100% dan merata ke seluruh kelurahan sampel terhadap dimensi-dimensi modal kognitif, yakni destruksi pada norma, nilai, sikap dan keyakinan responden. Hal ini memberikan gambaran pemahaman (makna) mendasar dan kontekstual bahwa telah terjadi perubahan nilai, sikap dan keyakinan pemilik tanah bahwa pembebasan tanah proyek KBT berbasis NJOP terbukti tidak memberikan perubahan masa depan yang lebih baik pasca pembebasan dan kompensasi.

Dampak Lingkungan Sekitar Modal Sosial

Temuan riset sebagaimana diuraikan pada Tabel 6 menggambarkan bahwa dampak *lingkungan sekitar* (eksternal) modal sosial berupa: pelanggaran HAM, konflik kekerasan, dan trauma psikososial yang berkaitan sangat erat dengan dampak *lingkungan internal* modal sosial. *Pertama,* dampak lingkungan sekitar modal sosial pada faktor Pelanggaran HAM, berkaitan erat dengan dampak modal struktural yang berfokus pada terabaikannya dimensi proteksi hukum dan peran pemerintah, serta pemberdayaan dan tindakan politik negara. *Kedua,* demikian juga, dampak lingkungan sekitar pada konflik dan kekerasan, berkaitan dengan modal relasional berupa terabaikannya dimensi saling percaya dan menerima,

Tabel 6. Hubungan Dampak Lingkungan Sekitar dan Modal Sosial

Dampak Lingkungan Sekitar	Indikator Dampak Lingkungan (Internal) Modal Sosial		
	Struktural	**Relasional**	**Kognitif**
Pelanggaran HAM	• Proteksi hukum dan peran pemerintah • Pemberdayaan dan tindakan politik		
Konflik Kekerasan		• Saling percaya dan menerima • Tindakan kolektif dan kerja sama • Solidaritas dan sinergisitas	
Trauma Psikososial			• Nilai, sikap dan keyakinan atas perlindungan negara/ pemerintah

tindakan kolektif dan kerja sama, serta solidaritas dan sinergisitas. *Ketiga,* dampak lingkungan sekitar pada faktor trauma psikososial, berkaitan sangat erat dengan modal kognitif, yakni dimensi nilai, sikap dan keyakinan. Di antara faktor pelanggaran HAM, konflik kekerasan dan trauma psikososial, temuan hasil riset membuktikan bahwa kondisi trauma psikososial terbukti bersumber pada kebijakan pembebasan tanah berbasis NJOP yang berdampak pada: (1) *destruksi faktor internal modal sosial*: struktural, relasional dan kognitif, dan (2) *reproduksi-destruksi faktor eksternal modal sosial*: terabaikannya proteksi hukum dan peran pemerintah serta terabaikannya pemberdayaan dan tindakan politik jajaran pemerintahan (hubungan modal struktural dan pelanggaran HAM); lahirnya kondisi tidak saling percaya dan menerima, melemahnya tindakan kolektif dan kerja sama, serta solidaritas dan sinergisitas di kalangan warga sasaran (hubungan modal relasional dan faktor konflik kekerasan). Temuan riset membuktikan pula bahwa, karena *destruksi modal sosial* dan *reproduksi destruksi modal sosial* berakar pada *kebijakan pembebasan tanah berbasis NJOP,* maka upaya penyembuhan, rehabilitasi dan rekonstruksi trauma psikososial berkepanjangan sebagai dampak strategisnya pada masyarakat korban, mesti meliputi ketiga elemen rantai sistem sosial tersebut.

Usaha Mengatasi Dampak

Usaha mengatasi dampak Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek KBT terhadap Modal Sosial masyarakat korban dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu (a) usaha pemerintah, dan (b) usaha masyarakat korban.

Usaha pemerintah. Tabel 7 memberikan gambaran temuan hasil studi tentang aspirasi pengalaman sadar partisipan bahwa, lima bentuk usaha yang patut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak pembebasan tanah proyek KBT secara dominan berkaitan dengan pemulihan modal struktural. Intervensi melalui lima bentuk usaha tersebut berfokus pada perbaikan dimensi hukum dan peran pemerintah, prosedur dan keteladanan, koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan, serta pemberdayaan dan tindakan politik. Dampak modal relasional, menunjukkan bahwa ada dua bentuk usaha pemerintah dalam mengatasi dampak pembebasan tanah proyek KBT berkaitan dengan dimensi-dimensi modal relasional, yakni "menyediakan berita acara (administrasi) pembebasan tanah, dan melakukan evaluasi dan kontrol dalam proses pembebasan tanah". Kedua bentuk usaha tersebut berkaitan dengan dimensi-dimensi saling

Tabel 7. Kaitan bentuk usaha pemerintah dengan alasan dimensi-dimensi dampak modal sosial.

Bentuk Usaha	Kategori dan Dimensi Modal Sosial		
	Struktural	Relasional	Kognitif
Mengubah NJOP sebagai basis kompensasi	• Hukum dan peran pemerintah		
Menyediakan Berita Acara pembebasan tanah	• Hukum dan peran pemerintah • Prosedur dan keteladanan	• Saling percaya dan menerima • Kewajiban • Komunikasi dan informasi	• Norma, nilai, sikap dan keyakinan
Memfasilitasi pemukiman kembali	• Pemberdayaan dan Tindakan Politik		
Melakukan evaluasi dan kontrol pembebasan tanah	• Koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan	• Saling percaya dan menerima • Kewajiban • Komunikasi dan saluran informasi	• Norma, nilai, sikap dan keyakinan
Mengatasi kesengajaan dan tindakan pembiaran	• Pemberdayaan dan tindakan politik		

percaya dan saling menerima, kewajiban, komunikasi dan informasi. Bahkan memiliki kaitan dengan dampak modal kognitif melalui dimensi norma, nilai, sikap, dan keyakinan partisipan.

Usaha masyarakat korban. Temuan hasil studi pada Tabel 8, memberikan gambaran bagaimana bentuk-bentuk usaha masyarakat korban berkaitan dengan dampak dimensi-dimensi modal sosial. Tabel. 9 menggambarkan hasil studi bahwa lima bentuk usaha masyarakat korban untuk mengatasi dampak pembebasan tanah proyek KBT, yakni: inisiatif bersama komunitas, pendampingan dan pemberdayaan, fasilitasi RT dan RW, serta melakukan evaluasi dan kontrol pembebasan tanah, berkaitan (memiliki alasan) dengan dampak dimensi-dimensi modal struktural, relasional dan kognitif. berkaitan dengan alasan modal struktural, keempat bentuk program tersebut berfokus pada dimensi: koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan, serta pemberdayaan dan tindakan politik. Gambaran hasil studi menunjukkan bahwa, keempat bentuk usaha yang dikonstruksikan partisipan berkaitan dengan dampak pembebasan tanah pada modal sosial masyarakat korban,

Tabel 8. Kaitan bentuk usaha masyarakat korban dengan alasan dimensi-dimensi dampak modal sosial.

Bentuk Usaha	Kategori dan Dimensi Modal Sosial		
	Struktural	**Relasional**	**Kognitif**
Inisiatif bersama komunitas	• Koordinasi tindakan • Pemberdayaan dan tindakan politik	• Saling percaya dan menerima • Kewajiban • Komunikasi dan informasi	• Norma, nilai, sikap dan keyakinan
Pendampingan dan pemberdayaan	• Pemberdayaan dan tindakan politik	• Saling percaya dan menerima • Kewajiban • Komunikasi dan informasi	• Norma, nilai, sikap dan keyakinan
Fasilitasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)	• Koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan • Pemberdayaan dan Tindakan Politik	• Saling percaya dan menerima • Kewajiban • Komunikasi dan informasi	• Norma, nilai, sikap dan keyakinan
Melakukan evaluasi dan kontrol pembebasan tanah	• Koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan	• Saling percaya dan menerima • Kewajiban • Komunikasi dan informasi	• Norma, nilai, sikap dan keyakinan

berfokus pada alasan rekonstruksi dampak modal struktural pada dimensi koordinasi tindakan dan penataan kelembagaan serta pemberdayaan dan tindakan politik. Artinya, pengalaman sadar dan makna yang terkandung dari pemahaman sadar partisipan untuk rekonstruksi modal struktural, utamanya terfokus pada kedua dimensi ini.

Berkaitan dengan alasan dampak modal relasional sebagai sasaran keempat bentuk intervensi (usaha) mengatasi dampak pembebasan tanah proyek KBT, Tabel.8 menunjukkan bahwa dimensi saling percaya dan menerima, kewajiban, serta komunikasi dan informasi merupakan area modal relasional yang menjadi sasaran rekonstruksi melalui keempat bentuk usaha yang diprioritaskan oleh masyarakat korban. Pada saat yang sama, keempat bentuk intervensi tersebut, disasarkan pula untuk memulihkan modal kognitif masyarakat korban yang berfokus pada dimensi norma, nilai, sikap dan keyakinan masyarakat korban.

Pembahasan

Bentuk Produk Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek KBT

Hasil penelitian menemukan secara konkrit bahwa bentuk produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT: (a) *bentuk produk kebijakan*: mengacu pada Keppres, Perpres, dan SK Gubernur/Walikota DKI; (b) *konten kebijakan*: menegaskan posisi NJOP sebagai dasar perhitungan kompensasi; (c) *struktur dan otoritas tanggung jawab*: dominan pada aktor Pemerintah dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Secara konstitusional, penetapan NJOP bertentangan dengan mandat UU No.12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994 yang menegaskan NJOP hanya bagi kepentingan perpajakan. Sementara NJOP baru menyangkut objek tanah dan belum hubungan tanah dan pemilik tanah sebagai hak asasi manusia secara filosofis, ekonomis, sosial, politik, kultural, dan psikologis. Temuan hasil studi menunjukkan kegagalan negara pada 3 level fungsi: (1) *fungsi minimal* melalui penyediaan barang dan jasa publik: pertahanan, hukum dan hak kepemilikan, perbaikan kesejahteraan dan proteksi kelompok Miskin; (2) *fungsi antara* mengatasi monopolli regulasi dalam mengatasi hambatan pembangunan; (3) *fungsi aktivis* dengan mengkoordinasi aktivitas privat dengan memperbaiki kesetaraan dan keadilan. Hubungan modal sosial dan efektivitas pemerintahan diperlukan untuk kualitas pemerintahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Argumentasi Produk Kebijakan

Alasan faktor NJOP: merujuk Keppres No.55/1993 berbasis NJOP; APBN/APBD berbasis NJOP karena terbatas anggaran negara; penolakan warga atas NJOP dianggap

menghambat proyek; karena itu Perpres menegaskan NJOP sebagai dasar kompensasi; diikuti dengan Keputusan Gubernur dan Walikota di DKI.

Alasan faktor non-NJOP: adanya Master Plan dan hasil studi tentang KBT; banjir tahun 2002 genangi halaman istana Merdeka; adanya desakan DPR-RI dan DPRD DKI. Alasan-alasan pada hakikatnya mengedepankan peran aktor dan struktur kekuasaan negara secara hirakhis kekuasaan begitu dominan dan bersifat represif (memaksa) dalam kebijakan pembebasan tanah proyek KBT. Karena itu, temuan penelitian dengan terang menemukan Pemerintah dan Pemerintah daerah DKI Jakarta sensitif atas kegagalan musyawarah penetapan nilai kompensasi yang rentan konflik (penolakan warga). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas negara/pemerintah menurut Wallis dan Dolerry melalui faktor *institutional capacity, technical capacity, administrative capacity,* dan *political capacity* (Wallis dan Dollery, 2001) menjadi penting dan strategis. Bahkan, modal sosial sudah semestinya dijadikan tools kebijakan publik (Canada Project Report, 2005). Rangkuman terhadap temuan hasil riset Sub Fokus (tujuan) Penelitian 1 dan 2 sebagaimana nampak pada Gambar 2 menunjukkan Ciri dan Kharakter Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek KBT. Pada Gambar 2 nampak jelas bagaimana kaitan antara penetapan NJOP dasar perhitungan pembebasan tanah dengan a) bentuk produk kebijakan (berupa Keppres, Perpres, SK Gub dan Walikota); b) Alasan Kebijakan: NJOP dan non-NJOP, c) aktor dan struktur tanggung jawab pada pemeritah; serta d) sensitif dan responsif atas kegagalan musyawarah penetapan
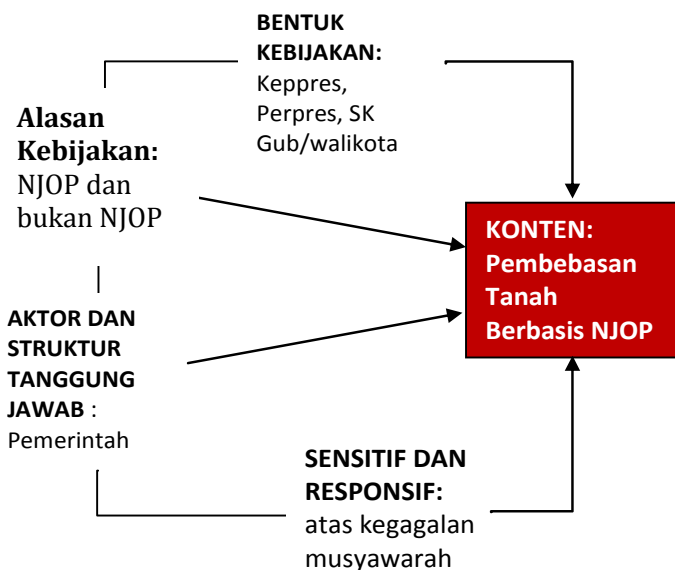
Gambar 2. Ciri dan Kharakter (Tipologi) Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek BKT

nilai kompensasi di kelurahan. Menurut Wallis dan Dollery (2001), untuk mengatasi *"state incapacity"*, diperlukan suatu kerangka analisis yang mengintegrasikan paradigma kegagalan pemerintah dengan *top-down-nya"* dengan paradigma *"social capital"* yang menekankan pendekatan *bottom-upnya*.

Dampak Modal Sosial Masyarakat Korban

Hasil studi secara konkrit memberikan gambaran (Gambar 3) pengalaman sadar partisipan terhadap dampak modal sosial masyarakat korban dalam konteks pembebasan tanah proyek KBT pada dua kondisi, yakni: *Pertama,* kondisi lingkungan (internal) modal sosial masyarakat korban sendiri yang meliputi kategori modal struktural, relasional dan kognitif dengan seluruh dimensi-dimensi destruktifnya yang nyata. *Kedua,* kondisi lingkungan sekitar modal sosial berupa faktor pelanggaran hak asasi manusia, konflik kekerasan, dan trauma psikososial berkelanjutan. Destruksi modal sosial dan faktor lingkungan sekitar modal memiliki kaitan sangat erat dan membentuk konfigurasi dampak holistik pembebasan tanah proyek KBT. Gambar.3. membuktikan hasil studi bahwa dampak lingkungan sekitar ini sangat berkaitan dengan kondisi destruksi pada lingkungan mikro modal sosial. Hasil riset membuktikan bahwa dampak faktor psikososial utamanya dimensi *lost aversion* karena kompensasi berbasis NJOP, secara dominan lebih merugikan pemilik tanah. Karena itu, pemilik tanah meminta kompensasi di atas NJOP (*dimensi endowment*
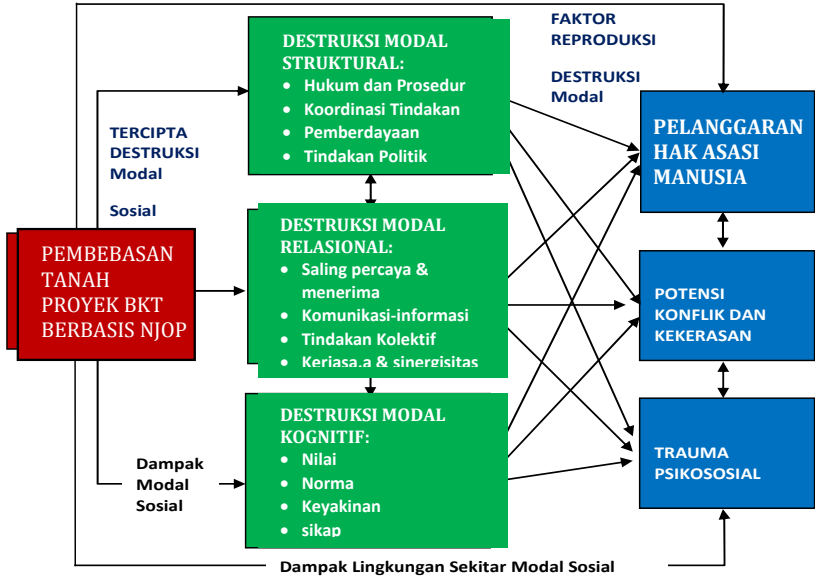
Gambar 3. Dampak Modal Sosial Masyarakat Korban

effect atau harga prospek). Ketiga faktor lingkungan sekitar terbukti berperan terhadap terkondisinya *reproduksi destruksi modal sosial,* utamanya *trauma psikososial berkepanjangan*. Ferragina (2009) menyadari bahwa mengelola modal sosial senantiasa akan berhadapan dengan berbagai kondisi seperti pendapatan yang tidak-setara atau *income inequalities* pada tingkat komunitas, jaringan, seta kelompok dan individu pada waktu yang sama, mesti dikelola tersistem.

Usaha Mengatasi Dampak

Hasil studi menemukan aspirasi (1) tindakan pemerintah mengatasi dampak destruksi dan reproduksi destruksi modal sosial dari kebijakan pembebasan tanah proyek KBT, yakni: mengubah NJOP sebagai dasar kompensasi, menata administrasi kompensasi, pemukiman kembali, evaluasi dan kontrol pembebasan tanah, mengatasi kesengajaan pembiaran destruksi; (2) tindakan konkrit masyarakat korban, yakni: inisiatif bersama warga, pendampingan dan pemberdayaan, fasilitasi aparat RT/RW serta evaluasi dan kontrol pembebasan tanah. Hamid Rashid (2010) mengemukakan pemberdayaan yang legal terhadap masyarakat miskin menjadi pusat perhatian utama dalam kerangka memahami hubungan "hak-hak masyarakat miskin atas tanah" dalam "konteks Millennium Development Goals-MDGs." Mencegah dan menghindari destruksi dan reproduksi modal sosial dalam konteks kebijakan pembebasan tanah, menempatkan hubungan antara *property rights, land rights, and poverty reduction* dan hak atas tanah sebagai hak asasi manusia fundamental dan pentingnya keamanan atas tanah milik (*tenure security*). Terutama martabat, keamanan material, relasi sosial dan kewarganegaraan. Hak atas tanah sebagai hak asasi manusia berkaitan dengan tanggung jawab penegakan dan pemajuan hak atas tanah melalui proteksi bentuk-bentuk sistem hak asasi atas tanah milik sebagai basis membangun kohesi sosial dan modal sosial masyarakat.

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terbukti bahwa bentuk produk kebijakan pembebasan tanah proyek KBT yang menggunakan Perpres, Keputusan Gubernur dan Walikota DKI Jakarta, dengan aktor utama jajaran Pemerintah, telah melegitimasi NJOP sebagai dasar perhitungan

kompensasi atau "ganti rugi" dengan menampilkan wajah kebijakan publik berciri dominasi kekuasaan dan represi pemerintah.

2. Terbukti bahwa alasan-alasan faktor NJOP dan non-NJOP lebih sebagai pembenaran penetapan NJOP sebagai dasar perhitungan kompensasi. NJOP sebagai dasar perhitungan ganti rugi bertentangan dengan UU No.12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994 yang mengatur bahwa NJOP untuk kepentingan perpajakan.

3. Terbukti bahwa kebijakan pembebasan tanah proyek KBT telah berdampak **destruksi modal sosial masyarakat korban** berupa modal struktural, relasional, dan kognitif serta dimensi-dimensi krusialnya; dan berdampak **reproduksi destruksi faktor lingkungan sekitar** berupa pelanggaran hak ECOSOC, konflik sumber daya tanah.

4. Terbukti bahwa kondisi destruksi dan reproduksi modal sosial masyarakat korban telah menjadi **akar terdalam trauma psikososial berkepanjangan pemilik tanah serta sensitivitas konflik kekerasan pembebasan tanah**.

5. Terbukti bahwa ada dua bentuk usaha mengatasi dampak kebijakan pembebasan tanah proyek KBT yakni: (a) oleh *pemerintah* dengan mengubah NJOP sebagai dasar perhitungan ganti rugi, menata administrasi proyek, memfasilitasi pemukiman kembali, evaluasi dan kontrol pembebasan tanah, tidak membiarkan situasi pasca pembebasan menjadi urusan warga sendiri; dan (b) oleh *masyarakat korban*, berupa inisiatif bersama mengatasi dampak kebijakan pembebasan tanah, mendorong pendampingan dan pemberdayaan aparat kelurahan, kejelasan informasi dan kontrol pembebasan tanah proyek KBT.

Implikasi

Temuan-temuan penelitian di lapangan di atas memberikan sejumlah implikasi sebagai berikut:

1. *Terhadap pengembangan keilmuan*:
   a. Hendaknya studi manajemen SDM memperdalam pemahaman tentang modal sosial dan psikososial masyarakat pemilik tanah berkaitan dengan kebijakan publik menurut: (1) *konteks sosial terjadinya*: kota, pinggiran kota, dan wilayah pedesaan, pulau besar, pulau-pulau, dsb.; (2) *kekhasan isu, alasan, kasus dan klaster terjadinya* terkait aneka pola kebijakan proyek. (3) *aktor utama:* pemerintah dan swasta; dan (4) komunitas lokal yang terkena dampak.

b. Seyogianya studi manajemen SDM yang berfokus pada modal sosial masyarakat pemilik tanah dalam konteks kebijakan pembebasan tanah juga dapat dilakukan, baik lintas pendekatan kuantitatif dan kualitatif, maupun lintas disiplin, seperti: disiplin manajemen SDM, psikologi sosial, tata ruang, HAM, kebijakan publik, dan sebagainya, sehingga diperoleh kerangka analisis dan pemahaman menyeluruh tentang realitas modal sosial masyarakat korban dalam konteks kebijakan publik dengan berbagai dampak secara terintegrasi.
c. Kiranya studi modal sosial dalam kaitan dengan psikososial korban pemilik tanah dalam konteks kebijakan pembebasan tanah proyek KBT ini menginspirasi mahasiswa dan pengajar di Perguruan Tinggi agar intensif melakukan studi lintas disiplin yang berfokus pada modal sosial, psikososial, dan advokasi kebijakan yang didominasi kekuasaan berciri represif ditransformasikan menjadi *welfare state institution*.
d. Hendaknya Program Studi Manajemen SDM dan Psikososial memberikan perhatian pada studi lintas disiplin berfokus pada modal sosial dan psikososial kebijakan pembebasan tanah secara nasional dan daerah demi penguatan modal sosial dan psiksososial masyarakat pemilik tanah di Indonesia.

2. *Terhadap kebutuhan praktikal*.
   a. Hendaknya Pemerintah mengubah pendekatan NJOP sebagai dasar perhitungan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan, karena terbukti berdampak *destruksi* dan *reproduksi destruksi modal sosial masyarakat* dan menjadi akar struktural terdalam trauma psikososial pemilik tanah secara berkepanjangan.
   b. Hendaknya Pemerintah memperluas pendekatan kompensasi berbasis NJOP (aspek fisik tanah) dengan pendekatan baru berbasis peran *appraisal* dengan mengedepankan aspek hak asasi manusia, modal sosial dan psikososial masyarakat pasca pembebasan tanah: *pemindahan korban, pemukiman kembali, rehabilitasi, rekonstruksi.*
   c. Kiranya dengan kemauan politik Pemerintah dan Pemerintah daerah berkenan merekonstruksi ciri kebijakan pembebasan tanah dari ciri dominasi kekuasaan dan represi ke ciri kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.
   d. Kiranya dengan kemauan politik Pemerintah berkenan mekonstruksi tugas dan fungsi Tim Appraisal Independen yang selama ini berbasis pada penilaian fisik tanah, dengan kerangka penilaian komponen non-fisik seperti hak asasi pemilik tanah, modal sosial, dan psikososial pemilik tanah.

e. Agar Pemerintah dan Pemerintah daerah menata ulang tugas dan fungsi institusi pembebasan tanah berbasis Perpres No.55 Tahun 1993, Perpres No.36 Tahun 2005 dan Perpres No.65 Tahun 2006 dengan seluruh instrumen kebijakan jabarannya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sejalan dengan diubahnya NJOP sebagai dasar perhitungan dan peran Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Daftar Acuan

Alias, A., Kamaruzzaman, S.N., & Daud, Md. Nasir. (2010). Traditional lands acquisition and compensation: The perception of the affected aborigin in Malaysia. *International Journal on The Physical Sciences, 5*(11).

Anseeuw, W., & Alden, C. (2010). *The struggle over land in Africa: Conflicts, politics & change.* Cape Town, South Africa: Human Science Research Council.

Appiah, D. (2007), *Analysis of state institutional capacity, for land acquisition in Ghana: A case study of the public land bureaucracy.* Thesis Submitted in Partial Fulfilment for The Award of Master of Philosophy in Public Administration, Department of Administration and Orgtanization Theory, University of Bergen, Bergen.

Bahar, Ujang. (2008). Permasalahan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Tahun ke-38, No. 1.

Block Komunitas Hukum (2007), *Tinjauan Yuridis Perpres No.65 Tahun 2006, Perubahan Atas Perpres No.36 Tahun 2005 Sebagai Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta.

Blyler, M., & Coff, R.W. (2003). Dynamic capabilities, social capital, and rent appropriation: Ties that split pies*, Strategic Management Journal*, Volume 24.

Badan Pertanahan Nasional (2010), *Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum*. Disampaikan dalam Acara Seminar Pertanahan dengan Tema "Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya" yang Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang.

Bourdieu, P. (1983). Forms of capital. Dalam J. C. Richards (ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education. New York: Greenwood Press.

Chariri, A. (2009). *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*. Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), 31 Juli - 1 Agustus 2009. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Chitiga, M., & Mabugu, R. (2008). Evaluating the impact of land redistribution: A CGE (computable general equilibirium) microsimulation aplication to Zimbabwe, *Journal of African Economies*, 17(4).

Creswell, J.W. (2010). *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (3rd ed.). (Achmad Fawaid, Tr.). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Cross, S., & Rosenthal, R. (1999). Three models of conflict resolution: effects on intergroup expectancies and attitudes. *Journal of Social Issues.*

Deininger, K (2004). *Land policies for growth and poverty reduction: Key issues and challenges ahead*. UN, FIG, PC IDEA Inter-regional Special Forum on The Building of Land Information Policies in the Americas. Aguascalientes, Mexico.

Economic Commission of Africa-ECA. (2004). *Land tenure systems and their impacts on food security and sustainability development in Africa.* UN ECA: Uganda.

Emanuelli, S. (2006). *La Parota Hydroelectric Dam Project*: *The impacts of mega-projects on the rights to land and housing.* Mexico: Habitat International Coalition.

Franke, S. (2005). *Measurement of social capital, reference document for public policy research, development, and evaluation*. PRI Project, Canada.

Field, J. (2003). *Social capital*. London: Routledge.

Grootaert, C., & Bastelaer, van Thierry. (2002). *Understanding and measuring social capital. A synthesis of findings and recomendations fromthe social capital initiative*. IRIS Center and USAID, Washinton DC.

Han, Sun Sheng., & Vu, Kim Trang. (2008). Land acquisition in transitional Hanoi, Vietnam. *Urban Studies Journal, 45*(5&6).

Havel, M.B., & Zaleczna, M. (2009). *The regulatory framework and social capital. A comparative study of the land development process in Poland and Findland.* International Academic Group on Planning, Law, and Property Rights, Third Conference. Aalborg, Denmark.

Hutagalung, A.S. (2010). *Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan permasalahannya*. Disampaikan dalam Acara Seminar Pertanahan dengan Tema "Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya" yang Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang.

Johnson, C., & Haque, I. (2014). *Compensating displacement: The politics of urban land acquisition in Bangladesh.*Paper prepared for presentation at the "2014 World Bank Conference on Land and Poverty", The World Bank, Washington DC, March 24-27, 2014.

Knorringa, P., & Staveren, I. van. (2006). *Social capital for industrial development: Operatizing the concept.* Unido Research Programme, Combating Marginalization and Poverty Through Industrial Development (COMPID). United Nations Industrial Development Organization, Vienna.

Kompas. (2004, 11 Juni). *Untuk proyek KBT, rumput wargapun diganti*, DIGILIB AMPL, Jejaring Perpustakaan Online. Kumpulan Berita, Kompas. Diunduh 12 Desember 2010.

Kompas. (2006, 6 November). *Banjir, Cacat bawaan DKI.* DIGILIB AMPL, Jejaring Kepustakaan Online, Kumpulan Berita. Kompas, 06 Nov, 2006, Jakarta.

Kompas (2006). *Dari Zaman Van Breen hingga Bang Yos,* DIGILIB AMPL, Jejaring Kepustakaan Online. Kumpulan Berita, Kompas, Jakarta.

Liao, J., & Welsch, H. (2005). Roles of social capital in venture creation: Key dimensions and research implication. *Journal of Small Business Management.*

Lombard, M. (2012). *Land tenure and urban conflict: A review of literature.* The Global Urban Research Center, University of Manchester, United Kingdom.

Lubis, S.R.B. (2004). *Analisis yuridis terhadap praktik pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol oleh PT Jasa Marga (Persero). Studi kasus Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Jakarta Selatan.* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, Jakarta.

Masum, F. (2010). *Improving governance for fringe land development and management: Need for stakeholder integration into planning process,* 46th ISOCARP Congress, Nairobi, Kenya.

Mitchell, David (2010). Land tenure and disaster risk management. *Land Tenure Journal,* No.1, Land Center School of Mathematical and Geospatial Sciences, RMIT University Melbourne, Australia.

Mollel, L.L., & Lugoe, F.N. (2006). *Urban-specific land-use conflict and their effect on land management, good governance and the environment.* Dar-Es-Salaam Institute of Land Administration & Policy Studies Ltd, Tanzania.

Muller-Jokel, Rainer (2004). *Land readjustment. A win-win strategy for sustainability urban development, spatial planning for sustainable development. Policies and tools.* http://www.fig.net/pub/athens/papers/ts14/TS14_3_MullerJokel.pdf.

Pfeffer, M.J., Wagenet, L., Stycos, J.M., Syndenstricker, J., & Meola, C. (2002). *Value conflict and use planning: An example at the rural/urban interface.* Prepared for the Northeast Regional Center for Rural/Urban Development, Workshop on Land Use Problem. Cornel University, Center for the Environment, USA.

Prianti, D.D. (2011). *Petunjuk praktis cara melakukan penelitian fenomenologi,* (http://desidwiprianti.lecture.ub.ac.id/2011/01/petunjuk-praktis-cara-melakukan-penelitian-fenomenologi/)

Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.

Riduwan. (2003). Skala pengukuran variabel-variabel penelitian. Bandung: Alfabeta.

Rupasingha, A., & J. Goetz, S. (2007). Social and political forces as determinnts of poverty: A spatial analysis. *Journal of Socio-Economics, 36*.

Silalahi, S.B. (2010). *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Disampaikan dalam Acara Seminar Pertanahan dengan Tema "Pengadaan Tanah Skala Kecil, Permasalahan dan Solusinya." Diselenggarakan oleh Walikota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang.

Siisiainen, M. (2000). *Two concept of social: Bourdieu vs Putnam*. Paper Presented at ISTR Fourth International Conference "The Third Sector: For What and for Whom", Trinity College, Dublin, Ireland, July, 5-8, 2000. University of Jyvaskyla, Ireland.

Simamora, M. (2009). *Bandingan Perpres 55/1993, Perpres 36/2005, dan Perpres 65/2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. (http://mardalli.wordpress.com/2009/07/15).*

Samuelson, Wi.,& Zeckhauser, R. (1988). Status quo bias in decision making. *Journal of Risk and Uncertainity, 1,* 7-59.

Stephan, H., Lobban, R., &Benjamin, J. (2010). Land acquisition in Afrika: A return to Franz Fanon? *TAWARIKH: International Journal for Historical Study, 2*(1).

Tripathi, S. (2009). *Land, business, and human rights.* New Delhi: Institute for Human Rights and Business.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1991). Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model. *The Quarterly Journal of Economics, 106*(4).

Wallace. J. (2009). *Land acquisition in developing economies,* The 7th FIG Regional Conference in Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009, International Federation of Surveyors, 2009. (http://www.fig.net/pub/vietnam/papers/ps02/ps02_wallace_3791.pdf).

Wallis, J., & Dollery, B. (2001).*Government failure, social capital and the appropriateness of the New Zealand Model for public sector in dvelopment countries. World Development, 29*(2), 245-263.

Wehmann, B. (2008). *Land conflicts: A practical guide to dealing with land disputes.* Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn, Germany.

Wichery, E. (2009). Land is life, land is power: Landlessness, exclusion, and deprivation in Nepal. *Fordham International Law Journal, 34*, 930. (http://www.leitnerlaw.com/files/Publications/Wickeri_FinaltoAuthor.pdf).

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implication for development theory, research, and policy. *World Bank Research Observer, 15*(2).

Zhang, Ying, & Fishbach, A. (2000). The role of anticipated emotions in the endowment effect. *Journal of Consumer Psychology, 15*(4), 316-324.

26
Revolusi Mental Berbasis Masyarakat Sebagai Fungsi Kontrol Sosial Bagi Upaya Preventif Terjadinya Kasus *Human Trafficking* di Jawa Timur

Ike Herdiana

Pendahuluan

Kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) sudah mulai dipandang serius oleh Pemerintah. Secara kuantitatif, sulit dipastikan jumlah kasus yang tercatat di setiap daerah. Kasus ini menyerupai fenomena gunung es, yang muncul di permukaan dan tercatat hanya sebagian kecil saja sedangkan banyak kasus lainnya tidak terlapor dan tercatat. Wilayah Jawa Timur merupakan salah satu sumber terjadinya perdagangan manusia (anak dan perempuan) di Indonesia. Informasi ini paling tidak termuat dalam dua laporan penting Kedutaan Besar Amerika Serikat tentang Perdagangan Orang Tahun 2011 dan 2012 (US Embassy, 2012). *Migrant Care* Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memerangi tindak perdagangan manusia, juga menyatakan bahwa di samping Nusa Tenggara Timur Jawa Timur merupakan kantong perdagangan manusia ke luar negeri. Di Jawa Timur kantong-kantong tersebut meliputi antara lain Kabupaten Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, dan Ngawi (Migrant Care, 2014).

Menelaah rentannya daerah-daerah di Jawa Timur terhadap terjadinya kasus *trafficking* membuat Herdiana, Chusairi, dan Nuralfian(2013) melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasikan faktor-faktor psikososial masyarakat yang mengarah pada risiko munculnya kasus *human trafficking* di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kasus-kasus *human trafficking* di daerah tersebut belum banyak terangkat ke ranah publik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman responden tentang *trafficking* cukup baik, sebagian besar dari mereka mengetahui bentuk-bentuk *traficking* dan juga mengetahui bahwa sasaran utama *human trafficking* ini adalah anak-anak dan perempuan. Di sisi lain, sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor kontrol dari masyakarat yang masih kurang memadai membuat risiko itu menjadi

semakin tinggi. Kondisi-kondisi yang mengarah pada kasus *human trafficking* seperti kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dianggap sebagai masalah domestik, sehingga partisipasi masyarakat dalam menangani faktor risiko tersebut masih kurang mendapatkan akses. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas kemasyarakatan yang rutin dilakukan di tingkat desa juga dilihat sebagai faktor kontrol sosial yang akan membantu menghindarkan masyarakat dari risiko terjadinya *human trafficking.* (Herdiana, Chusairi, & Nuralfian, 2013).

Menurut PBB perdagangan manusia merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan namun bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*a stand-alone crime*). Perdagangan manusia biasanya dipicu, didahului, atau disebabkan oleh kejahatan lain seperti penyelundupan manusia (*human smuggling*), perkosaan, pemalsuan dokumen, prostitusi, pornografi, perbudakan, eksploitasi seks, turisme seks, atau praktik memperkerjakan anak di bawah umur. Risiko terjadinya kasus *human trafficking* semakin besar pada masyarakat yang rentan. Kerentanan masyarakat diukur dari sejauh mana faktor psikososial berfungsi sebagai faktor pelindung. Menurut Herdiana, Chusairi, dan Nuralfian (2013), faktor psikososial yang mengarah pada penyebab *trafficking* yang teridentifikasi di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang meliputi kemiskinan keluarga, pengetahuan yang rendah tentang *trafficking*, fungsi keluarga yang kurang mendukung terbentuknya kesejahteraan anggota keluarga, kondisi individu yang kurang wawasan dan tidak memiliki keterampilan kerja, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak pernah teratasi.

Sementara itu penelitian tentang identifikasi faktor psikososial penyebab risiko terjadinya *human Trafficking* di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Herdiana, Chusairi, dan Zein (2014) menemukan bahwa faktor-faktor penyebab *human trafficking* yang teridentifikasi meliputi kemiskinan keluarga, pengetahuan yang rendah tentang *trafficking*, fungsi keluarga yang kurang mendukung terbentuknya kesejahteraan anggota keluarga, kondisi individu yang kurang wawasan dan tidak memiliki keterampilan kerja, kekerasan dalam rumah tangga yang tidak pernah teratasi, pernikahan dini, kenakalan remaja dan faktor lingkungan berupa kontrol dari masyarakat yang lemah.

Berdasarkan hasil kajian-kajian di atas menjadi jelas bahwa salah satu faktor psikososial yang penting untuk diperhatikan adalah kontrol sosial sebagai faktor pelindung masyarakat terhadap terjadinya kasus *human trafficking.* Hanya masih sulit bagi kita untuk memahami bagaimana kasus *human trafficking* ini bisa terjadi. Masyarakat juga belum terlalu peduli pada apa yang terjadi di wilayahnya terkait kasus tersebut. Pada beberapa keadaan masyarakat masih memberikan label atau stigma negatif bagi korban perdagangan manusia

terutama yang terindikasi pelacuran. Selain itu masyarakat juga masih permisif terhadap faktor psikososial lain yang merupakan faktor risiko seperti kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, pernikahan kontrak, memperkerjakan anak di bawah umur karena faktor kemiskinan, kriminalitas dan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat menganggap semua hal tersebut bukan tanggungjawab mereka dan tergolong persoalan domestik yang tidak perlu diakses oleh banyak orang di luar keluarga yang bersangkutan. Cara pandang seperti inilah yang perlu diubah, agar masyarakat menyadari bahwa *human trafficking* tergolong masalah sosial yang harus dicari jalan keluarnya bersama-sama.

Gambaran Umum Kasus *Human Trafficking* di Jawa Timur

Jawa Timur merupakan salah satu kantung kasus *human trafficking* terbesar di Indonesia. Keadaan ini relatif merata pada semua daerah, meski jumlah kasus tidak diketahui secara pasti. Pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten di Jawa Timur pun sudah mulai giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar jumlah kasus dapat ditekan. Banyak faktor yang membuat masyarakat Jawa Timur rentan menjadi korban *human trafficking,* salah satu di antarnya adalah faktor kemiskinan. Pada tahun 2012 di Kabupaten Lamongan terjadi peningkatan jumlah warga miskin melebihi tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari data jumlah penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Lamongan yang bertambah (post kota news, 2012).

Mayoritas korban *human trafficking* adalah anak, remaja dan perempuan. Perlahan namun pasti, kasus ini mulai banyak ditemukan di daerah-daerah di Jawa Timur. Terungkapnya beberapa kasus *human trafficking* di Jawa Timur ini seharusnya menjadikan Pemerintah melakukan kontrol terhadap kondisi daerah yang memang rentan membuat masyarakatnya menjadi korban *human trafficking.* Sebagaimana kita ketahui, kemiskinan merupakan kondisi paling mendasar yang dapat menjadi faktor risiko. Kemiskinan membuat masyarakat tidak selektif dalam memilih pekerjaan, membuat anak-anak terpaksa harus ikut bekerja untuk memastikan hidup terus berlanjut, membuat pengawasan terhadap anak menjadi terbatas karena orientasi finansial, dan menimbulkan kondisi berisiko lainnya.

Jawa Timur juga merupakan salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya yang bepergian tanpa dokumen sah atau sebagai imigran gelap. Daerah di Jawa Timur yang menjadi pengirim buruh migran dalam jumlah besar adalah: Malang, Jember, Ponorogo, Lumajang, Bondowoso, Ngawi, Magetan, Probolinggo, Madiun, Blitar, Kediri, Tulungagung, Tuban, Kota Surabaya, dan Pulau Madura. Meski kebanyakan buruh migran ini berencana bekerja di luar negeri, pada akhirnya sebagian menjadi pembantu

rumah tangga di Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia. Banyak dari buruh migran ini bermigrasi melalui jalur-jalur tak resmi. Entah melalui jalur yang sah atau tidak, ada bukti jelas bahwa tidak sedikit buruh migran dari Jawa Timur menjadi korban perdagangan untuk kerja seks, penjeratan utang, dan kerja paksa. Juga ada bukti anekdotal bahwa mantan buruh migran, teman, atau tetangga dari desa dipekerjakan oleh pelaku perdagangan untuk merekrut gadis muda dari desa mereka. Para pelaku perdagangan itu menggunakan tipuan atau muslihat untuk membujuk para gadis agar mau "bermigrasi" (Misra dan Mahri, dalam Rosenberg, 2003).

Selain kondisi di atas, Jawa Timur juga dikenal sebagai daerah pengirim sekaligus penerima pekerja seks komersial yang diperdagangkan. Kawasan Dolly di Jawa Timur sudah populer di seluruh Indonesia sebagai salah satu lokalisasi paling terkenal. Bukti anecdotal menunjukkan bahwa kawasan ini sering dikunjungi oleh usahawan dalam negeri yang datang ke Surabaya untuk berbisnis. Selain itu, sebuah studi mengenai pola migrasi pekerja seks di Irian Jaya menyimpulkan bahwa hingga tiga perempat pekerja seks yang beroperasi di rumah bordil di Papua berasal dari Jawa Timur, banyak di antaranya diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks (Safika & Wiebel, 2001: 3). Kebanyakan pekerja seks komersial di Papua mengungkapkan bahwa yang menjerumuskan mereka adalah teman atau saudara mereka – bukan agen atau perantara komersial – dengan menjebak mereka ke dalam suatu situasi di mana tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali terjun menjadi pekerja seks (Safika & Wiebel, 2001). *Human Rights Watch* juga melaporkan 24 kasus melibatkan perempuan asal Jawa Timur yang diperdagangkan untuk prostitusi antara tahun 1991-1994.

Peran Masyarakat sebagai Fungsi Kontrol Sosial bagi Pencegahan Kasus *Human Trafficking*

Meningkatkan peran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap faktor psikososial yang berisiko merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kasus *human trafficking* di Jawa Timur. Mengubah cara pandang masyarakat bahwa kasus ini seharusnya menjadi tanggungjawab bersama dapat dilakukan melalui perubahan mental masyarakat secara mendasar. Revolusi mental yang dilakukan terhadap masyarakat terkait pencegahan terjadinya kasus *human trafficking* ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk menghadapi ancaman kasus ini bersama-sama. Hal paling mendasar yang ingin diubah adalah menjadikan masyarakat sebagai bagian perjalanan hidup orang lain dalam kelompok masyarakat yang sama serta menjadikan masyarakat dapat menempatkan diri sebagai institusi sosial yang dapat mengubah

seseorang dari berisiko dan rentan menjadi terhindar dan resilien terhadap problem sosial yang ditemuinya. Horton dan Leslie (1982, dalam Suharto, 2005) menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan oleh banyak orang. Suatu masalah disebut masalah sosial apabila dirasakan oleh banyak orang. Jika masalah tersebut mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan oleh lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa dalam masalah sosial ini sangat penting terutama membuat agar masalah ini menjadi pembicaraan banyak orang. Masalah *human trafficking* merupakan masalah sosial, karena meski dialami oleh individu namun berdampak luas pada banyak orang. Selain itu kasus ini juga seringkali membuat kondisi masyarakat sekitar menjadi terpengaruh. Misalnya, ketika korban *trafficking* kembali ke tempat asalnya, bukan simpati yang didapat, namun banyak masyarakat justru memberikan penilaian negatif terhadap korban, terutama korban *human trafficking* pelacuran.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakkan. Orang akan senantiasa menghindari masalah. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan apakah suatu kondisi merupakan masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu, namun belum tentu demikian bagi masyarakat yang lain. Ukuran 'baik' dan 'buruk' sangat bergantung pada 'nilai' atau norma yang dianut oleh masyarakat. Di daerah yang merupakan basis TKI/TKW, anak yang berangkat menyusul Orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja dengan cara ilegal (karena usia tidak memenuhi persyaratan) adalah hal yang lumrah. Di daerah lain, kondisi seperti itu sudah menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakatnya. Kekhawatiran tersebut akan mengarah pada banyak faktor, salah satu di antaranya adalah faktor *role model,* yaitu akan mendorong banyak anak lain mencontoh keputusannya untuk mencari kerja ke luar negeri dengan cara ilegal. Faktor lain yang juga dapat muncul di masyarakat adalah pengaruh sosial, yaitu seseorang akan lebih mudah memengaruhi orang lain ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang sama.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Herdiana, Chusairi, dan Zein (2014) menemukan bahwa hampir seluruh responden dalam penelitiannya memandang perlunya masalah risiko *human trafficking* ini untuk

segera dipecahkan, baik secara pribadi, dengan mengikutsertakan peran Pemerintah, maupun dengan meningkatkan pasrtisipasi masyarakat.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial hanya bisa diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Problem *human trafficking* ini sudah pasti tergolong problem sosial karena melibatkan banyak orang dalam dinamika terjadinya. Sebagai korban, mereka terkait dengan pelaku dan juga faktor-faktor psikososial yang tidak dapat menjadi pelindung bagi mereka. Herdiana, Chusairi, dan Zein (2014) menemukan bahwa faktor psikososial yang menjadi faktor risiko bagi anak dan perempuan untuk menjadi korban *human trafficking* adalah faktor individu, keluarga, Pemerintah, dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari adanya pihak atau orang lain yang berkontribusi terhadap munculnya masalah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiana, Chusairi, dan Nuralfian (2013) serta Herdiana, Chusairi, dan Zein (2014) tentang peningkatan kapasitas psikososial berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya *human trafficking* di Jawa Timur menunjukkan bahwa salah satu faktor sosial penting bagi pencegahan terjadinya *human trafficking* adalah faktor lingkungan, yaitu masyarakat sebagai kontrol bagi warga masyarakat yang memiliki risiko tinggi. Belum banyaknya desa yang masyarakatnya mendapatkan penyuluhan tentang *human trafficking* tentu akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat tentang risiko dari *human trafficking* ini. Masyarakat juga masih menganggap permasalahan psikososial yang mengarah pada *human trafficking* sebagai kasus domestik, atau masalah internal rumah tangga orang yang mengalaminya, sehingga segan untuk ikut campur. Pengawasan di desa juga masih harus ditingkatkan mengingat kasus ini seringkali tidak kasat mata, namun tiba-tiba ada warga yang hilang tidak tahu kemana perginya. Seorang subjek FGD menceritakan tentang asisten rumah tangganya yang masih di bawah umur keluar kerja dari subjek, namun tidak pulang ke rumah Orang tuanya. Orang tuanya mencarinya ke berbagai tempat namun tidak ditemukan. Hingga saat ini masyarakat tidak tahu (atau tidak mau tahu) apakah anak tersebut sudah kembali ke rumahnya. Menelaah kondisi tersebut peran masyarakat memang sangat dibutuhkan terutama ketika faktor psikososial gagal menjadi faktor pelindung bagi masyarakat. Masyarakat harus kondusif dan menjadi faktor pelindung terhadap risiko terjadinya *human trafficking* di daerah masing-masing.

Revolusi Mental Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Preventif Kasus *Human Trafficking*

Berfungsinya masyarakat sebagai kontrol sosial atas anggota masyarakat lain akan berdampak teratasinya faktor risiko terjadinya kasus *human trafficking*. Sebagaimana diketahui, faktor psikososial berupa antara lain kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah, kriminalitas, kondisi masyarakat dengan pendidikan rendah, kemiskinan keluarga, penggunaan narkoba dan obat terlarang, merupakan faktor risiko, bukan faktor pelindung, bahkan di masyarakat tingkat desa. Beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk menjelaskan bagaimana revolusi mental berbasis masyarakat ini dapat diimplementasikan melalui peningkatan peran masyarakat, adalah sebagai berikut:

Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah teori Travis Hirschi, yang selanjutnya dikenal sebagai teori ikatan sosial. Dalam makalahnya yang berjudul 'Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial', Koentjoro menuliskan bahwa Hirschi percaya bahwa manusia dilahirkan untuk melanggar hukum dan akan menjauhkan diri dari perbuatan itu jika terjadi hal yang khusus. Kejadian khusus akan terjadi manakala ikatan individu pada alur utama masyarakat itu kuat. Kuatnya ikatan individu pada alur utama masyarakat itu terjadi karena adanya empat elemen:

a. *Attachment*, yaitu kemampuan individu untuk peka pada pikiran, perasaan dan keinginannya. *Attachment* menunjuk pada emosi atau keterlibatan afektif individu pada yang lain. Jika individu mampu menilai dan memperhatikan hubungannya dengan orang lain, maka akan kecil kemungkinan mereka untuk berbuat jahat.

b. *Commitment*, yaitu komponen rasional dari konformitas. Sebelum melakukan tindakan kriminal seseorang melewati proses rasional menimbang untung-rugi tindakannya dibandingkan dengan investasi dalam konformitasnya. Konsep komitmen ini berasumsi bahwa organisasi dalam masyarakat adalah milik banyak orang, karenanya akan berbahaya sekali bila individu terlibat dalam tindak kriminal.

c. *Involvement*. Semakin individu terlibat dan menikmati dalam konvensi tentang sesuatu, semakin kecil kemungkinannya untuk bertindak kriminal, karena setiap orang mempunyai keterbatasan waktu dan energi. Apabila individu terlibat dalam banyak aktivitas konvensional, dia akan terikat oleh perjanjian, *deadline*, dan perencanaan waktu kerja. Oleh sebab itu kesempatan untuk memunculkan tindak kejahatan menjadi berkurang sekali.

d. *Beliefs*. Ketika individu sudah tidak percaya pada masyarakatnya, maka kejahatan akan muncul.

Beberapa faktor psikososial yang teridentifikasi menjadi penyebab terjadinya kasus *human trafficking* di Jawa Timur adalah kenakalan remaja, remaja hamil di luar nikah, narkoba, dan memperkerjakan anak di bawah umur untuk membantu finansial keluarga. Secara umum, di dalam masyarakat kita, faktor psikososial tersebut tergolong dalam tindakan kriminal atau tindakan asusila. Padahal, jika kita menelaah lebih jauh, dinamika terjadinya kasus seperti itu lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Menurut teori kontrol sosial ini, perilaku menyimpang tidak akan terjadi jika individu memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat dan masyarakat pun memiliki kontrol terhadap segala tindakan individu selama masih menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Artinya semakin terlibat individu dengan masyarakat sekitarnya, maka kontrol terhadap dirinya pun akan berkembang. Dengan kata lain, kontrol sosial akan memperkuat kontrol diri individu sehingga dia akan menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang atau yang bertentangan dengan nilai/norma di dalam masyarakatnya. Salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat dibangun adalah Pemerintah desa menyediakan wadah aktivitas positif bagi remaja di desa. Keterikatan remaja yang tinggi terhadap wadah yang disediakan Pemerintah desa akan mengurangi peluang terjadinya perilaku menyimpang pada remaja.

Teori Perilaku Sosial

Brigham (1991) menyatakan bahwa perilaku prososial mempunyai maksud untuk menyokong kesejahteraan orang lain. Menurut Brigham (1991), ada beberapa cara dalam meningkatkan perilaku prososial:

a. Melalui penayangan model perilaku prososial, misalnya melalui media komunikasi massa, sebab banyak perilaku manusia yang terbentuk melalui belajar sosial terutama dengan cara meniru. Apalagi mengamati model prososial dapat memiliki efek *priming* yang berasosiasi dengan anggapan positif tentang sifat-sifat manusia dalam diri individu pengamat.

b. Dengan menciptakan suatu *superordinate identity*, yaitu pandangan bahwa setiap orang adalah bagian dari keluarga manusia secara keseluruhan. Dalam beberapa penelitian ditunjukkan bahwa menciptakan *superordinate identity* dapat mengurangi konflik dan meningkatkan perilaku prososial dalam kelompok besar serta meningkatkan kemampuan empati Di antara anggota-anggota kelompok tersebut.

c. Dengan menekankan perhatian terhadap norma-norma prososial, seperti norma-norma tentang tanggungjawab sosial. Norma-norma ini dapat ditanamkan oleh Orang tua, guru ataupun melalui media massa. Demikian pula para tokoh masyarakat dan pembuat kebijakan dapat memotivasi masyarakat untuk bertindak prososial dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah banyak berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan amasyarakat. Penghargaan ini akan member pengukuhan positif bagi pelaku tindakan prososial.

Kepuasan hidup seseorang tentu tidak hanya dikontribusi oleh kondisi personal. Mengembangkan perilaku prososial dalam bentuk menyokong kesejahteraan orang lain tentu juga akan memberikan kepuasan hidup. Salah satu faktor psikososial yang mengarah pada kasus *human trafficking* adalah kemiskinan. Kemiskinan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan apa pun asalkan menghasilkan uang, meski pekerjaan itu mungkin bukan harapannya. Jika di dalam masyarakat berlaku mekanisme saling menolong dan menghidupkan orang lain dengan memberikan kesempatan untuk berkembang sesuai kapasitasnya, mungkin masyarakat tidak akan menjadi faktor risiko, justru menjadi faktor pendukung bagi orang tersebut. Selain itu nilai-nilai prososial juga dapat dikembangkan dalam sebuah masyarakat melalui kontrol atau penguatan perilaku masyarakat melalui kegiatan bersama. Misalnya budaya kerja bakti yang rutin diselenggarakan Pemerintah desa akan meningkatkan keterikatan individu dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat pun bisa menjadi kontrol bagi dirinya.

Sense of Community*: *The McMillan-Chavis Model

McMillan dan Chavis (1986) mendefinisikan *sense of community* sebagai perasaan memiliki terhadap kelompok, perasaan bahwa anggota dan kelompok sama-sama penting, dan keyakinan bahwa kebutuhan anggota akan terpenuhi melalui komitmen pada kepentingan bersama. McMillan dan Chavis juga mengidentifikasikan empat elemen dalam *sense of community*, yaitu:

a. *Membership*, yaitu perasaan seseorang bahwa ia menjadi bagian dari suatu komunitas/ masyarakat. Perasaan itu menyangkut *boundaries* (batasan teritori, *ingroup/outgroup*), *a common symbol system* (atribut anggota), *emotional safety* (perasaan aman menjadi bagian dari masyarakat), *sense of belonging and identification with the community*, dan *personal investment.*

b. *Influence*, yaitu kekuatan yang diberikan oleh anggota kepada kelompok, dan kekuatan timbal balik anggota yang terjadi dalam dinamika kelompok.

c. *Integration and fulfillment of needs*, yaitu membangun nilai bersama dalam kelompok, pertukaran sumber daya dan kepuasan antar individu dalam masyarakat.

d. *Shared Emotional Connection*, yaitu adanya ikatan spiritual berdasarkan sejarah bersama di antara anggota masyarakat. Ini merupakan elemen definitif komunitas yang sejati. Beberapa proses dalam masyarakat akan memperkuatnya, terutama peristiwa yang menekankan nilai-nilai dan sejarah yang dialami bersama-sama.

`Tampaknya *sense of community* inilah yang masih harus ditingkatkan di dalam masyarakat kita. Orientasi hidup yang individual sudah melenceng jauh dari kultur kita yang sudah sejak lama menanamkan nilai-nilai kebersamaan melalui proses sosialisasi maupun enkulturasi. Ketidakpedulian terhadap kondisi di dalam masyarakat membuat kita tidak tahu apa yang terjadi bahkan pada tetangga sendiri, yaitu orang yang secara teritori berada dalam satu letak geografis. Rasa memiliki sebuah masyarakat dan ikatan emosional antar anggota dalam masyarakat harus ditingkatkan. Dengan demikian, apa pun yang terjadi dalam lingkungan kita, kita menjadi orang pertama yang mengetahui dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat individual. Membangun kembali budaya kebersamaan, kedekatan, gotong royong, budaya 'mangan ora mangan sing penting kumpul', merupakan langkah nyata yang sangat mendasar yang harus kita lakukan. Mental individual harus dikembalikan pada mental kolektif. Ada orang lain yang hidup bersama kita dan kita tidak hidup sendiri.

'*Open System Model*' untuk Perubahan Komunitas

Model ini dikembangkan oleh Katz dan Kahn (1978). Dalam model ini, aspek *input* meliputi kepemimpinan dalam masyarakat, cara pandang tentang perbedaan dalam masyarakat, pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat itu sendiri. Aspek *throughput* meliputi kohesivitas dalam kelompok, fungsi dari tugas dan peran individu dalam komunitas, dan fungsi evaluasi terhadap komunitas. Sementara aspek *ouput* meliputi tindakan di dalam masyarakat, perubahan komunitas, hasil dan dampak yang diterima oleh masyarakat. Skema dari *Open System Model of Community Change* adalah sebagaimana nampak pada Gambar 1.

Model ini akan bicara tentang bagaimana seharusnya masyarakat bertindak. Ketika kita menjadi bagian dari sebuah masyarakat tentu kita harus menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri. Kepemimpinan di dalam masyarakat hendaknya dapat berfungsi dengan baik, mengingat persoalan sosial yang mungkin ditimbulkan. Keteladanan, yang saat ini sudah menjadi krisis di dalam masyarakat kita, adalah *input* yang baik bagi sebuah
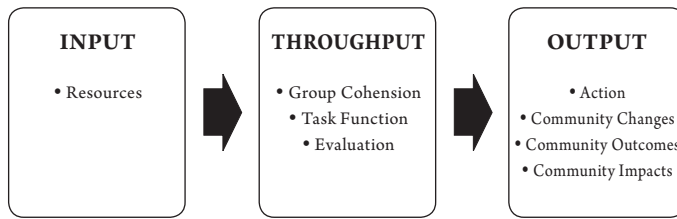
Gambar 1. Skema *Open System Model of Community Change*

masyarakat terutama masyarakat plural. Pemerintah sebagai pemimpin masyarakat harus *concern* dengan setiap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Begitu pula dengan kohesivitas dalam masyarakat. Semakin sebuah masyarakat kohesif, maka tindakan berikutnya adalah kondisi masyarakat yang lebih baik. Perubahan dalam masyarakat harus berbasis solusi atas problem sosial yang terjadi. Masalah *human trafficking* sangat menuntut adanya penanganan di level masyarakat. Hal ini dapat teratasi antara lain dengan upaya yang kuat untuk melahirkan kondisi masyarakat yang kohesif, erat satu sama lain, saling memperhatikan, saling membantu. Pada kondisi psikososial yang sangat rentan, masyarakat adalah penolong bagi mereka yang berisiko.

Diskusi dan Rekomendasi

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam satu teritori dan memiliki keterikatan satu sama lain, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Dalam konteks masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial, khususnya *human trafficking*, maka masyarakat harus berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses di mana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan memengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, *et al*., 1994, dalam Suharto, 1977).

Pemberdayaan masyarakat ini penting agar mereka dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam kehidupannya. Media-media yang ada di dalam masyarakat seringkali belum berfungsi secara optimal untuk membuat masyarakat berdaya. Padahal potensinya sangat besar sekali bagi masyarakat untuk bisa berubah melalui kegiatan pemberdayaan di tingkat desa. Berdasarkan analisa terhadap teori ikatan sosial Travis Hirschi, teori perilaku prososial, teori *sense of community*, dan teori perubahan komunitas 'Open System Model' maka dapat disimpulkan bahwa

pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilakukan melalui keberfungsian elemen-elemen masyarakat, terutama di tingkat desa, sebagai berikut:

1. Pemerintah di tingkat desa dapat mengaktivasi kegiatan kemasyarakatan yang selama ini vakum, tanpa evaluasi dan belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan itu harus memasyarakat, bukan konsumsi orang tertentu semata. Dengan demikian, kontrol terhadap anggota masyarakat akan terbangun.

2. Pemerintah dapat membantu peningkatan keterampilan keluarga melalui program bina keluarga di tingkat desa. Seperti kita ketahui kasus *human trafficking* terjadi karena faktor kemiskinan. Kemiskinan membuat akses terhadap pendidikan terhambat. Dengan pendidikan yang rendah, masyarakat menjadi sangat berisiko terhadap terjadinya kasus *human trafficking*. Keluarga miskin bukan hanya diperlukan untuk keperluan sensus belaka, namun juga harus dibantu untuk diberdayakan secara finansial melalui program bantuan yang dikelola oleh masyarakat sendiri.

3. Pemerintah desa dapat meningkatkan peran PKK dan Kader Pokja untuk melakukan sosialisasi meningkatkan wawasan dan ikut mengendalikan kasus *human trafficking* di tingkat desa. Peran PKK dan Kader Pokja inilah yang nanti akan langsung turun ke masyarakat sebagai kontrol sosial bagi masyarakat yang berisiko.

4. Pemerintah di tingkat desa dapat meningkatkan peran dasa wisma sebagai kontrol juga terhadap kasus *human trafficking* melalui penyampaian informasi tentang *trafficking* di tingkat Rukun Tangga. Pemerintah desa juga dapat mengaktifkan kembali peran Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja.

5. Kegiatan pengajian yang secara rutin dilakukan oleh masyarakat juga bisa menjadi media peningkatan kehidupan spiritual pada masyarakat.

6. Baik Pemerintah, masyarakat, keluarga, individu dapat mulai menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya lokal yang bernapaskan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran bahwa kita hidup tidak sendiri dan ada orang lain dalam kehidupan kita harus kembali dihidupkan. Dengan demikian, kita bisa menjadi kontrol bagi orang lain dan orang lain bisa menjadi kontrol bagi diri kita.

7. Meningkatkan kontrol masyarakat melalui kegiatan rutin menjaga keamanan, menetapkan jam malam, atau tamu wajib lapor kepada aparat desa setempat. Hal ini penting agar kerja sama masyarakat dan aparat desa dapat terjalin dengan lebih baik.

Daftar Acuan

Brigham, J.C. (1991). *Social psychology*. New York: Harper Collins.

Care, M. (2014, Januari 18). *Perdagangan manusia di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 24 Februari 2014 dari migrancare.com:http://migrantcare.com

Chavis, D.M., Hogge, J.H., McMillan, D.W., & Wandersman, A. (1986). Sense of community through Brunswick's lens: A first look. *Journal of Community Psychology, 14.*

Dalton, Elias & Wandersman. (2001). *Community psychology. Linking individuals and communities*. USA: Wadsworth Thomson Learning.

Embassy, U. (2012, Desember 11). *Laporan HAM*. Diunduh pada 19 Januari 2014 dari Indonesia.jakarta.usembassy.gov: http://indonesia.jakarta.usembassy.gov.

Herdiana, Chusairi & Nuralfian. (2013). *Peningkatan kapasitas psikososial berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) di Jawa Timur: Studi di kecamatan Nglegok kabupaten Blitar dan kecamatan Donomulyo Kabupetan Malang, Jawa Timur*. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Pertama.

Herdiana, Chusairi & Zein. (2014). *Peningkatan kapasitas psikososial berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) di Jawa Timur: Studi di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Karangbinangun Kabupetan Lamongan, Jawa Timur.* Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Kedua.

Koentjoro. (Tanpa tahun). *Kriminologi dalam perspektif psikologi sosial*. Makalah, tidak dipublikasikan.

Katz, D., & Kahn, R.L. (1978). *The social psychology of organizations* (2nd ed.). New York: Wiley.

Rosenberg, R. (Ed). (2003). *Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia*. Jakarta: American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Suharto, Edi. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Bandung: Refika Aditama.

Wiebel, W., & Safika. (2001). *Migration patterns of sex workers in Irian Jaya, Indonesia*. PATH Indonesia: Mimeo.

27
Menyalakan Kembali Semangat Kerja sama

Juliana Murniati

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat gotong royong. Perilaku yang merupakan satu bentuk dari kerja sama ini ditandai oleh kesediaan saling membantu ketika ada kegiatan bersama di lingkungan tinggal seperti kerja bakti, atau jika salah satu anggota masyarakat merayakan sesuatu seperti kawinan, khitanan, atau mengalami musibah, kematian, bencana. Tindakan diberikan tidak hanya dalam bentuk jasa saja, tetapi juga biaya apabila dibutuhkan. Di sini kita mengenal istilah saweran, yang merupakan ekspresi dari kerja sama ini. Kesediaan menolong, dan bekerja sama tanpa pamrih ini dikenal sebagai satu dari karakteristik bangsa.

Betulkah kerja sama seperti gotong royong masih menjadi karakteristik bangsa Indonesia? Kalau mencermati perilaku berkendaraan orang-orang Jakarta, atau juga kota besar lainnya, sebagian besar dari kita akan keberatan dan tidak setuju. Lihat saja pengemudi di jalan, kalau bisa, maka mobilnyalah yang melaju terus dan meninggalkan mobil lain terjepit di perempatan jalan. Kalau mobilnya di antara mobil-mobil yang terjepit di perempatan, maka keluar sumpah serapah dan juga klakson berkepanjangan. Kalau para pengemudi sungguh saling bekerja sama mestinya tidak ada mobil ’nyelonong’ sesudah lampu merah menyala dan yang kemudian mengakibatkan mobil-mobil lain ”stagnan” di tengah-tengah.

Pertanyaannya sekarang, apakah semangat gotong royong/bekerja sama sudah meluntur dan berganti menjadi kecenderungan berkompetisi? Ini menarik untuk dicermati karena jargon semasa kampanye dari Presiden RI, Jokowi, dengan ”revolusi mentalnya” mengindikasikan kalau karakteristik demikian sudah melemah dari bangsa Indonesia. Lebih menarik lagi mengingat bahwa nilai-nilai yang mementingkan kehidupan bersama (kekeluargaan) seperti gotong royong disosialisasikan sejak awal kehidupan seorang anak. Bahwa untuk pencapaian harmoni sosial, individu seharusnya (bahkan tidak boleh)

menempatkan kepentingan kelompok/umum di atas kepentingan pribadi. Bahwa kerja sama dalam bentuk bergotong royong demi pencapaian tujuan bersama (se)harusnya senantiasa dikedepankan.

Dalam banyak situasi, tindakan mau menang sendiri membawa konsekuensi negatif atau kerugian pada pihak lain, dan semata-mata membawa keuntungan untuk diri sendiri. Bahkan jika mayoritas pihak bertindak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka akan memunculkan 'bencana' pada pihak lainnya sebagaimana terlihat pada tindakan pengemudi yang ingin selamat sendiri keluar dari kemacetan dan ingin cepat sampai tujuan dengan meninggalkan stagnan pada pengemudi lain.

Kondisi yang dikenal sebagai dilema sosial ini (*social dilemma*; lihat Dawes, 1980) pada dasarnya mengandung konflik antara memaksimalkan kepentingan diri sendiri atau memaksimalkan kepentingan bersama. Kondisi demikian hanya akan memberikan manfaat pada semua pihak, jika mereka bekerja sama, meskipun untuk itu keuntungannya tidak sebesar, jika individu memilih berkompetisi untuk menang sendiri.

Pilihan untuk bekerja sama mengatasi pilihan untuk berkompetisi ini tidak terlepas dari rasa khawatir yang berlebihan, sebagaimana terungkap dalam *fear hypothesis*. Banyak ketidakpastian di seputar kehidupan masyarakat menyebabkan individu mengembangkan *coping* tersendiri dengan cara berkompetisi untuk mengatasi rasa khawatirnya.

Kekontrasan antara prinsip hidup bekerja sama (gotong royong) dengan praktik yang berkembang di masyarakat ini menarik untuk dicermati dan jadi fokus dalam tulisan ini. Ada tiga bagian dalam tulisan ini. Pertama-tama akan disajikan sejumlah situasi di masyarakat yang menunjukkan kecenderungan berkompetisi dari orang Indonesia; jadi bukan serobot menyerobot di jalan raya. Situasi ini kemudian dibingkai dalam kerangka dilema sosial. Selanjutnya *fear hypothesis* dipaparkan sebagai perspektif untuk memahami kecenderungan kompetisi ini. Pada bagian akhir dipaparkan beberapa pemikiran bagaimana revolusi mental dilakukan untuk kembali pada karakter bangsa Indonesia yang santun, dan bergotong royong sebagaimana jadi cita-cita Presiden Jokowi.

Perilaku Mau Menang Sendiri di Masyarakat

Ada banyak peristiwa sehari-hari di masyarakat (terutama di kota besar) yang menunjukkan perilaku mau menang sendiri alias perilaku kompetisi. Di antaranya yang menarik untuk disimak adalah:

1. Saling sikut dan dorong untuk mendapatkan barang, misalnya pada saat pembagian sembako. Ada sekelompok kecil orang menikmati hasil yang maksimal dari sembako perolehannya, sementara mayoritas lainnya tidak mendapatkan apa-apa, atau menderita luka karena terinjak, bahkan tewas secara menggenaskan. Singkatnya, mereka tidak memilih untuk bertindak kooperatif, yakni dengan berbaris rapi dan tertib mengantri. Jika demikian, maka proses kerja akan lebih efektif, efisien dan memungkinkan paling tidak mayoritas mendapatkan pembagian dengan cara yang *fair* (siapa datang lebih awal/berbaris paling depan berkesempatan lebih besar untuk mendapatkannya, namun tentu saja dalam porsi yang terbatas karena dibagi rata).

2. Saling dorong untuk mendapatkan tempat. Ini merupakan fenomena harian di *commuter line* ataupun busway. Serupa dengan situasi pembagian sembako, dalam situasi seperti itu hampir-hampir semua orang berpikir untuk dirinya sendiri. Seandainya saja mereka memilih untuk berbaris dengan tertib, tanpa "nyerobot" untuk mendapatkan posisi paling depan, dan tidak berdesak-desakan, sebagaimana ditemukan di Singapore dan negara maju lainnya, maka tidak ada orang yang terdorong, tersikut, terjepit, ataupun terjatuh. Cara demikian memang tidak membawa hasil paling menyenangkan pada orang tertentu (mendapatkan tempat duduk, bahkan duduk pada posisi yang paling diinginkan dan dekat jendela misalnya), tetapi memungkinkan mayoritas penumpang secara aman dan nyaman bisa menaiki bus atau kereta.

3. Kasus pembabatan kayu yang menyebabkan hilangnya daerah hijau dan mengakibatkan longsor. Dalam situasi ini, pilihan yang tersedia bagi semua pihak adalah sama-sama menjaga kelestarian hutan, tidak membabatnya untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri atau sebaliknya sama-sama tidak menjaga kelestarian alam. Yang terjadi sekarang ini adalah penebangan pohon tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Seandainya pilihan pertama yang dijatuhkan, maka semua pihak (juga generasi-generasi mendatang) masih memiliki hutan penahan banjir dan longsor, juga bisa menikmati hasilnya dalam jangka waktu panjang, tetapi dalam jumlah yang terbatas (alam bisa memproduksi lagi, tetapi jika dikuras secara habis-habisan, alam tidak mampu menggantikannya)

4. Kelangkaan sumber daya alam atau energi, senada dengan kasus pembabatan hutan, maka seandainya setiap orang bersedia hemat energi dan sumber daya alam, maka generasi-generasi mendatang pasti masih akan bisa menikmatinya. Hal ini bisa dicapai jika setiap orang bersedia hemat energi: mematikan AC, lampu, TV saat tidak dimanfaatkan, mematikan air saat sikat gigi/shampoo-an, dan lain sebagainya. Kesediaan itu juga bisa diungkapkan dengan tidak selalu memakai kendaraan pribadi

demi hemat energi dan tidak menyumbang pada polusi. Pengamatan menunjukkan bahwa individu lebih mengharapkan orang lain yang melakukan demikian, bukan dirinya.

5. Penolakan kenaikan BBM pada sekelompok orang yang pada posisinya mampu membeli mobil (bahkan lebih dari satu mboil dan tergolong kendaraan mewah) atau menggunakan Pertamax, dan bukan BBM bersubsidi, mengindikasikan kalau kepentingan diri dan kelompoknyalah yang diprioritaskan. Kalau harga bensin dan solar dinaikkan, maka hasil maksimal yang bisa diperoleh diri dan kelompoknya tidaklah sebanyak dibandingkan tanpa kenaikan BBM. Lagi-lagi perhatian tidak terfokus pada kepentingan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi pada keuntungan diri sendiri.

6. Keengganan diri pada kasus hemat energi disertai dengan harapan orang lain yang melakukannya juga terungkap pada kasus bayar pajak. Keengganan masyarakat membayar pajak bisa diteropong dalam kerangka ini, yakni dengan melihatnya dari sisi konsekuensi yang ditimbulkan. Seandainya semua warga negara membayar pajak, maka hasilnya adalah negara bisa membangun, memelihara, dan memperbaiki fasilitas umum. Seringkali muncul pemikiran bahwa negara tetap bisa mengadakan dan memperbaiki fasilitas umum, kalau hanya saya seorang diri saja yang tidak membayar pajak. Permasalahannya kemudian adalah hampir semua orang berpikir dengan pola semacam ini. Masing-masing pribadi berharap orang lain yang membayar pajak, dan bukan dirinya.

Singkatnya, dalam semua situasi di atas individu memperoleh keuntungan yang maksimal untuk sebuah pilihan yang menyimpang secara sosial (berkompetisi) dibandingkan pilihan bekerja sama yang diharapkan oleh masyarakat. Pilihan bekerja sama memungkinkan setiap orang mendapatkan sesuatu, tetapi tidak dalam jumlah sebanyak yang bisa diperoleh kalau seandainya berkompetisi.

Perilaku Mau Menang Sendiri dalam ”Laboratorium”

Pengertian Dilema Sosial (social dilemma)

Situasi-situasi yang tergambarkan di atas bisa dikaji dalam kerangka teoritik dilema sosial. Sebuah dilema sosial dicirikan oleh sebuah situasi, di mana anggota-anggota kelompoknya dihadapkan pada dua pilihan, yakni pilihan bekerja sama (kooperatif) yang berarti memaksimalkan keuntungan untuk seluruh anggota kelompok, dan pilihan non

kooperatif (kompetitif) yang berarti memaksimalkan keuntungan diri sendiri (Dawes, 1980; Parks & Hulbert, 1995). Pilihan tidak kooperatif memang akan menghasilkan keuntungan paling besar, tetapi jika semua pihak yang terlibat di dalamnya melakukan hal ini, maka akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi semua pihak.

Karakteristik yang menandai sebuah dilema sosial muncul dalam semua situasi yang dipaparkan di atas. Dalam semua perilaku yang dideskripsikan di atas, individu lebih memilih berperilaku berkompetisi, dengan memilih tindakan yang mendatangkan keuntungan terbesar untuk dirinya sendiri. Mereka tidak memilih untuk bekerja sama, yang akan membawa konsekuensi positif bagi semua pihak, namun dalam hasil yang terbatas. Dalam kasus pembagian sembako misalnya, pilihan kooperatif berupa tertib mengantri (misalnya berdasarkan urutan kedatangan), tidak saling mendorong atau menyikut, memang tidak akan membawa keuntungan paling besar pada individu tertentu (mendapatkan sembako paling banyak). Namun demikian, semua pengantri akan menikmatinya dalam porsi yang lebih kecil.

Secara khusus dilema-dilema sosial di atas dapat dikategorikan dalam tiga jenis dilema (lihat Parks & Hulbert, 1995), yakni *prisoner's dilemma*, *public goods dilemma* dan *resource dilemmas*. *Prisoner's dilemma* merupakan sebuah *game* berdilema untuk dua orang/pihak. Dilema di sini berupa pilihan memaksimalkan keuntungan pribadi, tetapi konsekuensi negatif bagi pihak lain dan pilihan untuk kesejahteraan semua pihak, tetapi dalam porsi yang terbatas. Nama *game* ini sendiri berasal dari sebuah anekdot yang intinya bercerita tentang dua orang yang terlibat dalam kejahatan, namun sebelum dijatuhkan hukuman hakim harus bisa membuktikan kejahatannya. Karena itulah hakim menawarkan kepada mereka kesempatan untuk mengakui - atau tidak mengakui – kejahatannya dengan masing-masing konsekuensinya.

Apabila kedua pihak sama-sama mengaku, maka mereka akan dikenai hukuman yang sifatnya moderat, tetapi lebih ringan dibandingkan, jika hanya salah satu pihak yang mengaku, sementara pihak yang tidak mengaku akan bebas. Seandainya tak seorangpun mengaku, maka keduanya akan dikenai hukuman minimum. Di sinilah letak dilema tersebut. Mengaku tetapi ditahan dengan hukuman moderat atau tidak mengaku, yang bisa membawa konsekuensi bebas (tidak dipenjara). Tentu ini sebuah pilihan yang diharapkan setiap pihak.

Public goods merupakan sebuah entitas terbatas yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok dan yang keberadaaannya sangat tergantung dari kontribusi tiap-tiap anggota kelompok. Dilema di sini muncul, jika seseorang memanfaatkannya, tetapi

tidak mau berkontribusi terhadapnya, misalnya membayar pajak. Pembangunan tidak akan berjalan, jika tidak ada orang yang bersedia membayar pajak.

Resource dilemmas (atau *social trap*) mencakup sumber-sumber alam terbatas yang bisa digunakan oleh semua anggota kelompok; sebagian besar bisa mengisi kembali dalam kurun waktu di antaranya, namun tidak akan pernah kembali ke level semula. Dilema di sini muncul, jika setiap orang menggunakan sumber alam tersebut sebanyak mungkin untuk kepentingan sendiri, karena alam tidak akan mampu mengisinya kembali secepat itu. Pada akhirnya sumber alam akan musnah. Masuk dalam *resource dilemma* misalnya air, bahan bakar, atau tanaman.

Kedua dilema ini merangkum semua situasi yang dipaparkan di bagian sebelumnya. Mendapatkan tempat nyaman di bus/kereta, dan memperoleh sembako terbanyak menimbulkan ketidaknyamanan pada pihak lain, karena orang lain terdorong/tersikut/terinjak atau terjatuh. Situasi ini analog dengan pilihan tidak kooperatif dari si terpidana (*prisoner's dilemma*): dirinya sendiri memilih tidak mengaku dan mengharapkan orang lain yang mengaku.

Kasus lainnya yakni 'keengganan' membayar pajak mengungkapkan *public goods dilemma,* sementara perusakan hutan maupun sikap tidak hemat energi merupakan kondisi yang bisa dikategorikan dalam *resource dilemmas.* Pilihan kooperatif berupa bayar pajak, pelestarian hutan, dan penggunaan energi alam secara seimbang akan membawa konsekuensi positif yang bisa dinikmati oleh semua pihak dalam kurun waktu tak terhingga, tetapi tidak maksimal pada level individual. Dengan kata lain, kerja sama selalu membawa hasil yang paling baik bagi semua pihak.

Studi Dilema Sosial dalam Konteks Indonesia

Untuk mendalami situasi seperti yang dipaparkan di atas para ahli umumnya menggunakan *experimental games*. Tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, situasi dalam *game* dirancang sedemikian rupa, sehingga memenuhi kondisi yang disyaratkan oleh dilema sosial, yakni mengandung sebuah situasi konflik antara pilihan kooperatif atau kompetitif. Hasil maksimal untuk diri sendiri akan diperoleh, jika individu berkompetisi. Namun jika pilihan ini yang diambil, maka akan menimbulkan konsekuensi negatif/kurang menguntungkan untuk semua individu yang terlibat di dalamnya.

Studi mengenai dilema sosial juga bisa ditemukan untuk konteks Indonesia (lihat Murniati T., 2008). Kajian lintas budaya dengan perbandingan kelompok kerja Indonesia

dan Jerman ini menggunakan sebuah skenario dengan variasi dari *Prisoner's dilemma*. Dilema sosial yang dikembangkan di sini berkenaan dengan pilihan alat transportasi 'pesawat' dan 'kapal laut' untuk mengangkut sayur dan buah. Keuntungan maksimal akan diperoleh, jika hanya satu pihak yang memilih alat transportasi pesawat, karena sayur dan buah akan lebih cepat tiba di pasar dan tanpa pesaing, sayur dan buah segera terjual. Pilihan ini membawa konsekuensi negatif bagi pihak yang memilih alat transportasi kapal laut, karena sayur dan buah yang tiba di lokasi sudah berkurang kualitasnya (tidak segar lagi), dan kebutuhan pembeli telah terpuaskan dari penjual sebelumnya.

Akan tetapi jika kedua pihak sama-sama memilih alat transportasi pesawat maka ada konsekuensi yang juga perlu dipertimbangkan, yakni menyangkut ukuran pesawat yang hanya mampu mengangkut barang dalam jumlah terbatas. Karena itu, jika kedua pihak memilih pesawat, pihak otoritas di lokasi akan meminta kedua pihak menunggu lima jam kemudian hingga pesawat lebih besar tiba di lapangan terbang. Persoalan ini bisa diatasi dengan kapal laut, karena memungkinkan sayur dan buah kedua pihak diangkut sekaligus ke lokasi.

Dalam situasi tersebut, jika kedua pihak bersedia mempertimbangkan satu sama lain, yakni sama-sama memilih kapal laut, atau sama-sama menunggu pesawat yang datang kemudian, maka tidak akan ada pihak yang mengalami kerugian besar, bahkan masih bisa menikmati keuntungan, namun tentunya dengan laba tidak tinggi sebagaimana diharapkan.

Kajian lapangan ini mengkonfirmasi hipotesis di awal, sekaligus juga memperkuat pengamatan kejadian sehari-hari di lapangan, di mana kecenderungan berkompetisi secara signifikan lebih sering muncul pada kelompok kerja Indonesia daripada Jerman. Kelompok kerja Indonesia lebih memilih bertindak untuk kesejahteraan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama/kelompok. Secara grafis perilaku kooperatif atau kompetitif kelompok kerja sama Jerman dan Indonesia tampak seperti berikut ini (lihat Grafik 1).

Rasa Khawatir, Ketidakpastian, dan Kecenderungan Mau Menang Sendiri

Kembali pada hipotesis di awal bahwa dalam masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal dengan 'gotong royong'nya berkembang kecenderungan mau menang sendiri (berkompetisi). Berangkat dari asumsi adanya rasa khawatir pada masyarakat Indonesia, maka fenomena ini dibahas dengan meninjaunya dari *fear hypothesis*. Dalam konteks ini rasa khawatir (*fear*) didefinisikan sebagai '*possibility that one will receive no payoff from*
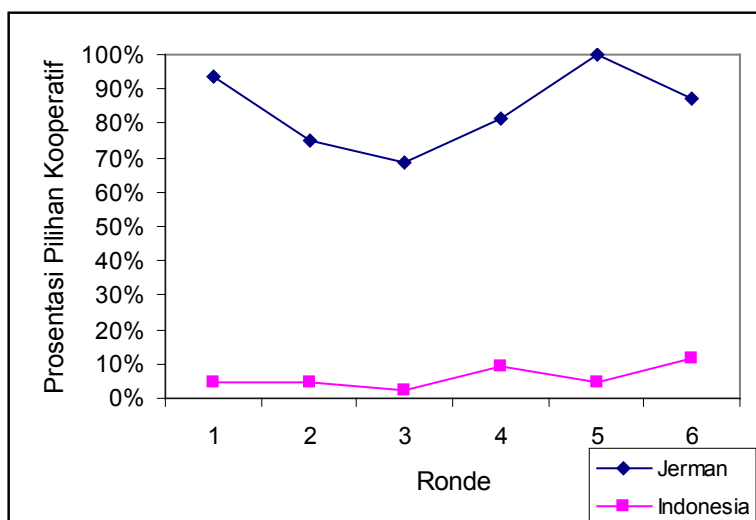
(n kelompok kerja Jerman = 32; n kelompok kerja Indonesia = 42)

Grafik 1. Perilaku Kooperatif kelompok kerja Indonesia dan Jerman

one's actions' (Parks & Hulbert, 1995: 720). Dalam skenario berkenaan dengan pilihan alat transportasi, rasa khawatir yang dimunculkan berkenaan dengan apa yang menjadi pilihan pihak lainnya. Di sini rasa khawatir muncul berkenaan dengan konsekuensi yang akan ditanggung sebagai hasil pilihan pihak lain: 'apa pilihan dia?', 'berapa yang akan saya dapatkan karena pilihannya?'. Dalam konteks bayar pajak, muncul pertanyaan apakah orang lain juga secara jujur membayar pajaknya; kalau tidak mengapa saya harus bayar pajak? Atau apakah orang lain bersedia berhenti menebangi hutan, dan mengeruk kekayaan alam?

Rasa khawatir muncul dari ketidakpastian yang dipersepsikan individu menyangkut pilihan pihak lain. Dalam realita hidup sehari-hari, konsekuensi sejelas ini tidak selalu diketahui atau terprediksi. Atau dengan kata lain, jumlah pilihan yang tersedia tidak sedefinitif uraian di atas. Ketidakpastian ini semakin memunculkan rasa khawatir yang kemudian mendorong individu untuk berkompetisi. Kajian yang ada sejauh ini (lihat Chen, Au & Komorita, 1996) memperlihatkan hasil yang konsisten tentang hubungan antara ketidakpastian dengan kemunculan perilaku kompetitif.

Ketidakpastian sebagai Sumber Rasa Khawatir

Ketidakpastian (*uncertainty*) didefinisikan sebagai "*a situation in which there are several alternative states of nature and one does not know which of them has occurred or will*

occur" (Chen, *et al.*, 1996: 38). Situasi dengan berbagai pilihan dengan tingkat kejadian yang tidak pasti memunculkan ambiguitas dan ketidaknyamanan pada individu, karena kemungkinan konsekuensi yang akan muncul tidak dapat diprediksi. Konsekuensi yang membawa keuntungan maksimal bagi diri sendiri adalah harapan setiap individu. Memilih "mengaku" pada ilustrasi terpidana di atas, yang disertai dengan pilihan pihak lain "tidak mengaku" akan membawa hukuman panjang di penjara untuk diri sendiri dan kebebasan bagi pihak lain.

Di dalam kajian dilema sosial, ketidakpastian dibedakan antara *environmental uncertainty*, yakni ketidakpastian terhadap situasi,dan *social uncertainty,* yang berkenaan dengan ketidakpastian akan pilihan orang lain (Chen, *et al.*, 1996). Dalam kasus-kasus yang dideskripsikan di atas, *environmental uncertainty* muncul pada dua kasus yang pertama. Di sini kekhawatiran individu akan apa yang mungkin didapatkannya tidak lepas dari ketidakpastiannya akan jumlah penumpang yang terangkut (di bus/kereta), jadual bus/kereta, atau jumlah persediaan sembako.

Sementara *social uncertainty* terlihat pada empat kasus terakhir, ketidakpastian yang dirasakan lebih berkenaan dengan sikap atau perilaku orang lain. Di sini individu ragu akan 'pilihan' yang mungkin diambil pihak lain: *'apakah orang lain juga mau dan akan mengakhiri tindakannya mengambil kayu di hutan, menggunakan bahan bakar sesuai kemampuannya, menghemat listrik, membayar pajak sesuai besarannya, atau berhenti korupsi'.* Apabila hanya individu sendiri yang bertindak demikian dan orang lain tidak melakukannya, maka apa yang dilakukan individu menjadi tidak bermakna, seperti hutan tetap akan gundul, energi berkurang banyak, dan negara tidak bisa melakukan pembangunan, karena orang lain tetap melakukan korupsi.

Dalam *experimental games* yang diikuti oleh kelompok kerja Indonesia dan Jerman, ketidakpastian yang ada menyangkut baik *environmental uncertainty* maupun *social uncertainty. Environmental uncertainty* yang muncul di sini menyangkut ketidaktahuan mereka akan kebijakan yang berlaku dan perubahan di tengah-tengah permainan. Karena ketidakpastian ini, maka mereka tidak bisa memprediksi/mengkalkulasi 'keuntungan' yang mungkin diperolehnya. Sementara *social uncertainty* muncul dalam bentuk ketidakpastian individu akan pilihan pihak lain.

Mencermati kedua jenis ketidakpastian di atas, agaknya perlu dipisahkan antara rasa khawatir tidak mendapatkan sembako, karena kebutuhan dasar untuk makan dan minum, dengan rasa khawatir tidak memperoleh sesuatu untuk memakmurkan diri sendiri yang sudah sejahtera. Untuk yang kedua ini, Rapoport & Eshed-Levy (1989) spesifik

menyebutnya sebagai faktor rakus (*greedy*). Menurut mereka, sifat rakus (*greedy*) yang ingin memonopoli hasilnya untuk kesejahteraan diri sendiri dimotivasi oleh keinginan untuk 'menunggangi' kontribusi orang lain, 'jika kontribusi orang lain sudah memadai, mengapa saya harus berkontribusi lagi'. Bahkan kajian Poppe dan Uten (1986 dalam Rapoport & Eshed-Levy, 1989) memperlihatkan, bahwa rakus merupakan motivasi utama di balik perilaku mau menang sendiri, bukan rasa khawatir.

Untuk konteks Indonesia, agaknya perlu kajian tersendiri untuk menjawab motivasi di balik perilaku-perilaku mau menang sendiri yang menggejala di masyarakat. Hal ini menarik, karena terdapat cukup banyak ketidakpastian di dalam masyarakat baik menyangkut *environmental uncertainty* maupun *social uncertainty*. Regulasi yang tidak jelas di lapangan (*environmental uncertainty*) ataupun keputusan tidak konsisten tergantung siapa yang memutuskan (*social uncertainty*) memicu masyarakat untuk *coping* dengan caranya sendiri sebagaimana digambarkan dalam kasus-kasus di atas.

Cara *coping* terhadap ketidakpastian pada dasarnya tercermin dari nilai yang dianut secara kolektif oleh masyarakat (Hofstede, 2001). Seperti diungkapkan di awal, hal ini menjadi menarik dalam konteks masyarakat Indonesia, karena pilihan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan mereka sama sekali tidak menggambarkan nilai-nilai yang telah disosialisasikan sejak kehidupan awal mereka. Tindakan demikian jelas tidak sejalan dengan nilai kerja sama yang telah lama didengung-dengungkan lewat kegiatan gotong royong. Alih-alih bekerja sama, mereka lebih cenderung mau menang sendiri, mengedepankan tindakan kompetitif untuk mengatasi persoalan yang ada.

Pilihan mau menang sendiri yang berarti membawa konsekuensi negatif atau kerugian pada pihak lain juga tidak sejalan dengan nilai mengedepankan tujuan/kepentingan bersama. Pertanyaan menarik yang kemudian muncul adalah: "di manakah dan bagaimana peran dari nilai-nilai tersebut?"; "apakah telah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat"? Sejumlah sinyalemen dalam kehidupan di kota-kota besar mungkin bisa menjawab hal ini: eksposure budaya Barat lewat film, pergeseran jenis permainan yang dimainkan, atau stimulus yang tinggi di kota Jakarta (*urban overload hypothesis*).

Film-film Barat yang menjadi suguhan tontonan masyarakat Indonesia memaparkan kehidupan dalam budayanya dengan nilai-nilai individualistik, seperti kompetisi, pengedepanan minat, kebutuhan aspirasi, dan kepentingan diri sendiri di atas kelompok (lihat Hofstede, 2001). Nilai-nilai ini sangat didukung dan diharapkan kemunculannya pada diri masyarakat individualis, tetapi tidak pada masyarakat kolektivis seperti Indonesia. Pemaparan nilai-nilai demikian secara terus menerus dan intensif tanpa *counter* dari nilai

dominan yang berkembang di masyarakat sendiri pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya pengadopsian dan internalisasi nilai-nilai individualistik tersebut dalam diri masyarakat Indonesia. Prinsip hidup seperti memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama sebagaimana dipaparkan dalam film-film tersebut akhirnya menjadi pengarah perilaku mereka.

Sejalan dengan eksposur film-film Barat di atas, pergeseran pada permainan anak-anak dewasa ini –dari permainan tradisional ke *game* elektronik- juga merupakan satu dari pemicu perilaku kompetitif. Permainan tradisional yang banyak mengedepankan kebersamaan –harus dilakukan bersama-sama dan mengajarkan nilai-nilai saling berbagi seperti congklak- kini telah digantikan oleh permainan yang sifatnya soliter, seperti video game. Kebutuhan akan kehadiran orang lain, seperti halnya bermain congklak atau lompat jangkit, kini bisa segera diatasi dengan "lawan" bermain virtual. Sebutan "lawan" sendiri sudah menghidupkan semangat untuk 'menang sebanyak mungkin'; tidak seperti halnya dalam permainan tradisional yang mencari "teman bermain". Ini belum berbicara mengenai isi permainannya sendiri yang juga sangat kontras. Permainan tradisional sangat mendukung perilaku kooperatif, sedangkan permainan elektronik –terutama yang diminati dan dinilai menantang oleh anak-anak- sangat bernuansakan agresivitas dan kompetisi.

Pergeseran tersebut akan semakin dipercepat oleh tuntutan hidup di kota-kota besar seperti di Jakarta. Anak-anak yang tumbuh di kota-kota besar memiliki lebih banyak model untuk diri mereka dalam mengembangkan perilaku non kooperatif. Mereka mengamati Orang tua mereka dan masyarakatnya yang cenderung tidak peduli dengan orang lain, karena tuntutan hidup dan berbagai persoalan hidup di kota besar. Orang tua dan juga masyarakatnya menyeleksi dengan siapa mereka harus berinteraksi dan menaruh perhatian, agar mereka tetap bisa efektif menjalankan kehidupannya. Apa yang disinyalir oleh Stanley Milgram dengan *urban overload hypothesis*nya -bahwa stimulus-stimulus yang tinggi di kota besar menyebabkan individu terpaksa bertindak selektif, agar mereka tetap mampu berfungsi secara optimal- memberikan justifikasi seolah itulah nilai-nilai yang harus dikembangkan.

Ini adalah sejumlah indikasi yang lagi-lagi dibutuhkan kajian tersendiri untuk konteks Indonesia. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya disonansi pada generasi penerus, karena lewat institusi dasar seperti keluarga, sekolah, (secara formal) mereka masih ditanamkan nilai-nilai yang tidak konsisten dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

Mengembangkan Perilaku Kerja sama untuk Konteks Indonesia

Kembali pada jargon ”revolusi mental” dari Presiden terpilih, Jokowi, sebagaimana dipaparkan di awal, maka bagian akhir dari tulisan ini berfokus pada bagaimana bangsa Indonesia bisa menyalakan kembali semangat gotong royong; kesediaan bekerja sama dengan orang lain demi pembangunan bangsa. Berikut ini adalah beberapa pemikiran untuk menumbuhkan kembali semangat tersebut, yakni dengan mereduksi perilaku kompetitif, dan sekaligus mengembangkan kecenderungan bekerja sama. Yang pertama adalah mengkomunikasikan pilihan dan menyatakannya sebagai sebuah komitmen. Hal lainnya yang mungkin bisa dilakukan adalah mengembangkan rasa percaya terhadap pihak lain dan yang terakhir dengan menciptakan *superordinate goal* yang mempertemukan kepentingan semua pihak.

Mengkomunikasikan Pilihan dan membuat Komitmen

Komunikasi antar pihak diyakini mampu mereduksi kecenderungan bertindak kompetitif (Chen, 1996). Interaksi antar pihak menyebabkan perasaan sekelompok lebih *salient*/menonjol, sehingga fokus perhatian tidak lagi pada kepentingan individual, melainkan pada kepentingan kelompok (bdk. Hogg & Terry, 2001). Pada level ini individu mempersepsikan dirinya lebih sebagai representasi kelompok dibandingkan sebagai pribadi yang unik. Karena itu muncul persepsi akan kemiripan satu sama lain yang tidak hanya terbatas pada karakteristik fisik saja, tetapi juga pada kesamaan minat, nilai-nilai dan tujuan yang hendak diraih.

Kemiripan ini seolah mereduksi jarak sosial antara individu dengan pihak lainnya. Karena itu individu yakin bahwa pihak lain akan bertindak selaras dengan norma dan nilai-nilai kelompok (*shared values*). Keyakinan akan konsistensi perilaku pihak lain mereduksi keraguan individu bahwa pihak lain akan bertindak semata demi keuntungan pribadi. Sebaliknya keterprediksian perilaku orang lain memunculkan keyakinan dalam diri individu, bahwa pihak lain akan bertindak demi keuntungan bersama (bekerja sama).

Komunikasi merupakan solusi yang bisa dipilih dan relevan untuk konteks Indonesia, terutama masyarakat di kota-kota besar. Jarak sosial yang tinggi antar warga di perkotaan melenturkan persepsi sebagai sebuah kelompok/masyarakat. Relevansi komunikasi sebagai alat untuk mereduksi kecenderungan berkompetisi bisa dirujuk pula pada kajian Hofstede (2001). Dalam studinya teridentifikasi Indonesia sebagai negara dengan kecenderungan kolektivisme yang tinggi, yang ditandai antara lain oleh orientasi pada kelompok. Dalam budaya ini, kepentingan bersama (baca: kelompok) harus selalu

dikedepankan dan melampaui kepentingan individu, sebagaimana antara lain tertera dalam materi pelajaran siswa SD, bahwa 'warga negara yang baik akan selalu mendahulukan kewajiban daripada hak'.

Dalam budaya ini kelompok juga memiliki makna dan sebagai sumber identitas sosial (*social identity*) bagi anggota-anggotanya. Karena itu, identitas kelompok mampu 'mengikat' individu-individu untuk bekerja sama; tidak berkompetisi. Dengan kata lain, identitas kelompok yang sama menyebabkan transformasi motivasi dari kepentingan pribadi kepada kepentingan bersama. Dengan kecenderungan demikian, kontrol sosial terhadap komitmen yang telah dinyatakan akan berfungsi dengan baik. Di sini kerja sama, bukan kompetisi, berkembang menjadi sebuah norma kelompok.

Singkat kata, mengkomunikasikan intensi untuk mengambil pilihan tertentu dalam kelompok yang terbatas (*ingroup*) dan juga menyatakan komitmennya terhadap keputusan tersebut (komitmen kelompok) bisa dipertimbangkan sebagai cara untuk mereduksi persepsi individu terhadap ketidakpastian. Studi di bidang ini telah memperlihatkan, bahwa komitmen untuk memegang janji akan pilihan tertentu (termasuk berkontribusi) telah berhasil mereduksi rasa khawatir dan sifat rakus individu (Chen, 1996), sehingga kecenderungan bekerja sama menjadi meningkat.

Mengembangkan rasa saling percaya (trust)

Komitmen hanya bisa meyakinkan pihak lain untuk bertindak kooperatif, kalau pihak yang satu meyakini adanya kemauan baik (*goodwill*) dari pihak lain, dan bahwa pihak lain ini tidak akan 'membelot' atau mengkhianati janjinya. Dengan kata lain, ada *trust* (rasa percaya) di antara mereka. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa *trust* memfasilitasi kerja sama (Kramer & Tyler, 1996). *Trust* memungkinkan pihak satu bersedia bekerja sama dengan pihak lainnya dengan mengesampingkan pikiran bahwa dirinya akan dieksploitasi. Keyakinan bahwa pihak lain peduli terhadap kepentingan bersama, bahwa pihak lain memiliki integritas dan perilakunya terprediksi, membuat individu merasa nyaman untuk menjatuhkan pilihan untuk kepentingan bersama, dan bukan pada pilihan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Di tengah situasi dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, keyakinan akan *goodwill* pihak lain tidaklah mudah dimunculkan. Keberadaan mekanisme kontrol dalam bentuk peraturan ataupun kesepakatan bersama dengan pelaksanaannya yang konsisten bisa dipertimbangkan sebagai 'penjamin' yang dapat memfasilitasi kemunculan *trust* terhadap pihak lain. Larangan pemotongan kayu di hutan dengan sanksi yang diterapkan secara

konsisten terhadap siapa pun dan kapanpun, serta sanksi tegas bagi yang tidak membayar pajak merupakan contoh-contoh di antaranya.

Menciptakan superordinate goal

Tendensi pada masyarakat kolektivis untuk mengikatkan diri pada sebuah kelompok (*in-group*) dapat dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan dan kerja sama. Di sini kohesivitas kelompok dijadikan sebagai alat untuk membangun tujuan bersama, sebuah *superordinate goal*, yakni sebuah tujuan yang lebih besar, yang hanya bisa diraih, jika semua kelompok bekerja sama. Untuk kasus-kasus menyangkut *public goods dilemma* atau *resource dilemmas,* strategi ini sangat cocok untuk dikembangkan. Bencana alam (banjir ataupun longsor) yang tidak henti-hentinya terjadi di Indonesia, karena penebangan hutan secara tidak terkontrol, atau pembangunan fasilitas publik yang tidak berjalan baik karena sumber pajak yang terbatas, bisa dijadikan sebagai *superordinate goal*. Ini kesempatan bagi pemimpin tertinggi di negeri ini untuk mencanangkannya sebagai tujuan bersama untuk negeri ini. Pendekatan lain berupa pemberian sanksi yang diterapkan secara konsisten sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan bersama. Ini dimungkinkan, karena persoalan ini sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai persoalan bersama; persoalan nasional.

Kembali pada jargon "revolusi mental" dari Presiden Jokowi, maka merujuk ketiga pemikiran di atas pimpinan puncak negeri ini bisa berbuat banyak untuk menyalakan kembali semangat bekerja sama, spirit gotong royong sebagai karakter bangsa. Pertama-tama meletakkan sistem yang menumbuhkan rasa percaya, sehingga muncul kesediaan dari satu pihak untuk bekerja sama dengan pihak lainnya. Dengan sistem yang jelas, dan lebih penting lagi implementasinya konsisten, maka ketidakpastian bisa direduksi. Rasa khawatir yang muncul akibat ketidakpastian ini karenanya bisa sirna, dan muncul kesediaan untuk berkomitmen. Kalaupun pihak lain tidak bisa diperhitungkan dengan pasti, namun sistem yang kredibel dan diimplementasikan secara ajek memberikan jaminan dan pegangan pada masyarakat. Kalau sistem sudah berjalan, maka dia akan bergulir dan menjadi norma sosial. Dengan kata lain, bekerja sama, bergotong royong akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadikannya sebagai sebuah karakter bangsa.

Penutup

Ada banyak situasi di masyarakat berupa dilema sosial, yang disikapi oleh individu dengan tindakan kompetitif. Menurut *fear hypothesis*, rasa khawatir karena tidak yakin akan mendapatkan hasilnya mendorong individu bertindak dengan cara yang mementingkan

hasil maksimal untuk dirinya sendiri. Ketidakpastian akan pilihan pihak lain (*social uncertainty*) dan juga situasi (*environmental uncertainty*) memunculkan rasa khawatir individu akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Hal ini terutama terjadi di kota-kota besar di Indonesia di mana jarak sosial semakin tinggi, sehingga makin memunculkan rasa khawatir karena pihak lain itu dipersepsikan sebagai bukan orang yang sekelompok dengannya. Akan tetapi, penelitian pada konteks lain menunjukkan sifat rakus sebagai motif yang mendorong individu bertindak kompetitif. Sejauh ini belum ada data untuk konteks Indonesia.

Menciptakan/memunculkan tujuan bersama yang hanya mungkin dicapai, jika setiap individu bekerja sama (*superordinate goal*) juga sebuah solusi. Dengan adanya kepentingan bersama pada level nasional ini menuntut masing-masing individu ’keluar’ dari kepentingan diri/kelompoknya, dan ’memandang’ dirinya dalam kepentingan kelompok yang lebih besar. Paralel dengan itu, mengkomunikasikan pilihan dan menyatakan komitmen terhadap keputusan tersebut juga perlu dilakukan. Kelompok kemudian bertindak untuk kontrol sosial terhadap penyimpangan. Ini hanya akan berfungsi dengan baik, jika ada rasa saling percaya (*trust*) antar pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk ini dibutuhkan komitmen tinggi dari petinggi negeri ini untuk mengembangkan sistem yang mendukung, mekanisme *reinforcement*, dan mengimplementasikannya secara konsisten.

Daftar Acuan

Chen, X-P (1996). The group-based binding pledge as a solution to public goods problems. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 66*, 2, 192-202.

Chen, X-P., Au, W.T. & Komorita, S.S. (1996). Sequential choice in a step-level public goods dilemma: the effects of criticality and uncertainty. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65*, 1, 37-47.

Dawes, R.M. (1980). Social dilemmas. *Annual Review of Psychology,* i, 169–193.

Hofstede, G. (2001). *Culture´s Consequences* (2 ed.). Thousand Oak: Sage Publication.

Hogg, M.A. & Terry, D.J. (2001). Social identity theory and organizational processes. In M.A. Hogg & D.J. Terry. *Social identity processes in organizational context* (pp. 1-12). USA: Psychology Press.

Kramer, R.M. & Tyler, T.R. (1996). *Trust in organization: Frontiers of theory and research*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Murniati T., J. (2008). *Eine kulturvergleichende Studie zum Vertrauensaufbau: am Beispiel deutscher und indonesischer Arbeitsgruppen*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Parks, C.D. & Hulbert, L.G. (1995). High and low trusters' responses to fear in a payoff matrix. *Journal of Conflict Resolution, Vol. 29 (4),* 718-730.

Pruit, D.G. & Kimmel, M.J. (1977). Twenty years of experimental gaming: critique, synthesis, and suggestions for the future. *Annual Review of Psychology,* 28, 363-392.

Rapoport, A. & Eshed-Levy, D. (1989). Provision of step-level public goods: effects of greed and fear of being gypped. *Organizational Behavior and Human Decision Processes,* 44, 325-344.

Yuki, M. (2003). Intergroup comparison versus intergroup relationships: a cross-cultural examination of social identity theory in North American and East Asian cultural context. *Social Psychology Quarterly, 66, 2: 166-183*

28
Revolusi Mental, Kesetaraan Gender dan Peran Psikologi

Saparinah Sadli, Livia Iskandar & Hana Panggabean

Pengantar

Psikologi sebagai ilmu perilaku seharusnya dapat bersuara dan berbuat lebih banyak dalam mencapai kesetaraan gender untuk menghapus ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki yang berdampak negatif dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah ilmu, objek studi Psikologi adalah perilaku manusia, baik yang teraga *(tangible)* maupun yang tidak teraga *(intangible)*. Oleh karena itu, bagaimana memahami cara pikir, cara rasa, serta cara laku beserta faktor motivasional dan situasional yang memengaruhinya tentunya menjadi keahlian para akademisi dan praktisi psikologi. Kita yang mempelajari ilmu psikologi juga belajar mengenai perkembangan manusia secara utuh, dalam aspek fisik, mental, psikologis dan sosial. Kita juga mempelajari kapan dan bagaimana identitas gender terbentuk, betapa kuatnya pengaruh enkulturasi nilai dan sosialisasi lingkungan memengaruhinya dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan peran gender serta bagaimana individu tersebut mengisi perannya tersebut.

Bagian pertama tulisan ini memulai bagaimana revolusi mental terjadi dalam bidang ilmu psikologi, yang diteruskan dengan bagian kedua mengenai perlunya revolusi mental dalam mengupayakan kesetaraan gender, yang tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi bagi semua perempuan dan laki-laki. Bagian yang ketiga adalah bagaimana praktisi dan akademisi psikologi dapat meningkatkan peran dalam memperbaiki ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki yang diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

Revolusi Mental dalam Bidang Ilmu Psikologi

Dalam studi psikologi, para akademisi dan praktisi psikologi mengenal Revolusi Kognitif yang dimulai di tahun 1960an yang meletakkan dasar-dasar dari psikologi eksperimen. Revolusi kognitif ini sekaligus meruntuhkan aliran psikoanalisa Sigmund Freud yang semula mendominasi ilmu psikologi. Di abad 19, Sigmund Freud dengan teori dasar psikoanalisanya menegaskan bawah perbedaan anatomis perempuan dan laki-laki menjadikan perempuan makhluk yang tidak sempurna karena tidak memiliki alat kelamin laki-laki. Sejak aliran yang digulirkan oleh Wundt tersebut, psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang menghasilkan teori dan konsep berdasarkan penemuan hasil eksperimen di laboratorium psikologi.

Revolusi Kognitif yang telah meminggirkan aspek eros/emosi dibandingkan dengan aspek logo/rasio kemudian secara akademik kembali diperhatikan ketika cabang Psikologi Perempuan menjadi Divisi ke 35 dari *American Psychological Association* (1973). Psikologi Perempuan berdiri sebagai koreksi terhadap realitas bahwa kebanyakan teori psikologi yang konvensional/tradisional adalah teori yang berdasarkan pada laki-laki dan tidak memperhatikan perbedaan jenis kelamin dalam berpikir dan bertingkah laku. Psikologi Perempuan menyediakan informasi berdasarkan penelitian terhadap perilaku kelompok perempuan yang seringkali dilupakan/dipinggirkan ataupun tidak diperhitungkan dalam penelitian maupun dalam pembentukan teori dalam bidang ilmu psikologi. Pengalaman perempuan secara ***kualitatif*** berbeda dengan pengalaman laki-laki yang terjadi karena beberapa hal, tidak hanya karena perempuan secara biologis berbeda (hanya perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui anaknya), tetapi karena adanya peran gender yang secara kultural berbeda bagi perempuan dan laki-laki.

Apabila menelaah tentang Teori Gender Schema yang dikemukakan oleh Bem (1981), dapat ditemukan penjelasan bagaimana anak-anak mengisi peran gender mereka sebagai anak perempuan dan anak laki-laki sebagai hasil dari proses sosialisasi yang diajarkan kepadanya oleh lingkungan terdekatnya. Konsep ini sekarang dapat dijelaskan dengan teori Ekopsikologi dari Bronfenbenner (1979).Dalam budaya kita, contohnya, anak perempuan belajar bahwa ia seharusnya 'cantik' sesuai definisi oleh masyarakat, dan dikuatkan oleh media, sementara anak laki-laki belajar bahwa ia seharusnya gagah berani. Stereotipi tentang perempuan dan laki-laki bersama dengan mitos dan prasangka kemudian berpengaruh pada sikap mental seseorang. Seorang perempuan akan lebih mudah untuk dianggap sebagai kaum yang lebih rendah posisinya dan kurang penting *(inferior)* sementara seorang laki-laki lebih mudah untuk dianggap lebih tinggi posisinya serta memiliki kualitas yang lebih baik *(superior)* karena konstruksi masyarakat tentang bagaimana seharusnya

laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut lagi, perempuan lebih dipersepsikan sebagai objek daripada subjek yang memiliki potensi dan lain sebagainya. Stereotipi negatif yang dilekatkan kepada perempuan dibanding laki-laki seringkali menyudutkan perempuan dalam menjalani berbagai peran dalam rentang kehidupannya. Misalnya saja perempuan dianggap tidak dapat memimpin, sehingga hanya laki-laki yang dianggap dapat menjadi pemimpin di ruang publik; perempuan dianggap terlalu emosional, sehingga tidak dapat berpikir secara rasional, sedangkan laki-laki lebih pantas memimpin karena lebih rasional (Saparinah Sadli & Imelda Bachtiar, 2010). Sebagai pemimpin yang tegas, laki-laki dianggap asertif, sementara perempuan dianggap agresif ataupun suka memerintah *(bossy).*

Figur I.1. Perempuan dalam dunia kerja

Dalam dunia kerja misalnya, perempuan harus sungguh-sungguh membuktikan bahwa dirinya mampu untuk diposisikan sebagai penyelia/pemimpin bagi orang lain. Dan bahkan pada posisi yang tinggipun, misalnya untuk dapat dipilih sebagai Menteri dalam Kabinet yang merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Dalam memilih perempuan untuk dijadikan menterinya, Presiden SBY mengatakan bahwa jelas mereka harus berkualitas (yang artinya harus memiliki gelar S3, ke4 menteri dalam kabinet SBY semuanya memiliki gelar doktor, sementara persyaratan seperti ini tidak disyaratkan untuk laki-laki yang menjadi menteri. Mereka bisa saja seorang politikus, misalnya Ketua Partai).
Dalam kabinet Kerja Presiden Jokowi, ada 8 orang perempuan yang menjabat sebagai Menteri; mereka bergelar Doktor maupun dokter, atau membuktikan diri menjadi pengusaha yang sukses terlebih dahulu.

(Sumber: Widhi, 2014).

Emosionalitas yang secara khusus dikaitkan dengan manusia yang berjenis kelamin perempuan merupakan hasil sosialisasi gender. Secara sosiologis disebut sebagai hasil enkulturasi atau hasil konstruksi sosial. Secara psikologis dapat dijelaskan bahwa setiap manusia sejak dilahirkan langsung berada dalam jaringan nilai-nilai budaya, agama dan negara (Bronfenbenner, 1979). Dalam proses tumbuh kembangnya seorang bayi akan segera diasuh dan diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya oleh Orang tua, keluarga besar dan masyarakat di mana dia berada. Dalam ilmu psikologi, kita belajar bahwa identitas gender dimulai ketika anak berusia antara 2-3 tahun. Di budaya Indonesia yang multikultural, ada peran gender yang dianggap pantas dan diharapkan dipenuhi dan yang juga berlaku

secara universal, yaitu bahwa perempuan dianggap lebih emosional dibanding laki-laki yang dianggap lebih rasional.

Revolusi Mental yang Menyangkut Kesetaraan Gender

Revolusi Mental dari segi psikologi membutuhkan terjadinya perubahan radikal dan mendasar dari sikap mental seseorang. Sikap mental seseorang tumbuh kembang dengan bertumpu pada nilai-nilai yang ia anut dan mewujud dalam pikiran, pernyataan ataupun perilakunya. Revolusi Mental dalam perspektif psikologi dapat diartikan sebagai diperlukannya perubahan nilai-nilai dalam memandang berbagai hal di sekitar kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah gerakan Revolusi Mental yang nyata agar ketidaksetaraan (baca: diskriminasi) dalam relasi laki-laki dan perempuan tidak terus berlangsung karena dampaknya yang negatif dalam kehidupan kita di abad ke-21 ini.

Telah banyak kemajuan yang dicapai oleh gerakan perempuan secara universal, sehingga perempuan di abad ke-21 tidak dibatasi untuk hanya bergerak di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga, namun juga dapat berperan di ranah publik dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih diperhitungkan dibandingkan pada abad-abad yang lalu. Perempuan masa kini dapat memilih pemimpin dan perwakilan rakyat lainnya serta mendapatkan kebebasan untuk memilih peran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya. Seorang perempuan yang telah menikah dapat memilih untuk menjadi seorang ibu yang bekerja untuk rumah tangganya tanpa imbalan, atau menjadi perempuan pekerja di luar rumah dengan imbalan untuk turut berperan dalam perekonomian keluarganya.

Namun dengan berat hati harus diakui bahwa masalah ketidaksetaraan gender yang sampai sekarang masih menjadi kenyataan dalam realitas kehidupan sehari-hari adalah faktor yang mendasari masih berlangsungnya diskriminasi terhadap perempuan mulai dari rumahnya sendiri maupun dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang dilakukan oleh pasangan dari perempuan itu sendiri, pelecehan yang dilakukan oleh (misalnya) guru dan anggota komunitas, perdagangan perempuan dan pemaksaan untuk menikah di bawah umur sampai perkosaan yang dialami oleh perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berhak hidup dengan bebas, setara dan tanpa rasa takut (*The universal declaration of human rights*, 1948).

Pada tataran negara memang harus diakui bahwa sistem hukum Indonesia belum banyak berpihak pada pemenuhan hak perempuan. Sistem hukum yang ada seolah mengukuhkan masyarakat patriarki kita. Pasal-pasal dalam Bab VI Undang-undang Perkawinan no I/74 mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri menjelaskan pembagian peran sebagai berikut: *Laki-laki harus aktif di ruang publik (sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama) dan perempuan adalah ibu Rumah Tangga dan pengasuh anak.* Dari perspektif Psikologi Perempuan ketentuan ini merugikan perkembangan potensi laki-laki dan perempuan karena kemudian laki-laki dibatasi dalam mengembangkan potensi afeksinya, sementara perempuan dihambat dalam mengembangkan potensi kognitifnya.

Undang-undang ini merupakan terobosan yang dibuat oleh perempuan perintis kemerdekaan dalam konteks memberi perlindungan pada perkawinan perempuan yang waktu itu cenderung dinikahkan sesuai kehendak Orang tua atau keluarga besarnya. Perempuan sendiri tidak memiliki suara apa pun ketika harus dinikahkan dan menikah. Dalam era penegakan hak perempuan abad ke-21, pasal-pasal ini digugat tidak hanya karena pembagian posisi laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik dianggap tidak adil bagi perempuan. Selain itu juga banyak perempuan yang menjadi Kepala Rumah Tangga karena suami yang meninggal/meninggalkan mereka karena bekerja atau menikah lagi ataupun menelantarkan mereka secara psikologis dan ekonomis, namun perempuan kepala rumah tangga ini seringkali tidak diakui secara yuridis. Contohnya, hingga hari ini dalam semua formulir pencatatan resmi, yang dicatat sebagai kepala rumah tanggal adalah laki-laki. Hal ini berimplikasi pada banyak aspek lainnya, seperti perhitungan pajak dan peran representatif keluarga.

Para penggiat kesetaraan hak perempuan hingga saat ini juga belum berhasil memperjuangkan peningkatan batas usia pernikahan bagi perempuan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan Indonesia karena batas usia menikah pada perempuan adalah (masih) 16 tahun (menurut definisi PBB, usia di bawah 18 tahun dianggap belum dewasa). Padahal pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia (sebutkan). Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa *Millennium Development Goal* yang batas waktunya adalah tahun 2015 tidak akan tercapai (*Millenium Development Goals and Beyond*, 2015).

Revolusi Mental pada Akademisi dan Praktisi Psikologi dalam Mengurangi Dampak Ketimpangan Relasi antara Perempuan dan Laki-laki

Kalangan psikologi memiliki *positioning* yang kuat apabila ingin mengambil peran dalam perjuangan hak asasi perempuan. Dengan bekal pengalaman dan keahliannya mengenai perilaku teraga dan tidak teraga, para praktisi dan ilmuwan psikologi dapat berpikir dan bersikap lebih objektif dan netral dalam memandang permasalahan serta dapat membahasnya pada tataran ilmiah. Dengan sifat keilmiahan disertai kepekaan pada persoalan di masyarakat, suara kalangan psikologi dapat membuka ruang dialog dengan pihak-pihak strategis serta menjangkau kalangan yang lebih luas. Maka tidaklah mengherankan apabila kalangan psikologi menjadi penyeimbang yang baik untuk gerakan-gerakan yang bertujuan memajukan perempuan.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa terlepas dari potensi kekuatan bersuara dan berkontribusi yang luar biasa sebagaimana diuraikan diatas, suara kalangan psikologi untuk persoalan kesetaraan gender masih dapat ditingkatkan gaungnya. Kenyataan bahwa profesi psikologi di Indonesia didominasi oleh perempuan, tidak serta merta membuat persoalan kesetaraan gender menjadi sebuah kesadaran yang memunculkan suara kritis Psikologi dalam upaya meminimalkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Selain itu, berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini, pendekatan kognitif yang rasional, empiris dan objektif, masih sangat kuat dalam bidang ilmu psikologi. Persoalan gender masih dipandang sebagai perbedaan yang sifatnya individual dalam konteks perilaku manusia. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang salah, karena pendekatan kognitif memang dibutuhkan sebagai salah satu pendekatan utama dalam memahami perilaku manusia. Meskipun demikian, arus psikologi kognitif tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya manusia itu sendiri dapat berdampak kepada kenyataan bahwa persoalan gender dibahas pada tataran individual, hanya kasus per kasus, walaupun mungkin dilakukan secara mendalam. Pendekatan yang akan digunakan akanlah berbeda apabila persoalan kaum perempuan (yang meliputi lebih dari 50% penduduk dunia ini) atau disebut "half the sky" oleh Kristof & WuDunn (2009)dianggap sebagai sebuah persoalan yang sistemik di masyarakat sehingga layak untuk mendapat perhatian yang komprehensif, serta penanganan dan pendekatan yang sistematis dan strategis.

Figur. II.1. Ilustrasi Kasus dari gagasan yang dilontarkan oleh Wapres Jusuf Kalla

Gagasan Wapres ini seputar PNS perempuan untuk dikurangi jam kerjanya sebanyak 2 jam sehari. Alasannya adalah untuk memberi kesempatan bagi para Ibu untuk lebih banyak mengasuh anaknya di rumah. Gagasan ini segera disambut dengan baik oleh beberapa pejabat negara. Salah satu dukungan terhadap gagasan ini muncul dari pejabat tinggi BKKBN yang menyatakan bahwa para ibu akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bercengkrama dengan anak-anaknya, dan ini adalah sesuatu yang baik bagi anak.

Di tengah-tengah pentingnya Revolusi Mental oleh Presiden Jokowi, ditambah dengan fakta akan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja bahkan menjadi Kepala Rumah Tangga dalam arti pencari nafkah utama, gagasan Wapres ini penting untuk ditelaah dari segi Psikologi Perempuan.

Dari perspektif Psikolog Perempuan memperpendek jam kerja perempuan secara umum dapat dianggap baik karena semua perempuan bekerja (di dalam dan di luar rumah, baik diberi imbalan maupun tidak). Ide ini menjadi kurang bijak apabila dikaitkan dengan alasan yaitu menambah ketersediaan waktu untuk mengurus anak. Gagasan ini mencerminkan sikap mental yang konvensional/tradisional tentang bagaimana kaum laki-laki (dalam hal ini pejabat tinggi negara yang melontarkan dan mendukung gagasan tersebut). Mengurangi jam kerja perempuan akan memperkuat stereotipe tradisional tentang peran domestik yang memojokkan kemanusiaan perempuan. Apabila kemudian pengurangan jam kerja ini berdampak pada pengembangan diri dan karir, kemudian gaji yang diterimanya (apakah akan sama dengan PNS laki-laki yang tidak dikurangi jam kerjanya dan apakah hal ini akan dapat diterima oleh kolega/bawahan serta atasan perempuan PNS tersebut).

Dalam semangat Revolusi Mental, barangkali yang perlu diperbaiki atau sistem dukungan bagi anggota keluarga yang bekerja seperti waktu yang lebih fleksibel ataupun juga adanya tempat Penitipan Anak yang dekat dengan tempat kerja atau ruang menyusui yang didukung oleh kementrian terkait.

Setiap ibu yang bekerja akan selalu mencari cara terbaik untuk dapat mengkombinasikan bekerja di ruang publik serta bekerja di ruang domestik, yaitu di rumah tangganya. Sepertinya pembagian waktu yang seimbang antara kerja di luar rumah serta di dalam rumah tidak perlu untuk diatur oleh seorang pejabat negara dan dijadikan kebijakan yang cenderung dapat mendiskriminasi perempuan PNS.

(Disarikan dari nasional.kompas.com)

Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut

Di era revolusi mental yang membuka peluang seluas-luasnya untuk perubahan sikap mental masyarakat, seyogyanya kalangan Psikologi turut serta dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, bermasyarakat serta dalam keluarga, yang juga akan memberikan dampak yang positif dalam pengembangan karakter anak dalam keluarga serta anak bangsa dalam jangka menengah dan panjang. Potensi perempuan yang dibatasi pagar-pagar psikologis yang dikembangkan masyarakat agar dapat dibebaskan sehingga perempuan tidak terus-menerus menjadi penonton pembangunan, dan dapat terjun aktif membentuk lingkungan yang kondusif.

Di akhir tulisan kami ini, kami merasa perlu kembali menyuarakan pentingnya kontribusi Psikologi dalam menyikapi dan berespons terhadap persoalan kemajuan perempuan secara universal. Sampai hari ini hanya segelintir akademisi dan praktisi psikologi yang terjun dalam memajukan upaya agar potensi perempuan tidak dipinggirkan. Berkembangnya unit dan program di universitas yang mendedikasikan kajiannya untuk studi perempuan tentunya juga membuka wawasan lebih luas tentang ulasan akademik mengenai perempuan.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dapat berkembang dan diperlakukan secara manusiawi. Terpinggirnya potensi perempuan tidak hanya melecehkan tetapi juga merugikan bangsa yang giat membangun. Revolusi Mental harus dimulai di rumah dan keluarga kita masing-masing sesuai dengan tantangan dan ajakan Presiden Jokowi, "**Ayo kerja, kerja, kerja!**"

Daftar Acuan

American Psychological Association, Society for the Psychology of Women, 35th Division. Diunduh dari http://www.apadivisions.org/division-35/pada tanggal 19 Desember 2014.

Bem, S.L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing source. *Psychological Review, 88*, 354.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kristof, N., & WuDunn, S. (2009). *Half the sky: Turning oppression into opportunity for women worldwide.* New York: Knopf.

Millenium development goals and beyond. (2015). Diunduh dari http://www.un.org/millenniumgoals/pada tanggal 19 Desember 2014.

Rastika, I. (2014), Wapres ingin jam kerja pegawai perempuan dikurangi dua jam. Diunduh dari http://nasional.kompas.com/read/2014/11/25/12273031/Wapres.Ingin.Jam.Kerja.Pegawai.Perempuan.Dikurangi.Dua.Jam pada 19 Desember 2014

Syurkani, P. (2014). Menteri perempuan Jokowi lebih banyak dari SBY. Diunduh dari http://news.arifhouse.com/detil-berita-53928.html, pada 19 Desember 2014.

Sadli, S., &Bachtiar, I. (2010). *Berbeda tapi setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

The universal declaration of human rights. (1948). Diunduh dari http://www.un.org/en/documents/udhr/pada tanggal 19 Desember 2014.

United nations convention on the rights of the child. (1990). Diunduh dari http://www.unicef.org/crc/pada tanggal 19 Desember 2014.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No I/1974.

Widhi, N. (2014). Lima fakta unik tentang para menteri perempuan Jokowi. Diunduh dari http://news.detik.com/read/2014/10/27/154141/2730857/10/5-fakta-unik-tentang-para-menteri-perempuan-jokowi, pada 19 Desember 2014.

29
Pergeseran Nilai Budaya Jawa

Retno Suhapti

Saat panitia meminta tulisan untuk serial buku “Sumbangan Psikologi untuk Bangsa” dengan tema “Revolusi Mental” membutuhkan waktu cukup lama bagi saya merenung makna tema buku kali ini yaitu Revolusi mental supaya tidak terjebak dengan istilah yang saat ini sedang *trend* dan agar tema ini tetap mempunyai makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “Revolusi” adalah perubahan yang cukup mendasar di suatu bidang, sehingga bila disimak kembali tema buku kali ini yaitu Revolusi mental maka kurang lebih berarti perubahan yang cukup mendasar di bidang mental atau watak. Perubahan dalam hal ini tidak selalu menjadikan lebih baik tetapi harapan dari suatu perubahan tentunya membawa ke arah yang lebih baik.

Topik tulisan ini adalah Pergeseran Nilai Budaya Jawa pada masyarakat Jawa. Bila menyimak dari definisi tema buku ini maka *pergeseran* yang ada tentunya diharapkan berdampak ke arah yang lebih baik, tetapi tulisan ini menyerahkan kepada pembaca untuk menyimpulkan sendiri apakah pergeseran ini menjadikan lebih baik atau bahkan sebaliknya.

Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai nilai atau *value*. Menurut Branca, Alport, Rokeach (Suhapti, 1987) Nilai adalah sesuatu yang dihayati untuk menentukan mana yang baik, benar, dan penting serta meninggalkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar dan tidak penting. Nilai sangat dipengaruhi kebudayaan, masyarakat dan kepribadian; sementara nilai yang dimiliki individu memengaruhi dalam bertingkah laku. (Triandis, 1990).

Menurut ilmu Psikologi nilai merupakan salah satu unsur kepribadian sehingga sering dibahas. Menurut Sullivan dalam (Mahoney & Stasson, 2005). Kepribadian adalah

bentuk tingkah laku yang relatif tetap pada seseorang dan tingkah laku ini terbentuk karena interaksi dengan orang lain mulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa.

Budaya Jawa

Budaya adalah dimensi aktif dari kehidupan sosial yang membuat orang menjadi bermakna. Budaya itu sangat kompleks di mana norma dan nilai sangat memengaruhi yang kemudian membentuk simbol, mitos, rutinitas, kebiasaan sampai pada kepribadian. (Geertz, 1994) Menurut Strauss (Sturrock, 1979) manusia diatur oleh tatanan yang dibentuk dari struktur yang tetap dan teratur dalam sistem kultural. Budaya perannya cukup besar dalam sistem masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai alat menyelesaikan masalah dan yang membuat masing-masing anggota masyarakat dapat berkomunikasi, belajar atau memenuhi kebutuhan baik emosi ataupun materi.

Menurut Koentjaraningrat (1984) Jawa adalah masyarakat kelompok suku yang terbesar di Indonesia dan merupakan masyarakat asli daerah bagian timur dan tengah Pulau Jawa. Masyarakat Jawa dikelompokkan dalam dua kelas sosial yaitu kelas sosial atas dan bawah. Kelompok sosial atas terdiri dari golongan bangsawan, pegawai negeri golongan atas. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok priyayi, sedangkan yang termasuk kelompok sosial bawah adalah petani, pengrajin, pedagang kecil dan pegawai negeri golongan bawah kelompok ini sering disebut sebagai kelompok wong cilik. Wong cilik yang karena prestasi atau pendidikan mendapat gelar kebangsawanan atau pangkat yang sesuai dengan priyayi maka statusnya akan berubah menjadi priyayi. Priyayi Jawa selalu dikaitkan dengan konsep hal-hal yang halus sementara wong cilik Jawa dengan konsep kasar. Tatanan masyarakat Jawa ini mengatur perbedaan mulai dari gelar kebangsawanan, gelar kepangkatan, bentuk rumah, bahasa, bentuk upacara yang dapat dilakukan, jenis kesenian hingga aspirasi di bidang pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Anderson (1965), masyarakat Jawa percaya bahwa hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos harus seimbang. Mikrokosmos adalah manusia dan makrokosmos adalah lingkungan, dapat juga diartikan bahwa mikrokosmos adalah alam sadar dan makrokosmos adalah alam tak sadar. Keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos bertujuan untuk tercapainya harmoni. Harmoni adalah sistem nilai masyarakat Jawa yang berdasar konsep rukun dan hormat. Orang Jawa sejak kecil telah ditanamkan konsep rukun dan hormat agar kehidupan menjadi tenang, selaras dan seimbang. Keadaan yang selaras dan seimbang sering disebut sebagai keadaan yang *tata,*

tentrem, kerta raharja. *Tata* menunjukkan keadaan yang teratur, *tentrem* adalah keadaan yang tidak menimbulkan kegelisahan, dan *raharja* adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak ada rintangan atau halangan (Suhapti,1994).

Rukun adalah suatu kondisi yang tenang, tidak ada konflik, sehingga keselarasan dapat tercapai. Bagi orang Jawa rukun dengan keluarga dan masyarakat merupakan hal yang utama, kebutuhan individu bukan hal yang penting. Terkadang orang Jawa harus menekan kebutuhannya dan bersifat merendah untuk tujuan kebersamaan. Orang Jawa harus mau dan rela bekerja sama, taat pada norma masyarakat, bertingkah laku sopan. Suasana gotong royong dan kebersamaan yang harus dimunculkan. Nilai rukun ini tampak sekali dalam tingkat keluarga, setiap anggota keluarga diharapkan saling rukun dan dekat. Bagi orang Jawa mendapat keamanan psikologis dari perasaan akrab, merasa hidup tidak sendiri menjadi bagian dari keluarga merupakan hal yang sangat penting. Dalam masyarakat Jawa manusia sebagai individu tidak penting, manusia bersama-sama membentuk suatu masyarakat yang harmonis apabila perlu harus mengorbankan diri melepas kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama dengan cara menyesuaikan diri, menghindari konflik, bersikap baik dengan sesama, tidak tinggi hati pada orang yang lebih rendah, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. (Hawkins, 1996). Apabila perlu orang Jawa harus menghindari keterusterangan agar tidak menimbulkan kekecewaan, karena pada dasarnya orang Jawa tidak senang dengan suasana yang tidak teratur, tidak rukun. (Suseno, 1996).

Selain rukun orang Jawa juga harus hormat pada orang lain, hormat pada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Hormat adalah suatu kondisi bahwa orang Jawa harus bertingkah laku, berbicara, dan membawa diri sesuai dengan kedudukannya agar tercipta masyarakat yang teratur. Bagi orang Jawa pemimpin merupakan tokoh sentral yang harus dihormati karenanya seorang pemimpin harus orang yang berwibawa karena kepadanya kita harus hormat tetapi sebagai pemimpin tidak boleh tinggi hati dan tidak boleh merasa hebat. Rasa hormat biasanya ditunjukkan dengan sikap *wedi* (takut), *isin* (malu) dan *sungkan*. Orang Jawa harus memiliki rasa takut termasuk takut pada orang tua, orang yang dihormati, serta takut pada orang yang belum dikenal. Wong cilik harus takut pada priyayi, anak harus takut pada orang tua, istri takut pada suami. Tujuan ditanamkan rasa takut agar menciptakan manusia yang dapat diterima dan menyesuaikan diri. Di samping rasa takut, orang Jawa juga harus mempunyai rasa malu apabila berbuat sesuatu yang tidak lazim, tidak pantas, atau berbuat salah. Rasa malu mulai ditanamkan sejak masa anak, di mana bila melakukan sesuatu kesalahan atau tidak pantas akan dibuat malu di depan orang lain. Orang Jawa juga harus mempunyai rasa *sungkan* yaitu rasa yang dekat dengan rasa malu. Sungkan lebih diartikan bahwa orang dilarang mengungkapkan perasaan, kehendak,

keinginan yang ada pada dirinya pada orang lain atau dengan kata lain orang tidak boleh menonjolkan diri (Koentjaraningrat, 1984; Suhapti, 1994).

Menurut Anderson (1965) selain rukun dan hormat, orang Jawa juga diharuskan memiliki sifat menerima, tidak boleh semena-mena (*aja dumeh*) dan *tepa slira* yaitu harus toleransi menghargai orang lain (Jatman, 2004). Semua sifat ini bertujuan agar orang Jawa dapat menghindari rasa kekecewaan. Orang Jawa dididik untuk menerima atau mensyukuri apa yang telah diperolehnya. Segi positif dari sifat ini bertujuan agar tidak kecewa bila mengalami kegagalan tetapi terkadang dapat menghambat kemajuan. Tujuan diajarkannya sifat tidak semena-mena pada orang Jawa agar tidak sombong dan mampu toleran terhadap orang lain. Orang Jawa juga diharapkan memiliki *rasa* yaitu mampu merasakan segala dimensi kehidupan mulai dari perasaan, sadar akan asal-usulnya sampai pada status sosial. Bagi orang Jawa manusia tidak berkedudukan bukan suatu aib tetapi manusia menjadi aib bila manusia tidak menjalankan tatanan aturan Jawa.

Tatanan Masyarakat Jawa

Seperti telah diuraikan diatas, menurut Koentjaraningrat (1984) masyarakat Jawa dikelompokkan dalam dua kelas sosial yaitu kelas sosial atas dan bawah. Kelompok sosial atas disebut sebagai kelompok priyayi, sedangkan yang termasuk kelompok sosial bawah sering disebut sebagai kelompok wong cilik. Tatanan masyarakat Jawa ini mengatur perbedaan mulai dari gelar kebangsawanan, bentuk rumah, bahasa, pakaian, bentuk upacara yang dapat dilakukan, jenis kesenian hingga aspirasi di bidang pendidikan dan pekerjaan seperti yang diuraikan di bawah ini. (Geertz,1983; Suhapti,1987; & Suseno, 1996).

Gelar kebangsawanan bagi orang Jawa sangat berarti, dengan menyandang gelar di depan namanya masyarakat dapat mengenal statusnya. Gelar kebangsawanan bagi orang Jawa terutama yang tempat tinggal di sekitar Yogyakarta dan Surakarta masih penting, terkadang selain pemberian gelar kebangsawanan juga diberikan pangkat oleh keraton atau kasunanan sesuai dengan gelarnya, yang kemudian juga diikuti dengan nama baru.

Rumah bagi orang Jawa tidak hanya sebagai tempat berteduh tetapi mempunyai banyak fungsi yaitu untuk melakukan berbagai kegiatan selain kegiatan rumah tangga juga kegiatan agama, ekonomi, hubungan kekerabatan sampai pendidikan. Bentuk rumah Jawa dibedakan dalam beberapa macam bentuk sesuai dengan bentuk atap. Bentuk rumah Jawa yang banyak dijumpai adalah rumah limasan, rumah serotong, dan rumah joglo. Rumah limasan dan rumah serotong banyak dijumpai di desa atau rumah wong cilik dan rumah

joglo rumah para priyayi. Selain bentuk rumah isi rumah juga menggambarkan tatanan masyarakat Jawa. Rumah Jawa juga ditandai dengan lambang-lambang status yang dipajang di ruang tamu misal adanya pedang, tombak, dan payung yang dipajang di ruang tamu. Tingkat kebangsawanan diatur dengan warna payung dan perhiasan yang ada pada pedang. Sebagai contoh payung warna emas untuk raja, pedang dengan lapis emas permata untuk raja atau para bangsawan.

Tatanan masyarakat Jawa juga mengatur penggunaan bahasa berdasar tingkatan yang bertujuan menempatkan orang pada posisinya, tingkat kebangsawanan dan kepangkatan, serta hubungan keluarga. Bahasa Jawa memiliki enam tingkat dari krama inggil, krama, krama madya, ngoko sae, ngoko madya, dan ngoko: tetapi yang sering dipakai hanya tiga tingkat yaitu krama inggil, krama, dan ngoko. Krama inggil digunakan oleh wong cilik pada orang yang berpangkat, wong cilik pada priyayi, dan anak kepada orang tua. Krama digunakan antara dua orang yang sejajar, pada orang yang lebih tua, dan bawahan kepada atasan yang berpangkat sedang. Ngoko digunakan kepada orang yang sudah akrab, priyayi atau orang berpangkat kepada wong cilik, orang tua pada anak atau orang muda. Etika dalam berhubungan atau bergaul pada masyarakat Jawa sangat erat dengan penggunaan tingkat bahasa. Pengucapan bahasa selalu dikaitkan juga dengan gerak tubuh. Sejak kecil anak sudah diajarkan aturan ini supaya tidak salah dalam bertingkah laku.

Selain bahasa tatanan masyarakat Jawa juga mengatur cara berpakaian dan juga upacara yang dilakukan. Cara berpakaian pria Jawa merupakan rangkaian kain batik dengan beskap atau surjan, ikat kepala, keris dan selop. Bagi masyarakat pria priyayi Jawa pakaian ini dihiasi dengan benang emas atau menggunakan asesoris yang mengkilap atau terbuat dari emas dan permata, dan sarung (bungkus) kerisnya juga sering berlapis emas. Sementara untuk perempuan Jawa menggunakan batik dan kebaya. Motif batik dan bahan kebaya membedakan kelas dalam masyarakat Jawa, terdapat motif tertentu dengan kelas batik yang sangat baik kualitasnya hanya dapat dipakai oleh perempuan priyayi Jawa.

Upacara tradisional pada masyarakat Jawa merupakan rangkaian kegiatan fisik, perangkat benda yang diatur dan diperagakan sehingga mengandung makna dan diharapkan para pelakunya bertindak sesuai makna tersebut. Terdapat banyak upacara pada masyarakat Jawa sejak upacara kehamilan, kelahiran, masa remaja, perkawinan sampai kematian. Upacara yang dilakukan lengkap dengan doa, mantera dan sesaji. Penyelenggaraan upacara ini ada yang menyelenggarakan secara lengkap dan sempurna, tetapi terdapat juga yang hanya melakukan upacara yang penting saja.

Masyarakat Jawa priyayi dan wong cilik berbeda kegemaran dalam kesenian dan ini berkaitan dengan konsep halus dan kasar. Priyayi Jawa lebih memahami tari serimpi, wayang kulit yang sarat dengan budi pekerti yang baik, ajaran filsafat serta musik klasik baik klasik Jawa (gamelan) maupun klasik barat. Sementara wong cilik keseniannya adalah kesenian yang bersifat kerakyatan seperti *ketoprak* (pentas drama kesenian rakyat).

Dalam Bidang pendidikan dan pekerjaan priyayi mempunyai kesempatan yang lebih baik dibanding wong cilik. Pada masa lalu kesempatan pendidikan hanya untuk priyayi sementara untuk pekerjaan karena hanya priyayi yang dapat memperoleh akses pendidikan maka hanya kaum priyayi yang dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Wong cilik lebih banyak bekerja, menjadi petani atau pedagang yang berpenghasilan kecil. Mungkin karena pencitraan bahwa petani adalah wong cilik yang menyebabkan orang Jawa terutama kaum mudanya segan menjadi petani.

Pergeseran Tatanan Masyarakat Jawa

Jaman telah berubah, pengaruh dunia dan masyarakat modern membawa dampak pada tatanan kehidupan orang Jawa. Sejak kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dilebur menjadi negara Republik Indonesia sedikit demi sedikit pergeseran budaya mulai terasa orientasi kekuasaan sudah tidak pada kerajaan atau keraton tetapi pada pemimpin. Pengaruh kemajuan informasi ilmu, kesenian antar negara juga ikut memengaruhi pergeseran budaya setempat hal ini yang disebut akulturasi. Akulturasi yaitu pertemuan budaya yang berlainan secara alamiah dalam waktu yang cukup lama akan membawa perubahan pada budaya yang ada. (Panggabean, 2010). Konsep rukun sudah mulai berubah pada masyarakat Jawa, orang Jawa sudah mulai meninggalkan hubungan sosial yang cukup tinggi, sudah tidak akrab dengan tetanggga, berani menonjolkan kepentingan pribadinya, individualis, independen, ambisius, gigih dalam berusaha. Ciri ciri ini menunjukkan ciri masyarakat modern (Triandis, 1990; Uskul dkk, 2004 dan Van Der Zee dkk,. 2004) Dampak dari bergesernya nilai rukun, rasa hormat pada orang Jawa juga mengalami akulturasi, orang Jawa sudah mulai meninggalkan kebiasaan bertingkah laku, berbicara, dan membawa diri dengan baik apabila berhadapan dengan pemimpin, orang tua atau orang yang lebih tua. Dalam keluarga Jawa sekarang pun konsep ini telah memudar anak dapat berbicara dengan orang tua dalam hubungan yang sejajar, sehingga terkesan lebih akrab. Selain adanya proses akulturasi pada rasa hormat saat ini konsep takut, malu dan sungkan juga mengalami perubahan, orang Jawa sudah lebih berani mengambil keputusan dan risiko bahkan terkadang keputusan tersebut sesuatu yang tidak lazim, tidak pantas, atau dapat menimbulkan kesalahan.

Berkaitan dengan tatanan atribut yang melekat pada orang Jawa yang membedakan wong cilik dan priyayi saat ini juga banyak yang mengalami akulturasi. Pada masa sekarang ini banyak orang Jawa yang sudah tidak mencantumkan gelar kebangsawanan karena dirasa tidak berarti bagi kehidupan masa kini karena era sudah berubah. Bagi orang Jawa pada saat ini baik dari kalangan mereka yang dianggap wong cilik maupun priyayi, gelar kepangkatan atau jabatan di pekerjaan, militer dan gelar kesarjanaan lebih penting (Suhapti, 1987).

Rumah orang Jawa pada masa kini tidak menjadi masalah, rumah joglo tidak selalu rumah priyayi bahkan konsep rumah priyayi sekarang lebih memilih rumah gedung yang megah, besar dan mewah. Lambang-lambang status pada rumah Jawa sekarang sudah tidak dapat menggambarkan tingkat kebangsawanan, karena mereka yang memiliki uang atau bahkan bukan orang Jawa juga berusaha memiliki lambang tersebut. (Suhapti, 1987).

Penggunaan bahasa Jawa pada masa kini sudah tidak begitu banyak digunakan kecuali di lingkungan keraton, orang Jawa baik priyayi maupun wong cilik cukup banyak yang menggunakan bahasa Indonesia karena merasa lebih nyaman tanpa mengenal tingkatan. Bahkan pada keluarga muda sekarang bahasa Indonesia lebih popular, atau bahasa Jawa ngoko sehingga terdapat pula anak berbicara pada orang tua atau orang yang lebih tua dengan bahasa Jawa ngoko (Suhapti, 1987).

Pemilihan berpakaian pada masyarakat Jawa juga mengalami perubahan, pada masa kini orang Jawa dalam keseharian lebih sering memakai pakaian orang barat atau pakaian orang muslim, masyarakat Jawa sekarang hanya menggunakan pakaian Jawa untuk upacara adat atau pada acara resmi. Banyak dari masyarakat Jawa yang berasal dari wong cilik terutama yang memiliki kemampuan finansial saat ini bila harus berpakaian Jawa, mereka memilih memakai atribut pakaian dipakai priyayi Jawa (Suhapti, 1987).

Upacara tradisional pada masyarakat Jawa merupakan rangkaian kegiatan yang diatur dan mengandung makna dan diharapkan para pelakunya dapat bertindak sesuai makna tersebut. Terdapat banyak upacara pada masyarakat Jawa sejak kehamilan, sampai kematian. Saat ini banyak orang Jawa yang menyelenggarakan upacara tradisional ini secara tidak lengkap bahkan banyak juga yang sudah mengabaikan upacara tradisional karena terkadang dianggap bertentangan dengan agama yang dianut. Justru wong cilik Jawa atau masyarakat Jawa di pedesaan yang masih melakukan upacara tradisional ini secara lengkap karena mereka takut melakukan kesalahan terhadap tradisi (Suhapti, 1987).

Bidang pendidikan dan pekerjaan priyayi dan wong cilik Jawa juga berbeda, priyayi Jawa lebih mempunyai kesempatan pendidikan yang lebih baik meskipun sekarang perbedaan itu hampir tidak ada karena semua penduduk Indonesia mendapat kesempatan

yang sama dalam bidang pendidikan. Justru kondisi sosial ekonomi dan kemampuan intelektual yang membedakan tingkat pendidikan yang dapat ditempuh tanpa memandang apakah dari kelompok priyayi atau wong cilik.

Aspirasi dalam bidang pekerjaan masyarakat Jawa, pada masa dahulu kesempatan untuk menjadi pegawai keraton atau menjadi pegawai negeri lebih diutamakan bagi priyayi sementara wong cilik menjadi petani atau pedagang yang berpendapatan rendah. Pada masa kini pekerjaan menjadi pegawai negeri bukan menjadi prioritas keinginan bagi priyayi Jawa, selain karena pendapatan yang relatif rendah juga kompetisi yang sulit. Sementara wong cilik Jawa berusaha menjadi pegawai negeri supaya derajat keluarganya akan naik sehingga dapat masuk dalam golongan priyayi.

Penutup

Seperti telah penulis sampaikan di atas bahwa topik tulisan ini adalah Pergeseran Nilai Budaya Jawa pada Masyarakat Jawa dan penulis menyerahkan kepada pembaca untuk menyimpulkan sendiri apakah pergeseran ini menjadikan lebih baik, atau bahkan sebaliknya bagi masyarakat Jawa. Apa pun juga yang pembaca putuskan mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca tentang masyarakat Jawa beserta nilai budayanya.

Daftar Acuan

Anderson, B. (1965). *Mythology and the tolerance of the Javanese.* Ithaca New York: Cornell University: Modern Indonesia Project.

Geertz, C. (1994). *Politik Kebudayaan.* Yogyakarta: PT Kanisius.

Geertz, H. (1983). *Keluarga Jawa.* Jakarta: Grafitipres.

Hana Panggabean. (2010). Mengembangkan Kompetensi Antar Budaya menjadi Pluralis dengan Sadar. *Dalam* Supratiknyo, A dan Susana, T. 50 tahun Himpunan Psikologi Indonesia. Redefinisi: Psikologi Indonesia dalam Keberagaman. Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia.

Hawkins, M. (1996). Is rukun dead? Ethnographic Interpretations of Social Change and Javanese Culture. *The Australian Journal of Anthropolgy,* 7 (3), 218-234.

Jatman, D. (2004). *Psikologi Jawa.* Jangkep.Semarang: Limpad.

Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa.* Jakarta: PN Balai Pustaka.

Sturrock, J. (1979). *Structuralism and since from Levi-Strauss to Derrida*. Oxford: Oxford University Press Suhapti, R. (1987). Studi Eksploratif Faktor-Faktor yang memengaruhi Nilai Hidup Masyarakat Jawa Pedesaan. *Thesis*. UGM: Fakultas Pasca Sarjana

Suseno, F.M. (1996). *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia

Triandis, H.C; McCusker, C & Hui, C.H. (1990). Multimethod probes of individualism and collectivism. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol.59, No.5, 1006-1020.

Triandis, HC. (1999). Cross-cultural psychology. *Asian Journal of Social Psychology*, 2, 127-143.

Uskul, A.K; Hynie, M & Lalonde, R.N.(2004). Interdependence as a mediator between culture and interpersonal closeness for Euro-Canadians and Turks. *Journal of Cross Cultural Psychology*. Vol. 35, No.2, 174-191.

Van Der Zee, K; Atsma, N & Brodbeck. (2004). The influence of social identity and personality on outcomes of cultural diversity in teams. *Journal Of Cross Cultural Psychology*. Vol. 35, No. 3, 283-303

BAGIAN IV

Organisasi/Komunitas

30
Membangun Budaya Organisasi yang Hidup: Salah Satu Upaya Pengembangan Manusia Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur

Wisnubrata Hendrojuwono

> *"Jagalah pikiranmu, karena akan menjadi perkataanmu.*
> *Jagalah perkataanmu, karena akan menjadi perbuatanmu.*
> *Jagalah perbuatanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu.*
> *Jagalah kebiasaanmu, karena akan membentuk karaktermu.*
> *Jagalah karaktermu, karena akan membentuk masa depanmu."*
>
> *Dalai Lama*

Pengantar

Bangsa yang besar ditentukan oleh kekuatan karakter warga negaranya. Roh karakter yang baik (berbudi pekerti luhur) dan kuat terletak pada seberapa kuat kita meyakini dan menjalankan nilai-nilai luhur bangsa. Tulisan ini diilhami oleh pengalaman penulis dalam memfasilitasi banyak Program Pengembangan Pribadi, Pengembangan Tim, Pengembangan Kepemimpinan, serta Pengembangan Budaya Kerja dan Budaya Organisasi sejak tahun 1976. Program ini lebih ditujukan untuk membangkitkan kesadaran bahwa pada dasarnya tiap orang memiliki kebajikan (*virtues*: sifat-sifat baik, kebaikan hati) dan potensi insani luar biasa (antara lain *passion*: semangat menggebu untuk melakukan sesuatu) yang belum seluruhnya dimanifestasikan ke dalam perbuatan nyata demi kemaslahatan diri, orang lain, maupun masyarakat luas. Kebajikan ini yang melandasi munculnya karakter yang baik dan kuat, sedangkan potensi insani bisa mendorong individu untuk memunculkan semua kebajikan dari dalam dirinya.

Revolusi mental yang dicanangkan Pemerintah RI yang baru dapat dikatakan sangat tepat untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan memiliki harkat hidup sebagai modal mencapai cita-cita bersama. Penggunaan istilah 'revolusi mental' sangat tepat, karena hal itu mengandung makna membangkitkan semangat

untuk membalikkan (*to turn around*) kondisi mental bangsa ini dari 'terpuruk' menjadi 'sangat terpuji'. Seyogyanya merupakan suatu upaya dan kerja keras untuk melakukan perubahan mendasar (*fundamental change*) terhadap mental bangsa yang memerlukan kesediaan sepenuh hati, keterlibatan secara aktif, serta kerja keras berkesinambungan dari semua pihak untuk membangun 'budaya baru' yang dilandasi nilai-nilai luhur bangsa serta kearifan lokal yang tetap relevan untuk menjadi pemersatu kebhinnekaan bangsa Indonesia.

Sejak Orde Baru berkuasa, dapat dikatakan bahwa kebiasaan berperilaku anak bangsa ini mulai berkembang ke arah yang salah, makin lama makin jauh menyimpang dan meninggalkan budaya bangsa yang agung, bangsa yang memiliki martabat (*human dignity*), harga diri (*self-esteem*), dan harkat hidup (*virtuous life*). Kondisi seperti ini sungguh amat memprihatinkan. Bahkan menurut penulis sudah sangat mengerikan, karena hal itu akan mendasari pembangunan karakter bangsa ke arah yang makin buruk. Apabila keadaan itu dibiarkan terus dan tidak dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengembalikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal itu sebagai landasan filosofis untuk membangun kembali budaya bangsa, maka bisa sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini di masa depan.

Tulisan ini ditekankan pada "revolusi mental" dalam suatu organisasi kerja yang bisa mengarah pada upaya mengembangkan anggotanya menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Fondasi pengembangan karakter adalah nilai-nilai luhur yang diyakini "kebenaran"-nya, sehingga bisa menjadi landasan membangun kebiasaan yang mewujud ke dalam perilaku nyata.

Benarkah nilai-nilai luhur bangsa memudar?

Setelah Era Orde Baru digantikan oleh Era Reformasi tampaknya juga tidak memberikan harapan yang cerah bagi bangsa Indonesia, bahkan kebebasan yang diharapkan memberi rahmat dan kebaikan justru tidak terjadi. Banyak perilaku 'Pejabat Publik' (bukan Pelayan Publik) termasuk pengusaha swasta bertindak kebablasan, tanpa memperhatikan etika-moral serta kehormatan diri dan bangsa serta melakukan perbuatan tercela. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) makin merajalela serta dilakukan secara 'berjamaah' tanpa ada rasa sungkan dan malu sama sekali. Kekayaan materi seolah-olah merupakan tujuan utama dalam kehidupan. Memiliki dan memamerkan harta kekayaan yang berlebihan tanpa melihat penderitaan yang dialami masyarakat, merupakan "kebanggaan" bagi kebanyakan orang. Melihat kenyataan yang terjadi tersebut, tampaknya kebiasaan baik

yang melambangkan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal sudah mulai memudar, bahkan cenderung menghilang.

Kementerian Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa ada 18 nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan karakter Bangsa Indonesia, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Kemendiknas, 2010). Nilai-nilai ini menjadi dasar utama untuk membangun karakter yang kuat dan budi pekerti luhur pada anak didik, mulai dari Sekolah Dasar (termasuk Taman Kanak-kanak) sampai dengan Perguruan Tinggi.

Di bawah ini akan disampaikan pengamatan penulis terhadap beberapa nilai luhur yang tampak memudar. Nilai-nilai tersebut banyak berkaitan dengan kearifan lokal yang tercermin dari makna pepatah/peribahasa dari beberapa daerah. Nilai-nilai di bawah ini tidak persis sama dengan yang dari Kemendiknas.

1. Religius, misalnya, *urip ana sing nguripake* (Jawa: hidup manusia karena ada Tuhan yang menghidupi) dan *eling sangkan paraning dumadi* (Jawa: manusia harus selalu menjaga sikap dan perbuatannya dan harus siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama hidupnya). Seharusnya manusia selalu ingat pada Sang Pencipta, sehingga ajaran agama apa pun bisa menjadi pedoman menjalani hidup yang lebih baik: menjalankan apa yang diperintahkan-Nya dan menghindari apa yang dilarang-Nya. Semua keberhasilan dan rezeki halal yang kita terima maupun penderitaan dan musibah yang kita alami pada hakikatnya merupakan rahmat-Nya, sehingga patut selalu disyukuri (selalu bersikap optimis) dalam menghadapinya.
   Nilai religius ini merupakan salah satu nilai yang digunakan sebagai landasan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengembangan karakter bangsa dan diletakkan pada urutan pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengembangkan seperangkat Tata Nilai bagi lembaganya, yang salah satunya adalah Nilai Religius, yang harus diserap dan dilakukan oleh semua anggotanya. KPK juga menempatkan Nilai Religius ini pada urutan pertama.
   Apakah ada keteladanan para Pemimpin Bangsa di semua bidang kehidupan yang terlihat menjalankan Nilai Religius ini secara konsisten? Keteladanan bukan pada perilaku ketaatan menjalankan ibadah yang bersifat ritual, melainkan pada semua perilaku yang mencerminkan bagaimana kita menjalani semua aspek kehidupan sehari-hari secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai religius.

2. Bersyukur, ini berkaitan dengan Butir 1 di atas (Religius). Misalnya, apabila mengalami/melihat suatu kecelakaan, sering terdengar orang mengatakan *"untung tidak meninggal"* (jika korban terluka berat) atau *"untung meninggal, kalau hidup akan menderita cacad seumur hidup"* (apabila korban meninggal). Orang yang memiliki rasa syukur akan lebih mudah menerima apa pun yang menimpanya serta memberi apa pun yang dimilikinya kepada maupun berbagi dengan orang lain. Hal ini tergambar dari pepatah *narima ing pandum* (Jawa: bersikap menerima apa pun rezeki yang diperoleh) dan *lamak dek awak, katuju di urang* (Minang: enak bagi kita, juga enak bagi orang lain).

   Ketiadaan rasa syukur bisa memunculkan rasa tamak. Orang tidak akan pernah merasa puas terhadap apa pun dan berapa pun jumlah materi yang diperolehnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa orang bisa "menghalalkan segala cara" dalam upaya mencapai atau mendapatkan sesuatu, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta hal-hal lain yang lebih banyak diwarnai 'egoisme', yaitu sikap dan tindakan mementingkan diri, yang bisa diperluas menjadi mementingkan keluarga maupun kelompok/golongan. Konsekuensinya adalah bahwa kepentingan bersama sebagai bangsa dan kepentingan nasional menjadi dinomorduakan atau bahkan sama sekali diabaikan.

3. Jujur, artinya tidak berbohong dan tidak curang dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Hal ini berkaitan erat dengan Nilai Integritas, yaitu sikap yang secara konsisten menunjukkan satunya kata dan perbuatan. Misalnya, *sing jujur mujur* (Jawa: yang jujur akan mendapat keberuntungan), *becik ketitik, ala ketara* (Jawa: perbuatan baik maupun buruk akan tampak nyata).

   Banyak lembaga pemerintah dan perusahaan, baik swasta maupun BUMN, mencantumkan Integritas sebagai salah satu butir dalam Tata Nilainya, yang dalam artikulasinya tersurat dan tersirat kejujuran. Dalam beberapa hal sering Jujur dan Integritas disatukan menjadi Jujur-Berintegritas. Apakah Jujur-Berintegritas dalam Tata Nilai itu benar-benar dilaksanakan dalam keseharian atau hanya merupakan *Words On The Wall* (WOW) semata? Walaupun memiliki Tata Nilai Integritas, banyak lembaga tidak melakukan upaya internalisasi kepada seluruh anggotanya. Bahkan sering terjadi Pimpinan Lembaga tersebut, baik pemerintah maupun swasta, menunjukkan perilaku yang "bertentangan" atau "berseberangan" dengan nilai Integritas tersebut.

4. Rasa Malu, dalam Bahasa Jawa sebenarnya lebih berkaitan dengan *wirang* (bukan*isin*), yaitu rasa malu bahwa perbuatan buruknya diketahui orang banyak. Leluhur kita akan merasa malu kalau melakukan perbuatan tercela maupun melanggar etika, apalagi yang berkaitan dengan moral dan/atau kriminal. Bahkan berlaku kurang santun saja merasa malu, apalagi jika diketahui berhutang. Memiliki hutang dianggap sebagai suatu aib,

sehingga yang bersangkutan berupaya keras agar orang lain tidak mengetahuinya. Dari tayangan televisi terlihat para koruptor tidak memiliki rasa malu. Mereka masih bisa melambaikan tangan dan tertawa cerah. Dapat diamati pula perilaku pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang arogan, pamer kekuasaan dan kekayaan, serta tidak melayani masyarakat tetapi malah minta dilayani. Rupanya mereka tidak mengenal lagi pepatah *harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama*.

5. Kerja Keras, misalnya, dari peribahasa *berakit-rakit ke hulu dan berenang-renang ke tepian* (bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian), *sapa ubet, ngliwet* (Jawa: siapa yang kreatif akan mendapatkan hasil), *jer basuki mawa beya* (Jawa: keberhasilan menuntut kerja keras), dan *sepi ing pamrih, rame ing gawe* (Jawa: kerja keras tanpa syarat, yang maknanya menggambarkan etos kerja dan semangat pengabdian).
   Hal ini menggambarkan bahwa kerja keras dan produktif serta kerja cerdas secara kreatif telah dilakukan oleh leluhur kita. Ki Hajar Dewantara pernah mengungkap 3N: *niteni, nirokke, nambahi* (memperhatikan, meniru, menambahi) yang tanpa disadari hal itu merupakan proses untuk melakukan inovasi. Pepatah Minang *takuruang nak di luar* (terkurung mau di luar), *taimpik nak di ateh* (terhimpit mau di atas), dan *baduo nak di tengah* (berdua mau di tengah) menunjukkan kecerdikan dan kemauan untuk memikirkan gagasan berbeda yang dianggap mustahil dilakukan.
   Untuk meraih keberhasilan kita perlu belajar serta bekerja keras dan cerdas, bukan mencari jalan pintas ('budaya instan') yang menghalalkan segala cara. Hal ini sekaligus mengungkap kesadaran bahwa 'imbalan' bukan merupakan tujuan, melainkan merupakan konsekuensi dari apa yang dikontribusikan. Jika hal ini merupakan filosofi yang mendasari setiap kegiatan, maka apa pun yang dilakukan akan menyenangkan serta dilakukan dengan penuh semangat dan setulus hati. Bukankah sampai saat ini masih banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk meraih gelar sarjana, master, dan doktor? Juga untuk naik pangkat serta mendapatkan jabatan dalam kerja? Di dunia bisnis banyak yang melakukan suap dan memberikan gratifikasi, di samping lebih senang sebagai "pemburu rente" (*rent seeker*) yang bisa mendapatkan keuntungan tanpa kerja?
   Pertanyaan yang mendasar adalah: Apakah kita semua sudah memberikan kontribusi terbaik dan berprestasi jauh melampaui harapan diri sendiri, harapan lembaga, maupun harapan masyarakat? Atau malahan tidak produktif, tidak ingin belajar, hanya meminta atau bahkan menuntut sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita? Kita tidak akan menjadi bangsa besar sejajar dengan bangsa negara maju apabila hanya memberi kontribusi sesuai standar atau target yang ditetapkan, tidak mau belajar dan tidak

melakukan perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*:hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini).

6. Bertanggung Jawab, misalnya, *melu handarbeni, wajib hangrungkebi* (Jawa: merasa ikut memiliki dan wajib memegang teguh komitmen), *memayu hayuning bawana* (Jawa: menjaga keselamatan dan kelestarian bumi), dan tidak*tinggal glanggang, colong playu* (Jawa: tidak lepas tangan dari tanggung jawab). Hal ini berkaitan dengan reputasi (bukan citra) dan kehormatan diri seseorang yang menunjukkan bahwa orang itu bukan pengecut (*lempar batu sembunyi tangan*) dan memiliki akontabilitas tinggi, berani mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya. Dalam belajar, bekerja, dan berprestasi orang diharapkan akan memberikan kontribusi yang jauh melampaui harapan diri, lembaganya, maupun masyarakat luas, dan akan menyelesaikannya secara tuntas tanpa cela.
   Apakah kita sudah menjaga efektivitas dan efisiensi kinerja pribadi maupun kinerja lembaga kita dikaitkan dengan aspek kualitas yang dihasilkan, biaya dan waktu yang digunakan, serta manajemen pribadi?

7. Rasa Hormat (Respek), kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, misalnya, *sitou timou tumou tou* (Minahasa: orang hidup memuliakan orang lain), menjauhkan diri dari sikap *adigang, adigung, adiguna* (Jawa: sombong karena kekayaan dan pangkat, sombong karena kepandaian dan kepintaran, sombong karena keberanian dan kepintaran berdebat). Pemimpin sejati adalah orang yang memiliki karakter yang baik dan kuat serta mempunyai kompetensi tinggi, namun bersikap rendah hati dan merasa bahwa keberhasilannya merupakan keberhasilan bersama yang didukung seluruh anggotanya (bagaikan ilmu padi, *makin berisi, makin merunduk*). Pada masa lalu hal ini ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang dengan menyamar sebagai rakyat biasa, sering membantu rakyatnya tanpa mereka menyadari bahwa yang membantunya adalah rajanya sendiri. Sebagai Raja, beliau benar-benar mencerminkan bahwa "Tahta untuk Rakyat".
   Apakah kita sering mengungkapkan, baik sadar maupun tidak sadar, bahwa diri, kelompok, atau golongan kita yang paling baik, paling hebat, dan paling benar? Bukankah itu berarti tidak menghormati pribadi, kelompok, atau golongan lain? Sampai sekarang hal ini masih terjadi, terutama yang berkaitan dengan SARA.

8. Empati dan Peduli (terhadap orang lain dan semangat Gotong Royong untuk membangun bersama), misalnya, *tepa slira* (Jawa: pandai menempatkan diri pada perasaan orang lain), *silih asih, silih asah, silih asuh* (Sunda: saling mengasihi, saling belajar, saling menjaga), dan *bajalan paliharolah kaki, maliek paliharolah mato* (Minang:

perilaku hendaklah diawasi, jangan sampai merusak perasaan orang lain). Melalui empati dan rasa peduli ini bisa dibangkitkan kerja sama sinergis yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif, tulus, dan sepenuh hati. Seperti, *lamak dek awak katuju dek urang* (Minang: enak di saya, sama enak di orang lain), *tuna satak, bathi sanak* (Jawa: rugi sedikit, namun beruntung mendapat sahabat), *rim ni tahi do gogona, rantosna do tajomna* (Batak: pada persatuan dan kesatuan, terletak kekuatan), dan *berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.*

9. Kebersamaan – Bahasa Indonesia mengenal kata KITA (*inclusive WE*) dan KAMI (*exclusive WE*). Kelompok-kelompok dalam masyarakat mudah terpancing ke arah ke-KAMI-an, sehingga mudah diadudomba dan berbenturan satu sama lain, termasuk organisasi politik maupun kemasyarakatan. Kelompok lain dianggap bukan bagian dari kelompoknya, tidak mau melihat pada kepentingan bersama dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Mungkin ini akibat dari politik *divide et empera* di Era Penjajahan, misalnya pembagian "peringkat kewarganegaraan" (warga negara kelas 1 adalah Orang Barat dan Jepang, warga negara kelas 2 adalah warga negara Keturunan Asing, dan warga negara kelas 3 adalah Pribumi/penduduk asli), di samping "pengelompokan lokasi hunian" sesuai kelompok etnis seperti Kampung Ambon, Kampung Bugis, Kampung Jawa, Kampung Arab, Pecinan, dsb. Sebagai warga negara Indonesia seharusnya menyadari bahwa kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi maupun egoisme kelompok/golongan/partai.

   Pepatah *rukun agawe sentosa* (Jawa: kerukunan membuat jadi kuat) yang terwujud dalam semangat bergotong royong menggambarkan persatuan dalam kebhinnekaan. Kebhinnekaan Rakyat Indonesia dipersatukan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928, dengan kesadaran bersatunya organisasi Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, dsb. ke dalam "Satu Bangsa, Satu Tanah Air, dan Satu Bahasa". Semangat ini seharusnya menghindarkan perlakuan diskriminatif dan menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA.

   Walaupun demikian sampai saat ini masalah yang berkaitan dengan SARA masih ada, bahkan kondisi yang bersifat diskriminatif ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah belum bisa melindungi sebagian warga negaranya dari diskriminasi ini.

Pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Amerika Serikat juga menggunakan nilai-nilai yang pada dasarnya serupa. Walaupun kuantitasnya berbeda namun kualitasnya lebih kurang serupa dengan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam peradaban manusia, nilai-nilai ini banyak yang bersifat universal, sekalipun

penerapannya bisa tidak persis sama, bergantung pada konteks budaya dan adat-istiadat bangsa yang bersangkutan. Sejak Era Orde Baru yang hilang adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan pilihan pribadi dan budi pekerti, padahal keduanya merupakan pendukung untuk membangun karakter kemandirian dan etika-moral anak bangsa ini. Padahal semua nilai luhur itu penting, saling melengkapi, saling menguatkan, dan merupakan landasan utama untuk membangun karakter yang baik dan kuat bagi bangsa, baik karakter sebagai pribadi maupun karakter sebagai warga negara.

Akontekstual dan Ahistoris?

Dalam pendidikan, khususnya pembangunan karakter bangsa, hal tersebut merupakan pertanyaan yang mendasar dan sangat penting untuk dikaji serta ditemukan jawabannya. Apabila kita kembali ke pendidikan keluarga, banyak orang-tua kurang memahami perlunya memberikan konteks dalam penjelasannya terhadap hal-hal yang dialami anak. Mereka tidak bisa disalahkan, karena dari orang-tuanya mereka juga kurang mendapatkan pemahaman kontekstual terhadap pengalaman masa lalunya. Pendidikan keluarga kurang memberikan pemahaman dan penyadaran tentang "mengapa" suatu perilaku itu baik atau tidak baik dan "mengapa" perilaku tertentu boleh dilakukan (*the do's*) dan perilaku lain tidak boleh dilakukan (*the don'ts*). Artinya, tidak ada penjelasan yang bisa diterima oleh anak, bahkan banyak hal yang dianggap "tabu", sehingga orang-tua mempunyai alasan untuk "tidak harus menjelaskan".

Dengan alasan yang berbeda, misalnya karena kesibukan kedua orang-tua yang sama-sama bekerja, kedekatan emosional dan kebersamaan keluarga menjadi lebih jarang terjadi. Dampak globalisasi juga bisa dijadikan alasan, karena semua anggota keluarga sibuk dengan perangkat elektronik masing-masing, seolah-olah mereka "ada tetapi tiada" bagi anggota keluarga yang lain. Konversasi sering menjadi sangat singkat dan tidak mengandung muatan kedekatan emosional satu sama lain, apalagi membangun konteks suasana keluarga yang benar-benar menciptakan *"home sweet home"*. Ruang keluarga menjadi "ruang *zombie*", masing-masing anggota keluarga asyik dengan kesibukannya sendiri. Jangankan memberikan konteks terhadap hal-hal yang dibicarakan bersama, konversasi dalam arti yang sebenarnya juga jarang terjadi dan biasanya berlangsung singkat.

Pendidikan sejarah di sekolah lebih banyak menyampaikan fakta yang terjadi, kurang menggali "mengapa" peristiwa itu bisa terjadi dan "bagaimana jika" penyebabnya berbeda atau kejadian itu berubah menjadi kejadian yang berbeda. Jika diarahkan untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana jika", maka hal itu akan merangsang berpikir,

mengundang renungan, dan menemukan makna yang lebih dalam pada siswa. Demikian juga dengan materi-materi lain di pendidikan dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah guru dan dosen memang siap dengan cara-cara seperti itu, karena guru dan dosen juga harus memahami latar belakang dan konteks dari setiap peristiwa atau pengetahuan yang disampaikan kepada siswa dan mahasiswanya.

Pada zaman penjajahan di masa lalu, bangkitnya pendidikan nasional Taman Siswa yang lepas dari pengaruh Pemerintah Hindia Belanda, sebenarnya merupakan cikal bakal upaya untuk mengaitkan pendidikan dengan sejarah dan konteksnya, yaitu penyadaran jati diri sebagai Bangsa Indonesia. Munculnya istilah Pamong, bukan Guru, memberikan penekanan bahwa Pamong harus menyiapkan diri berhubungan dengan muridnya 24 jam sehari, sehingga lebih berfungsi sebagai Mentor yang membantu pengembangan pribadi murid. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan beberapa konsep, antara lain *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa,* dan *tutwuri handayani*, yang kemudian disingkat dan hanya diambil yang paling belakang (namun pengertiannya mencakup ketiga-tiganya) untuk dijadikan *motto* dalam Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu *tutwuri handayani*.

Untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa, yang sebenarnya sudah ada pada diri tiap orang Indonesia, penulis ingin menggambarkan proses bagaimana membangun budaya organisasi yang hidup.

Membangun Budaya Organisasi yang Hidup

Berikut ini penulis ingin berbagi pengalaman membangun manusia berkarakter dan berbudi pekerti luhur dalam skala organisasi. Berdasarkan pengalaman penulis sejauh ini, upaya membangun "budaya organisasi yang hidup" di lingkungan perusahaan tidak mudah serta memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang.

Prosesnya diawali dengan Survai Budaya Kerja untuk "memotret" organisasi tersebut menurut persepsi anggotanya, baik jajaran direksi, manajer, maupun staf pelaksana. Dari survai itu dapat diketahui persepsi anggota terhadap: (1) dimensi budaya kerja yang ada, (2) iklim kerja yang dirasakan, (3) perilaku manajerial, (4) kualitas potensi intelektual dan potensi etikal, serta (5) perilaku pemimpinnya. Hasilnya disajikan kepada *Board Of Director* (BOD), dan apabila perlu juga kepada *Board Of Commissioner* (BOC), untuk mendapatkan klarifikasi dan verifikasi tentang "kebenaran" hasil survai. Jika dikehendaki, hasil itu bisa pula dipresentasikan kepada "Lapis Kedua" (Manajemen satu tingkat di bawah BOD), atas

persetujuan BOD, agar mereka mendapatkan pemahaman (*insight*) yang sama atas persepsi anggota terhadap organisasinya.

Berdasarkan hasil survai itu, BOD menyepakati dan bersama-sama menentukan arah pengembangan budaya organisasi, sehingga program membangun budaya baru yang hidup dapat disesuaikan dengan konteks organisasi *(customized)*. Pada tahap awal dilakukan pengembangan "landasan berpijak bersama" (*common platform*) terhadap BOD maupun "Lapis Kedua" yang akan menjadi Tim Khusus untuk membahas substansi dan menyusun Falsafah, Visi, Misi, dan *Values* (FVMV) organisasi secara kokreasi. Artinya, FVMV bukan bersifat *top-down* dari BOD maupun BOC, tetapi substansinya dibahas oleh Tim Khusus bersama BOD. Adakalanya BOD bahkan menyerahkan sepenuhnya penyusunan FVMV itu kepada Tim Khusus, namun sekali-sekali Tim Khusus melakukan *sensing* kepada BOD tentang perkembangan kemajuan yang dicapai atau meminta masukannya. Seluruh substansi dan isi FVMV benar-benar berasal dari Tim Khusus, penulis hanya memfasilitasi, mengajukan pertanyaan yang bersifat menstimulasi, serta selama pembahasan akan selalu mempertanyakan, melakukan klarifikasi, dan adakalanya bersifat menantang (*challenge*). Semuanya dikembalikan pada keyakinan terhadap hal-hal yang dibahas dan pada nilai-nilai yang mereka yakini. Setelah FVMV tersusun, terutama yang berkaitan dengan *Values*, pada umumnya mereka "tercengang", karena ternyata hal itu merupakan nilai-nilai luhur yang sudah ada pada diri mereka dan diyakini "kebenaran"-nya. Pada saat itu mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki kekuatan kebajikan yang selama ini terpendam dan belum terekspresikan keluar.

Setelah FVMV disusun dan disepakati bersama, maka kewajiban BOD adalah menyosialisasikannya kepada seluruh anggota organisasi sampai pada Lapisan Paling Bawah, bahkan sampai pada tenaga kerja kontrak, agar semuanya memiliki sikap dan menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi yang dikembangkan. Program pengembangan kepemimpinan dan keanggotaan dijalankan dengan mengacu pada model berikut:

- Kepemimpinan Transformasional: menggugah semangat anggota agar bersedia memunculkan potensi insani secara maksimal di lingkungan kerja yang bergejolak dan selalu berubah.

- Kepemimpinan Sinergistik: membangun kerja sama untuk mencapai hasil jauh melampaui harapan dari keanekaragaman potensi insani anggota.

- Kepemimpinan Visioner: mengarahkan anggota menerawang ke masa depan, sehingga bisa mengatur pemanfaatan energi sinergik untuk mewujudkan cita-cita bersama.

- Program Keanggotaan Transformasional: menggugah semangat anggota agar bersedia mengubah diri guna memunculkan potensi insani secara maksimal di lingkungan kerjanya.
- Program Kewargaan Korporat (*Corporate Citizenship*): menggugah kesadaran anggota untuk memahami FVMV organisasi dan bersedia memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian cita-cita bersama.
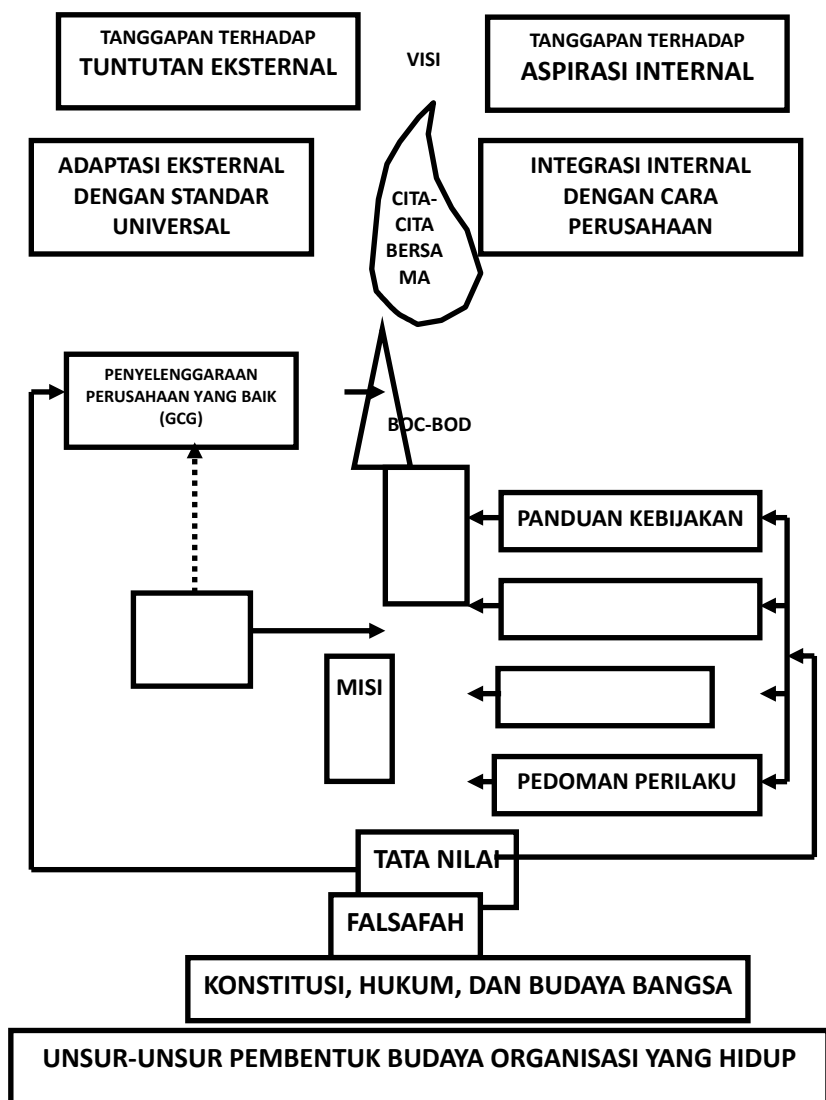
Gambar 1 Bagan Membangun Budaya Yang Hidup

Semua program itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan *experiential learning*, artinya anggota belajar dari pengalaman pribadi maupun pengalaman yang dialami bersama yang terjadi pada saat dan di tempat program berlangsung (*outdoor* maupun *indoor*). Anggota saling berbagi (*sharing*) pengalaman bersamanya dan mengaitkannya dengan kegiatan kerja di organisasinya, sehingga secara bersama-sama mereka memiliki *insight* terhadap apa yang akan mereka perbaiki dan kembangkan pada saat mereka kembali ke tempat kerja.

Pada setiap sesi ceramah, *exercise, game*, pemutaran *video clip*, dan diskusi selalu dikaitkan dengan tata nilai yang telah disepakati bersama. Di samping itu juga disisipkan pepatah/peribahasa dari berbagai daerah yang sesuai dengan tata nilai tersebut. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan ketulusan hati untuk berbakti pada negara di manapun mereka bekerja, pada awal program bersama-sama menyanyikan "Indonesia Raya" dan pada akhir program menyanyikan "Bagimu Negeri".

Proses selanjutnya adalah menyusun Panduan Kebijakan (*Policy Guideline*) sebagai payung dari semua kebijakan organisasi, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pegangan semua anggota bersikap dan berperilaku sesuai dengan tata nilai, di samping perangkat sistemnya. Melalui Pedoman Perilaku itu bisa dibangun perilaku dan kebiasaan baik, karena mereka bisa saling mengingatkan apabila ada perilaku yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku.

Menghadapi "tuntutan eksternal" diperlukan *Good Corporate Governance* (GCG = Penyelenggaraan Korporat Yang Baik) yang biasanya bersifat universal; sedangkan menghadapi tantangan "aspirasi dari dalam" diperlukan integrasi internal dengan cara yang khas korporat itu sendiri. Pendekatan yang digunakan adalah Psikologi Positif (*Positive Psychology*), yaitu lebih banyak menggali aspek kekuatan yang ada pada setiap orang, bukan melihat pada kelemahan/kekurangannya. Asumsinya adalah: "mereka orang normal yang bisa berkembang menjadi orang yang luar biasa".

Terapan Pada Diri dan Komunitas

Berbeda dengan hewan, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan (*freedom of choice*) terhadap perilakunya. Manusia bisa memilih menjadi orang yang selalu bersyukur dan berbuat kebaikan atau sebaliknya memilih menjadi manusia yang selalu mengeluh dan berperilaku buruk. Karakter yang kuat dan berbudi pekerti luhur ditentukan atas dasar pilihan cara hidup, yaitu:

- Menyukai tantangan dan berani menghadapi situasi sulit, atau justru selalu berupaya menghindarinya.
- Saat menghadapi dilema etika-moral, tetap bertahan pada karakter dan berpegang pada nilai-nilai luhur walau menghadapi penderitaan, atau melakukan kompromi dan membengkokkan kebenaran demi memperoleh kesenangan dan kenyamanan.
- Dalam kehidupan lebih banyak berjuang keras untuk mencapai tujuan (*there's no free lunch*), atau menempuh jalan pintas dan menghalalkan segala cara.

Pertanyaannya: Kita termasuk yang mana? Pilihan ada pada diri kita sendiri. Untuk mengubah diri sebaiknya berpegang pada *motto***4S**, yaitu: (1) mulai dari **S**aya (dimulai dari diri sendiri), (2) **S**ekecil apa pun (perubahan sekecil apa pun sangat bermakna), (3) **S**ekarang juga (mulai saat ini juga, tidak ditunda-tunda), dan (4) **S**ampai kapanpun (melakukan perubahan ke arah yang lebih baik setiap saat sampai kita mati). Kendali untuk mengubah diri berada di tangan kita sendiri, namun kita tidak bisa mengubah orang lain kecuali orang itu bersedia mengubah dirinya. Kita bisa memfasilitasi dan mengilhami orang lain untuk berubah dengan mengubah perilaku kita dalam berhubungan dengan orang itu, namun keputusan untuk mengubah dirinya tetap dalam kendali orang tersebut. Untuk memfasilitasi dan mengilhami perubahan pada orang lain, seyogyanya kita telah "melakukan apa yang kita katakan dalam perilaku nyata". *Walk the talk* (satunya kata dan perbuatan) merupakan kunci utama untuk memperoleh rasa percaya dari orang lain dalam komunitas yang dibantu. Di samping itu perlu disertai ketulusan hati dan jiwa sukarelawan, artinya semua yang kita lakukan bagi orang lain merupakan upaya tanpa pamrih serta penuh semangat, kesabaran, dan keteguhan hati. Hal ini tidak mudah, namun bisa dilakukan jika kita mau mengeluarkan semangat tinggi dan memang bersedia berbagi kebajikan demi kebaikan komunitas di lingkungan kita. *Courage is contagious, but discourage is contagious too*.

Untuk membantu memfasilitasi dan mengilhami suatu organisasi/komunitas untuk berubah, seyogyanya kita melakukan 3 (tiga) tahapan kepemimpinan berikut:

1. Mengubah diri terlebih dahulu (*ing ngarsa sung tulada*: memberi keteladanan). Hal ini sejalan dengan Program Kepemimpinan Transformasional, yaitu diperlukan keteladanan dan contoh dalam bentuk perilaku nyata guna membangkitkan semangat diri dan warga komunitas agar memunculkan potensi insaninya secara maksimal.
2. Bersedia untuk terjun langsung di dalam organisasi/komunitas itu (*ing madya mangun karsa*: membangkitkan semangat dan membangun etos kerja/etos belajar mereka).

Hal ini sejalan dengan Program Kepemimpinan Sinergistik, yaitu adanya kesadaran bahwa kerja sama cerdas bisa mencapai hasil jauh melampaui harapan.

3. Memberi kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan proses perubahannya sendiri (*tutwuri handayani*: memberi kesempatan mereka berjuang sendiri demi meraih kemandiriannya). Hal ini sejalan dengan Program Kepemimpinan Visioner, yaitu warga komunitas sudah mulai bisa memanfaatkan energi sinergisnya untuk mewujudkan cita-cita yang disepakati bersama.

Penutup

- Sebagai penutup tulisan ini, marilah secara jujur kita bertanya kepada diri sendiri:
- Apakah kita bersedia mengubah diri dan membangun karakter yang baik dan kuat terlebih dahulu? Bisakah integritas pribadi kita diandalkan oleh organisasi/komunitas yang ingin dibantu?
- Apakah kita bersedia memfasilitasi dan menginspirasi suatu organisasi/komunitas tertentu? Mengapa harus organisasi/komunitas itu yang dibantu, bukan yang lain?
- Apakah kita bersedia untuk melakukan ketiga tahapan kepemimpinan tersebut di atas (*ing ngarsa sung tulada/*kepemipinan transformasional*, ing madya mangun karsa/*kepempimpinan sinergistik*, tutwuri handayani/*kepemimpinan visioner) bagi organisasi/komunitas yang dibantu? Mengapa harus model itu? Bagaimana jika menggunakan model lain?
- Apakah kita bisa melakukannya secara sukarela dan tanpa pamrih, bahkan kadang-kadang harus "memberikan" waktu, tenaga, pikiran, bahkan adakalanya dana? (Walaupun dalam beberapa kasus bisa menerima imbalan, namun imbalan itu seyogyanya dianggap sebagai "konsekuensi dari kontribusi" yang dilakukan, bukan menjadi tujuan utama).
- Mungkinkah hal itu merupakan "panggilan hati" (*a call*) sehingga kita bisa merasa bahagia "berbagi" apa saja dengan perseorangan, organisasi, maupun komunitas yang dibantu?

Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran dan inspirasi tentang bagaimana membantu suatu organisasi/komunitas untuk berubah dan menciptakan budaya organisasi/komunitas yang hidup. Pada saat yang sama sekaligus menstimulasi

pembaca dan warga masyarakat agar menyadari bahwa mereka memiliki potensi insani yang luar biasa dan kekuatan kebajikan serta bersedia bersikap dan berperilaku yang mencerminkan karakter yang kuat dan budi pekerti luhur.

Daftar Acuan

Herusatoto, B. (2000). *Simbolisme dalam budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.

Fernanda, D., & Hendrojuwono, W. (2014). *PNS sebagai pengawal negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Modul Prajabatan CPNS Golongan 3 dan 2.

Suseno, F.M., & Reksosusilo, S. (1983). *Etika Jawa dalam tantangan: Sebuah bunga rampai*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

Hartanto, F.M. (2009). *Paradigma baru manajemen Indonesia*. Bandung: Mizan.

Adipurnomo, H. (2012). *Nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa*. Diunduh dari Just another WordPress.com site.

Sudjamoko, I. (2013). *Sejarah Taman Siswa*. Instagram@seberkassejarah.

Darlene, M. (2002). *Character building: Activities for kids*. San Fransisco: Jossey-Bass.

Sastroatmodjo, S. (2006). *Citra diri orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

Endraswara, S. (2003). *Budi pekerti dalam budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.

31
Revolusi Mental Wirausaha dalam Globalisasi Dunia

Benedicta Prihatin Dwi Riyanti

Pendahuluan

Kita sekarang adalah bagian dari dunia yang mengglobal. Aspek paling signifikan dari dunia global ini adalah kita tidak bisa lagi menolak perubahan, kita harus merangkulnya. Wirausaha perlu mengembangkan serangkaian nilai baru berdasar pada perubahan yang terjadi.

Nilai baru ini dicirikan oleh satu perubahan dari struktur, hirarki, peraturan, dan menuju pada pemenuhan otonomi, kesamaan, kebebasan, dan komitmen. Wirausaha sebagai pemilik usaha perlu menjadi sangat tanggap dan adaptif. Mereka perlu menanggapi pasar dengan cepat dan efisien. Wirausaha perlu menjadi tempat di mana kebebasan berfikir dan gagasan baru sangat dihargai, di mana karyawan-karyawan yang bekerja menyumbang pada capaian usaha yang tinggi, dapat membuat keputusan, dapat menambah nilai dan mencoba sesuatu yang baru.

Wirausaha perlu bersikap proaktif dalam menghadapi perubahan. Sikap wirausaha yang menerima perubahan sebagai hal yang alami yang memang dirasakan oleh semua pihak membantu menjadi penentu perubahan bukan mengikut perubahan. Sikap proaktif menghadapi perubahan ini sangat penting karena pada tahun 2015, perdagangan bebas ASEAN (AFTA) akan berlaku. Pada saat itu tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif` bagi negara-negara anggota ASEAN. Ini akan menciptakan iklim bisnis yang semakin kompetitif pada dunia bisnis di Indonesia. Situasi ini harus dihadapi bangsa Indonesia juga para wirausahanya.

Pada saat yang bersamaan, Indonesia sedang memasuki babak baru pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemerintahan baru ini melakukan perubahan arah pembangunan yang memprioritaskan pengelolaan

sumber daya laut, pembangunan pedesaan dan penguatan ekonomi rakyat (Tedjakusuma, 2014). Perubahan prioritas pembangunan ini akan memberi peluang bagi dunia usaha. Masalahnya adalah apakah kalangan bisnis khususnya wirausaha skala kecil dan menengah mampu menangkap peluang ini dan memanfaatkannya untuk membangun usaha?

Untuk mampu menghadapi perubahan para wirausaha harus mempersiapkan diri untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif sebagai prasyarat untuk bersaing dalam arus globalisasi yang kuat. Keunggulan kompetitif akan dapat dicapai dengan menghasilkan karya berkualitas yang dapat memenuhi atau melebihi persyaratan yang diperlukan untuk memasuki pasar global (Natalia, 2014). Pada AFTA tahun 2015, wirausaha di Indonesia dituntut tidak hanya memposisikan dirinya sebagai pemain lokal, tetapi juga global. Target pasar para wirausaha tidak hanya 250 juta rakyat Indonesia, tetapi 600 juta penduduk ASEAN. Oleh karena itu, kemampuan daya saing menjadi sangat diperlukan dalam hal ini.

Untuk memiliki keunggulan kompetitif diperlukan wirausaha yang tangguh. Wirausaha yang tangguh dicirikan oleh sejumlah sifat unggul yang melekat dalam dirinya dan memberi kontribusi pada keberhasilannya dalam mengelola usaha. Adanya sifat unggul wirausaha sudah dibahas sejak lama dalam literatur kewirausahaan. Misalnya, karakteristik utama pada wirausaha berhasil menurut Spencer dan Spencer (1993) meliputi: (1) inisiatif, (2) melihat dan memanfaatkan peluang, (3) ketekunan, (4) mencari informasi, (5) fokus pada tingkat kinerja yang tinggi, (6) komitmen pada pekerjaan, (7) orientasi pada efisiensi, (8) perencanaan yang sistematis, (9) pemecahan masalah, (10) kepercayaan diri, (11) kemampuan persuasif, (12) strategi untuk memengaruhi, dan (13) ketegasan.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian mereka Zimmerer dan Scarborough (1998) menemukan ciri-ciri wirausaha yang berhasil, meliputi: bertanggung jawab, menyukai risiko, yakin akan kemampuan untuk mencapai keberhasilan, menginginkan umpan balik segera, energi yang tinggi, orientasi ke masa depan, keterampilan mengelola, lebih menghargai prestasi daripada uang, komitmen yang tinggi terhadap ketidakpastian, dan fleksibel atau luwes yaitu kemampuan beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Di Indonesia sendiri, Sukardi (1991) juga melakukan penelitian kewirausahaan. Ia menemukan ada sembilan sifat yang muncul pada wirausahawan. Sembilan sifat unggul yang ada pada wirausaha itu adalah sifat instrumental, sifat prestatif, sifat keluwesan bergaul, sifat kerja keras, sifat keyakinan diri, sifat pengambilan risiko yang diperhitungkan, sifat swa-kendali, sifat inovatif, sifat mandiri. Dari sembilan sifat wirausaha tersebut, Riyanti (2003) menemukan sifat inovatif berpengaruh langsung pada keberhasilan usaha. Sifat inovatif kembali diulang pada penelitian wirausaha industri kreatif (Riyanti, Cahayani & Sungkowo, 2013) dan ditemukan hasil yang sama bahwa sifat inovatif menyumbang pada

keberhasilan usaha. Penelitian Prasajaningsih (2014) menemukan pengaruh faktor gaya hidup, *psychological capital*, *individual talents* terhadap kesuksesan *entrepreneur.*

Namun permasalahannya adalah bagaimana mengembangkan wirausaha Indonesia agar memiliki keunggulan kompetitif ini? Pemerintah selalu mendorong dan mengupayakan peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia namun dalam kenyataan, peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia tidak signifikan. Jumlah wirausaha di Indonesia masih 1,56% dari total penduduk yang bekerja (BPS 2013, dalam entrepreneur.bisnis.com). Angka ini belum mencapai angka ideal yaitu 2% dari total penduduk yang bekerja. Padahal negara-negara lain di Asia Tenggara sudah mencapai 4% ke atas. Untuk itu perlu dilakukan langkah nyata dalam menyiapkan wirausaha menghadapi AFTA dan globalisasi dunia.

Konstruk Pembinaan Wirausaha

Jumlah wirausaha yang belum mencapai angka ideal di Indonesia bisa jadi berkaitan dengan pola pembinaan yang selama ini dijalankan. Kebanyakan pola pembinaan yang dilakukan pada wirausaha maupun calon wirausaha menekankan pada masalah penyaluran modal usaha, pemberian keterampilan teknis dalam hal produksi, manajemen maupun pemasaran. Pembinaan yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta jarang menekankan pada masalah mental wirausaha. Padahal masalah mental wirausaha menjadi penentu dalam keberhasilan usaha. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah mental wirausaha menyumbang kepada keberhasilan usaha (Meng & Liang, 1996; Riyanti, 2003; Riyanti, Cahayani & Sungkowo, 2013; Prasajaningsih, 2014).
Penulis mencoba menelaah pembinaan wirausaha dari mental wirausaha berdasarkan penelitian-penelitian yang penulis lakukan. Riyanti (2003) mulai melakukan pembinaan wirausaha melalui pelatihan perilaku inovatif pada wirausaha di berbagai sektor. Namun dengan berjalannya waktu, nampaknya bukan hanya sekedar perilaku inovatif saja yang perlu dilatihkan pada wirausaha. Dari wawancara dengan sejumlah wirausaha (Riyanti dan Suwartono, 2013) menemukan bahwa wirausaha yang berhasil biasanya karena mereka memiliki visi (tujuan) dalam menjalankan usaha, mereka juga memiliki disiplin yang tinggi, merasa memiliki kemampuan (*self-efficacy*) dan berkomitmen dengan pekerjaannya dan pantang menyerah. Untuk itu Riyanti dan Suwartono (2013) melakukan pengembangan alat ukur sifat unggul wirausaha. Alat ukur ini diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi keberhasilan usaha. Alat ukur dikembangkan dari temuan wawancara dan konstruk sembilan sifat unggul wirausaha Sukardi, perilaku inovatif-kreatif dari Kirton, *self efficacy dari* Bandura dan optimisme dari Seligman. Alat ukur sifat unggul wirausaha Riyanti dan Suwartono terdiri dari 90 item yang terbagi dalam 9 dimensi/faktor yaitu visi (orientasi

usaha), optimisme, motivasi, disiplin, kerja keras, mandiri, self-efficacy, kreatif-inovatif, luwes bergaul, dan kemampuan melihat peluang.

Alat ukur sifat unggul wirausaha Riyanti dan Suwartono (2013) diujicobakan pada 652 wirausaha skala kecil dan menengah yang tersebar di daerah Bangka, Jawa dan Bali. Rentang usia responden antara 18-72 tahun dengan rata-rata berusia 40.36 tahun. Ada pun pengalaman berwirausaha para partisipan bervariasi antara 2-30 tahun dengan rata-rata lama berwirausaha selama 11 tahun.

Analisis item dilakukan dengan memilih item terbaik yaitu membuang item-item yang memiliki *corrected item-total correlations* di bawah 0.4 dan ini menyisakan 52 item valid. Setelah itu dilakukan pengujian data dengan uji KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) dan *Barltlett's Test of Spericity* sebelum melakukan analisis faktor.

Hasil uji data didapatkan angka KMO sebesar 0,933 dan signifikansi dari Barltlett's Test of Spericity ada jauh di bawab 0.05 (p = 000). Ini menunjukkan bahwa item dan besar sampel sudah memadai untuk dilakukan analisis faktor.

Setelah dilakukan analisis faktor, diperoleh adanya 6 faktor sifat unggul wirausaha. Berikut ini merupakan definisi dari sifat unggul wirausaha:

1. Visi adalah suatu kemampuan seseorang untuk membayangkan hasil akhir dan menentukan inti persoalan dari proses yang (akan) ia jalani sehingga ia dapat membuat perencanaan yang bisa ia terjemahkan ke tindakan guna menyelesaikan persoalan dan mewujudkan hasil akhir yang telah ditetapkan.

2. Disiplin adalah suatu kecenderungan seseorang untuk berperilaku rajin, terkendali, dan tertata dalam mengelola usaha guna mewujudkan hasil akhir (visi) yang telah ditetapkan.

3. Kemandirian adalah suatu kepercayaan dalam diri seseorang bahwa ia dapat mengambil keputusan yang realistis dan tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam hal pengelolaan usaha, sehingga meskipun ia mengalami kegagalan, ia juga merasa percaya bahwa ia bisa bangkit dari upaya-upaya yang ia lakukan.

4. Ketajaman melihat peluang adalah suatu kemampuan seseorang untuk berinisiatif menemukan potensi usaha, menyesuaikan diri akan perubahan-perubahan yang ada, dan mengelola risiko yang ditemui dalam mewujudkan hasil akhir (visi) yang telah ditetapkan.

5. Motivasi usaha adalah suatu kecenderungan seseorang untuk memiliki ketahanan, energi positif, dan antusiasme untuk menggugah diri dan orang-orang di sekitarnya untuk terus mengembangkan usahanya secara terarah menuju hasil akhir (visi) yang telah ditetapkan.

6. Kreatif inovatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan dan mengembangkan cara atau produk yang berbeda dan memiliki nilai lebih guna meningkatkan keberhasilan usahanya dalam mewujudkan hasil akhir yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, alat ukur ini mengukur semangat dan kemampuan seseorang untuk dapat tetap eksis dalam setiap keadaan, dan mampu merubah segala sesuatu menjadi peluang yang mendatangkan nilai manfaat bagi diri orang tersebut, orang lain, maupun lingkungan secara luas.

Dengan alat ukur yang sudah valid, kemudian dilakukan pengambilan data dengan sampel sebanyak 522 wirausaha skala kecil dan menengah dari berbagai daerah di Indonesia dan hasilnya dikorelasikan dengan demografi wirausaha dan keberhasilan wirausaha. Hasilnya menunjukkan bahwa:

1. Adanya hubungan yang signifikan antara usia dengan motivasi usaha, dengan $r_{(521)} = 0.106$, $p = 0.016$. Artinya bahwa semakin usia wirausaha bertambah, maka semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk memiliki ketahanan, energi positif, dan antusiasme untuk menggugah diri dan orang-orang di sekitarnya untuk terus mengembangkan usahanya secara terarah menuju hasil akhir (visi) yang telah ditetapkan.

2. Adanya hubungan yang signifikan antara periode usaha dengan keberhasilan usaha, dengan $r_{(368)} = 0.146$, $p = 0.005$. Artinya bahwa semakin lama usaha dijalankan oleh wirausaha semakin besar keberhasilan usaha yang diperoleh.

3. Adanya hubungan antara keberhasilan usaha dengan kreatif inovatif, dengan $r_{(521)} = 0.096$, $p = 0.028$.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keberhasilan usaha yang didapatkan, maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk menciptakan dan mengembangkan cara atau produk yang berbeda dan memiliki nilai lebih guna meningkatkan keberhasilan usahanya dalam mewujudkan hasil akhir yang telah ditetapkan.

Dari hasil olah data yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dimensi terpenting untuk berwirausaha adalah visi, motivasi usaha, dan kreatif-inovatif. Untuk

mendapatkan keuntungan yang maksimal, diperlukan visi dan kreatif-inovatif yang tinggi. Sedangkan untuk usaha yang langgeng, diperlukan motivasi usaha yang tinggi.

Konsep Pembinaan Wirausaha

Berdasarkan hasil penelitian Riyanti dan Suwartono (2013), peneliti mengusulkan mengembangkan pola pembinaan wirausaha di Indonesia yang menekankan pada pembinaan mental wirausaha.

Pembinaan dalam menetapkan visi usaha

Wirausaha perlu diajak untuk membuat visi usaha. Wirausaha diajak membayangkan hasil akhir dari usahanya, menetapkan tujuan usahanya secara bertahap, menjelaskan proses yang harus dilakukannya dan cara untuk mewujudkannya. Karena visi ini adalah tujuan yang ingin dicapai dimasa depan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, maka di sini wirausaha diajak bermimpi tentang usahanya dan diajak untuk berfikir bagaimana proses yang harus dilakukan dan bagaimana cara menjalankannya. Dengan adanya gambaran yang jelas tentang apa yang ingin diraihnya di masa depan, maka visi usahanya diharapkan akan lebih mudah terwujud.

Pembinaan dalam motivasi usaha

Perilaku mencapai tujuan itu tidak mudah, demikian halnya wirausaha. Banyak kendala dihadapi dalam mengelola usahanya. Oleh karena itu wirausaha perlu terus dimotivasi. Pelatihan motivasi membantu wirausaha untuk tetap memiliki ketahanan, energi positif, dan antusiasme untuk menggugah diri dan orang-orang di sekitarnya untuk terus mengembangkan usahanya secara terarah menuju hasil akhir (visi) yang telah ditetapkan. Pelatihan motivasi dalam berwirausaha sudah dikembangkan oleh McClelland sejak tahun 1960an. Namun hingga kini, pelatihan motivasi ini masih tetap diperlukan.

Pembinaan perilaku Kreatif

Wirausaha dicirikan sebagai orang yang kreatif, namun demikian, wirausaha tetap perlu diarahkan untuk menerapkan kreativitasnya itu terutama dalam mengelola usaha. Pelatihan perilaku kreatif inovatif adalah pelatihan untuk mengajak wirausaha menciptakan dan mengembangkan cara atau produk yang berbeda dan memiliki nilai lebih guna meningkatkan keberhasilan usahanya dalam mewujudkan hasil akhir yang telah

ditetapkan. Dengan mengikuti pelatihan perilaku kreatif inovatif wirausaha diharapkan terus mencari terobosan dalam menciptakan pembaruan dari usahanya.

Pelatihan tentang disiplin diri

Ada banyak kegagalan dalam menjalankan usaha. Salah satu factor kegagalan tersebut bermuara dari kurangnya sifat disiplin diri. Wirausaha kurang memiliki ketangguhan untuk dengan tekun menjalankan usahanya dari hari ke hari. Hasil wawancara dengan wirausaha menunjukkan banyak wirausaha kurang mampu menjaga disiplin. Contoh paling mudah misalnya dalam hal jam membuka dan menutup usaha. Contoh lainnya adalah kedisiplinan dalam mengatur keuangan usaha, kedisiplinan dalam membayar cicilan ke bank, kedisiplinan dalam menjaga ketersediaan barang. Ketika wirausaha berperilaku tidak ajeg maka pengelolaan usaha menjadi berantakan dan peluang usaha akan diambil oleh wirausaha karena konsumen tidak mau menunggu. Pelatihan disiplin diri diarahkan untuk membentuk suatu kecenderungan seseorang untuk berperilaku rajin, terkendali, dan tertata dalam mengelola usaha guna mewujudkan hasil akhir (visi) yang telah ditetapkan.

Pembinaan dalam kemandirian usaha

Dalam penelitian terhadap 9 sifat wirausaha di beberapa suku di Indonesia (Riyanti, 2009) ditemukan suku tertentu, misalnya suku Jawa, memiliki sifat mandiri yang lebih rendah dari pada suku lainnya, sementara suku Bali memiliki sifat mandiri yang paling tinggi. Kemandirian ini diperlukan oleh wirausaha ketika mereka harus membuat keputusan terkait usahanya. Mengajarkan kemandirian pada wirausaha sebenarnya juga mengajarkan kepercayaan diri dalam menentukan arah usahanya. Sifat kemandirian juga penting dalam mengatasi rasa "sungkan" kepada orang lain dan "ewuh pakewuh" ketika usaha berbeda dari usaha di sekitarnya.

Pelatihan tentang kemandirian dalam menjalankan usaha dimaksudkan untuk membangun kepercayaan dalam diri seorang wirausaha sehingga ia dapat mengambil keputusan yang realistis dan tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam hal pengelolaan usaha, sehingga meskipun ia mengalami kegagalan, ia juga merasa percaya bahwa ia bisa bangkit dari upaya-upaya yang ia lakukan.

Pembinaan dalam melihat peluang usaha

Sukardi (1991) menjelaskan bahwa wirausaha adalah "seseorang yang bersedia mengambil risiko pribadi untuk menemukan peluang usaha, mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri, di mana kelangsungan hidupnya tergantung pada tindakannya sendiri".

Kemampuan melihat peluang ini juga dijelaskan dalam sifat instrumental (Sukardi, 1991). Sifat instrumental yaitu kemampuan untuk memanfaatkan situasi, relasi dan kondisi untuk memajukan usaha. Wirausaha dengan sifat instrumental mampu memanfaatkan momen-momen yang dia temui dalam hidupnya untuk melancarkan usaha. Kemampuan melihat peluang bisa ditingkatkan dengan melakukan eksplorasi ke berbagai tempat baru atau mempelajari hal-hal baru.

Pelatihan tentang kemampuan melihat peluang adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha untuk berinisiatif menemukan potensi usaha, menyesuaikan diri akan perubahan-perubahan yang ada, dan mengelola risiko yang ditemui dalam mewujudkan hasil akhir (visi) yang telah ditetapkan.

Penutup

Menghadapi AFTA 2015 dan arus globalisasi, pemerintah perlu melakukan langkah strategik dalam menyiapkan wirausaha Indonesia agar memiliki keunggulan kompetitif dan siap bersaing. Selama ini orang Indonesia dikenal dengan sejumlah ciri buruk pada masyarakatnya yaitu tidak *achievement oriented* tetapi *status oriented*, berorientasi pada masa lalu, menggantungkan diri pada nasib, konformis dan berorientasi pada atasan, meremehkan mutu, dan suka menerabas, tidak percaya pada diri sendiri, tidak berdisiplin, suka mengabaikan tanggung jawab, munafik, feodal, percaya pada takhayul, berwatak lemah terhadap uang, tidak hemat (boros), kurang ulet, terlalu fleksibel, hidup manja (santai), kurang inovatif, kurang waspada atau gampang merasa aman, suka sok kuasa (haus kekuasaan), mencampuradukan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, sikap hidup miskin dan bersifat seperti pembantu. Pendapat ini bersifat umum dari ciri-ciri buruk yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1993) dan Lubis (dalam Swasono, 1984) dan Swasono (1984).

Pembinaan terhadap 6 sifat unggul wirausaha diharapkan dapat membuahkan revolusi mental wirausaha menjadi wirausaha yang inovatif, mandiri, disiplin, bermotivasi tinggi, memiliki visi dan mampu merebut peluang. Semoga dengan pembinaan yang benar

khususnya terkait dengan mentalitas wirausaha dapat menjadi salah satu cara meningkatkan jumlah wirausaha yang sukses dan memajukan ekonomi Indonesia.

Pembinaan terhadap wirausaha harus bersifat menyeluruh, bukan hanya 6 sifat unggul wirausaha ini saja namun harus dilengkapi dengan pembinaan dalam hal manajemen, produksi, pemasaran dan teknologi. Ini juga mengingat di mana wirausaha secara umum biasanya berpendidikan SLTA ke bawah. Rendahnya tingkat pendidikan ini perlu dibantu dengan pemberian pengetahuan-pengetahuan baru dan keterampilan-keterampilan baru yang berkaitan dengan pengelolaan usaha.

Dengan pembinaan yang dilakukan dari berbagai pihak terkait, semoga dalam menghadapi dunia yang semakin mengglobal, wirausaha Indonesia tetap memiliki akar kuat sebagai bangsa Indonesia, berjiwa nasional, cinta produk dalam negeri dan mengupayakan sebesar-besarnya keberhasilan usaha untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Daftar Acuan

Anonim. (2012). Jumlah Wirausaha RI Naik Jadi 1,56%. Diunduh pada tgl 26 Januari 2015 dari entrepreneur.bisnis.com/read/20120304/88/67018/jumlah-wieausaha-ri-naik-jadi-1-56-percent.

Koentjaraningrat, (1993). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Meng, L.A., & Liang, T.W. (1996).Entrepreneurship skills. Dalam *Entrepreneurs, entrepreneurship and enterprising culture*. Paris: Addison-Wisley.

Natalia, D.A. (2014). *Globalisasi dan AFTA 2015*. Diunduh pada tanggal 19 Desember 2014 dari https:/denichaalvian.wordpress.com/2014/07/26.

Prasajaningsih, U. (2014). *Analisis pengaruh faktor lingkungan terhadap gaya hidup, psychological capital, individual talents dan kesuksesan entrepreneur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Riyanti, B.P.D. (2003). *Kewirausahaan: Dari sudut pandang psikologi kepribadian*. Jakarta: PT. Grasindo.

Riyanti, B.P.D. (2009). *Perbedaan sembilan sifat wirausaha pada beberapa suku di Indonesia*. Laporan Penelitian. LPA Unika Atma Jaya Jakarta.

Riyanti, B.P.D., & Suwartono, C. (2013). *Uji psikometri alat ukur kompetensi soft skill wirausaha*. Laporan Penelitian. Fakultas Psikologi, Unika Atma Jaya, Jakarta.

Riyanti, B.P.D., Cahayani, A., & Sungkowo, B. (2013). *Laporan Penelitian Kompetitif. Faktor-Faktor Penentu keberhasilan Usaha Industri Kreatif di Jakarta*. LPA, Unika Atma Jaya, Jakarta.

Spencer, L., & Spencer, S.M. (1993). *Competence at work models for superior performance*. Canada: John Wiley & Son.

Sukardi, I.S. (1991). *Intervensi terencana faktor-faktor lingkungan terhadap pembentukan sifat-sifat entrepreneur (entrepreneur traits)*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.

Swasono, S.E. (1984). *Peningkatan kewiraswastaan nasional sebagai kunci keberhasilan pembangunan*. Pidato Ilmiah pada Hari Wisuda Akademi Wiraswasta Dewantara Jakarta.

Tedjakusuma, E E. (2014, 25 November). *Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015–2019*. Rakorbangpus. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Zimmerer, T.W., & Scarborough, N.M. (1998). *Essentials of entrepreneurship and small business management* (2nd ed.). New York: Prentice Hall.

32
Mengantisipasi Degradasi Manusia Indonesia: *Quo vadis* Tes Proyeksi?

Sarlito Wirawan Sarwono

Seluruh bagian di dunia sedang menghadapi perubahan. Dari perubahan iklim, teknologi, sosial-politik hingga perubahan budaya. Untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sebagian terjadi dengan sangat cepat, dan seringkali tidak bisa diduga (tidak linear), setiap bangsa, setiap masyarakat dan individu harus bersiap-siap. Maraknya konflik antarkelompok, tawuran, perang regional, aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa, radikalisme agama, penyalahgunaan narkoba, kasus perdangangan manusia, korupsi, perceraian dan penelantaran anak, bunuh diri, kejahatan dengan kekerasan dan sebagainya, yang makin hari makin meningkat di mana-mana, termasuk di Indonesia, sebetulnya merupakan perwujudan dari ketidaksiapan umat manusia menghadapi perubahan. Karena itulah, Presiden Jokowi sejak kampanye pilpres sudah menyerukan Revolusi Mental untuk seluruh bangsa Indonesia. Hanya dengan revolusi Mental yang menyeluruh, bangsa Indonesia akan bisa mengantisipasi kemungkinan makin terpuruknya kualitas manusianya di masa yang akan datang.

Mental merupakan sebuah kontruk psikologi. Maka Revolusi Mental pun merupakan lahan garapan komunitas Psikologi di Indonesia. Salah satu alat psikologi yang selama ini diandalkan (bahkan menjadi andalan utama) oleh psikolog adalah psikotes, atau metode pengukuran mental, termasuk tes proyeksi sebagai salah satu teknik psikodiagnostik untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang dan kemudian memperbaikinya atau membinanya sehingga lebih sehat mental dan lebih siap menghadapi tantangan perubahan di segala sektor. Makalah ini akan berbicara tentang kegunaan tes proyeksi, selama sejarah psikologi di Indonesia, dalam membantu psikolog untuk melaksanakan tugasnya menyiapkan atau mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dan unggul dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dengan perkataan lain, seberapa jauh peran tes proyeksi dalam mendorong Revolusi Mentalnya Jokowi?

Harapan saya adalah makalah ini bisa menjadi otokritik terhadap dunia psikologi di Indonesia, agar ke depan bisa dikembangkan ilmu dan terapan dari psikologi yang lebih bertepat-guna untuk membangun mentalitas bangsa Indonesia.

Sejarah tes proyeksi di Indonesia

Tes Proyeksi masih sangat populer di Indonesia, diajarkan di setiap fakultas psikologi dan digunakan oleh hampir setiap psikolog yang berpraktik, walaupun semua orang tahu bahwa tes itu sudah bocor ke mana-mana. Ada pelatihan-pelatihan psikotes yang mengajarkan caranya mengerjakan psikotes agar mendapat nilai baik, bahkan buku-buku tentang psikotes berikut bocorannya bisa dibeli bebas di toko-toko buku.

Tidak hanya tes proyeksi yang bocor, tetapi juga tes-tes prestasi, termasuk tes IQ. Namun, karena sifatnya yang kuantitatif, tes prestasi (*achievement tests*) lebih mudah untuk dibuat tes paralelnya, dibakukan ulang dengan standar Indonesia atau standar lokal. Bahkan setiap psikolog yang menguasai psikometri dapat membuat sendiri *achievement test* yang dikehendakinya, termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya.

Tidak demikian halnya dengan tes-tes proyeksi, yang biasanya berbentuk tes-tes gambar (subjek disuruh menggambar atau merespons gambar) seperti DAP (*Draw A Person*: Machover, 1949), Baum (pohon: Avé-Lallemant, 1976; Koch, 1952), HTP (*House Tree Person*: John Buck, 1948 dalam Groth-Marnat, 1997; Kline, 1999; Reynolds, 1998), Wartegg (Avé-Lallement, 1994; Crisi, 1998; Frank, 1939; Wartegg, 1936, 1939), Rorschach (Exner, 2002; Wood, 2003), dan TAT (*Thematic Apperception Test:* Murray, 1949). Tes-tes gambar ini sudah diajarkan kepada kami, mahasiswa-mahasiswa psikologi angkatan pertama di Indonesia dan masih diajarkan sampai sekarang kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi S2 Profesi Psikologi. Saya mempelajarinya sebagai mahasiswa psikologi UI angkatan 1961 di tahun 1962, ketika saya duduk di bangku Tingkat II[1].

Setahu saya, ilmu tentang tes proyeksi itu dibawa pulang oleh pemuda-pemuda Indonesia (sebagian tentara) yang dikirim ke Belanda dan Jerman, sesudah pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1949. Waktu itu, pasca-Perang Dunia II, pengaruh Psikoanalisis masih sangat kuat di Eropa. Bahkan sampai sekarang. Maka, saya ingat bahwa saya belajar HTP dari Letkol (TNI) Drs. Santoso, psikolog, yang belajar langsung tes itu di Belanda dan kami mahasiswa ketika itu, menganggap Pak Santoso sebagai dewanya tes HTP. Interpretasinya tentang gambar-gambar tes HTP selalu membuat kami tercengang karena tepat sekali (menurut

pendapat kami ketika itu). Saya belajar Tes Rorschach dari ibu Dra. Masdani dan dewanya tes Wartegg di UI adalah Prof. Dr Fuad Hassan. Bu Masdani dan Pak Fuad tidak belajar sendiri ke Belanda, tetapi sebagai angkatan yang lebih senior dari saya (masih sebagai mahasiswa kedoksteran UI), mereka belajar dari dosen-dosen Belanda yang mengajar di Balai Psikoteksnik FKUI.

Sebagian lain dari para perwira TNI itu langsung ditempatkan di Pusat Psikologi TNI AD di Bandung, dan merekapun langsung mengajar di Fakultas Psikologi Unpad, yang baru didirikan. Drs. Bob Dengah (waktu itu, kalau saya tidak salah berpangkat Mayor TNI AD) mempelajari test Rorschach di Belanda dan Letkol Drs. John Nimpuno mempelajari grafologi (saya dan teman-teman seangkatan saya tidak terlalu menguasai grafologi, karena tidak ada yang mengembangkannya di UI).

Semua tokoh perintis psikologi itu sudah almarhum atau almarhumah. Tetapi ajaran mereka tentang tes proyeksi yang dasarnya adalah teori Psikoanalisis (Frank, 1939; Lilienfield *et al.*, 2000; Machover, 1949; Murstein, 1963) masih digunakan sampai sekarang. Dalam teori Psikoanalisis, baik versi Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung (Eropa) maupun versi H.A. Murray[2] (Amerika), dipercaya bahwa ada alam ketidaksadaran (*unconsciousness*) dalam jiwa manusia yang bisa merupakan sumber gangguan jiwa (Machover, 1949). Melalui tes proyeksi diharapkan subjek bisa memproyeksikan isi alam ketidaksadarannya melalui gambar-gambar yang dibuatnya atau melalui stimulus yang ditunjukkan kepadanya, untuk kemudian dianalisis dan digunakan dalam konseling atau psikoterapi.

Perkembangan test proyeksi di Indonesia

Buat mereka yang berpraktik Psikologi Klinis, tes-tes proyeksi terasa besar manfaatnya. Tes-tes itu bukan hanya dapat membantu untuk menegakkan psikodiagnosis, melainkan bisa digunakan untuk mengembangkan hubungan baik (*rapport)* dengan subjek. Di Amerika Serikat, tes-tes proyeksi sempat populer bersamaan dengan masuknya pengaruh teori Psikoanalisis ke Amerika (Hale, 1971). Di sisi lain, oleh pihak-pihak yang lebih menginginkan tes-tes yang objektif, tes proyeksi dianggap terlalu subjektif, tidak ada standar, sulit untuk diskor atau dikuantitatifkan, karena itu juga sangat sulit diverifikasi validitas dan reliabilitasnya. Artinya, secara psikometrik, tes ini tidak menggambarkan keadaan jiwa subjek yang sesungguhnya dan tidak dapat diandalkan, bahkan ada yang mengatakan bahwa tes proyeksi adalah ilmu semu atau *pseudo science* (Lilienfield *et al*, 2000; Wood, *et al.* 2003; Dufresne, 2003; Webster, 2005).

Sejak itu, dalam kongres-kongres psikologi internasional, yang kebanyakan diadakan atau berorientasi ke APA (Asosiasi Psikologi Amerika), yang hampir setiap tahun saya ikuti, hampir tidak pernah saya temukan sesi tentang tes proyeksi yang dimasukkan ke dalam daftar acara. Hampir semua yang diagendakan berupa hasil riset empirik yang kuantitatif, apakah itu berupa *paper session, symposia,* atau *round table discussion*. Semua makalah yang dipaparkan dan mendapat akreditasi dari APA selalu bersifat kuantitatif, untuk membuktikan sesuatu yang khusus sekali, dengan menggunakan metode statistik yang ketat. Di UI dulu, ada sosok yang merupakan perwujudan tokoh kuantitatif, yaitu Profesor Sudirgo Wibowo (kemudian menjadi Dekan di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), dan Drs. Nurhadi (kemudian pindah ke TNI AL, dan menjadi Kapuspsi TNI AL di Surabaya). Mereka berdua ini bertolak belakang dengan Prof. Dr Fuad Hassan yang sangat tidak pro pada pendekatan kuantitatif. Sebagai pengajar mata kuliah filsafat, Prof Fuad Hassan, menggunakan paradigma phenomenologi dan eksistensialisme dalam menganalisis kasus-kasus psikologi. Karena itu Prof. Fuad Hassan lebih memilih tes-tes proyeksi ketimbang tes-tes prestatif[3].

Sementara itu, fakultas Psikologi UGM di Yogyakarta, yang berasal dari jurusan Psikologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UGM (sebelum pecah menjadi IKIP Yogya dan sekarang menjadi UNY), sejak awal memang kuat di metode statistika. Prof. Drs. Sutrisno Hadi Notowidagdo, MA., adalah salah satu dosen FPsi UGM yang terkenal dengan buku-bukunya tentang Statistika (Hadi, 2000b) dan Metodologi Riset (Hadi, 2000a) untuk Psikologi. Tetapi kemudian melalui pertemuan-pertemuan Konsorsium Psikologi, Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi, Dep. P&K (Pendidikan & Kebudayaan), lambat laun semua fakultas psikologi mengajarkan baik metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Jadi, sebenarnya kedua metode itu sah-sah saja, sepanjang digunakan sesuai dengan tujuannya tes itu dibuat semula, yaitu yang tertulis pada buku-buku *manual* masing-masing.

Masalahnya, kita di Indonesia, menurut pendapat saya, sangat mudah untuk tidak melihat lagi buku-buku acuan atau *manual* masing-masing tes. Dalam bukunya yang berjudul *The tree test,* seorang psikolog Swiss bernama Charles Koch (1952) yang menemukan tes Baum menuliskan bahwa instruksi yang harus diberikan kepada subjek dalam tes itu adalah "Menggambar pohon yang berdaun lebar (*broad leaved tree*)". Dari detail gambar daun, batang, ranting, akar dan bayangan pohon dapat diinterpretasikan kepribadian subjek, karena menurut Koch, pohon adalah perlambang kehidupan dan pohon selalu ada dalam semua mitos di seluruh dunia. Tetapi ketika saya belajar tes Baum di tingkat II Psikologi UI, saya sudah diajari (oleh dosen atau asisten dosen) untuk melarang subjek menggambar beberapa jenis pohon tertentu, seperti kelapa, papaya atau pisang, karena dianggap kurang

daunnya untuk diinterpretasi. Daftar larangan itu makin lama makin bertambah dengan pohon bambu, rumput dan sebagainya, dan saya baru tahu juga bahwa sekarang pohon beringin pun sudah masuk daftar yang dilarang (alasannya karena akarnya tidak tumbuh di tanah, melainkan dari cabang di atas tanah). Padahal dalam buku Koch tidak ada larangan menggambar pohon apa pun sejauh yang digambar itu masih pohon berdaun lebar.

Contoh lain lagi adalah dalam pengambilan tes Rorschach. Seperti kita ketahui, Rorschach sebetulnya tes individual untuk tujuan Psikologi Klinis. Namun begitu, saya dan mahasiswa angkatan saya pada tahun-tahun 1962 atau 1963 disuruh memperagakan plat tes Rorschah kepada beberapa calon mahasiswa untuk tujuan seleksi. Maksudnya mungkin demi efisiensi, tes tidak dilaksanakan secara individual (sehingga semua perilaku subjek dapat diobservasi sampai yang sekecil-kecilnya), melainkan secara masal. Empat-lima orang calon mahasiswa dilayani oleh seorang mahasiswa senior yang menunjukkan plat-plat tes Rorschach (yang sudah dipilih oleh para dosen), dan masing-masing subjek diminta mencontreng pilihan ganda yang sudah disiapkan, sesuai dengan apa yang dilihatnya di plat-plat yang ditunjukkan itu. Dengan metode tes masal dan contreng seperti itu, maka penilaian (scoring) lebih mudah dan cepat dilaksanakan, tetapi tes Rorschach kehilangan makna Psikologi Klinisnya, dan bergeser ke PIO, sebagai alat seleksi. Inilah salah satu kecerobohan dari dunia pengguna tes psikologi di Indonesia, mengorbankan *efficacy* (manfaat) demi efisiensi.

Kecerobohan ini tidak hanya dipraktikkan dengan tes Rorschach, melainkan hampir semua tes proyeksi dibelokkan fungsinya dari tes Psikologi Klinis menjadi tes PIO. Tes Rorschach malah sekarang sudah ditinggalkan orang, karena rumitnya menghitung skornya. Tetapi tes DAP, Baum, HTP dan lain-lain terus digunakan untuk seleksi PIO, termasuk dalam rekrutmen dan seleksi calon-calon anggota Polri/TNI. Namun berbeda dari tes Rorschach yang saya ceriterakan di atas, interpretasi tes-tes gambar sebagai alat seleksi dilakukan oleh psikolog dengan mata telanjang (tanpa formulir isian dan tanpa petunjuk teknis). Akibat subjektifismenya yang sangat tinggi, interpretasi ini akan sangat mudah digelincirkan untuk laku lancung macam nepotisme atau gratifikasi. Psikolog bahkan berani menyerahkan kepada pengetes (*tester*) untuk menentukan lulus/tidaknya calon hanya dengan memandang sepintas gambar-gambar, karena waktu yang sangat terbatas dan jumlah calon yang jauh melebihi jumlah pemeriksa. Apalagi sudah menjadi kebiasaan di lingkungan TNI dan Polri untuk merahasiakan segala-galanya kepada pihak luar. Demikian pula dengan hasil psikotes. Dengan alasan rahasia negara, hasil dan posedur psikotes dibuat tertutup atau bahkan dimanipulasi. Bagaimana bisa dibuahkan personil

tentara atau anggota Polri yang baik dengan cara-cara seperti ini? Hasilnya tentu sangat merugikan institusi maupun personilnya itu sendiri.

Di samping keteledoran dalam menjadikan tes proyeksi sebagai tes seleksi, kesalahan komunitas psikologi Indonesia (bukan oknum) adalah tidak pernah merujuk lagi ke buku-buku acuan (*manual*) yang asli. Di fakultas psikologi UPI YAI saya membimbing calon-calon psikolog peserta Prodi S2 Profesi Psikologi Klinis Dewasa. Seperti mahasiswa profesi psikologi lainnya, mereka menggunakan juga tes proyeksi dan menginterpretasikan hasil tes-tes proyeksi itu satu-persatu sebelum akhirnya disatukan dalam sebuah interpretasi komprehensif sesudah digabungkan dengan hasil wawancara (*autoanamnesis* dan *alloanamnesis*), observasi dan data lainnya. Namun ketika saya cek, misalnya, "Mengapa subjekmu ini kau bilang infantil?", jawabnya "Karena DAP-nya banyak kancingnya". "Dari mana kau tahu bahwa banyak kancing artinya infantil?", saya tanya lagi. "Dari buku primbon", jawabnya. Ternyata "Buku Primbon" itu adalah fotokopian interpretasi kompilasi berbagai macam tes yang dibuat entah oleh siapa, dan sudah generasi ke berapa. Fotokopiannya pun sudah hampir tak terbaca, tetapi mahasiswa-mahasiswa ini masih tetap bisa membacanya (mungkin mereka tidak membacanya melainkan tanya sama seniornya saja). Yang jelas, ketika saya tanya, "Bagaimana kamu bisa pastikan bahwa subjek memang benar infantil? Kalau dia menggambar pastur (pendeta Katolik) berjubah, dengan kancing dari leher sampai ke kaki, apa dia juga infantil?". Maka mahasiswa itu langsung mati gaya!

Tes Proyeksi memang penuh simbol. Gambar kecil atau besar, garis tegas atau terseret-seret, detil atau keseluruhan, gambar manusia, hewan, tumbuhan, ornamen, repetisi, angka, huruf, mata, hidung, tangan, besar-kecil dan lain-lain, itu semua punya makna. Tetapi makna itu bukan untuk kita buat sendiri, melainkan sudah didasarkan atas penelitian para pembuatnya. Karena itu, kita wajib mengacu ke buku acuan (kata mahasiswa: primbon) yang asli. Dengan demikian kita tidak boleh melanggar teori Koch tentang pohon yang menyimbolkan sifat-sifat manusia dalam semua mitos di dunia, dengan menambah atau mengubah sendiri instruksi kita pada subjek untuk jangan menggambar pohon ini atau itu. Kalau tidak setuju pada teori Koch, *ya* bikin riset sendiri, bikin teori sendiri, atau jangan pakai tes proyeksi sama sekali. Di School *of Psychology,* University of Brisbane, Australia[4], misalnya, dan juga diuniversitas-universitas Anglo-Saxon yang lain yang saya tahu, tes-tes proyeksi sudah ditinggalkan orang dan diganti dengan tes-tes inventori, seperti MMPI, EPPS, 16 PF dan lainnya yang dianggap lebih objektif.

Juga jangan dilupakan bahwa simbol-simbol dalam psikoanalisis dasarnya adalah antropologi. Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung, misalnya meneliti berbagai etnik, termasuk beberapa etnik primitif di luar Eropa (Afrika) dan menganalisis berbagai mitos

dan simbol yang hidup dalam budaya mereka untuk dijadikan penyusunan teori-teori mereka (Lachman, 2010; Ellenberger, 1970; Marcuse, 1974)[5]. Sebaliknya, budaya itu selalu lokal, karena itu tidak ada simbol yang berlaku universal. Di negara-negara Islam, Palang Merah Internasional dilambangkan dengan gambar bulan sabit merah, bukan dengan palang berwarna merah. Dalam epos Mahabarata dan Ramayana versi Jawa ada tokoh-tokoh Semar dan Punakawan, yang tidak terdapat dalam versi aslinya dari India. Bentuk wajah Buddha di candi Borobudur bulat seperti rembulan, di Muangthai tirus. Oleh karena itu dalam menginterpretasikan tes-tes proyeksi kita tidak boleh juga menggunakan interpretasi simbol yang ada dalam buku acuan yang asli sebagai patokan tanpa membandingkannya terlebih dahulu dengan simbol-simbol lokal. Di Indonesia yang sangat multidimensi, multikultural, dan multiagama, simbol-simbol bisa berbeda antardaerah. Jadi psikolog yang datang dari Jakarta, harus sangat berhati-hati jika hendak menginterpretasi tes proyeksi subjek yang berasal dari Aceh atau Papua. Untuk itulah setiap psikolog wajib menguasai Psikologi Lintas Budaya, dan Psikologi Ulayat (*Indigenous Psychology*). Saya termasuk orang yang percaya bahwa hanya sebagian hukum atau teori psikologi yang berlaku universal (misalnya, teori-teori persepsi atau teori imbalan dan hukuman (*reward and punishmen theory*), selebihnya bersifat lokal, karena mau tidak mau, perilaku dan cara berpikir setiap orang pasti terkait dengan budayanya. Itulah sebabnya mengapa banyak perbedaan antara muslim di Jawa Tengah (percaya pada mistik), di Sumatera Barat (matrilineal) dan di Malaysia (propoligami). Sebaliknya, adat orang Batak Mandailing yang Muslim, hampir sepenuhnya sama dengan adat orang Batak lainnya yang Kristen.

Sayang sekali, penelitian-penelitian tentang tes proyeksi dalam kaitannya dengan kebudayaan lokal, atau lintas budaya, hampir-hampir tidak ada (atau mungkin tidak ada sama sekali). Seharusnya ketika psikologi sudah berumur 61 tahun di Indonesia dan dipraktikkan secara sangat luas di seluruh Indonesia[6], peran psikologi harus jauh lebih besar dari pada yang sekarang. Penelitian-penelitian psikologi di Indonesia, termasuk penulisan skripsi, tesis dan disertasi, sepanjang saya tahu hanya mengikuti tren Amerika, yaitu kuantitatif, objektif dan universal. Metode yang digunakan terutama statistik dan metoda-metoda kuantitatif lainnya. Kekhasan lokal, apalagi individual diabaikan. Bahkan di Fakultas Psikologi UI, kuliah-kuliah *soft-sciences* seperti filsafat, antropologi dan sosiologi dikurangi sampai tingkat minimalis. Kalau mau belajar ilmu-ilmu itu, ambil saja di FIB atau FISIP. Padahal psikologi lahir dari Filsafat dan bertumbuh kembang bersama antropologi dan sosiologi.

Sampai pada suatu waktu, saya dan Dr. Kristi Purwandari menguji mahasiswa S1 dengan skripsi tentang kasus Psiklologi Klinis, tetapi disampaikan dengan metode

kuantitatif. Kami berdua berpendapat bahwa metode yang digunakan salah, seharusnya digunakan metode kualitatif, tetapi ketika kami tanyakan kepada mahasiswanya, katanya ini adalah peraturan fakultas.

Kembali ke jalan yang benar[7]

Sementara itu, penganut aliran psikoanalisis di Eropa sendiri sebenarnya tidak pernah berhenti mengembangkan teori, penelitian dan praktik yang dikembangkan oleh Freud dan kawan-kawannya. Penelitian demi penelitian dan publikasi-publikasi berjalan terus, walaupun tidak pernah bisa menyaingi gaung penelitian-penelitian dan publikasi-publikasi Amerika Serikat. Salah satu di antaranya adalah Dr. Roseline Davido, seorang psikolog anak yang berpraktik di Paris, Perancis.

Dr. Davido adalah seorang psikoanalis tulen. Saya pertama kali bertemu dengannya pada tahun 2009 pada Kongres ICP (*International Council of Psychologists*) di Mexico City (saya ingat sekali tahun itu, karena bertepatan dengan Pemilu Indonesia tahun 2009 dan saya mencoblos di TPS KBRI Mexico City). Dalam kongres itu, saya mengikuti paparan Dr Roseline Davido yang sangat menarik tentang tes CHaD (*Childhood Hand that Disturbs*) yang dasarnya sangat Psikoanalisis. Tes yang selengkapnya dinamai Davido-ChaD test ini diperkenalkan juga dalam buku ini sebagai test baru. Dalam tes itu Dr. Davido meminta subjeknya (semua umur) untuk membuat tiga buah gambar, yaitu gambar yang paling sering dibuatnya ketika ia masih kanak-kanak (pada anak-anak: ketika umurnya masih lebih muda), gambar tangan (sembarang tangan, sebanyak-banyaknya) dan gambar tangan yang mengganggunya (juga boleh sebanyak-banyaknya). Pada subjek anak-anak masih ada gambar keempat, yaitu gambar yang paling sering dibuatnya di masa sekarang.

Ternyata, menurut Dr. Davido dalam paparan makalahnya, gambar-gambar tangan itu bisa berceritera banyak sekali. Gambar-gambar itu bisa mengungkap trauma-trauma di masa kanak-kanak, termasuk trauma seksual. Bahkan karena salah satu pekerjaannya memang membantu Lembaga Pemasyarakatan di Perancis, Dr. Davido berhasil mengungkap (memancing pengakuan) kasus pembunuhan melalui tes ChaD yang diberikan kepada salah satu tersangka pidana. Semua teknik, pengalaman dan hasil penelitiannya, ditulis oleh Dr. Davido dalam sebuah buku acuan (1994).

Tertarik pada tes proyeksi yang baru saya ketahui itu (walaupun pada tahun 2009 sudah berumur 15 tahun), saya berdiskusi khusus dengan Dr. Davido, dan sebagai tindak lanjutnya, saya undang dia ke Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI[8]. Dia

datang di tahun 2010 (sekaligus dalam perjalanan untuk menghadiri Kongres APsyA (*Asian Psychological Asosiation*) di Darwin), memberi kuliah, pelatihan dan merancang penelitian bersama. Selama tahun 2011, saya mencobakan tes proyeksi ChaD ini kepada 10 orang mantan teroris (sejak 2006 saya meneliti kepribadian dan upaya deradikalisasi teroris di Universitas Indonesia, bersama Nasir Abas, tokoh eks teroris yang sudah berbalik membantu Polri), karena itu saya mempunyai hubungan pribadi dengan subjek-subjek penelitian itu. Percobaan di tahun 2011 saya lakukan bersama sebuah tim peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI, yang diketuai oleh Dra. Rilla Sovitriana, MPsi, psikolog.

Hasil penelitian itu menakjubkan, karena hampir semuanya tepat bisa mengungkap psikodinamika yang mendorong para pelaku terorisme itu untuk berbuat kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma umum yang berlaku. Karenanya hasil penelitian itu, saya paparkan pada Kongres ICP 2011 di Washington, DC, Amerika Serikat dan hasil lengkapnya diterjemahkan oleh Dr. Davido ke dalam bahasa Perancis. Pada tahun 2012 laporan itu diterbitkan dalam sebuah buku berbahasa Perancis (Sarwono, 2012) yang peluncurannya dilaksanakan di sebuah toko buku di Paris dan dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Perancis ketika itu, Rezlan Ishar Jenie[9].

Setelah saya melakukannya sendiri, saya tahu bahwa kesuksesan Dr. Davido dalam mengungkapkan psikodinamika kepribadian melalui tes proyeksinya adalah dalam teknik menggali informasi dari wawancara dan obervasi terhadap subjek. Selama menggambar, psikolog memang tidak boleh bertanya apa pun. Psikolog hanya mengamati secermat-cermatnya kelakuan subjek selama menggambar. Misalnya pinsil warna apa yang dipakai (pinsil/crayon warna disediakan), atau yang mau dipakai tetapi tidak jadi dipakai, atau bagian dari gambar yang dihapus, digambar kembali, tetapi dihapus lagi. Sangat boleh jadi ketika ia mengganti warna atau menghapus gambar, ada sesuatu yang ingin dikemukakan, tetapi dibatalkannya sendiri. Ada suatu hal yang mau dimunculkan dari ketidaksadaran tetapi disembunyikan lagi. Setelah selesai menggambar, hal ini harus ditanyakan kepada subjek: tadi mau menggambar apa sebenarnya, dan mengapa tidak jadi digambar. Jawaban-jawaban yang keluar kemudian diperdalam dengan mengikuti asosiasi bebas (teknik yang dilakukan oleh Freud), sehingga menyentuh inti permasalahan di alam ketidaksadaran.

Menurut Dr. Davido, semua gambar, gerak, mimik, gestur, dan ucapan adalah simbol. Simbol-simbol itu harus diinterpretasikan, tetapi tidak berdasarkan interpretasi yang kita buat sendiri atau kita ambil dari diktat (seperti ketika psikolog Indonesia menginterpretasi test DAP), melainkan berdasarkan interpretasi subjek sendiri. Di sinilah letak pentingnya observasi dan wawancara terhadap subjek yang sedang melakukan tes proyeksi. Jadi tes

proyeksi itu sebetulnya adalah tes individual, bukan tesmassal seperti yang selalu dilakukan di Indonesia, yang kemudian hasil test massal itu dianalisis dengan mengacu ke diktat fotokopian ("primbon"), seperti dokter mencocokkan hasil test laboratorium dengan buku panduan penyakit-penyakit.

Tentu saja mungkin kita akan mendapati perumpamaan atau simbol-simbol yang diilustrasikan oleh Dr. Davido, yang tidak pas, bahkan tidak relevan dengan kehidupan kita di Indonesia, di Timur, atau di negara tropis. Dalam presentasi Dr. Davido pada mahasiswa pascasarjana psikologi UPI YAI yahun 2010, ditemukan bahwa orang Indonesia juga menggunakan kakinya sebagai ekspresi perasaan (menendang dsb), bukan hanya tangannya. Hal ini tidak pernah terpikirkan oleh Dr. Davido sebagai orang Perancis. Selain itu, hampir semua orang Indonesia (termasuk 10 subjek saya yang mantan teroris) ketika disuruh menggambar bebas, mereka menggambar dua gunung, matahari yang bersinar, beberapa ekor burung di udara, awan-awan, sawah, jalan atau sungai yang membelah sawah dan pohon kelapa di kejauhan.

Sangat mungkin tidak banyak makna yang bisa diungkap dari gambar prototipe seperti ini, karena itu hanya gambar hasil didikan paksa selama di sekolah dasar yang dilakukan oleh para guru untuk memasung kreativitas murid[10]. Tetapi boleh jadi juga sawah, gunung dan matahari adalah benda-benda yang penuh makna, karena anak-anak Indonesia paling sering berhadapan dengan benda-benda itu dalam kehidupan sehari-harinya. Beda misalnya dengan salju yang secara eksplisit ditulis oleh Dr. Davido dalam bukunya (1994), sebagai salah satu ekspresi simbolik dari anak-anak di negaranya. Salju tidak bermakna apa-apa untuk orang Indonesia dan tidak ada anak Indonesia yang akan menggambar salju. Demikian juga dengan anjing yang dalam budaya Barat sering dianggap sebagai keluarga sendiri, bukan hanya binatang peliharaan. Orang Barat mungkin mau menggambar anjing, tetapi tidak begitu halnya dengan orang Indonesia. Atau anak Papua tidak akan menggambar kereta api atau kuda, karena benda dan hewan itu tidak eksis di tanah Papua. Menurut Dr. Davido, gambar anak adalah realitas buat si anak sendiri.

Karena gambar adalah realitas buat anak, maka ada hal-hal yang bersifat universal, tetapi tidak bisa diinterpretasikan secara universal. Misalnya tokoh ayah dalam buku Dr. Davido, yang juga mencerminkan budaya Eropa, digambarkan sebagai tokoh sentral dalam perkembangan jiwa anak (dalam hal ini Dr. Davido sangat Freudian), di Indonesia dan di mayoritas budaya Timur yang lain bukanlah tokoh sentral. Di Timur tokoh ibulah yang merupakan pusat acuan perkembangan jiwa anak. Dari mulai pengasuhan anak ketika masih Balita sampai pendidikan anak remaja atau mahasiswa, semuanya urusan

Ibu. Ayah hanya tahu beresnya, bahkan sering ayah tidak mau tahu sama sekali tentang urusan anaknya.

Demikianlah, singkatnya setelah saya bertemu dengan Dr. Davido saya yakin bahwa teori Psikoanalisis dan tes proyeksi masih sangat relevan, terutama untuk digunakan untuk tujuan Psikologi Klinis, sejauh dia mengacu kepada sistem simbol dan budaya lokal. Walaupun begitu perlu saya garis bawahi lagi di sini, bahwa tes proyeksi memang bukan tes untuk seleksi massal dalam bidang PIO (Psikologi Industri dan Organisasi). Dalam pengambilan dan interpretasi tes proyeksi psikolog pun harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Pengalaman dan latihan (jam terbang) serta penguasaan akan pengetahuan kebudayaan, khususnya tentang simbol-simbol lokal akan sangat menentukan dalam melakukan interpretasi tesproyeksi secara akurat.

Penutup

Saya ingin tes CHaD bisa menggantikan tes-tes proyeksi tradisional di Indonesia tetapi dengan prosedur yang lebih ketat dan tidak melenceng dari kitahnya sebagai tes individual, klinis, bukan massal, tidak untuk tujuan seleksi, melainkan untuk tujuan psikodiagnostik, konseling dan psikoterapi.

Untuk itu proses adaptasi tes CHaD berjalan terus sampai saat tulisan ini dibuat. Pada tahun 2013, bersamaan dengan Kongres ICP ke 71 yang diselenggarakan di UPI YAI, Jakarta, Dr. Davido datang lagi ke Jakarta untuk mengikuti Kongres tsb, sambil memimpin lokakarya (*workshop)* tentang CHaD dalam Kongres itu. Bersamaan dengan itu, kami mendirikan Asosasi Davido-CHaD Internasional (*Association Internationale du Davido-CHaD*) yang anggota-anggotanya terdiri dari para psikolog dan sarjana psikologi yang sudah mengikuti pelatihan CHaD. Setiap anggota CHaD internasional diberi nomor anggota, dan dengan nomor anggota ini masing-masing bisa mengakes milis atau laman (*website*) yang disiapkan oleh organisasi untuk saling berkomunikasi antaranggota atau berkonsultasi langsung dengan Dr. Davido. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa setiap anggota harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada organisasi sehingga bisa diketahui ia mempraktikkan CHaD di mana saja, kapan saja dan untuk kasus apa saja. Dengan demikian kalau terjadi malpraktik bisa segera dilacak. Ini adalah mekanisme kontrol yang sangat diperlukan agar CHaD tidak menyimpang lagi dari pakemnya.

Pada tahun 2014, Dr. Davido hadir lagi di Jakarta. Kali ini untuk melatih angkatan pertama psikolog dan sarjana psikologi dari umum (berbagai fakultas dan praktisi psikolog).

Ada sekitar 50 orang yang mengikuti pelatihan di UPI YAI ini. Kemudian masih pada tahun 2014, saya melatih sekitar 30 dosen psikologi Unair di Surabaya. Direncanakan pada tahun 2015, Dr. Davido akan datang di Makassar untuk melatih CHaD dalam rangka Kongres Konsorsium Psikologi di kampus Universitas Negeri Makassar.

Ini semua perlu saya lakukan, karena saya menaruh harapan besar pada tes proyeksi. Keunggulan psikolog dibandingkan dengan profesi lain (misalnya psikiater) adalah dalam tes, tetapi bukan tes prestasi atau *inquiry* yang mudah dilakukan oleh siapa saja sesudah membaca *manual,* melainkan tes proyeksi yang didasarkan pada teori Psikoanalisis yang oleh sebagian orang dianggap penuh misteri, tetapi kalau kita mau mendalaminya, dan serius mempelajarinya, bisa menangkap keadaan jiwa yang paling dalam dari manusia. Sebagai salah satu mantan anak didik Prof. Dr. Fuad Hassan (disertasi saya dipromotori oleh beliau), saya memang sangat percaya pada pendekatan Phenomenologi dan Eksistensualisme. Walaupun sebagai psikolog sosial saya dilatih dan terlatih untuk menggunakan teknik dan metodestatistik untuk menganalisis berbagai gejala, tetapi bagaimanapun juga kita harus kembali kepada psikologi yang pada hakikatnya subjektif dan kualitatif, bukan objektif-kuantitatif. Saya sering mangatakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang ujian S3 di UPI YAI bahwa judul dan abstrak disertasi mereka adalah tentang ilmu statistik, bukan ilmu psikologi.

Dengan psikologi kita menjawab masalah-masalah psikologi, baik pada tataran individual, maupun sosial. Jujur saja, saya merasa bahwa dunia psikologi di Indonesia (sekali lagi: bukan oknum) mudah sekali melenceng dari pakem bahwa psikologi adalah ilmu yang berasal dari ilmu-ilmu sebelumnya, yaitu filsafat, ilmu sosial, ilmu faal, kedokteran, dan matematika, sehingga kita mudah sekali tertarik kepada *pseudo psychnology* seperti ilmu otak tengah atau ilmu *finger printing* yang mengasumsikan psikolog bisa mengetahui dan mengubah kepribadian orang dalam waktu cepat. Ilmu-ilmu seperti ini laku keras di masyarakat dan bisa dijual dengan harga sangat mahal, karena dikemas secara komersil dan para psikolog yang menyandang gelar akademik dan atribut profesi secara resmi (diakui oleh HIMPSI) juga ikut "menjual" barang rongsokan ini. Pantaslah ketika Jokowi mempersiapkan tim untuk merumuskan Revolusi Mental (jelang Pilpres 2014), dia lebih memilih seorang profesor sosiologi (dari UI) untuk mengetuai tim itu, bukan seorang profesor psikologi.

Catatan Akhir

1. Fakultas Psikologi UI adalah fakultas psikologi yang pertama di Indonesia, dimulai sebagai bagian dari Fakultas Kedokteran sejak 1953, tetapi baru resmi sebagai fakultas Psikologi pada tahun 1960.
2. H.A. Murray sebenarnya tidak termasuk dalam kelompok Psikoanalisis, karena dia di AS, bukan di Eropa, tetapi teorinya tentang naluri dan proyeksi sangat mirip dengan Psikoanalisis (Sarwono, 1980).
3. Fuad Hassan, yang menjadi promotor saya ketika saya mengambil gelar doktor Psikologi di UI (1968), kalau saya tidak salah lulusan SGA (Sekolah Guru Atas), bukan SMA dan pemain biola pada Orkes Studio RRI Jakarta.
4. Sejak tahun 2000 ketika saya menjadi Dekan Fakultas Psikologi UI, UI mengadakan kerja sama dengan UQ (University of Queensland) dalam penyelenggaraan *Twinning Program* S1 psikologi, yang masih berlangsung sampai sekarang (2015). Mahasiswa mengambil kuliah di UI dan UQ masing-masing 4 semester dan pada akhirnya mereka mendapat dua gelar sekaligus (*double degree*) yaitu BA(Psy) dari UQ dan SPsi (dari UI).
5. Ketika saya mengunjungi museum Sigmund Freud di London (pernah menjadi rumah Sigmund an Anna Freud di pelarian dari Austria), saya menyaksikan berbagai artifak dan buku-buku mitologi kuno yang dulu digunakan kedua bapak-beranak itu dalam mengembangkan teori mereka tentang alam ketidak sadaran.
6. Prof. Dr. Ray Fowler, President IAAP (International Assosiation of Applied Psychology) dalam *key note speech*-nya pada pembukaan Kongres Asosiasi Psikologi Asia pertama di Bali (2006) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua di dunia, setelah Brazil, yang psikologinya sangat dikenal oleh masyarakat awaam,
7. Bagian berikut ini adalah sebagian dari Kata Pengantar saya (yang sudah saya modifikasi) untuk buku saya tentang penggunaan tes proyeksi CHaD di kalangan mantan teroris (Sarwono, 2012, 2013)
8. Setelah pensiun sebagai PNS, saya bekerja di Universitas Persada Indonesia YAI, sebagai Dekan Fakultas Psikologi, terhitung mulai tahun 2009 sampai sekarang (2015), di samping masih ditugasi untuk menjadi Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian di Program Pascasarjana UI.
9. Buat saya ini suatu peristiwa yang luar biasa, karena saya untuk pertama kali dan sangat mungkin untuk terakhir kalinya memublikasikan buku dalam bahasa Perancis, yang sama sekali tidak saya kuasai, sementara buku dalam bahasa Jawa belum satupun pernah saya tulis.

10. Di jaman SD, dalam pelajaran menggambar, murid yang menggambar pemandangan gunug dan asesorisnya mendapat nilai 8 atau 9. Kalau menggambar yang lain hanya mendapat 6 atau 7. Tentu saja setiap murid akan menggambar gunung yang terbawa sampai dewasa.
11. Test MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), misalnya, di AS adalah tes psikologi yang terakreditasi oleh APA, tetapi di Indonesia dikalim sebagai alat tesnya psikiater.

Daftar Acuan

Avé-Lallemant, U. (1976). *Baum tests*. Olten: Walter Verlag.

Avé-Lallement, U. (1994): *Der Wartegg-Zeichentest in der Lebensberatung* [The Wartegg Drawing test in counselling]. München: Reinhardt.

Crisi, A. (1998). *Manuale del Test di Wartegg* [Test manual of the Wartegg test]. Roma: MaGi.

Davido, R, (1994) *The childhood hand that disturbs: Projective test*. Preager.

Dufresne, Todd. (2003). *Killing Freud: Twentieth-CENTURY CULTURE AND THE DEATH OF PSYCHOANALYSIS*. New York: Continuum.

Ellenberger, Henri. (1970). *The discovery of the unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry*. New York: Basic Books.

Exner, John E. (2002). *The Rorschach: basic foundations and principles of interpretation: Volume 1*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Frank, L.K. (1993/1939): Projective methods. Dalam Thomas Freitas, A. M. L. (Ed.), *Guia de Aplicação e Avaliação do Teste Wartegg.* [Test manual for Wartegg assessment]. São Paulo: Casa do Psicólogo.

Groth-Marnat, Gary. (1997). *Handbook of psychological assessment* (3rd ed.). New York: John Wiley and Sons.

Hadi, Sutrisno. (2000a). *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hadi, Sutrisno. (2000b). *Statistik Jilid I,II,III,* dan *IV*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Hale, Nathan G., Jr. (1971) *Freud and the Americans: The beginnings of psychoanalysis in the United States, 1876–1917*. New York: Oxford University Press.

Kinget, M. (1952): *The Drawing-Completion Test*. New York: Grune & Stratton.

Kline, Paul. (1999). *The handbook of psychological testing.* New York: Routledge.

Koch, C. (1952): *The tree test*. New York: Grune & Stratton.

Lachman, Gary. (2010). *Jung the mystic*. New York: Tarcher/Penguin.

Lilienfeld, S. O., Wood, J. M., & Garb, H. N. (2000). The scientific status of projective techniques. *Psychological Science in the Public Interest, 1*(2), 27-66.

Machover, K. (1949): *Personality projection in the drawings of the human figure*. Springfield: Thomas.

Marcuse, Herbert. (1974). *Eros and civilization: A philosophical inquiry into Freud*. Boston: Beacon Press.

Murray, H. A. (1943). *Thematic Apperception Test manual*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Murstein, B. I. (1963). *Theory and research in projective techniques (Emphasizing the TAT).* New York, NY: John Wiley & Sons.

Reynolds, Cecil R. (1998). *Comprehensive clinical psychology* (Vol. 4). *Assessment.* Amsterdam: Elsevier.

Sarwono, S. W. (1980), *Berkenalan dengan tokoh-tokoh dan aliran-aliran psikologi.,* Jakarta: Bulan Bintang.

Sarwono, S.W. (2012). *Déradicalisation de la personnalité d'ex-terroristes, à l'aide du Davido-ChaD: 10 cas d'ex-terroristes indonésiens*, Paris: Edilivre.

Sarwono, S.W. (2013), *Menakar kepribadian teroris melalui Test Davido CHaD,* Jakarta: Salemba Humanika.

Wartegg, E. (1936). Gefühl und Fantasiebild [Emotion and imagination]. *Industrielle Psychotechnik, 13*(8).

Wartegg, E. (1939). Gestaltung und Charakter [Formation of gestalts and personality]. *Zeitschrift fürAngewandte Psychologie und Charakterkunde, 84,* Beiheft 2.

Webster, Richard. (2005). *Why Freud was wrong: Sin, science and psychoanalysis*. Oxford: The Orwell Press.

Wood, Jim, Nezworski, M., Lilienfeld, T., Scott, O., & Garb, H.N. (2003). *What's wrong with the Rorschach?* San Francisco, CA: Jossey-Bass, John Wiley & Sons.

33
Menuju Undang-Undang Praktik Psikologi: Revolusi Mental Psikolog Praktik

Riza Sarasvita

Pendahuluan

Buku tentang revolusi mental ini rasanya tidak hanya membatasi perbincangan pada apa yang dapat dilakukan komunitas psikologi bagi bangsa –*psychology is about you*, tetapi juga perlu mencakup apa yang dapat dilakukan komunitas psikologi untuk "perbaikan dirinya sendiri" –*psychology is also about ourself.* Hal ini berarti selain sumbang saran terkait keilmuan psikologi terhadap perbaikan karakter bangsa, kita sendiri pun perlu menggunakan ilmu kita guna perbaikan diri kita, komunitas psikologi, khususnya psikolog praktik.

Perbaikan diri seperti apa? Dan mengapa psikolog praktik? Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan ilmu dan praktik psikologi, profesi psikolog di Indonesia saat ini berkiprah dalam berbagai bentuk pekerjaan pada beragam sektor. Mereka yang memberikan jasa dan praktik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya membantu pemecahan masalah psikologis, disebut sebagai psikolog praktik. Ketika kita masuk pada area praktik atau layanan bagi masyarakat, maka perlu ada jaminan akuntabilitas atas kompetensi psikolog praktik tersebut. HIMPSI pada kongres ke 8 di Bandung tahun 2000 telah mengeluarkan Kode Etik Psikolog dan Ilmuwan Psikologi. Kode Etik ini merupakan perangkat nilai-nilai yang harus diikuti oleh psikolog dan ilmuwan psikologi agar kompetensi dan objektivitas mereka dalam menerapkan kemampuan profesionalitasnya dapat terjaga.

Dalam perkembangannya kemudian, penyelenggaraan praktik psikologi tidak selalu menaati Kode Etik yang berlaku. Pelanggaran Kode Etik bisa berupa pemberian diagnosis yang keliru maupun pemberian intervensi yang tidak tepat atau malpraktik. Dampak dari pelanggaran etik pada praktik psikologi memang cenderung tidak kasat mata, tidak mengancam nyawa seseorang secara langsung, namun tetap dapat mengganggu kesejahteraan

seseorang dan dapat bersifat jangka panjang. Oleh karena itu pemberian layanan psikologi di mana pun harus terjamin akuntabilitasnya untuk melindungi keamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kunci untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat penerima jasa praktik psikologi adalah legislasi terkait praktik psikologi. Berbagai profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sudah memiliki undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen, dan yang relatif baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014tentang Keinsinyuran.

Sebagai profesi yang relatif baru di Indonesia dibandingkan profesi-profesi lain yang sudah disebut, komunitas psikolog praktik pada umumnya belum berpikir untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Praktik Psikologi. Mungkin sebagian karena tidak merasakan urgensinya, sebagian bisa jadi merasa yakin bahwa Kode Etik sudah cukup melindungi masyarakat, dan sebagian lainnya lagi mungkin karena sulit bersepakat di bawah pembinaan kementerian atau lembaga mana praktik psikologi harus ditempatkan. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan renungan bagi para psikolog praktik dan pemangku kepentingan terkait, dalam upaya meningkatkan tanggungjawab profesionalitas psikolog praktik kepada masyarakat Indonesia.

Psikolog Praktik dan Negara

Menurut Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSI, 2000), psikolog adalah Sarjana Psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 dengan kurikulum lama, atau dengan sistem kredit semester PTN, atau dengan kurikulum nasional yang meliputi pendidikan program akademik (sarjana psikologi) dan program pendidikan profesi (psikolog), atau dengan kurikulum lama perguruan tinggi swasta yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi, atau mengikuti pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikolog Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti). Hingga tulisan ini dibuat, untuk bidang ilmu psikologi, Ditjen Dikti baru hanya mengesahkan satu profesi, yaitu Psikolog. Berbeda misalnya dengan bidang ilmu kedokteran yang telah memiliki 32 profesi, meliputi 1 profesi Dokter Umum dan 31 profesi Spesialis. Istilah

klinis, pendidikan, perusahaan-industri-dan-organisasi dalam bidang ilmu psikologi hanya merupakan kekhususan, bukan spesialisasi.

Kode Etik Psikologi menyebutkan bahwa untuk melakukan praktik psikologi, maka psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai ketentuan yang berlaku. Tulisan ini secara khusus ditujukan kepada psikolog praktik, karena tidak semua psikolog melakukan praktik psikologi dalam pekerjaannya sehari-hari. Menurut data Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI, 2014), hingga Agustus 2014 telah diterbitkan Surat Sebutan Psikolog (SSP) bagi 6.030 orang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi psikolog, sementara hanya diterbitkan 5.040 Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP). Berarti, ada 990 (profesi) psikolog yang tidak mengurus SIPP karena berbagai alasan. Dari seluruh pemegang SIPP, sekitar 450 orang (8.9%) terdaftar dalam Ikatan Psikolog Klinis (IPK). Sekitar 40% (sekitar 180 orang) Di antara mereka yang terdaftar dalam IPK bekerja di berbagai fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit/Puskesmas) milik Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Ide tulisan ini dikembangkan dari pengamatan terhadap rangkaian situasi yang dihadapi oleh psikolog yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di rumah sakit. Pada tahun 1999 diterbitkan Keputusan Presiden No 89 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional bagi PNS. Profesi psikolog tidak terdapat dalam contoh rumpun jabatan fungsional (jabfung) mana pun dalam dokumen ini. Karena kebanyakan psikolog praktik berkarya pada dunia swasta atau bahkan berwiraswasta, dampak dari Keppres tersebut tidak terlalu dirasakan. Tidak demikian halnya bagi komunitas minoritas psikolog yang bekerja di lingkungan instansi Pemerintah, khususnya di rumah sakit. Sebagai salah satu dari sedikit profesi yang tidak "diakui" sebagai rumpun jabfung kesehatan, saat itu komunitas psikolog di rumah sakit Pemerintah tidak berhak atas tunjangan jabatan dan kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit. Hal ini tentu sangat merugikan komunitas ini, tidak hanya dari segi karir, melainkan juga dari segi pengakuan dan penerimaan oleh komunitas profesi kesehatan pada umumnya.

Melalui serangkaian upaya yang tak kenal lelah dari beberapa psikolog senior rumah sakit dan berkat bantuan teman-teman dari HIMPSI Jaya selama kurun waktu tahun 2000-2006 dan dilanjutkan oleh teman-teman dari HIMPSI Pusat, komunitas yang kemudian secara spesifik menyandang sebutan psikolog klinis ini akhirnya masuk dalam rumpun Jabfung Kesehatan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 011 Tahun 2008. Selanjutnya komunitas psikolog klinis ini juga mendapatkan hak atas tunjangan jabatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Psikolog Klinis. Berdasarkan legislasi ini,

selain memperoleh tunjangan jabatan psikolog klinis di rumah sakit juga dapat mengurus kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit seperti profesi kesehatan lainnya. Ternyata, masalahnya tidak selesai sampai di sini.

Pada tahun 2012 diterbitkan Perpres Nomor 008 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengatur tentang kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Seluruh profesi terkena aturan ini termasuk psikolog agar dapat disusun kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi profesi psikolog. Konsekuensi lain dari KKNI adalah keharusan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi para profesi yang menjalankan praktik sesuai keprofesiannya. STR berbeda dari SIPP. SIPP adalah sertifikat kompetensi seorang psikolog dalam menyelenggarakan layanan psikologis yang diterbitkan oleh organisasi profesi (HIMPSI) sesuai aturan yang berlaku, sementara STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kerja dengan profesi tertentu yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 9 Perpres Nomor 008 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai kewenangannya. Pertanyaannya, apakah KKNI hanya berlaku bagi para psikolog klinis yang menjalankan praktik psikologi di rumah sakit sebagaimana tertera pada Permenpan Nomor 11 Tahun 2008? Pertanyaan ini sangat relevan. Sebagai profesi yang "diakui" sebagai tenaga kesehatan, komunitas psikolog klinis rumah sakit mendapatkan pembinaan dari Kementerian Kesehatan. Lantas, bagaimana dengan para psikolog praktik lainnya? Apakah psikolog praktik non rumah sakit "bebas" dari aturan KKNI? Di bawah pembinaan kementerian atau lembaga manakah para psikolog praktik non rumah sakit harus ditempatkan? Isu-isu ini tidak mudah dijawab mengingat psikolog sebagai suatu profesi memiliki ruang lingkup area pekerjaan yang sangat luas. Bagaimana keadaannya di negara lain?

Pelajaran dari Negara Lain

Mulai tahun 2009 Pemerintah Inggris mengeluarkan *statutory regulation* bagi psikolog yang mengatur bahwa setiap psikolog praktik wajib tercatat dan tunduk pada aturan lembaga Pemerintah terkait, yaitu *Health and Care Professions Council* (HCPC). *Statutory regulation* dibuat untuk melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat

serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya malpraktik. Regulasi ini mengatur tatanan standar praktik dan kompetensi profesi, kewajiban bagi mereka yang kompeten berpraktik untuk mendaftarkan diri (registrasi), serta penggunaan gelar kompetensi bagi masing-masing profesi.

Khusus tentang psikolog, HCPC mengatur dan melindungi (protected) tujuh jenis keahlian atau spesialisasi (bukan kekhususan), meliputi: (1) Psikolog Klinis, (2) Psikolog Kesehatan, (3) Psikolog Konseling, (4) Psikolog Pendidikan, (5) Psikolog Okupasi, (6) Psikolog Olahraga, dan (7) Psikolog Forensik.

Psikolog pada masing-masing kategori di atas bisa memperoleh salah satu atau dua titel tambahan, yaitu Psikolog Praktik dan Psikolog Tercatat. Psikolog yang terbukti tidak cakap menjalankan praktiknya dapat dicoret dari daftar resmi (register) Negara. Nama-nama psikolog praktik yang terdaftar dapat diakses pada laman HCPC dan asosiasi profesi keahliannya. Hal yang sama secara umum juga berlaku di Amerika Serikat dan Australia.

Revolusi Mental Psikolog Praktik

Kehadiran dan peran profesi psikolog dibutuhkan pada berbagai bidang pekerjaan dan kondisidi Indonesia. Sebagai contoh, psikolog menjadi tenaga inti dalam proses seleksi maupun penempatan pegawai, baik pada lingkungan pemerintahan maupun swasta. Psikolog juga menjadi bagian dari tim *psychological first aid* untuk berbagai kondisi bencana, khususnya sejak terjadinya tsunami Aceh pada 2004. Negara secara resmi juga menyebutkan keterlibatan aktif profesi psikolog setara dengan profesi dokter dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jauh sebelum itu, psikolog juga telah memperoleh kedudukan yang bergengsi di lingkungan TNI dan Polri. Penyelenggaraan praktik psikologi di kedua instansi tersebut diatur oleh pejabat eselon 2 (disebut Kepala Dinas atau Kepala Biro), setara dengan Kepala Dinas Kesehatan. Sayangnya, sekalipun urusan psikologi memiliki struktur tersendiri namun psikolog yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik TNI dan Polri seakan "terlepas" dari pembinaan Dinas/Biro Psikologi.

Semua jenis praktik psikologi, apa pun kekhususannya, di mana pun dilakukan, dan ada atau tidak adanya struktur formal yang mewadahi, seharusnya tunduk pada suatu aturan dasar yang baku. Kode Etik Psikologi yang diterbitkan HIMPSI merupakan dasar prinsipal dalam pelaksanaan praktik psikologi. Namun aturan ini idealnya terkait

dengan legislasi formal yang tercantum dalam lembaran negara. Dengan begitu jaminan perlindungan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pengguna aneka praktik itu menjadi lebih kuat, sekaligus melindungi para psikolog dalam menjalankan praktiknya. Legislasi formal juga dapat menjadi pendorong kuat bagi berbagai pemangku kepentingan terkait penyediaan tenaga psikolog di seluruh wilayah di Indonesia. Sampai disini kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan: setujukah kita pada prinsip ini? Sayang, manakala profesi advokat, dokter, guru, dosen, peneliti, perawat, bahkan insinyur sudah terikat dan sekaligus terlindungi oleh undang-undang, ternyata masih banyak Di antara kita para psikolog yang mempertanyakan pentingnya sebuah Undang-Undang Praktik Psikologi.

Sesudah setuju tentang perlunya undang-undang, bahan perenungan berikutnya adalah di mana sebaiknya kita menginduk? Kementerian atau lembaga manakah yang sebaiknya menjadi "pembina" para psikolog praktik? Kita tidak perlu lagi memperdebatkan posisi para psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit. Sebagai salah satu jabfung kesehatan secara otomatis mereka diampu oleh sektor kesehatan. Namun, kemana psikolog klinis yang tidak bekerja di rumah sakit atau di bidang layanan kesehatan lain harus menginduk? Kemana pula para psikolog non-klinis yang memiliki SIPP dan dalam pekerjaannya menerapkan praktik psikologi harus menginduk? Mengapa psikolog praktik non-klinis juga perlu diatur bukan hanya oleh kode etik melainkan juga oleh legislasi formal yang diterbitkan oleh Negara? Marilah kita kembali sejenak pada definisi praktik psikologi.

Pasal 1 huruf d Kode Etik Psikologi menyatakan bahwa Praktik Psikologi adalah kegiatan yang dilakukan oleh psikolog berupa pemberian jasa dan praktik kepada masyarakat dalam pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual maupun kelompok dengan menerapkan prinsip psikodiagnostik. Termasuk dalam pengertian praktik psikologi tersebut adalah terapan prinsip psikologi yang berkaitan dengan melakukan kegiatan DIAGNOSIS, PROGNOSIS, KONSELING, dan PSIKOTERAPI (HIMPSI, 2008). Berarti sebanyak 5030 psikolog yang memiliki SIPP dan menggunakannya dalam dunia kerja "sedikit banyak" menerapkan prinsip psikodiagnostik, kendati bukan psikolog dengan kekhususan klinis. Berarti, 90% psikolog praktik yang menerapkan pendekatan psikodiagnostik baik secara individual maupun kelompok kepada masyarakat, seharusnya juga terikat pada aturan Negara, tanpa terkecuali, sehingga akuntabilitas layanan psikologi yang mereka berikan terjamin di mana pun mereka bekerja.

Kembali pada pertanyaan tentang tempat pengindukan, kemana sebaiknya kita menginduk? Harap disadari, undang-undang selalu bersifat sektoral. Pasal 1tentang ketentuan umum pada setiap undang-undang selalu menyebutkan kementerian/lembaga yang paling bertanggungjawab atas topik yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan.

Beberapa profesi bersifat homogen sehingga mudah menentukan kementerian/lembaga pembinanya, sebagai contoh guru dan dosen diampu oleh kementerian yang mengatur bidang pendidikan, advokat diampu oleh kementerian yang mengatur bidang hukum, dokter diampu oleh kementerian yang mengatur bidang kesehatan, peneliti diampu oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Beberapa profesi lain bersifat heterogen, seperti keinsinyuran yang memiliki cakupan luas mulai dari urusan pertanian, kebumian dan energi, mesin, hingga bangunan. Profesi keinsinyuran diampu oleh kementerian bidang pendidikan. Kementerian Sosial mengampu profesi pekerja sosial dan penyuluh sosial. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengampu profesi instruktur.

Bagaimana dengan psikolog praktik? Apakah profesi kita ini bersifat homogen atau heterogen? Dibandingkan profesi insinyur yang sasaran kerjanya bervariasi mulai dari urusan tumbuhan hingga bangunan, sasaran profesi psikolog hanya satu yaitu perilaku manusia. Ditinjau dari ruang lingkup praktik psikologi, kata kuncinya mengerucut pada penerapan psikodiagnostik. Mempertimbangkan kedua hal ini sejatinya profesi psikolog termasuk profesi yang relatif homogen. Variasinya hanya terletak pada tempat, wadah, dan fokus utama pekerjaan kita. Maka siapakah kementerian/lembaga yang paling tepat melakukan pembinaan penyelenggaraan psikodiagnostik meliputi penerapan diagnosis, prognosis, konseling, dan psikoterapi? Bila kita cukup legawa merenungkan semua ini, rasanya tidak bisa lain bahwa kementerian yang relatif sesuai melakukan pembinaan psikodiagnostik adalah Kementerian Kesehatan. Namun gagasan ini diduga akan menimbulkan perdebatan bahkan penolakan yang cukup kuat dari kalangan psikolog praktik.

Resistensi kebanyakan psikolog praktik di Indonesia untuk berada dalam pembinaan kementerian kesehatan sangatlah tinggi. Isi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sebagian juga dianggap "mendiskriminasi" psikolog, antara lain karena keberadaan pasal yang mengatur penerbitan surat sehat jiwa hanya oleh psikiater. Beberapa alasan lain yang menjadi sumber keengganan para psikolog praktik untuk berada di bawah pembinaan Kemenkes meliputi: (1) keyakinan bahwa "selama tidak bekerja dalam fasilitas kesehatan maka saya tidak berada dalam area isu kesehatan"; (2) kekhawatiran bahwa profesi psikolog akan selamanya berada "di bawah" dan "diatur" oleh dokter; (3) pengalaman perlakuan diskriminatif antara profesi dokter dan psikolog; dan (4) Kementerian Kesehatan tidak sungguh-sungguh memperjuangkan nasib psikolog.

Berbagai alasan keengganan di atas dapat dimengerti, namun disinilah diperlukan perubahan sikap dan mental kita untuk melihat keprofesian kita dalam sudut pandang yang lebih luas. Secara faktual peran psikolog memang dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemerintah. Namun pengaturannya secara legal-formal mutlak dibutuhkan, terlebih

menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai tahun 2015.Tanpa adanya pengaturan secara legal-formal, masuknya profesi psikolog dari berbagai negara lain akan menimbulkan tantangan yang sangat besar bagi kita semua terkait kontrol, standarisasi kompetensi, dan sebagainya. "Perjuangan dan pengorbanan" komunitas psikolog praktikbukan hanya yang bekerja di rumah sakit atau sarana kesehatan lain yang notabene jumlahnya sangat sedikit, melainkan kita semua pemegang izin praktik psikologi untuk mendesak segera terbitnya Undang-Undang Praktik Psikologi, kiranya menjadi sebuah keniscayaan. Harus disadari bahwa penyusunan sebuah undang-undang membutuhkan upaya yang konsisten, waktu yang tidak sebentar, energi yang besar, serta biaya yang tidak sedikit.

Pada akhirnya keputusan akhir terpulang pada diri kita sendiri, termasuk organisasi HIMPSI beserta asosiasi/ikatan minat keilmuan dan/atau praktik spesialisasi psikologi. Apakah kita "legowo" menginduk pada Kemenkes? Adakah kementerian/lembaga lain yang lebih tepat membina seluruh psikolog praktik? Apakah pembinaan psikolog praktik lebih baik terfragmentasi, terpisah-pisah pada berbagai Kementerian/lembaga sesuai tempat/area kerja masing-masing? Perlukah definisi dan ruang lingkup praktik psikologi diubah agar tidak "tersangkut" hanya pada implementasi psikodiagnostik? Atau, apakah memang lebih baik kita berada pada *status quo* yang berlaku kini tanpa rujukan dan keterikatan legislasi dengan negara manapun? Sangat diperlukan revolusi mental untuk menjawab semua pertanyaan tersebut.

Daftar Acuan

HIMPSI. (2000). *Kode etik psikologi Indonesia.*

HIMPSI. (2010). *Anggaran dasar, anggaran rumah tangga.*

http://www.hcpc-uk.org/aboutregistration/professions/index.asp?id=14#profDetails.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 011 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Psikologi Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

BIOGRAFI SINGKAT

Anastasia Satriyo, lahir di Jakarta, 14 September 1990. Menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya pada tahun 2008 dan sedang menempuh pendidikan profesi Psikolog Klinis Anak di Universitas Indonesia (2013-kini). Pada tahun 2010 mendapat penghargaan Mahasiswa Berprestasi UNIKA Atma Jaya, finalis lomba PsychoPaper pada Olimpiade Psikologi yang diselenggarakan HIMPSI Jawa Timur dan Juara III lomba PsyCampaign yang diadakan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Pada tahun 2013 menerbitkan buku *self-published* "Woman: Human, Refleksi Perempuan Setengah Tionghoa". Pernah menjadi asisten dosen, asisten penelitian untuk Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, membantu penelitian tentang anak-anak TK di Jakarta dan menjadi anggota tim inti program pengabdian masyarakat bagi anak-anak dan remaja pra-sejahtera di DKI (kerjasama UNIKA Atma Jaya dan PEMDA DKI Jakarta). Mengikuti program psikoedukasi untuk mengenali diri sendiri, berlandaskan paradigma humanistik-Rogerian dan psikoanalisis *Personalite et Relation Humaine* (PRH) (2006-2013), serta mengikuti kursus ekstensi filsafat di STF Driyarkara dan mengikuti pelatihan intervensi terhadap anak DIRFloortime. Dapat dihubungi melalui email: anastasia.satriyo@gmail.com.

A. Supratiknya, Guru Besar Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Tamat dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (BA, 1977; Drs., 1980) dan dari Department of Psychology, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman (Ph.D., 1992). Pernah mengikuti Fulbright Visiting Scholar Program di Center for Cross-Cultural Psychology, Western Washington University, Bellingham, dan School of Psychology, Florida Institute of Technology, Melbourne, Amerika Serikat (2003-2004). Menjadi anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan American Psychological Association. Menulis dan menerjemahkan sejumlah buku, menulis artikel, dan melakukan penelitian tentang psikologi dan pendidikan, dengan perhatian khusus pada psikologi kritis dan pedagogi kritis. Dapat dihubungi melalui email: aswignyawardaya@yahoo.co.id.

Anisia Kumala, lahir di Batang pada 1 April 1981. Menyelesaikan pendidikan level S1 Jurusan Psikologi di Universitas Al Azhar Kairo pada tahun 2003, pada 2006 menyelesaikan program pendidikan Magister Profesi di Universitas Indonesia, Jakarta dalam bidang Psikologi Klinis. Mulai mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) pada 2006 dengan mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya: Psikologi Kepribadian dan Psikodiagnostika. Selain mengajar juga terlibat aktif dalam organisasi Nasyiatul Aisyiah (NA) dan menjadi Pimpinan dalam organisasi tersebut. Fokus penelitiannya: Psikologi Keluarga dan Religiusitas. Dapat dihubungi di anisia@uhamka.ac.id atau anisiakumala@gmail.com.

Bagus Takwin, lahir di Bandung, 31 Agustus 1970. Menempuh pendidikan S1 dan Psikolog (lulus tahun 1997) di Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok; menempuh pendidikan S2 (lulus tahun 2002) di Jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok; dan menempuh pendidikan S3 (lulus tahun 2008) di Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok. Menjadi Asisten Dosen (1997-2001) dan Dosen Tetap (2001-sekarang) di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok. Menjadi Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat (2008-2011), Ketua Lembaga Penelitian Psikologi (2013-2014), dan Dosen Inti Penelitian (jabatan fungsional di Universitas Indonesia) pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok. Karya tulisnya berupa artikel antara lain: "Ideologi Bahasa dan Psikologi Sosial" (2002, *Jurnal Psikologi Sosial*); "Perempuan dalam Spiritualitas Hindu: Potret Illahi Setengah Hati" (2002, *Jurnal Perempuan*); "The Role of Self-Management in Subjective Well-being in Jakarta's Individuals" (2009, *Journal of Psychological Studies*); serta "The role of social psychology in alleviating poverty and icreasing wellbeing through women empowerment" (2010, Makalah dipresentasikan pada *International Congress of Applied Psychology*, Melbourne, 11-16 Juli). Karya tulisnya berupa buku antara lain, *Soeharto: Ramuan Kecerdasan dan Masa Kecil yang Liat* (2001, bersama Niniek L. Karim dan Hamdi Muluk, Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu); *Akar-akar Ideologi* (2003, Yogyakarta: Jalasutra); *Rhapsodi Ingatan* (2005, Jakarta: Kholibri); *Kembalinya Politik* (2008, bersama tim, Jakarta: Penerbit Marjin Kiri); dan *Pengelolaan dan Pengembangan Diri* (2011, Jakarta: Banana). E-mail: takwin2000@yahoo.com; bagustakwin@yahoo.com

Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, Guru Besar di bidang Psikologi Industri dan Organisasi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Lahir di Gunungkidul 11 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan psikologi program S1 di Fakultas Psikologi UGM (1988), dan program magister (1994) dan program doktor (2002) di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Memiliki pengalaman karir sebagai dosen di

Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1988-1997) dan di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta (1998-sekarang). Di Unika Atma Jaya Jakarta selain mengajar di Program S-1, juga mengajar di Program Magister Psikologi Profesi untuk mata kuliah Kewirausahaan & Kreativitas dan Penyusunan Alat Ukur Psikologi, serta di Program Magister Manajemen untuk mata kuliah Perilaku Organisasi. Pernah menjadi dosen luar biasa di Program Magister Psikologi Universitas Gunadarma untuk mata kuliah Kreativitas di Tempat Kerja, Penyusunan Alat Ukur, dan Statistik Lanjut (1995-2009) serta di Program Doktoral Universitas Gunadarma untuk mata kuliah Statistik Lanjut (2009-2010). Memiliki minat pada isu-isu psikologi industri dan organisasi, kewirausahaan, kreativitas, dan psikometri. Memperoleh pengembangan diri ketika melakukan penelitian untuk program doktornya dengan terjun langsung ke wirausaha di Jakarta dan Jogjakarta. Pengalaman menjadi sekretaris yayasan sebuah LSM di Jakarta dan beberapa program hibah penelitian dari Dikti yang diperolehnya semakin menumbuhkan minatnya dalam mendalami tentang kewirausahaan. Dapat dihubungi melalui email benedictariyanti@yahoo.com.

Clara Moningka, lahir di Jakarta, 8 November 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi (2001) dan S2 Psikologi (2004) di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta. Pernah mengajar di beberapa universitas, saat ini menjadi Ketua Program Studi Psikologi serta Manager *Students Advisory Center* di Universitas Bunda Mulia Jakarta. Membuat beberapa penelitian di bidang sosial dan dipresentasikan dalam *Call for paper* bertaraf nasional dan internasional, dengan tema tentang orientasi akulturasi dan *self compassion* pada budaya Indonesia. Dapat dihubungi melalui email: claramoningka@gmail.com.

Clara R.P. Ajisuksmo, menyelesaikan pendidikan psikolog di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pendidikan Master of Science (MSc.) di bidang Psikologi Pendidikan di State University of New York at Albany (SUNY-Albany), New York, USA., dan pendidikan Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Psikologi Belajar di University of Tilburg, Negeri Belanda. Memiliki perhatian pada aspek metakognisi dan regulasi diri dalam proses belajar-mengajar, pendidikan untuk anak pada komunitas yang kurang beruntung, pendidikan karakter, serta hal-hal terkait pendidikan pencegahan penyebaran HIV dan AIDS dan kekerasan berbasis gender. Saat ini menjadi dosen Program S1 dan Program Magister Profesi Psikologi di Fakultas Psikologi serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Dapat dihubungi melalui clara.as@atmajaya.ac.id

Danny Irawan Yatim, menyelesaikan pendidikan di bidang psikologi di Universitas Gadjah Mada (Drs., 1982) dan Connecticut College (M.A., 1990), serta di bidang pendidikan di Harvard University (Ed.M., 1992). Banyak bekerja di bidang sosial kesehatan dan komunikasi, dengan pengalaman bekerja di hampir seluruh propinsi di Indonesia, maupun dalam beberapa proyek pelatihan di luar negeri. Memiliki minat pada isu remaja, kesehatan, bahasa dan budaya, serta komunikasi. Pernah mengikuti program sertifikasi *marketing for social change* di Georgetown University (1997). Sejak itu banyak terlibat dalam pelatihan yang berkaitan dengan komunikasi dan media terkait dengan pemasaran sosial bidang kesehatan, terutama masalah HIV dan AIDS serta narkoba. Sejak 2001 mulai mengajar sebagai dosen paruh-waktu di Unika Atma Jaya Jakarta untuk mata kuliah Psikologi Remaja, Psikologi Kesehatan, Konseling, Penulisan Ilmiah, dan Psikologi Kerjasama Antar-budaya. Dapat dihubungi melalui dannyyatim@gmail.com.

Friandry Windisany Thoomaszen, lahir di Kupang, 28 Januari 1990. Menempuh pendidikan S1 (lulus 2010) di Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan pendidikan S2 Profesi Psikologi (lulus 2013) di Jurusan Magister Profesi Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menjadi dosen tetap di Jurusan Konseling Pastoral Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang (2014-sekarang), Fasilitator Forum Anak Kota Kupang (2013-sekarang), serta Ketua Divisi Konseling di LSM yang peduli anak jalanan Obor Timor Ministry (2013-sekarang). Menulis: "Manajemen Stres Untuk Menurunkan Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional Pada Murid Sekolah Menengah Pertama" (2014, *Jurnal Psikologi Indonesia Humanitas,* Fakultas Psikologi Ahmad Dahlan); "The Rising of Minority" (2014, esai dilombakan pada International Essay Contest for Young People). E-mail: windisany90@gmail.com atau windisany_90@yahoo.com.

Hamdi Muluk, Profesor Psikologi Sosial dan Politik di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Meraih gelar Master dalam Psikologi Sosial dan Doktor dalam Psikologi Politik di Universitas Indonesia. Menjadi *Executive Committee: Asian Association of Social Psychology* (AASP) (2007-sekarang), anggota *International Society of Political Psychology* (ISPP) (1996-sekarang), anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) (2000-sekarang), Ketua Tim Editor *Jurnal Psikologi Sosial* (2007-sekarang), dan pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Psikologi Sosial HIMPSI (2010-2014). Menerbitkan lima buku dan dua bab buku di dalam C.J. Montiel, & N. M. Noor (Eds.), *Peace psychology in Asia*. New York, NY: Springer. Menulis artikel, antara lain "Jihad as justification: National survey evidence of belief in violent jihad as a mediating factor for sacred violence among Muslims in Indonesia" (Author, 2012) di *Asian Journal of Social Psychology;* "Are costly apologies universally perceived as being sincere? A Test of the Costly Apology-Perceived

Sincerity Relationship in Seven Countries" (Co-author, 2012) di *Journal of Evolutionary Psychology, 10*(4), 187-204.

Hana Panggabean, Guru Besar di bidang Psikologi Industri dan Organisasi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Menyelesaikan pendidikan psikolog pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1994) dan meraih gelar Doktor dari *Institute fuer Psychologie, Universitaet Regensburg*, Jerman (2002) di bidang Psikologi Antar Budaya. Saat ini menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Menjadi anggota Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (2007-2014). Area minat penelitiannya mengarah pada implementasi psikologi lintas budaya, pertemuan budaya, dan (*indigeneous psychology)* dalam konteks organisasi/ kelompok. Menulis buku, artikel dalam buku jurnal nasional dan internasional, antara lain *"Intercultural Sensitivity in Indonesian-German Work Groups"* (2004); "Pemimpin dan Perubahan: Langgam Terobosan Bisnis Profesional Indonesia" (2012, Tjitra, Panggabean, Murniati, Jakarta: Elexmedia Komputindo); "*Profiling intercultural competences of Indonesians in Asian workgroups*" (2013, Panggabean, Murniati, Tjitra, *International Journal of Intercultural Relations, Vol 37 (1)*). Selain itu juga menulis artikel populer, antara lain "Menyiapkan pemimpin global" (2011 dimuat dalam Majalah Sheng Yi, Oktober) dan "Asian Expats in Asia: Neighbours and Strangers". (2011, Tjitra, Panggabean, Zheng, HQ Asia. Vol 1, Singapore: HCLI). Minat ilmiahnya diterapkan dalam penyuluhan, pelatihan, *coaching* dan konseling untuk kepekaan budaya (*cultural awareness)* dan kompetensi antar budaya, untuk kalangan professional maupun organisasi non-profit. Dapat dihubungi melalui: hana. panggabean@atmajaya.ac.id

Helmi Firmansyah, lahir di Sleman 3 Juli 1984. Menempuh pendidikan S1 Psikologi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Sekarang bekerjasama dengan psikolog praktek Azri Augustin S,M.Psi., Psi memberikan pelatihan-pelatihan kepada siswa SMA mengenai minat-bakat. Dapat dihubungi melalui Email: firmansyahelmi@gmail.com

Hoshael Waluyo Erlan, meraih gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan gelar Magister Profesi Psikologi dan Psikolog bidang Klinis Dewasa dari Universitas Indonesia. Memiliki latar belakang dan bidang minat yang beragam. Kajian empiris yang ditekuni antara lain adalah seputar HIV-AIDS dan pengembangan alat ukur psikologis. Mengajar di area statistik, psikometri dan metode penelitian di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, selain menjadi Kepala Bagian Pengukuran Psikologis. Dapat dihubungi melalui hoshael.waluyo@atmajaya.ac.id

Ichlas Nanang Afandi, lahir di Makassar 25 Juli 1981. Menyelesaikan studi S1 Psikologi (2006) di Fakultas Psikologi UMM Malang, Magister Psikologi (2010) di UGM Yogyakarta, dan sedang menempuh Program Doktor Psikologi di UGM Yogyakarta. Sebelum menjadi dosen tetap tahun 2010 di Prodi Psikologi FK-UH Makassar dan mengajar mata kuliah Psikologi Kesehatan dan Psikologi Sosial, sempat mengajar di Jurusan Psikologi FIP Unnes Semarang. Sejak memutuskan melanjutkan studi Doktoral, minatnya lebih mengarah pada kajian Psikologi Sosial, khususnya perilaku yang berhubungan dengan budaya dan perubahan sosial. Dapat dihubungi melalui email ichlasafandi@yahoo.co.id

Ichsan Malik, lahir di Bandung pada 6 September 1957. Pernah kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran namun tidak selesai, lalu meraih gelar S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di IKIP Bandung. Melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan mendapat gelar Doktor Psikologi Perdamaian di fakultas yang sama pada tahun 2012. Saat ini menjabat sebagai Ketua dari Institut Titian Perdamaian di Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Psikologi Sosial seluruh Indonesia dan anggota Tim Kerja Dialog dan Mediasi GPPAC mewakili jaringan Asia Tenggara. Merupakan inisiator dan fasilitator dari Gerakan Perdamaian Maluku 'Baku Bae', sebuah gerakan yang berlangsung sejak April 2000 hingga 2003 untuk membangun perdamaian di Maluku, Indonesia. Pada 2009 melakukan pelatihan tentang *Conflict Early Warning and Early Response* untuk kegiatan Shalom Foundation di Myanmar. Pada 2011 menjadi fasilitator tim Nahdatul Ulama Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Menjadi dosen di Departemen Psikologi Universitas Indonesia dan dosen pengajar mata kuliah Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan Indonesia sejak 2012 hingga sekarang. Bersama dengan GPPAC Asia Tenggara terlibat dalam misi solidaritas ke Thailand Selatan, Kachin, Myanmar, dan Mindanao di tahun 2013-2014. Menerima penghargaan "Sani AhuSiwalima" dari para Pemimpin Adat Maluku di 2011. Dapat dihubungi melalui email: ichsanmalik@gmail.com.

Ifa Hanifah Misbach, lahir di Bandung 29 Juli 1975. Menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi (2000) dan program profesi psikolog (2002) di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Menempuh program master di bidang *Cognition and Learning Technologies-Educational Psychology* di University of Connecticut, Amerika Serikat (2013). Dosen tetap bidang filsafat fenomenologi, klinis dewasa dan psikologi pendidikan di Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (2004-sampai sekarang). Aktif mengembangkan desain pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal melalui permainan tradisional dan cerita moral rakyat. Mempublikasikan penelitian berskala nasional mengenai identifikasi nilai-nilai kearifan lokal dalam 17 permainan tradisional etnis Sunda yang melibatkan kajian

komprehensif dari para pemuka agama (2007). Mengembangkan alat ukur persepsi siswa terhadap karakter moral guru di Indonesia (2013). Sebagai salah satu pendiri "Rumah Indonesia" di Washington DC, mengembangkan program pembentukan karakter moral pada anak-anak Indonesia di Amerika melalui program pengenalan permainan tradisional dan cerita moral rakyat berbasis nilai-nilai kearifan lokal (2013-sampai sekarang). Melalui asosiasi alumni beasiswa *USAid* Amerika-Indonesia (Alpha-I), memegang Divisi Pendidikan yang berfokus pada kurikulum pendidikan maritim untuk jenjang PAUD. Juga mengembangkan desain perubahan perilaku dan karakter, melalui program pendampingan *value allignment* pada komunitas pembelajar kepala sekolah dan guru di beberapa sekolah di kepulauan Saparua, Maluku Tengah (2014-sampai sekarang). Dapat dihubungi melalui email ifahmisbach@gmail.com.

Ike Herdiana, lahir di Bandung, 22 Mei 1975. Menyelesaikan pendidikan sarjana, profesi psikolog, dan magister profesi psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini menjadi staf pengajar di Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya. Selain mengajar, kegiatan profesional lainnya adalah menjadi peneliti, penulis, asesor, konselor, penyuluh, dan berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat lainnya. Memiliki bidang minat penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Dalam dua tahun terakhir mengembangkan payung penelitian tentang *human trafficking* di Jawa Timur. Hasil penelitian-penelitan di bawah payung penelitian tersebut sudah dipresentasikan pada *International Conference ICPHESOS* 2013 di Surabaya dan pada temu ilmiah nasional *Psychofest* Unair Surabaya (2014). Beberapa tulisan dan esai lain dipublikasikan di Jurnal INSAN. Aktif sebagai pengurus Bidang 3 Pengurus Wilayah HIMPSI Jatim dan anggota IPS (Ikatan Psikologi Sosial) Jatim. Memiliki kontribusi dalam penulisan buku *Pengantar Psikologi Sosial* (2013), *Bunga Rampai Psikologi Sosial: Catatan-Catatan dari Lapangan* (2014); dan *Kelas Psikologi untuk Bunda PAUD* (2014). Pernah mengikuti pelatihan Logoterapi, CHAD, CBT dan *Reflections-Dialogues Workshop* di QUT Brisbane Australia. Dapat dihubungi melalui email: ike.herdiana@psikologi.unair.ac.id atau ikeherdiana@yahoo.com

Irwanto, lahir 56 tahun lalu di Purwodadi-Grobogan, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Kolese de Britto di Yogyakarta (1975), diterima menjadi mahasiswa angkatan 1976 di Fakultas Psikologi UGM. Memperoleh beasiswa Fulbright-Hays untuk menempuh pendidikan M.Sc. (1990) dan Ph.D. (1992) dari *Department of Child Development and Family Studies*, Purdue University, USA. Bekerja sebagai peneliti dan dosen di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta (1983-sekarang). Pernah ditugaskan menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Ketua Lembaga Penelitian (1993-

2006) Unika Atma Jaya Jakarta. Atas ijin rektor Unika Atma Jaya sejak 1993 mengajar di FISIP Universitas Indonesia, khususnya di jurusan Kesejahteraan Sosial di semua jenjang, dan memimpin dua unit penelitian yaitu Pusat Kajian Disabililitas dan Pusat Kajian Perlindungan Anak, hingga sekarang. Dikenal sebagai peneliti dan aktivis dalam persoalan HIV/AIDS, Narkotika, hak-hak anak, dan hak-hak orang dengan disabilitas. Juga menjadi *Adjunct Professor* di program *International Disability and Public Policy*, American University, Washington, DC, USA. Dapat dihubungi melalui e-mail: irwanto_i@yahoo.com.

J. Seno Aditya Utama, lulusan S1 dan S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pernah bekerja di Prasetiya Mulya Business School, saat ini merupakan dosen dan Kepala Bagian Psikologi Industri/Organisasi di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Menulis dan meneliti terkait karir, nilai-nilai kerja dan perilaku konsumen. Menjadi anggota Pengurus Pusat HIMPSI (2014-sekarang). Email: seno.aditya@atmajaya.ac.id.

Juliana Murniati, lahir di Pemangkat, Kalimantan Barat, 7 Agustus 1966. Menyelesaikan S-1 pada Program Studi Psikologi Pendidikan-Bimbingan, FKIP, Unika Atma Jaya (1990) dan meraih gelar Doktor dari Friedrich Schiller University, Jena, Jerman dengan disertasi bertemakan Pengembangan Rasa Percaya antara Kelompok Kerja Indonesia dan Kelompok Kerja Jerman. Menjadi dosen di Unika Atma Jaya sejak 1991 sampai sekarang, baik pada prodi S-1 maupun S-2 Psikologi, untuk berbagai matakuliah di area Psikologi Sosial dan Psikologi antar Budaya. Minat penelitian diarahkan pada pengembangan rasa percaya pada berbagai konteks relasi sosial, serta relasi antar kelompok dan problema yang ditimbulkannya. Kajiannya juga mencakup kompetensi yang berhubungan dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda, termasuk pada konteks kepemimpinan global. Hingga saat ini masih aktif menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Dapat dihubungi melalui: juliana.murniati@atmajaya.ac.id; jmurniati@gmail.com.

Juneman Abraham, dosen tetap pada Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara. Alumnus program studi S1 Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI dan program Magister Sains Psikologi Sosial Universitas Indonesia. Memperoleh sertifikasi internasional *Certified Webmaster Professional* (CWP) dari *World Organization of Webmasters* (2001), saat ini merupakan Ketua Kompartemen Keorganisasian dan Keanggotaan, Pengurus Pusat HIMPSI. Aktif terlibat di beragam organisasi serta kegiatan terkait penerbitan dan penulisan buku. Menjadi anggota Sidang Penyunting Jurnal Ilmiah Psikologi PSIKOBUANA Universitas Mercu Buana Jakarta (2008-2011), Jurnal Kesehatan Jiwa Indonesia ATARAXIS (2007), *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*/IJLFS (2008), Jurnal Psikologi Ulayat/*Indonesian Journal of Indigenous Psychology* (2012-2014), dan Ketua Sidang Penyunting Jurnal Ilmiah Psikologi Industri dan Organisasi/

JPIO (sejak 2012). Menulis buku hasil penelitian *Psychology of Fashion* (LKIS, 2010). Menyunting buku *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial/ P3KS Press, Jakarta, ISBN 9786028427708, 2012) serta *Isu Etik Dalam Penelitian di Bidang Kesehatan* (AIFI & Universitas YARSI, ISBN 9786021420805, 2013). Mengikuti pelatihan *Intercultural Rhetoric* (diselenggarakan oleh Psychology Department-UNIKA Atma Jaya Jakarta & Institut fuer Kommunikation and Interkulturelle Kompetenz, Hochschule fuer Technik Rapperswil, Switzerland, 2014) dan *Male Counseling*/Konseling Perubahan Perilaku Untuk Laki-laki (diselenggarakan oleh PULIH Foundation & RutgersWPF, 2014). Dapat dihubungi melalui email juneman@socialpsychologist.org.

Kamsih Astuti, lahir di Bantul 22 April 1970. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 Psikologi (1994) dilanjutkan mengikuti pelatihan psikodiagnostika (1996), dan menyelesaikan pendidikan S3 Psikologi (2010) dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Memiliki pengalaman karir sebagai asisten dosen hingga menjadi dosen penuh di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (1995-kini). Menjadi Wakil Dekan (2010-2012) dan Dekan (sejak 2012) di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Mengajar di Program S-1 dan di Program Magister Sains Psikologi untuk mata kuliah Psikologi Sosial dan Metode Kualitatif. Memiliki minat pada psikologi sosial, psikologi kesehatan serta isu-isu tentang kesejahteraan psikologis. Dapat dihubungi melalui email tutik.umby@gmail.com.

Listyo Yuwanto, lahir di Blitar, 23 Juni 1980. Menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Surabaya (lulus 2003) dan pendidikan Magister Profesi Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (lulus 2007). Menjadi Dosen Tetap di Laboratorium Psikologi Umum Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (2008-sekarang). Menulis artikel ilmiah antara lain: *Psychological Intervention Based on Resilience Model of Mount Merapi Refugees* (2013); *Social Stories Punakawan (clown-puppet) as a Means of Traumatic Healing Intervention for Children After Mount Merapi Disaster* (2013). Menulis buku antara lain: *Social Stories Ala Punakawan: Media Pendidikan Karakter Anak Usia Dini* (2012, bersama tim, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya); *Karya dari Gudang Kosong: Kumpulan Artikel Psikologis Popular (Edisi Pertama)* (2013, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya); *Fungsi Psikologis Make Up* (2013, bersama tim, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya); *Belajar Hidup Harmonis dari Penyandang Disabilitas* (2014, bersama tim, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya); *Karya dari Gudang Kosong: Kumpulan Artikel Psikologis Popular (Edisi Kedua)* (2014, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya); dan *Issue Kontemporer Psikologi Bencana* (2014, bersama tim, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya). Email: yuwanto81@gmail.com.

Livia Iskandar, lahir di Surabaya, 7 Januari 1970. Masuk ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di tahun 1988. Memperoleh gelar Master of Science dalam Psychological Counseling dari City University dengan beasiswa Chevening dari Foreign Commonwealth Office (1996-1997). Menjalani studi S3 di AS dengan gelar Doctor of Public Health (DrPH) dari Universitas Hawaii di Manoa dengan beasiswa penuh dari East West Center. Terpilih sebagai salah satu dari lima perempuan yang dikirim ke tiga negara dalam rangka studi banding Pusat Krisis Terpadu setelah diundang dalam lokakarya pengembangan Pusat Krisis untuk Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan UNFPA. Pernah menjadi Koordinator Divisi Pemulihan di Komnas Perempuan dan salah seorang pendiri PULIH-Pusat Pemulihan Trauma dan Penguatan Psikososial. Dapat dikontak melalui email: livia_iskandar@yahoo.com.

Nani Nurrachman, lahir di Yogyakarta 13 Mei 1950. Menyelesaikan pendidikan psikolog (1980) dan pendidikan doktor (1993) di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Memiliki pengalaman karir sebagai asisten dosen hingga menjadi dosen penuh di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1980-2000), kemudian pindah ke Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya hingga sekarang. Selain mengajar di Program S-1, juga mengajar di Program Magister Psikologi Profesi untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Profesi, serta di Program Magister Sains Psikologi Sosial untuk mata kuliah Pendekatan Teori-teori Kritis dalam Psikologi Sosial, Kearifan Lokal dan Perubahan Sosial Budaya. Pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara untuk mata kuliah Psikologi Sosial (1987-1989) serta di Program KajianWanita, Pasca Sarjana Universitas Indonesia (1990-1992). Memiliki minat pada isu-isu perempuan, psikologi budaya, psikologi sosial serta psikologi analitis, kendati perhatiannya melampaui bidang minatnya tersebut. Pernah menjadi *visiting scholar* di East Asian Institute, School of International Relations, Columbia University, New York (1984-1985) seraya mengikuti Women's Studies Course di New School for Social Research New York, dan mengikuti pelatihan hingga mendapat sertifikat sebagai fasilitator komunikasi lintas budaya yang diselenggarakan oleh Society for International Education, Training and Reserach di Virginia dan Washington, DC (1986). Dapat dihubungi melalui email: nani.nurrachman@atmajaya.ac.id.

Neivy Dewi Diniyar, lahir di Pontianak, 22 November 1985. Menempuh pendidikan S1 (lulus 2010) di Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Program Studi Magister Profesi Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menjadi asisten Psikolog (2010) di Tim *Trauma Healing* Rumah Zakat Indonesia untuk anak-anak korban Gunung Merapi Yogyakarta. Menjadi Konselor di Lembaga Psikologi Detection,

IONs (International Education), Yogyakarta (2013-sekarang), di TK Ar Royan Bantul, Yogyakarta (2013-sekarang), dan di Layanan Konseling Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2014-sekarang). E-mail: diniyar08@gmail.com.

Ngurah Sumitra Jaya Utama, Brigjen TNI, lahir di Denpasar 27 Januari 1959, adalah Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat. Menyelesaikan pendidikan psikolog (Drs., 1987) dan Magister Psikologi (2006, M.Psi.) di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung, serta merupakan lulusan Sekolah Perwira Wajib Militer (Sepawamil) ABRI TA 1983/1984 dan Kursus Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) TA 1998/1999. Sejak lulus dari pendidikan militer pertama, selalu bertugas di Dispsiad, kecuali saat ditugaskan sebagai Kepala Psikologi Akademi Militer (Akmil) di Magelang (1997-1998). Pernah mengikuti penugasan operasi dalam Operasi Seroja di Timor Timur (1995-1996), serta mengikuti penugasan ke luar negeri di Singapura (1991), Belanda (2008), Jerman (2010 dan 2013), Swiss (2010), Malaysia (2012), dan Thailand (2013). Alamat kontak: Dispsiad, Jl. Sangkuriang 17 Bandung 40135. Email: ngurah.sumitra@yahoo.co.id

Pieter George Manoppo, lahir di Ambon, 21 Juni 1956. Menyelesaikan pendidikan filsafat-teologi pada STT GPM Ambon (S0/1981) dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UMIM, S1/1988) Ambon. Meraih Magister Psikologi Sosial dengan fokus Psikososial Resolusi Konflik (2004) dari Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Doktor Manajemen SDM dengan fokus Kebijakan Pelayanan Publik dan Modal Sosial Masyarakat dari Universitas Negeri Jakarta (2012). Berkarir sebagai konsultan psikososial resolusi konflik sosial dan pembangunan perdamaian, serta psikososial konflik SDA serta alih fungsi lahan dan hutan. Sejak tahun 2004 menjadi konsultan, peneliti dan fasilitator pelatihan/pemberdayaan masyarakat melalui lembaga swasta. Pernah menjadi dosen luar biasa di Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2004-2005) dan Pascasarjana Manajemen SDM UTS (2013-2014). Kini mengajar di Pascasarjana Manajemen SDM IBM-ASMI Jakarta. Menaruh minat pada isu-isu gender based violence, HAM, psikologi sosial, psikologi budaya, kebijakan pelayanan publik, modal sosial masyarakat dan pembebasan tanah. Dapat dihubungi melalui email: piety562002@yahoo.com.

Rayini Dahesihsari, menyelesaikan pendidikan psikolognya di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Menyelesaikan pendidikan *master of psychology* di bidang Psikologi Organisasi dari *Curtin University of Technology, Western Australia* dengan beasiswa dari pemerintah Australia melalui program *Australian Development Scholarship*. Melanjutkan studi Ph.D. di bidang yang sama di *the University of Queensland, Australia*. Minatnya di bidang komunikasi, terutama dalam konteks antar kelompok, tumbuh setelah menyelesaikan

tesis doktoralnya tentang komunikasi antar kelompok di perusahaan multinasional. Kajian empiris di bidang tersebut terfasiltasi melalui hibah penelitian kompetitif yang didanai DIKTI dalam skema Hibah Bersaing dan hibah Strategis Nasional. Memperoleh sertifikasi profesional di bidang pengembangan organisasi. Selain melakukan studi dan publikasi di area tersebut, intervensi komunikasi antar kelompok juga dipraktekkan dalam konteks organisasi. Mengajar di Program S1 dan Program Magister Psikologi Profesi, mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masayarakat di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, serta menjadi Ketua Komisi Ilmiah LPPM Unika Atma Jaya. Email: rayini.dahesihsari@atmajaya.ac.id.

Regisda Machdy Fuadhy, lahir di Tangerang, 12 Agustus 1992. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada selama 3,5 tahun dan sempat menjalani program pertukaran pelajar di Högskolan i Borås, Swedia selama enam bulan. Karya-karyanya telah dipresentasikan di konferensi internasional dan juga dipublikasikan: "*Javanesse Adolescents' Self Concept Based on Parents' and Second Parents' Perceptions*" (Makalah dipresentasikan di *The 9th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology,* Kunming, Republik Cina. Juli 2011); "*Conception of Self among Javanese Adolescents in Parental Perception: Indigenous Psychological Analysis*" (Makalah dipresentasikan pada *The 2ndInternational Conference of Indigenous and Cultural Psychology, Bali, Indonesia. Desember 2011*); *"An Indigenous Psychological analysis of Javanese Adolescents' Looking-Glass Self in Parental Context"* (Makalah dipublikasikan pada Proceedings International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology 2012); *"Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini?" Aspirasi Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Perspektif Kepemudaan* (dipublikasikan dalam Jurnal Kepemudaan Youth Studies Centre, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2014). Selain dalam bidang penelitian, juga turut berusaha mengabdikan ilmu psikologi pada aksi nyata dengan mendirikan Youth Empowerment Studio (YES) sebagai wadah komunitas remaja sehat mental (yescpmh.wordpress.com) dan Pijar Psikologi sebagai portal psikoedukasi dan konsultasi online psikologi (pijarpsikologi.org). Dapat dikontak melalui email: regismachdy@yahoo.co.id; regismachdy@gmail.com.

Retno Suhapti, staf pengajar Fakultas Psikologi UGM. Tamat pendidikan Sarjana dari Fakultas Psikologi UGM (1979), pendidikan Magister dalam bidang Psikometri dari Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (1988), dan meraih *Master of Arts* dalam bidang *Social and Applied Studies* dari *University of Bradford, England, United Kingdom* (1994). Memiliki minat berkaitan dengan psikometri, pengembangan tes dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Aktif di lingkungan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

sebagai Ketua Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (1998-2001), Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat HIMPSI (2004-2007), dan Ketua Umum untuk dua periode berturut-turut (2007-2010 dan 2010-2014). Email: rshapti@yahoo.com.

Riza Sarasvita, Ketua Kompartemen Kerjasama Nasional pada Pengurus Pusat HIMPSI periode 2014-2018. Saat ini merupakan Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) di Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya selama 6 tahun menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penanggulangan dan Pencegahan NAPZA, Rokok dan Alkohol, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan RI. Menyelesaikan pendidikan Psikolog dan Magister Sains Psikologi Klinis di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Berminat pada persoalan pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA. Mengikuti *short course* di La Trobe University dan University of Melbourne dan memegang sertifikat *HIV/AIDS Surveillance and Social Research*. Juga menyelesaikan *Master of Health Science* pada *the Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore USA*, setelah sebelumnya meraih *Certificate of Graduate Study in Substance Abuse* dari universitas yang sama. Menyelesaikan pendidikan Doktor di *Department of Clinical Pharmacology, University of Adelaide, South Australia* (2010). Pengalaman risetnya antara lain sebagai *research coordinator* dari *WHO Collaborative Study for Pilot Project of Methadone Treatment* 2003–2005 (didanai oleh WHO), dan saat ini sebagai *behavioral interventionist of HIV treatment as Prevention for Injecting Drug Users –multisite clinical trial* (didanai oleh *National Institute of Health, USA*). Berpraktek sebagai psikolog selama 16 tahun di RSKO. Memiliki kualifikasi sebagai *national master trainer* untuk tema pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA dan Konseling HIV dan sebagai *regional master trainer* pada UNODC dan Colombo Plan untuk asesmen, rencana intervensi, dan konseling adiksi. Email: rizapram@yahoo.com.

Saparinah Sadli, lahir di Tegalsari, Jawa Tengah, 24 Agustus 1927, adalah Guru Besar (emeritus) di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sejak tahun 1980. Menyelesaikan pendidikan psikolog (masuk 1961) dan meraih gelar doktor dalam bidang ilmu psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1976. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam kurun waktu 1976-1981. Menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (1985-1991). Mendirikan Program Studi Kajian Wanita, Pascasarjana, Universitas Indonesia (1990-2000). Menjadi anggota komisioner di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2002). Pada tahun 2004, sahabat-sahabat Saparinah Sadli meluncurkan Anugrah Saparinah Sadli bagi perempuan-perempuan yang berjuang demi kemajuan perempuan lainnya di seluruh Indonesia.

Sarlito Wirawan Sarwono, lahir di Purwokerto, 2 Februari 1944. Lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Edinburgh, Skotlandia dan Universitas Leiden, serta mendapatkan gelar doktornya di UI (1978). Sebagai peneliti, pernah menjadi *fellow* di East West Center di Hawaii, AS. Aktivitasnya dalam bidang Psikologi Internasional, termasuk mendirikan Asosiasi Psikologi Asia, menyebabkannya mendapatkan *award* dari ICP (*International Psychological Council*) dalam kongresnya di San Diego (2007) dan dari Divisi 52 APA (*American Psychological Association*) dalam kongresnya di Honolulu (2013). Bidang kajiannya sangat beragam, mulai dari masalah keluarga berencana, anak jalanan, pemukiman, lalu lintas, sampai yang paling mutakhir (2006-2009) tentang terorisme. Sebagai penulis buku, artikel jurnal, rubrik di media cetak maupun sebagai nara sumber di media TV dan radio. sari UI, mendapat penghargaan sebagai Narasumber teraktif (2014). Sebagai profesor psikologi sejak 1992, pernah menjadi guru besar tamu (*visiting professor)* di *Cornell University* AS (1996), *Nijmegen University*-Belanda (1996), *Victoria University*-Selandia Baru (2007), dan Universiti Malaya-Malaysia (2008). Juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi UI (1997-2004). Selepas menjabat Dekan, diangkat menjadi Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana UI. Sekarang masih mengajar di UI, di samping menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan menjabat dekan di Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia/YAI. Dapat dikontak melalui email: sarlito.sarwono@gmail.com.

Seger Handoyo, lahir di Bojonegoro, 16 Februari 1967, adalah staf pengajar pada Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada Bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Menyelesaikan pendidikan Psikolog pada Universitas Airlangga dan meraih gelar Master dan Doktor dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Minat kajiannya berada di seputar bidang Psikologi Industri dan Organisasi serta Manajemen Pendidikan Tinggi, khususnya pada tema-tema Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Kesehatan Organisasi, Pembelajaran Organisasi dan Pendidikan Tinggi. Saat ini adalah Ketua Umum HIMPSI untuk periode 2014-2018. Selain itu juga pernah dan sedang menduduki sejumlah posisi dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan asosiasi profesi, yaitu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (2007-2010, 2010-2015), Ketua HIMPSI Jawa Timur (2008-2011, 2011-2014), sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Ketua Asosiasi Penyelenggara Pedidikan Tinggi Psikologi Indonesia (2011-2013). E-mail: seger.handoyo@psikologi.unair.ac.id.

Solita Sarwono, lahir di Tegal, 19 Juli 1948. Menyelesaikan pendidikan psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1975), kesehatan masyarakat di School of Public Health California State University at San Jose (1979), sosiologi pembangunan (1989) dan gelar doktor dalam sosiologi medis (1993) di Faculteit der Socialewetenschappen Universiteit Leiden. Mengikuti beberapa pendidikan tanpa gelar, yaitu kesehatan mental masyarakat di New South Wales Institute of Psychiatry di Sydney (1980), pembinaan tim dan resolusi konflik di National Training Laboratory (NTL) di Tampa, Florida (1983) dan spesialisasi gender di Gender and Development Training Center di Haarlem, Negeri Belanda (1998). Karirnya berawal di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai pengajar S1 dan S2 (1976-1987) dengan jabatan terakhir Ketua Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu-ilmu Perilaku. Setelah pindah ke Negeri Belanda (1987) mengajar di Universitas Leiden, Center for Development Sociology (1989-1991). Sejak 1987 bekerja sebagai konsultan internasional untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan minatnya, yaitu pendidikan/pelatihan, dinamika kelompok, gender, kesehatan perempuan dan lansia, di Eropa dan Asia (Albania, Indonesia, Negeri Belanda, Yaman, Maldives, Jepang dan Kambodia). Selain itu pernah menjadi Visiting Professor di Kyoto University, Graduate School for Asian and African Study Areas (ASAFAS) di bulan April-Juli 2006. Sejak 2007 menjadi pengajar tamu dan melakukan *capacity building* di beberapa universitas di Indonesia. Sering mempublikasikan tulisan di media massa Indonesia dan jurnal Indonesia maupun internasional serta di beberapa buku. Dapat dihubungi melalui email: solita.sarwono@gmail.com.

Steven Wijaya, lahir di Jakarta 15 Desember 1991. Menyelesaikan pendidikan psikologi (2014) di Program Studi Psikologi Universitas Bunda Mulia. Memiliki pengalaman karir sebagai Pelatih (Asisten) Supervisor dan pengajar di Bimbingan Belajar Alpha 5 di Jakarta (2010-2012). Bekerja paruh waktu sebagai Recruitment Staff di PT Griya Miesejati (Bakmi GM) (2013-2014). Saat ini bekerja sebagai Recruitment Staff di PT. Ifo Charchom Empowerment, salah satu biro psikologi di Jakarta. Dapat dihubungi melalui email: svenwijaya91@gmail.com.

Subhan El Hafiz, lahir di Jakarta pada 2 Oktober 1978. Menyelesaikan pendidikan sarjana Psikologi pada tahun 2003 di Universitas Diponegoro dan magister Psikologi Sosial pada 2006 di Universitas Indonesia. Sejak 2005 mulai mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) Jakarta. Mata kuliah

yang diampu diantaranya Psikologi Sosial, Psikologi Islami, dan Dinamika Kelompok. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan pernah dipresentasikan dalam beberapa forum Ilmiah nasional dan Internasional, diantaranya Asian Association of Social Psychology, International Congress of Applied Psychology, International Association of Cross-Cultural Psychology, Asosiasi Psikologi Islami, dan Ikatan Psikologi Sosial. Penelitian yang banyak dilakukan umumnya bertema Psikologi Positif dan Religiusitas. Penelitian yang hasilnya ditulis bersama Yulmaida dan Anisia Kumala dan yang disajikan di buku ini dilakukan menggunakan dana hibah Dikti, Kemendikbud melalui lembaga penelitian (Lemlit) UHAMKA. Para penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kelancaran penelitian, antara lain Ilham Mundzir, Fahrul Rozi, dan Yan Ariyani. Dapat dihubungi melalui email: subhan@uhamka.ac.id atau subhanhafiz@gmail.com.

Sukma Rahastri Kanthi, lahir di Kediri 09 Juli 1994. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Memiliki pengalaman kegiatan sebagai asisten penelitian dosen terkait dengan resiliensi warga yang terkena bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo (2013). Pernah melakukan penelitian tentang Gambaran *Subjective Well-being* pada Anak dan Remaja Korban *Human Trafficking* di Surabaya (2014) untuk Program Kreativitas Mahasiswa bidang penelitian (PKM-P) yang diselenggarakan oleh DIKTI. Aktif mengikuti *oral presentation* terkait dengan presentasi hasil penelitian pada Seminar Nasional dan Call for Paper Ketahanan Keluarga sebagai aset bangsa yang diselenggarakan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang (2014) dengan judul Gambaran *Subjective Well-being* pada Anak dan Remaja Korban *Human Trafficking* di Surabaya (Dwika, Setyawan, Pratama, Khairurahman). *Oral Presentation* pada Temu Ilmiah Nasional Psychofest Universitas Airlangga Surabaya dengan judul Persepsi Remaja Tentang *Trafficking* di SMAN 1 Karangbinangun Kabupaten Lamongan (2014). Aktif dalam kegiatan pembinaan anak di Pelayanan Sosial (YanSos) UKMKI UNAIR dan beberapa kegiatan sosial berkaitan dengan penyuluhan dan pendidikan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yang bekerjasama dengan BaPeMas Kota Surabaya. Dapat dihubungi melalui email: rahastrisukma@gmail.com.

Tiwin Herman, menyelesaikan pendidikan psikolog (1984) dan meraih gelar Magister (2001) dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Mengisi kegiatan remajanya dengan menjadi penyiar radio Prambors Rasisonia yang dijalaninya semenjak SMA hingga masa *stagist* di fakultas. Karir dalam organisasi dirintis dari bidang Marketing, yaitu sebagai Reseacher untuk Research Bureau Indonesia dan Lintas sampai masa kelulusan kuliah. Pernah menjadi Personnel & General Affair Officer untuk perusahaan kontruksi, kemudian menjadi Promotion Manager hingga Customer Service Manager untuk

perusahaan kosmetik. Pada tahun 1989 mendirikan Psiko Utama Konsultan di Medan yang pada masanya dikembangkan pula Psiko Utama di Jakarta. Kembali ke Jakarta tahun 1996 kemudian bekerja sebagai HRD Manager untuk PSP Grup. Minat utamanya adalah pada Psikologi Organisasi meski dalam prakteknya juga memberi perhatian pada bidang-bidang psikologi lainnya. Untuk kegiatan sosial lebih banyak aktif pada kegiatan pengembangan remaja di mana bersama PKBI mendirikan Youth Center di Sumatra Utara dan memberi penyuluhan mengenai reproduksi sehat hampir di seluruh wilayah Sumatra Utara selama kurun waktu 5 tahun. Pernah aktif membantu mengembangkan Yayasan Jati Diri Bangsa di Jakarta dan terakhir mendirikan Jangan Bunuh Diri, kegiatan sosial yang bertujuan mencegah mereka yang ingin bunuh diri serta memberi advokasi kepada masyarakat mengenai masalah bunuh diri. Saat ini berperan sebagai Senior Partner di Global Leadership Indonesia. Dapat dihubungi melalui email: tiwinherman@gmail.co atau tiwin@gliconsultant.com.

Tri Dayakisni, lahir di Jogjakarta pada 7 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan Psikolog (1987) dan Magister Sains (1996) di Universitas Gadjah Mada. Memulai karir sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1988 hingga sekarang dengan berbagai jabatan struktural, mulai dari Ketua Bidang Psikologi Sosial hingga Ketua Jurusan, dan pada saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi (2013 – 2017), juga aktif di berbagai lembaga yang ada di tingkat universitas. Minatnya yang besar pada psikologi sosial dan kepribadian membuatnya banyak melakukan penelitian dan dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah serta media masa, juga dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. Buku-buku yang sudah ditulisnya antara lain *Psikologi Sosial* (2001, 2003), *Psikologi Lintas Budaya* (2004), dan *Proyeksi Kepribadian melalui Tes Grafis* (2012). Dapat dihubungi melalui email: aquarinn@gmail.com.

Wisnubrata Hendrojuwono, lahir di Yogyakarta 15 April 1939. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Padjadjaran (1970) dan Pendidikan Doktor Psikologi (1990) melalui Program *Sandwich* antara Universitas Padjadjaran dan Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederland. Hasil penelitian Program Doktornya disajikan dalam *Conference of International Society for the Study of Behavioral Development* (ISSBD) di Minnesotta (1991). Menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (1970-2004) dan mengajar pula di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (1974-1985). Melakukan studi banding tentang Program *Inservice-Onservice Training* bagi Guru-guru IPA SMA ke Thailand, Kenya, Inggris, Papua Nugini, dan Australia, di samping mengikuti *Educational Evaluation Program* di Monash University, Melbourne (1981 dan 1982). Pernah menjadi pimpinan Lembaga

Psikologi Universitas Padjadjaran (1970-1975), Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan (1979-1985) dan Dekan (1995-1998). Saat ini ia merupakan konsultan dan fasilitator di berbagai Lembaga Pemerintah, BUMN dan Perusahaan Swasta (Nasional dan Asing) di bidang Pengembangan Pribadi, Tim, Kepemimpinan, serta Budaya Organisasi. Minatnya terutama pada Pengembangan Karakter, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi yang dilandasi oleh Nilai-nilai Luhur Lokal. Email: whendrojuwono@gmail.com.

Yulmaida Amir, lahir di Duri pada 18 Juli 1960. Mengambil pendidikan Psikologi di Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan pendidikan Master of Art dalam bidang Sosiologi di Flinders University Australia yang diselesaikan pada 1995. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan jenjang Doktor di Universitas Indonesia dengan disertasi mengenai *religious belief*. Memiliki pengalaman mengajar di Universitas Andalas, Padang, Universitas Indonesia, dan kini menjadi pengajar di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Bidang ilmu yang diampu dalam pengajaran diantaranya Psikologi Sosial, Psikologi Kesehatan, dan Sosiologi. Hasil penelitiannya juga sudah beberapa kali dipublikasikan dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional, diantaranya: Asian Association of Social Psychology, International Congress of Applied Psychology, International Association of Cross-Cultural Psychology, dan Ikatan Psikologi Sosial. Tema kajian yang sekarang banyak digelutinya adalah religiusitas, Psikologi Positif, dan Psikologi Kesehatan. Dapat dihubungi melalui email: yulmaida@uhamka.ac.id atau mai.tentramin@gmail.com.

Zakarija Achmat, lahir di Rembang pada 24 November 1968. Menyelesaikan Sarjana Psikologi di Universitas Gadjah Mada (1995) dan Magister Sains Psikologi di Universitas Indonesia (2008). Minatnya pada bidang psikologi industri dan organisasi membuatnya aktif menjadi asisten di sebuah biro konsultasi psikologi ketika masih kuliah, kemudian bekerja pada bagian pengelolaan sumber daya manusia di beberapa perusahaan setelah lulus sarjana. Memulai karir sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang pada 2000, kemudian dipercaya untuk mengepalai Pusat Layanan Psikologi (2001-2006), menjabat sebagai Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan (2009-2014), dan kembali mengepalai Pusat Layanan Psikologi (2014-sekarang). Juga aktif sebagai anggota tim kerja pada Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang sejak 2010 hingga sekarang. Minat di bidang kepelatihan dan pengembangan diri disalurkan dengan menjadi *trainer freelance* pada berbagai *event*. Karya ilmiahnya dipublikasikan melalui berbagai seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta pada berbagai jurnal, termasuk Jurnal Psikologi Indonesia (2011) yang diterbitkan oleh HIMPSI Pusat. Dapat dihubungi melalui email: zakarija@umm.ac.id

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai organisasi induk bagi mahasiswa, psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia terus berupaya hadir memberikan kontribusi pemikiran serta solusi bagi persoalan bangsa. Kompartemen 4: Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa, adalah salah satu bagian didalamnya yang berperan mengejawantahkan semangat tersebut melalui tulisan-tulisan di media ilmiah (jurnal) dan media populer (buku).

Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa, merupakan terbitan berkala tematik yang berisi tulisan para psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Ditulis dari beragam khazanah pengetahuan dan pengalaman di dunia psikologi yang digelutinya, serta disertai gagasan konkret untuk melaksanakannya. Edisi kali ini mengambil topik Revolusi Mental sebagai sebuah konsep yang bergulir di masyarakat di tahun 2015 ini. Semoga dapat memberikan aspirasi, inspirasi dan solusi untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.

Tim Editor:
Hana Panggabean
A. Supratiknya
J. Seno Aditya Utama